



Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri

Laporan Perekonomian Indonesia **2007**

Laporan Perekonomian Indonesia 2007



Visi

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

Misi

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan”

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan”

“Pencapaian di bidang ekonomi pada tahun 2007
sungguh membesarkan hati karena terwujud di tengah
berbagai cobaan dan gejolak. Tidaklah berlebihan jika
kita mengatakan bahwa dalam perekonomian nasional
sedang tertanam daya tahan yang lebih tangguh...”

(Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, 2007)

Daftar Isi

<p>Bab 1 Tinjauan Umum</p> <p>2</p>	<p>Bab 2 Kondisi Makroekonomi</p> <p>24</p>	<p>Bab 3 Perkembangan Ekonomi Daerah</p> <p>48</p>	<p>Bab 4 Nilai Tukar</p> <p>66</p>
<p>Evaluasi Perekonomian Indonesia Tahun 2007 5</p> <p>Kebijakan Makroekonomi dan Sektoral Tahun 2007 11</p> <p>Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan Tahun 2008 14</p> <p>Arah Kebijakan 18</p> <p>Strategi Komunikasi, Kebijakan Moneter, dan Kredibilitas Bank Sentral 21</p>	<p>Permintaan Agregat 26</p> <p>Penawaran Agregat 32</p> <p>Ketenagakerjaan 36</p> <p>Kesejahteraan 38</p> <p>Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 40</p> <p>Mencari Kebijakan Moneter yang Berpihak pada Si Miskin 43</p>	<p>Perkembangan Perekonomian Wilayah 48</p> <p>Demografi Daerah 58</p> <p>Permasalahan Ekonomi Daerah 59</p> <p>Inflasi Daerah: Permasalahan dan Upaya Pengendalian 61</p> <p>Penurunan Peranan Sektor Pertanian 63</p>	<p>Faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar 67</p> <p>Kebijakan yang Ditempuh 71</p> <p>Dampak Krisis <i>Subprime Mortgage</i> terhadap Pasar Keuangan Indonesia 72</p>
<p>Bab 5 Perkembangan Inflasi</p> <p>76</p>	<p>Bab 6 Perkembangan Moneter</p> <p>88</p>	<p>Bab 7 Neraca Pembayaran Indonesia</p> <p>100</p>	<p>Bab 8 Keuangan Pemerintah</p> <p>114</p>
<p>Perkembangan Inflasi 76</p> <p>Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi 76</p> <p>Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 81</p> <p>Bauran Kebijakan yang Telah Diambil dalam Rangka Pengendalian Inflasi 82</p> <p>Upaya Memahami Perilaku Inflasi di Indonesia: Komponen Permanen Inflasi dan Persistensi Inflasi 83</p> <p>Sasaran Inflasi Tahun 2008-2010 85</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan Moneter 89</p> <p>Respons Pasar Keuangan dan Pelaku Ekonomi terhadap BI Rate 89</p> <p>Perkembangan Likuiditas 95</p>	<p>Transaksi Berjalan 101</p> <p>Transaksi Modal dan Finansial 106</p> <p>Indikator Kerentanan Eksternal 108</p> <p>Perdagangan Intraregional Asia 109</p>	<p>Pendapatan Negara dan Hibah 115</p> <p>Belanja Negara 118</p> <p>Pembiayaan Defisit 121</p> <p>Implikasi terhadap Sektor Riil dan Sektor Moneter 123</p>

Bab 9 Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya		Bab 10 Sistem Pembayaran Nasional		Bab 11 Perekonomian Dunia dan Kerja Sama Internasional		Bab 12 Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan 2008	
126		150		162		180	
Perkembangan Bank Umum	127	Perkembangan Aktivitas Pembayaran	150	Perkembangan Ekonomi Dunia	162	Beberapa Asumsi Dasar	182
Kredit Mikro Kecil Menengah	130	Kebijakan Sistem Pembayaran	158	Perkembangan Pasar Keuangan	167	Prakiraan Permintaan dan Penawaran Agregat	186
Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	131			Perkembangan Pasar Komoditas	170	Prakiraan Neraca Pembayaran Indonesia	189
Kebijakan Perbankan Konvensional	132			Kerja Sama Internasional	172	Prakiraan Nilai Tukar Rupiah	190
Perkembangan Perbankan Syariah	134			Peningkatan Daya Saing Negara-negara di Kawasan	173	Prakiraan Inflasi	191
Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah	138			Upaya Menjaga Stabilitas Keuangan	174	Prakiraan Perbankan	192
Perkembangan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya	139			Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia	177	Prakiraan Sistem Pembayaran	193
Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya	144					Beberapa Faktor Risiko	193
<i>Grand Strategy</i> Pengembangan Perbankan Syariah sebagai Bagian dari Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah	146					Arah Kebijakan	194
Lampiran						Sensitivitas Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2008 terhadap Perubahan Harga dan Produksi Minyak	
209						200	
Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tahun 2007	210	Tabel Statistik	217			Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008	
Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2007	211	Daftar Singkatan	258			201	
						Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan: Peluang dan Tantangan	
						204	
						Penyempurnaan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter	
						207	

Daftar Tabel dan Grafik

Tabel

Tabel 1.1	Beberapa Indikator Makroekonomi	7	Tabel 3.15	Penduduk Bekerja dan Persentase Pengangguran menurut Wilayah	60
Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan	25	Tabel 5.1	Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non-inti	78
Tabel 2.2	Kenaikan Gaji Berdasarkan Tingkat Manajemen	26	Tabel 5.2	Inflasi dan Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas <i>Volatile Food</i>	79
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penjualan Produk Elektronik	27	Tabel 5.3	Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas <i>Administered Prices</i> Tahun 2007	79
Tabel 2.4	Kesenjangan Tabungan - Investasi	31	Tabel 5.4	Perkembangan dan Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas Makanan dalam Inflasi Inti Tahun 2007	79
Tabel 2.5	Peringkat Indonesia - Iklim Melakukan Usaha/ Investasi	31	Tabel 5.5	Perbandingan antara Asumsi dan Realisasi dalam Penetapan Sasaran Inflasi Tahun 2007	81
Tabel 2.6	Peringkat Indonesia – Daya Saing	32	Tabel 6.1	Suku Bunga dan Volatilitas Suku Bunga PUAB O/N Rupiah	90
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran	34	Tabel 6.2	Perkembangan <i>Base Money</i>	95
Tabel 2.8	Luas Areal Panen dan Produksi Padi	36	Tabel 6.3	Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya	97
Tabel 2.9	Pertumbuhan Properti Komersil	38	Tabel 7.1	Neraca Pembayaran Indonesia	101
Tabel 2.10	Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor dan Pertumbuhan Tenaga Kerja	39	Tabel 7.2	Perkembangan Indikator Kerentanan Eksternal	101
Tabel 2.11	Jumlah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39	Tabel 7.3	Transaksi Berjalan	102
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	41	Tabel 7.4	Perkembangan Ekspor	102
Tabel 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan	41	Tabel 7.5	Pangsa Komoditas Ekspor Nonmigas Utama Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2007	103
Tabel 2.14	Indeks Keparahan Kemiskinan	41	Tabel 7.6	<i>Revealed Comparative Advantage</i> (RCA)	104
Tabel 2.15	Pendapatan per Kapita	42	Tabel 7.7	Perkembangan Impor	105
Tabel 2.16	Gini Ratio	42	Tabel 7.8	Pangsa Komoditas Impor Nonmigas Utama Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor	106
Tabel 2.17	Pencapaian Target Inpres No. 6/2007	42	Tabel 7.9	Investasi Langsung (FDI)	107
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	50	Tabel 7.10	Investasi Portofolio Sisi <i>Liabilities</i>	107
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Sisi Permintaan	50	Tabel 7.11	Transaksi Investasi Lainnya	108
Tabel 3.3	Pertumbuhan PDRB Sumatera Sisi Penawaran	52	Tabel 7.12	Posisi Utang Luar Negeri Indonesia	108
Tabel 3.4	Data Perbankan Sumatera	52	Tabel 8.1	Ringkasan Operasi Keuangan Pemerintah	116
Tabel 3.5	Pertumbuhan PDRB Jakarta-Banten Sisi Permintaan	53	Tabel 8.2	Ringkasan Hasil Penerbitan Surat Berharga Negara Sepanjang Tahun 2007	122
Tabel 3.6	Pertumbuhan PDRB Jakarta-Banten Sisi Penawaran	53	Tabel 9.1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank	127
Tabel 3.7	Data Perbankan Jakarta-Banten	53	Tabel 9.2	Indikator Kinerja Bank Umum	128
Tabel 3.8	Perkembangan APBD Jakarta-Banten dan Realisasinya	54	Tabel 9.3	Perkembangan Kredit Perbankan	129
Tabel 3.9	Pertumbuhan PDRB Wilayah Jabalnustra	55	Tabel 9.4	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan	130
Tabel 3.10	Produksi Padi dan Jagung di Jawa dan Luar Jawa	55	Tabel 9.5	Perkembangan Kredit MKM	131
Tabel 3.11	Data Perbankan Wilayah Jabalnustra	56	Tabel 9.6	Indikator Kinerja BPR	132
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/ Kotamadya di Jawa Tengah	56			
Tabel 3.13	Pertumbuhan PDRB Wilayah Kali-Sulampua	58			
Tabel 3.14	Data Perbankan Wilayah Kali-Sulampua	58			

Tabel 9.7	Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah	135
Tabel 9.8	Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah	135
Tabel 9.9	Perkembangan Jenis-jenis Pembiayaan	136
Tabel 9.10	Indikator Kinerja BPRS	137
Tabel 9.11	Perkembangan Pembiayaan BPRS	137
Tabel 9.12	Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan	142
Tabel 10.1	Perkembangan UYD	151
Tabel 10.2	Transaksi BI-RTGS Berdasarkan Jenis Transaksi	155

Tabel 11.1	Indikator Utama Ekonomi Dunia	163
Tabel 11.2	Aliran Modal Internasional	167
Tabel 11.3	Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Dunia	167
Tabel 12.1	Proyeksi Ekonomi Internasional	182
Tabel 12.2	Prakiraan Harga Minyak Berbagai Lembaga	182
Tabel 12.3	Aliran Modal ke <i>Emerging Markets</i>	183
Tabel 12.4	APBN dan RAPBN-P 2008	185
Tabel 12.5	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan	186
Tabel 12.6	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran	189
Tabel 12.7	Proyeksi Neraca Pembayaran	190
Tabel 12.8	Kenaikan Upah Minimum Provinsi	192

Grafik

Grafik 2.1	Pertumbuhan PDB	24
Grafik 2.2	Upah Buruh Informal Perkotaan	26
Grafik 2.3	Upah Buruh Tani	26
Grafik 2.4	Pertumbuhan Konsumsi Swasta dan Komponennya	27
Grafik 2.5	Pertumbuhan Penjualan Mobil dan Motor	27
Grafik 2.6	Pertumbuhan M1 Riil	27
Grafik 2.7	Survei Konsumen	28
Grafik 2.8	Indeks Tendensi Konsumen	28
Grafik 2.9	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Riil	28
Grafik 2.10	Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi Lainnya	29
Grafik 2.11	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	29
Grafik 2.12	Distribusi PMTB terhadap PDB	29
Grafik 2.13	Pertumbuhan Komponen Investasi	29
Grafik 2.14	Pertumbuhan Penjualan Alat Angkut Berat	30
Grafik 2.15	Pertumbuhan Konsumsi Semen	30
Grafik 2.16	Akumulasi Kapital	30
Grafik 2.17	Indeks Tendensi Bisnis	30
Grafik 2.18	Realisasi Investasi (SKDU)	31

Grafik 2.19	Volume Ekspor Nonmigas Berdasarkan Kelompok Barang	32
Grafik 2.20	Volume Ekspor Produk Unggulan Tambang Nonmigas	32
Grafik 2.21	Volume Ekspor Produk Unggulan Pertanian	32
Grafik 2.22	Volume Ekspor Produk Unggulan Manufaktur	33
Grafik 2.23	Pertumbuhan Nilai Impor menurut Kelompok Barang	33
Grafik 2.24	Pertumbuhan Nilai Impor Barang Modal dan Investasi Nonbangunan	33
Grafik 2.25	Utilisasi Kapasitas	33
Grafik 2.26	Indeks Produksi Industri Pengolahan-Survei Produksi	34
Grafik 2.27	Pertumbuhan Indeks Produksi Pengolahan	35
Grafik 2.28	Pertumbuhan Produksi Mobil	35
Grafik 2.29	Pertumbuhan Penjualan Barang Elektronik	35
Grafik 2.30	Indeks Penjualan Eceran - Survei Penjualan Eceran	35
Grafik 2.31	Pertumbuhan Bongkar Barang di 4 Pelabuhan Utama-Domestik	36
Grafik 2.32	Tingkat Hunian Hotel dan Lama Tinggal	36
Grafik 2.33	Kunjungan Wisman melalui 13 Bandara Utama	36
Grafik 2.34	Produksi Karet Kering dan Biji Sawit	37

Grafik 2.35	Pertumbuhan Ekspor Aluminium dan Batu Bara	37
Grafik 2.36	Pelanggan Telepon Seluler	37
Grafik 2.37	Pertumbuhan Penumpang Angkutan KA dan Udara	37
Grafik 2.38	Angkatan Kerja, Bekerja, dan Menganggur	38
Grafik 2.39	Bekerja Formal dan Informal	39
Grafik 2.40	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Grafik 2.41	Produktivitas Tenaga Kerja	40
Grafik 3.1	Pertumbuhan NTP Sumatera	50
Grafik 3.2	Pertumbuhan UMP Riil Sumatera Tahun 2007	50
Grafik 3.3	Komoditas Ekspor Terbesar di Sumatera (SITC)	51
Grafik 3.4	Komoditas Impor Terbesar di Sumatera (SITC)	51
Grafik 3.5	Inflasi Inti dan Non-inti Sumatera Utara	52
Grafik 3.6	Inflasi Inti dan Non-inti Sumatera Bagian Selatan	52
Grafik 3.7	Inflasi Wilayah Jakarta-Banten	54
Grafik 3.8	Inflasi Jakarta-Banten	54
Grafik 3.9	Pertumbuhan UMP Riil Jabalnstra Tahun 2007	55
Grafik 3.10	Pertumbuhan NTP Jabalnstra	55
Grafik 3.11	Inflasi Wilayah Jabalnstra	57
Grafik 3.12	Inflasi Kota di Wilayah Jabalnstra Tahun 2007	57
Grafik 3.13	Pertumbuhan UMP Riil Kali-Sulampua Tahun 2007	58
Grafik 3.14	Pertumbuhan NTP Kali-Sulampua	58
Grafik 3.15	Inflasi Inti dan Non-inti Kalimantan Selatan	59
Grafik 3.16	Inflasi Inti dan Non-inti Sulawesi Utara	59
Grafik 3.17	PDRB per Kapita per Wilayah	60
Grafik 3.18	Tingkat Kemiskinan Penduduk Daerah	60
Grafik 4.1	Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS	67
Grafik 4.2	Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Volatilitasnya	67
Grafik 4.3	Cadangan Devisa, NFA, dan Rupiah	68
Grafik 4.4	<i>Country Risk Index</i> Indonesia	68
Grafik 4.5	<i>Yield Spread Global Bond</i> RI-US T-note	68
Grafik 4.6	Selisih Suku Bunga Domestik dan Luar Negeri Beberapa Negara Kawasan	69
Grafik 4.7	<i>Yield Spread Domestic Bond</i> -US T-note Beberapa Negara Kawasan	69
Grafik 4.8	<i>Risk Appetite</i> (EMBIG <i>Spread</i>) dan Kurs Rupiah	69
Grafik 4.9	Indeks Nilai Tukar Beberapa Mata Uang Global	70

Grafik 4.10	Apresiasi/Depresiasi Beberapa Mata Uang Global Sepanjang Tahun 2007 Dibandingkan dengan Tahun 2006	70
Grafik 4.11	Transaksi Valas- <i>Spot</i>	70
Grafik 4.12	Perbandingan Transaksi <i>Spot</i> , <i>Forward</i> , dan <i>Swap</i>	71
Grafik 4.13	Permintaan dan Pasokan Valas	71
Grafik 4.14	Posisi Kepemilikan Asing pada SUN dan SBI	71
Grafik 5.1	Inflasi IHK Bulanan dan Tahunan	77
Grafik 5.2	Inflasi per Kelompok	77
Grafik 5.3	Disagregasi Inflasi	78
Grafik 5.4	Ekspektasi Consensus Forecast	80
Grafik 5.5	Ekspektasi Inflasi Tahun 2007 (SPP)	80
Grafik 5.6	Ekspektasi Harga Konsumen	80
Grafik 5.7	Nilai Tukar dan Inflasi Mitra Dagang	80
Grafik 5.8	Inflasi IHPB Impor dan Inflasi Barang Impor	81
Grafik 6.1	Volatilitas Harian Suku Bunga PUAB O/N Rupiah dan Deviasi terhadap BI Rate	90
Grafik 6.2	Perkembangan Berbagai Suku Bunga	90
Grafik 6.3	Suku Bunga Deposito per Tenor	90
Grafik 6.4	Suku Bunga Kredit per Jenis	91
Grafik 6.5	Pertumbuhan Dana dan Kredit	91
Grafik 6.6	Pangsa dan Pertumbuhan DPK per Jenis	91
Grafik 6.7	Pangsa Deposito per Tenor	91
Grafik 6.8	Pertumbuhan Kredit per Jenis	92
Grafik 6.9	BI Rate dan IHSG	92
Grafik 6.10	BI Rate dan <i>Yield</i> SUN	92
Grafik 6.11	Rata-rata Aktivitas Perdagangan Harian SUN	93
Grafik 6.12	BI Rate dan NAB Reksadana	93
Grafik 6.13	BI Rate dan Indeks Tendensi Bisnis	94
Grafik 6.14	BI Rate dan Keyakinan Konsumen	94
Grafik 6.15	BI Rate dan Ekspektasi Inflasi Pedagang	94
Grafik 6.16	Proyeksi IHK dan Consensus Forecast	94
Grafik 6.17	Permintaan dan Penawaran Likuiditas Perbankan	95
Grafik 6.18	Perkembangan Stok Ekseks Likuiditas	95
Grafik 6.19	Pertumbuhan M0, M1, dan M2 Nominal	96
Grafik 6.20	Nisbah Likuiditas Perekonomian terhadap PDB (<i>Annualized</i>)	96
Grafik 6.21	Perkembangan M1 dan Inflasi	96

Grafik 6.22	Perkembangan M1 dan M2 Riil	96
Grafik 6.23	Pertumbuhan IHSG dan Giro per Pemilik	98
Grafik 7.1	Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	103
Grafik 7.2	Pangsa Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	103
Grafik 7.3	Perkembangan Harga Minyak	104
Grafik 7.4	Pangsa Impor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	105
Grafik 7.5	Indikator Kerentanan Sektor Eksternal	108
Grafik 8.1	Operasi Keuangan Pemerintah	115
Grafik 8.2	Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB	115
Grafik 8.3	Perkembangan Komponen Pendapatan Negara	117
Grafik 8.4	Komposisi Pendapatan Negara Tahun 2007	117
Grafik 8.5	Perkembangan Komponen Belanja Negara	119
Grafik 8.6	Komposisi Belanja Negara Tahun 2007	119
Grafik 8.7	Disparitas Harga BBM Bersubsidi dan Nonsubsidi Tahun 2007	120
Grafik 8.8	Perkembangan <i>Yield</i> SUN	122
Grafik 8.9	Perkembangan <i>Yield</i> Obligasi Valas	122
Grafik 8.10	Perkembangan Konsumsi Pemerintah	123
Grafik 8.11	Perkembangan Investasi Pemerintah	123
Grafik 8.12	Perkembangan Transfer ke Sektor Riil	124
Grafik 8.13	Indikator <i>Fiscal Impulse</i>	124
Grafik 8.14	Dampak Rupiah Operasi Keuangan Pemerintah	124
Grafik 9.1	Komposisi Aktiva Produktif	127
Grafik 9.2	Perkembangan Kredit, DPK, dan LDR	128
Grafik 9.3	Pertumbuhan Kredit Konsumsi	129
Grafik 9.4	NPL <i>Gross</i> Kredit Konsumsi	130
Grafik 9.5	Pertumbuhan Aset, DPK, PYD, dan FDR Perbankan Syariah	135
Grafik 9.6	NPF Perbankan Syariah	136
Grafik 9.7	Perbandingan NPF per Sektor	136
Grafik 9.8	Perkembangan IHSG dan Net Beli Asing	139
Grafik 9.9	Perkembangan Beberapa Indeks Bursa	139
Grafik 9.10	IPO, <i>Right Issue</i> , dan Akumulasi Penerbitan Saham	140
Grafik 9.11	Volume dan Frekuensi Perdagangan SUN	140
Grafik 9.12	Aktivitas Jual Beli SUN	140
Grafik 9.13	Emisi Obligasi Korporasi	141

Grafik 9.14	Perkembangan NAB Reksadana	141
Grafik 9.15	Perkembangan Industri Asuransi	143
Grafik 9.16	Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi	143
Grafik 9.17	Perkembangan Dana Pensiun	143
Grafik 9.18	Portofolio Investasi Dana Pensiun	143
Grafik 10.1	Perkembangan UYD	151
Grafik 10.2	Pangsa UYD di Perbankan	151
Grafik 10.3	Perkembangan <i>Outflow</i> Nasional	152
Grafik 10.4	Perkembangan <i>Inflow</i> Nasional	152
Grafik 10.5	Perkembangan <i>Outflow</i> dan <i>Inflow</i> Uang Kartal di KP dan KBI	152
Grafik 10.6	Perkembangan <i>Net Flow</i> KP dan KBI	153
Grafik 10.7	Transaksi BI-RTGS Periode 2007	154
Grafik 10.8	Aktivitas Transaksi Berdasarkan Kelompok Bank	154
Grafik 10.9	Perputaran Transaksi Pasar Modal pada Sistem BI-RTGS	155
Grafik 10.10	Aktivitas Transaksi Pemerintah	156
Grafik 10.11	<i>Throughput</i> BI-RTGS	156
Grafik 10.12	Transaksi RTGS Berdasarkan Waktu	156
Grafik 10.13	Perkembangan Aktivitas Perputaran Kliring secara Nasional	157
Grafik 10.14	Nilai Kliring Penyerahan Berdasarkan Wilayah	157
Grafik 10.15	Volume Kliring Penyerahan Berdasarkan Wilayah	157
Grafik 10.16	Jumlah APMK	158
Grafik 10.17	Nilai dan Volume APMK	158
Grafik 10.18	Pertumbuhan NPL Kartu Kredit Nasional	158
Grafik 11.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	163
Grafik 11.2	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia	163
Grafik 11.3	Suku Bunga Kebijakan Negara Maju	164
Grafik 11.4	Suku Bunga Kebijakan Negara Berkembang	164
Grafik 11.5	Indeks Harga Saham di Negara Maju	168
Grafik 11.6	Indeks Harga Saham di Asia	168
Grafik 11.7	<i>Yield</i> Obligasi Pemerintah Negara Berkembang	169
Grafik 11.8	<i>Yield</i> Obligasi Pemerintah Negara Maju	169
Grafik 11.9	Suku Bunga LIBOR 1 Bulan	170
Grafik 11.10	Perkembangan Indeks Harga Komoditas	170
Grafik 11.11	Produksi Minyak OPEC	170
Grafik 11.12	Kontrak Nonkomersial Minyak	171

Grafik 11.13 Pola Harga Minyak WTI	171
Grafik 11.14 Harga Gas Alam Cair (LNG)	171
Grafik 11.15 Harga Komoditas Pertanian	172
Grafik 11.16 Indeks Harga Komoditas Metal	172
Grafik 12.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia	182
Grafik 12.2 Defisit APBN	184
Grafik 12.3 Utang Pemerintah	184

Grafik 12.4 Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi Riil 2008	187
Grafik 12.5 Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi Pemerintah Nominal	187
Grafik 12.6 Persetujuan Investasi Domestik	188
Grafik 12.7 Persetujuan Investasi Luar Negeri	188
Grafik 12.8 Ekspektasi Inflasi Survei Konsumen dan Survei Penjualan Eceran	191

Keterangan Tanda-tanda, Periode Laporan, dan Sumber Data

Angka diperbaiki	r
Angka sementara	*
Angka sangat sementara	**
Angka belum tersedia	...
Angka tidak ada	-
Angka sebelum dan sesudah tanda ini tidak dapat diperbandingkan satu sama lain	x
Nol atau lebih kecil	--
Dolar Amerika Serikat	\$ (dolar)

Periode laporan adalah 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007
Sumber data adalah Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

Dewan Gubernur Bank Indonesia



Atas:

Burhanuddin Abdullah (Gubernur)

Tengah 2 (kiri-kanan):

Miranda S. Goeltom (Deputi Gubernur Senior)

Hartadi A. Sarwono (Deputi Gubernur)

Siti Ch. Fadrijah (Deputi Gubernur)

Tengah 3 (kiri-kanan):

S. Budi Rochadi (Deputi Gubernur)

Muliaman D. Hadad (Deputi Gubernur)

Bawah (kiri-kanan):

Budi Mulya (Deputi Gubernur – sejak 29 November 2007)

Ardhayadi Mitroatmodjo (Deputi Gubernur – sejak 29 November 2007)

Bunbunan E.J. Hutapea (Deputi Gubernur – s.d. 21 November 2007)

Aslim Tadjuddin (Deputi Gubernur – s.d. 21 November 2007)

Kata Pengantar



Burhanuddin Abdullah
Gubernur

Tahun 2007 memiliki arti khusus dalam perjalanan sejarah perekonomian Indonesia. Dalam 1 dasawarsa terakhir perjalanan perekonomian bangsa tersebut, kita mencermati banyak hal yang penting yang dapat diambil sebagai pelajaran dalam menyusun langkah bersama menyongsong masa depan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Khususnya dalam 5 tahun terakhir, kita secara bertahap tapi pasti telah mengalami peralihan dari suatu kondisi perekonomian yang berada dalam cengkeraman krisis multidimensional menuju sebuah konsolidasi pembangunan ekonomi yang ditopang oleh penguatan fondasi-fondasi kunci perekonomian nasional kita. Hasil dari proses konsolidasi tersebut telah mulai tampak sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai pencapaian perekonomian pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 lalu, di sisi pertumbuhan ekonomi, untuk pertama kalinya sejak krisis Asia, pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai di atas 6% per tahun. Pertumbuhan ini dicirikan oleh laju yang semakin berimbang antara permintaan dan penawaran, sebagaimana yang tercermin pada resiliensi pengeluaran konsumsi yang diikuti oleh perkembangan yang cukup menggembirakan pada investasi. Bahkan kita dapat pula mengatakan telah terdapat indikasi awal yang cukup kuat bahwa hambatan-hambatan struktural di sisi mikro ekonomi yang selama ini kita tengarai menjadi penghambat kemajuan sudah mulai tertangani.

Dari sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terus membukukan surplus, melanjutkan kecenderungan yang telah terjadi sejak 3 tahun sebelumnya. Perkembangan positif pada NPI ini ditopang oleh aliran portofolio ke pasar-pasar keuangan, penanaman modal langsung, net ekspor dan net remitansi tenaga kerja migran Indonesia. Ekspor nonmigas yang tetap tinggi

di tengah tekanan ekonomi di negara-negara maju, menunjukkan bahwa negara-negara tujuan ekspor kita mulai terdiversifikasi. Kinerja NPI yang sangat baik selama 4 tahun berturut-turut ini telah memberi ruang bagi kita untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, memperkuat diri melalui penambahan cadangan devisa, dan yang terpenting, melalui sumbangan aliran net remitansi tenaga kerja migran Indonesia, resiliensi permintaan domestik dapat kita pertahankan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berimbang, NPI yang surplus dan posisi cadangan devisa yang cukup baik yang mencapai \$56,9 miliar (setara 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah) pada akhir tahun 2007, telah banyak membantu upaya memelihara stabilitas nilai rupiah, terutama untuk jangka menengah-panjang. Kita mencatat bahwa nilai tukar rupiah kita pada akhir tahun 2007 secara rata-rata berada pada level Rp9140 per dolar AS atau sedikit terapresiasi dibandingkan dengan levelnya pada tahun 2006 yang sebesar Rp9167 per dolar AS. Stabilitas nilai tukar ini telah menopang berbagai upaya untuk mencapai sasaran laju inflasi nasional sepanjang tahun 2007. Pada akhir tahun 2007 lalu, laju inflasi IHK tercatat sebesar 6,59% secara tahunan, relatif sama dengan lajunya tahun 2006 dan berada dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia. Kondisi makroekonomi yang stabil ini memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk kemudian secara bertahap terus menurunkan tingkat suku bunga acuannya, sehingga BI rate pada akhir tahun 2007 tercatat sebesar 8% per tahun atau turun 175 basis poin dari levelnya pada akhir tahun 2006 yang sebesar 9,75% per tahun.

Di sisi perbankan, jika mencermati kemajuannya pada tahun 2007, kita dapat mengatakan bahwa

perkembangan indikator-indikator perbankan cukup mengembirakan, melanjutkan kecenderungan perbaikan yang telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2004. Aspek penting yang patut dicatat adalah bahwa sampai akhir tahun 2007 sistem perbankan kita semakin menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari solusi persoalan perekonomian negeri. Ini adalah fakta yang bertolak belakang dari 5 tahun pertama pascakrisis di mana perbankan kita kala itu masih menjadi bagian dari persoalan. Industri perbankan kita yang semakin sehat dan bermanfaat, ternyata juga telah berkembang semakin kokoh sebagaimana yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menyerap berbagai gejolak dalam perekonomian.

Pencapaian-pencapaian di atas tentu membesarkan hati kita karena terwujud di tengah berbagai cobaan dan gejolak baik yang bersumber dari dalam negeri seperti musibah bencana alam yang secara bergantian terus mendera kita, maupun yang bersumber dari luar negeri seperti krisis *subprime mortgage*. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2007 lalu dalam perekonomian makro dan sistem keuangan nasional sedang tertanam daya tahan yang lebih dalam dan tangguh. Tidaklah pula berlebihan jika mengatakan bahwa dalam banyak hal, daya tahan dan ketangguhan itu ditopang oleh terus meningkatnya kepercayaan pelaku ekonomi domestik dan internasional terhadap kemampuan bangsa kita sendiri dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan publiknya secara mandiri.

Namun, memasuki tahun-tahun ke depan kita sedang dihadapkan pada berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika perekonomian yang dalam banyak aspeknya merupakan efek-efek turunan dari arus dahsyat globalisasi ekonomi. Sebagai sebuah

progresi peradaban, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat menahan dan menutup diri darinya, alih alih menarik mundur progresi tersebut. Perekonomian dunia seakan sedang dalam transisi yang semakin cepat untuk menjadi satu pasar besar, yang seiring dengan itu menimbulkan ekkses.

Ekses yang telah bersama-sama kita rasakan saat ini adalah pemanasan global yang timbul karena limbah kegiatan produksi yang bertumbuh terlalu pesat ketimbang kapasitas bumi untuk menyerapnya. Dampak dari ekkses tersebut bagi kita yang berada di negara sedang membangun sangatlah nyata. Pemanasan global telah menimbulkan perubahan iklim yang akhir-akhir ini mengganggu upaya kita mempercepat pembangunan ekonomi, terutama di sektor tanaman bahan makanan. Di tengah gejala pemanasan global yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian tanaman pangan di negara-negara sedang membangun, termasuk Indonesia, kita juga dihadapkan pada sebuah realitas lainnya yaitu meningkatnya harga energi dan harga bahan makanan secara bersamaan di pasar dunia. Kita tentu perlu menyikapi hal ini dengan sangat serius karena bagi mayoritas masyarakat kita dampak dari semua itu adalah meredupnya harapan tentang kehidupan yang lebih baik yang selanjutnya menimbulkan kecemasan-kecemasan eksistensial.

Transisi perekonomian dunia menjadi pasar global dengan semua ekksesnya itu telah pula memberi dampak yang sangat luas terhadap perilaku manusia sebagai *homo economicus*. Kita telah merasakan bermunculannya perubahan preferensi serta visi para pelaku ekonomi di era global ini tentang kehidupan yang mereka jalani. Bagi pemangku kebijakan publik, perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan kegamangan bahkan bagi mereka

yang telah makan asam-garam, terutama karena dalam menyikapi fenomena ini diperlukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap berbagai asumsi yang mendasari sebuah kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan publik diujungnya menuntut kearifan, intuisi yang matang dan tajam untuk dapat memahami kondisi *ceteris paribus*, dan keberanian mengambil risiko bagi kepentingan masyarakat secara lebih luas.

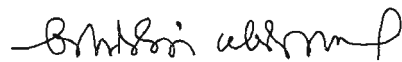
Sepuluh tahun setelah krisis, setelah kita melalui masa peralihan ini, adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengisi dekade-dekade ke depan dengan kerja kolektif yang lebih keras dalam semangat keadaban yang saling mendukung untuk menuju kehidupan yang semakin baik,

sejahtera dan berkeadilan. Apa yang dikatakan Bung Hatta 62 tahun lalu kiranya masih sangat relevan bagi kita dalam memasuki tahap selanjutnya di era pascakrisis Asia ini:

“Saat peralihan yang kita hadapi sekarang ini baiklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat menanam bibit yang bagus bagi pohon sejarah bangsa kita dimasa datang. Saat yang penting inilah yang akan menentukan nasib kita sebagai bangsa untuk berabad-abad lamanya.”

(Pidato Radio M. Hatta, 17 Juli 1946: Sebelas Bulan Merdeka)

Gubernur Bank Indonesia



Burhanuddin Abdullah



Bab 1

Tinjauan Umum

Bab 1: Tinjauan Umum

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mencatat beberapa pencapaian pokok yang mengembirakan meskipun mendapat tekanan terutama dari sisi eksternal. Untuk pertama kali sejak krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas angka 6% dengan stabilitas yang tetap terjaga baik. Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus, cadangan devisa meningkat, nilai tukar menguat, pertumbuhan kredit melampaui target, dan laju inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak mentah, dan merambatnya krisis *subprime mortgage* adalah beberapa faktor yang menorehkan tantangan dan ujian pada perekonomian Indonesia pada tahun 2007. Dalam menghadapi deretan ujian tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Daya tahan perekonomian Indonesia yang lebih baik tersebut antara lain disumbang oleh kombinasi kebijakan makroekonomi dan sektoral yang ditempuh. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter dan fiskal berjalan semakin baik. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dalam memberikan stimulus dan menjaga stabilitas perekonomian. Di sisi moneter, respons kebijakan dilakukan secara berhati-hati dan konsisten pada upaya pengendalian inflasi pada tingkat yang semakin rendah dalam jangka menengah-panjang. Di sisi fiskal, kesinambungan keuangan pemerintah tetap dijaga dengan baik di tengah upaya untuk mengendalikan harga komoditas strategis. Sementara itu, di sisi perbankan, fungsi intermediasi dan kelembagaan perbankan terus diperkuat, termasuk di dalamnya mempercepat pengembangan perbankan syariah. Adapun di sisi sektoral, pemerintah terus berupaya mendorong dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta penguatan, dan reformasi sektor keuangan.

Di tengah gejolak yang mewarnai perekonomian global, tantangan eksternal akan memberikan tekanan berat pada kinerja dan stabilitas makroekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2007. Inflasi diperkirakan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan relatif stabil. Ke depan, sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan semakin diperlukan untuk memitigasi dampak berbagai faktor risiko. Dalam hal itu, Bank Indonesia akan tetap konsisten mengarahkan kebijakannya untuk mencapai sasaran inflasi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Di bidang perbankan, upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dan penguatan kelembagaan perbankan akan tetap menjadi perhatian utama Bank Indonesia. Di sisi Pemerintah, peningkatan daya saing perekonomian melalui perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur perlu mendapat prioritas dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dengan struktur yang lebih sehat. Upaya-upaya itu diharapkan akan meningkatkan sisi penawaran dari perekonomian sehingga mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi dalam jangka menengah-panjang.

Tahun 2007 diawali dengan tingginya optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan. Memasuki tahun itu, perekonomian Indonesia meraih kembali stabilitas makroekonomi pascagejolak harga minyak pada akhir tahun 2005 yang dampaknya terasa hingga pertengahan tahun 2006. Optimisme itu dilandasi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi yang didukung oleh keselarasan arah kebijakan moneter yang konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi dan kebijakan fiskal yang berkomitmen kuat terhadap terjaganya kesinambungan fiskal. Seiring dengan meningkatnya kredibilitas pengelolaan kebijakan makro, kepercayaan masyarakat internasional terhadap perekonomian Indonesia menguat. Hal itu tercermin dari membaiknya peringkat *sovereign credit* dan premi risiko investasi di Indonesia.

Dalam perjalanannya, pada paruh kedua tahun 2007 perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan yang datang dari perekonomian global, termasuk rambatan krisis *subprime mortgage* di AS, serta tingginya harga minyak dan komoditas internasional lainnya. Perkembangan harga minyak dunia yang membubung mendekati \$100 per barel¹ mendorong tingginya permintaan valas untuk kegiatan impor dan memperberat beban fiskal, terutama untuk menutup kebutuhan subsidi BBM yang membengkak. Rambatan krisis *subprime mortgage* menimbulkan kecemasan yang meluas terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia dan mendorong investor global untuk menghindari aset yang dipandang berisiko tinggi (*flight to quality*), terutama aset-aset dari negara *emerging markets* termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut juga memicu pembalikan arus investasi portofolio asing (*capital reversal*) di pasar keuangan domestik terutama di pasar SBI, SUN, dan pasar modal.

Berbagai gejolak global tersebut pada gilirannya memengaruhi dinamika kestabilan makroekonomi Indonesia. Rupiah pada paruh kedua tahun 2007 terdepresiasi secara signifikan dan sempat mencapai nilai terlemah pada Agustus 2007 dengan rata-rata bulanan sebesar Rp9.372 per dolar AS. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sembari memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah kebijakan makroekonomi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan konsisten sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap rupiah. Di samping berbagai langkah tersebut, imbal hasil di pasar keuangan domestik

yang masih tinggi mendorong kembalinya aliran dana dari luar negeri ke pasar keuangan domestik seiring dengan tingginya akses likuiditas di pasar keuangan global.

Perkembangan nilai tukar rupiah secara keseluruhan tahun tetap relatif stabil. Kestabilan nilai tukar selama tahun 2007 didukung oleh perkembangan positif fundamental ekonomi nasional yang konsisten dengan pencapaian keseimbangan internal dan eksternal perekonomian. Kebijakan untuk menjaga volatilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dilakukan secara terbatas. Kebijakan tersebut juga ditopang penguatan strategi komunikasi serta peningkatan efektivitas peraturan kehati-hatian dan pemantauan lalu lintas devisa.

Perkembangan nilai tukar rupiah juga didukung oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang masih positif. Surplus NPI tahun 2007 masih tinggi mencapai sebesar \$12,5 miliar. Dengan demikian, NPI kembali membukukan surplus sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Neraca transaksi berjalan mencatat surplus \$11,0 miliar atau 2,5% dari PDB, sedikit lebih tinggi dari tahun 2006 sebesar \$10,8 miliar. Surplus tersebut terutama bersumber dari meningkatnya ekspor nonmigas. Meskipun pada triwulan III tahun 2007 sempat terjadi aliran keluar modal asing, secara keseluruhan tahun 2007 neraca modal dan finansial mencatat surplus \$2,8 miliar, sejalan dengan masih menariknya imbal hasil investasi rupiah. Kinerja NPI yang masih positif tercermin dari peningkatan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai \$56,9 miliar atau setara 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah, lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2006 yang tercatat sebesar \$42,6 miliar.

Perkembangan nilai tukar yang relatif stabil mendukung perkembangan inflasi IHK menjadi relatif stabil dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan. Di samping itu, stabilitas perkembangan IHK juga ditopang oleh menurunnya inflasi komoditas makanan yang bergejolak (*volatile foods*) dan rendahnya inflasi komoditas yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*). Keberhasilan pencapaian inflasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas dunia, termasuk harga komoditas nonmigas. Selain itu, pencapaian inflasi juga didukung oleh komitmen Pemerintah untuk tidak mengubah *administered prices* komoditas strategis (Bahan Bakar Minyak atau BBM dan Tarif Dasar Listrik atau TDL). Kredibilitas kebijakan yang semakin membaik berpengaruh positif terhadap ekspektasi inflasi masyarakat

1 Harga minyak WTI intraday per 20 November 2007.

yang pada gilirannya dapat memfasilitasi pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan.

Stabilitas makroekonomi yang terjaga menopang tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007, bahkan mencapai tingkat tertinggi di periode pascakrisis, yakni 6,32%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didukung oleh tingginya pertumbuhan permintaan domestik, baik konsumsi masyarakat maupun investasi. Konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan membaiknya daya beli. Sementara itu, pertumbuhan investasi didukung oleh membaiknya persepsi investor, meningkatnya imbal hasil investasi (*return on investment*) dan ketersediaan pembiayaan yang memadai termasuk dari perbankan dan pasar keuangan pada umumnya. Ekspor tetap mampu tumbuh tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Hal itu tidak terlepas dari upaya diversifikasi negara tujuan ekspor sehingga dampak perlambatan ekonomi di negara maju terhadap ekspor Indonesia dapat direduksi dengan peningkatan ekspor ke negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi seperti China dan India. Meningkatnya pertumbuhan di sisi permintaan diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan produksi di hampir seluruh sektor perekonomian. Tiga sektor utama yang mempunyai kontribusi dominan terhadap pertumbuhan PDB, yakni sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang relatif stabil di beberapa daerah. Dilihat dari kontribusinya, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnustra) dan wilayah Jakarta-Banten masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi harga, inflasi nasional yang relatif stabil didukung oleh relatif rendahnya inflasi di beberapa daerah penyumbang inflasi terbesar. Meskipun kinerja perekonomian di beberapa daerah membaik, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi antar daerah masih cukup tinggi.

Seiring dengan membaiknya prospek perekonomian, Bank Indonesia secara bertahap menurunkan BI Rate hingga mencapai 8%, atau turun 175 *basis points* dibandingkan dengan akhir tahun 2006. Penurunan tersebut juga diikuti oleh turunnya suku bunga pasar, termasuk suku bunga simpanan dan suku bunga kredit. Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan signifikan mencapai 25,5%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 22,0%. Di pasar

saham dan obligasi, penurunan BI Rate juga memfasilitasi kenaikan IHSG dan mendapat respon positif di pasar obligasi, meskipun bursa regional dan global tengah dibayangi sentimen negatif. Berbagai perkembangan tersebut juga diikuti peningkatan nilai aktiva bersih (NAB) investasi reksadana, terutama NAB per unit reksadana pendapatan tetap. Namun, penurunan BI Rate lebih lanjut sempat tertahan dalam periode Agustus-November 2007 untuk mengantisipasi risiko kenaikan tekanan inflasi akibat gejolak eksternal.

Di sisi fiskal, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga energi dan kebutuhan pokok masyarakat seraya mengupayakan stimulus bagi perekonomian. Lonjakan harga minyak dunia yang dibarengi dengan realisasi *lifting* minyak domestik yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan menimbulkan tekanan yang cukup signifikan pada defisit APBN. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah menempuh sejumlah langkah antisipatif di sisi pendapatan dan belanja negara. Di sisi pendapatan, Pemerintah mempercepat realisasi penerimaan pajak serta menambah setoran dividen dari BUMN. Di sisi belanja, Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM domestik dengan kebijakan pemberian subsidi yang berimplikasi pada belanja negara yang melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu di sisi pembiayaan, untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan defisit, Pemerintah mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sehingga target pembiayaan defisit telah terpenuhi sebelum terjadinya gejolak di sektor keuangan.

Ke depan, dengan mencermati kinerja perekonomian, peluang dan faktor risiko, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 akan mencapai 6,2%, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tinggi terutama akan ditopang oleh rencana kenaikan gaji pegawai negeri dan upah minimum provinsi. Peningkatan konsumsi juga akan didukung oleh ketersediaan pembiayaan konsumen yang cukup, baik dari sumber dana perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pertumbuhan investasi diprakirakan juga akan mengalami akselerasi. Selain ditopang oleh iklim investasi yang kondusif, peningkatan pertumbuhan investasi juga akan ditunjang oleh pembangunan proyek infrastruktur, baik yang dibiayai oleh Pemerintah maupun swasta, termasuk sejumlah proyek pembangunan jalan tol dan pembangkit energi. Kinerja ekspor diprakirakan melambat sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kinerja perekonomian Indonesia ke depan tetap dilandasi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan

mempertimbangkan imbal hasil investasi yang relatif menarik serta sumber pasokan valas yang berasal dari devisa hasil ekspor dan arus modal masuk, nilai tukar rupiah pada tahun 2008 diperkirakan akan tetap stabil. Sementara itu, inflasi IHK diperkirakan mengalami tekanan berat, terutama berasal dari faktor eksternal. Gejala eksternal diperkirakan mendorong meningkatnya tekanan *imported inflation*. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan juga bersumber dari meningkatnya ekspektasi inflasi. Secara keseluruhan, inflasi diperkirakan mencapai 6,0%-6,5% dengan kecenderungan mencapai batas atas prakiraan. Upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi menjadi semakin penting mengingat pola ekspansi perekonomian pada tahun 2008 masih akan tertumpu pada permintaan domestik, terutama konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan, prospek perekonomian tahun 2008 di atas akan ditopang oleh konsistensi Pemerintah terhadap langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan (Boks: Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008). Selain itu, pencapaian prospek perekonomian tidak terlepas dari konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terutama nilai tukar, serta jalinan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik.

Evaluasi Perekonomian Indonesia Tahun 2007

Meskipun dibayangi oleh gejala eksternal, perekonomian Indonesia tahun 2007 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditandai oleh kinerja NPI yang mantap, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tingkat pengangguran dan kemiskinan, meskipun masih relatif tinggi, telah berangsur menurun. Kestabilan makroekonomi yang terjaga serta didukung beberapa kebijakan sektoral memberikan sumbangan terhadap membaiknya kondisi perekonomian. Kestabilan makroekonomi ini tercermin pada nilai tukar yang stabil, inflasi yang terkendali serta defisit fiskal yang berada dalam batas aman. Dengan terjaganya stabilitas tersebut, persepsi investor dan pelaku pasar terhadap perekonomian semakin baik.

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2007 tersebut didukung oleh berbagai kebijakan yang konsisten untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik terhadap gejala eksternal ataupun domestik. Kebijakan tersebut, antara lain berupa kebijakan moneter yang konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan fiskal yang menjaga kesinambungan fiskal, kebijakan perbankan yang berhati-hati, dan kebijakan sektoral yang mendorong percepatan investasi dan perluasan pasar tujuan ekspor.

Kondisi Makroekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 mencapai 6,32%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,5%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2007, terutama, berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang mencatat pertumbuhan tinggi. Sementara dari sisi penawaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 17,7% pada tahun 2006 menjadi 16,6% pada tahun 2007 atau berkurang sebanyak 1,9 juta orang. Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya inflasi, membaiknya indikator kemiskinan juga terkait dengan berbagai program sosial yang diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin, termasuk bantuan yang terkait dengan bencana alam.

Dari sisi permintaan, ekspansi ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,0%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,2%. Akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut terutama didukung oleh membaiknya daya beli masyarakat dan tersedianya pembiayaan konsumen yang memadai. Membaiknya daya beli masyarakat sejalan dengan tingkat inflasi yang terjaga, penghasilan pegawai dan upah buruh yang meningkat serta *transfer remittance* pekerja TKI yang tinggi. Peningkatan pendapatan dinikmati oleh sebagian besar kelompok masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah. Kenaikan pendapatan kelas menengah diindikasikan dari hasil survei gaji eksekutif dan kenaikan gaji pegawai negeri yang meningkat sekitar 10%-15%. Sementara itu, pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perbaikan daya beli masyarakat, terutama, dinikmati oleh kelompok petani serta buruh di sektor industri formal. Membaiknya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah juga didukung oleh tingginya tingkat *remittance* TKI yang bekerja di luar negeri, yang mencapai \$6,0 miliar atau setara 1,4% PDB.

Investasi tumbuh mencapai 9,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan investasi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan membaiknya optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian domestik. Hal itu tercermin dari berbagai hasil survei yang menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap prospek perekonomian domestik. Tingginya pertumbuhan investasi juga disertai oleh perbaikan produktivitas kapital, seperti tercermin

pada tren *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang menurun. Kenaikan produktivitas kapital mengindikasikan tingkat imbal hasil dan efisiensi yang semakin baik. Sementara dari sisi pembiayaan, selain dari sumber dana kredit dan pasar modal, pemenuhan kebutuhan pembiayaan investasi diindikasikan juga bersumber dari dana internal. Hal itu sejalan dengan laporan keuangan emiten bursa yang mengindikasikan peningkatan penggunaan laba ditahan untuk mendukung ekspansi usaha.

Dari sisi pembiayaan, potensi sumber pembiayaan investasi cenderung meningkat, tercermin dari peningkatan rasio tabungan terhadap PDB (*saving ratio*). Pada tahun 2007 *saving ratio* mencapai 26,8%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 23,7%. Meskipun demikian, potensi pembiayaan tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya untuk pembiayaan investasi fisik, tercermin dari perkembangan kesenjangan tabungan-investasi (*saving-investment gap*) yang masih tinggi, yakni sebesar 2,6% terhadap PDB. Berdasarkan penyumbangannya, surplus tabungan terhadap investasi berasal dari sektor swasta, sedangkan sektor pemerintah mengalami peningkatan defisit. Hal itu mengindikasikan sumber tabungan sektor swasta masih dominan diinvestasikan di sektor finansial.

Meskipun investasi tumbuh membaik, daya saing usaha di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga –yang mencakup operasi, strategi perusahaan, dan kualitas lingkungan dunia usaha– masih perlu dicermati. Hal ini dikonfirmasi oleh survei Bank Dunia (Oktober 2007) yang melaporkan peringkat daya saing Indonesia yang relatif belum berubah (peringkat 54 dari 131 negara), meskipun beberapa indikator efisiensi yang terdiri dari ukuran pasar, efisiensi di pasar barang, dan efisiensi di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan. Beberapa indikator utama yang masih dikeluhkan antara lain adalah kurangnya sarana infrastruktur, inefisiensi dalam proses birokrasi dan permasalahan akses pembiayaan. Implikasinya, rasio investasi terhadap PDB masih berada pada level sekitar 24,9%, di bawah kondisi sebelum krisis yang mencapai sekitar 29% dan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.

Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor riil masih tumbuh sebesar 8,0%. Selain perkembangan harga komoditas internasional yang terus meningkat, pertumbuhan ekspor juga ditopang oleh kuatnya permintaan negara-negara berkembang seperti China dan India. Dilihat komoditasnya, pertumbuhan ekspor yang tinggi terutama ditopang oleh permintaan akan komoditas batubara, kelapa sawit dan karet. Tingginya

ekspor kelapa sawit dan batubara terkait dengan program pengembangan energi alternatif dalam upaya diversifikasi energi di negara maju akibat kecenderungan peningkatan harga minyak.

Ekspansi kegiatan ekonomi berdampak pada meningkatnya pertumbuhan impor riil yang tumbuh sebesar 8,9%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping perkembangan nilai tukar yang relatif stabil, peningkatan impor juga didukung oleh tingginya permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi. Dilihat dari komponennya, impor barang konsumsi dan barang modal mencatat pertumbuhan yang tinggi, secara nominal masing-masing tumbuh sebesar 42,4% dan 23,1%.

Di sisi penawaran, penyumbang utama pertumbuhan PDB masih berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor pertanian. Untuk keseluruhan tahun 2007; sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,7%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2006 yaitu sebesar 4,6%. Seiring dengan itu, sektor perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan dari 6,1% pada tahun 2006 menjadi 8,5%. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan membaiknya keyakinan dunia usaha terhadap kondisi perekonomian. Sektor pertanian juga mencatat kenaikan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan produktivitas terutama pada subsektor tanaman bahan makanan serta tingginya permintaan ekspor, terutama karet dan kelapa sawit. Produksi padi bahkan memperlihatkan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingkat pendapatan per kapita tahun 2007 yang mencapai \$1.947 per kapita, meningkat sekitar 17% dibandingkan dengan tahun 2006. Selain itu, pertumbuhan ekonomi telah mampu menyerap tambahan angkatan kerja sebesar 4,5 juta orang sehingga rasio pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja menurun dari 10,3% pada Agustus 2006 menjadi 9,1% pada Agustus 2007. Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran pada kelompok pendidikan akademi dan universitas masih menunjukkan peningkatan. Sementara itu, tingkat pengangguran pada kelompok pendidikan rendah semakin turun yang antara lain didukung oleh meningkatnya peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Indikator kemiskinan juga menunjukkan perbaikan, tercermin pada jumlah penduduk miskin, indeks

Tabel 1.1
Beberapa Indikator Makroekonomi

persen

Rincian	2003	2004	2005	2006	2007
Pertumbuhan PDB	4,7	5,0	5,7	5,5	6,3
Inflasi IHK	5,1	6,4	17,11	6,60	6,59
Inflasi Inti	6,9	6,7	9,75	6,03	6,29
Nilai Tukar (Rp/\$) Rata-rata	8.572	8.940	9.713	9.167	9.140
Suku Bunga SBI (1 Bulan)/BI Rate sejak Juli 2005	8,31	7,43	12,75	9,75	8,00
Transaksi Berjalan/PDB	3,4	0,6	0,1	2,9	2,5
PDB menurut Pengeluaran					
Konsumsi	3,9	5,0	4,0	3,2	5,0
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,6	14,7	10,9	2,5	9,2
Ekspor Barang dan Jasa	5,9	13,5	16,6	9,4	8,0
Impor Barang dan Jasa	1,6	26,7	17,8	8,6	8,9
PDB menurut Lapangan Usaha					
Pertanian	3,8	2,8	2,7	3,4	3,5
Pertambangan dan Penggalian	-1,4	-4,5	3,2	1,7	2,0
Industri Pengolahan	5,3	6,4	4,6	4,6	4,7
Listrik, Gas, dan Air Bersih	4,9	5,3	6,3	5,8	10,4
Bangunan	6,1	7,5	7,5	8,3	8,6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,4	5,7	8,3	6,4	8,5
Pengangkutan dan Komunikasi	12,2	13,4	12,8	14,4	14,4
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,7	7,7	6,7	5,5	8,0
Jasa-jasa	4,4	5,4	5,2	6,2	6,6
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,5	9,4	10,8	10,3	9,1
Tingkat Kemiskinan	17,4	16,7	16,0	17,7	16,6
PDB per Kapita, dalam ribu Rp	9.574	10.506	12.700	15.000	17.600
PDB per Kapita, dalam dolar AS	1.116	1.167	1.321	1.663	1.947
Agregat Moneter					
Pertumbuhan M2, Akhir Periode	8,12	8,14	16,42	14,87	18,89
Pertumbuhan M1, Akhir Periode	16,60	13,41	11,07	28,08	27,63
Pertumbuhan Uang Primer, Akhir Periode (<i>Test Date</i>)	20,42	19,81	20,22	23,90	27,77
Suku Bunga					
PUAB (<i>Overnight</i>)	8,18	6,86	10,03	5,97	6,50
Deposito (1 Bulan)	6,62	6,43	10,43	8,96	7,19
Kredit Modal Kerja	15,07	13,41	15,18	15,07	13,00
Kredit Investasi	15,68	14,05	14,92	15,10	13,01
Neraca Pembayaran					
DSR (<i>Debt to Service Ratio</i>)	34,1	27,1	17,3	24,8	19,2
Cadangan Devisa, Setara Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah (dalam bulan)	7,1	5,5	4,3	4,5	5,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Bank Indonesia

kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) yang menurun. Jumlah penduduk miskin berdasarkan laporan BPS (Maret 2007) tercatat sebesar 37,2 juta orang, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 39,3 juta orang. Penurunan

penduduk miskin terutama terjadi di daerah pedesaan sebesar 1,20 juta orang, sedangkan di perkotaan berkurang 0,93 juta orang. Dilihat porsinya, penduduk miskin di Indonesia masih dominan berada di desa yakni sebesar 63,5%. Sementara itu, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin menunjukkan perbaikan,

tercermin dari indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang menurun. Seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2007 juga cenderung membaik yang ditunjukkan oleh koefisien Gini yang menurun.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut juga diikuti oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat. Menurut laporan Bank Dunia November 2007, persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1 per hari adalah 8,5%, jauh lebih rendah daripada target *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yakni 10,3%. Indikator MDGs lainnya yang juga menunjukkan perbaikan adalah jumlah siswa yang masuk Sekolah Dasar, jumlah kematian anak di bawah 5 tahun, dan akses masyarakat terhadap sarana air bersih. Dalam kaitan itu, Bank Dunia juga mencatat bahwa hampir di seluruh aspeknya, pencapaian program-program MDGs Indonesia berjalan sesuai dengan target. Dari delapan MDGs, Indonesia telah mencatat kemajuan yang cukup berarti dalam program pengentasan kemiskinan.

Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang relatif stabil di beberapa daerah. Dilihat dari kontribusinya, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnustra) dan wilayah Jakarta-Banten masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kali-Sulampua) menyebabkan sumbangan wilayah tersebut terhadap pertumbuhan nasional meningkat. Di sisi harga, inflasi nasional yang relatif stabil didukung oleh relatif rendahnya inflasi di beberapa daerah penyumbang inflasi terbesar. Meskipun kinerja perekonomian di beberapa daerah membaik, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi antar daerah masih cukup tinggi. Hal ini tetap perlu menjadi perhatian bersama agar kesenjangan pendapatan antar daerah dapat semakin dikurangi.

Membaiknya kondisi perekonomian domestik juga didukung oleh kinerja NPI tahun 2007 yang secara keseluruhan masih mantap, tercermin pada surplus yang tercatat sebesar \$12,5 miliar. Meskipun dibayangi kecemasan terhadap potensi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis *subprime mortgage* dan harga minyak yang tinggi, neraca transaksi berjalan mencatat surplus sebesar \$11,0 miliar, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar \$10,8 miliar. Kenaikan surplus ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekspor yang

meningkat seiring dengan tingginya permintaan dunia dan kenaikan harga komoditas ekspor. Dilihat dari komoditasnya, pertumbuhan ekspor terutama didukung oleh komoditas sektor manufaktur dan sektor tambang. Impor menunjukkan peningkatan sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan ekspor.

Di sisi neraca transaksi modal dan finansial, meskipun sentimen negatif yang terjadi di pasar keuangan global sempat mendorong aliran modal asing keluar, neraca transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus sebesar \$2,8 miliar. Hal itu sejalan dengan masih menariknya imbal hasil investasi rupiah, terjaganya stabilitas makroekonomi, dan membaiknya persepsi risiko investor. Perbaikan kinerja neraca transaksi modal juga ditopang oleh investasi langsung (*Foreign Direct Investment* – FDI) yang mencapai \$1,2 miliar. Sementara itu, transaksi portofolio mencatat surplus yang meningkat hingga mencapai \$7,0 miliar seiring dengan ekspek likuiditas global yang masih besar dan persepsi risiko investor yang membaik. Dengan perkembangan di atas, posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2007 mencapai \$56,9 miliar atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Gejolak perekonomian global memberi tekanan pada kesinambungan fiskal. Perkembangan harga minyak mentah dunia yang mencapai rata-rata sekitar \$72,3 per barel dan rendahnya *lifting* minyak domestik (899 ribu barel per hari) meningkatkan pengeluaran subsidi dan sekaligus mengurangi penerimaan negara dari hasil minyak. Meningkatnya beban subsidi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM domestik walaupun terjadi peningkatan harga minyak mentah dunia. Untuk meredakan tekanan harga minyak dunia yang melonjak tinggi, pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dan listrik meningkat signifikan hingga masing-masing mencapai sebesar 151% dan 102% dari rencana anggaran. Beban subsidi BBM juga semakin berat akibat realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi perkiraan, yaitu dari 36 juta kilo liter menjadi sekitar 38 juta kilo liter.

Dalam menghadapi gejolak eksternal tersebut, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Di sisi penerimaan, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk pajak ekspor CPO dan menambah setoran dividen BUMN. Di sisi lain, penyerapan beberapa komponen belanja negara masih berjalan lambat karena berbagai kendala administratif juga berkontribusi terhadap terkendalnya defisit APBN. Defisit fiskal tetap terjaga, yaitu 1,3% dari

PDB, lebih rendah dari target 1,5% dari PDB. Upaya Pemerintah secara konsisten menjaga keseimbangan fiskal tercermin pula pada rasio utang luar negeri terhadap PDB yang terus menurun hingga mencapai 31,2% pada tahun 2007.

Dinamika perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun 2007 menunjukkan kecenderungan yang stabil. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.140 per dolar AS, menguat 0,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.167 per dolar AS. Penguatan rupiah ditopang oleh kinerja NPI yang mencatat surplus, faktor risiko yang membaik serta imbal hasil investasi aset rupiah yang tetap menarik. Daya tarik investasi dalam instrumen pasar keuangan domestik masih mendorong aliran masuk modal asing, meskipun sempat terjadi arus pembalikan aliran modal akibat gejolak eksternal pada paruh kedua tahun 2007. Di paruh pertama tahun 2007, pasar valas domestik mengalami aliran modal masuk yang cukup besar sehingga nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun di paruh kedua tahun 2007, risiko global meningkat sehingga secara keseluruhan tahun pasar valas dalam negeri mencatat eksese permintaan. Secara *point to point*, Rupiah melemah sebesar 4,2% sehingga pada akhir tahun 2007 tercatat sebesar Rp9.393 per dolar AS. Pelemahan tersebut terjadi pada periode akhir tahun 2007, bersumber dari krisis *subprime mortgage* yang belum mereda dan tingginya harga minyak. Secara rata-rata, selama tahun 2007 Rupiah mengalami apresiasi yang disertai oleh penurunan volatilitas dari 3,8% pada tahun 2006 menjadi 1,4%.

Perkembangan nilai tukar yang stabil mendukung inflasi IHK selama tahun 2007 tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Inflasi IHK pada tahun 2007 tercatat sebesar 6,59% atau berada dalam kisaran yang ditetapkan Pemerintah, yakni 6,0% \pm 1%. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi pada tahun laporan dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor, baik fundamental maupun nonfundamental. Berdasarkan faktor fundamentalnya, perkembangan inflasi yang stabil sepanjang tahun disebabkan oleh stabilnya ekspektasi inflasi, terjaganya kestabilan nilai tukar, dan rendahnya tekanan inflasi dari kesenjangan *output*. Sementara berdasarkan faktor nonfundamental, menurunnya tekanan inflasi IHK disebabkan oleh minimalnya kebijakan *administered prices* dan menurunnya inflasi *volatile foods*.

Perkembangan ekspektasi inflasi sepanjang tahun 2007 relatif stabil yang tercermin dari hasil beberapa survei terhadap konsumen, produsen, dan pakar keuangan. Stabilnya ekspektasi inflasi tidak terlepas dari kombinasi beberapa langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank

Indonesia dan Pemerintah, terutama dalam menangkalkan tekanan inflasi yang berasal dari tingginya harga minyak dan krisis pasar keuangan global. Di samping itu, tidak adanya kenaikan *administered price* atas komoditas strategis selama tahun 2007 juga memberikan kontribusi dalam pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat yang stabil dan rendah. Dari sisi eksternal, perkembangan nilai tukar yang relatif stabil membantu mengurangi tekanan inflasi barang-barang impor (*imported inflation*) yang meningkat tinggi akibat lonjakan harga komoditas internasional, terutama harga minyak dan harga komoditas pangan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi inti selama tahun 2007 dapat dijaga pada angka 6,29%.

Sementara itu, tekanan inflasi yang berasal dari *volatile food* mencapai 11,41%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 15,27%. Penurunan inflasi *volatile food*, terutama disebabkan oleh menurunnya inflasi beras akibat dari terjaganya kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Selain ditunjang oleh peningkatan produksi, upaya untuk menjaga kecukupan pasokan beras juga dilakukan melalui impor pengadaan beras oleh Bulog. Meskipun inflasi komoditas beras cenderung menurun, inflasi beberapa komoditas pangan lainnya meningkat akibat kenaikan harga di pasar internasional dan gangguan alam. Komoditas dimaksud di antaranya adalah jagung dan minyak goreng serta produk turunannya.

Tekanan inflasi yang bersumber dari kebijakan *administered prices* relatif minimal seiring tidak adanya kenaikan harga barang *administered* yang bersifat strategis seperti BBM bersubsidi (premium, solar, minyak tanah) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pengaruh kebijakan tersebut cukup signifikan dalam upaya menjaga kestabilan inflasi pada tahun ini mengingat bobotnya yang cukup besar dalam keranjang IHK serta dampak lanjutan (*second round effect*) terhadap produk lain yang cukup tinggi. Meskipun relatif rendah, inflasi *administered prices* pada tahun laporan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, dari sebesar 1,8% menjadi 3,3%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 7% pada Maret 2007, pengenaan tarif cukai rokok spesifik per 1 Juli 2007, kenaikan tarif air minum PAM di beberapa kota, kenaikan tarif jalan tol, dan kenaikan harga BBM nonsubsidi (Pertamax, Pertamina Plus, dan Pertamina Dex).

Mencermati prospek kondisi makroekonomi yang membaik dan relatif stabil, Bank Indonesia secara bertahap telah menurunkan BI Rate sejak awal tahun 2007 dari 9,5% menjadi 8,25% di bulan Juli 2007.

Penurunan tersebut tertahan dalam periode Agustus-November 2007 seiring dengan tekanan inflasi ke depan yang dikhawatirkan meningkat akibat melambungnya harga minyak dunia dan timbulnya sentimen negatif terhadap nilai tukar yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Namun, seiring dengan meredanya tekanan terhadap inflasi dan optimisme terhadap perkembangan dinamika perekonomian ke depan, Bank Indonesia kembali menurunkan BI Rate di bulan Desember sebesar 25 *basis points*. Dengan demikian, pada akhir tahun 2007 BI Rate mencapai level 8,0%.

Seiring dengan turunnya BI Rate dan ekspansi perekonomian, kinerja pasar keuangan domestik juga membaik. Pasar modal dalam negeri mencatat kenaikan indeks sebesar 52,1% sehingga ditutup pada level 2.745,8 pada akhir tahun 2007. Peningkatan minat investasi pada pasar saham, di tengah likuiditas global yang berlebih, didorong oleh terjaganya kondisi fundamental makro, tren penurunan BI Rate, dan membaiknya kinerja mikro perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh laporan keuangan para emiten. Secara sektoral, penguatan IHSG terutama didorong oleh sektor pertambangan, pertanian, dan properti. Peningkatan kinerja juga terjadi di pasar SUN dan Reksadana. *Yield* SUN menurun seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap instrumen keuangan tersebut. Di pasar reksadana, NAB terus meningkat dan mencapai Rp92,2 triliun per Desember 2007. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh reksadana yang berbasis saham dan campuran.

Menurunnya BI Rate juga diiringi oleh membaiknya fungsi intermediasi perbankan, sehingga dunia perbankan memberi sumbangan yang semakin signifikan dalam keseluruhan pembiayaan perekonomian. Seiring dengan turunnya suku bunga simpanan, suku bunga kredit mulai turun, walaupun dalam besaran yang lebih kecil dari suku bunga simpanan. Hal itu mendorong peningkatan kredit dalam jumlah yang cukup tinggi, bahkan melampaui target yang ditetapkan di awal tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penyaluran kredit pada tahun 2007 tumbuh 25,5% menjadi Rp1.045,7 triliun. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 17,4% menjadi Rp1.510,7 triliun. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut mendorong peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan hingga mencapai 69,2%, rasio tertinggi yang pernah dicapai pada periode pascakrisis. Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh LDR industri BPR yang tercatat sebesar 109,7%. Kinerja kredit MKM meningkat hingga mencapai Rp502,8 triliun, tumbuh 22,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja

perbankan syariah juga menggembirakan yang tercermin dari perluasan jaringan pelayanan, pertumbuhan penghimpunan dana, dan pembiayaan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Berbagai pencapaian kinerja yang baik di sisi intermediasi juga diimbangi oleh kemampuan manajemen risiko yang makin andal. Hal itu tercermin dari berbagai indikator kinerja keuangan dan operasional industri perbankan seperti kualitas kredit, profitabilitas, dan permodalan yang seluruhnya menunjukkan perbaikan. *Non-Performing Loans* (NPL) industri perbankan telah mengalami penurunan, terutama karena dipengaruhi oleh restrukturisasi kredit korporasi besar pada bank BUMN. Permodalan perbankan dapat terus bertahan pada tingkat yang memadai, tercermin pada rasio kecukupan modal bank (CAR) yang dapat terus bertahan pada level yang cukup tinggi, yakni sekitar 19,2%.

Likuiditas perekonomian pada tahun 2007 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kondisi historis 5 tahun terakhir. Likuiditas perekonomian dalam arti sempit (M1) mencapai Rp460,8 triliun atau tumbuh 27,6%. Sementara itu, M2 tumbuh 18,9%, hingga mencapai Rp1.643,2 triliun. Perkembangan agregat moneter tersebut mengindikasikan tingginya tantangan pengelolaan likuiditas perekonomian. Dilihat dari faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan likuiditas tersebut terjadi karena pemberian kredit kepada sektor bisnis yang meningkat cukup besar, yakni Rp208,0 triliun atau tumbuh sebesar 26,4%. Dari jumlah itu, sebesar Rp154 triliun disalurkan dalam bentuk kredit rupiah, sedangkan sisanya Rp54 triliun atau \$5 miliar berupa kredit dalam valas. *Net Foreign Assets* (NFA) secara keseluruhan juga meningkat sebesar 27,0%, bertambah sebesar Rp111,4 triliun dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Tambahan tersebut didominasi oleh NFA pada Bank Indonesia sejalan dengan meningkatnya cadangan devisa yang bersumber dari penerimaan hasil migas akibat tingginya harga minyak dunia.

Membaiknya kinerja perekonomian sepanjang tahun 2007 juga tercermin dari peningkatan aktivitas sistem pembayaran. Secara keseluruhan, penggunaan uang kartal sebagai alat transaksi selama tahun 2007 masih cukup tinggi, tercermin dari rata-rata jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat (UYD) yang mencapai Rp174,8 triliun atau meningkat sebesar 21,0%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,6%. Di sisi pembayaran nontunai, rata-rata harian (RRH) volume transaksi melalui sistem BI-RTGS dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama tahun 2007 mengalami peningkatan masing-

masing sebesar 45,6% dan 13,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, penggunaan alat pembayaran berbasis kartu cukup tinggi dengan dominasi volume dalam penggunaan *account based card* yang mencapai 77,6% dan sisanya kartu kredit. Selain didorong oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut juga disebabkan oleh transaksi perdagangan pada pasar keuangan, pergeseran preferensi cara pembayaran, dan inovasi teknologi sistem pembayaran.

Kebijakan Makroekonomi dan Sektoral Tahun 2007

Secara umum kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2007, baik di bidang moneter, perbankan maupun sistem pembayaran, tetap diarahkan untuk memperkuat kestabilan makroekonomi guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas. Kebijakan moneter dilakukan secara berhati-hati dan konsisten untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Kebijakan perbankan diarahkan untuk mendorong peran perbankan sebagai lembaga intermediasi tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian serta melanjutkan upaya penguatan kelembagaan perbankan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran ditempuh dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan di bidang moneter dan perbankan dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Di sisi pemerintah, kebijakan fiskal diarahkan pada peningkatan stimulus dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, sedangkan kebijakan sektoral diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan Moneter

Pada sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) tetap fokus pada upaya untuk mencapai target inflasi yang rendah dalam jangka menengah. Untuk mencapai itu, Bank Indonesia secara konsisten menetapkan BI Rate dalam kerangka *inflation targeting framework* yang didasarkan atas proyeksi inflasi dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi makroekonomi. Dalam implementasinya, *stance* kebijakan moneter selama tahun 2007 dapat dibagi dalam dua periode yakni periode penurunan BI rate (Januari-Juli 2007) dan periode suku bunga tetap (Agustus-November 2007). Penurunan BI rate terutama didasarkan atas pertimbangan tercapainya sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, tidak berubahnya BI rate didasarkan atas pertimbangan antisipatif terhadap meningkatnya potensi risiko inflasi yang ditimbulkan oleh gejolak pasar keuangan global sejak akhir Juli 2007 dan tren kenaikan harga minyak dunia.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka operasional kebijakan moneter, memperkaya instrumen moneter dan memperkuat komunikasi dan transparansi kebijakan moneter. Penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter mencakup pengembangan infrastruktur untuk memperkuat efektivitas operasi pasar terbuka melalui penyempurnaan pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan menggunakan *fixed rate tender*. Upaya memperkaya instrumen moneter dilakukan melalui implementasi operasi lelang tidak reguler (*fine tune operation/FTO*), serta terus memperbaiki proyeksi dan pengelolaan likuiditas. Untuk lebih memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi dan transparansi kebijakan moneter melalui berbagai sarana, termasuk melalui siaran pers dan publikasi berkala laporan ekonomi bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disertai dengan sejumlah program seminar dan diskusi (Boks: Strategi Komunikasi, Kebijakan Moneter, dan Kredibilitas Bank Sentral).

Pada tahun 2007 Bank Indonesia konsisten menerapkan kebijakan nilai tukar fleksibel sehingga pergerakan nilai tukar sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi. Pergerakan nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi tersebut diharapkan dapat tetap menjaga daya saing ekspor, sedangkan terjaganya volatilitas nilai tukar diharapkan dapat menjaga kepastian usaha dan meminimalkan dampaknya terhadap inflasi. Guna menjaga volatilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing dalam skala terbatas.

Untuk mengoptimalkan kebijakan moneter lebih lanjut, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat. Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi (TPI), yang terdiri dari Bank Indonesia dan instansi terkait, terus diperkuat dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. Di sisi lain, Pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang khusus bertugas menstabilkan harga kebutuhan pangan pokok (beras, gula, dan minyak goreng) agar terjangkau oleh masyarakat. Tim ini antara lain bertugas (i) merencanakan dan merumuskan kebijakan stabilisasi kebutuhan pangan pokok beras, gula, dan minyak goreng; (ii) mengkoordinasikan pelaksanaan stabilisasi kebutuhan pangan pokok; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas kebutuhan pangan pokok.

Kebijakan Perbankan

Kebijakan perbankan yang ditempuh selama tahun 2007 diupayakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan memperkuat kelembagaan perbankan, termasuk

meningkatkan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah. Kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan antara lain melalui penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan kredit, sehingga dapat lebih mendorong penyaluran kredit MKM dan kredit ke sektor padat karya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan. Sementara itu, penguatan kelembagaan perbankan antara lain adalah mendorong proses konsolidasi serta berperan aktif dalam pengembangan pasar dan instrumen keuangan untuk membentuk sektor keuangan yang sehat dan kuat dalam rangka meningkatkan daya tahan perekonomian. Dari sisi perbankan syariah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perannya dalam perekonomian melalui peningkatan keberagaman produk dan jasa syariah, serta meningkatkan daya tarik instrumen keuangan syariah sebagai salah satu *outlet* penanaman dana dari luar negeri.

Kebijakan untuk lebih meningkatkan intermediasi perbankan ditempuh melalui empat langkah pokok. Pertama, Bank Indonesia berperan aktif menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan baik oleh perbankan maupun pelaku usaha lainnya. Hal itu dilakukan dengan meluncurkan Database Perekonomian Nasional dan Pusat Informasi Kajian Ekonomi pada *website* Bank Indonesia dan melakukan revitalisasi fungsi dan peran Kantor Bank Indonesia (KBI). Kedua, perbaikan fungsi intermediasi perbankan juga diupayakan melalui revitalisasi peran bank BUMN melalui peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah dalam menata kembali industri perbankan nasional. Ketiga, menyesuaikan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya antara lain terkait dengan revisi tata cara penilaian kolektibilitas kredit dan prinsip kehati-hatian perbankan.² Keempat, meningkatkan dan memperluas peran dan kontribusi BPR di sektor UMKM melalui pelaksanaan *linkage program*. Implementasi dari keempat langkah di atas tercermin dari peluncuran Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah, penerapan *linkage program* Bank Umum dengan BPR, bazar intermediasi di berbagai daerah, dan upaya membangun kemitraan strategis yang lebih efektif dengan Pemerintahan Daerah melalui penguatan fungsi *advisory* Kantor-kantor Bank Indonesia di daerah.

Kebijakan memperkuat struktur kelembagaan perbankan terus diarahkan untuk meningkatkan daya tahan perbankan nasional menghadapi persaingan global.

Secara umum kebijakan ini dibagi dalam tiga langkah pokok. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai fasilitator proses *merger* dalam program konsolidasi sektor perbankan, terutama bagi bank-bank yang berpotensi menimbulkan instabilitas pada industri perbankan. Kedua, menerbitkan panduan bagi bank asing untuk lebih berperan optimal dalam proses intermediasi perbankan sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit dari bank asing ke sektor produktif. Ketiga, meningkatkan peran Bank Indonesia dalam pengembangan pasar dan instrumen keuangan guna membentuk sektor keuangan yang sehat dan kuat. Implementasi dari keempat langkah pokok tersebut di atas tercermin dari penguatan *prudential regulations*, implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan persiapan implementasi Basel II. Implementasi Basel II bagi sektor perbankan Indonesia ditargetkan pelaksanaannya pada tahun 2008.

Selain itu, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dan instansi terkait lainnya untuk membangun Jaring Pengaman Sektor Keuangan yang efektif dan efisien. Dalam rangka mengembangkan kerangka sektor keuangan secara komprehensif, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan berbagai institusi terkait untuk menyusun cetak biru Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) dan mempersiapkan pelaksanaan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah. Untuk itu, sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia telah memformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah. Rencana peningkatan tersebut dilakukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak untuk mencapai target peningkatan pangsa perbankan syariah menjadi 5% dari total volume usaha perbankan nasional pada akhir tahun 2008. Untuk memperkaya produk jasa keuangan perbankan syariah bagi masyarakat, pada tahun 2007 telah disusun Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang memuat informasi berbagai produk bank syariah yang telah tersedia di pasar domestik agar dapat menjadi referensi bagi bank-bank syariah dalam melengkapi produk-produk jasa keuangannya.

Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran terdiri dari kebijakan pengedaran uang dan kebijakan pembayaran nontunai. Dalam tahun 2007 kebijakan pengedaran uang terus diupayakan untuk meningkatkan pengedaran

² Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 pada 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

uang yang aman, handal, dan efisien, meningkatkan layanan kas prima, dan meningkatkan kualitas uang. Sementara itu, kebijakan pembayaran nontunai diarahkan untuk memitigasi risiko sistem pembayaran, melakukan pengawasan (*oversight*) sistem pembayaran, meningkatkan disiplin pengguna cek dan bilyet giro, mengatur kegiatan *money remittances*, meningkatkan efisiensi pengelolaan rekening Pemerintah, dan meningkatkan pembayaran nontunai.

Implementasi kebijakan dalam mendukung pagedaran uang yang aman, handal, dan efisien dilakukan antara lain melalui penyediaan uang yang cukup didasarkan pada rencana dan realisasi cetak uang, efektivitas dan efisiensi distribusi uang, implementasi kas besar titipan di 13 KBI, serta penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Indonesia.

Peningkatan layanan kas prima bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi uang kepada *stakeholders*. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perluasan wilayah kerjasama penyediaan uang kartal di wilayah perbatasan dan terpencil dengan PT Pos Indonesia (PT Posindo), melanjutkan penerapan pembatasan transaksi setoran dan bayaran bank (atau uji coba setoran bayaran bank), dan persiapan penerapan strategi pemilahan uang oleh pihak ketiga.

Kebijakan meningkatkan kualitas uang diarahkan pada upaya-upaya untuk menanggulangi risiko pemalsuan uang dan memperpanjang usia edar uang rupiah. Implementasi kebijakan tersebut antara lain dengan tetap melanjutkan peningkatan sosialisasi dan edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan pengembangan Bank Indonesia-*Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Terkait dengan kualitas bahan uang, Bank Indonesia melakukan kajian terhadap bahan uang pecahan Rp1000.

Di sisi pembayaran nontunai, untuk memitigasi risiko sistem pembayaran, kehandalan operasional Sistem BI-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) senantiasa dijaga melalui uji coba secara rutin baik terhadap sistem utama maupun sistem *back up*. Hal serupa juga dilakukan terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) antara lain dengan mekanisme *Failure to Settle* (FtS) yang berfungsi mengamankan sistem kliring dari potensi risiko kredit dengan mensyaratkan seluruh peserta kliring untuk menyediakan dana awal maupun surat berharga melalui sarana Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) sebagai jaminan keikutsertaan kliring

sepanjang hari. Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur dan struktur regulasi sistem pembayaran, khususnya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), memfasilitasi munculnya instrumen pembayaran elektronik (*e-money*) dan mengatur *money remittance*.

Pengawasan Sistem Pembayaran juga dilakukan melalui serangkaian aktivitas *oversight* untuk menguji kualitas operasional sistem BI-RTGS agar sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan *Bank for International Settlement* (BIS) yaitu the *Core Principle on Systemically Important Payment System* (CP SIPS). Di sisi lain, untuk memitigasi risiko setelmen surat berharga, penyelenggaraan BI-SSSS telah menerapkan prinsip *Finality of Settlement* yang mengacu kepada rekomendasi dari *Internasional Organisation of Securities Commission* (IOSCO). Berdasarkan prinsip tersebut setelmen surat berharga bersifat final sehingga tidak mengakomodasi adanya pembatalan setelmen (*unwinding*).

Terkait dengan upaya meningkatkan disiplin pengguna Cek/BG, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan baru terkait Daftar Hitam Nasional (DHN). Salah satu perbedaan mendasar dengan ketentuan lama adalah penetapan nasabah penarik Cek/BG kosong dilakukan sendiri oleh bank (*self assesment*) mengingat bank yang lebih mengetahui kosong tidaknya suatu cek/BG yang ditarik nasabahnya.

Terkait dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan rekening Pemerintah, Bank Indonesia telah mengembangkan aplikasi untuk memudahkan Pemerintah mengelola rekeningnya yang dinamakan Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-eB). Pada tahap awal, aplikasi BIG-eB menyediakan modul informasi transaksi yang bersifat *online* dan *real time*. Modul ini akan membantu Departemen Keuangan dalam memantau aktivitas transaksi keuangannya secara terkini dan akurat sehingga mempercepat proses penyusunan laporan realisasi anggaran.

Kebijakan Fiskal dan Sektorial

Kebijakan fiskal tahun 2007 terus diarahkan untuk meningkatkan stimulus dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Peningkatan stimulus fiskal tercermin dari peningkatan defisit anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan terjaganya kesinambungan fiskal tercermin dari tetap menurunnya rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan terjaganya surplus keseimbangan primer anggaran. Pemberian stimulus pada perekonomian tidak hanya dilakukan dari sisi belanja negara, tetapi juga melalui beberapa insentif

perpajakan secara terbatas untuk meningkatkan aktivitas di sektor riil³ serta melanjutkan berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin.

Dalam menghadapi tantangan tingginya harga minyak dan rendahnya penyerapan anggaran, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal untuk tetap mempertahankan defisit anggaran sesuai yang ditetapkan. Dari sisi penerimaan, konsolidasi fiskal antara lain dilakukan melalui upaya mengoptimalkan pendapatan berupa peningkatan setoran dividen BUMN dan pajak CPO. Dari sisi pengeluaran, konsolidasi dilakukan melalui penghematan dan peningkatan efisiensi belanja lembaga dan kementerian, serta tetap mempertahankan kebijakan untuk membayar subsidi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, kebijakan sektoral yang telah ditempuh adalah perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta penguatan dan reformasi sektor keuangan.⁴ Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi meliputi tiga aspek pokok yaitu (i) kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan pelayanan investasi serta menyinkronkan peraturan pusat dan peraturan daerah (Perda), (ii) kelancaran arus barang ekspor dan impor antara lain meningkatkan pelayanan kargo dan mempercepat pelayanan kepabeanan, dan (iii) perpajakan antara lain meningkatkan pelayanan perpajakan dan melindungi hak wajib pajak. Sasaran utama dari paket ini adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 6% dengan menjadikan investasi sebagai salah-satu motor utamanya.

Kebijakan Reformasi Sektor Keuangan merupakan kelanjutan dari Kebijakan Sektor Keuangan yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2006 yang meliputi lima aspek pokok yaitu (i) stabilitas sistem keuangan antara lain memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan dan memperkuat lembaga keuangan, (ii) lembaga keuangan perbankan antara lain meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan dan memfasilitasi perkembangan perbankan syariah, (iii) lembaga keuangan bukan bank antara lain mengembangkan pembiayaan ekspor dan meletakkan dasar pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*) terhadap perusahaan pembiayaan, (iv) pasar modal antara lain meningkatkan efisiensi dan likuiditas Pasar Modal serta meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat Utang), dan (v) lain-lain antara lain mengembangkan diversifikasi sumber

pembiayaan pembangunan. Sasaran utama dari paket ini adalah untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan serta mendorong diversifikasi sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, baik dari perbankan, pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan dalam tahun laporan. Kebijakan ini meliputi tiga aspek pokok yaitu (i) penyempurnaan peraturan perundang-undangan yakni percepatan penyelesaian peraturan perundangan di bidang infrastruktur, (ii) penguatan kelembagaan antara lain peningkatan kemampuan *Contracting Agency* dalam penyiapan proyek yang dikerjakan bersama dengan swasta dalam rangka pelaksanaan Perpres 67/2005 serta pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur, dan (iii) peningkatan manajemen pembangunan infrastruktur antara lain percepatan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum serta penyiapan petunjuk operasional kerjasama pemerintah dan swasta dalam rangka Perpres 67/2005. Kebijakan ini pada prinsipnya merupakan konsolidasi dari langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dalam mewujudkan reformasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan infrastruktur.

Sementara itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kebijakan pemberdayaan UMKM terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan program. Kebijakan Pemberdayaan UMKM meliputi empat aspek pokok yaitu (i) Peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, (ii) Pengembangan kewirausahaan dan SDM, (iii) Peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (iv) *Regulatory reform*. Sasaran utama dari paket ini adalah untuk meningkatkan produktivitas UMKM serta mendorong peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan signal yang lebih positif tentang pentingnya komitmen bersama untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM.

Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan Tahun 2008

Perekonomian Indonesia pada tahun 2008 diprakirakan akan menghadapi tantangan berat berupa tingginya tekanan harga komoditas internasional bersamaan dengan risiko anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia. Tekanan faktor eksternal tersebut diprakirakan akan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Di satu sisi, laju pertumbuhan ekonomi diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekspansi ekonomi dunia yang melambat akan mendorong

3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.

4 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tanggal 12 Juni 2007.

perlambatan kinerja ekspor. Selain itu, kebijakan Pemerintah yang mengedepankan upaya menjaga stabilitas makro, seiring dengan meningkatnya tekanan eksternal, mengakibatkan melambatnya stimulus pada perekonomian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, gejala eksternal akan meningkatkan intensitas tekanan pada laju inflasi. Inflasi IHK diperkirakan akan berada di atas kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Prospek perekonomian dimaksud masih dihadapkan pada berbagai faktor risiko, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik. Mempertimbangkan hal tersebut, berbagai kebijakan akan ditempuh agar kinerja perekonomian tetap baik. Dalam hal ini, kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2008 akan senantiasa diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Prakiraan Ekonomi Global

Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2008, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 4,9%. Berbagai permasalahan masih akan membayangi ekspansi ekonomi dunia pada tahun 2008, terutama yang bersumber dari berlanjut dan meluasnya rambatan krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Federal Reserve Bank Amerika Serikat dan Bank of England, masih terdapat risiko bahwa masalah yang menimpa sektor finansial tersebut belum akan berakhir dalam jangka pendek. Dampak rambatan gejala tersebut diperkirakan akan memengaruhi kegiatan investasi, pengeluaran konsumsi maupun kegiatan perdagangan antar negara. Disturbansi ekonomi global juga diperparah oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia, yang diperkirakan akan menjadi faktor penghalang bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi pada tahun mendatang. Berbagai permasalahan tersebut diperkirakan akan mendorong perlambatan pertumbuhan di negara maju. Di sisi lain, negara berkembang diperkirakan masih akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sejalan dengan kuatnya permintaan domestik, walaupun tidak dapat dihindari dampak negatif dari perlambatan ekonomi dunia.

Meskipun ekspansi ekonomi dunia melambat, tekanan inflasi global berpotensi meningkat. Tingginya harga komoditas internasional diperkirakan akan meningkatkan intensitas tekanan pada laju inflasi global. Di tengah kondisi kapasitas produksi yang belum menunjukkan penambahan yang signifikan, masih tingginya permintaan dari China dan India, serta kondisi geopolitik dan gangguan iklim, diperkirakan masih akan memicu harga minyak mentah untuk bertahan tinggi pada tahun 2008. Tekanan pada harga minyak diperkirakan juga akan

didorong oleh aksi spekulatif pelaku pasar keuangan di pasar komoditas. Di sisi lain, secara umum harga komoditas nonmigas diperkirakan akan menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, tingginya harga minyak akan mendorong upaya pengadaan energi alternatif yang semakin intensif dari produk pertanian, yang pada gilirannya juga mengakibatkan tetap tingginya harga beberapa komoditas pangan seperti jagung, *crude palm oil* (CPO), dan gula.

Dengan prakiraan perekonomian dunia yang melambat, kebijakan moneter negara maju pada tahun 2008 diperkirakan cenderung longgar. Meskipun tekanan inflasi diperkirakan meningkat, potensi perlambatan ekspansi ekonomi global yang lebih dalam diperkirakan akan mendorong berbagai bank sentral di negara maju untuk menempuh kebijakan moneter yang cenderung longgar. Sementara itu, di sebagian besar negara-negara *emerging markets*, bank sentral diperkirakan akan menempuh kebijakan moneter yang cenderung ketat guna mengantisipasi tingginya tekanan inflasi.

Aliran modal ke negara *emerging markets* diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Namun, kondisi likuiditas global yang berlebih dan prospek fundamental ekonomi yang positif diperkirakan akan tetap mendorong aliran modal ke negara berkembang, khususnya dalam bentuk FDI dan portofolio. Prospek perekonomian yang membaik mendasari pertimbangan penanam modal untuk melakukan investasi dalam bentuk FDI di negara *emerging markets*. Aliran modal dalam bentuk portofolio juga diperkirakan akan mencatat peningkatan, sejalan dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik serta faktor risiko ekonomi yang terjaga.

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 6,2%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tingginya intensitas tekanan faktor eksternal diperkirakan akan mendorong perlambatan ekspansi ekonomi. Kinerja ekspor diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan perlambatan ekspansi ekonomi dunia. Harga komoditas internasional yang bertahan tinggi mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian pola pengeluaran dalam RAPBN-P 2008 berupa efisiensi belanja konsumsi dan investasi, serta peningkatan subsidi. Kebijakan mengurangi belanja, untuk dialihkan ke dalam bentuk subsidi tersebut pada gilirannya mendorong perlambatan pengeluaran konsumsi dan investasi Pemerintah pada tahun 2008.

Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diperkirakan berasal dari kegiatan konsumsi masyarakat

dan investasi. Membaiknya daya beli masyarakat, yang antara lain didorong oleh kenaikan UMP dan gaji pegawai negeri, serta berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mendukung kenaikan pengeluaran konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh optimisme konsumen akan prospek ekonomi yang membaik, serta ditopang oleh ketersediaan pembiayaan yang semakin murah sejalan dengan tingkat suku bunga yang kondusif. Optimisme akan prospek ekonomi juga mendukung perbaikan kegiatan investasi. Investasi bangunan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan semakin maraknya pembangunan proyek-proyek infrastruktur, baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Upaya Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan infrastruktur diharapkan akan mendukung kegiatan investasi tersebut. Investasi nonbangunan diperkirakan juga akan meningkat. Membaiknya permintaan dan optimisme akan prospek ekonomi mendorong minat pelaku usaha untuk melakukan peningkatan kapasitas perekonomian. Penerapan berbagai kebijakan di bidang investasi juga turut memberi insentif bagi kegiatan penanaman modal. Hal ini diindikasikan antara lain oleh peningkatan persetujuan investasi baik dari investor dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

Di sisi ekspor, laju pertumbuhan diperkirakan tidak sebaik tahun sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor tersebut terkait dengan perlambatan ekspansi ekonomi dunia. Namun, sejalan dengan semakin terdiversifikasinya negara tujuan ekspor Indonesia, terutama ke China, India dan negara-negara Eropa Timur, dampak kurang menguntungkan dari penurunan permintaan negara maju yang terjadi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi di kelompok negara tersebut diperkirakan dapat dimitigasi. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik.

Prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh stimulus fiskal, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Selama tahun 2008 Pemerintah menargetkan defisit RAPBN-P tahun 2008 sebesar 2,0% dari PDB, lebih tinggi dari defisit APBN-P 2007 sebesar 1,3% dari PDB. Peningkatan defisit RAPBN-P tahun 2008 tidak terlepas dari peran Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Guna mempertahankan daya beli masyarakat, di tengah prakiraan tekanan harga komoditas dunia yang tetap tinggi, Pemerintah menempuh kebijakan untuk menaikkan anggaran yang diperuntukkan bagi subsidi BBM dan listrik serta rencana program stabilisasi harga komoditas pangan strategis. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2008 juga tetap diarahkan untuk memberi

stimulus pada perekonomian. Baik belanja rutin maupun belanja modal Pemerintah direncanakan meningkat, meskipun tidak setinggi laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Peningkatan pada belanja rutin antara lain terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri melalui rencana kenaikan gaji pokok sekitar 20%. Sementara itu, belanja modal Pemerintah ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Berbagai kebijakan Pemerintah tersebut pada gilirannya turut mendukung pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008.

Berdasarkan sektor ekonomi, prakiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Permintaan yang meningkat mendorong kenaikan kinerja sektor industri pengolahan. Peningkatan konsumsi masyarakat memacu pertumbuhan subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, serta subsektor industri alat angkutan. Sementara itu, pembangunan proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan diikuti oleh kenaikan kinerja subsektor industri logam dasar besi dan baja, serta subsektor industri semen dan barang galian bukan logam. Selain dipicu oleh kenaikan permintaan, pertumbuhan sektor industri pengolahan juga didukung oleh penerapan berbagai kebijakan Pemerintah yang memberi insentif bagi pengembangan sektor dimaksud, di antaranya kebijakan penghapusan bea masuk baja canai panas dan penurunan pajak penjualan barang mewah produk elektronika. Kegiatan ekonomi yang meningkat pada gilirannya akan mendorong sektor-sektor penghasil jasa, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan.

Dari sisi pembiayaan, kegiatan investasi selama tahun 2008 didukung terutama oleh modal sendiri, pembiayaan perbankan, dan belanja modal Pemerintah. Sumber dana sendiri, antara lain berupa modal usaha sendiri dan penyisihan laba, diperkirakan masih akan mendominasi pembiayaan investasi, dengan pangsa di atas 50% dari total pembiayaan. Dari sisi domestik, peran Pemerintah, perbankan, dan pasar modal diperkirakan mencapai sekitar 30%. Sementara itu, sumber dana eksternal diperkirakan akan membiayai sekitar 10% dari total pembiayaan.

Prakiraan Neraca Pembayaran

NPI selama tahun 2008 diperkirakan mencatat surplus \$11,3 miliar, sehingga posisi cadangan devisa di akhir tahun 2008 diperkirakan mencapai \$68,2 miliar atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

NPI diperkirakan menunjukkan penurunan surplus, baik pada neraca transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Di sisi neraca transaksi berjalan, surplus selama tahun tersebut diperkirakan cukup tinggi, meskipun tidak sebaik tahun sebelumnya. Di tengah kecenderungan perlambatan ekspansi ekonomi dunia, kinerja ekspor diperkirakan melambat. Namun, perlambatan yang lebih dalam sebagian dapat diredam oleh diversifikasi negara tujuan ekspor, sehingga pelemahan permintaan negara maju diperkirakan dapat dikompensasi oleh tingginya permintaan dari negara-negara berkembang seperti China, India, dan negara-negara Eropa Timur. Kinerja ekspor juga ditopang oleh harga komoditas internasional, baik migas maupun nonmigas, yang diperkirakan masih berada pada level yang cukup tinggi. Sementara itu, membaiknya kegiatan ekonomi domestik akan mendorong impor tetap tumbuh tinggi.

Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus yang tidak setinggi tahun sebelumnya. Kinerja neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh kenaikan arus modal jangka panjang sejalan dengan membaiknya iklim investasi di dalam negeri. FDI diperkirakan akan mencatat laju pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aliran modal masuk dalam bentuk portofolio diperkirakan masih besar, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Imbal hasil investasi yang tetap menarik, di tengah kondisi likuiditas global yang berlebih, mendorong minat yang cukup tinggi dari investor asing untuk menanamkan modal di negara *emerging markets*. Kenaikan aliran modal masuk terutama ditanamkan dalam bentuk surat berharga negara (SBN).

Prakiraan Nilai Tukar

Dengan prakiraan surplus neraca pembayaran yang cukup tinggi, kestabilan nilai tukar rupiah selama tahun 2008 diperkirakan akan tetap terjaga. Terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah didukung oleh membaiknya faktor fundamental sebagaimana tercermin pada surplus NPI yang tetap tinggi dan menariknya imbal hasil investasi dalam rupiah dibandingkan dengan negara kawasan. Kebutuhan impor yang meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik serta harga minyak mentah internasional yang bertahan tinggi diperkirakan akan memicu peningkatan kebutuhan akan valas. Namun, kenaikan permintaan valas tersebut diperkirakan dapat dipenuhi oleh pasokan yang memadai, sehingga nilai tukar rupiah diperkirakan dapat dijaga stabil.

Prakiraan Inflasi

Inflasi IHK pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 6,0%-6,5%, atau berada di atas kisaran sasaran yang telah

ditetapkan. Perkembangan ekonomi global, khususnya harga komoditas internasional yang bertahan tinggi, akan memberi tekanan yang cukup berat, sehingga inflasi IHK diperkirakan mengarah ke batas atas kisaran proyeksi. Tingginya harga komoditas dunia diperkirakan akan mendorong kenaikan *imported inflation* dan ekspektasi inflasi masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan inflasi inti. Namun, dengan nilai tukar yang stabil dan dukungan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, sebagian dari tekanan faktor eksternal tersebut diperkirakan dapat dimitigasi. Di sisi lain, tekanan sisi permintaan diperkirakan akan diimbangi oleh meningkatnya kegiatan investasi untuk menambah kapasitas perekonomian. Di kelompok *volatile food*, tekanan inflasi akan menurun dengan dukungan komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga pasokan bahan makanan, melalui program intensifikasi pertanian serta pemberian kekeluwesan kepada Bulog untuk melakukan impor. Di kelompok *administered prices*, kenaikan harga diperkirakan minimal sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga kelompok *administered* yang strategis.

Prakiraan Kondisi Perbankan

Dalam rangka mendukung ekspansi ekonomi, kredit perbankan selama tahun 2008 diperkirakan akan tumbuh sebesar 22%-24% yang dibarengi dengan perbaikan kualitas kredit (NPL *gross* diperkirakan tetap di bawah 5%), sehingga LDR akan mencapai sekitar 72%. Ekspansi ekonomi yang masih cukup tinggi, serta perkembangan suku bunga yang masih kondusif diperkirakan akan mampu mendorong meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Kondisi perbankan yang membaik, sebagaimana tercermin pada permodalan yang semakin kuat, turut menopang eskalasi penyaluran kredit. Akselerasi pertumbuhan kredit perbankan terutama akan didukung oleh penyaluran kredit pada sektor infrastruktur, yang diharapkan akan memberi efek pengganda pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Dana pihak ketiga yang diperkirakan tumbuh sebesar 16%-18% turut menopang kenaikan ekspansi kredit.

Kinerja perbankan syariah juga diperkirakan terus membaik sehingga pangsa diperkirakan mencapai sebesar 5% dari total aset perbankan nasional pada tahun 2008. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Prakiraan tersebut didukung oleh potensi meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan syariah seiring dengan prospek perekonomian yang masih baik serta meningkatnya daya saing produk investasi di bank syariah. Dari sisi pembiayaan, ekspansi permintaan domestik diperkirakan

akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap pembiayaan dari perbankan syariah. Jenis pembiayaan perbankan syariah masih akan didominasi oleh pembiayaan berbasis jual-beli, khususnya untuk sektor jasa dan perdagangan.

Faktor Risiko Perekonomian Indonesia Tahun 2008

Prakiraan perekonomian di atas dihadapkan pada berbagai faktor risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian proyeksi. Perkembangan harga komoditas internasional, baik minyak mentah maupun nonmigas yang lebih tinggi dari perkiraan, merupakan faktor risiko terberat yang patut dicermati. Kondisi permintaan yang tetap tinggi, kapasitas produksi yang masih terbatas, serta berbagai faktor sentimen, termasuk permasalahan geopolitik, diprakirakan akan memicu harga minyak internasional untuk tetap bertahan tinggi hingga tahun 2008. Di sisi lain, kecenderungan harga minyak mentah yang bertahan tinggi tersebut memicu upaya yang lebih gencar untuk menyediakan sumber energi alternatif. Harga pangan internasional seperti jagung dan kedelai berpotensi tumbuh tinggi terkait dengan kegiatan produksi *biofuel*. Selain itu, perubahan cuaca akibat dampak pemanasan global juga turut memberi tekanan pada harga komoditas pangan melalui gangguan di sisi produksi. Tingginya harga komoditas tersebut, di satu pihak akan memberi dampak positif pada kinerja neraca pembayaran negara pengekspor, namun di pihak lain akan memberi tekanan pada perekonomian melalui kenaikan laju inflasi.

Tingginya harga minyak dunia, yang disertai pula oleh ketidakpastian berakhirnya gejolak pasar finansial global akibat meluasnya krisis *subprime mortgage*, diprakirakan akan memengaruhi kinerja perekonomian dunia. Pelemahan ekonomi di negara maju, khususnya Amerika Serikat, diprakirakan berlanjut sehingga menurunkan optimisme akan ekspansi perekonomian global. Kondisi tersebut pada gilirannya berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakpastian akan perkembangan gejolak pasar keuangan global juga berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi. Dengan struktur arus masuk modal asing yang masih didominasi oleh dana jangka pendek dan kondisi pasar keuangan domestik yang masih relatif dangkal menyebabkan pasar keuangan Indonesia relatif lebih rentan terhadap risiko global. Berbagai faktor risiko tersebut berpotensi mengakibatkan kinerja perekonomian tidak sebaik prakiraan semula, melalui tekanan terhadap nilai tukar, peningkatan inflasi IHK maupun potensi penurunan laju pertumbuhan.

Selain akibat kenaikan harga minyak mentah internasional melebihi asumsi yang digunakan, potensi tekanan terhadap defisit APBN juga bersumber dari peningkatan

permintaan konsumsi minyak domestik yang antara lain dipicu oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, serta kemampuan produksi minyak domestik yang tidak sesuai target. Kenaikan defisit APBN tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal, yang pada gilirannya dapat memicu sentimen negatif dan memengaruhi prospek perekonomian secara keseluruhan. Sentimen negatif tersebut dapat memicu aliran keluar modal asing yang ditanamkan dalam bentuk portofolio. Akibatnya, surplus NPI berpotensi menurun, sehingga dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Lebih lanjut, pelemahan Rupiah akan meningkatkan tekanan inflasi IHK, yang pada gilirannya akan memperlambat ekspansi ekonomi.

Kegiatan investasi berpotensi terhambat akibat berbagai kendala dalam implementasi proyek infrastruktur yang belum dapat diselesaikan, antara lain ketidakjelasan peraturan pembebasan lahan, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur yang belum menunjukkan perbaikan signifikan serta risiko terjadinya bencana alam berpotensi menyebabkan gangguan pasokan barang, yang pada gilirannya dikhawatirkan akan memicu kenaikan inflasi. Risiko kenaikan harga juga dapat bersumber dari terhambatnya kelancaran program konversi minyak tanah ke elpiji yang berpotensi memicu kelangkaan komoditas tersebut, sehingga berisiko mendorong kenaikan harga minyak tanah.

Arah Kebijakan

Di bidang moneter, kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan menjaga stabilitas makroekonomi dengan terus mengupayakan agar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Kebijakan moneter yang akan ditempuh tetap mengedepankan konsistensi dan komitmen dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2008. Selain melalui kebijakan suku bunga, kebijakan moneter tersebut perlu didukung oleh kebijakan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Dalam kaitan ini, kebijakan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa masih konsisten dengan upaya untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi. Di samping itu sebagai upaya berjaga-jaga, melalui kerjasama ASEAN+3 dalam kerangka *Chiang Mai Initiatives*, Bank Indonesia memperluas kesepakatan *bilateral swap arrangements* dengan Jepang, Korea dan China. Langkah *regional self-help* ini cukup strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan di waktu-waktu mendatang.

Kebijakan moneter tersebut perlu didukung oleh penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter.

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan melakukan serangkaian langkah taktis guna lebih mengefektifkan piranti moneter dalam menyerap kelebihan likuiditas sistem perbankan. Pelaksanaan operasi pasar terbuka (OPT) akan menggunakan instrumen dengan maturitas yang lebih beragam dalam rangka menjaga stabilitas suku bunga PUAB *overnight* (O/N). Dalam hal ini, pelaksanaan OPT juga akan diperkaya dengan penggunaan instrumen FTO, transaksi repo dengan *underlying* SUN, dan *foreign exchange swap* (FX Swap). Di pasar keuangan, pelaksanaan strategi pendalaman dan perluasan basis instrumen pasar keuangan menjadi semakin penting. Pengaktifan kembali instrumen dan jenis transaksi yang telah dimiliki merupakan upaya yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pasar keuangan, yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar keuangan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan perbankan pada tahun 2008 diarahkan pada penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan akses pembiayaan usaha MKM, perluasan ke arah *universal banking*, serta melanjutkan upaya konsolidasi perbankan. Penyaluran kredit yang lebih berkualitas antara lain dilakukan melalui peningkatan kredit pada sektor produktif, dan penajakan kemungkinan pendirian kembali *policy bank*, yang berkonsentrasi pada penghimpunan dana jangka panjang untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan usaha MKM, Bank Indonesia tetap menekankan pada perluasan *linkage program*, pengembangan skim penjaminan kredit bagi usaha MKM, penurunan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit MKM, serta *redefinition* dan *redirection* peran BPR dalam pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal. Perluasan kesempatan operasional perbankan ke arah *universal banking* menjadi semakin terbuka, seiring dengan semakin tingginya tuntutan untuk melakukan inovasi produk perbankan yang terintegrasi dengan berbagai produk industri keuangan. Selain akan menopang pemenuhan kebutuhan pembiayaan, adopsi *universal banking* ke dalam sistem perbankan juga akan menopang upaya *financial market deepening*.

Upaya untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan perlu disertai dengan langkah-langkah penguatan ketahanan industri perbankan. Bank Indonesia akan tetap melanjutkan upaya konsolidasi perbankan, antara lain dengan menyusun ketentuan terkait dengan kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) dan Bank Jangkar, selain melakukan pemeriksaan atas efektivitas peningkatan modal perbankan menjadi Rp80 miliar. Persiapan

terhadap implementasi Basel II, utamanya yang terkait dengan tiga pilar yaitu kebutuhan modal minimum, proses *review* pengawasan, dan disiplin pasar, juga akan terus dilaksanakan.

Kebijakan perbankan juga akan diarahkan untuk meningkatkan transparansi perbankan kepada masyarakat serta pencanangan tahun Edukasi Perbankan. Pada pertengahan tahun 2008 seluruh bank diharapkan telah menerapkan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sebaik-baiknya dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada masyarakat. Tahun 2008 juga akan menjadi tahun Edukasi Perbankan, seiring dengan dimulainya program edukasi masyarakat di bidang perbankan secara komprehensif, terintegrasi, dan terkoordinasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan industri perbankan. Dengan program tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin terberdayakan dan mampu memilih serta memanfaatkan produk dan jasa perbankan secara lebih terencana dan bijaksana. Selain itu, perbankan juga diharapkan berperan dalam pengembangan aspek sosial masyarakat melalui penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Terkait dengan hal itu, CSR industri perbankan dapat diarahkan pada upaya-upaya strategis di bidang pendidikan sebagai sumbangan terhadap peningkatan kualitas bangsa.

Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi serta efektivitas kebijakan moneter dan perbankan, kebijakan pengedaran uang pada tahun 2008 tetap diarahkan untuk meningkatkan pengedaran uang yang aman, handal, dan efisien; meningkatkan layanan kas prima; dan meningkatkan kualitas uang. Beberapa kebijakan yang telah ditempuh akan terus dilaksanakan, seperti penerapan strategi distribusi uang yang aman, efektif, dan efisien, serta kebijakan untuk menanggulangi peredaran uang palsu melalui upaya memperkuat infrastruktur di Bank Indonesia dan meningkatkan kerjasama pemberantasan uang palsu dengan pihak terkait. Selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan uji coba implementasi *cash centre* di wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia dan beberapa Kantor Bank Indonesia di daerah sebagai bagian dari strategi pengelolaan uang kartal oleh pihak eksternal. Selain itu, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan usia edar yang lebih lama, pada tahun 2008 Bank Indonesia merencanakan untuk mengeluarkan uang kertas pecahan Rp2.000.

Di bidang pembayaran nontunai, arah kebijakan ditujukan untuk melakukan pengendalian risiko, peningkatan efisiensi, kesetaraan akses (*equitable access*) dan prinsip perlindungan konsumen. Guna mendukung

stabilitas sistem keuangan, upaya untuk memitigasi risiko operasional sistem pembayaran ditempuh antara lain dengan terus melakukan uji coba *disaster recovery planning* untuk menjaga kehandalan dan kelangsungan operasional sistem pembayaran (RTGS dan SKN) serta pengkajian kemungkinan penyelenggaraan transfer valas dengan mekanisme *payment versus payment* (PVP) sistem pembayaran dan pengembangan model mitigasi risiko transfer dana. Upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui penyelenggaraan jaringan APMK untuk menerapkan prinsip *interoperability*, sedangkan penerapan prinsip kesetaraan akses dituangkan melalui ketentuan penyelenggaraan sistem dengan menegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai regulator, penyelenggara, dan peserta. Sementara itu, prinsip perlindungan konsumen akan diupayakan dengan menerbitkan ketentuan penyelenggaraan *e-money* dan menerapkan secara luas ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang.

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas kebijakan Bank Indonesia, upaya koordinasi dengan kebijakan makroekonomi lainnya akan terus diperkuat. Upaya menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dengan struktur yang lebih sehat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Prasyarat penting untuk itu di antaranya adalah peningkatan daya saing perekonomian melalui perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan

infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, upaya untuk menyelaraskan berbagai kebijakan akan terus ditempuh. Jalinan koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang telah terbentuk akan terus diperkuat. Dalam upaya pengendalian inflasi, disamping Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok, koordinasi kebijakan juga dilakukan melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian. Di tingkat daerah, peran KBI bagi pemberdayaan dan percepatan pembangunan ekonomi di daerah, serta upaya pengendalian inflasi di daerah akan terus diperkuat, salah satunya melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan koordinasi antara KBI dan instansi terkait. Di bidang sistem pembayaran, sejalan dengan penerapan *Treasury Single Account*, Bank Indonesia akan melengkapi aplikasi *government e-banking* (BIG-eB) dengan berbagai modul transaksi dan informasi untuk aktivitas transaksi keuangan Pemerintah. Selain itu, untuk menjaga dan memperkuat stabilitas sistem pasar keuangan, koordinasi dalam Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK), yang merupakan kerjasama antara Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan terus diperkuat. Selama tahun 2008, FSSK merencanakan akan melakukan finalisasi *Crisis Management Protocol*, *Macro Early Warning System*, seraya tetap melanjutkan berbagai program yang terdapat dalam Inisiatif Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia.

Strategi Komunikasi, Kebijakan Moneter, dan Kredibilitas Bank Sentral

Satu hal menarik yang dapat dilihat di Bank Indonesia sejak beberapa tahun terakhir adalah keterbukaannya pada publik, khususnya terkait dengan kebijakan moneter. Sebelumnya, pengambilan keputusan di bidang moneter dilaksanakan tertutup dan hasilnya tidak diumumkan secara luas kepada publik. Kini, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan moneter maupun memperoleh hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dilaksanakan setiap bulan. Bank Indonesia juga membuka diri terhadap masyarakat yang ingin belajar dan memahami kebijakan moneter. Berbagai sarana komunikasi lainnya, seperti *website*, *workshop*, seminar, kunjungan pelajar/mahasiswa, dan pertemuan-pertemuan formal maupun informal, dibentuk sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan moneter dan perekonomian nasional. Bank Indonesia, kini berupaya untuk semakin dekat dengan masyarakat.

Upaya mendekatkan diri Bank Indonesia ke masyarakat, tidak terlepas dari kerangka kebijakan moneter yang dianutnya sejak tahun 2005. Diimplementasikannya *Inflation Targeting Framework* (ITF) sebagai kerangka kerja kebijakan moneter di Indonesia telah memengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter itu sendiri. ITF memperkenalkan kepada masyarakat sebuah logika berpikir baru atas langkah kebijakan yang ditempuh bank sentral. ITF juga telah mengubah secara struktural pendekatan komunikasi bank sentral selama ini¹. Kebijakan bank sentral kini secara konsisten diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi di masa depan, yaitu pada jangka menengah panjang. Untuk mencapai sasaran itu, komunikasi merupakan ujung tombak dalam pembentukan kredibilitas bank sentral.

Saat ini, para praktisi bank sentral memahami bahwa kredibilitas adalah salah satu elemen terpenting yang

menentukan efektivitas kebijakan moneter. Pada tahun 1960 dan 1970an, para pengambil kebijakan belum sepenuhnya memahami hubungan antara determinan kredibilitas dengan hasil kebijakan. Namun, pada tahun 1977, Finn Kydland dan Edward Prescott menerbitkan tulisan yang berjudul "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans" (Kydland and Prescott, 1977), yang memaparkan sebuah analisis yang tajam terkait dengan kredibilitas otoritas pengambil keputusan. Secara khusus, Kydland dan Prescott menunjukkan bagaimana, dalam banyak situasi, indikator perekonomian akan memberikan hasil yang lebih baik apabila para pembuat kebijakan mampu membuat pernyataan yang kredibel, atau janji, tentang aspek-aspek tertentu dari kebijakan yang akan mereka lakukan di masa depan. "Kredibel" dalam konteks ini berarti publik percaya bahwa pembuat kebijakan akan menepati janjinya, walaupun muncul godaan untuk melanggar janji itu.

Secara khusus, Kydland dan Prescott memberikan contoh bahwa bank sentral akan cenderung mengumumkan atau memberi komitmen kepada masyarakat untuk mencapai target inflasi yang rendah. Bila pernyataan ini dipercaya publik (bank sentral kredibel), maka publik akan meyakini pernyataan tersebut. Selanjutnya, permintaan akan kenaikan upah dan harga-harga pun menjadi moderat dan disesuaikan dengan ekspektasi yang terbangun. Perilaku masyarakat tersebut akan menjadikan komitmen bank sentral untuk mewujudkan tingkat inflasi yang rendah menjadi mudah dicapai. Sebaliknya, jika publik skeptis akan komitmen bank sentral untuk mencapai inflasi pada tingkat yang rendah (misalnya mereka percaya bahwa bank sentral akan tergoda untuk lebih populis dengan mengorbankan pencapaian jangka panjang), maka ekspektasi publik akan inflasi menjadi lebih tinggi lagi. Ekspektasi publik akan inflasi yang lebih tinggi di masa depan pada gilirannya akan mengarah pada kenaikan harga-harga, yang akhirnya menjadikan upaya mencapai dan menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil menjadi sulit serta mahal bagi bank sentral. Di sinilah kredibilitas bank sentral menjadi besar peranannya dalam pencapaian target inflasi.

¹ Kini telah banyak ditulis hubungan antara komunikasi bank sentral dalam kerangka ITF. Referensi awal dari Leiderman and Svensson (1995) dan pemikiran dasar dari Svensson (1999). Beberapa pandangan umum dapat ditemukan dalam Bernanke et al. (1998), Loayza and Soto (2001), Mishkin and Schmidt-Hebbel (2001) dan Gjedrem (2001). Eksperimen masing-masing Negara telah pula dievaluasi oleh Kohn (2000) untuk Inggris, Svensson (2001) untuk New Zealand, dan Svensson et al. (2002) untuk Norwegia.

Dalam pandangan teoritis, pentingnya kredibilitas bank sentral didukung oleh beberapa pandangan seperti aliran *New Macroeconomics of Monetary Policy* dengan pandangan *New Neoclassical Synthesis* (NNS) atau pendekatan *New Keynesian Economics*. *Benchmark* dari pendekatan NNS memuat berbagai fitur ekonomi klasik, seperti *real business cycle* (RBC), *intertemporal optimization*, dan *rational expectation*. Pendekatan NNS juga memuat fitur Keynesian, seperti *monopolistically competitive firms*, *a markup of price over marginal cost*, dan *sticky prices* (*costly price adjustment*). Pemahaman terhadap teori tersebut membantu bank sentral untuk mengerti dan dapat menjelaskan kepada publik, bagaimana kebijakan moneter memperoleh dan mempertahankan kredibilitas akan inflasi yang rendah, dan mengapa *inflation targeting* dapat meningkatkan stabilitas baik inflasi dan output secara seimbang.

Di Indonesia, laju inflasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, komoditas makanan yang harganya bergejolak (*volatile food*), biasanya ditentukan oleh faktor musim panen, keterbatasan pasokan, ataupun gangguan distribusi dan bencana alam. Kedua, harga kelompok komoditas yang diatur oleh Pemerintah (*administered prices*) seperti BBM dan listrik. Ketiga, adalah faktor inflasi inti (*core inflation*) yang terdiri dari inflasi yang berasal dari keseimbangan permintaan dan penawaran (*output gap*), inflasi yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti nilai tukar dan kenaikan harga komoditas internasional, serta faktor ekspektasi inflasi masyarakat. Dari berbagai determinan inflasi tersebut, salah satu faktor pembentuk inflasi yang dominan di Indonesia adalah masih tingginya ekspektasi inflasi masyarakat.

Pembentukan ekspektasi masyarakat tersebut disebabkan oleh dua faktor, pertama ekspektasi adaptif atau *backward looking*, di mana pembentukan inflasi ditentukan oleh pandangan subyektif pelaku ekonomi berdasarkan data dan peristiwa ekonomi di masa lalu. Pandangan subyektif inilah yang masih dominan mewarnai pembentukan ekspektasi masyarakat di Indonesia. Kedua, ekspektasi rasional atau *forward looking*, pembentukan inflasi terjadi berdasarkan skenario moneter yang diproyeksikan ke depan oleh bank sentral yang dalam hal ini memiliki sasaran inflasi. Proyeksi moneter ke depan inilah yang diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna mengarahkan perilaku para pelaku ekonomi. Pencapaiannya tentu membutuhkan kredibilitas dari bank sentral, adanya saling percaya (*mutual trust*) antara bank sentral dan masyarakat.

Di sinilah strategi komunikasi menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Secara terstruktur, strategi komunikasi kebijakan moneter di Bank Indonesia merupakan bagian dari strategi komunikasi Bank Indonesia secara keseluruhan. Strategi itu disusun sebagai pedoman Bank Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan publik, memengaruhi ekspektasi, dan pada ujungnya membangun kredibilitas bank sentral. Berbagai kegiatan komunikasi di bidang moneter, telah dilakukan sejak tahun 2005 dan mulai dibakukan dalam strategi komunikasi kebijakan moneter pada tahun 2007.

Strategi komunikasi kebijakan moneter disusun hingga tahap operasional. Strategi tersebut memuat beberapa hal yaitu; tujuan akhir (*main objectives*), *target group* (*stakeholders*), dan instrumen komunikasi (*communication tools*). Penyampaian materi komunikasi dilakukan secara transparan, komprehensif, dan dapat diprediksi sebelumnya (*predictable*). Komunikasi kebijakan moneter dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan faktual. Upaya melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi penting sebagai prasyarat strategi komunikasi yang efektif. Fokus komunikasi ataupun edukasi kebijakan moneter Bank Indonesia saat ini diarahkan pada media massa, pelaku pasar keuangan dan perbankan, pengamat ekonomi, kalangan industri (Asosiasi-asosiasi bisnis, Kadin dll), akademisi, mahasiswa, pelajar, politisi, anggota DPR, LSM, serta masyarakat umum.

Ke depan, langkah komunikasi kebijakan moneter di Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat. Pemahaman masyarakat yang masih beragam, ekspektasi publik akan laju inflasi dan prospek perekonomian ke depan, serta belum optimalnya kredibilitas dari bank sentral, menjadi faktor yang menambah berat tantangan tersebut. Upaya mewujudkan laju inflasi yang rendah dan stabil bukanlah proyek yang mudah dan sekali jadi, melainkan sebuah langkah besar yang panjang dan berliku. Dalam hal ini, kredibilitas bank sentral menjadi kunci. Tanpa kredibilitas, yang muncul adalah kepercayaan publik yang rendah dan berdampak pada perilaku publik yang tidak diharapkan. Kebanksentralan di zaman moden ini adalah menyangkut manajemen ekspektasi. Oleh karenanya, upaya bersama dari segenap elemen bangsa untuk menjaga kredibilitas bank sentral menjadi sangat strategis dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.



Bab 2

Kondisi Makroekonomi

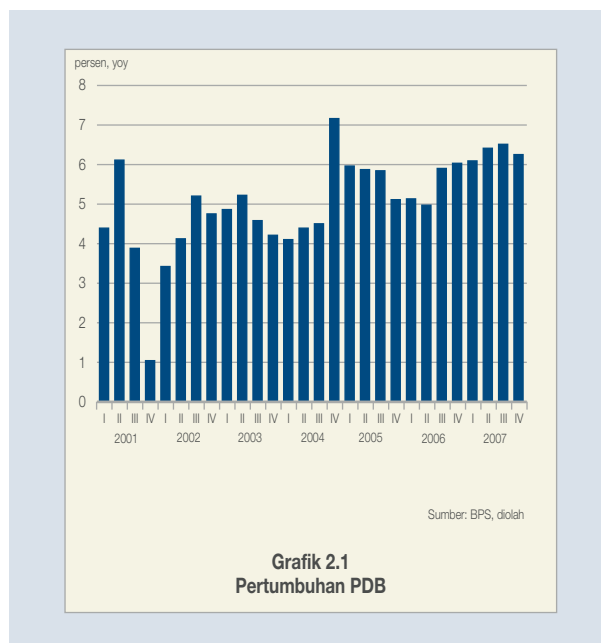
Bab 2: Kondisi Makroekonomi

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pascakrisis yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh dan terjaga baik. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan investasi seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan prospek ekonomi. Meskipun sedikit melambat, ekspor tetap tumbuh tinggi di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia. Ekspansi di sisi permintaan tercermin pula pada peningkatan utilisasi kapasitas produksi di hampir semua sektor ekonomi. Beberapa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi diikuti pula dengan penyerapan angkatan kerja yang lebih tinggi, pendapatan per kapita yang meningkat dan indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan yang menurun.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, bahkan merupakan pencapaian tingkat pertumbuhan tertinggi pascakrisis. Secara keseluruhan perekonomian berkembang menuju kondisi yang lebih baik meskipun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang bersumber baik dari sisi global maupun domestik. Dari sisi eksternal, dampak lonjakan harga minyak dan krisis *subprime mortgage* di AS dapat diminimalkan sehingga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan defisit fiskal tetap terjaga. Terciptanya stabilitas makroekonomi di dalam negeri serta perbaikan daya beli masyarakat memberikan landasan yang kokoh dan kondusif bagi penguatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007. Setelah menurun menjadi 5,5% (yoy) pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan pada tahun 2007 hingga mencapai 6,3% (yoy) (Grafik 2.1).

Di sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang impresif tercermin pada peningkatan pertumbuhan permintaan domestik serta relatif tingginya ekspor. Pada paruh pertama tahun 2007, daya beli masyarakat, yang menurun pada tahun 2006 pascakenaikan harga BBM tahun 2005, berangsur membaik sehingga mendorong peningkatan konsumsi swasta. Investasi yang sempat melambat sejalan dengan berkurangnya daya dorong permintaan domestik, mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ekspor di awal tahun masih tumbuh tinggi

didukung oleh permintaan dunia dan harga internasional yang masih menarik, terutama untuk komoditas berbasis sumber daya alam. Impor masih tumbuh tinggi sejalan dengan perbaikan permintaan domestik dan ekspor. Pada paruh kedua, pulihnya daya beli masyarakat telah mendorong konsumsi swasta tumbuh tinggi. Investasi terus tumbuh dengan tren yang meningkat terutama bersumber dari penguatan permintaan dalam negeri.



Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Persen

Rincian	2004	2005	2006*	2007**				2007**
				I	II	III	IV	
Total Konsumsi	4,9	4,3	3,9	4,6	4,6	5,3	5,1	4,9
Konsumsi Swasta	5,0	4,0	3,2	4,7	4,7	5,1	5,6	5,0
Konsumsi Pemerintah	4,0	6,6	9,6	3,7	3,8	6,5	2,0	4,0
Investasi ¹	14,2	10,8	2,9	7,0	6,9	10,4	12,1	9,1
Permintaan Domestik	9,1	5,3	3,3	-0,8	3,4	4,4	9,6	4,2
Net Ekspor	-23,1	13,6	15,6	6,8	25,0	6,7	-14,2	6,1
Ekspor Barang dan Jasa	11,1	16,4	9,2	8,1	9,8	6,9	7,3	8,0
Impor Barang dan Jasa	25,2	17,1	7,6	8,5	6,5	7,0	13,6	8,9
PDB	4,9	5,7	5,5	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3
Distribusi PDB (%)								
Total Konsumsi	68,2	67,3	66,3	64,4	65,2	63,8	68,2	65,4
Konsumsi Swasta	60,6	59,6	58,3	57,8	57,3	56,3	58,9	57,6
Konsumsi Pemerintah	7,6	7,7	8,0	6,5	7,9	7,4	9,3	7,8
Investasi ¹	21,4	22,5	21,9	21,5	22,0	22,5	23,6	22,4
Ekspor Barang dan Jasa	41,1	45,2	46,8	47,0	48,0	46,9	49,1	47,8
Impor Barang dan Jasa	32,8	36,3	37,0	36,8	38,2	38,8	40,2	38,5

Sumber: BPS, diolah

1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ekspor tumbuh melambat di akhir tahun seiring dengan perlambatan permintaan global. Sementara itu, impor tumbuh tinggi di akhir tahun sejalan dengan kuatnya permintaan domestik.

Di sisi sektoral, seluruh sektor tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Sektor-sektor yang tumbuh signifikan adalah sektor transportasi dan komunikasi, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara itu, sektor industri, perdagangan dan pengangkutan masih merupakan sektor penopang utama pertumbuhan. Sementara pangsa utama sektor-sektor terhadap perekonomian tidak mengalami perubahan yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Kebijakan sektor riil diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang terkait dengan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Paket kebijakan tersebut merupakan penguatan kebijakan-kebijakan lintas sektoral yang telah ada dan penerbitan kebijakan-kebijakan baru. Paket kebijakan tersebut mencakup perbaikan iklim investasi, reformasi sistem keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM yang dibagi ke dalam: i) paket perbaikan iklim investasi; ii) reformasi sistem keuangan; iii) percepatan pembangunan infrastruktur; dan iv)

pemberdayaan UMKM. Sampai dengan November 2007, Pemerintah telah berhasil menyelesaikan sebagian besar target yang ditetapkan dalam Inpres tersebut. Di bidang kesejahteraan, kebijakan-kebijakan dilakukan antara lain percepatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna membantu siswa tidak mampu serta berbagai kebijakan lainnya.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 juga diiringi oleh pengurangan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Ekspansi perekonomian pada tahun 2007 mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibanding penambahan angkatan kerja. Konsekuensinya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 turun menjadi 10,5 juta orang dibandingkan dengan 11,1 juta orang pada tahun 2006. Penurunan angka pengangguran tersebut pada gilirannya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dari 39,30 juta orang (17,7% dari total penduduk) pada tahun 2006 menjadi 37,17 juta orang (16,6% dari total penduduk) pada tahun 2007. Perbaikan di bidang kesejahteraan ini memberikan dampak positif pada beberapa indikator yang ditargetkan di dalam Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 (*Millenium Development Goals* 2015) khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, penurunan tingkat kematian anak, dan peningkatan jumlah anak yang memperoleh pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2.2
Kenaikan Gaji Berdasarkan Tingkat Manajemen

Tingkat Manajemen	Kenaikan Rata-rata		
	2005	2006	2007*
Kerah Biru	9,9	12,3	12,7
Klerk	9,8	13,1	13,8
Manajemen Junior	9,8	13	13,7
Manajemen Menengah	9,6	12,8	13,9
Manajemen Senior	9,4	12,8	13,6
Keseluruhan	9,7	13	13,8

Sumber: SWA, Februari 2007
* perkiraan

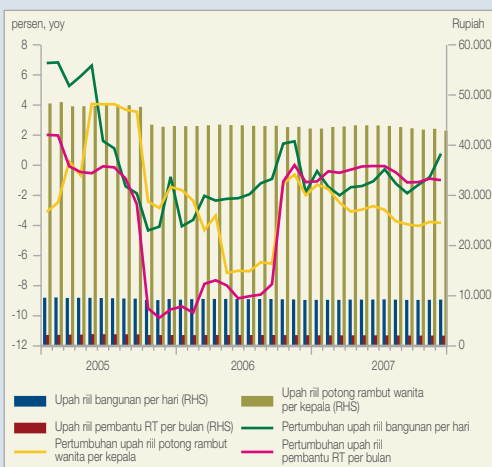
Permintaan Agregat

Dari sisi permintaan, membaiknya daya beli masyarakat dan tingginya permintaan dunia terhadap produk ekspor Indonesia, menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007. Pada paruh pertama tahun 2007, perbaikan daya beli masyarakat yang didukung oleh keyakinan konsumen terhadap peningkatan pendapatan mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi swasta yang signifikan. Ditopang oleh tingginya permintaan dunia terhadap komoditas pertanian dan pertambangan, ekspor masih tumbuh tinggi. Investasi juga tumbuh dengan tren yang meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi swasta. Sementara itu impor, terutama impor barang konsumsi dan bahan baku, tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik dan ekspor. Pada paruh kedua, pertumbuhan ekonomi masih disumbang terutama oleh permintaan domestik yang tumbuh tinggi. Sementara itu, seiring dengan perlambatan perekonomian global, sumbangan ekspor cenderung mengalami

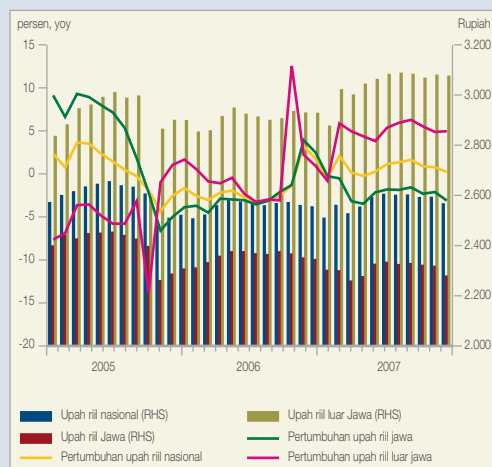
penurunan. Pada saat yang bersamaan impor tumbuh dengan tren yang meningkat.

Pertumbuhan konsumsi swasta tahun 2007 meningkat mencapai 5,0% didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat pada tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM berangsur-angsur pulih pada tahun 2007. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi swasta yang terus tumbuh dengan tren yang meningkat sejak awal tahun hingga menjadi 5,0% (yoy) pada tahun 2007, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,2% (yoy). Pulihnya daya beli masyarakat tersebut dirasakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Gaji kelompok masyarakat golongan menengah ke atas yang bekerja pada sektor formal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13% (yoy) pada tahun 2007 (Tabel 2.2). Sementara itu, upah pekerja di sektor informal, yang menunjukkan daya beli masyarakat golongan bawah, meskipun belum mengalami peningkatan signifikan, terus menunjukkan perbaikan (Grafik 2.2 dan 2.3).

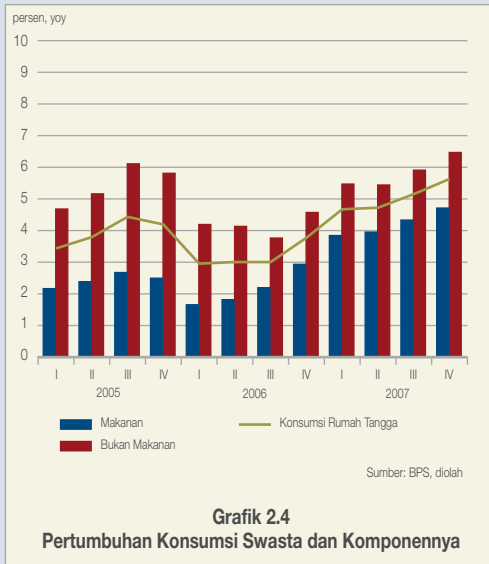
Berdasarkan komponennya, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2006 (Grafik 2.4). Konsumsi bukan makanan tumbuh sebesar 5,8% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 4,1%. Peningkatan konsumsi bukan makanan tercermin dari peningkatan signifikan penjualan barang tahan lama seperti pembelian kendaraan bermotor dan barang elektronik. Pembelian kendaraan bermotor selama tahun 2007 tumbuh sebesar 36,3% atau membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 40,2%



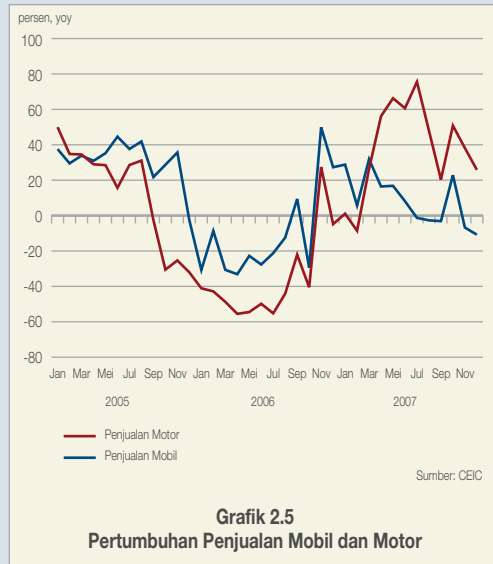
Grafik 2.2
Upah Buruh Informal Perkotaan



Grafik 2.3
Upah Buruh Tani



Grafik 2.4
Pertumbuhan Konsumsi Swasta dan Komponennya



Grafik 2.5
Pertumbuhan Penjualan Mobil dan Motor

(Grafik 2.5). Sementara itu, pembelian sepeda motor yang tumbuh negatif sebesar 12,8% meningkat menjadi sebesar 5,8%. Pembelian barang elektronik antara lain televisi dan mesin cuci meningkat menjadi sebesar 21,3% dan 33,3% pada tahun 2007 (Tabel 2.3). Tren peningkatan konsumsi ini juga tercermin pada pertumbuhan M1 riil yang meningkat pada tahun 2007 (Grafik 2.6).

Keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian juga merupakan pendorong perbaikan konsumsi swasta. Sejak awal tahun 2007, keyakinan konsumen diindikasikan terus mengalami perbaikan. Hal ini diperlihatkan oleh Survei Konsumen-Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan tren



Grafik 2.6
Pertumbuhan M1 Riil

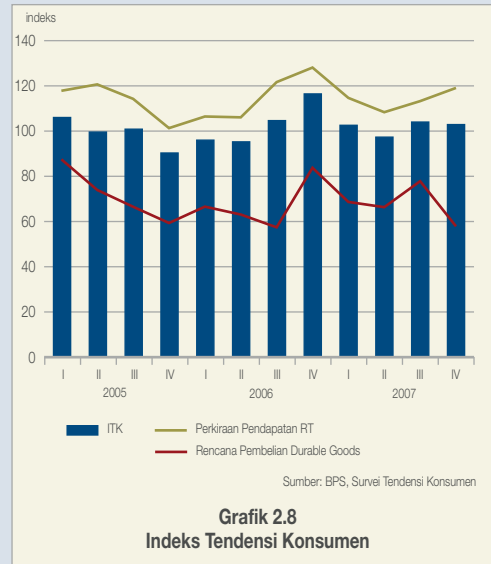
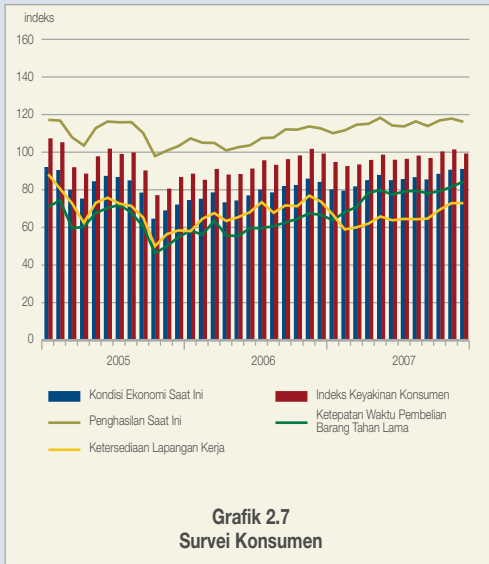
peningkatan sejak awal tahun. Komponen pembentuk indeks keyakinan konsumen di Survei Konsumen-BI terus menunjukkan peningkatan (Grafik 2.7). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penghasilan saat ini, kondisi ekonomi, dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara ekspektasi pendapatan yang berasal dari Survei Tendensi Konsumen-BPS juga berada pada level optimis yang terutama berasal dari perbaikan perkiraan pendapatan rumah tangga (Grafik 2.8). Selain itu, penurunan suku bunga pinjaman hingga pertengahan tahun diperkirakan juga memengaruhi peningkatan konsumsi swasta.

Dari sisi pembiayaan, percepatan pertumbuhan konsumsi swasta didukung oleh kredit konsumsi dan pembiayaan nonbank. Kredit konsumsi maupun pembiayaan nonbank tumbuh lebih tinggi seiring dengan penurunan suku bunga. Realisasi kredit konsumsi pada tahun 2007 sebesar 17,5%, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 16,8%. Selain itu, pembiayaan konsumen pada tahun 2007 secara rata-rata juga tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata tahun sebelumnya (Grafik 2.9 dan Grafik 2.10).

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penjualan Produk Elektronik

Produk	2005	2006	2007
Televisi	-4,10	-3,77	21,26
Lemari Es	21,07	-11,76	23,27
AC	26,03	-13,48	34,85
Mesin Cuci	16,71	4,24	33,34

Sumber: Electronic Marketing Club.



Berbeda dengan perkembangan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah tumbuh melambat. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 4,0% melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,6% seiring dengan realisasi APBN yang lebih rendah. Berdasarkan komponennya perlambatan terutama terjadi pada belanja pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, belanja lain-lain dan Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh negatif.

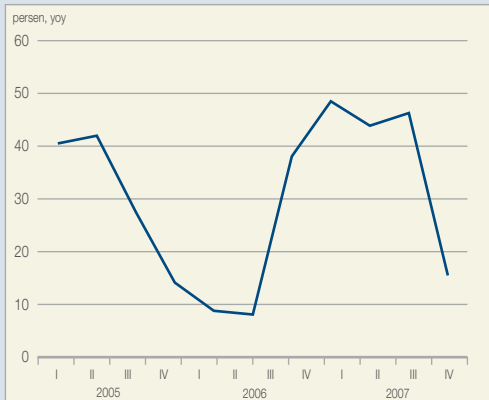
Merespons perbaikan permintaan, investasi juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, investasi tumbuh sebesar 9,2%



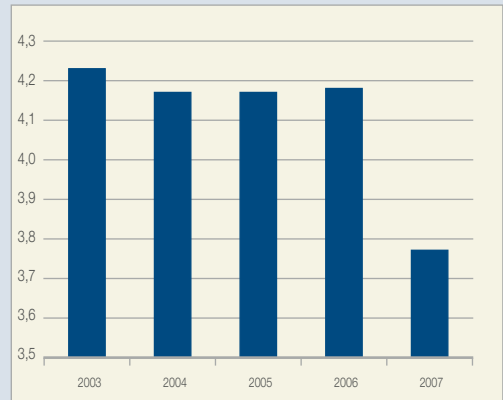
(yoy) meningkat dibandingkan dengan 2,5% pada tahun 2006. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan yang berasal baik dari domestik maupun eksternal pada paruh pertama tahun 2007 serta peningkatan konsumsi swasta yang tinggi hingga akhir tahun. Peningkatan pertumbuhan terjadi baik pada investasi bangunan maupun nonbangunan. Kondisi itu juga didukung oleh efisiensi penggunaan kapital yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya penanaman modal disektor yang padat teknologi. Pada tahun 2007, *incremental capital output ratio* (ICOR)¹ mengalami penurunan (perbaikan) menjadi sebesar 3,8, lebih rendah dari angka tahun 2006 sebesar 4,2 (Grafik 2.11) maupun rata-rata 4 (empat) tahun terakhir. Dengan perkembangan tersebut, rasio investasi terhadap PDB (riil) meningkat secara perlahan mencapai 22,4%, namun masih berada di bawah angka tertingginya pada periode sebelum krisis (Grafik 2.12).

Dari sisi komponennya, akselerasi pertumbuhan investasi terutama didorong oleh pertumbuhan investasi nonbangunan yang mencapai 10,1% (yoy) (Grafik 2.13). Peningkatan pertumbuhan investasi nonbangunan tersebut tercermin pada tren pertumbuhan penjualan alat angkut berat yang meningkat pada tahun 2007 (Grafik 2.14). Sementara itu, investasi bangunan tumbuh stabil sebesar 8,6% (yoy). Perkembangan investasi bangunan tersebut sejalan dengan perkembangan penjualan semen yang relatif tetap selama tahun 2007 (Grafik 2.15).

¹ ICOR adalah angka rasio antara tambahan modal terhadap tambahan output atau besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.



Grafik 2.10
Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi Lainnya



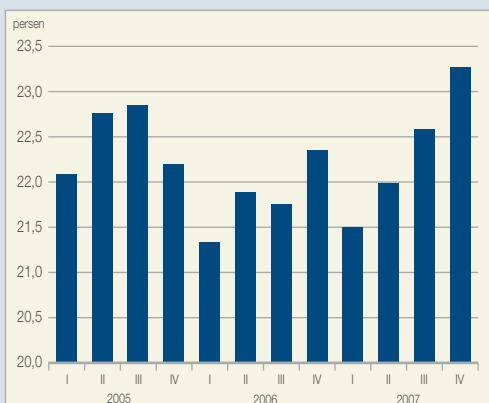
Grafik 2.11
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Perkembangan investasi berdampak pada peningkatan kapasitas perekonomian sehingga tercermin pada tren akumulasi kapital yang meningkat. Berbagai permasalahan terkait prasarana untuk kegiatan produksi mulai mengindikasikan perbaikan seiring meningkatnya tren akumulasi kapital secara perlahan (Grafik 2.16). Di sisi lain, membaiknya pertumbuhan investasi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga tekanan inflasi dari sisi *output gap* menjadi minimal.

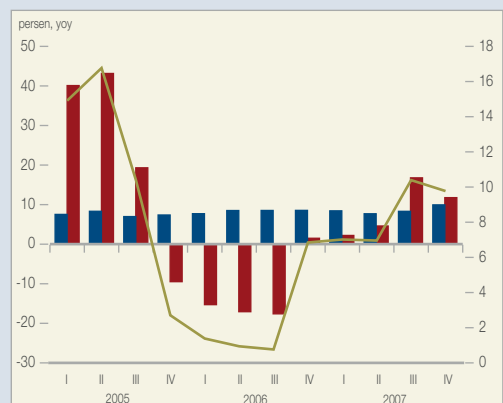
Meningkatnya pertumbuhan investasi didukung oleh membaiknya sentimen bisnis pengusaha terhadap kondisi perekonomian. Survei BPS memperlihatkan bahwa

sentimen pelaku bisnis akan kondisi perekonomian ke depan membaik, khususnya yang terkait dengan kondisi permintaan dalam negeri dan permintaan akan barang *input* (Grafik 2.17). Searah dengan survei BPS, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang terkait dengan realisasi investasi memberikan indikasi bahwa realisasi nilai investasi pada semester II-2007 meningkat bila dibandingkan dengan semester I-2007 (Grafik 2.18).

Peningkatan investasi tercermin pada kesenjangan tabungan-investasi (*saving-investment gap*). Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang meningkat, rasio kesenjangan tabungan-investasi terhadap PDB juga



Grafik 2.12
Distribusi PMTB terhadap PDB



Grafik 2.13
Pertumbuhan Komponen Investasi



Grafik 2.14
Pertumbuhan Penjualan Alat Angkut Berat

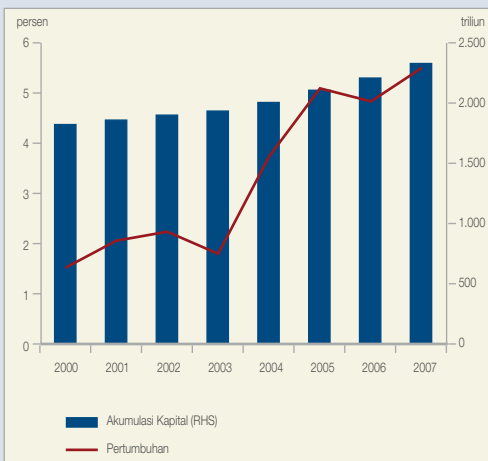


Grafik 2.15
Pertumbuhan Konsumsi Semen

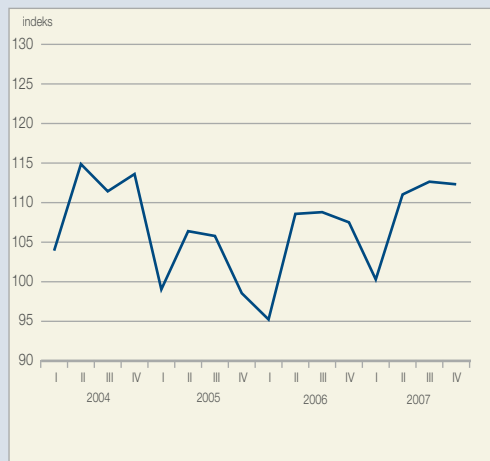
mengalami penurunan dari 2,7% pada tahun 2006 menjadi 2,5% pada tahun 2007. Namun, penurunan surplus kesenjangan tabungan-investasi tersebut lebih berasal dari peningkatan defisit Pemerintah, dari -0,9% menjadi -1,2%. Sementara itu, surplus di sektor swasta mengalami peningkatan dari 3,6% menjadi 3,8%, meskipun pertumbuhan investasi swasta meningkat.

Walaupun demikian, kegiatan investasi masih dihadapkan pada kendala iklim investasi yang kurang kondusif bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti

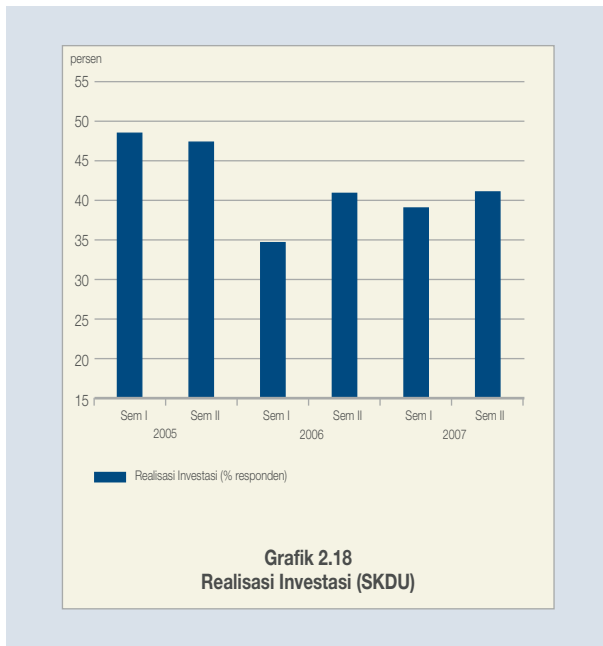
belum tersedianya infrastruktur secara memadai serta permasalahan peraturan terkait investasi. Berdasarkan survei Doing Business 2008 oleh International Financial Corporation, peringkat daya saing Indonesia menunjukkan perbaikan dari posisi 133 menjadi 123 pada tahun 2007 (Tabel 2.5). Namun peringkat Indonesia tersebut tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam. Selain survei tersebut, World Economic Forum juga menunjukkan peringkat Indonesia tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, daya saing Indonesia hanya mengungguli daya saing Vietnam dan Filipina (Tabel 2.6).



Grafik 2.16
Akumulasi Kapital



Grafik 2.17
Indeks Tendensi Bisnis



Perkembangan ekspor barang dan jasa terkait dengan tingginya permintaan dunia. Pada tahun 2007, ekspor masih tumbuh tinggi sebesar 8,0% (yoy) meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekspor terutama berasal dari tingginya permintaan dunia di paruh pertama tahun 2007 (Grafik 2.19). Menjelang akhir paruh kedua tahun 2007, kondisi eksternal berkembang menjadi kurang kondusif sehubungan dengan berlanjutnya kasus *subprime mortgage* AS yang mulai berdampak pada penurunan permintaan global. Namun kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekspor.

Pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi tersebut terutama didukung oleh ekspor komoditas ekstraktif yaitu komoditas tambang seperti, ekspor batu bara dan nikel (Grafik 2.20) dan komoditas pertanian seperti minyak

Tabel 2.4
Kesenjangan Tabungan – Investasi

	2005	2006	2007
	Rasio terhadap PDB (%)		
Pemerintah			
Tabungan	2,4	2,2	2,2
Investasi	2,9	3,1	3,4
Defisit/Surplus	-0,5	-0,9	-1,3
Swasta			
Tabungan	21,3	24,6	25,2
Investasi	20,7	21,0	21,5
Defisit/Surplus	0,6	3,6	3,8
Total			
Tabungan	23,7	26,8	27,4
Investasi	23,6	24,1	24,9
Defisit/Surplus	0,1	2,9	2,5
Keterangan:			
PDB (Triliun Rp), tahun dasar 2000	2.774,3	3.339,5	3.957,4
Transaksi Berjalan (Juta \$)	278	10.836	11.009
Rata-rata Kurs (Rp/\$)	9.713	9.167	9.140

Sumber: BPS, Depkeu, diolah

sawit dan karet (Grafik 2.21). Sementara itu, komoditas sektor industri pengolahan yang menonjol adalah barang kimia dan produk karet (Grafik 2.22). Pada tahun 2007 permintaan dunia akan batu bara dan minyak sawit meningkat tajam sehubungan dengan diversifikasi energi akibat melambungnya harga minyak.

Sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi, impor barang dan jasa juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006. Pertumbuhan impor barang dan jasa yang mencapai 8,9% (yoy) terutama ditunjang oleh pertumbuhan barang konsumsi dan bahan baku yang tumbuh tinggi (Grafik 2.23). Pertumbuhan impor barang konsumsi yang lebih tinggi disebabkan oleh ekspansi konsumsi masyarakat seiring perbaikan daya beli. Sementara kenaikan pertumbuhan impor bahan baku

Tabel 2.5
Peringkat Indonesia – Iklim Melakukan Usaha/Investasi

Negara	Kemudahan Melakukan Bisnis		Memulai Bisnis		Perizinan		Ketenagakerjaan		Perlindungan Investor		Kepatuhan Kontrak		Menutup Bisnis	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Indonesia	133	123	163	168	117	99	154	153	49	51	142	141	137	136
Malaysia	21	24	74	74	102	105	43	43	4	4	14	63	53	54
Vietnam	94	91	90	97	62	63	82	84	175	165	41	40	119	121
Thailand	17	15	27	36	11	12	49	49	32	33	26	26	41	44
China	92	83	128	135	175	175	86	86	81	83	20	20	76	57
Filipina	130	133	135	144	75	77	122	122	141	141	113	113	147	147
Singapura	1	1	11	9	5	5	1	1	2	2	5	4	0,8	2

Sumber: IFC, diolah

Tabel 2.6
Peringkat Indonesia – Daya Saing

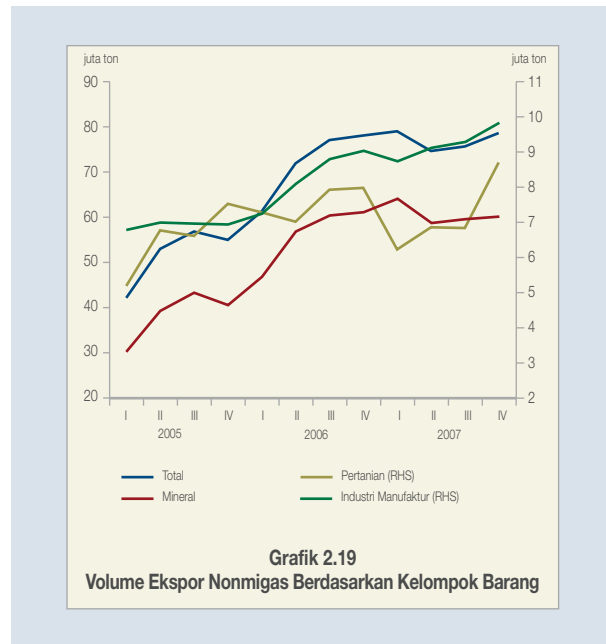
Negara	2007-2008 (dari 131 negara)	2006-2007 (dari 122 negara)
Indonesia	54	54
Malaysia	21	19
Vietnam	68	64
Thailand	28	28
China	34	35
Filipina	71	75
Singapura	7	8

Sumber: WEF, diolah

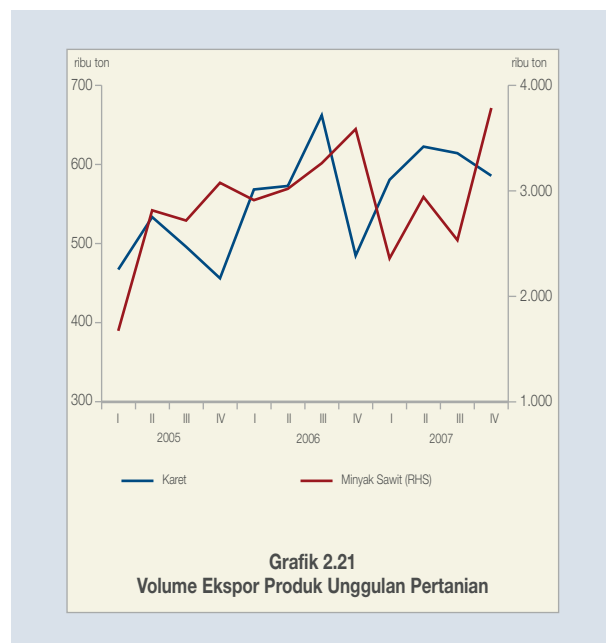
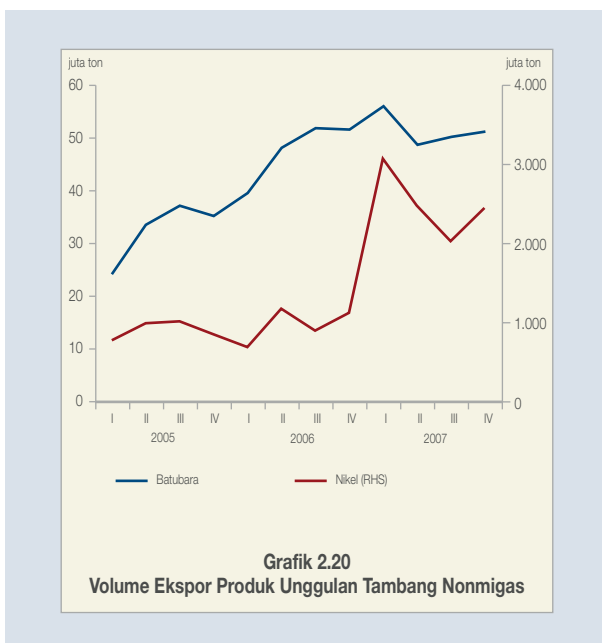
dan barang modal terkait dengan peningkatan kegiatan produksi serta peningkatan investasi (Grafik 2.24). Peningkatan impor yang tinggi terutama terjadi pada paruh kedua tahun 2007 sejalan dengan semakin menguatnya permintaan domestik.

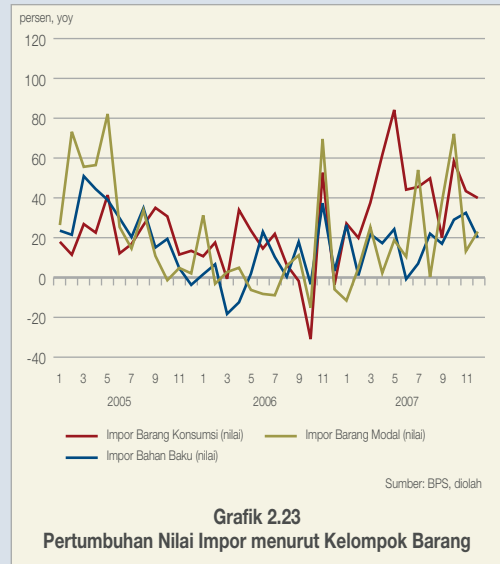
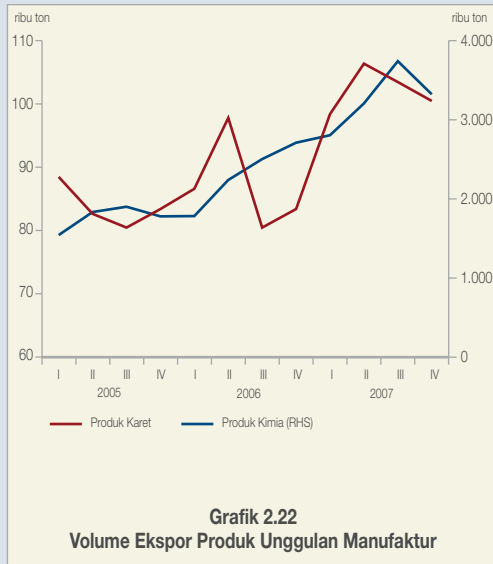
Penawaran Agregat

Dari sisi penawaran, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dengan tahun 2006. Perkembangan tersebut didukung oleh indikasi peningkatan utilisasi kapasitas produksi yang terjadi di hampir semua sektor (Grafik 2.25). Sektor-sektor yang tumbuh tinggi pada tahun 2007 adalah sektor-sektor *nontradables* yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara itu, sektor-sektor yang merupakan penopang perekonomian seperti sektor industri pengolahan dan sektor pertanian tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006.



Peningkatan permintaan domestik dan masih tingginya ekspor mendorong penguatan pertumbuhan industri pengolahan. Pada tahun 2007, industri pengolahan tumbuh sebesar 4,7% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan 4,6% (yoy) pada tahun 2006 (Tabel 2.7). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh subsektor alat angkutan, mesin dan perlengkapannya serta subsektor makanan, minuman, dan tembakau. Membaiknya pertumbuhan industri pengolahan tercermin pada pertumbuhan tahunan indeks produksi industri pengolahan Bank Indonesia dan BPS yang menunjukkan peningkatan sejak awal tahun (Grafik 2.26 dan Grafik 2.27). Namun demikian, perlu dicermati tren pertumbuhan triwulanan



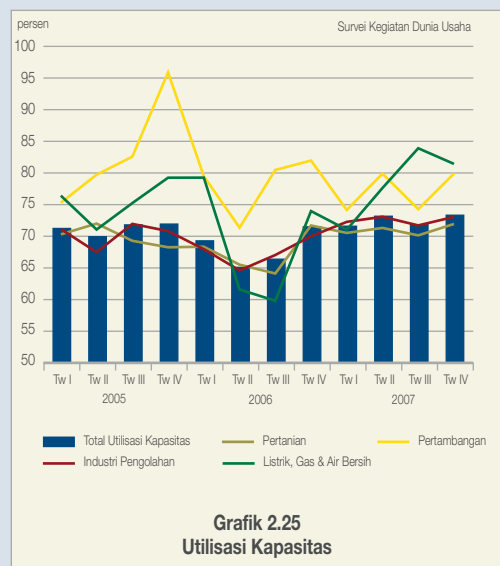
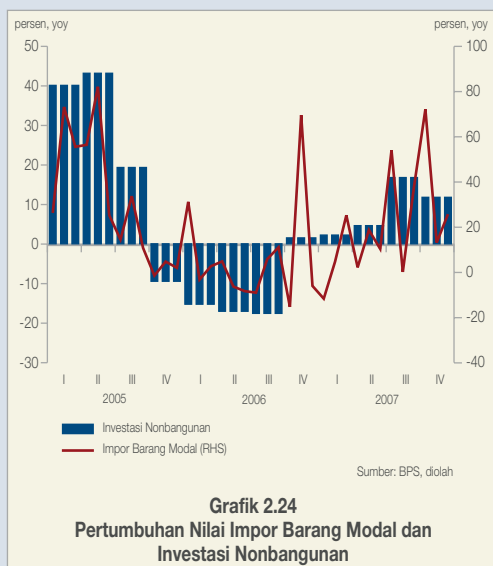


sektor industri pengolahan yang terus melambat hingga akhir tahun yang bersumber dari melambatnya pertumbuhan beberapa subsektor.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh subsektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya yang masih tumbuh tinggi. Pada tahun 2007, subsektor industri alat angkut, mesin dan peralatannya tumbuh sebesar 9,7% dibandingkan dengan 7,6% pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik yaitu konsumsi swasta dan investasi yang meningkat. Hal ini terlihat pada produksi kendaraan bermotor dan barang elektronik yang meningkat pada tahun 2007 (Grafik 2.28 dan Grafik 2.29).

Produksi mobil pada tahun 2007 mencapai 411,6 ribu unit, meningkat 98,4% (yoy) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar 207,5 ribu unit. Pada saat yang bersamaan, total penjualan barang elektronik (televisi, lemari es, AC, dan mesin cuci) mencapai 7,9 juta unit atau meningkat sebesar 24,8% dibanding periode yang sama di tahun 2006.

Sementara itu, subkelompok industri makanan, minuman, dan tembakau serta subkelompok tekstil, barang dari kulit dan alas kaki menunjukkan penurunan kinerja bila dibandingkan dengan tahun 2006. Kelompok industri makanan, minuman dan tembakau tumbuh sebesar 5,1% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Tabel 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

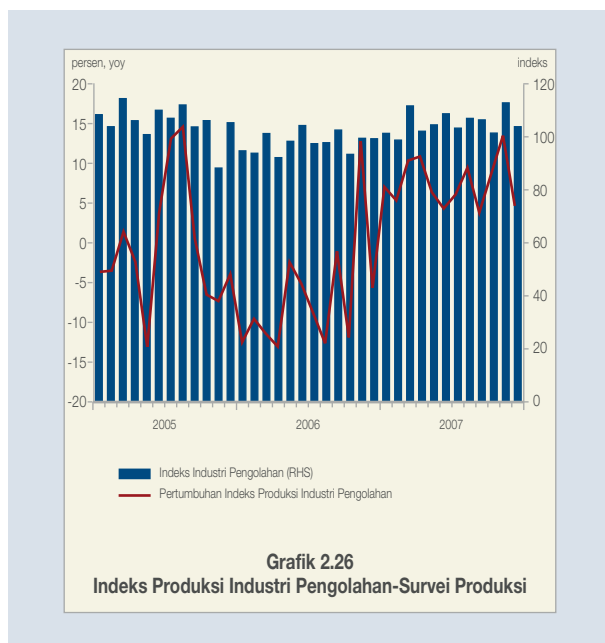
Rincian	2004	2005	2006*	2007**				2007**
				I	II	III	IV	
Pertumbuhan (%)								
Pertanian	2,8	2,7	3,4	-1,7	4,7	7,6	3,1	3,5
Pertambangan dan Penggalian	-4,5	3,2	1,7	6,2	3,2	1,0	-2,1	2,0
Industri Pengolahan	6,4	4,6	4,6	5,2	5,1	4,5	3,8	4,7
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5,3	6,3	5,8	8,2	10,2	11,3	11,8	10,4
Bangunan	7,5	7,5	8,3	8,4	7,7	8,3	9,9	8,6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,7	8,3	6,4	9,2	7,6	7,9	9,1	8,5
Pengangkutan dan Komunikasi	13,4	12,8	14,4	13,0	12,7	14,1	17,4	14,4
Kuangan, Persewaan, dan Jasa	7,7	6,7	5,5	8,1	7,6	7,6	8,7	8,0
Jasa-jasa	5,4	5,2	6,2	7,0	7,0	5,2	7,2	6,6
PDB	5,0	5,7	5,5	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3
Distribusi terhadap PDB (%)								
Pertanian	14,9	14,5	14,2	13,8	14,4	15,1	11,9	13,8
Pertambangan dan Penggalian	9,7	9,4	9,1	9,1	8,8	8,4	8,6	8,7
Industri Pengolahan	28,4	28,1	27,8	27,5	27,3	27,1	27,6	27,4
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Bangunan	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,5	6,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,4	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2	17,7	17,3
Pengangkutan dan Komunikasi	5,8	6,2	6,8	6,9	7,1	7,2	7,9	7,3
Kuangan, Persewaan, dan Jasa	9,1	9,2	9,2	9,4	9,3	9,1	9,6	9,4
Jasa-jasa	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,0	9,5	9,3

Sumber: BPS, diolah

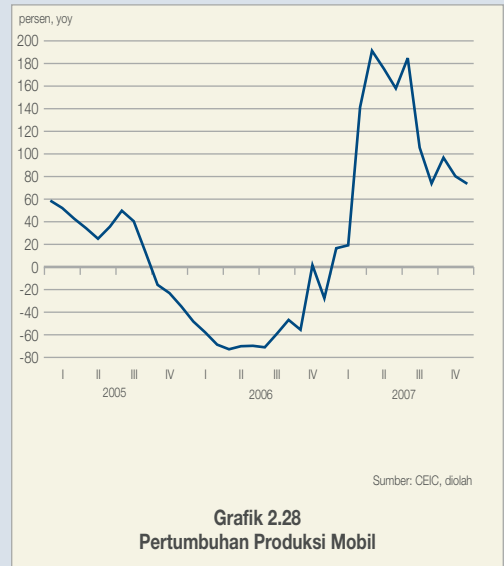
sebesar 7,2%. Apabila dilihat secara triwulanan, meskipun sempat tumbuh tinggi di awal tahun, kelompok industri makanan, minuman dan tembakau terus menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat hingga akhir tahun. Bahkan subkelompok industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki yang pada tahun 2007 tumbuh sebesar

-3,7% (yoy), berlawanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,2% (yoy). Beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan subkelompok industri tekstil adalah penetrasi produk impor berharga murah terutama dari China serta lambatnya program restrukturisasi mesin industri tekstil berupa pemberian subsidi bunga kredit perbankan.²

Sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh tinggi. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 8,5% pada tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 6,4%. Peningkatan ini terutama bersumber dari subsektor perdagangan yang meningkat dari 6,6% pada tahun 2006 menjadi 8,9% pada tahun 2007. Sebagai indikator perbaikan konsumsi masyarakat, peningkatan kegiatan perdagangan tercermin pada hasil survei di tingkat pedagang eceran oleh Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan kegiatan perdagangan (Grafik 2.30). Di samping itu, data bongkar muat barang di empat pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok,



2 Dari total subsidi bunga kredit sebesar Rp255 miliar, baru terserap oleh industri tekstil sebesar 60,2%.

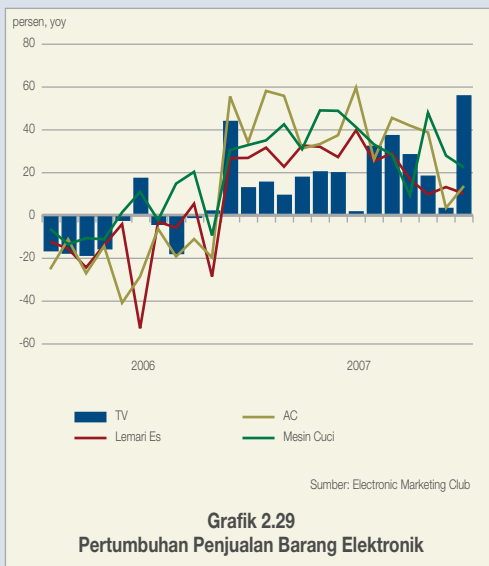


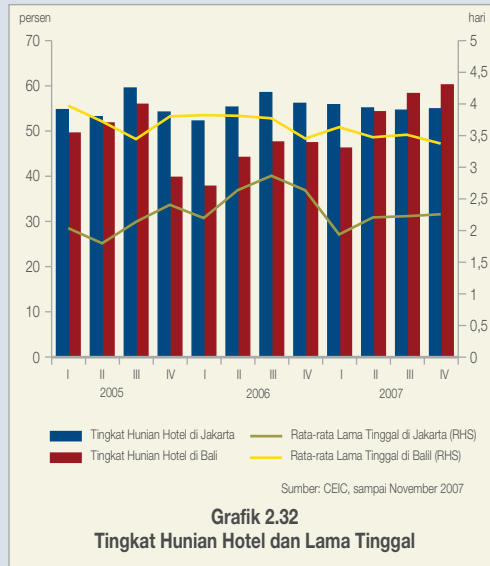
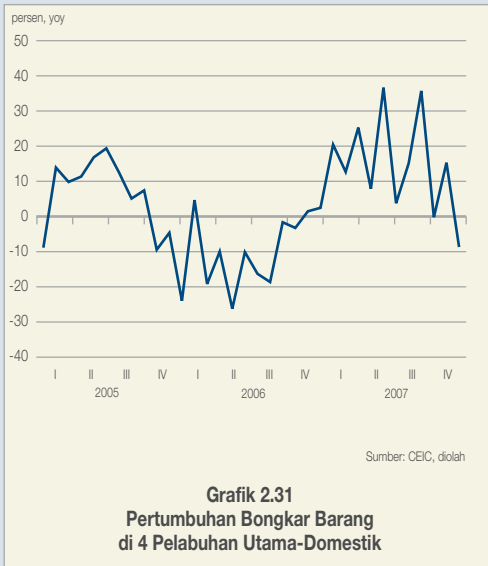
Tanjung Perak, dan Makassar) menunjukkan peningkatan kegiatan (Grafik 2.31). Subsektor hotel dan restoran juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin pada tingkat hunian hotel serta jumlah wisatawan mancanegara yang mengalami peningkatan (Grafik 2.32 dan Grafik 2.33).

Kenaikan produksi dan meningkatnya permintaan ekspor mendorong perbaikan pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2007, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 3,4%. Kenaikan ini terutama bersumber dari kenaikan subsektor tanaman bahan makanan khususnya padi, yang merupakan penopang

utama pertumbuhan sektor pertanian (Tabel 2.8). Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan produksi padi yang berasal dari kenaikan produktivitas di wilayah Jawa dan luas lahan pertanian di luar Jawa. Sementara itu, kenaikan produksi karet dan kelapa sawit terkait dengan tingginya permintaan luar negeri selama tahun 2007 (Grafik 2.34).

Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh lebih tinggi mencapai 2,0% pada tahun 2007 terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor nonmigas. Untuk subsektor nonmigas, komoditas yang menopang pertumbuhan terutama adalah komoditas batubara dan bijih nikel





(Grafik 2.35). Sementara subsektor migas tumbuh negatif akibat rendahnya investasi, turunnya produktivitas, dan penutupan beberapa sumur minyak.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh tinggi sebesar 14,4%, sama dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Subsektor komunikasi masih tumbuh tinggi dan menjadi pendorong utama, sejalan dengan semakin ketatnya persaingan antaroperator telepon. Hal ini berdampak pada semakin gencarnya inovasi dan ekspansi usaha sehingga memengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah penggunaan telepon, khususnya telepon seluler. Hingga akhir tahun 2007, jumlah pengguna telepon seluler mencapai 80 juta pelanggan (Grafik 2.36). Sementara itu, subsektor pengangkutan tumbuh lebih rendah terkait maraknya kecelakaan pada berbagai moda transportasi di awal tahun (Grafik 2.37).

Sektor bangunan tumbuh meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan investasi bangunan, sektor bangunan tumbuh sebesar 8,6% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan 8,3% (yoy) pada tahun 2006. Peningkatan pertumbuhan sektor bangunan ini terkait dengan keyakinan investor terhadap perbaikan daya beli

Tabel 2.8
Luas Areal Panen dan Produksi Padi

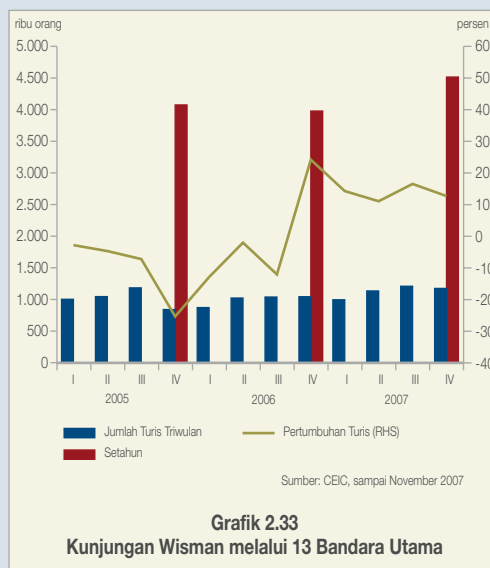
	Luas Panen (Ha)	Hasil/Ha (Ku/Ha)	Produksi (ton)
2005	11.839.060	45,74	54.151.097
2006	11.786.430	46,20	54.454.937
2007*	12.124.827	47,05	57.051.679

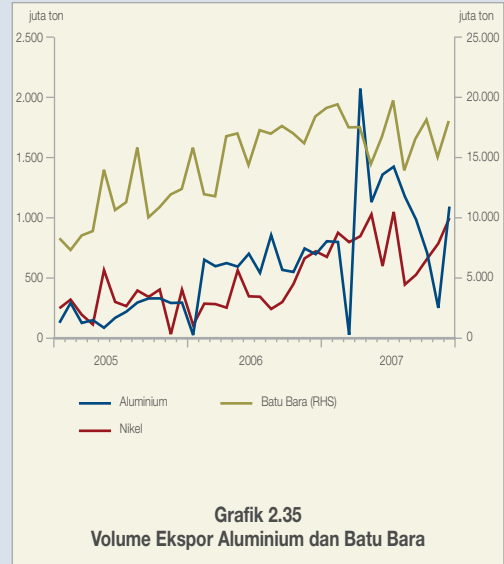
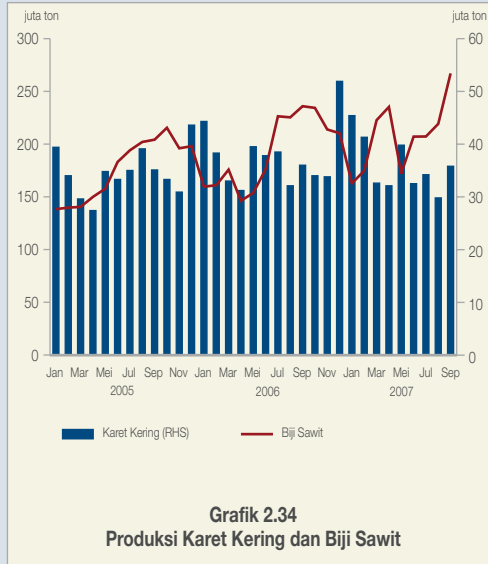
Sumber: BPS
* Angka Sementara

masyarakat serta berbagai upaya Pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Perbaikan pertumbuhan sektor bangunan ini tercermin pada tingginya pertumbuhan properti komersial seperti pusat perbelanjaan, apartemen, dan kondominium (Tabel 2.9).

Ketenagakerjaan

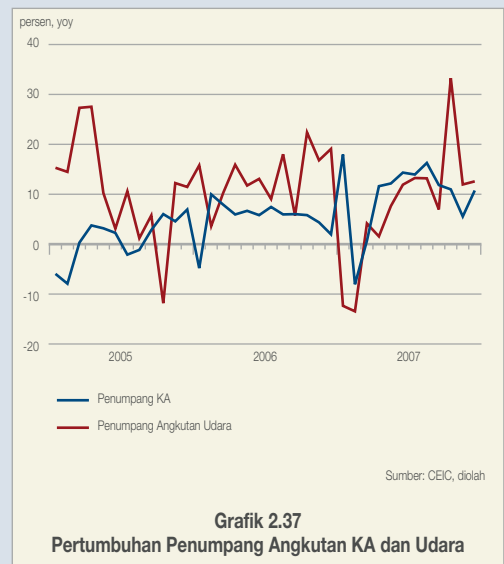
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pada tahun 2007 diiringi oleh penyerapan jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi yang berdampak pada penurunan angka pengangguran. Data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2007 mencapai 109,9 juta orang, naik





sebesar 3,6 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2006 (Grafik 2.38). Peningkatan angkatan kerja ini juga diikuti oleh jumlah penduduk yang bekerja. Pada Agustus 2007, jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 4,5 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2006. Dari jumlah penduduk bekerja tersebut 69,1% bekerja di sektor informal sementara sisanya bekerja di sektor formal (Grafik 2.39). Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja mendorong tren penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2007 menjadi 9,1% dibandingkan dengan 10,3% pada Agustus 2006.

Komposisi tenaga kerja Indonesia belum mengalami perubahan dengan sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2007 sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,7%, 7,0%, dan 4,0%. Sementara itu, peningkatan daya serap tenaga kerja oleh sektor-sektor yang tumbuh tinggi seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa, serta sektor bangunan belum mampu memengaruhi komposisi tenaga kerja di Indonesia. Komposisi tenaga kerja terbesar masih berada di sektor pertanian, perdagangan dan industri masing-masing sebesar 41,0%, 20,6%, dan 12,4% (Tabel 2.10).



Tabel 2.9
Pertumbuhan Properti Komersil

Jenis Properti	Kumulatif per Triwulan II-2005	Kumulatif per Triwulan II-2006	Kumulatif per Triwulan II-2007	Pertumbuhan Triwulan II-2006 dibandingkan Triwulan II-2005 (%)	Pertumbuhan Triwulan II-2007 dibandingkan Triwulan II-2006 (%)
Perkantoran (juta m2)	5,15	5,19	5,41	0,78	4,24
Pusat Perbelanjaan (juta m2)	2,00	2,43	2,56	21,50	5,35
Apartemen (unit)	16,304	19,601	28,371	20,22	44,74
Kondominium (unit)	36,694	44,204	54,284	20,47	22,80
Industri (hektar)	7,166	7,246	7,304	1,12	0,80

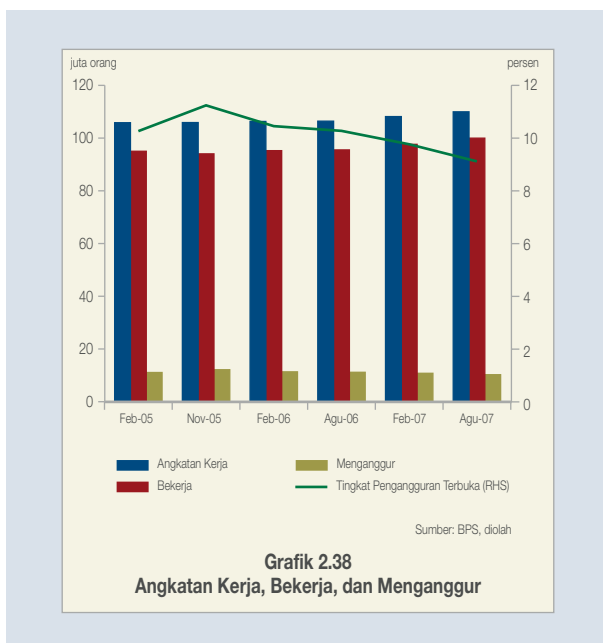
Sumber: Procon Indah Research, Triwulan II-2007.

Proporsi tenaga kerja yang masih didominasi angkatan kerja berlatar belakang pendidikan rendah memengaruhi tingkat produktivitas. Dari sisi tingkat pendidikan, lebih dari 35% jumlah tenaga kerja berpendidikan tertinggi sekolah dasar dan selanjutnya diikuti oleh SLTP, SLTA, dan tidak/belum sekolah (Grafik 2.40). Sebagai konsekuensinya, jumlah penganggur dengan latar belakang pendidikan rendah mengalami penurunan sebaliknya jumlah penganggur dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkat (Tabel 2.11). Relatif tidak berubahnya proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan tersebut memengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja yang sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahan signifikan. Apabila diukur dengan menggunakan nilai *output* PDB (juta Rp) per jumlah tenaga kerja, tingkat produktivitas tenaga kerja tidak banyak mengalami perubahan yaitu meningkat tipis dari Rp19,4 juta per orang pada tahun 2006 menjadi Rp19,6 juta per orang pada tahun 2007 (Grafik 2.41).

Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 menurun seiring dengan turunnya pengangguran. Secara tahunan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,2 juta (16,6%) dibandingkan dengan 39,3 juta (17,8%) pada tahun 2006, atau turun sebesar 2,1 juta (Tabel 2.12). Penurunan penduduk miskin terutama terjadi di daerah pedesaan sebesar 1,2 juta orang sementara di perkotaan berkurang 0,9 juta orang. Kondisi ini tidak terlepas dari pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi pada tahun laporan yang mampu menyerap tambahan tenaga kerja di pedesaan sehingga pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan tersebut. Namun demikian, rasio penduduk miskin pedesaan terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 63,4%. Apabila dilihat dari persentasenya, penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan turun menjadi 12,5% dan 20,4% dibandingkan dengan 13,4% dan 21,9% pada tahun sebelumnya.

Indeks kedalaman³ dan keparahan kemiskinan⁴ menunjukkan penurunan pada tahun 2007, meskipun sempat meningkat pada tahun 2006 akibat kenaikan BBM Oktober 2005. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren perbaikan pada periode 1999-2005. Kondisi ini terkait dengan penurunan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2006 mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum meningkat. Pada tahun 2007, baik indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 3,0 sementara indeks keparahan kemiskinan turun menjadi 0,8 (Tabel 2.13 dan 2.14).



3 Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin.

4 Semakin tinggi nilai indeks ke kemiskinan berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.10
Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor dan Pertumbuhan Tenaga Kerja

Sektor	2005		2006		2007		Pertumbuhan Tenaga Kerja			
	Februari	November	Februari	Agustus	Februari	Agustus	2005-2006		2006-2007	
							Nominal	(%)	Nominal	(%)
Pertanian	41.814,2	41.309,8	42.323,2	40.136,2	42.608,8	41.206,5	-1.173,6	-2,84	1.070,2	2,67
Pertambangan	808,8	904,2	947,1	923,6	1.020,8	994,6	19,4	2,14	71,0	7,69
Industri	11.652,4	11.953,0	11.578,1	11.890,2	12.094,1	12.368,7	-62,8	-0,53	478,6	4,02
Listrik, Gas dan Air	186,8	194,6	207,1	228,0	247,1	174,9	33,4	17,17	-53,1	-23,30
Konstruksi	4.417,1	4.565,5	4.374,0	4.697,4	4.397,1	5.252,6	131,9	2,89	555,2	11,82
Perdagangan	18.896,9	17.909,1	18.555,1	19.215,7	19.425,3	20.554,7	1.306,6	7,30	1.339,0	6,97
Transportasi	5.552,5	5.652,8	5.467,3	5.664,0	5.575,5	5.958,8	11,2	0,20	294,9	5,21
Keuangan	1.042,8	1.141,9	1.153,3	1.346,0	1.252,2	1.399,5	204,1	17,88	53,4	3,97
Jasa Kemasyarakatan	10.576,6	10.327,5	10.572,0	11.355,9	10.962,4	12.020,0	1.028,4	9,96	664,1	5,85
Total	94.948,1	93.958,4	95.177,1	95.456,9	97.583,1	99.930,2	1.498,5	1,59	4.473,3	4,69

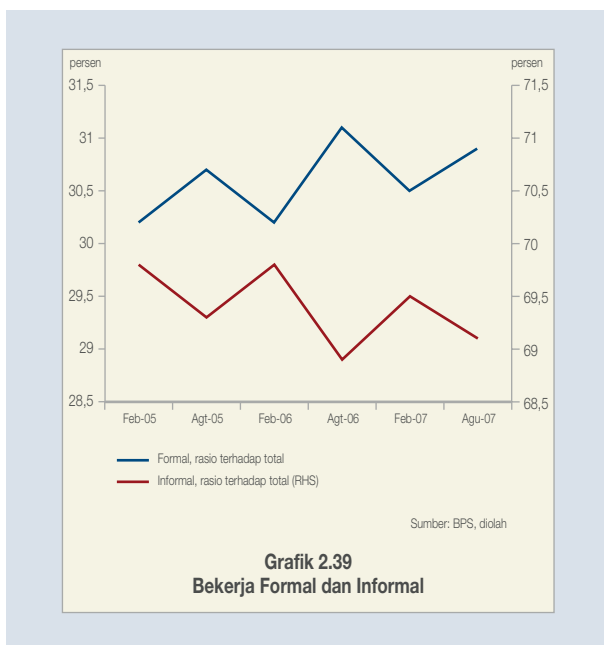
Sumber: Sakernas BPS

Dilihat dari distribusinya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan lebih besar dan tinggi dibanding di perkotaan. Apabila dilihat lebih rinci, kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih besar jika dibandingkan dengan di perkotaan, kondisi ini relatif tidak berubah sejak periode tahun 1999 hingga tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pengeluaran penduduk miskin di pedesaan masih jauh di bawah garis kemiskinan pedesaan. Kondisi yang sama juga terlihat pada indeks keparahan kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini menunjukkan distribusi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

Seiring dengan membaiknya berbagai indikator kesejahteraan di atas, pendapatan per kapita tahun 2007

mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, pendapatan mencapai \$1.947,1 per kapita atau meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2006 (Tabel 2.15). Meningkatnya pendapatan per kapita tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan ekonomi secara nominal pada tahun 2007 dan pertumbuhan penduduk yang moderat. Namun demikian, kondisi distribusi pendapatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan hitungan BPS, koefisien Gini yang mengukur disparitas pendapatan pada tahun 2007 sedikit lebih tinggi dari tahun 2006 (Tabel 2.16). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan masyarakat cenderung melebar yang ditandai oleh membaiknya pendapatan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung mengalami penurunan pendapatan.

Perbaikan kesejahteraan pada tahun 2007 berdampak pada kemajuan yang signifikan dalam pencapaian target yang ditetapkan di dalam Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 (*Millennium Development Goals/ MDGs*). Sampai dengan akhir tahun 2007, Bank Dunia

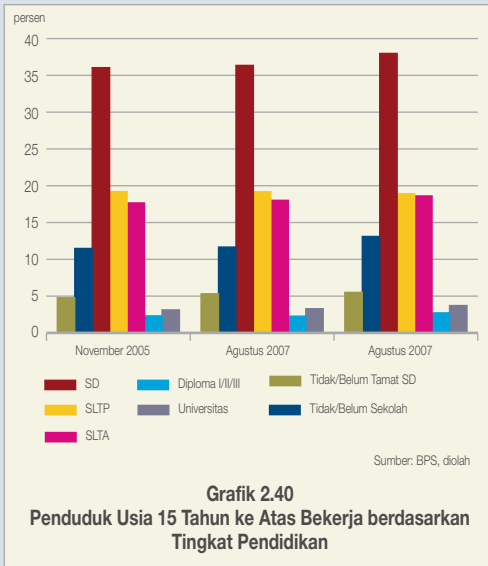


Tabel 2.11
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

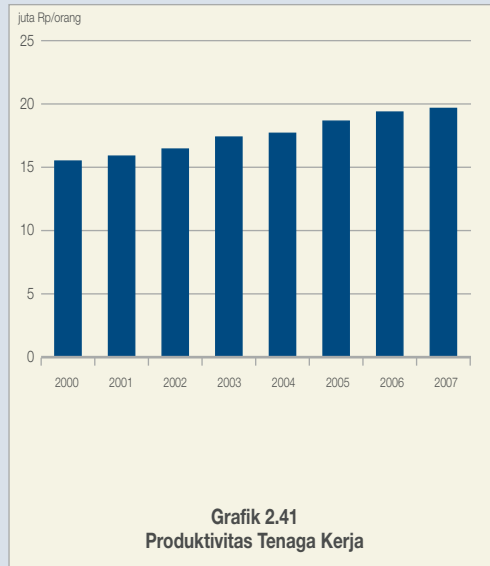
(persentase dari total jumlah pengangguran)

Pendidikan	Agustus 2006	Agustus 2007
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,6	0,9
Belum/Tidak Tamat SD	5,6	4,4
SD	23,7	21,8
SLTP	25,0	22,6
SLTA	38,0	40,7
Diploma	2,5	4,0
Universitas	3,6	5,7
Total	100	100

Sumber: BPS, diolah



Grafik 2.40
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 2.41
Produktivitas Tenaga Kerja

dalam laporan MDGs tahun 2007/2008, menilai bahwa Indonesia mampu menyelesaikan sebagian besar target-target yang terangkum di dalam 8 tujuan MDGs. Di bidang kemiskinan dan kelaparan, saat ini prosentase penduduk dengan penghasilan \$1 per hari telah berhasil diturunkan menjadi 7,5%, di bawah targetnya sebesar 10%. Meskipun demikian, Bank Dunia mencatat bahwa indikator kemiskinan yang lain seperti tingkat kedalaman kemiskinan dan proporsi konsumsi penduduk miskin belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Indikator lain yang juga menunjukkan kemajuan adalah tingkat kematian anak yang menurun dan jumlah anak yang mengenyam pendidikan tingkat SD dan SMP yang meningkat.

Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2007 kebijakan sektor riil melalui implementasi kombinasi kebijakan yang terintegrasi diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6% seperti tercantum dalam RPJMN tahun 2004-2009. Pentingnya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih keras dan bersungguh-sungguh dalam merencanakan dan mengimplementasikan setiap kebijakan. Pada tahun 2007, Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6/2007 berupa paket kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Paket kebijakan tersebut merupakan penguatan kebijakan-kebijakan lintas sektoral yang terdiri dari percepatan implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya⁵ dan penerbitan kebijakan-kebijakan baru. Paket kebijakan tersebut terdiri dari

141 kebijakan yang dikelompokkan ke dalam: i) paket perbaikan iklim investasi; ii) reformasi sistem keuangan; iii) percepatan pembangunan infrastruktur; dan iv) pemberdayaan UMKM. Sampai dengan November 2007, Pemerintah telah berhasil menyelesaikan sebagian besar target yang ditetapkan di dalam Inpres tersebut dan masih menyisakan 47 tindakan kebijakan yang belum dapat diselesaikan (Tabel 2.17).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Kombinasi antara permasalahan domestik yang belum dapat diselesaikan secara menyeluruh dan persaingan yang makin ketat dengan negara-negara tetangga menjadikan perbaikan iklim investasi sebagai salah satu prioritas utama dalam implementasi kebijakan selama tahun 2007. Perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh Pemerintah mencakup 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, kelancaran arus barang dan kepabeanaan, serta perpajakan. Dalam aspek kelembagaan, upaya mendorong investasi ditunjukkan dengan disahkannya UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa terobosan penting dalam rangka meningkatkan investasi dalam undang-undang tersebut adalah perluasan cakupan jenis penanaman modal, kriteria investor, jenis usaha, dan penyederhanaan perijinan. Terkait dengan aspek kelancaran barang dan kepabeanaan, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang intinya memangkas bea masuk beberapa komoditas untuk kegiatan penanaman modal dan pengembangan sektor-sektor produktif. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan penyederhanaan prosedur pengeluaran barang melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 menit dan jalur

⁵ Terutama Inpres No.3 Tahun 2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi.

Tabel 2.12
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan					
2005	103.992	46.807	150.799	12,40	11,37
2006	126.527	48.797	175.324	14,29	13,36
2007	132.258	55.683	187.942	13,56	12,52
Perdesaan					
2005	84.014	33.245	117.259	22,70	19,51
2006	103.180	28.076	131.256	24,76	21,9
2007	116.265	30.572	146.837	23,61	20,37
Kota + Desa					
2005	91.072	38.036	129.108	35,10	15,97
2006	114.619	38.228	152.847	39,05	17,75
2007	123.992	42.704	166.697	37,17	16,58

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas Panel Februari 2005, Maret 2006 dan 2007.

merah menjadi rata-rata 3 hari. Selanjutnya, untuk aspek perpajakan, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan kelonggaran pajak, khususnya untuk pajak penghasilan dan pertambahan nilai, untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal.

Selain itu, pada tahun 2007 Pemerintah menekankan upaya-upaya reformasi sektor keuangan melalui penguatan stabilitas sistem keuangan yang mencakup lembaga keuangan bank, nonbank, dan pasar modal. Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain adalah penguatan mekanisme koordinasi antarotoritas lembaga keuangan dan penyusunan jaring pengaman sistem keuangan. Di samping itu, Pemerintah juga berhasil menyelesaikan beberapa kredit bermasalah bank BUMN yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan guna mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Upaya-upaya pemberdayaan UMKM dilakukan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan makin memperkokoh struktur perekonomian. Pemberdayaan UMKM pada tahun 2007 mencakup upaya-upaya di bidang peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia, perluasan pasar produk UMKM, dan reformasi peraturan. Terkait dengan akses pada sumber pembiayaan, Pemerintah telah melakukan sertifikasi terhadap 13.000 lahan yang tersebar di berbagai daerah sebagai jaminan kredit kepada UMKM. Selain itu, Pemerintah telah menyelesaikan tahap awal di dalam proses penambahan modal kepada lembaga penjamin kredit UMKM dan menerbitkan peraturan pelaksanaan sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan UMKM.

Iklim investasi yang kondusif juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai sehingga Pemerintah pada tahun 2007 berupaya untuk

Tabel 2.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
1999	3,52	4,84	4,33
2000	1,89	4,68	3,51
2001	1,74	4,68	3,42
2002	2,59	3,34	3,01
2003	2,55	3,53	3,13
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99

Sumber: BPS, Februari 2007

Tabel 2.14
Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
1999	0,98	1,39	1,23
2000	0,51	1,39	1,02
2001	0,45	1,36	0,97
2002	0,71	0,85	0,79
2003	0,74	0,93	0,85
2004	0,58	0,9	0,78
2005	0,6	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1
2007	0,57	1,09	0,84

Sumber: BPS, Februari 2007

Tabel 2.15
Pendapatan per Kapita

	PDB Nominal (\$ miliar)	PDB per Kapita (\$/orang)
2000	165,6	807,2
2001	164,5	791,2
2002	198,9	944,0
2003	237,3	1115,7
2004	256,7	1116,6
2005	288,4	1256,6
2006	369,4	1662,6
2007	438,1	1947,1

Sumber: BPS

lebih mempercepat program pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ditujukan pada penyempurnaan peraturan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan manajemen. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan aturan yang

isinya mengatur secara jelas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terkait dengan itu, penguatan kelembagaan ditempuh melalui pemberian *guarantee fund* sebesar Rp2 triliun melalui APBN tahun 2007 khususnya untuk pembebasan lahan dan jaminan kredit proyek infrastruktur. Sementara itu 10 proyek percontohan yang dimulai sejak tahun 2006 semakin mendekati proses pembangunan secara fisik.

Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh kebijakan peningkatan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Pada tahun 2007, Pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian subsidi dan transfer kepada masyarakat golongan ekonomi lemah baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak lagi memberikan bantuan langsung tunai, Pemerintah masih memiliki skema bantuan lain yang dijalankan seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, dan subsidi pangan untuk keluarga miskin.

Tabel 2.16
Gini Ratio

Kelompok Penduduk	2002	2003	2004	2005	2006	2007
40% terendah	20,92	20,57	20,80	18,81	19,75	19,10
40% menengah	38,89	37,10	37,13	36,40	38,10	36,11
20% teratas	42,19	42,33	42,07	44,78	42,15	44,79
Gini ratio	0,33	0,32	0,32	0,36	0,33	0,37

Sumber: BPS

Tabel 2.17
Pencapaian Target Inpres No. 6/2007

Program	Rencana Tindak	Dapat Diselesaikan
Perbaikan Iklim Investasi	49	40
Reformasi Sektor Keuangan	36	28
Percepatan Pembangunan Infrastruktur	40	13
Peremberdayaan UMKM	34	28

Sumber: Kantor Menko Perekonomian

Mencari Kebijakan Moneter yang Berpihak pada Si Miskin

Bertentangan dengan keyakinan umum bahwa kebijakan moneter longgar yang ekspansif adalah cara yang jitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyelamatkan golongan miskin, hasil penelitian¹ menunjukkan bahwa ternyata kebijakan moneter berhati-hati, yang mengusahakan inflasi rendah dan ekonomi makro yang stabil, justru merupakan kebijakan yang menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan basis data regional 26 provinsi di Indonesia periode 1984-2005, kajian ini secara empiris membuktikan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (*prudent*) merupakan kebijakan moneter yang berpihak pada si miskin (*pro poor*).

Secara teoritis kebijakan moneter yang longgar akan menurunkan pengangguran, meningkatkan *output* dan inflasi dalam jangka pendek. Namun dampak kebijakan ini hanya bersifat sementara karena adanya *business cycle* dan tidak disukainya inflasi yang tinggi, sehingga kebijakan moneter ini tidak dapat menghasilkan *boom* permanen. Di lain pihak, kebijakan moneter berhati-hati, konsisten, dan kredibel adalah kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dalam jangka panjang dan menstabilkan fluktuasi permintaan agregat. Rendahnya inflasi dalam jangka panjang serta stabilnya ekonomi makro merupakan situasi positif yang mendorong investasi sehingga dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin secara permanen. Studi yang dilakukan Easterly dan Fischer (2001) menunjukkan adanya korelasi antara menurunnya tingkat kemiskinan dengan turunnya inflasi. Selanjutnya, Romer dan Romer (2002) berhasil memisahkan efek inflasi terhadap kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Inflasi yang tinggi dalam jangka pendek belum tentu berpengaruh positif menurunkan tingkat kemiskinan namun dalam jangka panjang pasti berpengaruh negatif menaikkan tingkat kemiskinan. Dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi makro, Agenor (2004) menunjukkan bahwa membaiknya stabilitas ekonomi makro akibat pengaruh suatu kebijakan cenderung meningkatkan

tabungan dan investasi sehingga kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Analisis Jangka Pendek

Penelitian menggunakan data tahunan nasional dan regional Indonesia dua dekade terakhir (1984-2005). Kinerja kebijakan moneter diukur dari tingkat pengangguran (*unemployment rate*) dan inflasi jangka pendek (diukur menggunakan deflator PDB tahunan). Spesifikasi regresi jangka pendek dibangun dari keyakinan bahwa perubahan tingkat kemiskinan tahunan berkorelasi dengan dinamika pengangguran atau perkembangan inflasi di tahun tersebut. Secara lebih formal, spesifikasi model regresi jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$\Delta y_t = \alpha_1 + \beta_1 \Delta x_{1t} + \sum \delta_j d_j + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta y_t = \alpha_2 + \beta_2 \Delta x_{2t} + \sum \delta_j d_j + \varepsilon_{2t}$$

$$\Delta y_t = \alpha_3 + \beta_3 \Delta x_{1t} + \beta_4 \Delta x_{2t} + \sum \delta_j d_j + \varepsilon_{3t}$$

di mana:

$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$: perubahan tingkat kemiskinan di tahun t,

$\Delta x_{1t} = x_{1t} - x_{1,t-1}$: dinamika tingkat pengangguran pada tahun t,

$\Delta x_{2t} = x_{2t} - x_{2,t-1}$: perkembangan inflasi pada tahun t,

d_j : variabel *dummy* untuk subsampel j.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek (1 tahun) terdapat hubungan positif yang signifikan (0,992) antara perubahan tingkat pengangguran dan perubahan tingkat kemiskinan (Tabel 1). Sementara itu, tingkat inflasi menunjukkan hubungan yang negatif (-0,130) dengan tingkat kemiskinan. Inflasi yang meningkat sebagai akibat kebijakan moneter yang longgar akan mendorong permintaan agregat yang pada akhirnya berperan positif menurunkan tingkat kemiskinan. Kedua penemuan di atas sesuai dengan teori yang diterima banyak khalayak, dimana kebijakan moneter yang ekspansif (kontraktif) akan menaikkan (menurunkan) aktivitas ekonomi.

1 Munandar, Kurniawan, dan Santoso (2007), Bank Indonesia, *Working Paper* "Mencari Kebijakan Moneter yang Berpihak pada Si Miskin: Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia".

Tabel 1 Hasil Regresi Jangka Pendek			
Perubahan Tingkat Kemiskinan & Makroekonomi			
	Model 1	Model 2	Model 3
C	-0,922 -3,024 0,009	-0,551 -1,896 0,077	-0,808 -2,494 0,026
Perubahan Tingkat Pengangguran	0,992** 2,378 0,031		0,744 1,545 0,145
“Perubahan Tingkat Inflasi”		-0,130* -1,99 0,065	-0,074 -1,021 0,325
1997	5,117** 4,144 0,001	4,815** 3,813 0,002	5,235** 4,227 0,001
1998	2,602* 1,954 0,07	12,803** 2,818 0,013	7,918 1,474 0,163
1999	-0,036 -0,031 0,976	-10,302* -2,005 0,063	-5,759 -1,005 0,332
R ²	0,666	0,636	0,689
S.E.E	1,141	1,191	1,139

Note: ** Signifikan di 5%

* Signifikan di 10%

Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan.

Ketiga angka pada tiap variabel adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.

Analisis Jangka Panjang

Analisis jangka panjang menggunakan data *cross-section* provinsi tahun 2005 bersamaan dengan data panel seluruh provinsi periode tahun 1984-2004. Inflasi jangka panjang dihitung menggunakan rata-rata inflasi tahunan (deflator PDB) periode tersebut. Instabilitas ekonomi makro didekati dengan standard deviasi dari pertumbuhan PDB nominal periode tahun 1984-2004. Tingkat kemiskinan didekati dengan proporsi penduduk miskin suatu populasi tertentu (nasional atau regional).² Kinerja kebijakan moneter didekati dengan inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro.

Model yang dipakai adalah sebagai berikut, di mana variabel independen mengacu pada tahun referensi tertentu (2005) sedangkan variabel penjelas dibentuk dari data jangka panjang (20 tahun) sebelumnya (1984-2004):

$$y_1 = \rho_1 + \gamma_1 x_{1i} + \sum \phi_j d_j + \xi_{1i}$$

$$y_2 = \rho_2 + \gamma_2 x_{2i} + \sum \phi_j d_j + \xi_{2i}$$

$$y_3 = \rho_3 + \gamma_3 x_{3i} + \gamma_4 x_{2i} + \sum \phi_j d_j + \xi_{3i}$$

2 Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2 Hasil Regresi Jangka Panjang			
Tingkat Kemiskinan & Makroekonomi			
	Model 1	Model 2	Model 3
C	-0,205 -1,166 0,258	0,009 0,213 0,833	-0,174 -1,239 0,231
Inflasi Jangka Panjang	3,132** 2,139 0,046		1,691 1,36 0,191
Instabilitas Makroekonomi	1,295**	1,141** 4,039 0,001	3,426 0,003
NAD	0,153** 2,177 0,042	0,136** 2,441 0,025	0,155** 2,75 0,013
Maluku	0,200** 2,823 0,011	0,190** 3,386 0,003	0,209** 3,689 0,002
DKI Jakarta	-0,180** -2,442 0,025	-0,120* -2,163 0,044	-0,153** -2,573 0,019
Kaltim	-0,071 -1,029 0,317	-0,116** -1,985 0,062	-0,122** -2,127 0,048
NTT	0,198** 2,602 0,018	0,226** 3,705 0,002	0,253** 4,023 0,001
R ²	0,511	0,674	0,704
Adj. R ²	0,357	0,57	0,589
S.E.E	0,066	0,054	0,053

di mana: y_1 – tingkat kemiskinan provinsi i tahun 2005.
 x_{1i} – tingkat inflasi jangka panjang provinsi i (dihitung dari rata-rata inflasi tahun 1984-2004)
 x_{2i} – tingkat instabilitas makroekonomi provinsi i (standar deviasi pertumbuhan PDB nominal tahun 1984-2004).

Hasil regresi (Tabel 2) menunjukkan bahwa inflasi jangka panjang yang tinggi maupun kondisi ekonomi makro yang tidak stabil berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan (dengan koefisien masing-masing 3,132 dan 1,295). Kedua hubungan di atas secara statistik signifikan, kecuali saat kedua variabel diikutsertakan bersama-sama. Sementara itu, variabel *dummy* digunakan pada beberapa provinsi yang memiliki karakteristik berbeda (*outliers*). Provinsi-provinsi tersebut adalah NAD dan Maluku, yang merupakan daerah dimana konflik pernah/ sedang berlangsung. Di samping itu terdapat juga provinsi DKI, Kaltim dan NTT yang merupakan daerah dengan kekhususan sumber daya (*endowment*). DKI dan Kaltim memiliki sumber daya berlimpah sedang NTT

sangat minim. Hasil estimasi koefisien variabel *dummy* mengkonfirmasi dugaan bahwa daerah-daerah konflik dan dengan *endowment* rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan temuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi makro dan secara konsisten menghasilkan inflasi rendah dalam jangka panjang berdampak secara signifikan pada menurunnya tingkat kemiskinan.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan moneter yang ekspansif dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Namun fluktuasi *business cycle* dan tidak disukainya inflasi yang tinggi membuat efek positif yang dihasilkan hanya bersifat temporer. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah dan terjaganya stabilitas ekonomi makro berkorelasi secara signifikan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Kebijakan moneter yang berhati-hati (menjaga kestabilan harga dan kondisi ekonomi makro) memiliki efek positif yang permanen dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan sejumlah temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (*prudent*) adalah kebijakan moneter yang berpihak pada kelompok miskin (*pro-poor*).



Bab 3

Perkembangan Ekonomi Daerah

Bab 3: Perkembangan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang relatif stabil di beberapa daerah. Dilihat dari kontribusinya, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnustra) dan wilayah Jakarta-Banten masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kali-Sulampua) menyebabkan sumbangan wilayah tersebut terhadap pertumbuhan nasional meningkat. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi daerah terutama ditopang oleh tingginya pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Investasi juga tumbuh membaik terutama investasi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Di sisi harga, inflasi nasional yang relatif stabil didukung oleh relatif rendahnya inflasi di beberapa daerah penyumbang inflasi terbesar. Meskipun kinerja perekonomian di beberapa daerah membaik, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi antardaerah masih cukup tinggi. Hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian bersama agar kesenjangan pendapatan antardaerah dapat semakin dikurangi.

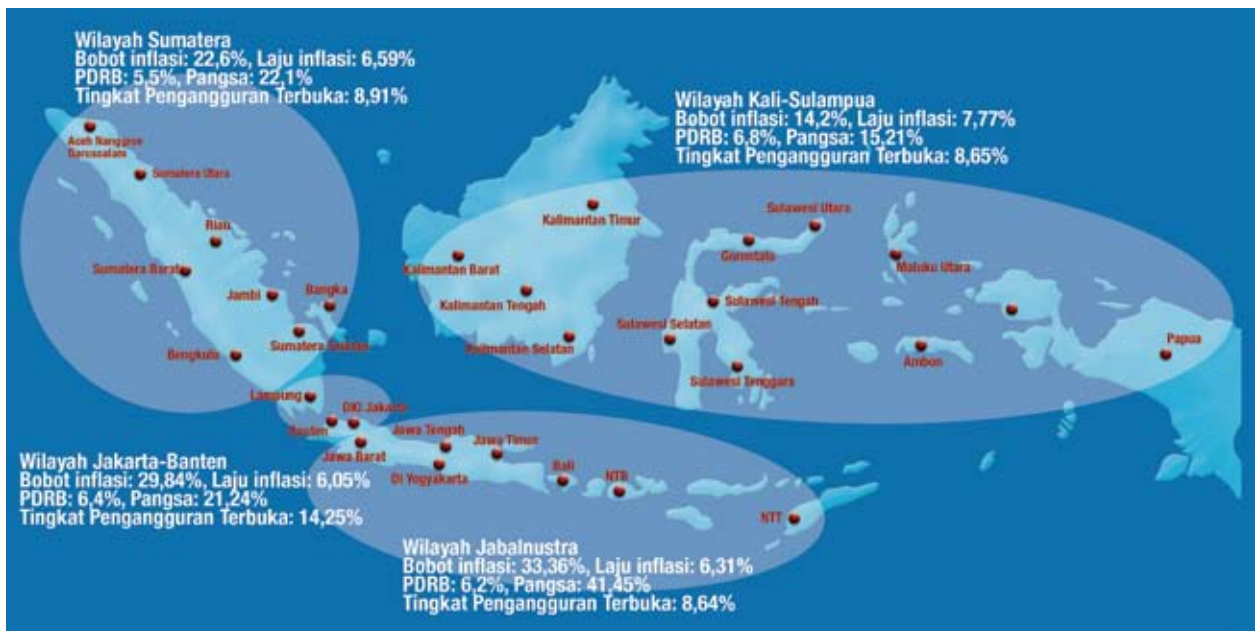
Perkembangan Perekonomian Wilayah

Perekonomian daerah sepanjang tahun 2007 memperlihatkan perkembangan yang membaik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang stabil di beberapa daerah. Dilihat dari kontribusinya, pertumbuhan ekonomi nasional masih disumbang, terutama, oleh, wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnustra. Dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 6,4% dan 6,2%, kontribusi wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnustra terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai sebesar 4,0%. Sementara itu, peran wilayah Kali-Sulampua dan Sumatera dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional semakin besar. Wilayah Kali-Sulampua memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,0%, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah tersebut, yaitu sebesar 6,8%. Kontribusi wilayah Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,3%.

Di sisi permintaan, konsumsi masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Peningkatan konsumsi tersebut ditopang oleh membaiknya daya beli seiring dengan kenaikan pendapatan riil masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah didukung pula oleh kenaikan ekspor, terutama, di wilayah Kali-Sulampua, Jabalnustra, dan Jakarta-Banten. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kali-Sulampua juga didorong oleh peningkatan kegiatan investasi.

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi daerah sebagian besar disumbang oleh sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang cukup tinggi, terutama terjadi di wilayah Jabalnustra. Selain itu, ekspansi ekonomi di wilayah Jabalnustra, Sumatera dan Kali-Sulampua, juga ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian. Namun, membaiknya pertumbuhan sektor pertanian belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan mendasar di sektor tersebut mengingat masih terdapat permasalahan terkait luas lahan yang cenderung menyempit dan tingkat produktivitas yang terbatas (Boks: Penurunan Peranan Sektor Pertanian). Pertumbuhan ekonomi nasional juga didukung oleh tingginya pertumbuhan subsektor pertambangan nonmigas di wilayah Kali-Sulampua dan subsektor komunikasi di wilayah Sumatera.

Perkembangan inflasi nasional yang relatif stabil selama tahun 2007 didukung oleh rendahnya inflasi di beberapa daerah penyumbang utama inflasi, terutama, di wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnustra. Rendahnya inflasi di kedua wilayah tersebut didukung oleh rendahnya inflasi kelompok bahan makanan yang disebabkan oleh lancarnya distribusi. Namun, pada periode yang sama, masih terdapat kota-kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Pada tahun 2007 terdapat 25 kota yang mencatat laju inflasi di atas inflasi nasional, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 23 kota. Kota yang mencatat inflasi



tertinggi adalah kota Banda Aceh (10,44%), sedangkan yang terendah adalah kota Pangkal Pinang (2,60%). Perbedaan inflasi antarkota yang masih tinggi tersebut, terutama, disebabkan oleh perbedaan inflasi kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan. Tingginya deviasi inflasi pada kedua kelompok tersebut, antara lain, disebabkan oleh faktor gejolak (*shocks*) di sisi pasokan, yang mencakup ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Kecenderungan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berdampak positif terhadap indikator kesejahteraan di daerah. Tingkat pengangguran di seluruh daerah menurun dan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Di tengah kondisi inflasi yang relatif stabil, turunnya tingkat pengangguran dan naiknya upah nominal di berbagai daerah telah meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, kenaikan daya beli juga didukung oleh kenaikan harga komoditas perkebunan yang relatif tinggi, terutama, di wilayah-wilayah yang subsektor perkebunannya relatif dominan dalam perekonomian wilayah tersebut.

Kinerja perekonomian daerah masih diwarnai oleh perbedaan pertumbuhan antardaerah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, diikuti oleh provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang rata-rata berada di atas 5,95%. Provinsi-provinsi tersebut, antara lain, adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan

Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Riau dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 0,04%; 2,5%; 3,1%; 3,5%; dan 4,3%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, deviasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi meningkat dari 1,7% menjadi 1,8%. Salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan di provinsi-provinsi tersebut adalah keterbatasan infrastruktur.

Di sisi inflasi, beberapa daerah masih mencatat inflasi yang relatif tinggi dan berada di atas inflasi nasional. Inflasi di daerah-daerah tersebut bersumber dari tingginya inflasi kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan dengan faktor penyebabnya adalah *shocks* pasokan. Di sisi kesejahteraan, pendapatan per kapita penduduk masih bervariasi antarprovinsi, terutama, antara wilayah Jakarta-Banten dan Kali-Sulampua, seiring dengan relatif bervariasinya pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.

Wilayah Sumatera

Pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera tahun 2007 tercatat sebesar 5,5%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,6%. Di sisi permintaan, konsumsi masih menjadi penyumbang utama terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Kegiatan investasi di wilayah Sumatera juga mencatat peningkatan tinggi. Bahkan pertumbuhan investasi di wilayah Sumatera relatif lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di wilayah lain. Di sisi penawaran, sumbangan pertumbuhan, terutama, bersumber dari sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor bangunan. Kinerja perekonomian tersebut tidak terlepas dari peran pembiayaan perbankan yang terus meningkat seiring dengan kenaikan penyaluran

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera

	persen		
	2005	2006	2007
Wilayah Sumatera	4,8	4,6	5,5
Zona Sumatera Bagian Utara	4,9	5,7	5,2
Zona Sumatera Bagian Tengah	4,7	4,1	5,4
Zona Sumatera Bagian Selatan	4,6	4,5	5,7

Sumber: BPS daerah, diolah.

kredit perbankan. Di sisi perkembangan harga, laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun di beberapa kota laju inflasi masih relatif tinggi. Turunnya inflasi di Sumatera bersumber dari menurunnya inflasi kelompok bahan makanan.

Membbaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera ditopang oleh peningkatan pertumbuhan di sebagian besar provinsi di wilayah tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama, terjadi di provinsi-provinsi zona Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (Tabel 3.1). Berdasarkan wilayah, provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan merupakan penyumbang utama peningkatan perekonomian wilayah Sumatera. Kenaikan pertumbuhan, terutama, disumbang oleh membaiknya kinerja subsektor perkebunan yang merupakan salah satu sektor utama pendorong perekonomian di ketiga provinsi. Di sisi lain, beberapa provinsi masih mengalami pertumbuhan yang rendah, yaitu provinsi NAD dan Riau. Rendahnya pertumbuhan di kedua provinsi tersebut disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan, khususnya subsektor migas yang merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan di kedua provinsi tersebut. Sementara

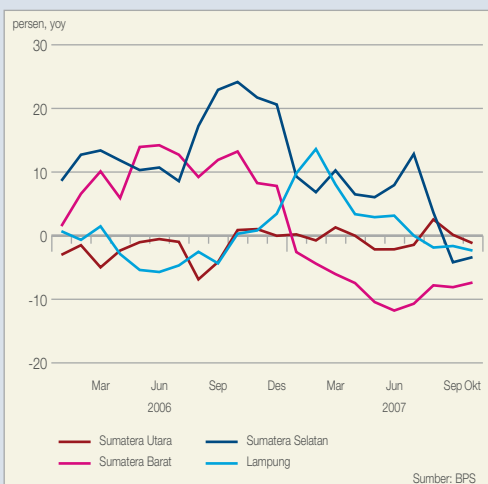
Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB Sumatera Sisi Permintaan

	persen		
	2005	2006	2007
Wilayah Sumatera			
Konsumsi	4,9	5,1	6,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,3	6,1	8,2
Ekspor Neto	4,6	4,1	5,1

Sumber: BPS daerah, diolah.

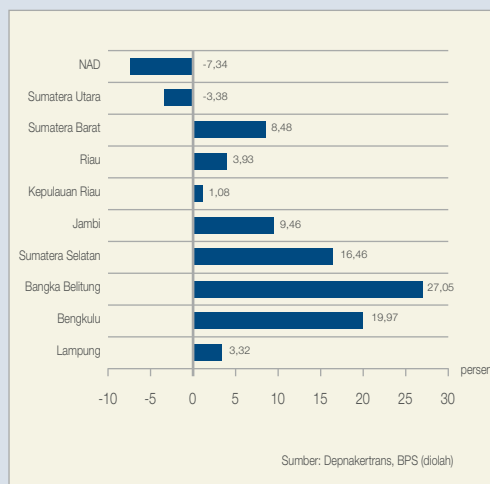
itu, program rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD pascabencana Tsunami belum memberikan stimulus yang optimal terhadap perekonomian daerah tersebut. Program rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD belum sepenuhnya mendorong roda perekonomian di NAD.

Di sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera disumbang oleh konsumsi dan investasi (Tabel 3.2). Selama tahun 2007, konsumsi tumbuh cukup tinggi. Peningkatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh perbaikan nilai tukar petani (NTP) dan pertumbuhan UMP riil di sebagian besar provinsi (Grafik 3.1 dan Grafik 3.2). Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh relatif tinggi di wilayah Sumatera. Membbaiknya investasi, terutama, didorong oleh pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan lintas timur Sumatera serta peningkatan investasi di sektor perkebunan. Pertumbuhan ekspor wilayah Sumatera selama tahun 2007 juga menunjukkan peningkatan. Kenaikan ekspor, terutama, didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas perkebunan seperti *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya, serta karet dan produk karet (Grafik 3.3).



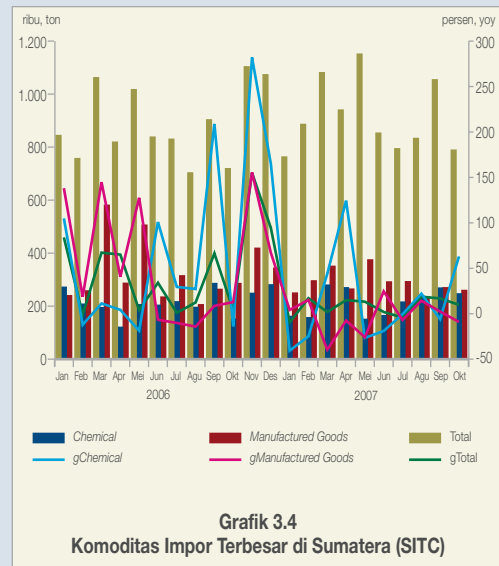
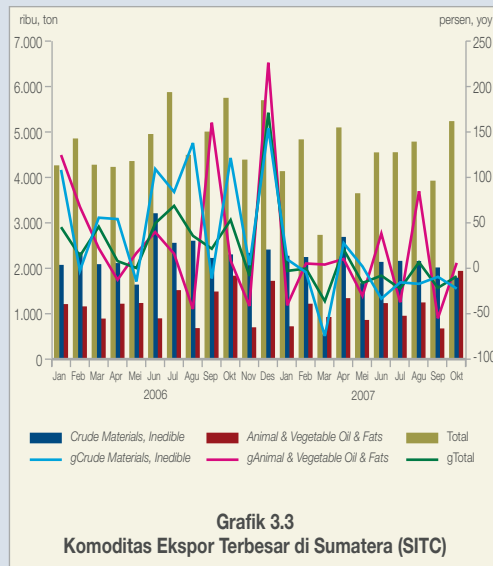
Grafik 3.1
Pertumbuhan NTP Sumatera

Sumber: BPS



Grafik 3.2
Pertumbuhan UMP Riiil Sumatera Tahun 2007

Sumber: Depnakertrans, BPS (diolah)



Di sisi sektoral, peningkatan pertumbuhan di wilayah Sumatera, terutama, disumbang oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor bangunan. Sektor pertanian di wilayah Sumatera selama tahun 2007 tumbuh relatif tinggi, terutama, didorong oleh tingginya pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan (karet dan kelapa sawit). Meningkatnya luas lahan perkebunan menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan produksi karet dan kelapa sawit. Di samping itu, kenaikan harga karet dan harga CPO dunia menjadi pemicu semakin meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet. Di sektor perdagangan, membaiknya pertumbuhan itu tidak terlepas dari membaiknya konsumsi dan pertumbuhan di sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor perdagangan, di antaranya adalah sektor bangunan dan sektor industri. Peningkatan pertumbuhan di sektor bangunan, antara lain, didorong oleh program rekonstruksi pascabencana Tsunami dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit.

Perkembangan perekonomian wilayah Sumatera secara umum dapat terpacu akibat dari disetujuinya UU *Free Trade Zone* Batam-Bintan-Karimun (FTZ-BBK) pada Oktober 2007. FTZ-BBK menetapkan bahwa pulau Batam, pulau Rebang, dan pulau Galang menjadi kawasan perdagangan bebas menyeluruh, sedangkan Bintan dan Karimun menjadi kawasan *enclave*. Dengan pemberlakuan FTZ-BBK, tidak hanya provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memperoleh manfaat atas terpacunya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi daerah sekitarnya juga mendapat efek pengganda melalui hubungan ketergantungan ekonomi antardaerah.

Perbaikan ekonomi wilayah Sumatera juga ditopang oleh sisi pembiayaan. Kinerja perbankan di wilayah Sumatera terus menunjukkan perbaikan. Posisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp203,2 triliun atau naik 19,6% dari tahun sebelumnya. Komposisi DPK hampir merata dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Pertumbuhan nilai kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan. Nilai kredit yang disalurkan selama tahun 2007 mencapai Rp127,2 triliun atau naik 28,6% dari tahun sebelumnya. Pesatnya kenaikan kredit dibandingkan dengan DPK telah memperbaiki kinerja perbankan sebagaimana tercermin dari naiknya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Tabel 3.4).

Di sisi keuangan daerah, tingkat penyerapan APBD di wilayah Sumatera masih relatif rendah. Di provinsi NAD, penyerapan anggaran mencapai Rp1,4 triliun atau 35,4% dari pagu anggaran sebesar Rp4,0 triliun¹. Di provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, realisasi PAD dan belanja daerah baru mencapai rata-rata lebih dari 70%. Masih rendahnya penyerapan disebabkan beberapa faktor, di antaranya proyek Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru dilakukan menjelang akhir tahun.

Inflasi di wilayah Sumatera tahun 2007 mencapai 6,95%, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan laju inflasi di wilayah Sumatera terjadi seiring dengan menurunnya inflasi pada kelompok bahan makanan. Namun, di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (Grafik 3.5 dan Grafik 3.6) tekanan inflasi akibat gangguan pasokan masih terjadi sebagaimana tercermin dari inflasi *volatile*

¹ November 2007.

Tabel 3.3
Pertumbuhan PDRB Sumatera Sisi Penawaran

	persen		
	2005	2006	2007
Wilayah Sumatera			
Pertanian	2,4	2,2	4,3
Pertambangan & Penggalian	1,6	1,6	1,5
Industri Pengolahan	4,6	4,0	4,4
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5,9	5,8	3,3
Bangunan	8,3	7,0	7,3
Perdagangan, Hotel, Restoran	6,8	9,0	7,1
Pengangkutan & Komunikasi	9,7	9,7	10,2
Keuangan, Persewaan	7,0	7,7	8,2
Jasa-jasa	4,7	5,0	8,7

Sumber: BPS daerah, diolah.

foods yang tinggi. Dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Sumatera masih berada di atas inflasi nasional. Dari 14 kota di wilayah Sumatera terdapat 7 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Bahkan untuk kota Banda Aceh, inflasi mencapai 10,44% atau tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di seluruh Indonesia. Tingginya tingkat ketergantungan wilayah Sumatera terhadap pasokan barang dari luar Sumatera maupun antarprovinsi di Sumatera yang disertai oleh belum membaiknya kondisi infrastruktur turut menyebabkan rentannya harga barang-barang di Sumatera terhadap *shocks*.

Wilayah Jakarta-Banten

Perekonomian wilayah Jakarta-Banten tahun 2007 tumbuh sebesar 6,4%, tidak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi permintaan, konsumsi

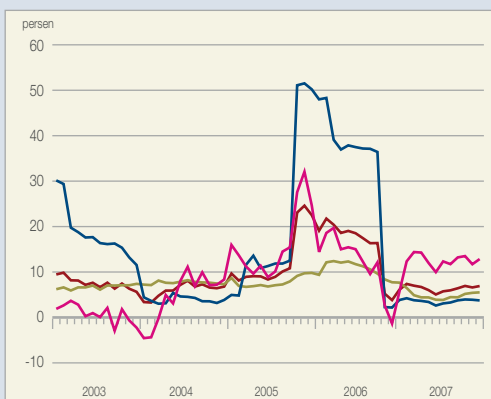
Tabel 3.4
Data Perbankan Sumatera

	2004	2005	2006	2007
DPK				
Posisi (triliun Rp)	118,1	135,5	173,2	203,2
Pertumbuhan (%)	15,7	19,9	21,9	19,6
Giro (triliun Rp)	28,1	40,2	56,5	62,6
Tabungan (triliun Rp)	52,6	50,9	61,7	74,8
Deposito (triliun Rp)	37,5	44,4	55,0	65,8
Kredit (total)				
Posisi (triliun Rp)**	68,5	84,8	100,9	127,2
Pertumbuhan (%)	29,2	25,9	17,4	28,6
Modal Kerja (triliun Rp)	30,9	39,7	47,6	61,3
Investasi (triliun Rp)	16,8	19,2	22,6	26,0
Konsumsi (triliun Rp)	20,8	25,9	30,7	39,9
UMKM (triliun Rp)***	44,2	57,3	69,0	86,0
Loan to Deposit Ratio	57,6	60,5	58,2	62,6
Non Performing Loan Ratio	2,4	6,8	5,8	4,7

** berdasarkan lokasi bank penyalur

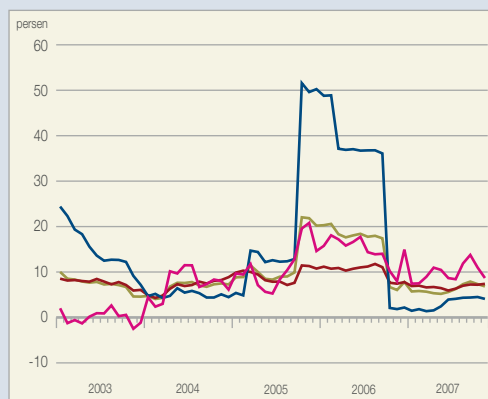
*** berdasarkan lokasi proyek

menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi, terutama, didorong oleh sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor bangunan. Di sisi pembiayaan, kinerja perekonomian ditopang oleh kredit perbankan yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan, sedangkan tingkat realisasi APBD relatif tinggi. Inflasi di wilayah Jakarta-Banten, menurun dibandingkan dengan tahun 2006. Dibandingkan dengan inflasi nasional, wilayah Jakarta-Banten mencatat inflasi yang lebih rendah. Penurunan inflasi terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa.



Grafik 3.5
Inflasi Inti dan Non-inti Sumatera Utara

Sumber: BPS



Grafik 3.6
Inflasi Inti dan Non-inti Sumatera Bagian Selatan

Sumber: BPS

Tabel 3.5
Pertumbuhan PDRB Jakarta-Banten Sisi Permintaan

	persen		
	2005	2006	2007
Konsumsi	6,5	6,7	7,2
PMTB	5,2	4,4	5,6
Ekspor	8,6	9,4	5,6
Impor	5,6	4,2	11,4

Sumber: BPS daerah (diolah)

Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten didukung oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi (Tabel 3.5). Faktor yang memengaruhi peningkatan konsumsi adalah perbaikan daya beli masyarakat, terutama, untuk golongan menengah ke atas, dan ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian yang semakin baik. Investasi mengalami kenaikan pertumbuhan, terutama, terkait dengan pembangunan properti dan infrastruktur transportasi di Jakarta dan sekitarnya.

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta-Banten didorong oleh sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor bangunan. Pertumbuhan sektor perdagangan sejalan dengan membaiknya konsumsi. Peningkatan kegiatan sektor tersebut tercermin pada volume arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Banten, dan Sunda Kelapa. Di sektor keuangan, peningkatan pertumbuhan kredit dan DPK telah mendorong kenaikan kinerja perbankan. Sektor bangunan tumbuh relatif tinggi sebagai akibat dari pembangunan properti dan infrastruktur pengangkutan.

Di wilayah Jakarta-Banten, kinerja perbankan pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan. Penghimpunan DPK mencapai Rp725,7 triliun atau meningkat 13,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi DPK terbesar dalam bentuk deposito, yaitu Rp401,8 triliun, atau sebesar 55,4% dari keseluruhan DPK. Nilai kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan sebesar 26,4% sehingga nilai kredit yang telah disalurkan sebesar Rp503,8 triliun. Pada tahun 2007, meningkatnya kinerja perbankan juga tercermin dari meningkatnya LDR, dan menurunnya tingkat NPL (Tabel 3.7).

Di sisi keuangan daerah, tingkat realisasi APBD tahun 2007 untuk provinsi DKI Jakarta dan provinsi Banten relatif tinggi. Di provinsi DKI Jakarta, tingkat realisasi belanja modal hingga akhir tahun 2007 mencapai 81,7%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Namun, pangsa terbesar realisasi belanja masih terjadi pada pengeluaran rutin, yakni mencapai 87,4%. Sementara itu, di provinsi Banten, realisasi belanja modal

Tabel 3.6
Pertumbuhan PDRB Jakarta-Banten Sisi Penawaran

	persen		
Wilayah/Sektor	2005	2006	2007
Wilayah Jakarta Banten			
Pertanian	2,3	2,4	1,2
Pertambangan & Penggalian	1,6	0,4	2,2
Industri Pengolahan	5,8	5,5	4,3
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5,6	5,1	2,4
Bangunan	6,0	7,6	8,1
Perdagangan, Hotel, Restoran	7,1	6,3	7,9
Pengangkutan & Komunikasi	11,2	12,7	14,1
Keuangan, Persewaan	4,7	4,3	5,4
Jasa-jasa	5,6	5,2	6,6

Sumber: BPS daerah (diolah)

tahun 2007 mencapai 87,8%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2006.

Laju inflasi Jakarta-Banten tahun 2007 mencapai 6,05%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 6,15%. Penurunan laju inflasi di wilayah Jakarta-Banten didorong oleh menurunnya inflasi pada kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan. Menurunnya inflasi di Jakarta-Banten, antara lain, disebabkan oleh lancarnya pasokan barang ke Jakarta, termasuk untuk komoditas beras dan minyak goreng. Laju inflasi wilayah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.

Wilayah Jabalnustra

Selama tahun 2007, wilayah Jabalnustra mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

Tabel 3.7
Data Perbankan Jakarta-Banten

	2004	2005	2006	2007
DPK				
Posisi (triliun Rp)	529,8	582,5	628,7	725,7
Pertumbuhan (%)	8,2	16,9	5,0	13,6
Giro (triliun Rp)	146,8	160,1	175,9	200,6
Tabungan (triliun Rp)	95,6	85,9	99,2	123,3
Deposito (triliun Rp)	287,4	336,4	353,5	401,8
Kredit (total)				
Posisi (triliun Rp)**	299,7	356,1	409,5	503,8
Pertumbuhan (%)	26,4	24,0	8,1	26,4
Modal Kerja (triliun Rp)	158,0	190,0	225,8	275,6
Investasi (triliun Rp)	74,7	83,0	93,4	114,1
Konsumsi (triliun Rp)	67,0	83,1	90,4	114,2
UMKM (triliun Rp)***	63,5	85,2	97,8	131,7
Loan to Deposit Ratio	57,2	60,6	62,4	69,4
Non Performing Loan Ratio	6,0	8,7	6,8	4,9

** berdasarkan lokasi bank penyalur

*** berdasarkan lokasi proyek

Tabel 3.8
Perkembangan APBD Jakarta-Banten dan Realisasinya

miliar Rp

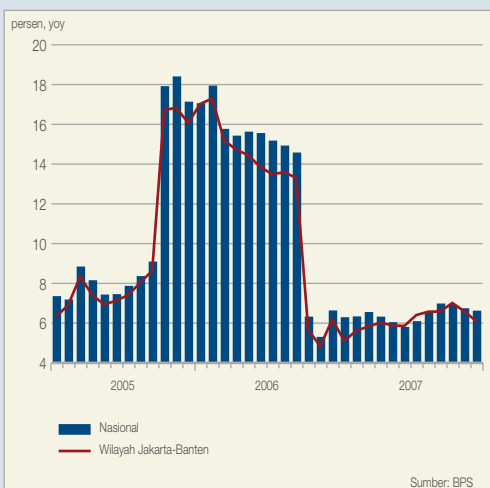
Uraian	Anggaran 2006	Realisasi s.d Tw IV 2006	%	Anggaran 2007	Realisasi s.d Tw IV 2007	%
DKI Jakarta						
Pendapatan Asli Daerah	8.666,7	7.771,8	89,7	10.084,3	8.819,8	87,5
Dana Perimbangan	6.661,0	6.459,9	97,0	7.572,1	7.445,9	98,3
Belanja Administrasi dan Operasional	11.974,8	10.993,4	91,8	13.929,1	12.171,8	87,4
Belanja Modal	5.828,2	4.348,6	74,6	6.142,7	5.019,3	81,7
Banten						
Pendapatan Asli Daerah	1.126,4	1.118,0	99,3	1.306,9	1.306,2	99,9
Dana Perimbangan	480,1	465,4	96,9	590,7	574,3	97,2
Belanja Administrasi dan Operasional	7021,5	651,5	92,9	828,6	626,8	75,6
Belanja Modal	396,7	390,1	98,3	443,2	389,2	87,8

5,4%. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi, terutama, ditopang oleh konsumsi. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor utama, yakni sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan. Di sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan di wilayah Jabalnustra menunjukkan peningkatan 20,9%. Tingkat realisasi APBD di beberapa provinsi di Jabalnustra juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju inflasi di Jabalnustra menurun dibandingkan dengan inflasi tahun 2006, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Penurunan laju inflasi disebabkan oleh turunnya inflasi di hampir seluruh kelompok barang dan jasa.

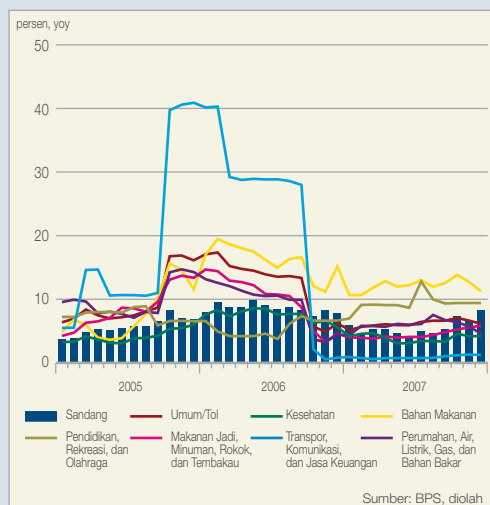
Akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabalnustra, terutama, disumbang oleh pertumbuhan provinsi Jawa Barat, yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan sekaligus

menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan wilayah Jabalnustra. Sementara itu, zona Jawa Bagian Timur menjadi penyumbang terbesar kedua yang diikuti oleh zona Jawa Bagian Tengah. Masih tingginya pertumbuhan di ketiga zona Jawa tersebut mengindikasikan bahwa bencana banjir yang terjadi di Jawa tidak memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Jabalnustra.

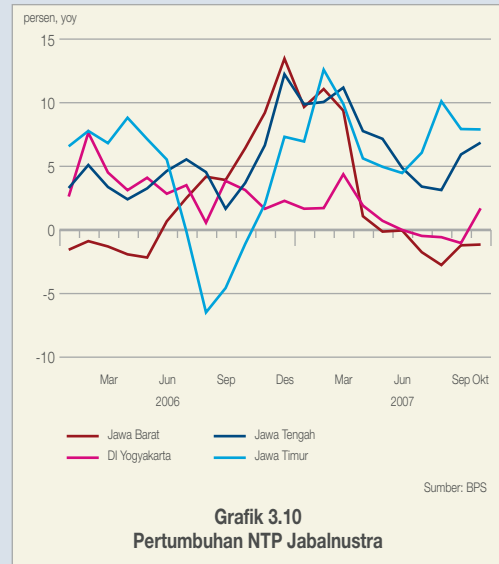
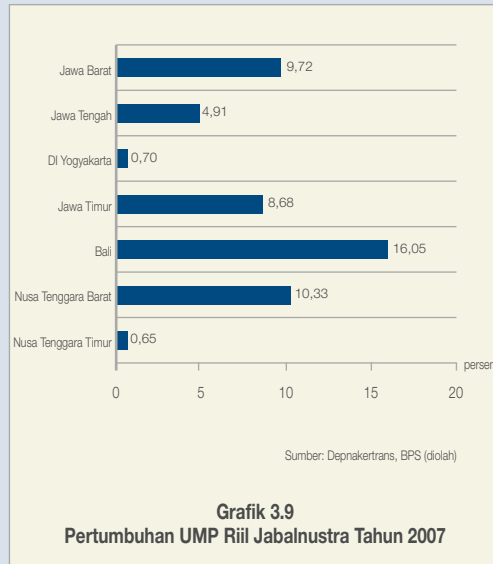
Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan ekspor masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabalnustra. Peningkatan konsumsi terkait dengan perbaikan daya beli seiring dengan kenaikan UMP riil di seluruh provinsi (Grafik 3.9) dan kenaikan NTP di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Grafik 3.10). Ekspor meningkat di zona Jawa Bagian Barat, terutama, untuk komoditas



Grafik 3.7
Inflasi Wilayah Jakarta-Banten



Grafik 3.8
Inflasi Jakarta-Banten



tekstil dan produk tekstil seiring dengan meningkatnya permintaan luar negeri.

Di sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi wilayah Jabalnustra bersumber dari sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi. Perbaikan kinerja sektor tersebut ditunjukkan oleh peningkatan arus barang keluar wilayah Jabalnustra. Pertumbuhan sektor pertanian, terutama, disebabkan oleh meningkatnya produksi padi dan jagung yang merupakan komoditas utama sektor pertanian di wilayah Jabalnustra (Tabel 3.10). Meningkatnya produksi padi dan jagung di Jabalnustra didukung oleh membaiknya tingkat produktivitas. Perubahan cuaca dan bencana banjir relatif tidak berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian di Jabalnustra. Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan yang juga menjadi salah satu sektor andalan wilayah Jabalnustra, menunjukkan peningkatan. Di zona Jawa Bagian Barat, peningkatan sektor industri pengolahan didorong oleh kinerja subsektor alat angkut, subsektor mesin, dan subsektor TPT. Di zona Jawa Bagian Timur, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, terutama, terjadi pada subsektor

makanan, minuman, dan tembakau, serta subsektor kertas dan barang cetakan. Di zona Jawa Bagian Tengah, tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan, terutama, didorong oleh tingginya pertumbuhan subsektor industri migas sebagai akibat peningkatan produksi di kilang minyak Cilacap dan beberapa blok minyak lainnya.

Kinerja perbankan di Jabalnustra tahun 2007 terus menunjukkan perbaikan. Penghimpunan DPK hingga akhir 2007 mencapai Rp373,1 triliun atau meningkat 13%, dengan komposisi terbesar dalam bentuk deposito, yaitu Rp149,8 triliun (40,1% dari total DPK). Sementara itu, nilai kredit yang telah disalurkan mencapai Rp245,7 triliun atau meningkat sebesar 20,9% yang sebagian besar disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja. Perbaikan kinerja perbankan juga ditunjukkan oleh meningkatnya rasio LDR dan turunnya rasio NPL di Jabalnustra.

Tabel 3.9
Pertumbuhan PDRB Wilayah Jabalnustra

	2005	2006	2007
Wilayah Jabalnustra	5,6	5,4	6,2
Zona Jawa Bagian Barat	5,6	6,0	6,4
Zona Jawa Bagian Tengah	5,3	5,2	5,5
Zona Jawa Bagian Timur	6,0	5,8	6,0

Sumber: BPS daerah, diolah

Tabel 3.10
Produksi Padi dan Jagung di Jawa dan Luar Jawa

	2005	2006	2007	Pertumbuhan 2007 (%)
PADI				
Produksi (ribu ton)				
Jawa	29.767,0	29.961,0	30.628,7	2,2
Luar Jawa	24.389,6	24.495,6	26.413,9	7,8
Indonesia	54.156,5	54.456,6	57.042,6	4,7
JAGUNG				
Produksi (ribu ton)				
Jawa	7.455,0	6.689,0	7.457,4	11,5
Luar Jawa	5.068,7	4.921,3	5.822,0	18,3
Indonesia	12.523,7	11.610,3	13.279,4	14,4

Sumber: BPS
* ARAM III

Tabel 3.11
Data Perbankan Wilayah Jabalnustra

	2004	2005	2006	2007
DPK				
Posisi (triliun Rp)	265,1	278,7	324,5	373,1
Pertumbuhan (%)	3,4	15,1	13,8	13,0
Giro (triliun Rp)	54,2	57,6	68,0	78,9
Tabungan (triliun Rp)	109,8	105,4	123,9	144,4
Deposito (triliun Rp)	101,0	115,7	132,5	149,8
Kredit (total)				
Posisi (triliun Rp) **	150,8	185,9	207,0	245,7
Pertumbuhan (%)	24,1	25,1	10,3	20,9
Modal Kerja (triliun Rp)	80,8	99,4	113,0	131,5
Investasi (triliun Rp)	17,8	20,1	21,9	25,7
Konsumsi (triliun Rp)	52,2	66,5	72,1	88,5
UMKM (triliun Rp)***	128,9	168,1	191,4	206,1
<i>Loan to Deposit Ratio</i>	58,4	63,5	61,6	65,9
<i>Non Performing Loan Ratio</i>	2,9	4,6	5,0	4,3

** berdasarkan lokasi bank penyalur

*** berdasarkan lokasi proyek

Di sisi keuangan daerah, tingkat realisasi APBD tahun 2007 di Jabalnustra secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Di provinsi Jawa Barat, tingkat realisasi komponen belanja langsung mencapai di atas 90%. Tingginya realisasi belanja tersebut, antara lain, terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan, terutama, untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Di provinsi Jawa Tengah, komposisi belanja didominasi oleh

belanja pegawai sebesar 51,9%, sedangkan pangsa belanja modal untuk pelayanan publik hanya mencapai 10,7% dari total belanja (Tabel 3.12).

Perkembangan inflasi di wilayah Jabalnustra menunjukkan penurunan, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Menurunnya inflasi di wilayah Jabalnustra didorong oleh kelompok bahan makanan, terutama, komoditas beras. Menurunnya inflasi bahan makanan, antara lain, terkait dengan kecukupan pasokan dan lancarnya distribusi kebutuhan pokok di wilayah Jabalnustra.

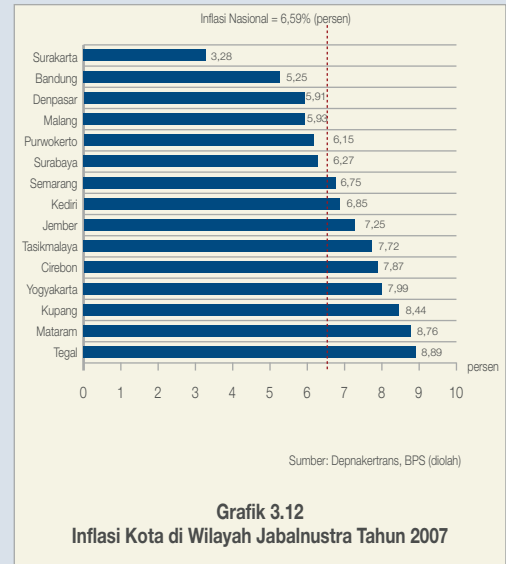
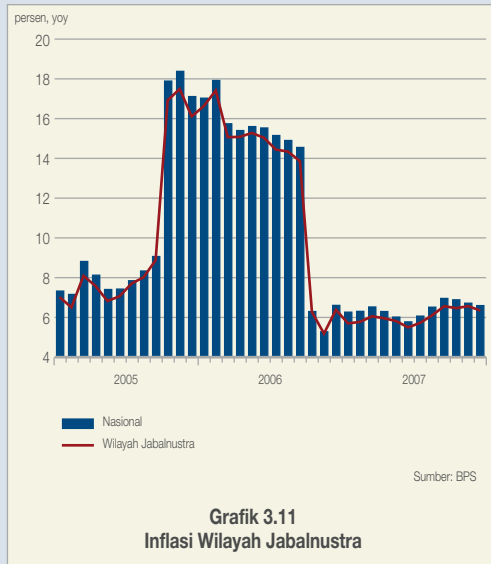
Wilayah Kali-Sulampua

Selama tahun 2007, perekonomian di wilayah Kali-Sulampua mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan inflasi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi Kali-Sulampua mencapai 6,8%, atau tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sumber pertumbuhan ekonomi di sisi permintaan adalah konsumsi, ekspor dan investasi. Sementara itu di sisi sektoral, sektor perdagangan dan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, wilayah Kali-Sulampua menghadapi laju inflasi yang tinggi (7,77%) bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Sumber tingginya inflasi adalah kenaikan harga barang untuk kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kotamadya di Jawa Tengah

Uraian	2007			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1 Belanja Pegawai	2.123,92	2.407,30	2.501,19	2.658,47
2 Belanja Barang dan Jasa	423,81	706,49	720,59	724,56
3 Belanja Perjalanan Dinas	64,95	100,81	104,75	104,75
4 Belanja Pemeliharaan	141,31	242,75	252,22	235,49
5 Belanja Lain-lain	1,27	1,27	1,30	1,40
6 Belanja Modal	149,75	296,26	444,39	546,24
7 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	217,49	683,54	615,19	724,68
8 Belanja Tidak Tersangka	0,00	133,04	140,89	128,80
Jumlah	3.122,51	4.571,44	4.780,50	5.124,3
Distribusi (dalam persentase)				
1 Belanja Pegawai	68,02	52,66	52,32	51,88
2 Belanja Barang dan Jasa	13,57	15,45	15,07	14,14
3 Belanja Perjalanan Dinas	2,08	2,21	2,19	2,04
4 Belanja Pemeliharaan	4,53	5,31	5,28	4,60
5 Belanja Lain-lain	0,04	0,03	0,03	0,03
6 Belanja Modal	4,80	6,48	9,30	10,66
7 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	6,97	14,95	12,87	14,14
8 Belanja Tidak Tersangka	0,00	2,91	2,95	2,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

miliar Rp



Perekonomian wilayah Kali-Sulampua tahun 2007 tumbuh relatif tinggi. Tingginya pertumbuhan tersebut disumbang oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua yang mencapai 11,1%. Sementara itu, wilayah Kalimantan mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yaitu sebesar 3,8%. Di zona Sulampua, sebagian besar provinsi mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, kecuali provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku yang tumbuh masing-masing sebesar 5,2% dan 5,1%. Di zona Kalimantan, provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Kalimantan Timur juga mengalami pertumbuhan yang relatif rendah yaitu masing-masing sebesar 5,3% dan 2,5%. Terbatasnya pertumbuhan di provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Kalimantan Selatan disebabkan relatif rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan.

Di sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kali-Sulampua. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh perbaikan daya beli masyarakat, yang tercermin pada peningkatan UMP dan NTP di beberapa provinsi (Grafik 3.13 dan Grafik 3.14). Kenaikan NTP di Kali-Sulampua disebabkan oleh peningkatan harga komoditas perkebunan. Ekspor wilayah Kali-Sulampua juga tumbuh seiring dengan peningkatan ekspor untuk komoditas primer seperti batubara, karet, dan CPO, akibat tingginya permintaan baik dari pasar domestik maupun internasional. Sementara itu, investasi terus membaik, terutama, di sektor perkebunan dan pertambangan, serta pembangunan jalur kereta api batubara.

Di sisi sektoral, sumber pertumbuhan adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor utama di Kali-Sulampua memberikan kontribusi terbatas. Di sektor perdagangan, pertumbuhan didorong oleh membaiknya konsumsi dan kinerja sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor perdagangan. Kinerja sektor pertanian membaik, ditopang oleh peningkatan produksi di subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor perkebunan. Hal itu didukung oleh meningkatnya luas lahan dan membaiknya tingkat produktivitas. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pertambangan yang membaik terjadi di zona Sulawesi, sebagai akibat meningkatnya produksi bijih nikel dan emas seiring dengan perluasan tambang bawah tanah oleh perusahaan pertambangan terbesar di Papua.

Di wilayah Kali-Sulampua, kinerja perbankan menunjukkan peningkatan. Penghimpunan DPK telah mencapai Rp132,9 triliun, dengan komposisi terbesar dalam bentuk tabungan, yaitu Rp55,4 triliun, atau sebesar 41,7% dari keseluruhan DPK. Sementara itu, nilai kredit yang telah disalurkan mencapai Rp77,5 triliun, di mana kredit lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit konsumsi. Membaiknya kinerja perbankan tercermin pada terus meningkatnya LDR. Di samping itu, NPL di wilayah Kali-Sulampua menurun, walaupun rasio NPL di wilayah Kali-Sulampua tertinggi jika dibandingkan dengan NPL di wilayah lain. (Tabel 3.14).

Tabel 3.13
Pertumbuhan PDRB Wilayah Kali-Sulampua

	persen		
	2005	2006	2007
Wilayah Kali-Sulampua	5,5	6,2	6,8
Zona Kalimantan	3,9	3,7	3,8
Zona Sulawesi	8,1	9,9	11,1

Sumber: BPS daerah, diolah

Di sisi keuangan daerah, realisasi keuangan Pemda relatif tinggi. Di provinsi Kalimantan Timur, realisasi belanja APBD sampai akhir tahun mencapai 80%. Di provinsi Kalimantan Tengah, realisasi belanja APBD mencapai 64% dari anggaran belanja tahun 2007. Administrasi anggaran dan waktu yang relatif lama menjadi faktor penghambat realisasi anggaran.

Perkembangan inflasi di wilayah Kali-Sulampua selama tahun 2007 meningkat cukup signifikan, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Meningkatnya inflasi di wilayah Kali-Sulampua didorong oleh kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan serta kelompok pengangkutan. Dari 14 kota di wilayah Kali-Sulampua, terdapat 12 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di Kali-Sulampua adalah keterbatasan pasokan di sebagian wilayah Kali-Sulampua sebagai akibat masalah kelancaran distribusi, serta ketergantungan pada pasokan daerah lain, terutama, dari pulau Jawa. Hal itu tercermin pada tingginya inflasi *volatile foods* di beberapa kota di Kali-Sulampua, di antaranya Banjarmasin (Grafik 3.15) dan Manado (Grafik 3.16).

Tabel 3.14
Data Perbankan Wilayah Kali-Sulampua

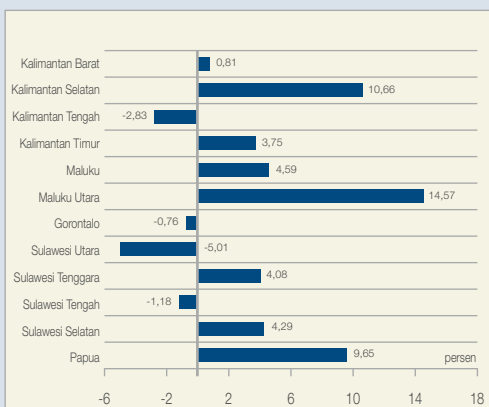
	2004	2005	2006	2007
DPK				
Posisi (triliun Rp)	75,6	85,4	111,0	132,9
Pertumbuhan (%)	16,3	20,6	25,7	20,7
Giro (triliun Rp)	16,8	23,0	36,7	42,2
Tabungan (triliun Rp)	39,5	39,2	49,1	55,4
Deposito (triliun Rp)	19,3	23,2	25,3	35,3
Kredit (total)				
Posisi (triliun Rp) **	43,4	52,6	62,0	77,5
Pertumbuhan (%)	39,2	24,0	16,4	27,5
Modal Kerja (triliun Rp)	17,2	20,5	24,9	31,6
Investasi (triliun Rp)	8,2	9,8	11,2	12,7
Konsumsi (triliun Rp)	18,0	22,3	25,9	33,2
UMKM (triliun Rp)***	33,9	43,3	51,3	64,5
Loan to Deposit Ratio	58,0	59,7	55,2	58,3
Non Performing Loan Ratio	2,7	7,1	6,1	6,0

** berdasarkan lokasi bank penyalur

*** berdasarkan lokasi proyek

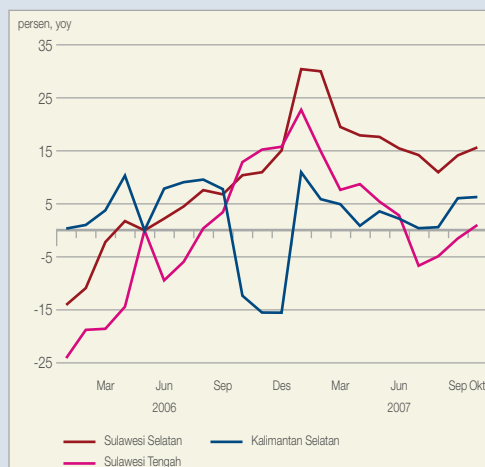
Demografi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik dan stabilnya inflasi di sebagian besar daerah secara bertahap mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran daerah menurun dan tingkat pendapatan per kapita membaik. Perbaikan tingkat kesejahteraan tersebut juga tidak terlepas dari implementasi berbagai program Pemerintah di antaranya program asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) dan program bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, perbaikan kesejahteraan tersebut belum signifikan seperti ditunjukkan oleh relatif kecilnya penurunan tingkat



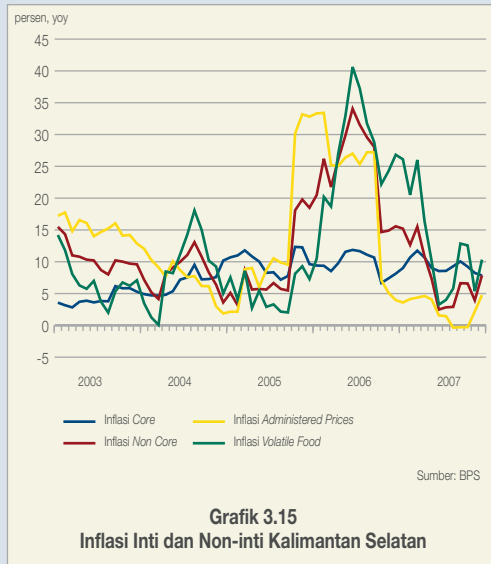
Sumber: Depnakertrans, BPS (diolah)

Grafik 3.13
Pertumbuhan UMP Riil Kali-Sulampua Tahun 2007



Sumber: BPS

Grafik 3.14
Pertumbuhan NTP Kali-Sulampua

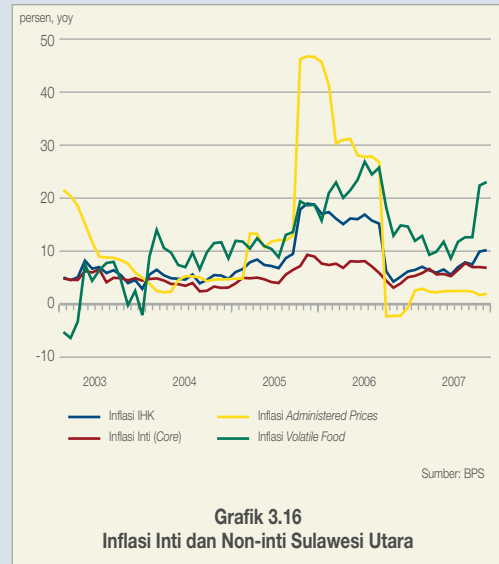


pengangguran dan tingkat kemiskinan, serta masih terdapatnya perbedaan pendapatan antardaerah.

Kondisi ketenagakerjaan di daerah pada tahun 2007 menunjukkan perbaikan. Penyerapan tenaga kerja meningkat di seluruh daerah seiring dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kenaikan jumlah tenaga kerja tertinggi terjadi di daerah Sumatera, yang diikuti dengan daerah Jawa dan Sulawesi (Tabel 3.15). Namun kenaikan penyerapan tenaga kerja tidak diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran secara signifikan. Hal itu disebabkan oleh karena penyerapan tenaga kerja yang tidak sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi terjadi di daerah Jakarta-Banten, Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sementara itu di provinsi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Papua dan Sumatera tingkat pengangguran rendah, bahkan berada di bawah tingkat pengangguran nasional.

Membbaiknya pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk yang rendah² telah meningkatkan pendapatan per kapita. Seluruh wilayah mengalami kenaikan pendapatan per kapita dengan pendapatan per kapita tertinggi dialami oleh provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur (Grafik 3.17). Namun, perbaikan pendapatan tersebut masih diikuti oleh perbedaan pendapatan antardaerah, terutama, antara wilayah Jakarta-Banten dan wilayah Kali-Sulampua. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapatan antardaerah, di antaranya adalah perbedaan

2 Sumber: *Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, Maret 2007, BPS.



laju pertumbuhan ekonomi serta tingkat pertumbuhan penduduk.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja telah menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tahun 2007 di seluruh wilayah turun dibandingkan dengan tahun 2006. Penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di wilayah Sumatera (8,1%) diikuti oleh wilayah Jakarta-Banten (6,0%) (Grafik 3.18). Namun, penurunan jumlah penduduk miskin relatif kurang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh pangsa penduduk miskin terhadap populasi penduduk di masing-masing daerah yang relatif tidak berubah.

Permasalahan Ekonomi Daerah

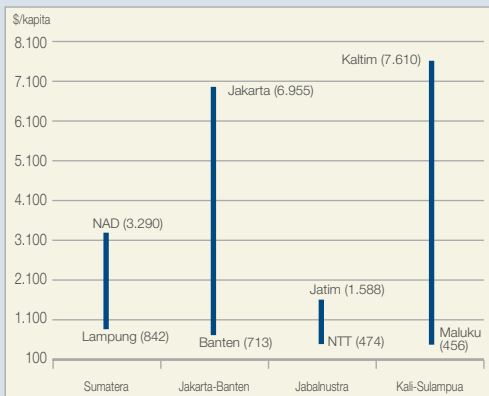
Perekonomian daerah masih menghadapi permasalahan yang antara lain mencakup perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah dan meningkatnya jumlah kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Kedua permasalahan daerah tersebut menyebabkan perbedaan peningkatan kualitas ekonomi daerah. Namun, dengan perbaikan infrastruktur serta koordinasi antarinstansi, berbagai permasalahan tersebut secara bertahap diupayakan untuk diatasi.

Perekonomian nasional menghadapi permasalahan perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan, terutama, terjadi di wilayah Kali-Sulampua dan Sumatera. Beberapa provinsi di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan PDRB yang relatif jauh di bawah pertumbuhan nasional. Bahkan, beberapa daerah yang termasuk dengan kategori kaya sumber daya alam (SDA) mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih

Tabel 3.15
Penduduk Bekerja dan Persentase Pengangguran menurut Wilayah

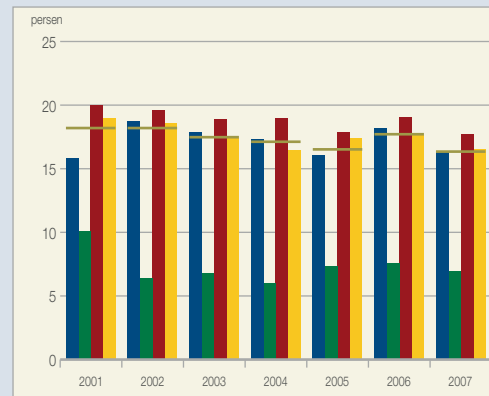
	Angkatan Kerja (juta orang)		Bekerja (juta orang)		Tingkat Pengangguran (%)	
	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2006	Agustus 2007	Agustus 2006	Agustus 2007
Sumatera	21,08	21,66	18,95	19,73	10,10	8,91
Jabalnusra	61,72	64,15	55,74	58,61	9,69	8,64
Jawa (non Jakarta-Banten)	55,59	57,91	49,99	52,67	10,07	9,05
Bali dan Nusa Tenggara	6,13	6,24	5,75	5,94	6,20	4,81
Jakarta-Banten	8,29	8,42	7,05	7,22	14,96	14,25
Kali-Sulampua	15,26	15,72	13,71	14,36	10,16	8,65
Kalimantan	6,10	6,13	5,53	5,67	9,34	7,50
Sulawesi	7,00	7,35	6,21	6,62	11,29	9,93
Papua dan Maluku	2,16	2,24	1,97	2,07	8,80	7,59
Nasional	106,39	109,94	95,46	99,93	10,28	9,11

Sumber: BPS



Grafik 3.17
PDRB per Kapita per Wilayah

Sumber: BPS, diolah



Grafik 3.18
Tingkat Kemiskinan Penduduk Wilayah

Sumber: BPS (diolah)

rendah dari pertumbuhan nasional, seperti NAD, Riau, dan Kalimantan Timur. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, deviasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi meningkat dari 1,7% menjadi 1,8%. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan di beberapa daerah relatif rendah, di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, aturan daerah yang kurang menarik minat investasi, dan bertumpunya ekonomi daerah pada sektor primer tertentu (pertambangan).

Di sisi inflasi, sebagian besar kota-kota di Indonesia menghadapi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan dalam 4

tahun terakhir, terdapat 34 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Tingginya inflasi di kota-kota tersebut, terutama, berasal dari kenaikan inflasi barang kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di daerah-daerah tersebut adalah pengaruh gangguan pasokan barang. (Boks: Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah). Beberapa permasalahan yang menyebabkan gangguan pasokan di antaranya: kelangkaan pasokan, buruknya infrastruktur untuk distribusi, *span of distribution* yang panjang, perilaku penimbunan dan pungli, serta pengaruh musiman.

Inflasi Daerah: Permasalahan dan Upaya Pengendalian

Inflasi yang rendah dan stabil adalah prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, pelaku ekonomi dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih terukur. Produsen dapat menetapkan harga jual yang lebih terjangkau, sedangkan konsumen dapat memperoleh barang kebutuhan yang sesuai dengan daya belinya. Kestabilan inflasi yang berdampak pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berimplikasi pada sisi kesejahteraan yang ditandai oleh meningkatnya daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan penduduk. Kondisi itu akan membantu peningkatan kualitas penduduk di daerah sebagaimana misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Inflasi IHK nasional merupakan gabungan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi di 45 kota di Indonesia. Ditinjau dari bobot per kota, kota Jakarta merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi nasional. Walaupun demikian, apabila ditinjau dari sisi wilayah, seluruh wilayah memiliki bobot inflasi yang cukup besar terhadap laju inflasi nasional (Tabel 1).

Perkembangan inflasi kota dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan terdapatnya 34 kota yang hampir secara berkelanjutan mengalami inflasi relatif di atas inflasi IHK nasional. Tingginya inflasi di kota-kota tersebut terutama berasal dari kenaikan inflasi pada barang kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan. Ditinjau dari faktor penyebabnya, inflasi yang dihadapi setiap kota secara umum relatif sama yaitu faktor fundamental (berupa tekanan nilai tukar, tingginya ekspektasi, dan kesenjangan *output*) dan *administered priced*. Namun secara khusus yang membedakan perilaku perubahan harga di daerah adalah faktor pasokan dan distribusi barang yang dapat menimbulkan perbedaan kejutan pasokan di masing-masing daerah. Terdapat beberapa aspek penyebab kejutan, yaitu kelangkaan pasokan, buruknya infrastruktur untuk distribusi, jalur distribusi yang panjang, perilaku penimbunan dan pungli, serta pengaruh musiman.

Terciptanya kestabilan inflasi IHK merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Bank Indonesia memformulasikan suatu kebijakan moneter berdasarkan

Tabel 1
Bobot Inflasi per Kota

Sumatera		Jakarta-Banten		Jabalnustra		Kali-Sulampua	
Lhokseumawe	0,25	Jakarta	27,66	Tasikmalaya	0,7	Pontianak	1,36
Banda Aceh	0,66	Serang/Cilegon	2,18	Bandung	6,76	Sampit	0,26
Padang Sidempuan	0,31			Cirebon	0,87	Palangkaraya	0,52
Sibolga	0,24			Purwokerto	0,69	Banjarmasin	1,93
Pematang Siantar	0,68			Surakarta	1,58	Balikpapan	1,31
Medan	5,98			Semarang	4,36	Samarinda	1,55
Padang	2,07			Tegal	0,83	Manado	1,27
Pekanbaru	1,95			Yogyakarta	1,22	Palu	0,68
Batam	1,72			Jember	0,92	Makassar	3,06
Jambi	1,31			Kediri	0,86	Kendari	0,5
Palembang	3,98			Malang	2,05	Gorontalo	0,46
Bengkulu	0,76			Surabaya	8,9	Ternate	0,32
Bandar Lampung	2,25			Denpasar	1,94	Ambon	0,58
Pangkal Pinang	0,44			Mataram	1,07	Jayapura	0,4
				Kupang	0,61		
Total	22,6	Total	29,84	Total	33,36	Total	14,2

kerangka *inflation targeting*. Dalam kerangka tersebut, bank sentral memengaruhi inflasi di sisi fundamental, terutama, dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat. Namun di sisi nonfundamental, Bank Indonesia tidak dapat memengaruhi inflasi mengingat faktor *administered price* adalah kewenangan Pemerintah dan kejutan pasokan ditentukan oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Terkait dengan pasokan dan distribusi, Pemerintah Daerah memiliki peranan sentral pascaotonomi daerah. Oleh karenanya, pengendalian kejutan pasokan harus menjadi perhatian Bank Indonesia dengan mendorong kerja sama antara Pemerintah dan institusi di daerah yang bersentuhan dengan masalah produksi dan distribusi barang serta penyusunan kebijakan.

Pengendalian inflasi daerah yang dilakukan dengan mengajak *stakeholders* di daerah melalui beberapa strategi pendekatan sebagai berikut.

- a. Memperkuat aspek kelembagaan antara Bank Indonesia di daerah dan Pemda, terutama, dalam rangka menanamkan komitmen pihak terkait untuk bersama-sama mengendalikan inflasi di daerah mengingat terciptanya inflasi yang rendah dan stabil merupakan kebutuhan bersama.

- b. Mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah. Adapun tujuan dari strategi itu adalah untuk menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, memperpendek jalur distribusi, memperbaiki infrastruktur di daerah, dan menghapus perilaku penimbunan dan pungutan liar.
- c. Melakukan diseminasi untuk memberikan pemahaman masyarakat di daerah terkait kondisi dan prospek ekonomi serta risiko tekanan inflasi.

Terkait dengan penguatan aspek kelembagaan, Bank Indonesia melalui KBI di masing-masing provinsi akan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan Pemda. Terdapat dua format kerja sama yang akan dikembangkan dan implementasikan tahun 2008, yaitu mengoptimalkan *Focus Group Discussion* (FGD) atau kerja sama pembentukan Tim Pengendalian Inflasi di Daerah (TPID). Adapun tujuan dari langkah memperkuat kelembagaan tersebut adalah menyampaikan kepedulian mengenai tekanan inflasi di masing-masing daerah dan upaya untuk menanganinya. Terdapat tiga fokus dari pengendalian inflasi daerah, yaitu: (i) mengamankan kecukupan pasokan; (ii) meminimalkan gangguan harga yang bersumber dari peraturan daerah (retribusi dan pajak); dan (iii) memberikan pemahaman kondisi dan prospek ekonomi serta risiko tekanan inflasi di daerah.

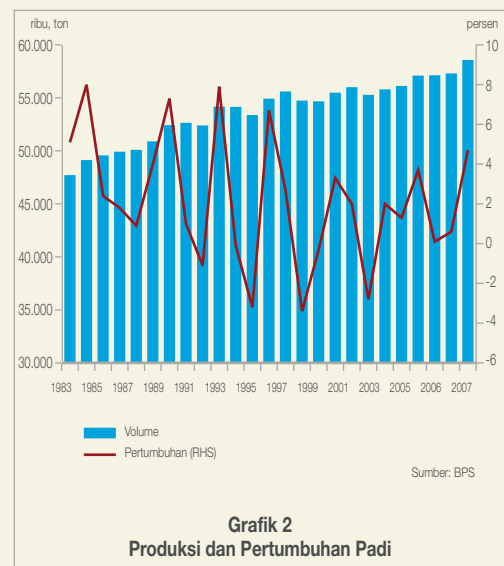
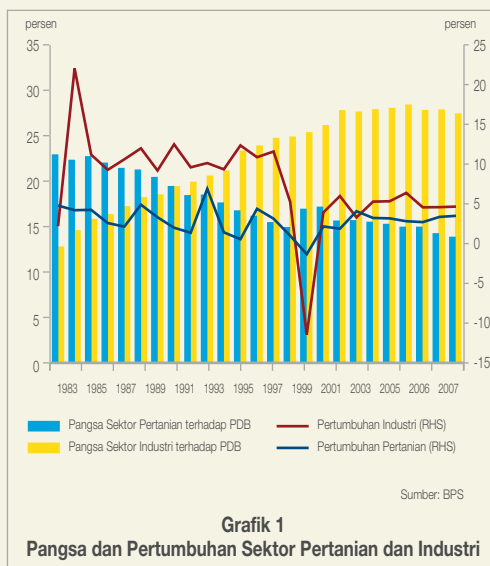
Penurunan Peranan Sektor Pertanian

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan peran sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian. Hal itu terlihat dari penurunan pangsa sektor pertanian terhadap ekonomi nasional, dari sekitar 20% pada tahun 1990 menjadi hanya sekitar 15% (Grafik 1). Penurunan peranan pertanian disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertanian yang relatif rendah dengan sumber utama perlambatan berasal dari subsektor tanaman bahan makanan (tabama). Komoditas yang tergabung dalam subsektor tabama di antaranya padi, jagung, gandum, dan kentang. Padi merupakan komponen utama penyumbang subsektor tabama.

Produksi tanaman padi dalam 20 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan (Grafik 2). Perlambatan tersebut, terutama, disebabkan oleh pertumbuhan produksi padi di wilayah Jawa yang tidak secepat wilayah lainnya. Wilayah Jawa merupakan sentra produksi padi terbesar di Indonesia dengan pangsa sekitar 57,6%, yang diikuti oleh wilayah Sumatera dan Sulawesi dengan pangsa masing-masing sebesar 22% dan 9,6%.

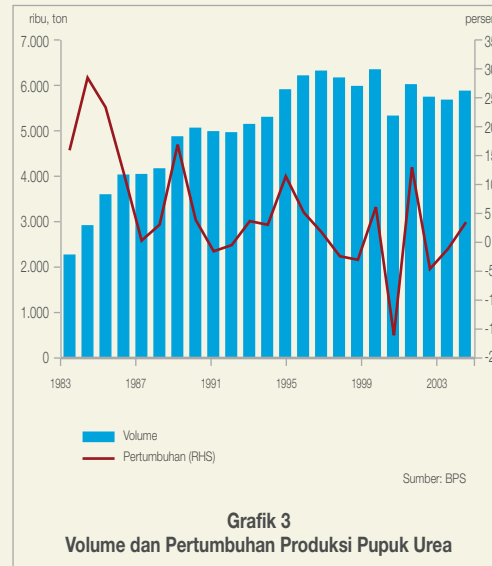
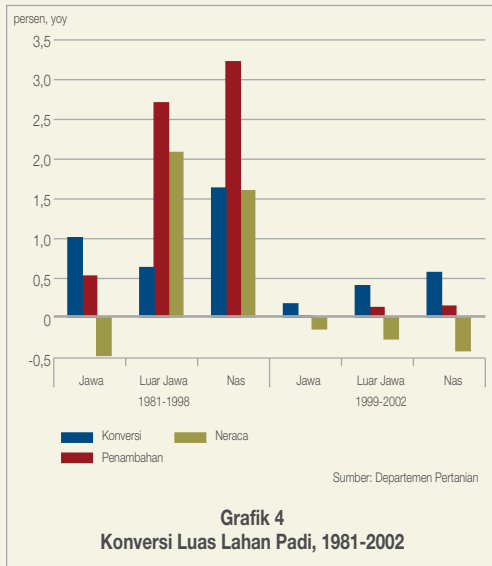
Melambatnya pertumbuhan produksi tanaman padi disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya produktivitas dan berkurangnya luas lahan. Rendahnya produktivitas disebabkan beberapa hal, yaitu kondisi infrastruktur pertanian yang mulai menurun, pemakaian teknologi benih yang masih terbatas, dan pengadaan/distribusi pupuk serta obat-obatan yang kurang memadai. Jaringan infrastruktur pertanian mengalami kerusakan yang relatif signifikan dengan tingkat kerusakan mencapai 17,5% (Tabel 1). Kerusakan infrastruktur terparah terjadi pada jaringan irigasi dan waduk penyimpanan air. Sistem penyaluran benih berlabel belum menjamin adanya kontrol kualitas sehingga tingkat produksi tidak maksimal walaupun petani telah berusaha melakukan penangkaran atas benih berlabel. Di sisi pasokan pupuk, muncul keterbatasan penyediaan pupuk mengingat tingkat produksi pupuk dalam negeri yang terbatas akibat menurunnya kapasitas (Grafik 3). Terkait dengan luas lahan, terdapat penurunan luas lahan padi khususnya di pulau Jawa akibat alih fungsi lahan (Grafik 4).

Implikasi dari menurunnya peranan sektor pertanian adalah turunnya penyediaan bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi penyediaan bahan



pangan, meningkatnya populasi penduduk Indonesia yang hanya diimbangi dengan produksi padi yang terbatas telah mengakibatkan kebutuhan pangan harus dijembatani oleh kebijakan impor beras (Tabel 2). Impor beras terjadi setiap tahun, kecuali tahun 1993 ketika Indonesia berhasil melaksanakan swasembada beras. Di sisi penyerapan

tenaga kerja, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian juga menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Suatu hal yang sangat disayangkan mengingat sektor pertanian merupakan sektor penyangga penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.



Tabel 1
Kondisi Infrastruktur Irigasi

Prasarana Terbangun	Jumlah	Unit	Kondisi		Keandalan Air	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	Waduk	Non Waduk
Jaringan Irigasi	6.771,83	km	341,33 (0,05%)	1.178,55 (17,4%)	719,17 (10,62)	6.052,65 (89,38)
Bendungan	1.154	lokasi	1 (0,24%)	—	—	—
Waduk	273	lokasi	14 (5,1%)	5 (1,8)	—	—

Sumber: Departemen Pertanian

NEWY	TOKYO	SINGAPORE	JAKARTA	FRANKFURT	LONDON	NEW YORK	CHICAGO
6:46	15:16:46	14:16:46	13:16:46	7:16:46	5:16:46	1:16:46	0:16:46
EB 08	18 FEB 08	18 FEB 08	18 FEB 08	18 FEB 08	18 FEB 08	18 FEB 08	18 FEB 08
30/35	107.84/87	1.4109/23	9140/ 9145	1.4694/85	1.9623/26	DJI12348.21	UST3.7647

.00	INR	39.65	JPY	2.705	SGD	7.98	USD	4.25	E/Y	211.61	MYR	2.06	RMB	28.25	USD	76.04
06.70	KRW	945.35	THB	40.63	BIDR	8.00	ZAR	3.12	E/Y	158.36	TRY	1.89	FED	3.00	AUD/NZD	1.511
7.52	OIL	96.13	TRX	32.51	TRX	9091/9183	3.43	E/60	0.748	25YR	2.75	ECB	4.00	AUD/JPY	99.48	
7.95	M255	13635.4	137	URR	8637/9637	3.96	NZD	0.7928	10Y	3.76	BOE	5.25	NZD/JPY	95.56		



Bab 4

Nilai Tukar

Bab 4: Nilai Tukar

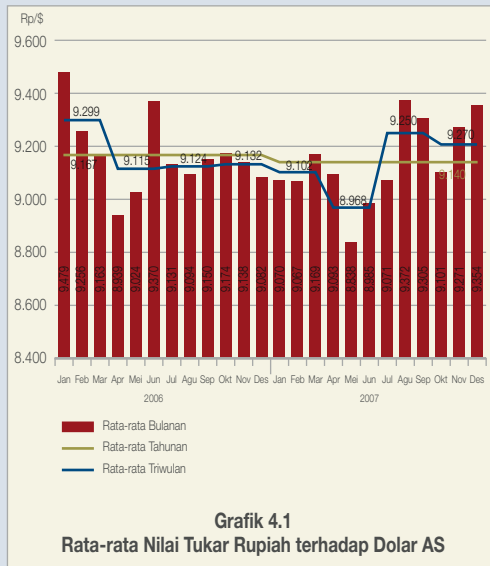
Sepanjang tahun 2007 nilai tukar rupiah bergerak stabil dan secara rata-rata menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kestabilan nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh kondisi fundamental makroekonomi domestik yang semakin membaik di tengah perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global yang bergejolak. Krisis sektor perumahan di Amerika Serikat (*subprime mortgage*) yang meluas dalam skala global disertai kenaikan harga minyak selama paruh kedua tahun 2007 sempat menimbulkan tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah. Namun, dengan kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh secara hati-hati dan konsisten disertai langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar yang berhati-hati, tekanan tersebut dapat diminimalkan sehingga secara keseluruhan tahun kestabilan nilai tukar rupiah tetap terjaga.

Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2007 secara umum stabil dengan kecenderungan menguat disertai volatilitas yang menurun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara rata-rata menguat 0,3% dari Rp9.167/\$ pada tahun 2006 menjadi Rp9.140/\$ (Grafik 4.1). Kestabilan nilai tukar rupiah juga tercermin pada volatilitasnya yang menurun dari 3,9% pada tahun 2006 menjadi 1,4%¹ (Grafik 4.2). Meskipun demikian, secara *point to point* rupiah melemah 4,2% dari Rp8.995/\$ pada akhir tahun 2006 menjadi Rp9.393/\$ pada akhir tahun 2007 terutama disebabkan oleh tekanan eksternal pada paruh kedua tahun 2007. Perkembangan nilai tukar rupiah yang stabil, di tengah perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global yang kurang menguntungkan, ditopang oleh semakin membaiknya kepercayaan masyarakat, baik domestik maupun internasional, terhadap perekonomian Indonesia serta tingginya imbal hasil di pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah sempat tertekan pada paruh kedua tahun 2007 terutama akibat dampak krisis di Amerika Serikat (AS) yang meluas dalam skala global (Boks: Dampak Krisis *Subprime Mortgage* terhadap Pasar Keuangan Indonesia) dan meningkatnya harga minyak dunia secara signifikan. Meskipun demikian, kebijakan moneter dan fiskal yang tetap ditempuh secara hati-hati dan konsisten, serta langkah Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar mampu menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Pada paruh pertama tahun 2007 nilai tukar rupiah cenderung menguat dipengaruhi peningkatan arus masuk modal portofolio asing ke pasar keuangan. Meningkatnya arus masuk modal portofolio ditopang oleh kondisi fundamental makroekonomi yang semakin membaik sebagaimana tercermin pada meningkatnya surplus neraca pembayaran, menurunnya laju inflasi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan terjaganya kesinambungan fiskal. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari hasil pengelolaan kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara hati-hati dan konsisten sehingga semakin mempertebal kepercayaan masyarakat, baik internasional maupun domestik, terhadap rupiah. Selain itu, di tengah tingginya ekspek likuiditas di pasar keuangan global, imbal hasil di pasar keuangan domestik yang tinggi juga turut menarik arus modal portofolio asing tersebut. Seiring dengan perkembangan tersebut rupiah terapresiasi dan mencapai nilai terkuat pada Mei 2007 dengan rata-rata bulanan sebesar Rp8.838/\$.

Namun pada paruh kedua tahun 2007, risiko global meningkat sehingga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Krisis *subprime mortgage* di AS menimbulkan gejolak di pasar keuangan global sehingga mendorong investor global menghindari aset-aset yang dipandang lebih berisiko termasuk aset-aset *emerging markets*. Perkembangan tersebut juga memicu pembalikan arus investasi portofolio asing (*capital reversal*) di pasar keuangan domestik sehingga menimbulkan tekanan terhadap rupiah. Sementara itu, kenaikan harga minyak dunia menyebabkan kebutuhan valuta asing

¹ Volatilitas rupiah adalah indikator untuk mengukur fluktuasi rupiah dengan menghitung deviasi nilai tukar rupiah harian dari rata-rata tahunannya (*moving average 250 hari*).



Grafik 4.1
Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS

untuk impor minyak meningkat. Berbagai perkembangan tersebut mengakibatkan rupiah pada paruh kedua tahun 2007 secara umum terdepresiasi dan mencapai nilai terlemah pada Agustus 2007 dengan rata-rata bulanan sebesar Rp9.372/\$. Dengan demikian, berdasarkan dinamikanya, nilai tukar rupiah bergerak menguat pada paruh pertama tahun 2007 dan selanjutnya cenderung berfluktuasi pada paruh kedua tahun 2007 (Grafik 4.2).

Faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar

Faktor Domestik

Kondisi fundamental makroekonomi domestik tetap kondusif dalam mendukung kestabilan nilai tukar rupiah. Berlanjutnya kesinambungan pertumbuhan ekonomi domestik selama tahun 2007, perkembangan inflasi yang secara umum terkendali menuju sasaran yang ditetapkan, serta pengelolaan kebijakan makroekonomi yang tetap konsisten dan hati-hati telah mempertebal kepercayaan pasar terhadap rupiah. Di tengah rangkaian kejutan eksternal, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 mencapai 6,3% dan tingkat inflasi mencapai 6,59%, sementara kondisi fiskal tetap *sustainable*. Di samping itu, kinerja transaksi berjalan (NPI) pada tahun 2007 juga mencatat surplus yang cukup besar dengan cadangan devisa yang meningkat signifikan. Kondisi fundamental ekonomi yang terjaga tersebut berdampak positif dalam mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap kondisi dan prospek ekonomi Indonesia di tengah gejolak eksternal. Hal tersebut bersama imbal hasil investasi rupiah yang dalam skala regional cukup tinggi mengakibatkan tetap tingginya arus modal portofolio

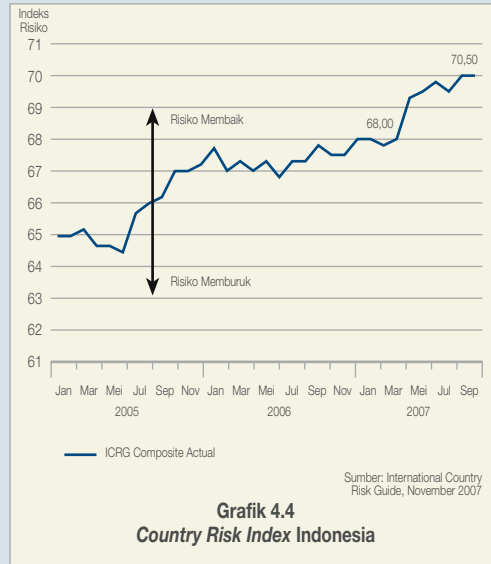
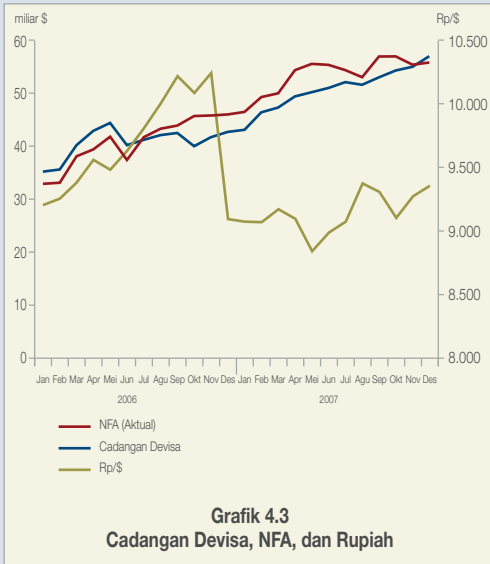


Grafik 4.2
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Volatilitasnya

global selama tahun 2007, meskipun sempat mengalami pembalikan (*capital reversal*) secara terbatas akibat efek beberapa kejutan eksternal.

Kinerja neraca pembayaran yang tetap solid berdampak pada meningkatnya potensi pasokan valas dan cadangan devisa sehingga mendukung perkembangan nilai rupiah yang stabil. Pada tahun 2007, neraca transaksi berjalan mencatat surplus \$11 miliar, lebih tinggi dari tahun 2006 sebesar \$10,8 miliar. Besarnya surplus tersebut telah berperan sebagai penyangga dalam mengimbangi penurunan surplus neraca modal, terutama akibat pembalikan arus modal portofolio asing. Meskipun pada triwulan III-2007 sempat terjadi pembalikan arus modal asing, secara keseluruhan tahun 2007 neraca transaksi investasi portofolio mencatat surplus \$10 miliar. Kinerja neraca pembayaran yang tetap solid juga tercermin dari peningkatan cadangan devisa dan aktiva luar negeri bersih sistem moneter (*Net Foreign Asset*). Cadangan devisa meningkat dari \$42,6 miliar pada tahun 2006 menjadi \$56,9 miliar pada tahun 2007. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih –sebagai indikator potensi pasokan valas di pasar valas domestik– meningkat dari \$45,9 miliar pada tahun 2006 menjadi \$55,71 miliar pada tahun 2007 (Grafik 4.3).

Faktor risiko investasi di Indonesia membaik sejalan dengan terjaganya fundamental ekonomi. Perkembangan fundamental ekonomi sebagaimana diuraikan di atas berdampak positif terhadap penurunan risiko investasi pada aset keuangan rupiah. Beberapa indikator risiko menunjukkan perkembangan yang membaik sepanjang



tahun 2007 sebagaimana tercermin pada peringkat kredit Indonesia (*sovereign credit rating*) yang ditingkatkan oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional dan perbaikan indeks risiko negara (*Country Risk Index*). Perkembangan fundamental ekonomi yang semakin membaik dan pengelolaan kebijakan makroekonomi yang tetap konsisten dan hati-hati menjadi pertimbangan dalam perbaikan *sovereign credit rating* Indonesia oleh Moody's, Rating and Investment Information (R & I), serta Japan Credit Rating Agency (JCRA). Moody's meningkatkan rating Indonesia dari 'B1' menjadi 'B1+' pada 1 Agustus 2007, dan meningkatkannya lagi menjadi 'Ba3' pada 18 Oktober 2007. Sementara itu, R&I menaikkan *rating*

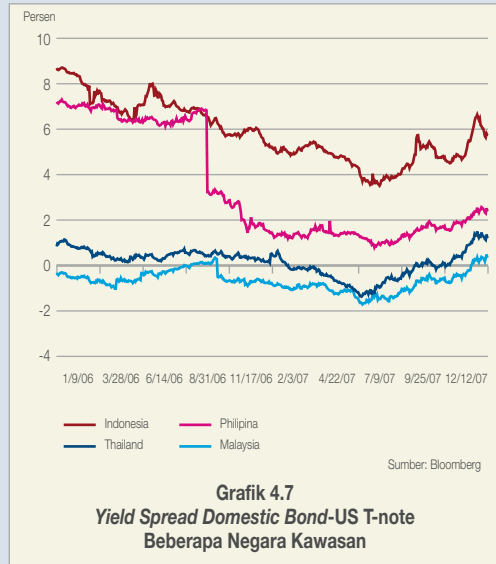
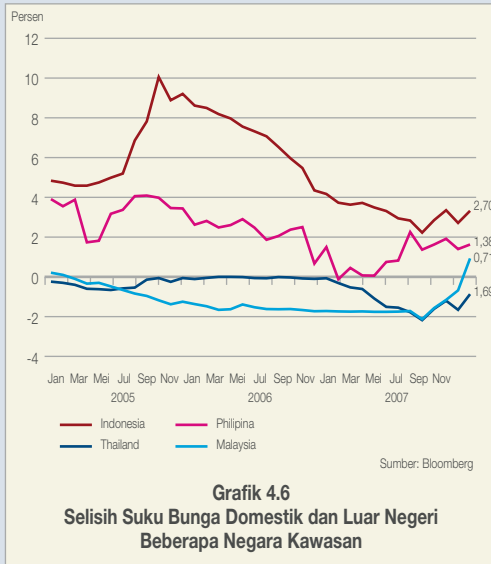
Indonesia dari 'BB' menjadi 'BB+' pada 31 Oktober 2007. JCRA juga meningkatkan *rating* Indonesia dari 'BB-' menjadi 'BB' pada 6 September 2007. Peringkat Indonesia tersebut semakin mendekati '*investment-grade*' dan level peringkat kredit sebelum krisis.

Di samping peringkat kredit, indikator risiko lainnya seperti indeks risiko negara yang diterbitkan oleh *International Country Risk Guide* juga menunjukkan perbaikan secara gradual dari 68 pada tahun 2006 menjadi 70,5 pada Oktober 2007 (Grafik 4.4). Indikator risiko berupa selisih imbal hasil (*yield spread*) antara *global bond* Indonesia dan US T-note juga menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan ini lebih disebabkan oleh *yield* US T-note yang menurun akibat naiknya penanaman dana global ke instrumen ini terkait dengan krisis *subprime mortgage* di AS (Grafik 4.5).



Perkembangan imbal hasil investasi pada aset rupiah sepanjang tahun 2007 tetap terjaga. Meskipun BI Rate mengalami penurunan sejak akhir tahun 2005 sampai November 2007, dalam skala regional tingkat suku bunga Indonesia tetap kompetitif. Imbal hasil investasi rupiah yang diukur baik dengan selisih suku bunga dalam dan luar negeri² (*uncovered interest rate parity - UIP*) maupun dengan memperhitungkan risiko, yaitu minus selisih *yield global bond* RI dengan US T-notes (*covered interest rate parity - CIP*), cenderung menurun. UIP menurun drastis dari 4,16% pada akhir tahun 2006 menjadi 2,70% (Grafik 4.6). Penurunan tersebut disebabkan turunnya BI Rate sebesar 175 bps sepanjang tahun 2007. Sementara

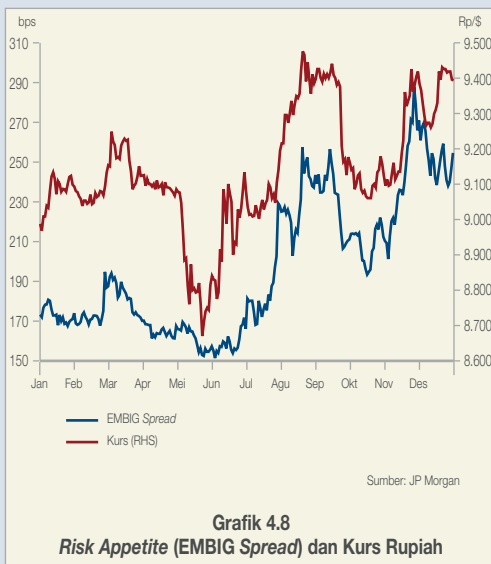
2 Suku bunga dalam negeri menggunakan suku bunga JIBOR Rupiah tenor 1 bulan dan suku bunga luar negeri menggunakan suku bunga SIBOR berdenominasi dolar AS tenor 1 bulan.



itu, CIP mencapai 0,45% pada akhir tahun 2007, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,94%. Meskipun menurun, suku bunga Indonesia relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga di beberapa negara kawasan. Hal itu mengimplikasikan investasi pada aset rupiah masih lebih menguntungkan. Sebagaimana ukuran imbal hasil berdasarkan suku bunga, investasi pada obligasi rupiah juga menawarkan imbal hasil yang menarik, seperti tercermin pada selisih *yield* obligasi domestik dan US T-notes yang paling tinggi dalam skala negara kawasan (Grafik 4.7). Imbal hasil investasi rupiah yang tinggi menjadikan pasar keuangan Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan menarik bagi arus masuk modal portofolio global.

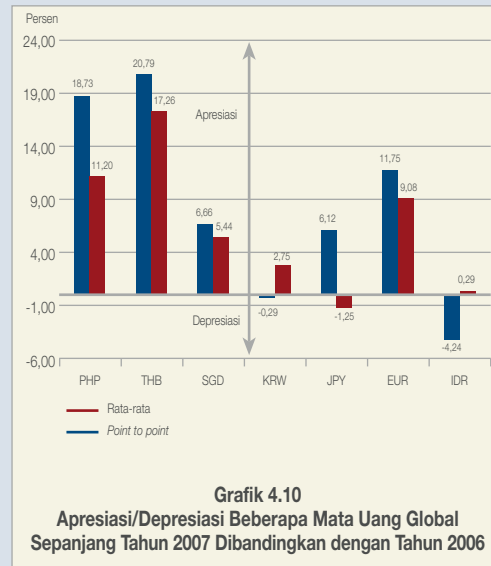
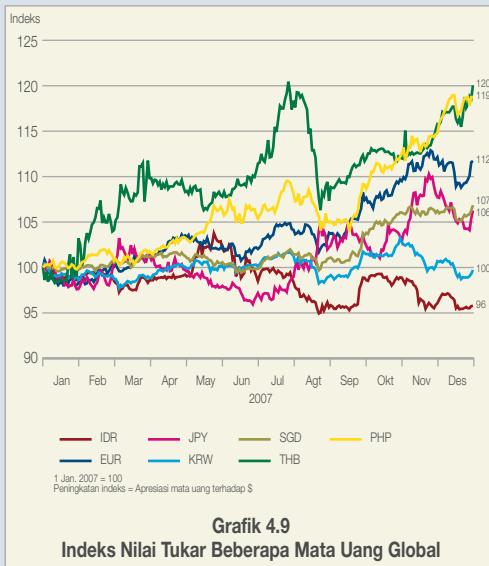
Faktor Internasional

Pada paruh pertama tahun 2007, pasar keuangan dunia diwarnai eksekusi likuiditas serta tren pelemahan dolar AS sebagai bagian dari proses penyesuaian ketidakseimbangan perekonomian global. Kondisi tersebut meningkatkan arus dana portofolio dari negara dengan mata uang berbunga rendah ke mata uang berbunga tinggi (transaksi *carry trade*), terutama negara *emerging markets* termasuk pasar keuangan Indonesia. Pengambilan risiko oleh investor global di pasar keuangan negara *emerging markets* juga meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi fundamental makroekonomi di negara-negara tersebut. Hal itu tercermin dari semakin menyempitnya *yield* obligasi negara *emerging markets* terhadap obligasi pemerintah AS sebagai ukuran '*risk appetite*' investor global (Grafik 4.8).



Risiko global memburuk pada paruh kedua tahun 2007 dipengaruhi krisis *subprime mortgage*. Krisis tersebut memicu gejolak di pasar keuangan global mulai akhir Juli 2007 dan mengakibatkan investor global melakukan penilaian ulang risiko (*repricing of risk*) terhadap risiko berinvestasi pada aset *emerging markets*. Perkembangan tersebut mendorong penarikan dana dari aset *emerging markets* termasuk dari aset rupiah (*flight to quality*). Tekanan selanjutnya muncul dari kenaikan harga minyak yang mencapai \$98,9 per barel³, tertinggi sepanjang 2007. Meskipun kenaikan harga minyak meningkatkan pembelian valas untuk kebutuhan impor tetapi tekanannya terhadap rupiah minimal. Tekanan harga minyak terhadap rupiah lebih diakibatkan oleh penyesuaian portofolio asing di pasar SUN dalam skala terbatas sehubungan

3 Harga minyak WTI per 20 November 2007.



dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap tekanan inflasi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, selama paruh kedua tahun 2007 rupiah cenderung terdepresiasi dibandingkan dengan mata uang global lainnya (Grafik 4.9 dan Grafik 4.10).

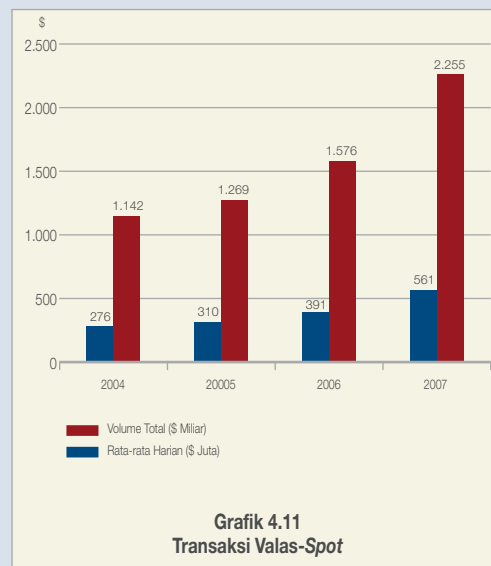
Transaksi di Pasar Valas

Aliran masuk dana asing mendorong perkembangan pasar valas, di samping menyeimbangkan pasokan-permintaan valas. Berkembangnya pasar valas domestik tercermin pada volume transaksi yang meningkat. Peningkatan volume transaksi terjadi di pasar *spot*, *forward* ataupun *swap*. Total volume transaksi valas di pasar *spot* sepanjang tahun 2007 mencapai \$561 miliar, meningkat 43,5% dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai \$391 miliar (Grafik 4.11). Sementara itu, volume transaksi valas di pasar *forward* ataupun *swap* meningkat masing-masing sebesar 19,1% dan 45,1% menjadi \$28 miliar dan \$192 miliar pada tahun 2007. Struktur pasar *spot* relatif tidak mengalami perubahan. Transaksi *spot* masih didominasi oleh pertukaran antara dolar AS dan rupiah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

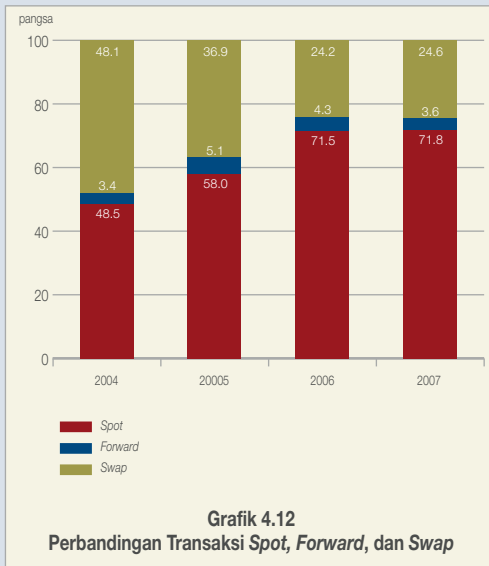
Volume transaksi *spot* semakin dominan dibandingkan dengan transaksi *forward* dan *swap*. Hal tersebut terlihat dari peningkatan pangsa transaksi *spot* dari tahun ke tahun (Grafik 4.12). Peningkatan pangsa transaksi *spot* tersebut, antara lain, disebabkan oleh pembatasan transaksi derivatif yang diberlakukan mulai Juli 2005⁴. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya transaksi yang

bersifat spekulatif sehingga secara umum berpengaruh positif terhadap nilai tukar rupiah.

Arus dana investasi asing sebagian besar masuk pada periode awal tahun sebelum terjadinya krisis *subprime mortgage* di AS pada akhir Juli 2007. Sekalipun arus masuk dana investasi asing cukup besar, secara keseluruhan tahun terjadi eksekusi permintaan valas. Sepanjang tahun 2007, aliran dana investasi asing yang masuk ke pasar valas domestik (*net inflow*) mencapai \$4,0 miliar, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan *net inflow* tahun 2006 yang mencapai \$4,3 miliar. Di sisi lain, pelaku domestik mengalami eksekusi permintaan

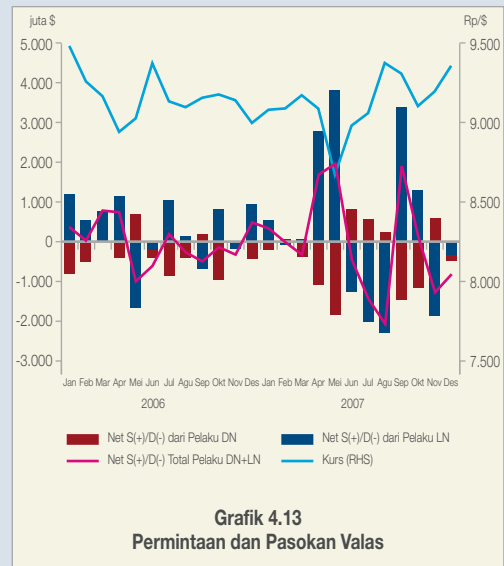


4 Melalui PBI no 7/14/PBI/2005 mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

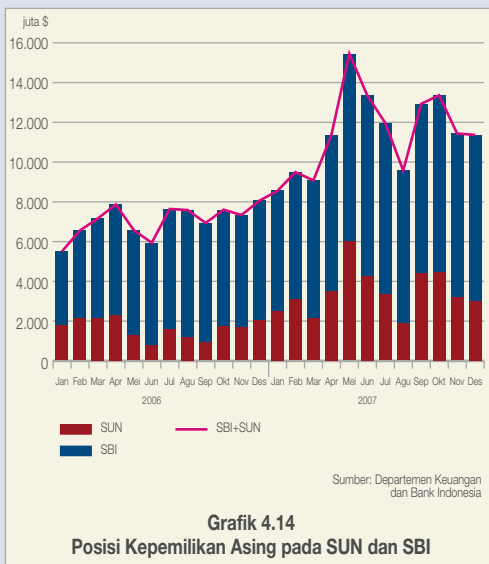


valas sebesar \$4,4 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai \$4,2 miliar. Dengan demikian, untuk tahun 2007 pasar valas (*interbank market*) mengalami eksekusi permintaan sebesar \$372 juta, berbeda dengan tahun sebelumnya yang justru mengalami eksekusi penawaran sebesar \$181 juta (Grafik 4.13). Hal tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan tekanan terhadap rupiah sehingga sekalipun rupiah secara rata-rata tahunan bergerak menguat terhadap dolar AS, tetapi secara *point to point* melemah.

Aliran dana asing pada tahun 2007 ditempatkan pada beberapa aset keuangan rupiah, yakni saham, obligasi



pemerintah (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Proporsi terbesar dana asing tersebut ditempatkan pada saham dengan total nilai mencapai Rp32,6 triliun (\$3,6 miliar). Penempatan pada saham menjadi pilihan investor di tengah tren turunnya suku bunga dan turunnya *yield spread* obligasi. Sekalipun demikian, *yield spread* obligasi Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, penempatan pada SUN sepanjang tahun ini mencapai Rp23,2 triliun (\$2,6 miliar), kedua terbesar setelah saham. Dengan demikian, kepemilikan asing pada SUN meningkat dengan total nilai mencapai Rp78,2 triliun (\$8,4 miliar). Sementara itu, penempatan investor asing pada SBI juga meningkat sekitar Rp9,9 triliun (\$1,2 miliar) sehingga total nilai kepemilikan asing pada SBI meningkat menjadi Rp28 triliun atau \$3 miliar (Grafik 4.14).



Kebijakan yang Ditempuh

Kestabilan nilai tukar rupiah selama tahun 2007 didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar yang tetap diarahkan untuk menjaga konsistensinya dengan pencapaian keseimbangan internal dan eksternal perekonomian. Dalam kaitan tersebut, kebijakan intervensi di pasar valuta asing tetap dilakukan secara terukur untuk menjaga volatilitas nilai tukar. Hal tersebut tercermin pada volatilitas rupiah yang secara tahunan menurun dari 3,9% pada tahun 2006 menjadi 1,4% pada tahun 2007. Selain kebijakan intervensi, Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi komunikasi serta peningkatan efektivitas peraturan kehati-hatian dan pemantauan lalu lintas devisa.

Dampak Krisis *Subprime Mortgage* terhadap Pasar Keuangan Indonesia

Kronologis Krisis *Subprime Mortgage*

Rendahnya suku bunga di AS dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2004, melonggarnya ketentuan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan persaingan antara lembaga penyalur kredit, telah meningkatkan penyaluran KPR ke masyarakat dengan *creditworthiness* yang rendah (*subprime borrower*). Penyaluran KPR untuk nasabah *subprime* yang pada tahun 2002 hanya mencapai \$213 miliar, meningkat menjadi \$665 miliar pada tahun 2005. Di pihak lain, sekuritisasi dengan agunan berbasis KPR *subprime* terus meningkat melalui *financial engineering* yang dikemas dalam bentuk *Asset Backed Securities* (ABS) dan *Collateralized Debt Obligation* (CDO).

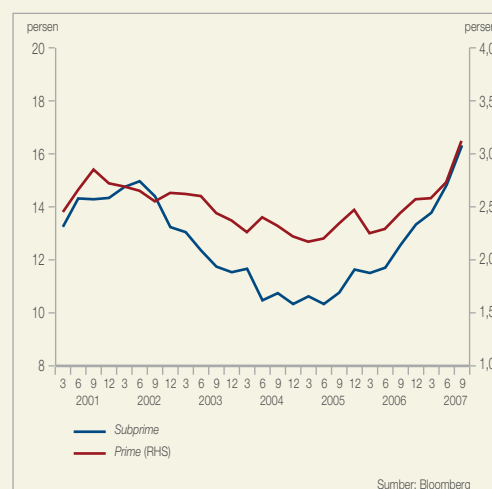
Besarnya potensi keuntungan yang diraih dari sekuritisasi *subprime mortgage* mendorong beberapa lembaga keuangan besar masuk bisnis ini termasuk Bear & Sterns, HSBC, dan Citigroup. Kemasan produk CDO menjadi semakin menarik karena memperoleh *rating* yang tinggi dari lembaga pemeringkat termasuk Standard and Poor's dan Moody's. Imbal hasil yang tinggi juga menarik minat investor dari banyak negara untuk membeli CDO tersebut. Selama tahun 2003-2007 penerbitan ABS dan CDO yang beragunan *subprime mortgage* meningkat tajam sehingga pada tahun 2006 mencapai lebih dari \$450 miliar.

Mengapa bisnis yang terkait *subprime mortgage* cepat berkembang menjadi krisis global? Sebagian besar dari KPR menggunakan *Adjustable Rate Mortgage* (ARM) yang suku bunganya tetap pada beberapa tahun pertama dan selanjutnya menyesuaikan dengan suku bunga pasar. Dengan risiko kredit nasabah *subprime* yang cukup tinggi maka suku bunga yang dibebankan adalah ARM ditambah margin tertentu.

Sejalan dengan tren suku bunga yang meningkat sejak pertengahan tahun 2004, beban pembayaran angsuran nasabah *subprime* menjadi semakin berat. Hal itu menyebabkan mereka tidak lagi mampu membayar sehingga menimbulkan kredit macet yang terus meningkat (Grafik 1). Pada saat yang hampir bersamaan, harga sektor properti AS juga jatuh. Akibatnya, lembaga keuangan penyalur KPR banyak yang merugi, bahkan beberapa di antaranya gulung tikar. Pada pertengahan

tahun 2007, akumulasi permasalahan kredit macet sektor perumahan di AS memuncak dan akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global (Grafik 2). Kredit macet yang meningkat tinggi menyebabkan investor menilai ulang investasinya di CDO karena semakin menurunnya nilai agunan dari surat berharga tersebut. Harga CDO pun merosot tajam. Sementara itu, rentetan kerugian yang dialami lembaga penyalur KPR mengakibatkan harga sahamnya juga berjatuh di bursa saham AS yang merembet ke seluruh saham di sektor keuangan terutama perbankan.

Kejatuhan harga saham di AS pada gilirannya berimbas dalam skala global terutama harga saham lembaga keuangan di luar AS yang memiliki eksposur, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap CDO. Investor global yang menyadari memiliki eksposur terhadap CDO juga serentak menilai ulang risiko investasinya (*repricing of risk*). Akibatnya, terjadi pengalihan dana besar-besaran dari aset keuangan yang dipandang berisiko ke aset yang relatif aman seperti obligasi pemerintah AS (*flight to quality*).



Grafik 1
Perkembangan Kredit Perumahan yang Bermasalah

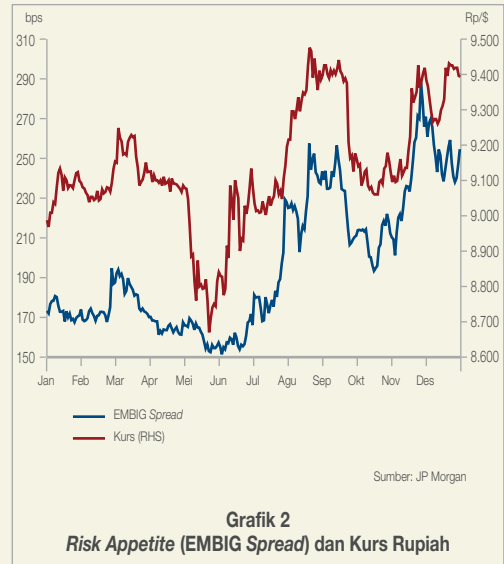
Krisis kepercayaan terhadap CDO meluas sehingga menyebabkan lembaga keuangan penyalur KPR dan perusahaan penerbit *commercial paper* yang beragunan aset atau '*Asset Backed Commercial Paper*' (ABCP) semakin sulit memperoleh dana di pasar kredit. Hal tersebut terjadi karena investor banyak yang menolak memperpanjang penempatan dana di ABCP. Sektor perbankan sebagai penjamin ABCP harus mengambil alih pemenuhan dana dari penyalur KPR yang pada gilirannya membebani neraca bank. Perkembangan tersebut menyebabkan ketatnya pasar uang antarbank khususnya yang bertenor 3 bulan. Langkah Federal Reserve menurunkan suku bunga pada Agustus 2007 dan injeksi likuiditas melalui koordinasi dengan sejumlah bank sentral lain dalam jumlah besar hanya mampu meredam gejolak pasar keuangan sesaat.

Kejatuhan harga rumah yang terus berlanjut, ketidakstabilan di pasar keuangan, dan ketatnya standar penyaluran KPR pada gilirannya menekan konsumsi masyarakat AS. Selain itu, sektor manufaktur juga mulai terkena imbas dari melemahnya konsumsi sehingga mendorong gelombang pemutusan hubungan kerja. Di pihak lain, sejumlah lembaga keuangan termasuk bank-bank investasi AS terkemuka melaporkan kerugian yang cukup besar dari bisnis CDO dan sampai akhir tahun 2007 total kerugiannya melampaui \$100 miliar. Menjelang akhir tahun 2007 ekonomi AS pun semakin dibayangi resesi sehingga tekanan di pasar keuangan global terus berlanjut.

Bergejolaknya pasar keuangan global akibat efek lanjutan krisis *subprime mortgage* menyebabkan investor global serentak melakukan penilaian ulang terhadap profil risiko investasinya. Penarikan dana dari investasi di pasar keuangan negara berkembang yang dipandang berisiko pun meningkat sehingga menimbulkan tekanan terhadap mata uang di sebagian besar negara tersebut. Selain itu, penarikan dana investor global tersebut merupakan upaya untuk menutup kerugian dari investasinya di pasar keuangan negara maju yang jatuh tajam.

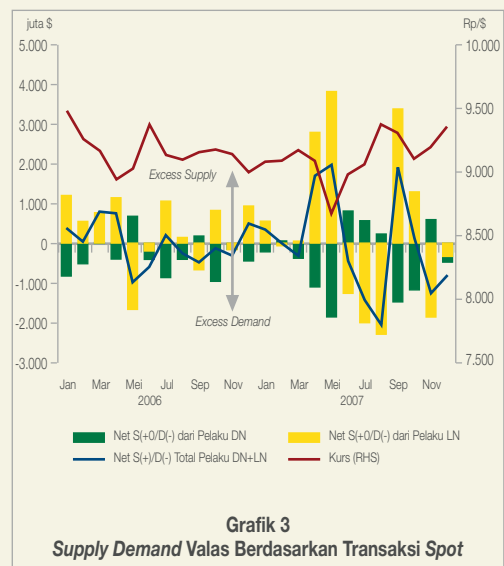
Dampaknya terhadap Pasar Keuangan Domestik

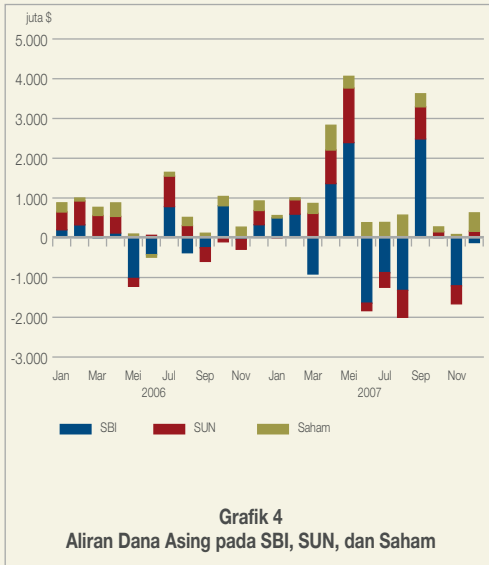
Lembaga keuangan di Indonesia teridentifikasi tidak memiliki eksposur terhadap surat berharga beragunan *subprime mortgage*. Meskipun demikian, gejolak pasar keuangan global yang dipicu krisis *subprime mortgage* telah meningkatkan volatilitas dan ketidakpastian sehingga mendorong arus keluar dana asing dari instrumen investasi rupiah. Dalam kondisi pasar keuangan global yang bergejolak investor cenderung menyelamatkan dananya dengan menghindari instrumen investasi berisiko (*risk aversion*), termasuk instrumen yang diterbitkan *emerging markets* seperti Indonesia.



Pada periode terjadinya krisis *subprime mortgage*, *risk appetite* investor global terhadap aset *emerging markets* menurun seperti tercermin dari meningkatnya *spread* EMBIG (*Emerging Market Bond Index Global*) terhadap US Treasury Bond. Perkembangan *risk appetite* tersebut juga berkorelasi kuat dengan perkembangan nilai tukar rupiah. Hal tersebut tercermin pada melebarnya *spread* EMBIG yang diikuti dengan tekanan depresiasi terhadap rupiah (Grafik 2).

Arus keluar dana asing mengalami eskalasi sejak Juni 2007 dan berlanjut hingga Agustus 2007, yang menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah (Grafik 3). Penarikan dana investasi asing dari pasar





keuangan Indonesia sebagian berasal dari SBI dan obligasi negara. Meskipun demikian, investasi asing di bursa saham masih terus masuk (Grafik 4). Setelah itu arus dana keluar mereda, bahkan kembali masuk dalam jumlah besar setelah The Fed menurunkan *Fed Fund Rate* sebesar 50 basis poin pada 18 September 2007.

Krisis *subprime mortgage* ternyata lebih dalam dan luas dari yang diperkirakan semula. Pada November 2007 pasar keuangan kembali bergejolak karena krisis sektor

perumahan yang berkembang menjadi krisis likuiditas dan kredit semakin mendorong perekonomian AS ke arah resesi dan disertai dengan terjadinya rangkaian kerugian sejumlah lembaga keuangan besar. Bersamaan dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia mendekati \$100 per barel, perkembangan tersebut kembali mendorong arus keluar dana asing. Akibatnya, nilai tukar rupiah kembali tertekan meskipun tekanan tersebut kembali mereda menjelang penutupan akhir tahun 2007.

Meskipun pasar keuangan Indonesia turut terkena imbas krisis *subprime mortgage* di AS, dampak yang ditimbulkannya masih dapat diminimalkan. Kondisi fundamental ekonomi yang didukung pengelolaan kebijakan makroekonomi yang semakin membaik menjadikan perekonomian Indonesia semakin memiliki daya tahan terhadap kejutan eksternal seperti *subprime mortgage*. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana kejutan eksternal menimbulkan gejolak berkepanjangan yang mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara signifikan dan Pemerintah mengurangi subsidi BBM.

Membbaiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia tercermin dari surplus neraca pembayaran yang besar, laju inflasi yang sampai akhir tahun 2007 tetap terkendali, dan ekspansi perekonomian yang terus berlanjut. Selain itu, instrumen investasi rupiah menawarkan imbal hasil yang tetap menarik, bahkan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut di atas menjadikan pasar keuangan Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi global.



Bab 5

Perkembangan Inflasi

Bab 5: Perkembangan Inflasi

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2007 tercatat sebesar 6,59%, atau berada dalam kisaran sasaran inflasi IHK tahun 2007 yang ditetapkan Pemerintah, yaitu sebesar $6,0\% \pm 1,0\%$. Tingkat inflasi IHK yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun lalu, yang tercatat 6,60%, tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar yang terjaga stabil, ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup, serta kenaikan harga-harga barang yang dikendalikan Pemerintah (*administered price*) yang minimal. Keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dukungan Pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas internasional. Kondisi tersebut pada gilirannya meningkatkan kredibilitas kebijakan sehingga memberi kontribusi positif terhadap upaya mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat sejalan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Perkembangan Inflasi

Secara umum, perkembangan harga barang dan jasa di tingkat konsumen selama tahun 2007 relatif terkendali. Relatif stabilnya inflasi tahun 2007 merupakan hasil kontribusi dari relatif rendahnya inflasi yang terjadi sampai dengan paruh pertama tahun 2007. Laju inflasi IHK tahun kalender sampai dengan Juni 2007 tercatat sebesar 2,08% (ytd) termasuk di dalamnya deflasi 0,16% (mtm) pada bulan April. Laju inflasi paruh pertama periode 2007 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 2,87% (ytd). Dilihat dari kelompok pengeluarannya¹, hampir seluruh kelompok barang mengalami penurunan inflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan penurunan tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu dari 5,16% (ytd) pada paruh pertama tahun 2006 menjadi 2,45% (ytd) pada periode yang sama tahun 2007.

Memasuki paruh kedua tahun 2007 (Juli-Desember), perkembangan inflasi mendapat tekanan yang cukup berat. Meningkatnya harga komoditas internasional seperti minyak mentah, *crude palm oil* (CPO), gandum, dan emas, yang disertai melemahnya nilai tukar rupiah menjadi pemicu peningkatan inflasi pada paruh kedua tahun 2007.

Selain itu, faktor musiman seperti hari besar keagamaan, permulaan tahun ajaran baru, dan liburan akhir tahun juga memberikan tekanan tambahan kepada inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK meningkat pada paruh kedua, yaitu sekitar 4,51%. Peningkatan inflasi tersebut tercermin pada peningkatan inflasi yang terjadi pada hampir seluruh kelompok barang, terutama pada kelompok bahan makanan. Secara keseluruhan tahun 2007 inflasi IHK relatif stabil mencapai 6,59% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6,60%.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi

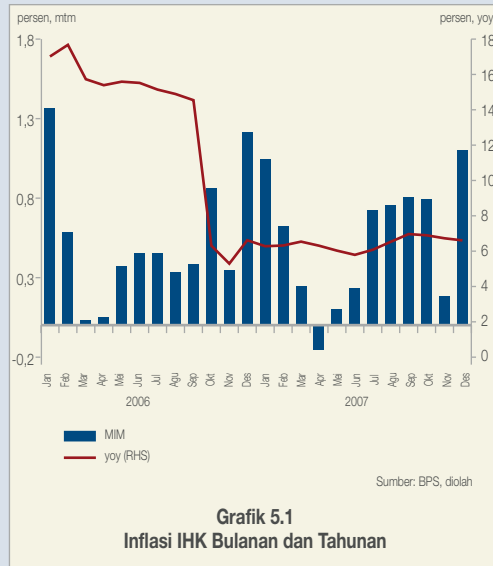
Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya², relatif stabilnya inflasi tahun 2007 tersebut lebih disebabkan oleh membaiknya kondisi faktor-faktor nonfundamental serta didukung oleh cukup terkendalinya faktor-faktor fundamental. Dari sisi nonfundamental, penurunan inflasi *volatile food*³ dan tidak adanya perubahan kebijakan Pemerintah di bidang *administered prices*⁴ untuk barang-barang strategis, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL), merupakan dua hal utama penyebab membaiknya kondisi inflasi dari faktor

1 Menurut tujuan/alasan pengeluaran sesuai COICOP (*Classification Of Individual Consumption by Purpose*), 744 komoditas IHK dikelompokkan oleh BPS ke dalam 7 kelompok barang dan jasa yaitu: (1) kelompok bahan makanan, (2) kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, (3) kelompok perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar, (4) kelompok sandang, (5) kelompok kesehatan, (6) kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta (7) kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

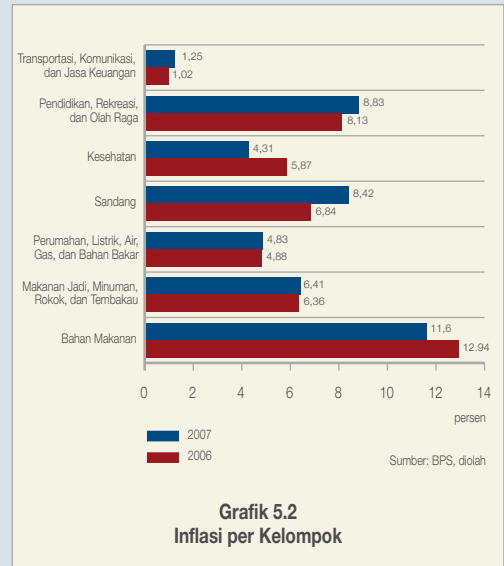
2 Berdasarkan karakteristik perkembangan harga komoditas, inflasi IHK dapat dikelompokkan ke dalam inflasi komoditas yang harganya bergejolak (*volatile food inflation*), inflasi komoditas yang harganya diatur oleh Pemerintah (*administered price inflation*), dan inflasi inti (*core inflation*).

3 Inflasi *volatile food* adalah inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu seperti faktor musim panen, gangguan distribusi, bencana alam, dan hama.

4 Inflasi *administered prices* adalah inflasi kelompok komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh Pemerintah.



Grafik 5.1
Inflasi IHK Bulanan dan Tahunan



Grafik 5.2
Inflasi per Kelompok

nonfundamental. Dari sisi fundamental, masih cukup terkendalinya inflasi inti⁵ lebih disebabkan oleh masih terjaganya ekspektasi inflasi dan minimalnya tekanan dari interaksi permintaan dan penawaran agregat. Sementara itu, di tengah meningkatnya *imported inflation*, tekanan dari sisi eksternal relatif dapat diredam sejalan dengan rata-rata nilai tukar rupiah yang menguat tahun 2007 (Grafik 5.3).

Dinamika inflasi tersebut menunjukkan bahwa peranan penurunan inflasi *volatile food* cukup penting menjaga stabilnya inflasi IHK tahun 2007. Penurunan inflasi *volatile food* tersebut menyebabkan sumbangan inflasi *volatile food* dalam pembentukan inflasi mengalami penurunan, yaitu dari 2,75% tahun 2006 menjadi 2,09% tahun 2007. Penurunan sumbangan inflasi dari kelompok *volatile food* tersebut dapat mengimbangi kenaikan sumbangan inflasi yang berasal dari inflasi inti dan *administered prices* sehingga secara keseluruhan tahun inflasi relatif stabil (Tabel 5.1).

Faktor Nonfundamental (Shocks)

Komoditas yang Harganya Bergejolak (Volatile Food)

Perkembangan inflasi *volatile food* menunjukkan penurunan dari 15,27% tahun lalu menjadi 11,41% tahun 2007. Menurunnya inflasi *volatile food* utamanya disebabkan oleh menurunnya inflasi komoditas beras

sejalan dengan relatif terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi. Selain ditunjang oleh peningkatan produksi, upaya untuk menjaga kecukupan pasokan beras juga dilakukan melalui impor beras oleh Bulog. Inflasi komoditas beras, yang memiliki bobot terbesar dalam penghitungan IHK, menurun cukup tajam dari 32,0% tahun 2006 menjadi 8,49% tahun 2007. Penurunan tersebut mulai terlihat pada bulan April setelah Pemerintah memberikan kebebasan kepada Bulog untuk mengimpor beras, terkait upaya menjaga stok beras. Secara keseluruhan, sumbangan komoditas beras terhadap inflasi menurun dari 1,58% tahun 2006 menjadi 0,52% tahun 2007 (Tabel 5.2).

Meskipun secara umum inflasi *volatile food* tahun 2007 mengalami penurunan, inflasi beberapa komoditas di kelompok ini mengalami kenaikan akibat meningkatnya beberapa harga komoditas di pasar internasional dan terjadinya bencana alam. Meningkatnya harga CPO dunia berpengaruh signifikan terhadap inflasi *volatile food* melalui kenaikan harga minyak goreng yang tercatat sebesar 41,40% (Tabel 5.2). Peningkatan inflasi minyak goreng tersebut juga diikuti oleh kenaikan produk turunan CPO lainnya seperti *margarine* dan mentega yang masing-masing meningkat sebesar 14,28% dan 29,81% (Tabel 5.4).

Sementara itu, kenaikan harga jagung internasional yang diikuti oleh kenaikan harga pakan ternak mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing sebesar 12,30% dan 19,04%. Terjadinya banjir juga memberikan tekanan terhadap inflasi *volatile*

5 Inflasi inti adalah inflasi komoditas yang perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen.

Tabel 5.1
Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non-inti

Tahun	Inti		Volatile Foods		Administered Prices		Inflasi IHK
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	
2006	6,03	3,48	15,27	2,75	1,84	0,37	6,60
2007	6,29	3,75	11,41	2,09	3,30	0,75	6,59

Sumber: BPS, diolah

food seperti tercermin pada peningkatan inflasi bawang merah. Pada tahun 2007, inflasi bawang merah tercatat sebesar 124,50%, melonjak tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang mencatat deflasi 18,8% (Tabel 5.2).

Dilihat dari sumbangannya terhadap inflasi, komoditas beras masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu 0,52%. Sementara itu, komoditas yang inflasinya cukup tinggi –minyak goreng dan bawang merah– juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap inflasi *volatile food*, masing-masing sebesar 0,49% dan 0,47% (Tabel 5.2).

Komoditas yang Harganya Diatur oleh Pemerintah (Administered Prices)

Selama tahun 2007, tekanan inflasi *administered prices* relatif minimal seiring tidak adanya kenaikan harga barang *administered* yang bersifat strategis, seperti BBM bersubsidi (premium, solar, dan minyak tanah) dan TDL. Pengaruh kebijakan tersebut cukup signifikan dalam upaya menjaga kestabilan inflasi tahun ini mengingat bobotnya yang cukup besar dalam keranjang IHK serta dampak rambatannya terhadap komoditas lain yang cukup tinggi.

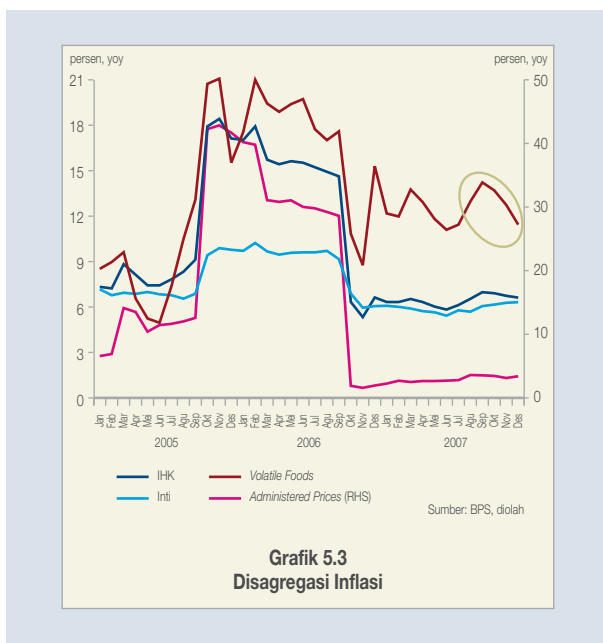
Meskipun relatif rendah, inflasi *administered prices* tahun laporan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, dari sebesar 1,84% menjadi 3,30%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penerapan beberapa kebijakan *administered prices* nonstrategis (Tabel 5.3), antara lain kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 7% pada Maret 2007, pengenaan tarif cukai rokok spesifik per 1 Juli 2007⁶, kenaikan tarif air minum PAM di beberapa kota, kenaikan tarif jalan tol, dan kenaikan harga BBM nonsubsidi (Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex).

Di samping itu, inflasi *administered prices* juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan komoditas minyak tanah dan *Liquidified Petroleum Gas* (LPG) atau gas elpiji meskipun Pemerintah tidak melakukan penyesuaian (ditingkat agen/pangkalan). Komoditas minyak tanah mengalami kenaikan harga di tingkat pedagang pengecer terutama pada triwulan III-2007. Hal tersebut terjadi sebagai akibat adanya permasalahan dalam penerapan program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg. Dengan kondisi tersebut, inflasi minyak tanah selama tahun 2007 meningkat menjadi 2,7% dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,07%. Selain minyak tanah, komoditas gas elpiji juga mengalami kenaikan harga sebagai akibat dari adanya kelangkaan pasokan di beberapa daerah yang disebabkan oleh tersendatnya distribusi komoditas tersebut. Inflasi gas elpiji tercatat sebesar 2,1% dengan bobot sumbangan sebesar 0,01% (Tabel 5.3).

Faktor Fundamental

Inflasi Inti

Dari sisi fundamental, perkembangan inflasi inti masih relatif terkendali meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi inti tercatat sebesar 6,29%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6,03%. Lebih tingginya inflasi inti tersebut sebagai akibat dari meningkatnya tekanan *imported inflation*, terkait dengan kenaikan beberapa harga komoditas



6 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Kebijakan Cukai, Pemerintah memberlakukan dua kebijakan terkait dengan cukai rokok yaitu kenaikan harga jual eceran (HJE) dan pemberlakuan tarif cukai rokok spesifik untuk rokok golongan I sebesar Rp7/batang, golongan II sebesar Rp5/batang, dan golongan III sebesar Rp3/batang.

Tabel 5.2
Inflasi dan Sumbangan Inflasi Beberapa
Komoditas Volatile Food

Komoditi	2006		2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
Beras	32,00	1,58	8,50	0,52
Minyak Goreng	6,70	0,08	41,40	0,49
Bawang Merah	-18,80	-0,09	124,50	0,47
Daging Ayam Ras	10,40	0,14	12,30	0,17
Telur Ayam Ras	4,90	0,04	19,00	0,13

Sumber: BPS, diolah

internasional seperti minyak mentah, CPO, emas, dan gandum. Namun, tekanan *imported inflation* tersebut sedikit teredam oleh relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Sementara faktor yang memengaruhi inflasi inti lainnya, yaitu faktor interaksi permintaan dan penawaran (*output gap*) serta faktor ekspektasi inflasi, menunjukkan perkembangan yang relatif stabil.

Dilihat dari komoditasnya, pengaruh kenaikan harga internasional tersebut terlihat pada komoditas emas dan berbagai makanan. Emas perhiasan merupakan komoditas yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi inti yang meningkat tajam menjadi 27,50% dan memberikan sumbangan sebesar 0,33%. Komoditas berbagai makanan juga menunjukkan peningkatan terutama beberapa jenis mie, berbagai jenis kue dan roti, serta tempe (Tabel 5.4).

Ekspektasi inflasi

Ekspektasi inflasi masyarakat selama tahun 2007 relatif stabil di kisaran 6%-7%. Pada umumnya, pelaku

Tabel 5.4
Perkembangan dan Sumbangan Inflasi
Beberapa Komoditas Makanan dalam Inflasi Inti
Tahun 2007

Komoditi	2007	
	Inflasi	Sumbangan
1 Emas	27,50	0,33
2 CPO		
Margarine	14,28	0,01
Mentega (<i>Butter</i>)	29,81	0,00
3 Gandum		
Tepung Terigu	35,92	0,03
Berbagai Jenis Mie	16,19	0,06
Biskuit	7,52	0,02
Berbagai Jenis Kue dan Roti	9,81	0,20
4 Kedelai		
Tempe	18,60	0,09

Sumber: BPS, diolah

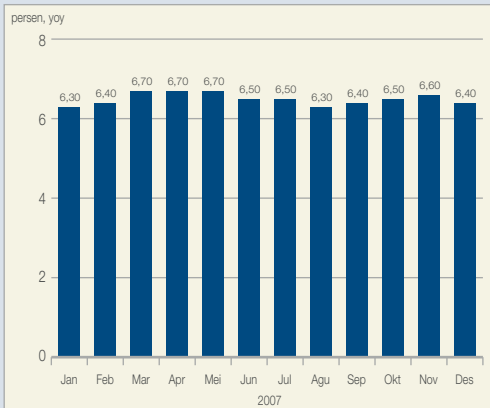
Tabel 5.3
Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas
Administered Prices Tahun 2007

Komoditi	2006		2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
Rokok Kretek Filter	7,10	0,16	1,02	0,24
Tarif Air Minum PAM	7,80	0,08	12,90	0,14
Rokok Kretek	6,90	0,09	0,00	0,12
Bensin	0,10	0,00	2,90	0,10
Minyak Tanah	1,80	0,04	2,70	0,07
Rokok Putih	5,60	0,02	7,10	0,03
Tarif Jalan Tol	11,20	0,01	24,10	0,02
Gas Elpiji	1,10	0,01	2,10	0,01
Tarif Parkir	3,20	0,01	3,10	0,01

Sumber: BPS, diolah

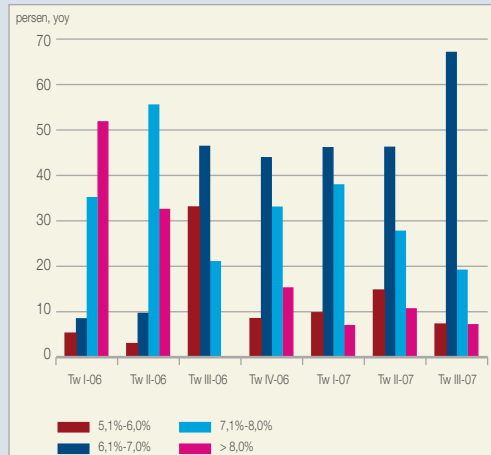
pasar masih meyakini bahwa inflasi tahun 2007 masih berada pada kisaran 6%-7%, atau masih dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2007 yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 6%±1%. Berdasarkan survei Consensus Forecast, perkiraan inflasi tahun 2007 dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi tahun 2007 relatif stabil pada kisaran 6,3%-6,7% (Grafik 5.4). Hasil tersebut juga dikonfirmasi oleh hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia yaitu Survei Persepsi Pasar (SPP) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memperkirakan inflasi tahun 2007 berada pada kisaran 6%-7%. Bahkan jumlah responden yang menyatakan inflasi akan berada dalam kisaran 6%-7% mengalami peningkatan, sementara jumlah responden yang menyatakan inflasi akan naik (kisaran 7,1%-8,0%) semakin menurun (Grafik 5.5). Ekspektasi inflasi yang terjaga stabil mencerminkan kepercayaan mayoritas pelaku pasar bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia tetap konsisten mengarahkan kebijakannya untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Meskipun relatif stabil, tingkat ekspektasi inflasi ke depan masih perlu dicermati. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya ekspektasi kenaikan harga ke depan terutama pada akhir tahun. Hasil survei konsumen pada akhir tahun menunjukkan bahwa ekspektasi konsumen untuk harga 3 bulan dan 6 bulan ke depan mengalami peningkatan (Grafik 5.6). Hal tersebut ditengarai sebagai akibat meningkatnya harga komoditas internasional yang dikhawatirkan akan menaikkan biaya produksi dan selanjutnya ditransmisikan ke harga barang domestik. Selain itu, masih tingginya ekspektasi inflasi juga terkait masih dominannya perilaku ekspektasi masyarakat yang bersifat *backward looking* sehingga penurunan inflasi menjadi lebih lambat.



Grafik 5.4
Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast

Sumber: Consensus Forecast

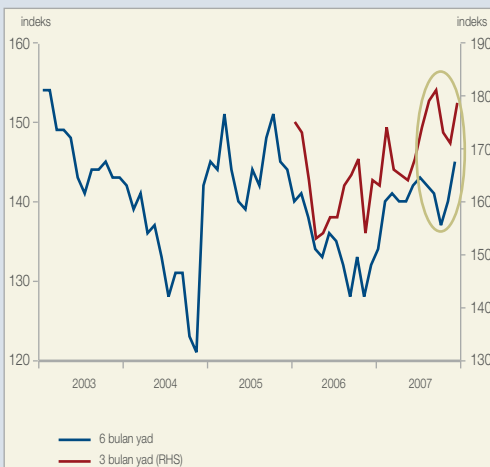


Grafik 5.5
Ekspektasi Inflasi Tahun 2007 (SPP)

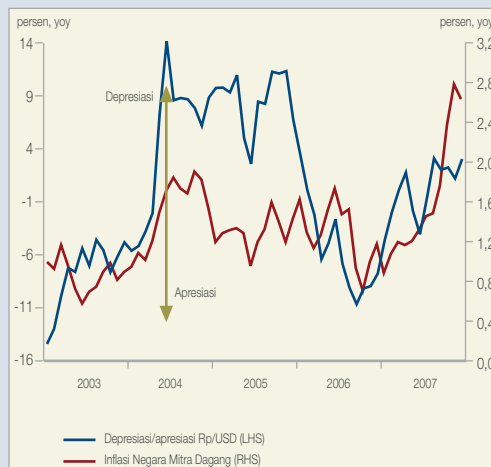
Faktor Eksternal

Pada tahun 2007, tekanan inflasi dari faktor eksternal terutama disebabkan oleh peningkatan *imported inflation*, sebagai dampak dari peningkatan harga komoditas internasional, khususnya harga minyak mentah, CPO, dan gandum. Kenaikan harga komoditas internasional tersebut memberikan tekanan inflasi di berbagai negara seperti tercermin pada peningkatan inflasi mitra dagang (Grafik 5.7). Selanjutnya, kondisi tersebut ditransmisikan pada inflasi di dalam negeri sebagaimana tercermin pada inflasi IHPB Impor yang meningkat dari 7,01% tahun 2006 menjadi 25,60%. Namun demikian, kenaikan IHPB impor tersebut tidak sepenuhnya ditransmisikan

ke harga barang dalam negeri di tingkat konsumen. Hal itu ditunjukkan oleh peningkatan inflasi komoditas impor tidak sebesar peningkatan inflasi IHPB impor. Laju inflasi komoditas impor IHK sedikit meningkat dari 5,83% tahun 2006 menjadi 7,20% tahun 2007 (Grafik 5.8). Pola lebih rendahnya inflasi komoditas impor dibandingkan dengan inflasi IHPB impor ditengarai disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) beberapa barang impor merupakan salah satu komponen *input* dalam proses produksi sehingga proporsi kenaikan harga barang akhir akan lebih rendah dibandingkan dengan proporsi kenaikan harga barang impor; (2) indikasi bahwa produsen berusaha tidak mentransmisikan seluruh kenaikan barang *input* ke harga

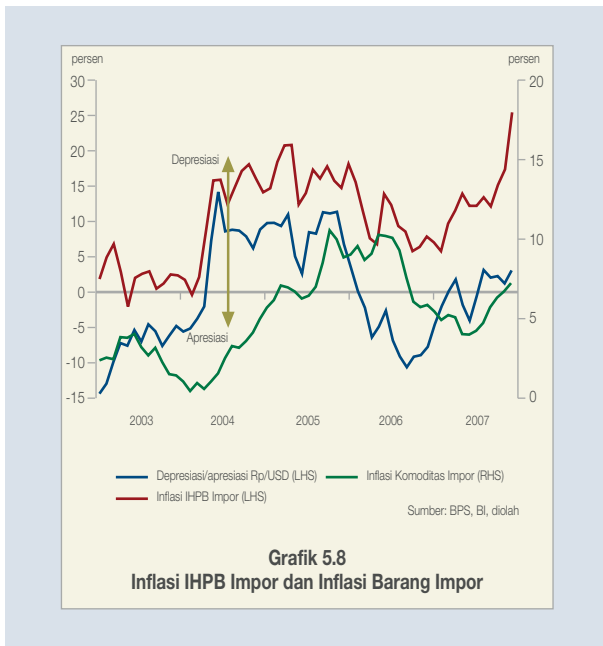


Grafik 5.6
Ekspektasi Harga Konsumen



Grafik 5.7
Nilai Tukar dan Inflasi Mitra Dagang

Sumber: BPS, BI, diolah



jual produk dengan pertimbangan kondisi permintaan konsumen dan kondisi persaingan bisnis.

Di sisi lain, perkembangan nilai tukar yang relatif stabil mengurangi tekanan yang timbul dari *imported inflation*. Secara rata-rata, nilai tukar tahun 2007 mencapai Rp9.140 per dolar meskipun sempat mengalami tekanan akibat krisis *subprime mortgage* di AS.

Faktor Interaksi Sisi Permintaan dan Penawaran (Output Gap)

Tekanan inflasi dari interaksi permintaan dan penawaran diindikasikan masih minimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh kesenjangan *output* (*output gap*) yang masih negatif. Hal tersebut disebabkan kemampuan sisi penawaran yang masih dapat mengimbangi kenaikan sisi permintaan. Respons dari sisi penawaran tercermin pada peningkatan indeks produksi dalam survei produksi yang dilakukan oleh BPS. Indeks produksi meningkat dari rata-rata tahun 2006 sebesar 116,9% menjadi 123,12%. Di samping itu, SKDU triwulan IV-2007 menunjukkan kapasitas terpakai sebesar 73,26% yang menggambarkan bahwa sebagian besar industri masih mempunyai ruang untuk meningkatkan produksi apabila terjadi peningkatan permintaan.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi

Pada tahun 2007 Pemerintah menetapkan sasaran inflasi IHK sebesar 6% dengan deviasi $\pm 1\%$ ⁷. Penetapan sasaran ini didasarkan pada prakiraan awal tahun terhadap

⁷ Diputuskan dalam rapat koordinasi bidang makroekonomi Kantor Menko Perekonomian pada tanggal 17 Maret 2006. Sasaran inflasi tersebut merevisi sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 5,0% dengan deviasi 1%, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 399/KMK.011/2004 tanggal 6 September 2004.

faktor-faktor fundamental dan nonfundamental (*shocks*) penyebab tekanan inflasi (Tabel 5.5). Dari sisi faktor fundamental, penyebab inflasi diperkirakan bersumber dari faktor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara faktor eksternal lainnya, yaitu harga minyak dunia, diperkirakan sebesar \$60/barel. Dengan prakiraan tekanan dari kesenjangan *output* relatif minimal dan faktor ekspektasi inflasi masyarakat diperkirakan masih akan stabil, maka inflasi inti diperkirakan akan berada pada tingkat 6,3%. Dari sisi nonfundamental, inflasi *volatile food* diperkirakan masih tinggi, meskipun mengalami penurunan. Sementara itu, inflasi *administered prices* diperkirakan memberi dampak minimal terhadap inflasi IHK seiring dengan komitmen Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dan TDL.

Dalam realisasinya, faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, baik fundamental maupun nonfundamental, ternyata relatif sama dengan prakiraan semula, sehingga inflasi IHK tahun 2007 berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan hasil capaian koordinasi yang semakin baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Kebijakan moneter yang secara konsisten terus diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan serta kemampuan Pemerintah dalam mengendalikan gejolak harga-harga melalui berbagai paket kebijakan sektoral merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pencapaian sasaran inflasi tahun 2007. Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi inti –yang menggambarkan perkembangan faktor fundamental– tercatat sebesar 6,29%. Hal tersebut disebabkan oleh masih memadainya respon sisi penawaran agregat

Tabel 5.5
Perbandingan antara Asumsi dan Realisasi dalam Penetapan Sasaran Inflasi Tahun 2007

	Variabel	2007	
		Perkiraan Awal	Realisasi
Asumsi	• Nilai Tukar (Rp/\$)	9.300	9.140
	• Harga Minyak (\$/barel)	60	72,3
Proyeksi	• PDB (%)	6,0	6,3
	• Inflasi Inti (%)	6,30	6,29
	• Inflasi IHK (%)	6,60	6,59
Faktor yang Memengaruhi	• Nilai Tukar	sedikit melemah	relatif stabil
	• Ekspektasi Inflasi	stabil namun masih tinggi	stabil namun masih tinggi
	• <i>Output Gap</i>	rendah	rendah
	• <i>Administered Prices</i>	rendah	rendah
	• <i>Volatile Foods</i>	tinggi, pembatasan impor beras	tinggi, tidak ada pembatasan impor beras
Sasaran Inflasi IHK		6,0% \pm 1%	

terhadap peningkatan permintaan agregat serta ekspektasi inflasi yang relatif stabil. Namun, pada faktor eksternal, realisasi harga minyak dunia ternyata meningkat tajam menjadi \$72,3 per barel, sehingga memberi tekanan pada *imported inflation*. Meskipun demikian, realisasi nilai tukar rupiah yang relatif stabil membantu mengurangi tekanan *imported inflation* terhadap inflasi domestik.

Dari faktor nonfundamental, dalam realisasinya, komitmen Pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan *administered prices* yang bersifat strategis menyebabkan inflasi *administered price* relatif rendah. Sementara itu, realisasi inflasi *volatile food* menunjukkan masih tinggi meskipun mengalami penurunan. Penurunan inflasi *volatile food* tersebut lebih disebabkan oleh menurunnya inflasi komoditas beras yang bobotnya terbesar dalam keranjang IHK.

Bauran Kebijakan yang Telah Diambil dalam Rangka Pengendalian Inflasi

Tercapainya sasaran inflasi tahun 2007 tidak terlepas dari semakin baiknya koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi serta menciptakan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dari sisi Bank Indonesia, selama tahun 2007 kebijakan moneter yang ditempuh secara konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Hal itu diwujudkan melalui pengelolaan likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah ditengah gejolak kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.

Dalam rangka mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat ke sasaran inflasi yang telah ditetapkan, Bank Indonesia juga terus berupaya untuk melakukan penguatan strategi komunikasi. Selain melalui siaran pers dan konferensi pers yang secara reguler mengumumkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan penerbitan Laporan Kebijakan Moneter, penguatan strategi komunikasi tersebut dilakukan melalui program diseminasi kebijakan moneter kepada seluruh *stakeholders*, seperti akademisi, dunia usaha, wartawan, dan pelaku keuangan, yang dilakukan, baik di pusat maupun daerah. Dalam diseminasi tersebut dipaparkan asesmen menyeluruh Bank Indonesia mengenai perkembangan terkini makroekonomi, inflasi

dan kondisi moneter, serta prakiraan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan untuk membawa inflasi ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Melalui penguatan komunikasi tersebut, perilaku ekspektasi inflasi di Indonesia diharapkan akan mengacu pada pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah (*forward looking*).

Di sisi lain, Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal seraya terus menjaga kecukupan pasokan barang terutama kebutuhan pokok. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui berbagai paket kebijakan sektoral seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pemberian subsidi untuk komoditas pangan yang rentan terhadap *shocks* seperti minyak goreng. Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan dan distribusi agar harganya tidak bergejolak seperti pada komoditas beras, minyak tanah, dan gula. Sesuai dengan komitmen awal, Pemerintah tidak menerapkan kebijakan *administered price* yang bersifat strategis (BBM dan TDL).

Komitmen Pemerintah diperkuat melalui pembentukan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang beranggotakan departemen teknis terkait dengan tugas antara lain: merencanakan dan merumuskan kebijakan stabilisasi kebutuhan pangan pokok (beras, gula, dan minyak goreng), mengoordinasi pelaksanaan, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan stabilisasi tersebut. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Inpres No. 6/2007 yang antara lain berisi kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM yang di antaranya adalah paket kebijakan perbaikan investasi dan paket kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam rangka koordinasi kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi yang bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan tekanan inflasi. Selain itu, Tim juga membahas dan merumuskan usulan sasaran inflasi tahun 2008-2010 (Boks: Sasaran Inflasi Tahun 2008-2010). Koordinasi kebijakan tersebut sangat diperlukan, terkait dengan komponen permanen inflasi di Indonesia yang masih cukup tinggi (Boks: Upaya Memahami Perilaku Inflasi di Indonesia: Komponen Permanen Infasi dan Persistensi Inflasi).

Upaya Memahami Perilaku Inflasi di Indonesia: Komponen Permanen Inflasi dan Persistensi Inflasi

Upaya pengendalian inflasi menuntut adanya pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai perilaku inflasi itu sendiri. Dua aspek perilaku inflasi yang selama ini menjadi tantangan dalam upaya menurunkan maupun mengendalikan laju inflasi di Indonesia adalah sulitnya menurunkan laju inflasi ke level yang lebih rendah¹ serta persistensi inflasi yang tinggi. Sulitnya membawa laju inflasi ke tingkat yang lebih rendah menimbulkan pertanyaan apakah memang ada suatu tingkat inflasi yang inheren untuk Indonesia selama ini. Pemahaman mengenai hal tersebut akan sangat membantu, misalnya dalam menentukan suatu target inflasi, agar dapat dilakukan secara realistis. Penentuan target yang tidak realistis akan memaksa bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang ekstrem sehingga akan menimbulkan biaya perekonomian yang sangat besar. Sementara itu, persistensi terkait dengan seberapa cepat inflasi akan kembali ke keseimbangannya setelah mengalami suatu kejutan (*shock*). Inflasi yang persisten berarti bahwa ketika terjadi *shocks*, laju inflasi akan cenderung lama untuk kembali pada laju inflasi semula. Kondisi inflasi yang persisten ini juga akan semakin menyulitkan upaya untuk membawa laju inflasi ke tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persistensi inflasi juga sangat penting karena akan menentukan seberapa *pre-emptive* Bank Indonesia dalam merespon kejutan-kejutan dalam perekonomian yang mengganggu kestabilan harga.

Studi yang dilakukan menunjukkan adanya karakteristik inflasi di Indonesia yang tampaknya memiliki kecenderungan untuk sulit diturunkan ke tingkat yang lebih rendah (*sticky inflation*). Dengan menghitung rata-rata inflasi, *long-term trend* inflasi untuk kurun waktu tahun 1980-2007 adalah 9,8%. Sementara itu, jika hanya dihitung pada periode 2000-2007, *long-term trend* inflasi adalah 8,8%. Tingginya *long-term trend* inflasi ini menimbulkan pertanyaan apakah ada suatu level tertentu yang merupakan komponen permanen pembentuk inflasi di Indonesia. Pendekatan ekonometri menganjurkan teknik dekomposisi inflasi menjadi komponen permanen dan *transitory*². Selanjutnya, komponen permanen

inflasi diuraikan menjadi dua unsur pembentuknya, yakni *deterministic* dan *stochastic trend*. *Deterministic trend* direpresentasikan oleh *long term trend* yang linear. *Stochastic trend* adalah akumulasi dari *shock* yang bersifat permanen yang akan menetap pada inflasi³. Dapat dikatakan bahwa *stochastic trend* terkait dengan inflasi yang cenderung memiliki persistensi yang tinggi.

Hasil penghitungan data komponen permanen inflasi menunjukkan bahwa level terendah yang dapat dicapai adalah sekitar 5,3%, yang terjadi pada masa pascakrisis, tepatnya pada periode triwulan II-2003 sampai triwulan I-2004. Kenyataan bahwa pada masa prakrisis, inflasi permanen cenderung berada di atas *long-term trend*-nya (Grafik 1), sedangkan pada masa pascakrisis cenderung berada di bawah *long-term trend*-nya (Grafik 2), menyiratkan bahwa *stochastic trend* lebih rendah pada masa pascakrisis. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa derajat persistensi inflasi di Indonesia telah semakin menurun. Studi yang dilakukan dengan menggunakan model *autoregresi* sederhana menemukan bahwa dalam kurun waktu tahun 1990-2006 tingkat persistensi di Indonesia ternyata mengalami perubahan dari waktu ke waktu⁴. Studi tersebut menunjukkan penurunan derajat persistensi inflasi IHK, dari 0,27 pada periode sebelum krisis menjadi 0,12 setelah krisis. Perubahan derajat persistensi inflasi tersebut juga dikonfirmasi dari hasil estimasi *rolling regression* koefisien persistensi. Lebih rendahnya persistensi inflasi mengimplikasikan bahwa bila ada kejutan dalam perekonomian, inflasi akan kembali lebih cepat ke tingkat rata-rata inflasinya. Dari sisi pengendalian inflasi, lebih rendahnya persistensi inflasi juga akan mempermudah upaya menurunkan laju inflasi, karena kecenderungan masyarakat untuk menjangkarkan ekspektasi inflasi ke masa lalu telah berkurang.

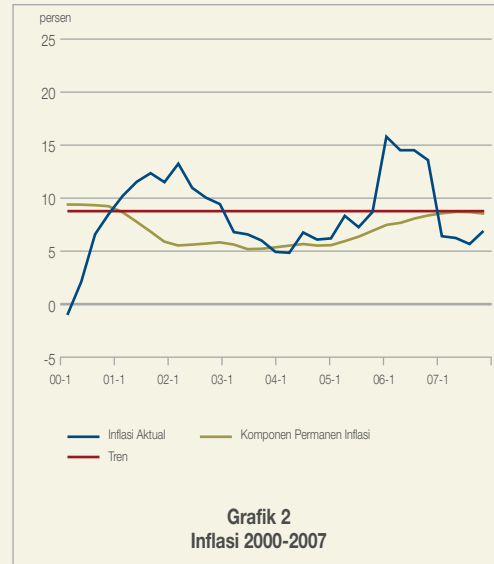
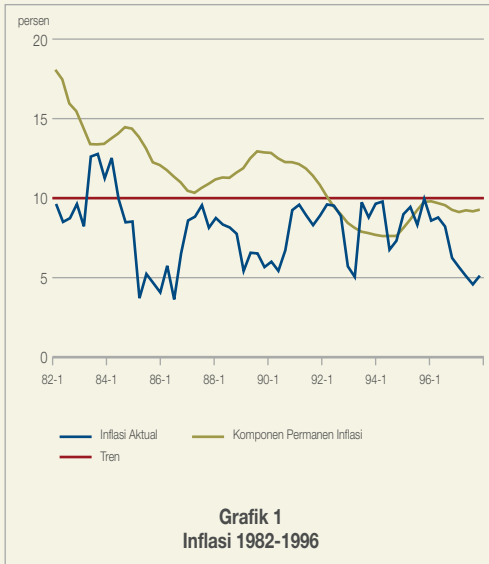
Hasil kajian yang menunjukkan adanya komponen permanen inflasi di Indonesia yang masih cukup tinggi menjadi kendala dalam upaya menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah. Masih tingginya level

1 Level inflasi terendah adalah sekitar 5% yang dicapai tahun 1992, 1996, dan 2003.

2 Affandi, Yoga (2007): "A Small Monetary System for Indonesia". Working Paper Bank Indonesia.

3 *Shock* yang bersifat *transitory* secara kumulatif akan hilang.

4 Yanuarti, Tri (2007), "Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?". Working Paper Bank Indonesia.



komponen permanen inflasi mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar dalam fenomena inflasi di Indonesia, terutama hal-hal yang terkait dengan produktivitas, efisiensi, dan struktur perekonomian. Adanya keterkaitan erat antara inflasi dengan produktivitas dan efisiensi perekonomian memberikan implikasi bahwa kebijakan disinflasi perlu diterapkan dengan senantiasa memperhatikan prinsip pentahapan (*gradualism*) dan keseimbangan (*balance*). Kebijakan moneter yang

terlampau ketat di tengah rendahnya produktivitas dan efisiensi perekonomian dapat menimbulkan resesi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu longgar, hanya akan membuat perekonomian menjadi *inflatoir* dan tidak *pro-poor*. Adanya keterkaitan erat antara inflasi dan aspek-aspek struktural juga memberi implikasi bahwa untuk melakukan proses disinflasi yang kredibel diperlukan koordinasi yang menyeluruh dan terpadu dari Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sasaran Inflasi Tahun 2008-2010

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3/2004, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam Undang-Undang tersebut (penjelasan pasal 10 ayat 1a) diatur bahwa sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya sasaran inflasi tersebut dipergunakan oleh Bank Indonesia sebagai dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

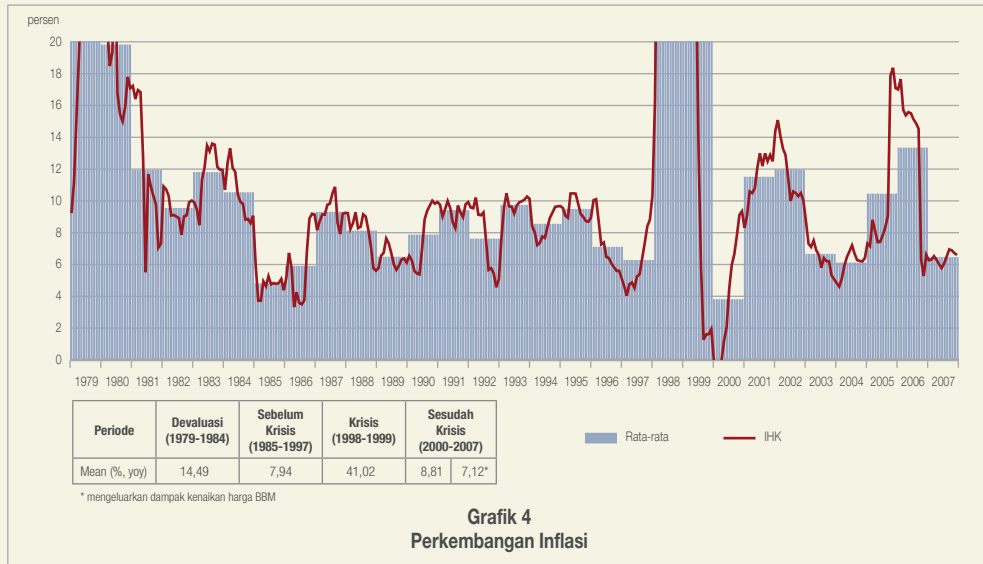
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 399/KMK.011/2004 tanggal 6 September 2004, periode sasaran inflasi ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun, sementara jenis sasaran inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK tahunan. Dalam keputusan tersebut disepakati pula sasaran inflasi untuk tahun 2005-2007, yaitu $6\% \pm 1\%$ untuk tahun 2005, $5,5\% \pm 1\%$ untuk tahun 2006, dan

$5,0\% \pm 1\%$ untuk tahun 2007. Kemudian, Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat merevisi sasaran tersebut pada tanggal 17 Maret 2006. Sasaran inflasi periode 2006-2008 disepakati masing-masing sebesar 8,0%, 6,0%, dan 5,0% dengan deviasi sebesar $\pm 1\%$. Selanjutnya, pada awal Januari 2008 Pemerintah menetapkan sasaran inflasi yang baru untuk periode 2008-2010 yaitu masing-masing sebesar 5,0%, 4,5%, dan 4,0% dengan deviasi $\pm 1\%$ melalui Keputusan Menteri Keuangan No.1 tahun 2008 (Grafik 3). Secara umum, sasaran inflasi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi dan kebijakan yang perlu diambil sehingga sasaran inflasi tersebut realistis.

Penetapan sasaran inflasi tersebut diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi setiap pelaku ekonomi termasuk Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang terkait. Adapun penetapan sasaran inflasi yang menurun menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan proses disinflasi secara gradual sehingga inflasi domestik nantinya akan relatif sama dengan inflasi di negara kawasan. Sasaran inflasi tersebut juga diharapkan akan menjadi jangkar pembentukan ekspektasi inflasi setiap pelaku ekonomi (*forward looking*). Hal itu dirasa penting mengingat pentingnya peranan faktor ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi.

Pemerintah menyadari bahwa pencapaian tersebut memerlukan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak mengingat rata-rata historis inflasi Indonesia yang masih tinggi. Berdasarkan data historis selama 30 tahun terakhir, rata-rata inflasi terendah terjadi pada periode sesudah krisis yaitu pada level 7,12%, suatu tingkat inflasi yang masih cukup tinggi (Grafik 4). Meskipun demikian, pencapaian inflasi yang lebih rendah dari rata-rata historis tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin mengingat tahun 1992, 1996, dan 2003 inflasi pernah mencapai sekitar 5%. Pada ketiga tahun tersebut, keberhasilan pencapaian inflasi yang rendah sangat terbantu oleh terkendalinya faktor nonfundamental yaitu inflasi *volatile food* dan *administered price*. Menyadari





faktor penentu inflasi yang beragam, yang tidak hanya terbatas pada lingkup kebijakan moneter namun juga lingkup kebijakan produksi dan kebijakan distribusi, Pemerintah memutuskan membentuk Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi di samping memperkuat Tim yang sudah ada seperti Tim Pengendalian Inflasi dan Tim

Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok. Forum tersebut diharapkan dapat memantau pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi. Forum ini diketuai langsung oleh Menko Perekonomian, dengan anggota tetap yakni Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Perdagangan.



Bab 6

Perkembangan Moneter

Bab 6: Perkembangan Moneter

Pada tahun 2007 kebijakan moneter menghadapi tantangan dari kuatnya dampak gejolak perekonomian global dan akses likuiditas di pasar uang domestik. Bank Indonesia menurunkan BI Rate untuk kemudian dipertahankan tetap sampai mendekati akhir tahun. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam operasional kebijakan moneter melalui pengelolaan likuiditas dalam bentuk operasi pasar terbuka dan berbagai instrumen lain. BI Rate telah ditransmisikan secara efektif di pasar finansial dan telah menimbulkan optimisme pelaku ekonomi di sektor riil. Kondisi tersebut didukung oleh memadainya likuiditas di perekonomian meskipun di pasar uang masih mengalami peningkatan akses likuiditas. Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang didukung oleh kebijakan fiskal telah mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mencapai sasaran inflasi dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan keyakinan perbaikan stabilitas makroekonomi, pencapaian target inflasi, dan ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia sejak awal tahun 2007 menurunkan suku bunga acuan secara terukur dan kemudian tetap dipertahankan sampai mendekati akhir tahun. Kondisi perekonomian domestik memasuki tahun 2007 semakin menunjukkan perbaikan pascakenaikan harga BBM pada tahun 2005. Perbaikan tersebut diperkuat oleh terpeliharanya stabilitas makroekonomi, seperti tercermin pada nilai tukar yang stabil dan inflasi yang cenderung menurun. Dengan menimbang kondisi tersebut, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan moneter yang cenderung longgar, yang telah dimulai sejak Mei 2006. Memasuki paruh kedua 2007, perekonomian domestik terkena imbas krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Gejolak tersebut menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan global yang kemudian berimplikasi pada pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut diperburuk oleh melambungnya harga minyak dunia sehingga berisiko pada peningkatan inflasi. Sehubungan dengan risiko tersebut, sejak Agustus sampai dengan November 2007 Bank Indonesia menahan penurunan BI Rate. Pada akhir tahun BI Rate kembali diturunkan sehingga menjadi 8% sejalan dengan indikasi meredanya tekanan inflasi ke depan dan sinyal dukungan terhadap keberlanjutan ekspansi perekonomian.

Konsistensi dan komitmen kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi diperkuat oleh transparansi kebijakan moneter dan koordinasi yang semakin baik

dengan Pemerintah. Transparansi kebijakan moneter dilakukan melalui penguatan strategi dan intensitas komunikasi dan diseminasi kebijakan moneter di berbagai media dan kepada *stakeholders*, baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut diharapkan dapat menyelaraskan persepsi *stakeholders* dengan intensi Bank Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Di samping itu, transparansi kebijakan dapat memengaruhi pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung masih bersifat adaptif agar menjadi lebih sejalan dengan sasaran inflasi ke depan. Sementara itu, koordinasi kebijakan moneter-fiskal yang semakin erat telah membuahkan stabilitas makroekonomi yang kondusif bagi kesinambungan ekspansi perekonomian. Koordinasi kebijakan tersebut, antara lain, diwujudkan melalui pertemuan rutin antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan instansi terkait dalam forum koordinasi dan Tim Pengendalian Inflasi.

Kebijakan moneter telah direspons positif oleh pasar keuangan dan memperkuat optimisme pelaku ekonomi di sektor riil. Di pasar keuangan, respons positif pelaku pasar keuangan tampak pada terus meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar saham yang diikuti oleh akselerasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pasar Surat Utang Negara (SUN) cenderung marak dengan *yield* yang tetap menarik. Perbankan masih terus melakukan penurunan suku bunga simpanan dan pinjaman sehingga mendukung berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil dan mendorong pembiayaan alternatif dalam bentuk

penerbitan saham dan obligasi. Di sektor riil, respons positif tercermin pada ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang relatif stabil dan naiknya keyakinan konsumen, dan dunia usaha terhadap perekonomian domestik. Kondisi itu merupakan sinyal penting dalam mendukung kinerja perekonomian.

Sejalan dengan ekspansi perekonomian domestik, likuiditas perekonomian mengalami akselerasi. Likuiditas perekonomian mengalami peningkatan, terutama, dalam bentuk kredit kepada sektor swasta. Sementara itu, eksekusi likuiditas perbankan relatif masih tinggi. Dalam kondisi tersebut patut dicermati implikasinya bagi stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan.

Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Strategi kebijakan moneter melalui penetapan BI Rate diarahkan pada upaya pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Strategi tersebut ditempuh secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi, dinamika perekonomian terkini, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi itu, upaya menjaga stabilitas makroekonomi diwarnai dengan penurunan BI Rate pada periode Januari sampai dengan Juli 2007 dari 9,5% ke 8,25%. Di tengah penurunan tersebut, pada Maret 2007 permasalahan *subprime mortgage* mulai mengemuka, tetapi belum berdampak signifikan pada kestabilan perekonomian.

Pada paruh kedua tahun 2007, permasalahan *subprime mortgage* semakin menguat dan meluas sehingga mewarnai perkembangan BI Rate. Sejalan dengan hal tersebut, pada Agustus investor mulai menghitung kembali risiko investasinya untuk kemudian menyesuaikan portofolio kepada aset berkualitas tinggi. Kondisi dimaksud pada gilirannya memengaruhi nilai tukar rupiah dan nilai tukar beberapa negara *emerging markets* lainnya. Hal itu diperparah oleh cenderung membubungnya harga minyak dunia sehingga memberi tekanan tambahan pada nilai tukar dan inflasi ke depan. Menyikapi hal itu, Bank Indonesia menahan penurunan suku bunga sejak Juli hingga November 2007. BI Rate diputuskan tetap di level 8,25% untuk menahan akselerasi ekspektasi inflasi dan mengurangi tekanan di pasar keuangan. Pada akhir tahun 2007, setelah mempertimbangkan ekspektasi inflasi yang diindikasikan terjaga, kapasitas produksi yang mencukupi, dan pasar keuangan yang telah mencapai keseimbangan baru, BI Rate diturunkan menjadi 8%. Kebijakan tersebut diharapkan memberi sinyal positif terhadap ekspansi ekonomi yang tengah berlangsung, kendati tetap mengedepankan upaya mencapai sasaran inflasi.

Strategi kebijakan diterjemahkan dalam operasional kebijakan moneter melalui pengelolaan likuiditas dalam bentuk Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan berbagai instrumen lain. Sejalan dengan perkembangan BI Rate, seluruh instrumen moneter yang terkait langsung dengan BI Rate otomatis mengalami penurunan dengan besaran yang sama. Pada akhir tahun 2007, suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia *overnight* (FASBI O/N) yang selama ini dimanfaatkan sebagai batas bawah (*floor*) pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *overnight* (PUAB O/N) menjadi sebesar 3% (dari sebesar 4,75% pada akhir tahun 2006). Adapun suku bunga SBI repo yang dapat menjadi batas atas (*ceiling*) pergerakan suku bunga PUAB O/N menjadi sebesar 11% (dari sebesar 12,75% pada akhir tahun 2006). OPT terutama difungsikan untuk menyerap eksekusi likuiditas dan menjaga ketersediaan likuiditas di PUAB. Kegiatan OPT secara berkala terutama bertumpu pada lelang mingguan instrumen SBI 1 bulan dengan *fixed rate tender* pada level BI Rate. Adapun kegiatan OPT nonrutin berupa *Fine Tune Operation* (FTO) diimplementasikan secara terbatas dan dengan *pricing* yang variatif menyesuaikan dengan kondisi pasar uang. Berbagai instrumen moneter di pasar rupiah itu juga dilengkapi dengan instrumen intervensi valuta asing guna mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan.

Respons Pasar Keuangan dan Pelaku Ekonomi terhadap BI Rate

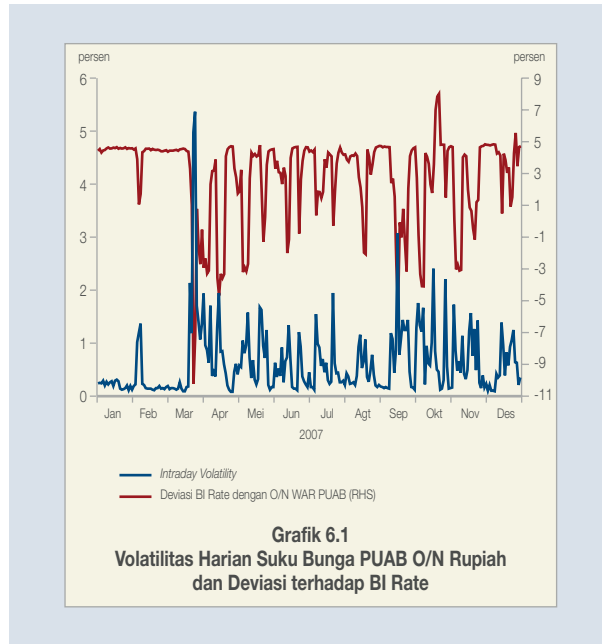
Respons Pasar Keuangan

Perkembangan BI Rate diikuti oleh suku bunga pasar uang. Sepanjang tahun 2007, suku bunga PUAB O/N rupiah secara rata-rata menurun lebih besar daripada BI Rate, sejalan dengan kondisi pasar uang yang masih mengalami kelebihan likuiditas. Sementara itu volatilitasnya relatif tidak berbeda dengan kondisi pada tahun 2006 (Tabel 6.1). Pergerakan suku bunga yang seperti itu diindikasikan cukup kuat yang diwarnai oleh kondisi mikrostruktur pasar uang dan efek dari pergerakan faktor otonomus terutama dari operasi keuangan pemerintah. Secara harian, kondisi tersebut tercermin pada suku bunga PUAB O/N yang bergerak fluktuatif dengan deviasi yang cukup bervariasi terhadap BI Rate (Grafik 6.1).

BI Rate direspons kuat oleh suku bunga deposito. Kuatnya respons tersebut juga mencerminkan kondisi eksekusi likuiditas dan sejalan dengan perkembangan suku bunga penjaminan deposito rupiah (Grafik 6.2). Suku bunga deposito rata-rata untuk keseluruhan tenor menurun 2,3% atau lebih besar daripada menurunnya BI Rate pada periode yang sama (1,75%). Hal tersebut

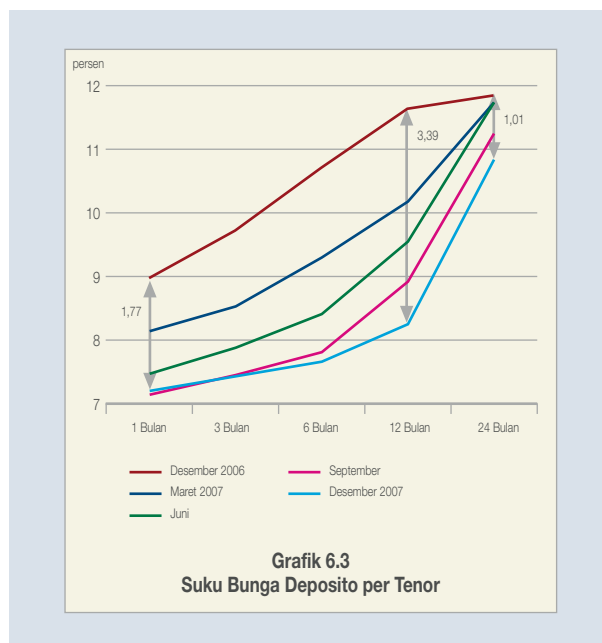
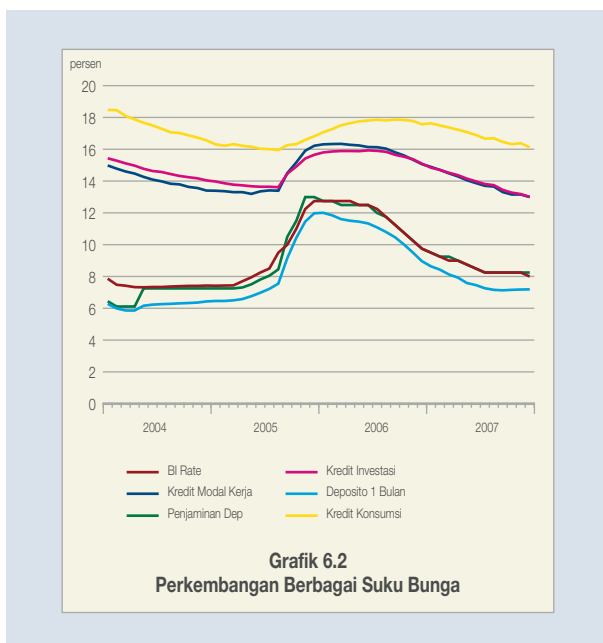
Tabel 6.1
Suku Bunga dan Volatilitas Suku Bunga
PUAB O/N Rupiah

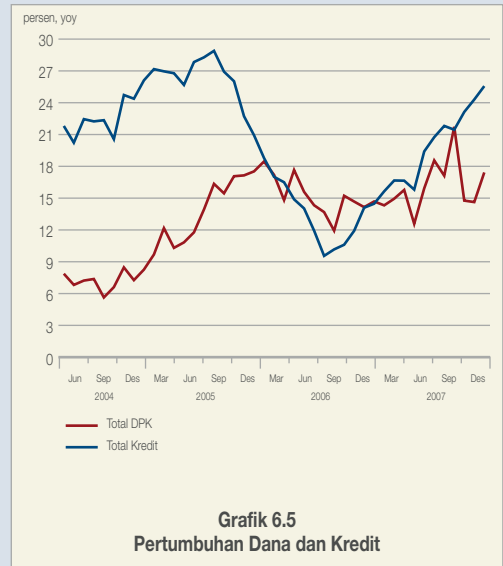
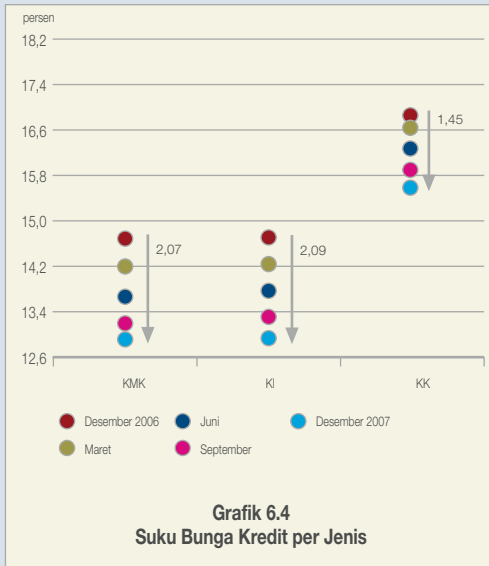
Periode	RRT PUAB O/N (%)		Volatilitas O/N (%)	
	Pagi	Sore	Pagi	Sore
2006	9,2	8,7	2,2	2,1
Jan	5,0	4,9	0,1	0,1
Feb	5,2	5,1	1,2	0,9
Mar	7,5	7,3	5,1	3,7
Mei	8,5	7,9	3,8	3,5
Jun	6,9	6,3	3,1	2,9
Jul	5,6	5,3	2,3	1,9
Sep	5,2	4,8	1,8	1,2
Okt	4,9	4,8	2,0	2,0
Nov	6,8	6,7	3,3	3,0
Jan	5,1	4,7	3,7	3,4
Feb	6,5	6,4	3,0	3,0
Mar	4,3	4,2	1,4	1,4
2007	6,0	5,8	2,6	2,2



terutama disumbang oleh penurunan suku bunga deposito tenor 12 dan 6 bulan (Grafik 6.3). Penurunan suku bunga deposito yang paling tinggi terjadi pada kelompok bank persero, sedangkan pada kelompok bank asing campuran justru terendah dibandingkan dengan perbankan secara keseluruhan. Sejak September 2007 penurunan suku bunga deposito berbagai tenor semakin melambat, bahkan suku bunga deposito 1 bulan sedikit meningkat sejak Oktober 2007. Kondisi itu diindikasikan terkait dengan upaya perbankan untuk mempertahankan nasabah dengan menjaga agar depositan tetap menerima suku bunga rupiah riil yang positif dan kompetitif.

Di lain pihak, respons suku bunga kredit lebih lambat. Terbatasnya respons tersebut diindikasikan terkait dengan cukup bervariasinya variabel yang memengaruhi *pricing* suku bunga kredit yang tidak seluruhnya mampu dipengaruhi oleh kebijakan moneter semata seperti biaya *overhead*, margin keuntungan, dan faktor risiko. Pada Desember 2007 penurunan suku bunga kredit terbesar terjadi pada suku bunga kredit modal kerja dan investasi, sedangkan penurunan suku bunga kredit konsumsi lebih lambat khususnya terkait suku bunga Kredit Tanpa Agunan dan Kartu Kredit (Grafik 6.4). Sementara itu apabila diperbandingkan secara keseluruhan rata-rata suku bunga kredit berbagai jenis

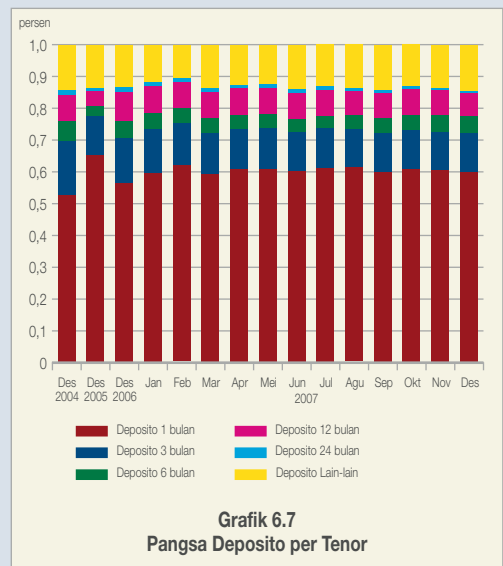
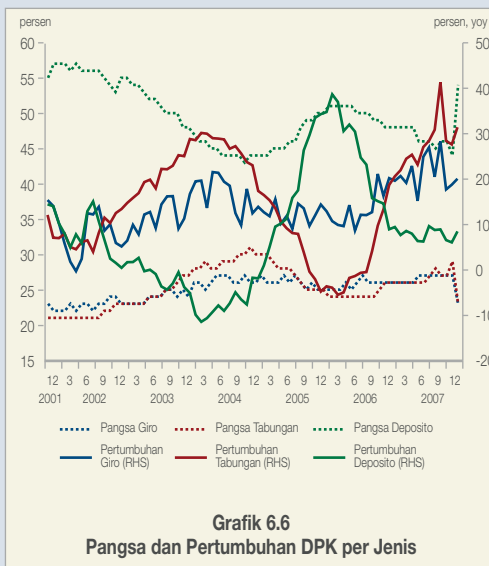


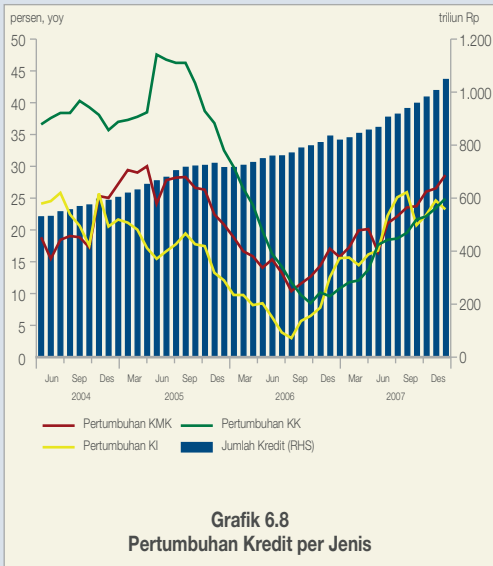


penggunaan antarkelompok bank, tampak bahwa kelompok BPD paling lambat dalam menurunkan suku bunga kreditnya, sedangkan kelompok bank swasta nasional justru menurunkan suku bunga kredit lebih besar dari perbankan secara industri. Sejak September 2007 penurunan suku bunga kredit berbagai jenis penggunaan semakin melambat. Kondisi itu ditengarai terkait dengan telah tercapainya rencana bisnis, mulai naiknya suku bunga dana, dan sikap berhati-hati perbankan dalam memandang ekonomi ke depan.

Perkembangan BI Rate direspons dengan struktur dana yang semakin berjangka pendek. Pada akhir tahun

2007 pertumbuhan dana pihak ketiga masyarakat (DPK) sebesar 17,4% naik dari 14,1% pada akhir tahun 2006 (Grafik 6.5) sehingga cukup memperkuat kondisi likuiditas perbankan. Kenaikan tersebut terutama didominasi oleh tabungan sehingga saat ini pangsaanya telah melampaui giro (Grafik 6.6). Sementara itu deposito terus tumbuh melambat terutama untuk tenor 24 dan 12 bulan, sejalan dengan tingginya penurunan suku bunga pada tenor ini. Dengan perkembangan tersebut, deposito semakin terkonsentrasi pada tenor 1 bulan (Grafik 6.7). Sementara itu, pertumbuhan DPK dalam valuta asing masih cenderung naik terutama dalam bentuk simpanan valuta asing yang perkembangannya secara umum diindikasi



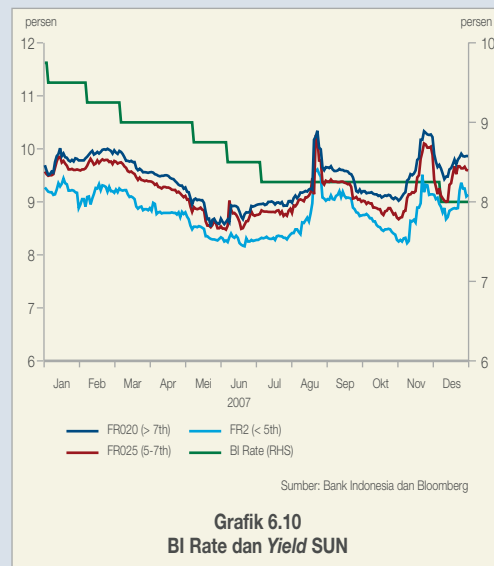


memiliki hubungan dengan menurunnya imbal hasil simpanan rupiah, menguatnya persepsi depresiasi, dan ekspektasi inflasi pada periode tertentu.

Respons yang kuat terhadap BI Rate juga terlihat pada akselerasi pertumbuhan kredit. Pada akhir tahun 2007 pertumbuhan kredit melesat mencapai 25,5% dari hanya 14,1% pada akhir tahun 2006 (Grafik 6.5). Meningkatnya pertumbuhan terjadi khususnya sejak paruh kedua tahun 2007 sejalan dengan menguatnya perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit secara industri perbankan telah melampaui prediksi awal tahun (22%). Akselerasi pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh

jenis penggunaan dengan peningkatan pertumbuhan terbesar pada kredit modal kerja (Grafik 6.8). Kredit-kredit tersebut dimanfaatkan untuk berbagai sektor ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan terbesar pada sektor pertambangan, jasa dunia usaha, pengangkutan, dan konstruksi. Pada tahun 2007, pertumbuhan kredit dalam valuta asing cenderung naik cukup tinggi melampaui pertumbuhan kredit secara total. Pertumbuhan kredit valuta asing yang tinggi tersebut, terutama, ditujukan untuk modal kerja dan investasi di sektor *traded*, seperti pertambangan dan *nontraded*, seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa dunia usaha. Maraknya penyaluran kredit valuta asing tersebut diindikasikan terkait dengan suku bunganya yang cukup kondusif pada kisaran 6,9-10,4% dan persepsi sebagian pelaku ekonomi yang meyakini bahwa Bank Indonesia akan berkomitmen pada stabilitas nilai tukar.

Di pasar saham, respons terhadap BI Rate terlihat pada kecenderungan pasar saham yang semakin *bullish*. Indeks saham sepanjang tahun 2007 bergerak bervariasi kendati tetap dalam kecenderungan meningkat. Pada akhir tahun 2007, IHSG ditutup pada level 2.745 atau menguat 52,1% dibandingkan dengan akhir tahun 2006 (Grafik 6.9). Peningkatan itu menjadikan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bursa ke-2 yang berkinerja terbaik pada tahun 2007 di bawah bursa China. Pencapaian tersebut ditopang oleh berbagai faktor domestik dan global. Faktor domestik, seperti terjaganya stabilitas makroekonomi yang diwakili oleh pergerakan BI Rate, daya beli yang naik, dan fundamental mikro beberapa emiten yang cukup baik. Sementara itu, faktor global, yaitu persepsi investor asing yang masih positif dan juga masih tingginya harga



berbagai komoditas dunia. Terus menguatnya IHSG juga berimbas pada membaiknya likuiditas pasar sehingga secara rata-rata mencapai Rp4,3 triliun per hari dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,8 triliun per hari.

BI Rate direspons dengan maraknya aktivitas perdagangan SUN, kendati *yield* relatif stabil. Aktivitas perdagangan SUN secara umum terus membaik sebagaimana tercermin pada meningkatnya volume dan frekuensi perdagangan SUN. Pada tahun 2007, rata-rata perdagangan SUN adalah sebesar Rp5,8 triliun per hari atau naik signifikan dari tahun sebelumnya (Rp3,3 triliun per hari). Adapun rata-rata frekuensi transaksi SUN mencapai 253,4 kali per hari, naik dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya sebesar 146,7 kali per hari (Grafik 6.11). Pada akhir tahun 2007, rata-rata *yield* SUN berbagai tenor sedikit menurun sebesar 17 bps dari akhir tahun sebelumnya. Tertahannya penurunan *yield* tersebut, terutama, dipengaruhi oleh kuatnya sentimen global dari krisis *subprime mortgage* dan menjulangnya harga minyak mentah dunia pada paruh kedua tahun 2007 (Grafik 6.10). Sebelumnya, *yield* sempat terus bergerak menurun sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi.

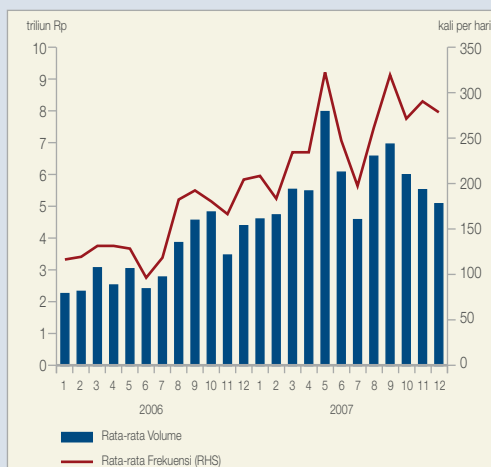
BI Rate menjadi salah satu faktor pendorong terus meningkatnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana. Pada akhir tahun 2007, NAB reksadana tercatat mencapai Rp92,2 triliun, meningkat 78,6% dari akhir tahun 2006 (Grafik 6.12). Tingginya kenaikan NAB tersebut terutama ditopang oleh apresiasi harga, terutama, pada jenis reksadana saham. Sementara itu, aliran dana bersih dari pembelian reksadana (*net subscription/new cash flow*) secara total meningkat Rp20,2 triliun dengan dominasi

juga pada jenis reksadana saham. Pencapaian tersebut, di samping ditopang oleh kondisi makroekonomi yang kondusif, juga didukung oleh pengetahuan investor yang semakin tinggi sejalan dengan gencarnya edukasi dan promosi dari agen penjual reksadana dan ketersediaan perangkat hukum yang lebih memadai. Dengan hal tersebut, tidak saja NAB yang meningkat, tetapi juga variasi jumlah reksadana. Pada akhir tahun 2007 jumlah reksadana sebanyak 473 produk, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 403 produk.

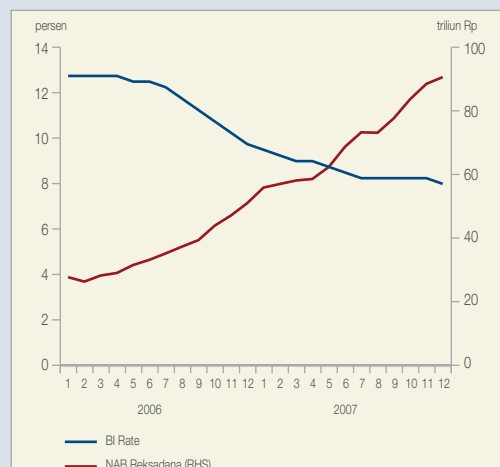
Perkembangan BI Rate direspons positif melalui peningkatan pembiayaan ekonomi di luar perbankan. Berlanjutnya ekspansi ekonomi di tengah terjaganya stabilitas makroekonomi dan pasar saham yang cenderung *bullish* telah meningkatkan permintaan pembiayaan perusahaan. Pada tahun 2007, pembiayaan perusahaan yang berasal dari pasar modal tercatat mencapai Rp78,3 triliun, meningkat 236,1% dari akhir tahun 2006 (Rp23,3 triliun). Dari penerbitan selama tahun laporan tersebut sebesar Rp47,0 triliun dijarah melalui penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* atau IPO) dan *right issue*, sementara selebihnya melalui penerbitan obligasi. IPO saham dilakukan oleh 21 emiten senilai Rp17,2 triliun dan *right issue* sebesar Rp29,8 triliun yang terutama digunakan untuk ekspansi usaha. Adapun penerbitan obligasi bersumber dari 43 emiten yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*).

Respons Sektor Riil

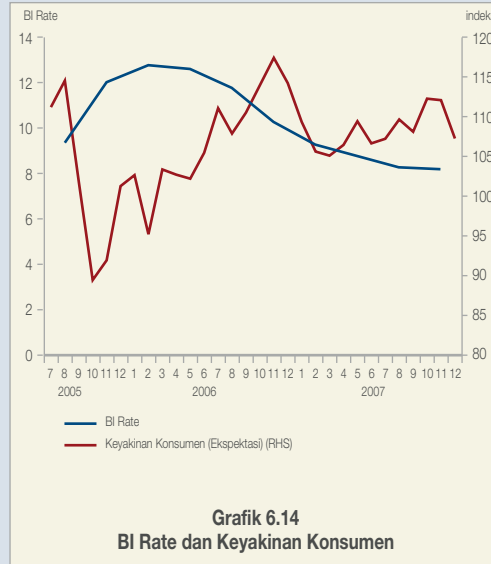
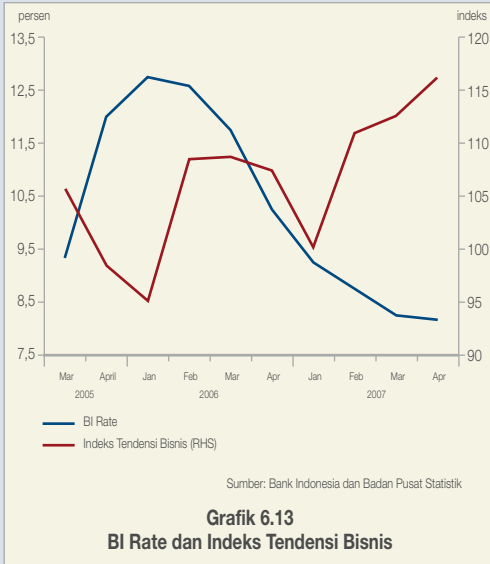
Penurunan BI Rate dipandang mampu meningkatkan optimisme dalam berusaha di Indonesia. Hal itu



Grafik 6.11
Rata-rata Aktivitas Perdagangan Harian SUN

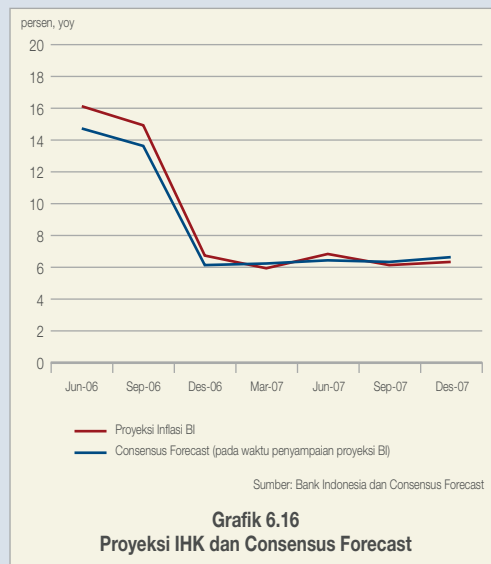
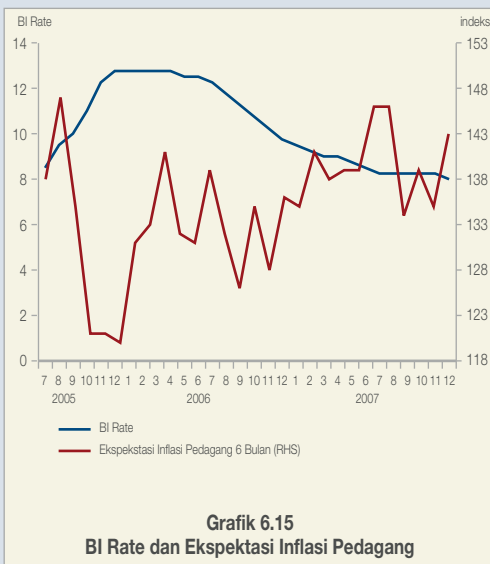


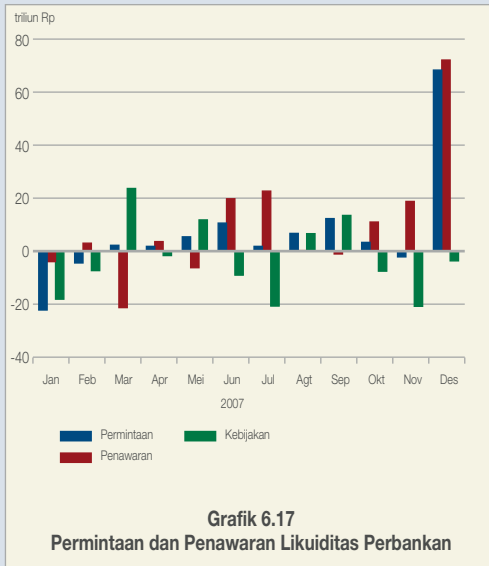
Grafik 6.12
BI Rate dan NAB Reksadana



dikonfirmasi oleh hasil survei tendensi bisnis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan perbaikan tendensi bisnis oleh dunia usaha sejalan dengan terpeliharanya kondisi makroekonomi dan prospek berlanjutnya ekspansi perekonomian (Grafik 6.13). Sementara itu, kebijakan moneter dipersepsikan secara positif oleh konsumen sebagaimana tercermin dari membaiknya ekspektasi konsumen secara agregat terhadap perekonomian ke depan, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja (Grafik 6.14).

Kebijakan moneter yang diterapkan juga mendorong terjaganya ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Pada tahun 2007, komitmen dan konsistensi kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi cukup efektif dalam memengaruhi pembentukan ekspektasi inflasi, baik pada pelaku di sektor riil (Grafik 6.15) maupun analis pasar keuangan (Grafik 6.16). Kondisi tersebut menunjukkan terus membaiknya transparansi kebijakan yang tercermin dari semakin mampunya *stakeholders* memahami kebijakan moneter Bank Indonesia. Hal itu memungkinkan Bank Indonesia meningkatkan kredibilitas (*credibility gain*) sehingga bermanfaat dalam menghadapi tantangan untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun-tahun mendatang.





Grafik 6.17
Permintaan dan Penawaran Likuiditas Perbankan



Grafik 6.18
Perkembangan Stok Ekses Likuiditas

Perkembangan Likuiditas

Perkembangan *Base Money* dan Ekses Likuiditas Perbankan

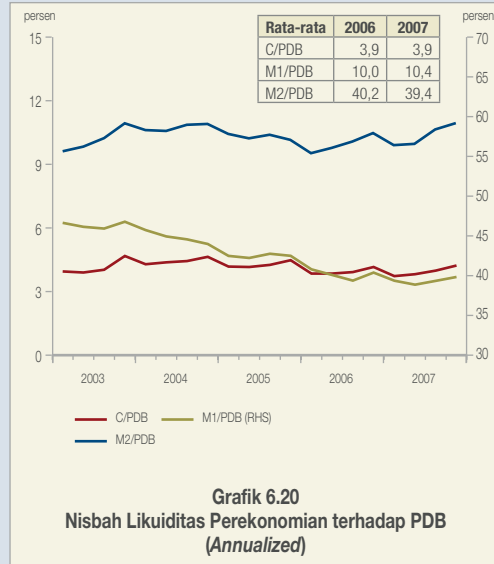
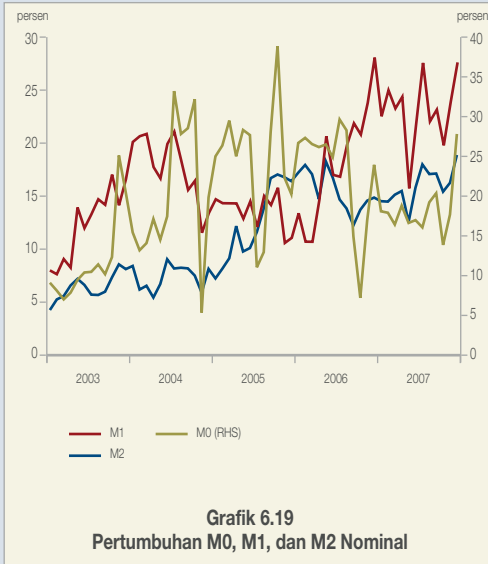
Peningkatan *base money* sejalan dengan kegiatan perekonomian. Pada akhir tahun 2007, *base money* tumbuh 27,8% menjadi Rp379,6 triliun (Tabel 6.2). Kondisi tersebut terutama disumbang oleh cukup tingginya pertumbuhan uang kartal di masyarakat selaras dengan berlanjutnya ekspansi perekonomian di sektor riil. Sementara itu, perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM) milik perbankan lebih moderat. Insentif *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengurangi kewajiban pemenuhan

GWM sebesar Rp1,0 triliun. Di luar GWM, giro perbankan (*excess reserve*) meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi pada hari terakhir tahun 2007 terkait dengan realisasi pengeluaran Pemerintah di akhir tahun.

Kenaikan *base money*, terutama, dipengaruhi oleh aktivitas Pemerintah dan Bank Indonesia. Peningkatan permintaan uang primer yang mencapai Rp82,5 triliun dari tahun sebelumnya masih dapat dipenuhi oleh transaksi rupiah Pemerintah yang bersifat ekspansif dan aktivitas Bank Indonesia (Grafik 6.17). Tambahan likuiditas bersih dari Pemerintah yang bersumber dari rekeningnya di Bank

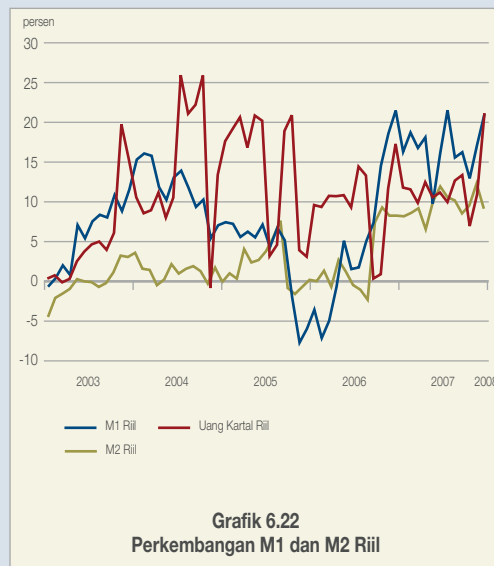
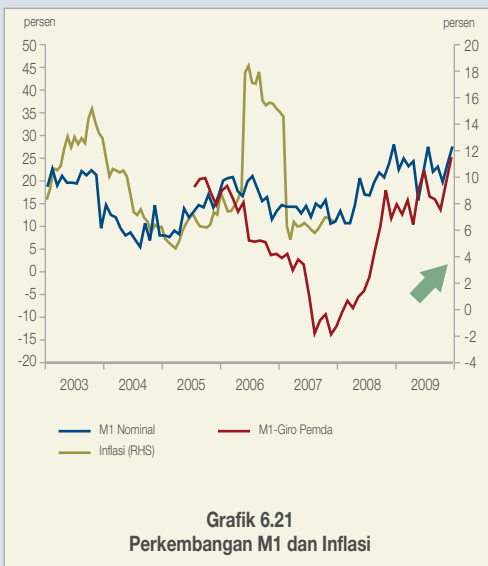
Tabel 6.2
Perkembangan *Base Money*

	2005	2006	2007
Base Money	239.781	297.080	379.582
I Uang yang Diedarkan	144.869	178.572	220.785
1. Uang Kartal di Masyarakat	124.316	151.009	183.419
2. Kas Bank Umum	20.553	27.563	37.366
II Saldo Giro Positif pada BI	94.531	118.417	158.452
III Giro Sektor Swasta	381	91	345
Aktiva Luar Negeri Bersih	173.806	274.694	356.883
Aktiva Dalam Negeri Bersih	65.976	22.386	22.700
I Tagihan Bersih pada Pemerintah	39.357	49.865	49.458
II Tagihan pada Bank Umum	233.398	243.220	227.555
III Tagihan Lainnya	19.984	19.919	8.407
IV Operasi Pasar Terbuka	(121.325)	(242.001)	(281.163)
1. SBI	(74.632)	(208.762)	(247.687)
2. FASBI	(57.212)	(41.568)	(48.933)
3. SUN (Surat Utang Negara)	10.519	8.330	15.457
V Lainnya Bersih	-105.438	-48.618	18.444



Indonesia mencapai Rp66,9 triliun, menurun signifikan dari tahun 2006 (Rp115,1 triliun). Dalam kondisi rasio defisit fiskal terhadap PDB yang sedikit meningkat dari 0,9% pada tahun 2006 menjadi sekitar 1,3% pada tahun 2007, penurunan tersebut ditengarai terkait dengan perubahan strategi *financing* Pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada penerbitan SUN di dalam negeri daripada pemanfaatan rekeningnya di Bank Indonesia. Sementara itu, aktivitas Bank Indonesia menambah likuiditas dari biaya pengelolaan moneter. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah demi terpeliharanya stabilitas makroekonomi yang berkesinambungan.

Ekses likuiditas di pasar uang bertambah. Bank Indonesia melakukan penyerapan melalui OPT untuk mengurangi likuiditas yang bertambah lebih besar dari kebutuhannya. Pada tahun 2007, posisi OPT secara agregat meningkat Rp39,2 triliun sehingga mencapai Rp281,2 triliun. Naiknya posisi OPT tersebut mencerminkan terus bertambahnya ekses likuiditas di pasar uang yang belum mampu digunakan secara optimal dalam kegiatan perekonomian di sektor riil (Grafik 6.18). Dalam hubungannya dengan itu, berbagai upaya, seperti pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), serta peningkatan komitmen dan konsistensi Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter di pasar uang akan terus dilanjutkan.



Tabel 6.3
Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

	2006	2007	2006	2007
	Miliar Rp		Pertumbuhan (persen)	
Uang Beredar dalam Arti Luas (M2)	1.382.074	1.643.203	14,87	18,89
M2 Rupiah	1.198.141	1.427.296	18,13	19,13
Uang Beredar dalam Arti Sempit (M1)	361.073	460.842	28,08	27,63
– Uang Kartal di Masyarakat	151.009	183.419	21,47	21,46
– Uang Giral	210.064	277.423	33,30	32,07
Uang Kuasi	1.021.001	1.182.361	10,82	15,80
– Simpanan dalam Rupiah	837.068	966.454	14,30	15,46
= Simpanan Berjangka	506.565	533.376	11,94	5,29
= Tabungan	330.503	433.078	18,10	31,04
– Simpanan dalam Valas	183.933	215.907	(2,65)	17,38
(miliar \$)	20.392	22.922	6,09	12,41
Aktiva Luar Negeri Bersih	413.265	524.703	32,00	26,97
Bank Indonesia:	377.936	530.913	51,09	40,48
– Aktiva Luar Negeri	385.820	538.775	12,19	39,64
– Kewajiban Luar Negeri	7.884	7.862	(91,59)	(0,28)
Bank Umum:	35.329	-6.210	(43,87)	(117,58)
– Aktiva Luar Negeri	93.924	70.907	(20,89)	(24,51)
– Kewajiban Luar Negeri	58.595	77.117	5,03	31,61
Aktiva Dalam Negeri Bersih	968.809	1.118.500	8,84	15,45
1. Tagihan Bersih pada Pemerintah	506.488	497.478	1,52	(1,78)
– Bank Indonesia	265.919	249.069	11,19	(6,34)
– Bank Umum	240.569	248.409	(7,39)	3,26
2. Tagihan Bersih pada BPPN	0	0		
3. Tagihan kepada Sektor Usaha	837.072	1.040.996	13,29	24,36
– Kredit kepada Sektor Swasta	787.136	995.111	14,13	26,42
Kredit kepada Sektor Swasta (miliar \$)	87.27	105.65	24,38	21,07
= Kredit dalam Rupiah	639.152	793.186	12,84	24,10
= Kredit dalam Valas	147.984	201.925	20,09	36,45
Kredit dalam Valas (miliar \$)	16.41	21.44	30,88	30,67
– Tagihan Lainnya	49.936	45.885	1,55	(8,11)
4. Lainnya Bersih	-374.751	-419.974	7,81	12,07

Di samping itu, berbagai kebijakan di sektor riil semakin diperkuat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat menyerap eksekutif likuiditas secara permanen.

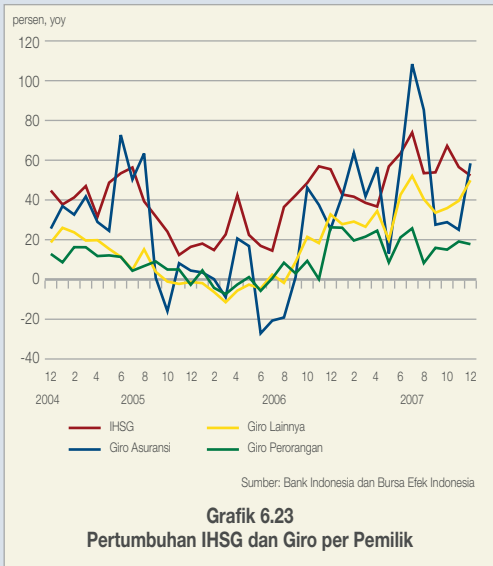
Likuiditas perekonomian

Likuiditas perekonomian yang tercermin pada M1 dan M2 menunjukkan peningkatan. Pada akhir Desember 2007, likuiditas perekonomian dalam arti sempit (M1) tumbuh 27,6% sehingga mencapai level Rp460,8 triliun. Likuiditas perekonomian dalam arti luas (M2) tumbuh 18,9% atau tercatat sebesar Rp1.643,2 triliun. Pertumbuhan likuiditas perekonomian tersebut dapat dikategorikan tinggi apabila dibandingkan dengan kondisi historisnya

dalam 5 tahun terakhir kendati secara rasio terhadap PDB relatif stabil dari tahun sebelumnya (Grafik 6.20). Tingginya pertumbuhan likuiditas perekonomian tersebut mengindikasikan potensi tekanan inflasi ke depan¹ (Grafik 6.21). Sebagaimana pertumbuhan nominalnya, pertumbuhan tahunan riil² M1 dan M2 juga meningkat mencapai masing-masing sebesar 21,0% dan 12,3% (Grafik 6.22).

BI Rate cukup kuat memengaruhi perkembangan komponen likuiditas perekonomian. Penurunan BI Rate memengaruhi komponen likuiditas perekonomian

1 Dalam grafik, pertumbuhan M1 dijadikan indikator penuntun (*leading*) 18 bulan terhadap inflasi.
2 Diperhitungkan dengan inflasi IHK.



yang berupa semakin meningkatnya preferensi likuiditas masyarakat seperti tampak pada percepatan pertumbuhan tabungan relatif terhadap deposito. Hal tersebut diikuti pula oleh semakin meningkatnya aktivitas giro milik swasta sejalan dengan bergairahnya pasar saham. Perkembangan giro milik swasta tersebut,

terutama, didominasi oleh kelompok asuransi, dana pensiun, dan kategori lainnya (antara lain, perusahaan sekuritas atau manajer investasi). Sebagaimana tampak pada Grafik 6.23, hubungan antara indeks saham dengan kelompok giro itu meningkat pasca 2005. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan terjadinya peningkatan peran institusi dalam meramaikan pasar saham domestik.

Faktor domestik dominan memengaruhi perkembangan likuiditas perekonomian. Faktor domestik dalam bentuk kredit kepada sektor bisnis mendominasi kinerja likuiditas perekonomian. Pada Desember 2007, total kredit untuk sektor tersebut naik 26,4% atau secara level bertambah sebesar Rp208,0 triliun dari posisi akhir tahun 2006. Dari jumlah itu sebesar Rp154,0 triliun disalurkan dalam bentuk kredit rupiah, sedangkan selebihnya Rp54,0 triliun atau \$5,0 miliar berupa kredit dalam valuta asing. Faktor eksternal yang tercermin pada perkembangan aktiva luar negeri bersih (*Net Foreign Assets – NFA*) secara keseluruhan meningkat sebesar 27,0% atau secara level bertambah sebesar Rp111,4 triliun. Tambahan tersebut terjadi pada NFA Bank Indonesia sejalan dengan meningkatnya cadangan devisa yang bersumber dari penerimaan hasil migas akibat tingginya harga minyak dunia. Sementara itu, NFA perbankan justru menurun, terutama, pada sisi *foreign asset* dalam bentuk *call money* dan *demand deposit* pada bank di luar negeri.



Bab 7

Neraca Pembayaran Indonesia

Bab 7: Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat kinerja yang tetap positif. Pada akhir tahun 2007, NPI mencatat surplus yang terutama bersumber dari surplus transaksi berjalan sebesar 2,5% PDB. Kenaikan surplus transaksi berjalan ditopang oleh harga komoditas di pasar internasional dan permintaan dunia yang cukup tinggi. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh menariknya imbal hasil rupiah di pasar keuangan domestik dan terjaganya kestabilan makro ekonomi dalam negeri. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa terus meningkat, sehingga berdampak positif terhadap kepercayaan pelaku ekonomi dan mampu meredam dampak gejolak yang terjadi di pasar finansial global. Secara umum, kinerja NPI dan indikator kerentanan eksternal terus membaik sehingga stabilitas nilai tukar rupiah terjaga.

NPI tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang tetap mantap. Kondisi ekonomi internasional dan domestik masih kondusif bagi peningkatan kinerja NPI. Dari sisi internasional, meskipun tidak sebaik tahun 2006, perekonomian dunia 2007 masih mengalami ekspansi yang cukup tinggi. Dampak perlambatan ekonomi AS terhadap ekonomi dunia dapat diimbangi oleh pertumbuhan negara - negara berkembang (*emerging markets*) seperti China dan India yang masih tinggi. Namun demikian, ekspansi ekonomi dunia yang berlangsung cukup kuat pada semester I 2007, sempat tertahan oleh gejolak pasar finansial dunia yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di AS. Dampak besar yang ditimbulkan dari krisis tersebut adalah terjadinya arus balik aliran modal swasta ke luar dari negara-negara berkembang yang berlangsung sejak awal semester II 2007. Kuatnya perekonomian negara *emerging markets* mendorong minat investor asing, sehingga mendukung perkembangan transaksi finansial di Indonesia yang positif.

Dari sisi domestik, berbagai perbaikan di bidang makroekonomi telah memberikan fondasi yang lebih kokoh sehingga pasar finansial Indonesia menjadi lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung (FDI) maupun portofolio, tetap berlangsung dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2006. Imbal hasil rupiah masih menarik dibandingkan dengan negara lain di kawasan regional, sejalan dengan faktor risiko yang menurun seperti ditunjukkan oleh perbaikan *rating* dari berbagai lembaga pemeringkat mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi domestik,

yang dicerminkan oleh kenaikan investasi dan konsumsi, berpengaruh pada meningkatnya impor. Namun demikian, kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor menyebabkan surplus transaksi perdagangan meningkat. Dengan berbagai perkembangan tersebut, NPI mencatat surplus yang cukup tinggi mencapai \$12,5 miliar sehingga cadangan devisa mencapai \$56,9 miliar atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (Tabel 7.1). Seiring dengan perkembangan tersebut, indikator kerentanan eksternal menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2006 (Tabel 7.2).

Untuk mendorong penguatan kinerja sektor eksternal, Pemerintah berkoordinasi dengan pihak terkait menempuh berbagai upaya. Dari sisi peraturan, Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait dengan pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA), pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan ketentuan yang menekankan pada implementasi dan pemantauan kebijakan/ketentuan.¹ Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pengembangan ekspor, khususnya komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan memberikan bantuan pembelian mesin dan pinjaman dengan bunga lebih rendah. Kebijakan lain pada pengelolaan utang luar negeri pemerintah yang lebih mandiri ditandai dengan pembubaran forum CGI yang selama ini menjadi forum kreditur kepada Indonesia. Pembubaran tersebut juga

¹ Antara lain adalah Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Inpres RI No 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Tabel 7.1
Neraca Pembayaran Indonesia

Rincian	2005	2006	2007
I. Transaksi Berjalan	278	10.836	11.009
A. Barang, Bersih (Neraca Perdagangan)	17.534	29.660	33.083
– Ekspor, fob.	86.995	103.528	118.014
– Impor, fob.	-69.462	-73.868	-84.930
1. Nonmigas	13.321	22.875	27.048
– Ekspor	66.753	80.578	93.142
– Impor	-53.431	-57.703	-66.094
2. Migas	4.212	6.785	6.036
– Ekspor	20.243	22.950	24.872
– Impor	-16.030	-16.165	-18.836
B. Jasa-jasa, Bersih	-9.122	-9.888	-11.103
C. Pendapatan, Bersih	-12.927	-13.800	-15.875
D. Transfer Berjalan, Bersih	4.793	4.863	4.903
II. Transaksi Modal dan Finansial	345	2.944	2.753
A. Transaksi Modal	333	350	530
B. Transaksi Finansial	12	2.594	2.223
1. Investasi Langsung	5.271	2.211	1.164
2. Investasi Portofolio	4.190	4.174	6.981
3. Investasi Lainnya	-9.449	-3.792	-5.922
III. Jumlah (I+II)	623	13.780	13.726
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-179	729	-1.220
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	444	14.510	12.543
VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait ¹⁾	-444	-14.510	-12.543
A. Perubahan Cadangan Devisa	663	-6.902	-12.543
B. Pinjaman IMF	-1.107	-7.608	0
1. Penarikan	0	0	0
2. Pembayaran	-1.107	-7.608	0
Catatan:			
Posisi Cadangan Devisa (Setara Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah)	34.724	42.586	56.920
	4,0	4,5	5,7

1) Tanda - (minus) menunjukkan surplus dan sebaliknya untuk tanda + (plus) menunjukkan defisit.

sejalan dengan kebijakan menurunkan ketergantungan pembiayaan dari luar negeri dan upaya menurunkan rasio utang Indonesia sehingga ketahanan terhadap gejala eksternal semakin baik.

Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan mencatat surplus yang semakin tinggi menjadi \$11,0 miliar atau 2,5% dari PDB (Tabel 7.3). Sejalan dengan harga komoditas internasional yang meningkat dan permintaan eksternal yang cukup kuat, nilai ekspor Indonesia mencatat kenaikan yang cukup tinggi. Di sektor pertambangan nonmigas, kenaikan volume ekspor juga didukung oleh peningkatan kapasitas produksi. Di sektor pertambangan migas, khususnya minyak, walaupun terjadi penurunan produksi secara alamiah setiap tahunnya, volume ekspor minyak mentah masih mengalami peningkatan. Dari sisi impor, kegiatan

Tabel 7.2
Perkembangan Indikator Kerentanan Eksternal

Rincian	1996	1997	2005	2006	2007
Transaksi Berjalan/PDB	-3,4	-2,3	0,1	2,9	2,5
Ekspor Barang dan Jasa/PDB	25,7	29,1	37,5	33,5	32,0
Ekspor Nonmigas/PDB	16,7	19,7	23,1	21,8	21,2
Pembayaran Bunga ULN/PDB	2,7	3,0	1,0	1,3	1,2
Pembayaran ULN (pokok dan bunga)/Ekspor barang dan jasa ¹⁾	35,9	44,5	17,3	24,8	19,2
Transaksi Modal dan Keuangan/PDB	4,8	1,1	0,1	0,7	1,3
Posisi ULN/Ekspor Barang dan Jasa	188,7	207,3	120,7	104,1	97,3
Posisi ULN/PDB	48,5	60,3	45,3	34,9	31,2
Cadangan Devisa/ Pembayaran ULN ²⁾	91,2	73,4	185,6	138,8	210,8
Cadangan Devisa/Posisi ULN	17,4	15,7	26,6	33,1	41,7
Cadangan Devisa/Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah (bulan) ³⁾	5	5,5	4,3	4,5	5,7
Posisi ULN (miliar \$)	110,171	136,088	130,652	128,736	136,640
Posisi Cadangan Devisa (miliar \$) ⁴⁾	19,215	21,418	34,724	42,586	56,920

Sumber: BI dan BPS (diolah).

- 1) DSR (peningkatan DSR di 2006 terjadi karena percepatan pelunasan pembayaran utang IMF).
- 2) Pembayaran total ULN baik utang pokok dan bunga.
- 3) Tahun 1996 dan 1997 faktor pembagi cadangan devisa belum termasuk pembayaran ULN pemerintah.
- 4) Tahun 1996 menggunakan konsep devisa resmi, 1997-1999 atas dasar konsep *Gross Foreign Assets*, dan mulai 2000 dengan konsep *International Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL)*.

ekonomi domestik yang membaik dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil mendorong peningkatan pertumbuhan impor. Impor minyak mentah juga mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri.

Transaksi jasa-jasa dan pendapatan bersih mencatat peningkatan defisit dibandingkan dengan tahun 2006. Kenaikan defisit transaksi jasa-jasa terkait dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing, sedangkan pada transaksi pendapatan terkait dengan meningkatnya aliran profit transfer ke perusahaan induk di luar negeri atas kegiatan usaha di Indonesia yang membaik. Untuk transaksi transfer berjalan, surplus tercatat relatif sama dengan tahun sebelumnya, antara lain didukung oleh mulai berlakunya kenaikan gaji TKI pada tahun 2007 terutama untuk beberapa negara di Timur Tengah.

Perkembangan Ekspor

Ekspor tumbuh cukup tinggi terutama ditopang oleh ekspor nonmigas. Total nilai ekspor selama tahun 2007

Tabel 7.3
Transaksi Berjalan

Rincian	juta \$		
	2005	2006	2007
Transaksi Berjalan	278	10.836	11.009
– Nonmigas	-2.548	5.424	6.225
– Migas	2.826	5.412	4.784
Barang, bersih (Neraca Perdagangan)	17.534	29.660	33.083
– Nonmigas	13.321	22.875	27.048
– Migas	4.212	6.785	6.036
Ekspor, fob	86.995	103.528	118.014
– Nonmigas	66.753	80.578	93.142
– Migas	20.243	22.950	24.872
Impor, fob	-69.462	-73.868	-84.930
– Nonmigas	-53.431	-57.703	-66.094
– Migas	-16.030	-16.165	-18.836
Jasa-jasa, bersih	-9.122	-9.888	-11.103
Pendapatan, bersih	-12.927	-13.800	-15.875
Transfer berjalan, bersih	4.793	4.863	4.903

meningkat 14,0% menjadi \$118,0 miliar (Tabel 7.4). Kenaikan nilai ekspor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas, meskipun kenaikan volume ekspor juga terjadi pada berbagai komoditas. Namun demikian, kenaikan volume yang terjadi cenderung belum merata dan masih terkonsentrasi pada komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan. Hal ini sejalan dengan kecenderungan kenaikan harga komoditas tambang yang berlangsung sejak tahun 2004. telah direspon oleh eksportir dengan peningkatan volume. Di sisi lain, kenaikan volume ekspor industri belum merata, bahkan terjadi penurunan pada komoditas utama seperti produk turunan CPO dan peralatan listrik. Demikian juga dengan kinerja sektor migas yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dan masih menunjukkan penurunan produksi alami akibat respon investasi dan eksplorasi baru migas yang agak lambat.

Kenaikan harga komoditas di pasar internasional masih menjadi faktor utama peningkatan nilai ekspor nonmigas. Harga komoditas ekspor nonmigas Indonesia secara komposit meningkat 14,9% dibandingkan dengan tahun 2006 (Grafik 7.1). Secara lebih rinci, kenaikan harga kelompok pertanian, kelompok pertambangan, dan kelompok industri masing-masing sebesar 9,5%, 10,5%, dan 26,1%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga relatif tinggi adalah CPO (74,1%), nikel (55,6%), timah (65,5%), dan kopi (25,7%). Sejalan dengan kenaikan harga yang berlangsung cukup lama, beberapa komoditas ekspor menunjukkan peningkatan volume, antara lain nikel, aluminium, mesin dan mekanik, serta produk kimia. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan volume, di

Tabel 7.4
Perkembangan Ekspor

Rincian	2006	2007	2007	
	Perubahan (%)		Nilai fob (juta \$)	Pangsa (%)
Ekspor Nonmigas	20,7	15,6	93,142	78,9
Pertanian	255,4	14,7	11,704	9,9
Pertambangan	130,1	17,2	21,609	18,3
Perindustrian	-7,0	15,2	59,829	50,7
Ekspor Migas	13,4	8,4	24,872	21,1
Total	19,0	14,0	118,014	100,0

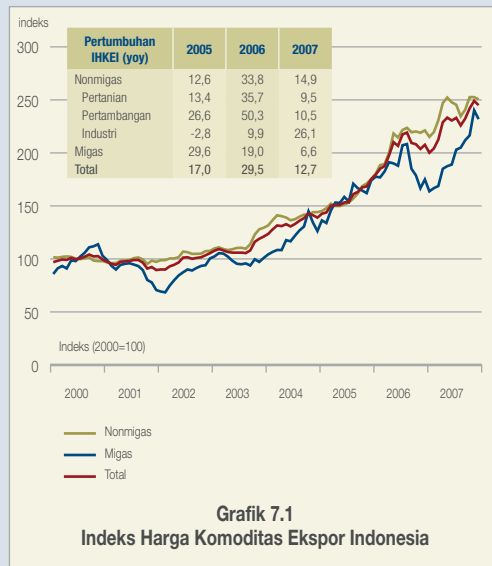
Sumber: BI dan BPS (diolah).

antaranya komoditas utama seperti produk turunan CPO, udang, tembaga, TPT dan peralatan listrik.

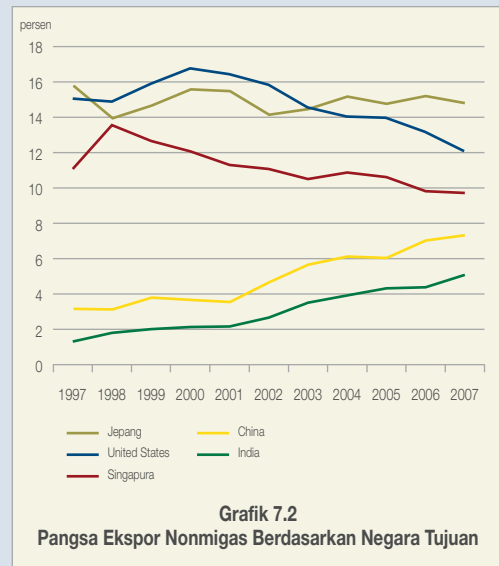
Di tengah kenaikan harga komoditas dunia, beberapa komoditas tidak bisa mengoptimalkan peluang dengan meningkatkan volume ekspor akibat adanya kendala yang dihadapi. Salah satu komoditas yang cukup besar penurunan volume ekspor adalah CPO dan produk turunannya. Penurunan volume ekspor CPO yang terjadi pada awal tahun terkait dengan puncak masa panen tanaman sawit yang bergeser dari awal tahun 2007 menjadi akhir tahun 2006. Sementara itu, penyebab penurunan volume ekspor produk turunan CPO, terkait dengan peningkatan pajak ekspor CPO pada pertengahan tahun menyusul kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam negeri,² Pemerintah menaikkan pajak ekspor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok khususnya minyak goreng dalam negeri. Secara potensial, kesempatan peningkatan ekspor CPO masih terbuka terkait dengan luas lahan kelapa sawit Indonesia yang terus meningkat dan menjadi terbesar di seluruh dunia. Saat ini luas lahan yang dimanfaatkan sekitar 5,5 juta hektar dan masih tersedia sekitar 3,7 juta hektar untuk dapat dikembangkan.

Kendala peningkatan volume ekspor juga terjadi pada komoditas tembaga. Penurunan volume ekspor tembaga terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan. Sementara itu, penurunan ekspor udang terkait dengan aliran lumpur di Sidoarjo yang berdampak pada sentra-sentra tambak udang di provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu sentra produksi udang. Permasalahan pada komoditas TPT, terkait dengan produktivitas mesin-mesin yang relatif rendah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Rendahnya produktivitas tersebut berdampak pada penurunan volume dan jenis/kualitas komoditas TPT. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

² Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.011/2007 tanggal 15 Juni 2007, tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran tarif Pungutan Ekspor,



Grafik 7.1
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia



Grafik 7.2
Pangsa Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

pengembangan ekspor TPT dengan memberikan bantuan pembelian mesin dan pinjaman dengan bunga lebih rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat merestrukturisasi mesin-mesin di sektor TPT sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih kompetitif di pasar internasional.

Kinerja ekspor yang tetap baik, di tengah perlambatan ekspansi dunia, juga ditopang oleh upaya diversifikasi negara tujuan ekspor. Meskipun tujuan ekspor masih tergantung pada beberapa negara utama tertentu, peran negara kawasan Asia dalam perdagangan (*intraregional trade*) meningkat. Lima negara utama tujuan ekspor dengan pangsa ekspor nonmigas terbesar saat ini adalah Jepang (14,3%), AS (12,0%), Singapura (9,6%), China (7,3%), dan India (5,3%) (Grafik 7.2). Jumlah pangsa ekspor ke lima negara tersebut mencapai sekitar 48,5% dari total ekspor nonmigas Indonesia, sedikit turun dibandingkan dengan tahun 2006. Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat perkembangan positif terkait dengan pergeseran peran negara maju sebagai

mitra dagang utama. Pangsa ekspor nonmigas ke AS, Jepang dan kawasan Eropa saat ini sekitar 40%, turun dari 50% pada tahun 2000. Dengan penyebaran negara tujuan ekspor yang lebih luas diharapkan meningkatkan fleksibilitas kinerja ekspor Indonesia dalam mengantisipasi berubahnya siklus perekonomian di berbagai negara mitra dagang, khususnya perlambatan ekonomi yang terjadi di negara maju (Boks: Perdagangan Intraregional Asia).

Jenis komoditas ekspor ke negara tujuan utama cukup bervariasi (Tabel 7.5). Komoditas utama ekspor nonmigas ke AS dan Jepang masing-masing adalah pakaian dan biji logam. Sementara ekspor ke China dan India, sebagian besar berupa ekspor minyak sayur dan lemak. Distribusi pangsa ekspor komoditas lainnya relatif merata, tidak terkonsentrasinya ekspor pada produk dan tujuan kawasan tertentu merupakan perkembangan yang positif. Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan produk dan kawasan tertentu.

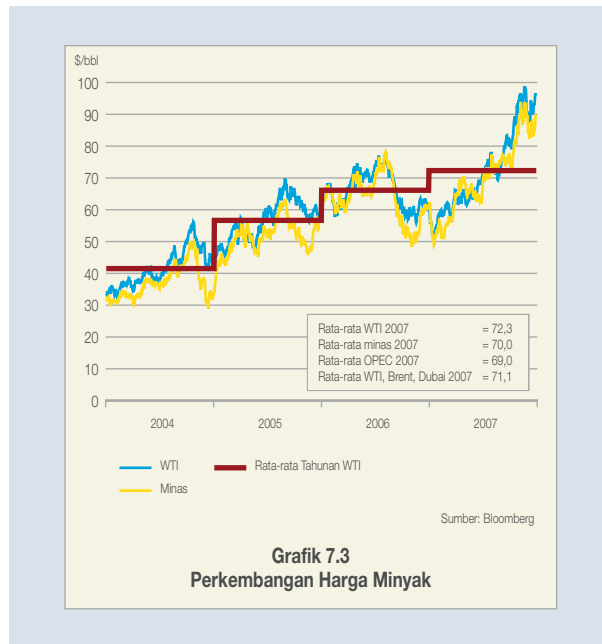
Tabel 7.5
Pangsa Komoditas Ekspor Nonmigas Utama Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2007

Jepang		A S		Singapura		China		India	
Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa
Biji Logam & Sisa Logam	4,22	Pakaian	3,84	Mesin Listrik & Alat-alatnya	1,35	Minyak Sayur & Lemak	1,33	Minyak Sayur & Lemak	2,36
Batubara, Krokas & Briket	1,4	Karet Mentah	1,29	Mesin Kantor & Pengolah Data	1,05	Biji Logam & Sisa Logam	0,82	Batubara, Krokas & Briket	0,93
Logam Tidak Mengandung Besi	1,23	Ikan & Kerang-kerangan	0,81	Logam Tidak Mengandung Besi	0,98	Karet Mentah	0,78	Biji Logam & Sisa Logam	0,57
Mesin Listrik & Alat-alatnya	0,93	Barang-barang Manufaktur	0,62	Telekomunikasi & Alat-alatnya	0,64	Kimia Organik	0,59	Minyak Hewan & Sayur & Lemak	0,12

Secara umum, produk ekspor Indonesia masih bertumpu pada komoditas berbasis sumber daya alam. Berdasarkan indikator daya saing yang diukur dari *Revealed Comparative Advantage* (RCA), komoditas ekspor berbasis primer masih kompetitif. Komoditas pertanian seperti, karet alam, memiliki RCA yang tinggi dan menduduki peringkat kedua terbesar dari nilai ekspor Indonesia. Komoditas pertambangan, seperti pada timah, tembaga, dan batubara, juga mempunyai daya saing yang masih cukup tinggi serta menempati urutan utama perdagangan dunia. Sementara itu, pada kelompok barang industri, CPO mempunyai nilai RCA yang tertinggi (Tabel 7.6).

Selama tahun 2007, perkembangan nilai tukar yang bergerak stabil mendukung daya saing ekspor Indonesia. Secara rata-rata nilai tukar selama tahun 2007 cenderung menguat. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan regional, penguatan rupiah masih relatif rendah sehingga mendukung daya saing ekspor dari sisi harga.

Nilai ekspor migas masih meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. Nilai ekspor migas mengalami peningkatan sebesar 8,4% menjadi \$24,9 miliar. Pertumbuhan nilai tersebut lebih didorong oleh harga minyak yang meningkat. Secara rata-rata, harga minyak internasional berbagai jenis mengalami peningkatan, bahkan untuk jenis WTI sempat mendekati level \$100 per barel pada November 2007 (Grafik 7.3).



Perkembangan faktor fundamental, yang dicerminkan dari tambahan pasokan dan sisa kapasitas produksi minyak yang masih relatif rendah, menjadi rentan terhadap faktor nonfundamental seperti faktor sentimen dan geopolitik. Di samping itu, tren pelemahan nilai tukar dolar AS memicu peningkatan aksi spekulatif dengan meningkatnya transaksi *noncommercial* di pasar komoditas minyak. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata harga ekspor minyak mentah Indonesia selama 2007 naik 12,2% menjadi \$70,1 per barel.

Tabel 7.6
Revealed Comparative Advantage (RCA)

Rincian	SITC	RCA			Peringkat di Dunia ¹⁾		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
Pertanian							
– Udang, Kerang dan Sejenisnya, Segar/Dingin	036	9,4	6,2	7,1	3	6	4
– Kopi	071	3,9	4,0	4,1	9	6	5
– Coklat	072	12,1	9,4	10,8	3	4	4
– Getah Karet Alam, Karet Alam Lainnya	231	66,0	14,5	35,6	1	2	2
Pertambangan							
– Bijih Tembaga	283	20,6	12,8	16,9	2	2	2
– Batubara	321	11,6	9,5	14,0	4	3	2
– Barang-barang Timah	687	29,1	34,3	31,5	1	1	1
Industri							
– Produk TPT							
– Benang Tekstil	651	8,1	4,9	4,9	7	7	7
– Pakaian Lelaki dan Anak Lelaki Rajutan	843	2,8	2,3	3,2	12	12	6
– Kayu dan Produk Kayu							
– Kayu Bakar dan Arang Kayu	245	7,2	5,6	6,0	5	2	3
– <i>Plywood</i> , Tripleks, dsb	634	8,4	8,8	6,8	4	3	5
– Barang-barang Kayu	635	5,2	4,4	4,2	6	7	6
Minyak Nabati Lainnya, Cair atau Kental (CPO)	422	46,6	39,5	42,2	2	1	1

Sumber: UNCOMTRADE, di olah.

1) Peringkat berdasarkan urutan nilai ekspor di pasar dunia sesuai dengan kode SITC.

Berdasarkan kontribusi, nilai ekspor gas sedikit di bawah nilai ekspor minyak. Selama 2007, ekspor gas mencapai \$12,4 miliar, sementara ekspor minyak \$12,5 miliar. Dari sisi volume, walaupun terjadi kecenderungan penurunan produksi minyak, ekspor minyak mentah tetap mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan masih belum optimalnya pemanfaatan minyak domestik untuk diolah di kilang dalam negeri. Di sisi lain, impor minyak, baik *crude* maupun produk olahan, juga tetap mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan kilang dan konsumsi BBM dalam negeri. Sementara itu untuk gas, peningkatan nilai eksportnya tidak diikuti oleh peningkatan volume. Hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan domestik, antara lain untuk mendukung program konversi BBM dari minyak tanah ke LPG.

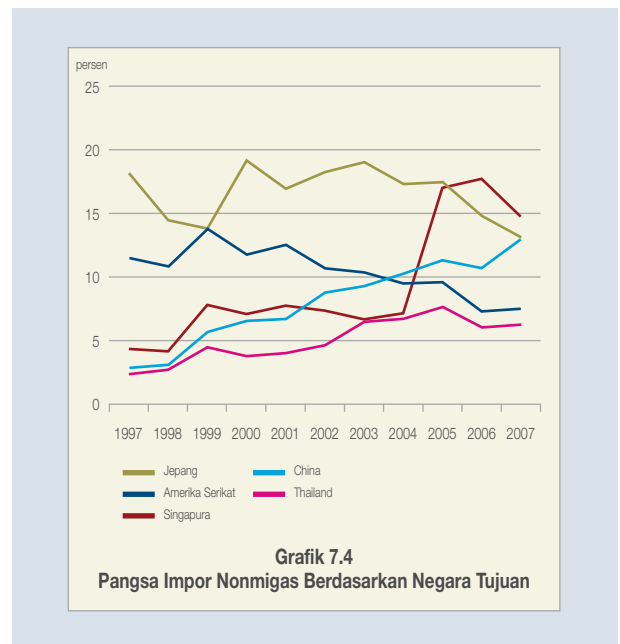
Perkembangan Impor

Pertumbuhan impor cukup tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang meningkat. Secara keseluruhan, total impor (c&f) tumbuh sebesar 15,0% menjadi \$92,4 miliar (Tabel 7.7). Kenaikan impor yang cukup besar terjadi pada komoditas minyak seiring dengan kenaikan harga, penurunan produksi dalam negeri, dan peningkatan konsumsi BBM domestik. Stabilitasnya pergerakan nilai tukar rupiah juga mendorong naiknya impor barang nonmigas, khususnya barang konsumsi yang mencapai 46,8%. Namun demikian, peningkatan tersebut perlu dicermati dan dapat menjadi indikasi daya saing produk dalam negeri yang semakin menurun. Sementara itu, impor barang modal dan bahan baku juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan ekspansi ekonomi domestik.

Berdasarkan asal negara, pangsa impor dari lima negara utama relatif tetap. Secara keseluruhan, pangsa impor nonmigas (c&f) dari lima negara mencapai 54,5% menjadi \$39,2 miliar, atau relatif tidak banyak berubah dari pangsa 2006 sebesar 56,5% (Grafik 7.4). Penetrasi barang impor dari China yang terus meningkat, telah menyamai pangsa impor dari Jepang. Maraknya impor barang dari China

Tabel 7.7
Perkembangan Impor

Rincian	2006	2007*	2007	
	Perubahan (%)	Perubahan (%)	Nilai c&f (Juta \$)	Pangsa (%)
Impor Nonmigas	8,0	14,6	71.907	78,2
Barang Konsumsi	18,4	46,8	7.241	6,1
Bahan Baku	7,8	12,0	50.502	56,1
Bahan Modal	5,4	11,0	14.164	15,9
Impor Migas	3,0	16,7	20.474	21,8
Total	6,9	15,0	92.381	100,0



dengan harga yang relatif murah menjadi substitusi impor dari negara lain, sehingga kecenderungan impor dari Jepang dan AS menunjukkan penurunan. Jenis barang impor dari negara asal utama relatif bervariasi. Impor kendaraan bermotor, terutama berasal dari Jepang dan Thailand. Sementara itu, impor mesin secara umum berasal dari lima negara utama, dengan pangsa terbesar dari Singapura (Tabel 7.8).

Perkembangan Transaksi Jasa-jasa, Pendapatan, dan Transfer Berjalan

Defisit transaksi jasa-jasa dan pendapatan bersih mengalami peningkatan, sementara surplus transaksi transfer berjalan relatif tetap. Transaksi jasa-jasa mencatat peningkatan defisit, terutama bersumber dari kenaikan biaya transportasi untuk impor dan arus wisatawan Indonesia ke manca negara, termasuk perjalanan haji dan umroh. Dari sisi penerimaan, aliran devisa masuk terutama disumbang oleh kunjungan turis asing yang meningkat menjadi 5,5 juta orang atau merupakan pencapaian tertinggi selama ini. Peningkatan kunjungan turis asing sejalan dengan membaiknya isu keamanan, serta meningkatnya kegiatan MICE (*meeting, incentives, conference and exhibition*) berskala internasional. Berbagai usaha juga telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah untuk menarik turis asing termasuk melalui berbagai promosi di berbagai bursa pariwisata, pengembangan daerah unggulan wisata, serta penambahan negara penerima fasilitas *visa on arrival* (VOA) dari 52 pada tahun 2006 menjadi 63 negara pada akhir 2007.

Transaksi pendapatan bersih mencatat kenaikan defisit dari 15,0% menjadi \$15,9 miliar. Peningkatan defisit

Tabel 7.8
Pangsa Komoditas Impor Nonmigas Utama Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor

Singapura		Jepang		China		Amerika Serikat		Thailand	
Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa	Komoditas	Pangsa
Mesin Listrik & Alat-alatnya	2,24	Kendaraan Bermotor	1,92	Besi & Baja	1,65	Peralatan Transportasi Lainnya	0,89	Kendaraan Bermotor	1,53
Alat Telekomunikasi	1,44	Besi & Baja	1,56	Alat Telekomunikasi	1,23	Mesin Industri & Peralatan	0,54	Gula & Madu	0,49
Kimia Organik	1,43	Mesin Khusus Untuk Industri Tertentu	1,25	Mesin Listrik & Alat-alatnya	0,96	Serat Tekstil & Sisanya	0,53	Mesin Industri & Peralatan	0,43
Mesin Kantor & Pengolah Data	1,10	Mesin Industri & Peralatan	1,23	Tekstil, Benang, Kain & Produk Tekstil	0,93	Biji Minyak, Kacang & Minyak Biji-bijian	0,52	Mesin Listrik & Alat-alatnya	0,38

tersebut terutama disumbang oleh peningkatan *profit transfer* dan *reinvested earning* perusahaan PMA di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya keuntungan dari perusahaan PMA karena prospek usaha di Indonesia yang membaik. Sementara itu, transfer berjalan mencatat surplus terutama disumbang dari transfer (TKI) yang bekerja di luar negeri. Selama 2007, transaksi transfer masuk dari TKI mencatat surplus \$4,9 miliar atau meningkat 7%. Salah satu upaya yang terkait dengan perkembangan TKI adalah terealisasinya kenaikan gaji TKI di beberapa negara khususnya Timur Tengah pada 2007.³ Berdasarkan negara, Arab Saudi dan Malaysia tetap merupakan negara dengan penempatan TKI terbesar. Secara keseluruhan, posisi penempatan TKI tahun 2007 sebanyak 4,3 juta, lebih rendah dibanding tahun 2006 sebanyak 4,6 juta,

Transaksi Modal dan Finansial

Transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi \$2,8 miliar. Berdasarkan komposisinya, aliran masuk bersih dalam bentuk investasi portofolio masih cukup dominan, sementara investasi langsung (FDI) menunjukkan perkembangan yang positif. Masih relatif tingginya imbal hasil rupiah dan terjaganya stabilitas makroekonomi mendorong masuknya aliran modal portofolio. Sementara itu, berbagai kemajuan di bidang infrastruktur telah mendorong iklim investasi yang semakin kondusif dan berdampak positif bagi perkembangan FDI.

Transaksi Investasi Langsung

Pada tahun 2007 FDI mencatat surplus yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun dengan komposisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan aliran masuk bersih FDI diimbangi oleh peningkatan aliran

keluar bersih FDI (Tabel 7.9). Dari sisi *liabilities*, transaksi FDI mencatat kenaikan surplus sejalan dengan iklim investasi dan kegiatan ekonomi domestik yang membaik. Investasi FDI sektor migas terus meningkat sejalan dengan harga minyak yang tinggi. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan usaha pemerintah meningkatkan produksi minyak melalui penawaran langsung sejumlah blok migas yang diadakan sejak tahun 2006. Sepanjang tahun 2007, terdapat kontrak baru untuk 35 proyek hulu dan 26 blok migas dengan total komitmen mencapai \$13,0 miliar. Demikian pula halnya dengan FDI sektor nonmigas yang mencatat kenaikan selama tahun 2007. Aliran FDI masuk, baik yang bersumber dari penarikan pinjaman dari induk perusahaan di luar negeri maupun dari penambahan modal (*equity*) naik cukup tinggi. Salah satu sumber peningkatan modal FDI lainnya yang cukup penting adalah dalam bentuk *reinvested earning*. Peningkatan dari sumber tersebut mencerminkan keyakinan investor FDI pada iklim usaha di Indonesia dengan terus meningkatkan ekspansi bisnis. Selama tahun 2007, aliran masuk bersih FDI sektor migas dan nonmigas masing-masing mencatat kenaikan 18,3% dan 12,4% menjadi \$0,9 miliar dan \$4,6 miliar. Dari sisi aset, terjadi kenaikan aliran modal keluar sebesar 63,0% menjadi \$4,4 miliar. Hal ini dapat dipandang sebagai perkembangan yang positif karena perusahaan Indonesia mampu berkompetisi di luar negeri. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan FDI bersih mencatat surplus yang relatif tetap, berdasarkan komposisinya menunjukkan perkembangan yang positif.

Berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat investor asing ke Indonesia. Salah satu upaya memberi kepastian usaha telah dilakukan antara lain melalui UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Inpres RI No.6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui perangkat peraturan tersebut, kepastian usaha asing di Indonesia diharapkan

³ Antara lain diatur melalui Surat Edaran No. 01/BNP2TKI/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan SE No. 02/BNP2TKI/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 masing-masing tentang kenaikan upah minimum TKI di Singapura dan Arab Saudi.

Tabel 7.9
Investasi Langsung (FDI)

Rincian	2005	2006	2007
FDI (<i>net</i>)	5.271	2.211	1.164
Ke Luar Negeri (<i>net</i>)	-3.065	-2.703	-4.407
Di Indonesia (<i>net</i>)	8.336	4.914	5.571
Nonmigas	7.282	4.122	4.633
Migas	1.054	793	938

lebih terjamin, misalnya dari risiko nasionalisasi, penetapan bidang usaha yang terbuka dan tertutup, serta pelayanan terpadu dengan struktur birokrasi yang lebih baik. Melalui Inpres tersebut semua rencana tindak dipastikan dapat berjalan, dengan memantau implementasi tiap-tiap rencana tindak yang telah ditetapkan tahun 2006 dan tahun 2007. Selama tahun 2007, kepercayaan asing atas iklim investasi di Indonesia cenderung membaik. Berbagai lembaga pemeringkat menaikkan peringkat untuk Indonesia (*sovereign rating*). Secara berurutan, Moody's, Rating & Investment, dan Japan Credit Rating Agency menaikkan rating masing-masing menjadi Ba3, BB+, dan BB.

Transaksi Investasi Portofolio

Transaksi investasi portofolio mencatat peningkatan surplus dan menunjukkan ketahanan terhadap efek gejolak finansial global. Sepanjang tahun 2007, total surplus transaksi investasi portofolio mencatat \$7,0 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, meningkatnya aliran masuk modal portofolio ditunjang oleh masih besarnya likuiditas di pasar keuangan global. Dari sisi domestik, peningkatan surplus terutama dipengaruhi oleh membaiknya kepercayaan terhadap kondisi makroekonomi dan prospek ekonomi. Perbandingan imbal hasil investasi dalam bentuk rupiah juga relatif masih lebih menarik dibandingkan dengan hasil penempatan di negara *emerging markets* lainnya. Pasar portofolio Indonesia menunjukkan ketahanan yang meningkat dari efek kejutan di pasar global. Aliran modal keluar, sebagai akibat dari guncangan pasar finansial dunia yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di AS, terjadi dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Berdasarkan komponen, aliran masuk investasi portofolio sisi *liabilities* meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada sisi aset relatif tidak banyak berubah. Secara keseluruhan, investasi portofolio pada sisi *liabilities* mencatat kenaikan surplus menjadi \$10,0 miliar (Tabel 7.10). Di sektor publik, peningkatan surplus disumbang dari SUN dalam rupiah dan SBI, sedangkan yang bersumber SUN valas menurun. Di sektor swasta, peningkatan surplus disumbang pembelian asing pada saham dan surat utang perusahaan domestik.

Tabel 7.10
Investasi Portofolio Sisi *Liabilities*

Rincian	2005	2006	2007
Sektor Publik, bersih	4.826	4.514	5.270
Obligasi Valas	2.095	1.930	1.425
SUN	2.054	2.209	2.612
SBI	677	375	1.233
Sektor Swasta, bersih	444	1.593	4.711
Saham	-165	1.898	3.559
Surat Utang	609	-305	1.152
Total	5.270	6.107	9.981

Transaksi Investasi Lainnya

Transaksi investasi lainnya mencatat defisit yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi \$5,9 miliar, sejalan dengan strategi pengelolaan utang pemerintah yang lebih mandiri. Di sektor publik, transaksi investasi lainnya mencatat kenaikan defisit menjadi \$2,4 miliar (Tabel 7.11). Kecenderungan defisit tersebut merupakan cerminan kebijakan pemerintah yang berusaha mengurangi beban utang luar negeri dengan menerapkan strategi penarikan yang lebih rendah dari pembayaran utang. Perkembangan menarik dalam pengelolaan utang pemerintah tahun 2007 diwarnai adanya pembubaran forum CGI pada awal tahun 2007. Dengan demikian fleksibilitas pengelolaan utang luar negeri dapat lebih baik dengan dilakukan secara bilateral. Usaha tersebut juga dibarengi dengan efektivitas pencairan pinjaman sisa komitmen yang belum ditarik.

Pembubaran CGI tidak serta-merta menyebabkan penurunan pencairan utang pemerintah secara drastis. Meskipun pencairan pinjaman proyek turun, tapi pencairan pinjaman program meningkat. Pencairan utang luar negeri dalam bentuk pinjaman program yang diperoleh pada tahun 2007 bahkan meningkat menjadi \$1,9 miliar dari tahun 2006 sebesar \$1,5 miliar. Demikian juga dengan penarikan utang proyek yang sebagian besar merupakan komitmen CGI tahun lalu masih cukup besar. Meskipun pencairan pinjaman pemerintah secara umum tidak mengalami hambatan, namun besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan fiskal dan dijaga pada level yang lebih rendah dari pembayarannya. Strategi pengelolaan utang pemerintah yang mandiri juga terefleksi pada prioritas pembiayaan yang bersumber dari domestik.

Di sektor swasta, transaksi investasi lainnya mencatat kenaikan defisit menjadi \$3,6 miliar. Salah satu faktor penyebab peningkatan defisit tersebut adalah aliran modal keluar negeri yang dicatat di sisi aset dalam bentuk simpanan milik residen di luar negeri. Berdasarkan pengalaman selama ini, aliran modal keluar tersebut dapat menjadi sumber pasokan valas ketika terjadi kejutan yang

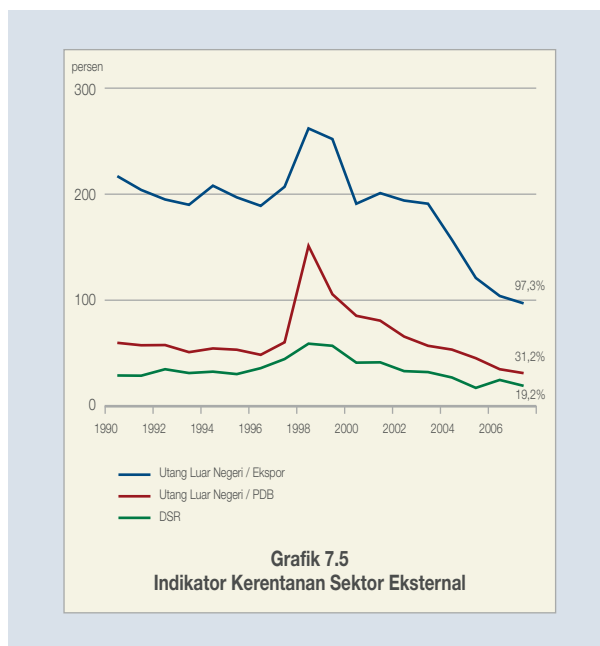
Tabel 7.11
Transaksi Investasi Lainnya

Rincian	juta \$		
	2005	2006	2007
Investasi Lainnya, bersih (Sektor Publik)	-848	-2.497	-2.363
Aset	0	0	0
Kewajiban	-848	-2.497	-2.363
Investasi Lainnya, bersih (Sektor Swasta)	-8.601	-1.296	-3.559
Aset	-8.646	-1.588	-5.633
Kewajiban	45	292	2.075
Total	-9.449	-3.793	-5.922

berakibat pada peningkatan permintaan valas di pasar domestik. Fenomena ini juga menjadi satu faktor yang dapat menjelaskan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar finansial dunia.

Indikator Kerentanan Eksternal

Dengan pencapaian surplus pada transaksi berjalan, transaksi modal, dan finansial tersebut di atas, total NPI selama tahun 2007 mencatat surplus \$12,5 miliar. Meningkatnya kinerja NPI tersebut disertai dengan struktur yang semakin baik sehingga memberikan dukungan fundamental bagi stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2007. Meskipun peranan arus masuk modal jangka pendek masih cukup besar, arus modal jangka panjang semakin menunjukkan perkembangan yang positif.



Indikator kerentanan eksternal cenderung membaik, Meskipun posisi ULN meningkat menjadi \$136,6 miliar (Tabel 7.12), rasio ULN terhadap PDB dan ekspor tetap menurun masing-masing menjadi 31,2% dan 97,3% (Grafik 7.5). Kedua indikator tersebut semakin menunjukkan perbaikan dari batasan kritis yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Demikian juga dengan indikator rasio pembayaran utang terhadap ekspor barang dan jasa (DSR) menjadi 19,2% atau di bawah batasan kritis 20%.

Tabel 7.12
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia

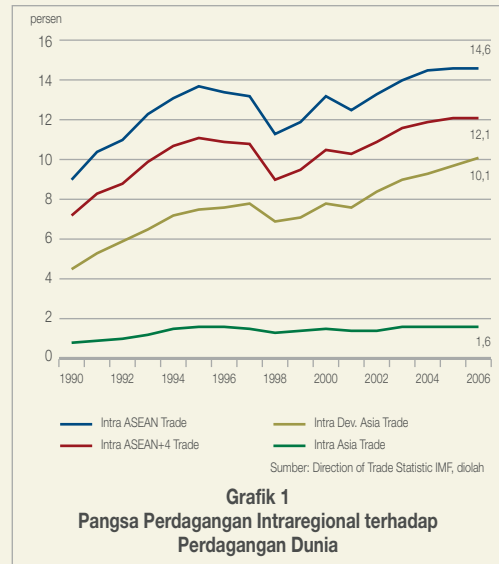
Keterangan	2005	2006	2007			
			Maret	Juni	September	Desember*
Pemerintah	75.406	67.722	69.085	66.155	68.088	69.340
Swasta	48.601	50.983	51.127	52.073	53.641	53.909
a. Lembaga Keuangan	6.371	6.560	6.992	6.900	6.948	7.465
– Bank	4.042	4.544	4.963	4.935	4.837	5.351
– Bukan Bank	2.329	2.017	2.029	1.965	2.111	2.114
b. Bukan Lembaga Keuangan	42.229	44.423	44.135	45.173	46.693	46.444
Surat-surat berharga	6.646	10.031	11.071	15.253	15.218	13.391
– Pemerintah	4.666	8.087	9.105	13.233	13.147	11.269
– Bank	15	30	47	75	52	50
– Bukan Lembaga Keuangan	1.965	1.914	1.919	1.944	2.019	2.073
Total	130.652	128.736	131.283	133.482	136.947	136.640

* Angka sementara

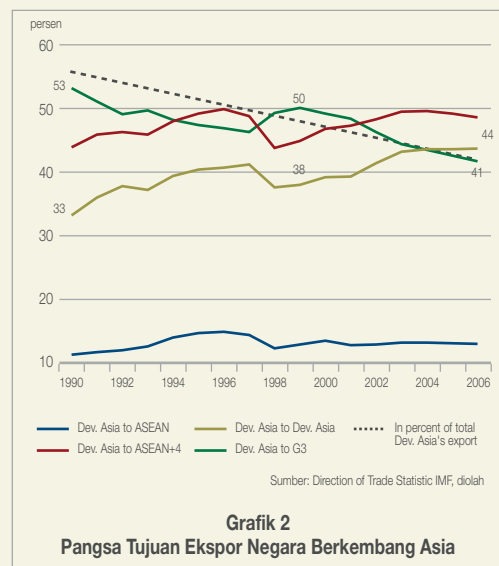
Perdagangan Intraregional Asia

Perdagangan intraregional Asia dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Peningkatan perdagangan intraregional ini telah menggantikan dominasi pangsa perdagangan dari Asia ke negara maju. Pangsa perdagangan intraregional untuk sesama kawasan ASEAN, ASEAN+4, negara berkembang Asia dan Asia semakin meningkat terhadap total perdagangan dunia (Grafik 1).¹ Pertumbuhan intraregional negara berkembang Asia tahun 2006 mencapai 44% atau meningkat tajam dari 33% tahun 1990 (Grafik 2). Peningkatan tersebut telah menggantikan dominasi pangsa perdagangan dari negara berkembang Asia ke negara maju utama atau G3 (AS, kawasan Eropa, dan Jepang) dari 53% pada tahun 1990 menjadi sekitar 42% tahun 2006. Meskipun peranan perdagangan ke negara maju G3 masih cukup besar, menurunnya pangsa perdagangan ke negara maju merupakan perkembangan positif di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di negara maju. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemandirian perdagangan negara berkembang di kawasan Asia. Ditinjau per negara, perdagangan intraregional Asia ke AS, kawasan Eropa dan Jepang terus menunjukkan penurunan, sementara perdagangan dengan China meningkat pesat (Tabel 1). Dalam kondisi ekonomi negara maju yang melambat, maka dampak perlambatan tersebut sebagian dapat dikompensasi oleh peningkatan perdagangan dengan China dan negara lain di kawasan Asia.

Peningkatan perdagangan intraregional didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia terutama China dan India. Perdagangan intraregional Asia yang meningkat didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi kawasan terutama di China dan India. Dukungan volume PDB dan jumlah penduduk yang sangat besar menjadi sumber permintaan eksternal utama bagi negara lain di kawasan Asia. Pada tahun 2007 pangsa PDB China dan India terhadap PDB negara berkembang Asia telah lebih dari separo atau masing-masing mencapai 47,6% dan 16,0%.² Perkembangan lain yang mendukung



peningkatan perdagangan intraregional adalah kebijakan relokasi industri dari negara maju, terutama dari Jepang, ke berbagai negara di Asia. Perkembangan tersebut juga didukung oleh arus investasi modal langsung ke Asia yang besar serta berbagai kebijakan kerjasama perdagangan



1 (Negara Berkembang Asia = Asia-Jepang-Timur Tengah). (ASEAN = Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Laos). (ASEAN+4 = ASEAN + Jepang+ China + India + Korea Selatan).

2 Menggunakan PDB nominal yang bersumber dari data base WEO-IMF Oktober 2007.

Tabel 1
Tujuan Ekspor Intraregional ke Beberapa Negara

Negara Asal	Tujuan Ekspor*														
	Amerika Serikat			Kawasan Eropa			Jepang			China			India		
	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006	1990	1999	2006
Negara Berkembang Asia	21,9	21,9	16,9	16,9	17,0	16,2	14,3	11,1	8,5	15,7	17,4	22,2	0,7	1,0	1,6
ASEAN	19,4	20,1	14,1	16,0	16,5	13,0	18,9	12,4	10,6	6,4	8,6	14,8	1,2	1,7	2,4
ASEAN+4	25,1	24,4	18,2	18,2	17,2	16,0	8,4	7,8	6,9	5,0	7,7	10,8	0,7	0,9	1,5
Indonesia	13,1	14,2	11,5	12,3	15,1	12,2	42,5	21,4	19,4	5,7	6,9	9,3	0,2	1,9	3,2

* Pangsa terhadap total ekspor negara asal.
Sumber: IMF Trade Directions Statistics, diolah.

Tabel 2
Korelasi Business Cycle dengan Negara Maju

	Amerika Serikat			Kawasan Eropa			Jepang		
	1995-98	1999-02	2003-07	1995-98	1999-02	2003-07	1995-98	1999-02	2003-07
EM Asia	-0,64	0,71	0,56	0,16	0,28	0,17	0,66	0,36	0,04
Indonesia	-0,50	0,10	-0,53	0,14	0,27	-0,50	0,64	0,55	-0,58

bilateral dan multilateral di kawasan Asia yang cukup intensif sejak tahun 1990-an.

Ketergantungan intraregional terhadap G3 yang menurun, didukung oleh struktur perdagangan intraregional yang bersifat intra-industry, sementara perdagangan dengan negara maju lebih bersifat *inter-industry*.³ *Intra-industry trade* di dalam perdagangan sesama negara Asia mengindikasikan spesialisasi sesuai dengan daya saing komparatif tiap negara untuk tujuan ekspor. Hal ini sejalan dengan meningkatnya korelasi *business cycle* ke sesama negara Asia, sementara korelasi *business cycle* negara berkembang Asia dengan negara maju cenderung menurun (Tabel 2).⁴ Penurunan ketergantungan perdagangan Indonesia dengan negara maju juga tercermin dari penurunan korelasi *business cycle* antara Indonesia dengan ketiga negara maju tersebut. Korelasi bahkan menjadi negatif (pada periode 2003-2007), sejalan dengan periode dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung ekspansif ditengah perlambatan ekonomi negara maju.

Dari sisi komoditas yang diperdagangkan, perdagangan intraregional Asia didominasi oleh bahan baku dan penolong (*intermediate goods*). Secara umum, pangsa ekspor dari negara berkembang Asia, termasuk Indonesia,

sebagian besar dalam bentuk bahan baku (Tabel 3).⁵ Kecenderungan dominasi pangsa ekspor dalam bentuk bahan baku, terjadi pada perdagangan intraregional maupun dengan negara maju G3. Ekspor bahan baku tersebut sebagian besar berupa produk primer yang belum diproses lebih lanjut. Struktur ekspor tersebut, sayangnya memiliki nilai tambah yang relatif kecil dalam kegiatan sektor riil seperti misalnya penyerapan tenaga kerja. Khusus Indonesia, struktur ekspor ke AS relatif sudah baik dengan dominasi ekspor barang konsumsi (55%) khususnya TPT. Namun demikian, ekspor dari Indonesia ke negara lain masih didominasi oleh komoditas bahan baku (barang primer). Kecenderungan ekspor komoditas primer juga terjadi ke negara utama tujuan ekspor seperti Jepang (hasil tambang, karet mentah), China (CPO dan karet mentah), dan India (CPO dan hasil tambang).

Bagi perekonomian domestik, struktur ekspor yang kurang berimbang ini mengimplikasikan perlunya peningkatan sisi *supply* dan daya saing ekspor guna memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang tinggi, dan perlunya strategi industri yang mengarah pada ekspor barang jadi sehingga bernilai tambah lebih besar.

3 Perdagangan yang bersifat intra-industry cenderung meningkatkan korelasi siklus bisnis antar negara, sedangkan inter-industry cenderung mengurangi korelasi siklus bisnis. Lihat Harm Zebregs, *Intraregional Trade in Emerging Asia*, IMF Policy Discussion Paper, PDP/04/1, April 2004.

4 Perhitungan korelasi siklus bisnis berdasarkan model *Phase Average Trend* yang dikembangkan oleh OECD.

5 Penggolongan komoditas menggunakan Broad Economic Indicators (BEC) United Nations Statistic Division 9 April 2007.

Tabel 3
Komoditas Ekspor Intraregional & Indonesia ke Beberapa Kawasan

persen

Negara Asal	Negara Tujuan Ekspor*														
	Amerika Serikat			Kawasan Eropa			Jepang			China			India		
	1995	1999	2006	1995	1999	2006	1995	1999	2006	1995	1999	2006	1995	1999	2006
Negara Berkembang Asia															
Barang Modal	20,1	20,0	26,0	17,5	20,6	27,0	10,2	12,5	16,6	12,5	11,8	19,0	14,9	11,1	22,0
Bahan Baku	34,8	35,3	34,0	39,4	39,9	39,3	49,3	46,5	53,2	66,5	66,1	67,4	75,8	73,7	68,4
Barang Konsumsi	43,6	42,0	36,6	40,2	36,3	29,6	39,9	37,5	25,6	20,2	18,4	9,6	6,3	8,2	5,1
Indonesia															
Barang Modal	12,1	6,0	4,9	3,8	4,4	7,8	1,0	1,6	2,5	2,4	1,6	4,9	1,1	0,8	2,8
Bahan Baku	42,5	39,5	39,4	55,9	50,2	59,1	81,3	81,7	84,7	84,6	83,2	87,8	89,7	81,4	91,8
Barang Konsumsi	45,3	51,3	55,4	40,3	40,6	33,1	17,0	13,2	6,8	12,5	13,1	5,0	5,7	6,3	3,9

* Pangsa terhadap total ekspor negara asal.

Sumber: UN Comtrade, diolah.



Bab 8

Keuangan Pemerintah

Bab 8: Keuangan Pemerintah

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2007 dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Tingginya harga minyak dunia yang disertai dengan penurunan *lifting* minyak domestik memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap upaya untuk menjaga defisit fiskal agar tetap dalam batas aman. Namun, berbagai upaya langkah kebijakan Pemerintah yang mencakup ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara dan kebijakan penghematan dan peningkatan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga mampu menjaga kesinambungan fiskal. Hal itu tercermin pada menurunnya rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan terjaganya surplus keseimbangan primer.

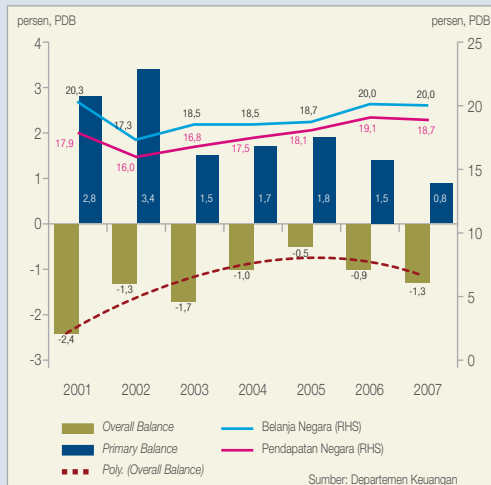
Kebijakan fiskal tahun 2007 secara umum diarahkan pada peningkatan stimulus fiskal dengan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Dengan arah ekspansif tersebut, defisit APBN-P 2007 ditetapkan sebesar 1,5% dari PDB, meningkat dari realisasi defisit tahun 2006 sebesar 0,9% dari PDB. Ekspansi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kontribusi fiskal pada sektor riil, baik melalui konsumsi Pemerintah maupun investasi Pemerintah. Di samping kontribusi langsung tersebut, Pemerintah juga memberikan beberapa insentif perpajakan untuk meningkatkan aktivitas di sektor riil tanpa mengesampingkan upaya peningkatan penerimaan negara. Sementara itu, untuk menurunkan tingkat kemiskinan Pemerintah masih melanjutkan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Peningkatan defisit belum mengganggu prospek kesinambungan fiskal sebagaimana tercermin dari perkiraan turunnya rasio stok utang Pemerintah dan masih terjaganya surplus keseimbangan primer.

Implementasi APBN tahun 2007 dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber, baik dari lingkungan eksternal maupun permasalahan internal. Di sisi eksternal, pelaksanaan anggaran dihadapkan pada kondisi terus meningkatnya harga minyak mentah sejak triwulan II-2007. Secara keseluruhan tahun harga minyak mentah mencapai rata-rata sekitar \$72,3/barel¹, di atas asumsi APBN-P 2007 sebesar \$60/barel. Diiringi oleh berbagai parameter dalam perhitungan subsidi energi yang melebihi prakiraan awal tahun, kenaikan harga minyak mentah tersebut meningkatkan jumlah subsidi secara cukup signifikan sehingga berpotensi meningkatkan defisit

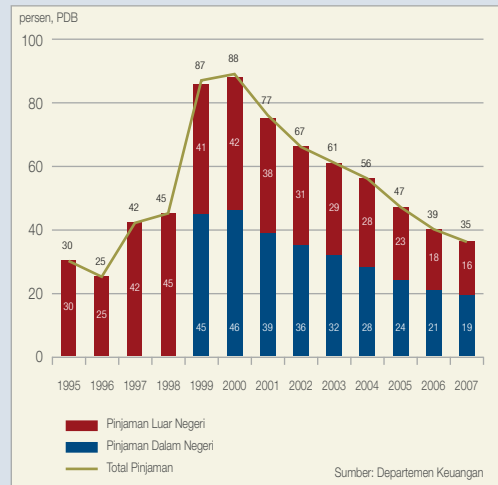
anggaran mendekati 2% dari PDB. Memasuki triwulan III-2007, krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat sempat menyebabkan turunnya harga surat berharga Pemerintah yang dapat memengaruhi pembiayaan defisit anggaran. Di sisi domestik, pelaksanaan keuangan negara juga dihadapkan pada *lifting* minyak domestik yang terus menurun. Secara keseluruhan tahun *lifting* minyak mencapai rata-rata 899.000 barel per hari, di bawah asumsi APBN-P 2007 sebesar 950.000 barel per hari. Kondisi tersebut mendorong turunnya penerimaan dari sektor migas. Tantangan internal lainnya menyangkut penyerapan beberapa komponen Belanja Negara yang berjalan lambat selama paruh pertama tahun 2007 walaupun telah diupayakan beberapa perbaikan dalam peraturan terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Lambatnya penyerapan tersebut disebabkan oleh peningkatan kehati-hatian dan efisiensi dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah tetap konsisten menjalankan konsolidasi fiskal sehingga berhasil mengendalikan defisit anggaran. Hal tersebut pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi makro. Di sisi penerimaan pajak, berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah berhasil mendorong realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target APBN-P 2007, lebih baik dari kinerja tahun lalu. Di sisi penerimaan nonpajak, harga minyak mentah yang lebih tinggi dan nilai tukar yang lebih depresiatif dari asumsi APBN-P 2007 memungkinkan diperolehnya tambahan penerimaan dari pajak ekspor CPO dan setoran dividen dari BUMN. Realisasi penerimaan pajak dan nonpajak tersebut menyebabkan terlampauinya target Pendapatan Negara dan Hibah. Di sisi pengeluaran,

1 Rata-rata ICP Januari-Desember 2007 untuk perhitungan subsidi BBM dan listrik.



Grafik 8.1
Operasi Keuangan Pemerintah



Grafik 8.2
Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB

penghematan dan peningkatan efisiensi dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) memungkinkan Pemerintah membayar subsidi energi dalam rangka menjaga stabilitas harga. Dengan langkah-langkah tersebut, defisit diperkirakan masih dapat dikendalikan sebesar target APBN-P 2007, yaitu 1,5% dari PDB. Di sisi pembiayaan, strategi *frontloading* dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menyebabkan target pembiayaan defisit dapat terpenuhi sebelum kondisi sektor keuangan mengalami dampak rambatan kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat.

Realisasi defisit anggaran lebih rendah dari target defisit APBN-P 2007 terutama akibat penyerapan belanja K/L yang di bawah target APBN-P 2007. Penghematan dan langkah efisiensi yang disertai peningkatan kehati-hatian dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah memungkinkan dapat dipertahankannya kebijakan pemberian subsidi di tengah kenaikan harga minyak mentah. Namun, dalam realisasinya langkah tersebut menyebabkan pencapaian target Belanja Negara lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian target Pendapatan Negara sehingga realisasi defisit berjalan sangat lambat. Sejak bulan Maret hingga November 2007, operasi keuangan Pemerintah terus mengakumulasi surplus anggaran. Di akhir tahun realisasi defisit hanya mencapai 1,3% dari PDB,² di bawah target APBN-P 2007 sebesar 1,5% dari PDB. Defisit tersebut didukung oleh prospek kesinambungan fiskal yang masih terjaga. Rasio utang Pemerintah menurun dari 39% dari PDB pada tahun 2006 menjadi 35% dari PDB pada tahun 2007. Sementara itu, keseimbangan primer masih

mencatat surplus sebesar 0,8% dari PDB (Grafik 8.1 dan Grafik 8.2).

Pendapatan Negara dan Hibah

Kinerja Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 ditandai oleh prestasi di sektor perpajakan namun dibayangi oleh memburuknya kinerja sektor migas akibat *lifting* minyak yang terus menurun. Sebagaimana diperkirakan dalam APBN-P 2007, kinerja Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2006 yang mencapai 29%. Perlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari sektor migas. Sementara itu, prestasi dari sektor perpajakan cukup memuaskan. Penerimaan pajak meningkat sebesar 20%, sesuai dengan APBN-P 2007, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 18%. Dengan perkembangan tersebut, Pendapatan Negara dan Hibah mencapai sekitar 19% dari PDB, relatif sama seperti tahun 2006 (Grafik 8.3). Pendapatan Negara dan Hibah sebagian besar, sekitar 69%, disumbang dari penerimaan pajak dengan *tax ratio* sebesar 13% dari PDB dan sisanya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 6% dari PDB (Grafik 8.4). Kurang optimalnya kinerja sektor migas tercermin dari penerimaan migas yang menurun pada saat harga minyak mentah terus menanjak dan mencapai \$69,7/barel.³ Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh *lifting* minyak domestik yang terus menurun dan mencapai 899.000 barel/hari. Dari sisi pencapaian target APBN-P 2007, penerimaan pajak dapat mencapai target yang didorong oleh hampir

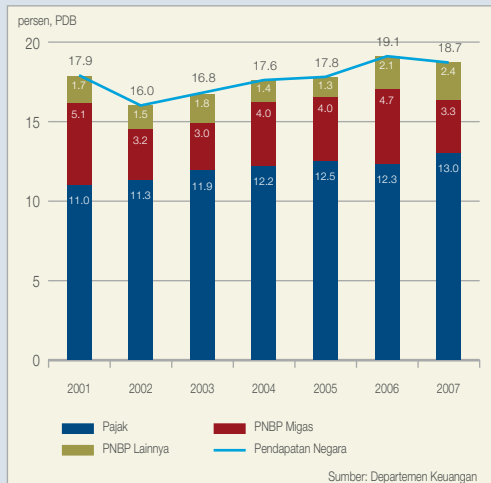
2 Atau 1,2% dari PDB dengan menggunakan realisasi PDB 2007 sebesar Rp3.957 triliun.

3 Rata-rata ICP Desember 2006-November 2007 untuk perhitungan penerimaan migas.

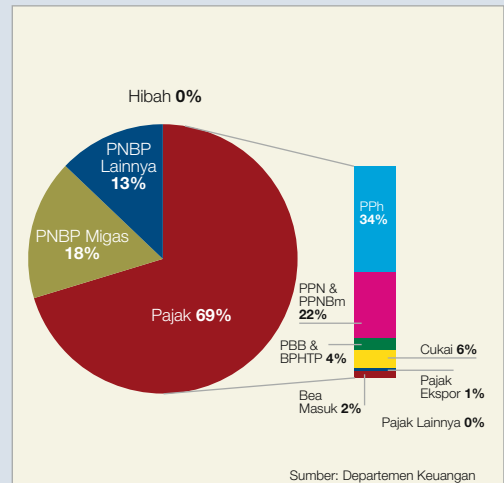
Tabel 8.1
Ringkasan Operasi Keuangan Pemerintah

Rincian	Realisasi 2006				APBN 2007		APBNP 2007		Realisasi 2007 ¹			
	Triliun Rp	% PDB	% yoy	% APBNP	Triliun Rp	% PDB	Triliun Rp	% PDB	Triliun Rp	% PDB	% yoy	% APBNP
A. Pendapatan Negara dan Hibah	638,0	19,1	28,8	96,8	723,1	20,5	694,1	18,5	708,5	18,7	11,0	102,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	636,2	19,1	28,8	97,1	720,4	20,4	690,3	18,4	706,8	18,7	11,1	102,4
1. Penerimaan Pajak	409,2	12,3	17,9	96,3	509,5	14,4	492,0	13,1	491,8	13,0	20,2	100,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,0	6,8	54,5	98,7	210,9	6,0	198,3	5,3	215,0	5,7	(5,3)	108,4
– Minyak Bumi & Gas Alam	158,1	4,7	52,4	98,9	139,9	4,0	107,7	2,9	124,8	3,3	(21,1)	115,9
II. Hibah	1,8	0,1	40,6	43,3	2,7	0,1	3,8	0,1	1,7	0,0	(7,6)	44,3
B. Belanja Negara	667,1	20,0	30,9	95,4	763,6	21,6	752,4	20,0	757,2	20,0	13,5	100,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	440,9	13,2	22,8	92,2	504,8	14,3	498,2	13,2	504,0	13,3	14,3	101,2
a. Belanja Pegawai	73,3	2,2	35,0	92,6	98,5	2,8	98,0	2,6	90,4	2,4	23,4	92,3
b. Belanja Barang	47,2	1,4	61,7	84,3	71,9	2,0	61,8	1,6	54,2	1,4	14,9	87,7
c. Pembayaran Bunga Utang	79,1	2,4	21,3	95,9	85,1	2,4	83,6	2,2	79,6	2,1	0,6	95,2
d. Subsidi	107,4	3,2	(11,0)	99,8	103,0	2,9	105,1	2,8	150,2	4,0	39,8	142,9
e. Belanja Modal	55,0	1,6	67,1	78,8	76,9	2,2	71,7	1,9	64,4	1,7	17,1	89,8
f. Belanja Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g. Bantuan Sosial	40,7	1,2	63,5	99,2	50,7	1,4	52,3	1,4	50,7	1,3	24,6	97,1
h. Belanja Lain-lain	38,3	1,1	19,9	90,7	18,8	0,5	25,8	0,7	14,6	0,4	(62,0)	56,4
II. Anggaran Belanja untuk Daerah	226,2	6,8	50,3	102,4	258,8	7,3	254,2	6,8	253,3	6,7	12,0	99,6
C. Keseimbangan Primer	49,9	1,5		117,5	44,6	1,3	25,3	0,7	30,8	0,8		121,9
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(29,1)	(0,9)		72,9	(40,5)	(1,1)	(58,3)	(1,5)	(48,8)	(1,3)		83,7
E. Pembiayaan	29,1	0,9			40,5	1,1	58,3	1,5	48,8	1,3		
I. Pembiayaan Dalam Negeri	55,7	1,7			55,1	1,6	70,8	1,9	72,7	1,9		
1. Perbankan Dalam Negeri	18,6	0,6		103,9	13,0	0,4	10,6	0,3	14,9	0,4		140,3
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	37,1	1,1	54,9	99,3	42,1	1,2	60,2	1,6	57,8	1,5	56,0	96,1
a. Privatisasi (neto)	0,4	0,0		40,0	2,0	0,1	2,0	0,1	0,3	0,0	(25,0)	15,0
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan	2,7	0,1	(58,9)	104,7	1,5	0,0	1,7	0,0	2,4	0,1		144,8
c. Penjualan Obligasi Pemerintah, neto	36,0	1,1	59,4	100,6	40,6	1,1	58,5	1,6	57,1	1,5	58,8	97,6
d. Dana Investasi Pemerintah	(2,0)	(0,1)	(61,5)	100,0	(2,0)	(0,1)	(2,0)	(0,1)	(2,0)	(0,1)		100,0
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(26,6)	(0,8)	158,6	173,9	(14,6)	(0,4)	(12,5)	(0,3)	(23,9)	(0,6)	(10,0)	190,6
1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto)	26,1	0,8	(2,7)	69,5	40,3	1,1	42,2	1,1	34,0	0,9	30,2	80,5
2. Pembayaran Cicilan Pokok ULN	(52,7)	(1,6)	42,0	99,7	(54,8)	(1,6)	(54,8)	(1,5)	(57,9)	(1,5)	9,9	105,8
Asumsi:												
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5					6,3		6,3		6,3		
Inflasi (%)	6,6					6,5		6,0		6,59		
Nilai tukar rata-rata (Rp/\$)	9.063					9.300		9.050		9.140		
Suku bunga SBI 3 bulan rata-rata (%)	11,7					8,5		8		8		
Harga minyak internasional (\$/barel)	63,8					63		60		69,7		
Lifting minyak Indonesia (juta barel/hari)	0,959					1.000		0,959		0,899		

Sumber: Departemen Keuangan
1 Angka sementara, Januari 2008



Grafik 8.3
Perkembangan Komponen Pendapatan Negara



Grafik 8.4
Komposisi Pendapatan Negara Tahun 2007

seluruh komponen penerimaan pajak yang dapat melebihi targetnya. Realisasi PNBP juga melebihi target, terutama, disumbang oleh penerimaan migas akibat pengaruh kenaikan harga minyak yang lebih dominan dari pengaruh penurunan *lifting*. Dengan perkembangan tersebut, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dapat melebihi target dalam APBN-P 2007 (Tabel 8.1).

Prestasi di sektor perpajakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro yang kondusif. Kelanjutan kebijakan perpajakan di tahun-tahun lampau, seperti ekstensifikasi melalui perluasan pengusaha kena pajak, intensifikasi terhadap subjek dan objek kena pajak, penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan, peningkatan upaya monitoring pelaksanaan pajak dan kenaikan tarif cukai, ditambah dengan kondisi ekonomi makro yang positif menyebabkan naiknya kinerja penerimaan pajak. Peningkatan kinerja tercermin dari peningkatan *tax ratio* yang mencapai 13% dari PDB, naik dari *tax ratio* tahun 2006 sebesar 12,3% dari PDB serta bertambahnya jumlah wajib pajak dari sekitar 20,8 juta pada tahun 2006 menjadi sekitar 23,1 juta pada tahun 2007.⁴ Peningkatan penerimaan pajak terjadi di seluruh komponen penerimaan pajak dengan peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan Pajak Ekspor. Kenaikan Pajak Ekspor terutama dipengaruhi oleh kenaikan ekspor komoditi CPO, bahan bakar mineral dan pertambangan serta karet dan barang dari karet yang didorong oleh kenaikan harga minyak. Di sisi Pajak Dalam Negeri kenaikan terutama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak lainnya dan cukai seiring dengan

pertumbuhan konsumsi swasta yang terus meningkat sejak triwulan I-2007.

Kenaikan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Khusus terkait dengan cukai, kenaikan penerimaan cukai didorong, baik oleh kenaikan volume produksi barang kena cukai seperti rokok dan minuman yang mengandung *ethyl alcohol* maupun pengaruh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau sebesar 7% per batang/gram terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 dan pengenaan tarif spesifik sebesar Rp3-7/batang menurut golongan industri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2007.⁵ Upaya menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai dan rokok dengan pita cukai palsu yang dilakukan sejak tahun 2001 juga turut memberi andil dalam kenaikan penerimaan cukai. Dari seluruh komponen penerimaan pajak, hanya realisasi PPh Nonmigas yang berada di bawah target. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh penurunan setoran PPh Pasal 25 (PPh Badan) tahun 2007 akibat rendahnya realisasi laba pada beberapa perusahaan besar dan sejumlah Wajib Pajak potensial tahun 2006 serta akibat bencana alam sepanjang tahun 2006-2007 yang sempat mengganggu aktivitas di sektor riil.

Implementasi kebijakan perpajakan juga mencakup pemberian stimulus fiskal secara terbatas dan masih berlanjutnya program harmonisasi tarif. Berbagai fasilitas perpajakan diberikan sepanjang tahun 2007 ditujukan untuk meningkatkan kegiatan produksi dan investasi.

4 Termasuk WP yang tidak memiliki NPWP.

5 Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Di bidang pajak penghasilan, fasilitas yang diberikan mencakup pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal tertentu, percepatan penyusutan dan amortisasi, penurunan tarif Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri, perpanjangan periode kompensasi kerugian⁶; pemberian fasilitas pembebasan barang hasil pertanian⁷; serta pemberian fasilitas PPN atas sumbangan dan bantuan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.⁸ Di bidang pajak internasional, Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk masih terus dilanjutkan. Program itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri, memberikan kepastian usaha bagi investor, mengantisipasi globalisasi ekonomi, meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan dan mencegah penyelundupan.

Pada sisi nonpajak, terus menurunnya *lifting* minyak domestik merupakan faktor utama penurunan realisasi PNB. Sebagaimana diperkirakan dalam APBN-P 2007, kinerja PNB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006, terutama akibat menurunnya penerimaan dari migas. Penurunan PNB Migas disebabkan oleh *lifting* minyak domestik yang hanya mencapai 899.000 barel/hari, lebih rendah dari asumsi sebesar 950.000 barel/hari, sedangkan harga minyak mentah justru mencapai \$69,7/barel, di atas asumsi sebesar \$60/barel. Turunnya *lifting* minyak domestik tersebut terkait dengan tingginya *natural declining rate* sumur-sumur minyak di Indonesia yang sudah tua, yaitu mencapai sekitar 5%-11% per tahun sementara sumur-sumur baru seperti Cepu dan Lapangan Jeruk belum berproduksi.

Menurunnya realisasi PNB juga disebabkan oleh melambatnya Setoran Laba BUMN dan PNB lainnya. Melambatnya Setoran Laba BUMN adalah akibat tidak diperhitungkannya *carry over* dividen BUMN dan Sisa Surplus Bank Indonesia dalam komponen Setoran Laba BUMN 2007 sebagaimana dilakukan pada tahun 2006. Penerimaan dari Sisa Surplus Bank Indonesia menjadi komponen tersendiri dalam APBN-P 2007 dan terealisasi sesuai dengan target, yaitu mencapai sekitar Rp13 triliun. Namun demikian, Setoran Laba BUMN tersebut lebih tinggi dari target APBN-P 2007 karena adanya

tambahan setoran dividen terkait dengan kenaikan harga minyak mentah. Sementara itu, melambatnya kenaikan PNB lainnya, antara lain, karena sudah tidak diperhitungkannya lagi penerimaan dari pembayaran hasil lelang penggunaan pita frekuensi radio untuk mendukung layanan telekomunikasi seluler berbasis generasi ketiga sebagaimana diperhitungkan pada tahun 2006.

Belanja Negara

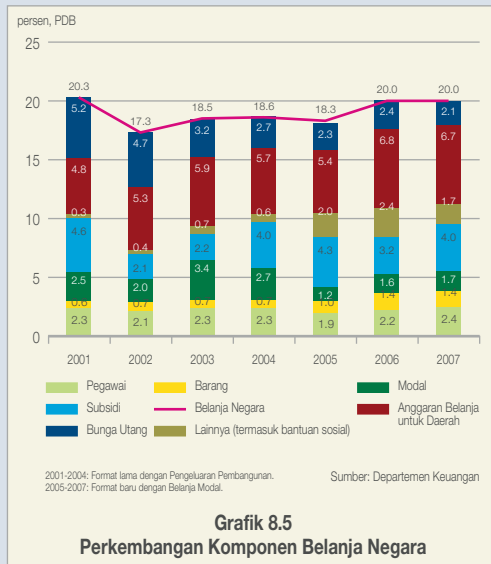
Pelaksanaan Belanja Negara tahun 2007 diwarnai oleh kebijakan stabilisasi harga, peningkatan stimulus fiskal dan kelanjutan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan menjaga stabilitas harga dilakukan melalui komitmen pemberian berbagai jenis subsidi. Kebijakan peningkatan stimulus dilakukan melalui peningkatan pendapatan aparatur negara; peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan anggaran Belanja Barang; peningkatan anggaran untuk infrastruktur dalam Belanja Modal; serta peningkatan anggaran pendidikan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, program bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya, untuk masyarakat miskin tetap dipertahankan. Dengan arah kebijakan tersebut, Belanja Negara tahun 2007 mencapai sekitar 20% dari PDB, sama dengan tahun 2006. Belanja Negara tahun 2007 sebagian besar (33%) digunakan untuk Belanja untuk Daerah, disusul oleh pengeluaran untuk Subsidi dan Bunga Utang (31%), sekitar 27% untuk stimulus fiskal dari Pemerintah Pusat (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal) dan sisanya (9%), antara lain, untuk program pengentasan kemiskinan melalui anggaran Bantuan Sosial. Dari seluruh komponen Belanja Negara tersebut, hanya Belanja Pegawai, Subsidi dan Belanja untuk Daerah yang pangasanya terhadap PDB mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2006 (Grafik 8.5). Sementara itu, pangsa Belanja Modal dan Belanja Barang masih minimal dan stabil seperti tahun lalu, yaitu hanya mencapai sekitar 1%-2% dari PDB.

Upaya peningkatan stimulus fiskal masih berjalan tersendat. Sebagaimana ditargetkan dalam APBN-P 2007, pencapaian Belanja Negara sebesar 20% dari PDB disebabkan oleh pertumbuhan Belanja Negara yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2006. Hal tersebut terjadi, baik pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja untuk Daerah. Di tingkat pusat, berbeda dari APBN-P 2007 yang memperkirakan perlambatan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2007 didorong oleh penurunan subsidi, dalam realisasinya, perlambatan Belanja Pemerintah Pusat disebabkan oleh perlambatan hampir seluruh komponen Belanja Pemerintah Pusat yang lebih besar dari target APBN-P 2007 serta penurunan Belanja Lainnya, sedangkan Subsidi justru mengalami

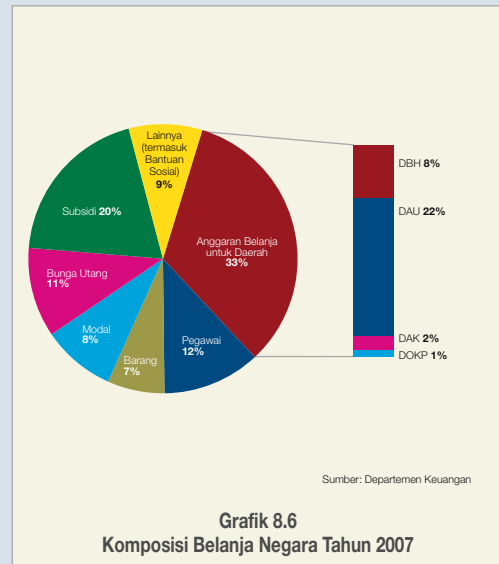
6 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu.

7 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

8 Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan PPN dan PPhBM atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri.



Grafik 8.5
Perkembangan Komponen Belanja Negara



Grafik 8.6
Komposisi Belanja Negara Tahun 2007

kenaikan karena perkembangan harga minyak mentah (Grafik 8.6). Kondisi tersebut disebabkan oleh penyerapan Belanja Pemerintah Pusat, khususnya Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lainnya yang di bawah target APBN-P 2007. Dalam dua tahun terakhir setelah dimulainya reformasi keuangan negara pada tahun 2005, penyerapan beberapa komponen Belanja Pemerintah Pusat masih terus di bawah target. Berbagai upaya penyempurnaan ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilakukan⁹. Belum berhasilnya upaya tersebut diperkirakan terkait dengan peningkatan kehati-hatian dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, disertai dengan langkah penghematan serta efisiensi pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai antisipasi melonjaknya kebutuhan pembayaran subsidi energi. Di tingkat daerah, realisasi Belanja untuk Daerah relatif sesuai target walaupun dibayangi oleh pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (DOKP) yang di bawah target.

Secara umum, kenaikan Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Belanja Pemerintah Pusat meningkat sekitar 14% dengan peningkatan terjadi

di seluruh komponen pengeluaran, kecuali Belanja Lainnya. Di bidang kepegawaian, beberapa kebijakan utama adalah penyesuaian gaji pokok aparatur negara sekitar 15%, pemberian gaji ketigabelas¹⁰ dan penyesuaian tunjangan struktural serta tunjangan fungsional. Di bidang pendidikan, anggaran fungsi pendidikan meningkat dari realisasi pada tahun 2005 sebesar Rp29,3 triliun, menjadi Rp45,3 triliun pada tahun 2006 dan diperkirakan menjadi Rp51,3 triliun pada APBN-P 2007. Peningkatan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN¹¹. Kenaikan Belanja Barang digunakan untuk mendukung perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan (sekitar separuh dari anggaran Belanja Barang), penanganan pascabanjir, dan pengadaan vaksin flu burung. Untuk investasi, anggaran infrastruktur meningkat dari sekitar Rp32,2 triliun pada tahun 2006 menjadi sekitar Rp43,8 triliun pada tahun 2007¹² yang, antara lain, digunakan untuk percepatan pembangunan banjir kanal timur dan banjir kanal barat dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek, pembangunan Bandara Kuala Namu di Medan, dan pengembangan Bandara Hasanudin di Makassar.

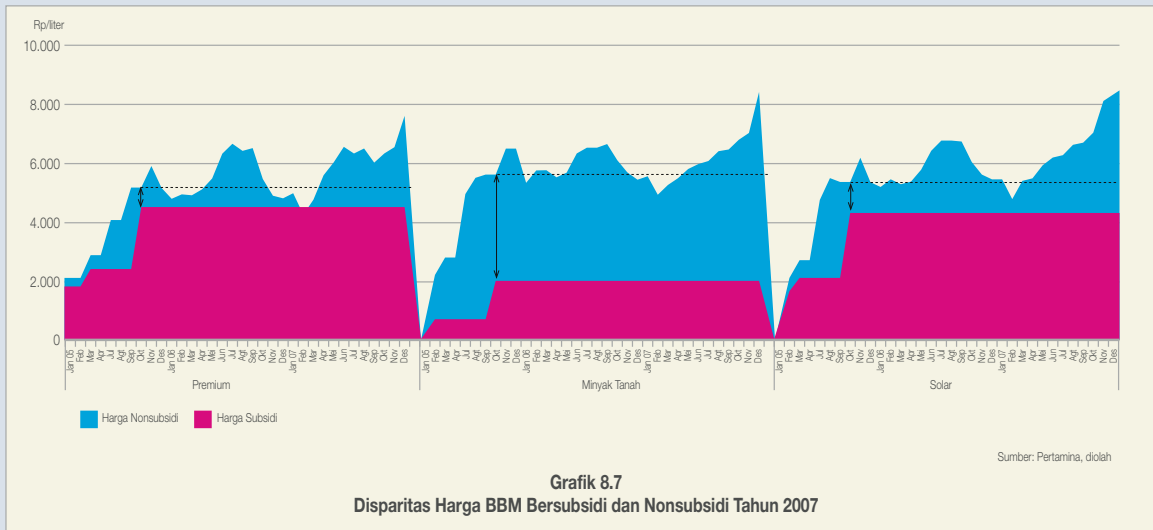
Di bidang subsidi, selain kenaikan subsidi energi, berbagai subsidi lainnya juga mengalami peningkatan. Subsidi pangan meningkat akibat bertambahnya jumlah sasaran

9 Beberapa butir penting dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006 menyebutkan kementerian dan lembaga negara serta Pemerintah Daerah dan Pimpinan BUMN dan BUMD dapat mengadakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan. Selain itu, PP juga mengatur tentang pengunduran kewajiban sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan dimungkinkannya penunjukan langsung untuk pekerjaan lelang sampai dengan Rp50 juta.

10 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.33/PB/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemberian Gaji/penisun/tunjangan bulan ke-13 tahun anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

11 Sumber: Nota Keuangan APBN 2008.

12 Sumber: Kantor Menko Perekonomian, Desember 2007.



rumah tangga miskin (RTM) penerima subsidi dari 10,8 juta RTM pada tahun 2006 menjadi 15,8 juta RTM pada tahun 2007. Subsidi pupuk naik sebagai akibat dari naiknya harga eceran tertinggi (HET) pupuk per Januari 2007. Kenaikan HET pupuk tersebut terkait dengan program nasional untuk meningkatkan produksi beras menjadi dua juta ton yang memerlukan tambahan pupuk bersubsidi sekitar 800 ribu ton. Subsidi bunga kredit program meningkat untuk mendukung program Pemerintah meningkatkan volume pembangunan rumah bersubsidi dan program subsidi energi nabati serta revitalisasi perkebunan. Untuk menjamin keberlangsungan program bantuan kepada masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah meningkatkan anggaran Bantuan Sosial. Peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Khusus Murid (BKM) untuk bidang pendidikan, pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta kelas III yang ditunjuk, serta uji coba proyek Bantuan Langsung Tunai bersyarat di bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, realisasi Belanja Lainnya lebih rendah dari tahun 2006, terutama karena sudah tidak adanya lagi program Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2007. Anggaran Belanja Lainnya mencakup dana untuk *policy measures*, gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan yang belum dianggarkan, dan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kebijakan mempertahankan pemberian subsidi di tengah gejolak eksternal menyebabkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat di atas target. Penyerapan dan kenaikan Belanja Pemerintah Pusat yang di atas target, terutama didorong oleh pembayaran Subsidi, khususnya

Subsidi BBM dan Subsidi Listrik. Kenaikan Subsidi BBM didorong oleh disparitas yang semakin tinggi antara harga BBM yang ditetapkan Pemerintah dengan harga keekonomiannya serta realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, yaitu dari 36 juta kilo liter menjadi sekitar 38 juta kilo liter (Grafik 8.7). Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi tersebut juga terkait dengan lambatnya realisasi program konversi energi dari minyak tanah ke LPG yang terealisasi hanya sebesar 20.638 kilo liter atau 6% dari target. Sementara itu, kenaikan subsidi listrik juga dipengaruhi oleh disparitas yang semakin tinggi antara Tarif Dasar Listrik yang telah ditetapkan Pemerintah dengan biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan biaya produksi listrik disebabkan oleh naiknya harga BBM, naiknya porsi penggunaan BBM dalam bauran bahan bakar yang digunakan dan naiknya harga jual BBM dari Pertamina karena kenaikan margin penjualan (α) dari 6,5% menjadi 9,5%, serta kenaikan penjualan listrik ke masyarakat dari rencana awal. Komitmen mempertahankan subsidi itu mengindikasikan peran Pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian atau bersifat *countercyclical*¹³.

Di tingkat daerah, transfer Belanja untuk Daerah terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan negara dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur. Secara umum kebijakan Belanja untuk Daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro, meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,

13 Sejalan dengan hasil penelitian "Fiscal and Monetary Interaction in Indonesia" (Hermawan, Munro, 2007).

meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi Belanja Untuk Daerah. Realisasi Belanja Untuk Daerah pada tahun 2007 relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2006 yaitu sekitar 6,7%-6,8% dari PDB. Seluruh komponen Anggaran Belanja untuk Daerah meningkat kecuali Dana Bagi Hasil (DBH) seiring dengan penurunan penerimaan migas yang disebabkan oleh turunnya *lifting* minyak domestik. Kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sejalan dengan peningkatan pendapatan dalam negeri neto. Kenaikan DAK sejalan dengan semakin besarnya pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan ditampungnya kekurangan pembayaran DAK tahun 2005. Sedangkan kenaikan DOKP disebabkan oleh dialokasikannya dana penyesuaian infrastruktur. Alokasi DAK sekitar 30% masing-masing digunakan untuk bidang pendidikan dan infrastruktur, sekitar 20% untuk kesehatan dan sisanya untuk prasarana pemerintah, bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup. Realisasi DAK dan DOKP di bawah target, antara lain, karena keterlambatan penetapan APBD yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana.

Pembiayaan Defisit

Realisasi pembiayaan defisit APBN tahun 2007 relatif sesuai dengan target, terutama yang bersumber dari dalam negeri. Tiga langkah strategi pembiayaan mencakup peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, penurunan stok utang dan rasionya terhadap PDB secara bertahap, dan pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Implementasi ketiga strategi tersebut terlaksana dengan lancar sehingga target sumber pembiayaan defisit terutama yang bersumber dari dalam negeri dapat terpenuhi dan pembayaran utang telah dilakukan tepat waktu. Sampai dengan akhir Desember 2007 jumlah SBN rupiah dan valas yang telah diterbitkan mencapai Rp99,8 triliun¹⁴. Setelah memperhitungkan SUN yang jatuh tempo, *buyback* SUN dan pelunasan sebagian pokok kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia (SRBI-01) sekitar Rp13,7 triliun, neto penerbitan SBN mencapai Rp57,1 triliun, sedikit di bawah target APBN-P 2007 sebesar Rp58,5 triliun. Dari sisi penjualan aset, realisasi program privatisasi sampai dengan bulan Desember terjadi di bawah target, sedangkan target dari penjualan aset perbankan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sesuai target. Pada tahun 2007, Pemerintah mendapatkan dana dari program privatisasi BUMN sekitar Rp3 triliun, sedikit di bawah target APBN-P 2007 sebesar Rp3,3 triliun. Di bulan Desember juga dilakukan pembayaran Penyerahan Modal Negara (PMN) pada

beberapa BUMN sekitar Rp2,7 triliun, melebihi targetnya sebesar Rp1,3 triliun. Dengan demikian, privatisasi neto diperoleh sekitar Rp0,3 triliun, di bawah target sebesar Rp2 triliun. Sementara itu, dari program restrukturisasi perbankan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyetorkan sekitar Rp2,4 triliun, melebihi target APBN-P 2007 sebesar Rp1,7 triliun. Di sisi eksternal, pola historis masih terjadi dengan penarikan pinjaman luar negeri yang hanya mencapai sekitar 81% dari target APBN-P karena tidak terpenuhinya *policy matrix*. Sumber utama pinjaman luar negeri masih berasal dari World Bank dan ADB yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan hampir seluruh sektor perekonomian. Sementara itu, pembayaran cicilan pokok dilaksanakan tepat waktu sehingga neto penarikan pinjaman luar negeri di bawah targetnya. Dengan realisasi neto penerbitan SBN yang melebihi target, sedangkan realisasi defisit lebih rendah dari target, posisi rekening pemerintah di Bank Indonesia mengalami sedikit peningkatan setelah dalam APBN-P 2007 diperkirakan akan mengalami penurunan karena digunakan untuk membiayai defisit. Seperti halnya dua tahun terakhir, kebijakan di sisi pembiayaan juga ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur melalui *Public Private Partnership* (PPP) sekitar Rp2 triliun.

Strategi pembiayaan tersebut memungkinkan berlanjutnya tren penurunan rasio stok utang Pemerintah terhadap PDB. Realisasi neto penerbitan SBN dan neto pembayaran pinjaman luar negeri tersebut menyebabkan rasio stok utang Pemerintah masih mengalami penurunan dan mencapai sekitar 35% dari PDB, menurun dari rasio pada tahun 2006 sebesar 39% dari PDB. Penurunan tersebut disumbang oleh jumlah pinjaman luar negeri yang menurun dari sekitar 18% dari PDB pada tahun 2006 menjadi sekitar 16% dari PDB pada tahun 2007 dan pinjaman dalam negeri menurun dari 21% dari PDB pada tahun 2006 menjadi 19% dari PDB pada tahun 2007. Dilihat dari pangsaanya, pinjaman dalam negeri dan luar negeri stabil, yaitu masing-masing 53% dan 47% dari total utang Pemerintah. Kondisi itu sejalan dengan strategi utang Pemerintah jangka panjang yang diarahkan pada utang dalam negeri secara bertahap terutama untuk menghindari risiko nilai tukar. Tahun 2007 ditandai pula oleh pembubaran CGI pada Januari 2007 untuk meningkatkan otonomi Indonesia dalam negosiasi pinjaman bilateral sehingga menghasilkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. Di samping itu, searah dengan strategi pembiayaan anggaran yang ditujukan pada penurunan risiko utang Pemerintah (*refinance risks*), sepanjang tahun 2007 Pemerintah kembali melakukan program pembelian kembali (*buyback*) SUN dan menukarkan (*debt switching*) SUN jangka

¹⁴ Sumber: Bank Indonesia.

Tabel 8.2
Ringkasan Hasil Penerbitan Surat Berharga Negara Sepanjang Tahun 2007

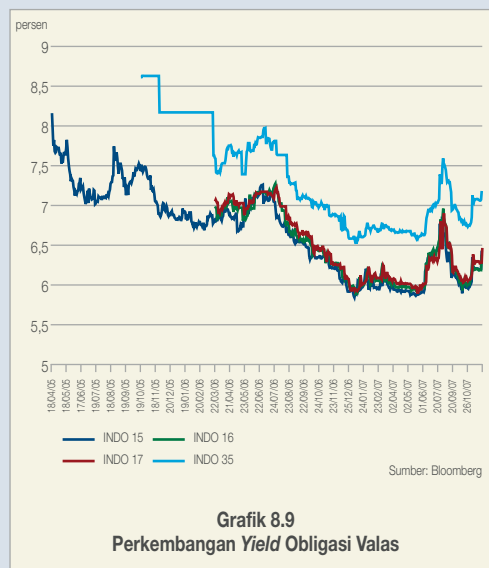
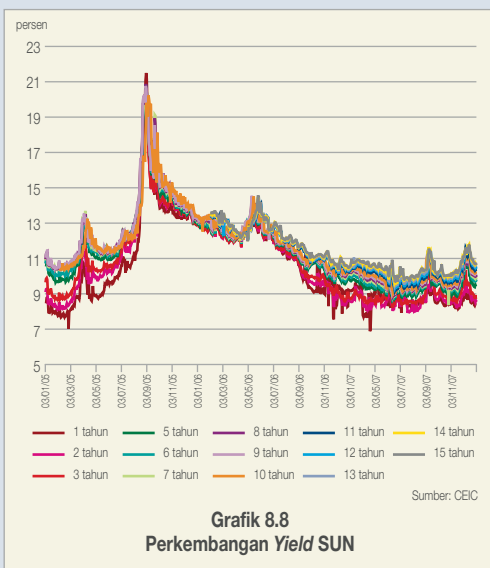
SUN														
Tanggal penerbitan	23-Jan	22-Feb	20-Mar	17-Apr	24-Mei	19-Jun	17-Jul	21-Agu	28-Agu	20-Sep	25-Sep	30-Okt	20-Nov	4-Des
Seri	FR042	FR043	FR028, FR043	FR028, FR044	FR042, FR045	FR043, FR045	FR045, FR046	FR046, FR047	FR047, ZC001	ZC002	FR047, FR048	FR047, FR048	ZC003	FR027; ZC004
Target Indikatif (triliun Rp)	3	4	3	3; 3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Jumlah Penawaran (triliun Rp)	20,0	7,6	7,0; 8,6	11,1; 8,9	10,4; 10,8	9,9; 6,5	3,2; 4,3	2,1; 2,3	4,5; 9,1	6,5	6,3; 11,1	3,1; 4,0	2,2	6,2; 4,5
Jumlah Penerbitan (triliun Rp)	4,8	4,0	4,1; 5,1	3,0; 4,0	2,6; 1,7	2; 2,5	2,2; 3,6	1; -	3,5; 6,0	3,0	3,5; 3,5	0,9; 0,1	1,5	4,1; -
Kupon (%)	10,25	10,25	10; 10,25	10; 10,25	10,25; 9,75	10,25; 10,56	9,75; 9,5	9,5; -	9,5; -	-	10; 9	10; 9	-	9,5; -
Yield RRT (%)	10,48	10,68	9,93; 10,48	9,82; 10,38	9,76; 10,07	9,35; 9,53	9,81; 9,71	10,61; -	10,34; 8,41	8,74	9,89; 9,39	10,15; 9,45	9,87	9,62; -
Jatuh Tempo	15/7/27	15/7/22	15/7/17; 15/7/22	15/7/17; 15/9/24	15/7/27; 15/5/37	15/7/22; 15/5/37	15/5/37; 15/7/23	15/7/23; 15/2/28	15/2/28; 20/11/08	20/9/09	15/2/28; 15/9/18	15/2/28; 15/9/18	20/11/12	15/6/15; 20/3/09

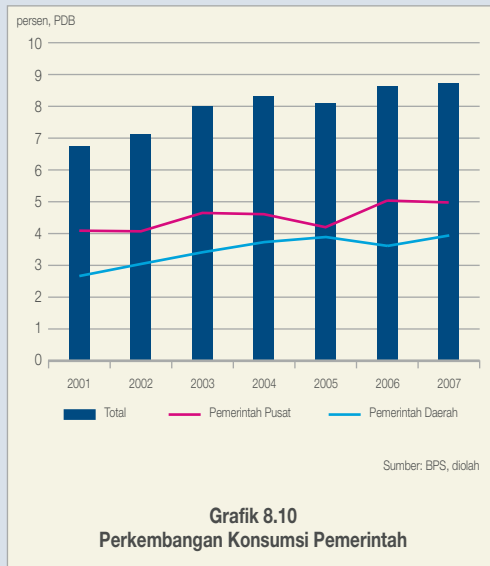
	ORI		SPN			Obligasi Valas
Tanggal penerbitan	28-Mar	12-Sep	30-Mei	27-Jun	25-Jul	7-Feb
Seri	ORI 002	ORI 003	SPN2008052801	SPN2008052801	SPN2008052801	INDO 37
Target Indikatif (triliun Rp/miliar \$)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Jumlah Penawaran (triliun Rp/miliar \$)	6,3	9,5	12,9	3,9	2,7	5,0
Jumlah Penerbitan (triliun Rp/miliar \$)	6,2	9,4	2,0	1,9	0,3	1,5
Kupon (%)	9,28	9,40	-	-	-	6,63
Yield RRT (%)	-	-	8,5	8,45	8,46	6,75
Jatuh Tempo	3/28/10	9/12/11	5/28/08	5/28/08	5/28/08	2/7/37

pendek dengan SUN jangka panjang yang dimiliki investor melalui mekanisme lelang. Program *buyback* SUN dilakukan pada SUN yang akan jatuh tempo pada tahun 2008-2012 senilai sekitar Rp2,9 triliun, sedangkan program *debt switching* dilakukan dengan menata kembali profil jatuh tempo SUN dari yang akan jatuh tempo tahun 2007-2012 menjadi tahun 2018-2025 sekitar Rp16 triliun. Program itu kembali memberi ruang gerak bagi

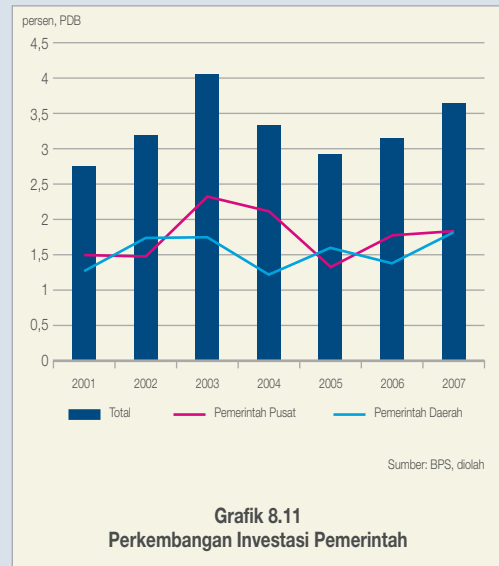
Pemerintah untuk dapat menerbitkan SBN dalam tenor yang lebih pendek dalam rangka pengembangan pasar SBN dan peningkatan kepercayaan investor dan pelaku pasar lainnya terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola portofolio utangnya.

Keberhasilan pemenuhan target pembiayaan melalui penerbitan SBN didukung oleh kondisi ekonomi makro





Grafik 8.10
Perkembangan Konsumsi Pemerintah



Grafik 8.11
Perkembangan Investasi Pemerintah

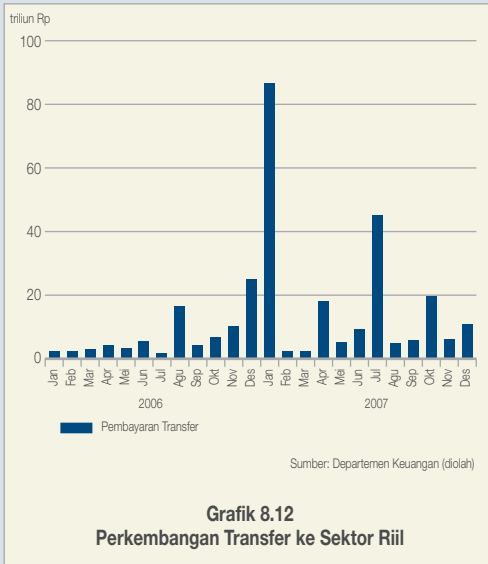
yang positif. Sebagaimana tahun 2006, pada tahun 2007 Pemerintah kembali menghadapi kondisi *oversubscribe* pada hampir setiap kali lelang SBN dilakukan. Kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan makroekonomi dan prospek kesinambungan fiskal yang didukung oleh tingkat imbal hasil yang menarik (Tabel 8.2). Di sisi internasional, minat investor asing yang masih tinggi didukung oleh masih besarnya akses likuiditas global seiring tingginya harga minyak dunia serta masih tingginya ekspektasi *spread* imbal hasil SBN. Selama tahun 2007, Pemerintah melakukan lelang berbagai jenis SBN sebanyak 20 kali baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan sejak bulan Januari (*frontloading*). SBN yang diterbitkan lebih bervariasi dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencakup berbagai jenis investor. Pada tahun ini, SBN seri *Zero Coupon* dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pertama kali diterbitkan untuk melengkapi lelang seri SUN, ORI dan obligasi valas. Dengan perkembangan tersebut, posisi SBN di akhir tahun 2007 mencapai Rp477,7 triliun dengan komposisi 57,7% seri *Fixed Rate*, 35,3% seri *Variable Rate*, 4,0% seri Obligasi Negara Ritel (ORI), 2,2% seri *Zero Coupon* dan 0,9% seri SPN. Strategi *frontloading* tersebut menyebabkan realisasi neto penerbitan SBN sampai dengan triwulan III-2007 telah mencapai sekitar 90% dari targetnya sehingga relatif tidak terganggu oleh kondisi pasar keuangan yang sempat terkena dampak gejala *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Kepercayaan pelaku pasar pada ketahanan fiskal juga sudah semakin meningkat seperti tercermin dari perkembangan *yield* SUN dan obligasi valas yang relatif stabil meskipun harga minyak mentah terus meningkat sejak triwulan I-2007. *Yield* yang sempat meningkat

memasuki triwulan III-2007 juga lebih disebabkan oleh dampak krisis *subprime mortgage* yang kemudian mengalami perbaikan (Grafik 8.8 dan Grafik 8.9).

Implikasi terhadap Sektor Riil dan Sektor Moneter

Arah kebijakan fiskal untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap memberikan stimulus fiskal masih dapat dilakukan pada tahun 2007 walaupun dengan laju yang melambat. Perlambatan konsumsi dan investasi Pemerintah disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan DAU serta menurunnya Belanja Lainnya dan DBH (Grafik 8.10 dan Grafik 8.11). Perlambatan tersebut lebih besar dari yang ditargetkan dalam APBN-P karena penyerapan beberapa belanja yang di bawah target APBN-P 2007. Sementara itu transfer ke sektor riil, yang terdiri dari Subsidi, Bantuan Sosial dan Bunga Utang Dalam Negeri mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan pembayaran Subsidi (Grafik 8.12). Realisasi pembayaran Subsidi tersebut juga menyebabkan pembayaran transfer tahun 2007 melebihi target. Dengan perkembangan tersebut, indikator *fiscal impulse*¹⁵ (Grafik 8.13)

15 Indikator *Fiscal Impulse* (FI) dihitung dengan membandingkan nilai aktual defisit dengan defisit potensial (*structural balance*) yang secara konseptual seharusnya terjadi. Perhitungan indikator FI ini mengikuti Model Chand (1992) yang memasukkan beberapa indikator ekonomi makro dalam perhitungan FI, seperti MPC, sensitivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dan *multiplier* dari pengeluaran Pemerintah. Jika nilai aktual defisit melebihi defisit potensial maka dikatakan impulse fiskal bersifat ekspansif pada pertumbuhan ekonomi. Threshold dari nilai FI adalah kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila $FI < 2\%$ PDB, ekspansif apabila $FI > 2\%$ PDB dan netral bila $-2\% \text{ PDB} < FI < 2\% \text{ PDB}$. Defisit fiskal ini hanya memperhitungkan komponen APBN domestik dan mengeluarkan komponen luar negeri seperti penerimaan migas dan pembayaran bunga utang luar negeri.



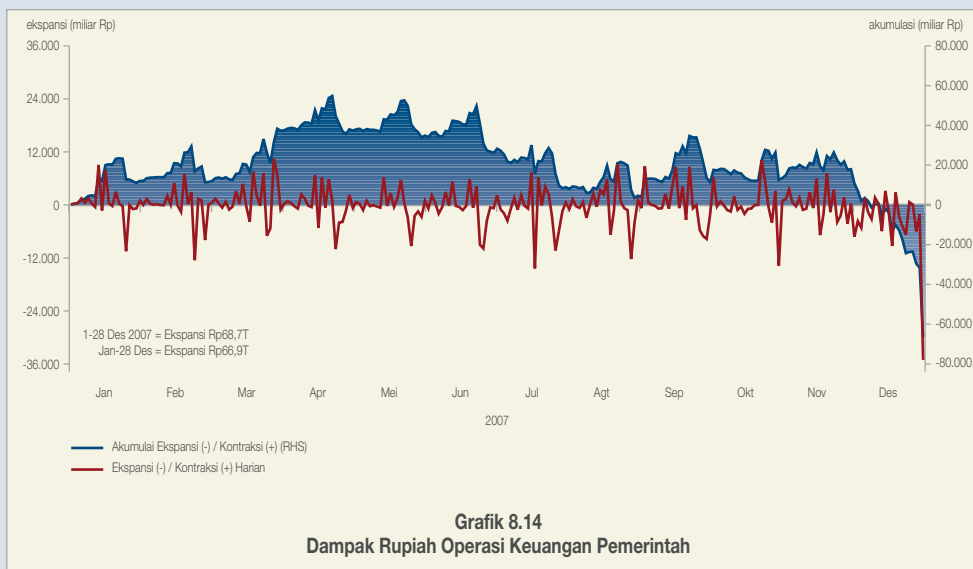
Grafik 8.12
Perkembangan Transfer ke Sektor Riil



Grafik 8.13
Indikator Fiscal Impulse

mengindikasikan operasi keuangan Pemerintah masih bersifat ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, searah dengan defisit anggaran, operasi keuangan Pemerintah mencatat ekspansi rupiah selama tahun 2007. Seiring dengan surplus anggaran selama Januari-November 2007 ditambah *frontloading* dalam penerbitan SBN, maka operasi keuangan Pemerintah terus berdampak kontraktif pada uang primer. Namun di bulan Desember 2007 terjadi ekspansi rupiah dalam jumlah besar terutama untuk pembayaran termin

proyek, DBH dan berbagai subsidi. Dengan ekspansi Desember 2007 tersebut, secara keseluruhan tahun operasi keuangan Pemerintah berdampak ekspansif sebesar Rp66,9 triliun (Grafik 8.14). Jumlah ekspansi tersebut menurun dibandingkan dengan ekspansi rupiah tahun 2006 yang mencapai sekitar Rp100 triliun dengan defisit yang lebih rendah. Ekspansi rupiah yang lebih rendah tersebut dimungkinkan karena penggunaan utang domestik yang lebih besar dan penggunaan rekening Pemerintah di Bank Indonesia yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu.



Grafik 8.14
Dampak Rupiah Operasi Keuangan Pemerintah



Bab 9

Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya

Bab 9: Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya

Salah satu aspek penting untuk dicatat terkait dengan kinerja perbankan sampai akhir tahun 2007 adalah kenyataan bahwa stabilitas sistem perbankan Indonesia pascakrisis telah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum krisis. Hal itu dapat dilihat baik dari pelaksanaan intermediasi maupun dari kondisi ketahanan. Pencapaian tersebut terjadi sejalan dengan stabilnya kondisi perekonomian dan didorong pula oleh berbagai kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan memperkuat ketahanan perbankan. Dari aspek intermediasi, pencapaian tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit tahun 2007 yang melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun. Sementara itu, perbaikan ketahanan terlihat dari tetap stabilnya kondisi perbankan yang, antara lain, tercermin dari tingginya permodalan yang dimiliki dan menurunnya *non-performing loan* (NPL). Krisis *subprime mortgage* yang memengaruhi perbankan di berbagai negara, sejauh ini berdampak minimal terhadap perbankan nasional. Hal lain yang menggembirakan adalah kinerja perbankan syariah yang semakin baik, seperti tercermin pada perluasan jaringan pelayanan, pertumbuhan penghimpunan dana, dan pembiayaan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di sisi lembaga keuangan bukan bank, pasar modal menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sangat tajam. Tren peningkatan juga terjadi pada pasar obligasi, reksadana, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

Kinerja perbankan pada tahun 2007 meningkat secara signifikan sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin kondusif. Peningkatan kinerja tersebut terutama tercermin pada penyaluran kredit yang melampaui target, kualitas kredit yang semakin baik, dan rasio kecukupan modal yang jauh di atas ketentuan minimum. Perhatian perbankan dalam penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) masih tetap tinggi yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan kredit MKM pada tahun laporan. Sementara dari sisi permodalan, perbankan mampu memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar Rp80 miliar. Sejalan dengan perkembangan positif pada bank umum, perkembangan perbankan syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan kinerja yang terus meningkat.

Kinerja pasar modal dan lembaga keuangan lainnya juga memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan. Meningkatnya kinerja pasar modal tercermin pada IHSG yang mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah bursa saham Indonesia. Peningkatan kinerja juga terjadi di pasar

obligasi, baik obligasi pemerintah (SUN) maupun obligasi korporasi. Meningkatnya aktivitas di pasar modal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana investasi yang tercermin dari meningkatnya jumlah penerbitan saham dan obligasi. Di pasar reksadana, nilai aktiva bersih juga mengalami lonjakan yang signifikan mengikuti tren peningkatan di pasar saham dan obligasi. Peningkatan kinerja juga ditunjukkan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun yang ditunjukkan oleh peningkatan total aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana investasi yang dikelola.

Peningkatan kinerja perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya tidak terlepas dari paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Di bidang perbankan, peningkatan penyaluran kredit didorong oleh kebijakan penurunan BI Rate dan penyesuaian berbagai ketentuan, terutama pada ketentuan penilaian aktiva produktif bank pada Maret 2007. Di pasar modal, kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, efisiensi, daya saing, dan kualitas pengawasan. Salah satu langkah yang

Tabel 9.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank¹

Kelompok Bank	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum								
Jumlah Bank	151	145	141	138	133	131	130	130
Jumlah Kantor	6.510	6.765	7.001	7.730	7.939	8.236	9.110	9.680
Bank Persero								
Jumlah Bank	5	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah Kantor	1.736	1.807	1.885	2.072	2.112	2.171	2.548	2.765
BPD								
Jumlah Bank	26	26	26	26	26	26	26	26
Jumlah Kantor	826	857	909	1.003	1.064	1.107	1.217	1.205
BUSN Devisa								
Jumlah Bank	38	38	36	36	34	34	35	35
Jumlah Kantor	3.302	3.432	3.565	3.829	3.947	4.113	4.395	4.694
BUSN Non Devisa								
Jumlah Bank	43	42	40	40	38	37	36	36
Jumlah Kantor	535	556	528	700	688	709	759	778
Bank Campuran								
Jumlah Bank	29	24	24	20	19	18	17	17
Jumlah Kantor	58	53	53	57	59	64	77	96
Bank Asing								
Jumlah Bank	10	10	10	11	11	11	11	11
Jumlah Kantor	53	60	61	69	69	72	114	142

1 Tidak termasuk BRI Unit Desa

diambil adalah penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan produk seperti produk keuangan syariah dan obligasi daerah.

Perkembangan Bank Umum

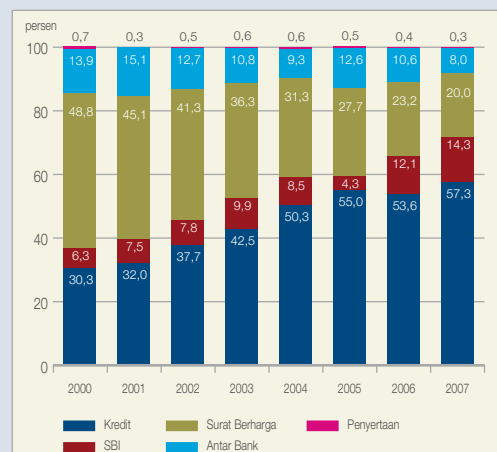
Pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor bank. Semakin berkembangnya perekonomian di berbagai daerah dan tingginya persaingan untuk menarik nasabah mendorong bank untuk lebih meningkatkan dan melengkapi pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor pelayanan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kantor bank pada tahun laporan sebanyak 570 kantor menjadi 9.680 kantor (Tabel 9.1).

Peningkatan pelayanan tersebut diikuti oleh perbaikan kinerja perbankan (Tabel 9.2). Salah satu indikator peningkatan kinerja perbankan adalah pertumbuhan kredit yang mencapai 25,5%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 22%. Pencapaian tersebut juga diikuti oleh membaiknya kualitas kredit perbankan yang tercermin dari menurunnya rasio NPL, baik secara *gross* maupun *net*. Peningkatan penyaluran kredit –bersamaan dengan turunnya suku bunga dana– berdampak

positif pada profitabilitas bank yang ditunjukkan oleh meningkatnya *net interest income* (NII). Perbankan juga berhasil mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) pada level yang tinggi di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berbagai perkembangan positif tersebut juga mengindikasikan bahwa ketahanan perbankan pada tahun 2007 lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga dapat menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peningkatan intermediasi pada tahun 2008.

Pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Pada akhir tahun 2007, total kredit perbankan mencapai Rp1.045,7 triliun, dengan pertumbuhan 25,5%. Sementara itu, dana pihak ketiga mencapai Rp1.510,7 triliun, dengan pertumbuhan 17,4%. Peningkatan kredit yang signifikan tersebut meningkatkan pangsa kredit dalam aktiva produktif perbankan dari 53,6% menjadi 57,3% (Grafik 9.1). Kondisi tersebut mendorong peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan menjadi sebesar 69,2%, yang merupakan rasio tertinggi pascakrisis (Grafik 9.2). Pencapaian kinerja kredit tersebut meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi.

Kredit perbankan masih didominasi oleh kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi (KK) yang berjangka pendek. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, porsi KMK naik menjadi sebesar 53,2%. Sementara itu, porsi KK dan kredit investasi (KI) turun masing-masing menjadi sebesar 28,2% dan 18,6% (Tabel 9.3). Dari sisi pertumbuhan, KI pada tahun laporan tumbuh sebesar 23,2%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan



Grafik 9.1
Komposisi Aktiva Produktif

Tabel 9.2
Indikator Kinerja Bank Umum

Indikator Utama	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total Aset (triliun Rp)	1.006,7	1.030,5	1.099,7	1.112,2	1.196,2	1.272,3	1.469,8	1.693,5	1.986,5
DPK (triliun Rp)	617,6	699,1	797,4	835,8	888,6	963,1	1.127,9	1.287,0	1.510,7
Kredit (triliun Rp) ¹	277,3	320,5	358,6	410,3	477,2	595,1	730,2	832,9	1.045,7
LDR (Kredit/DPK, %)	44,9	45,8	45,0	49,1	53,7	61,8	64,7	64,7	69,2
NII (triliun Rp)	1,1	2,9	3,1	4,0	3,2	6,3	6,2	7,7	8,9
ROA (%)	(6,1)	0,9	1,4	1,9	2,5	3,5	2,6	2,6	2,8
NPLs Gross (%)	32,8	18,8	12,1	8,1	8,2	5,8	8,3	7,0	4,6
NPLs net (%)	7,3	5,8	3,6	2,1	3,0	1,7	4,8	3,6	1,9
CAR (%)	(8,1)	12,7	20,5	22,5	19,4	19,4	19,5	20,5	19,2

1 Termasuk kredit channeling.

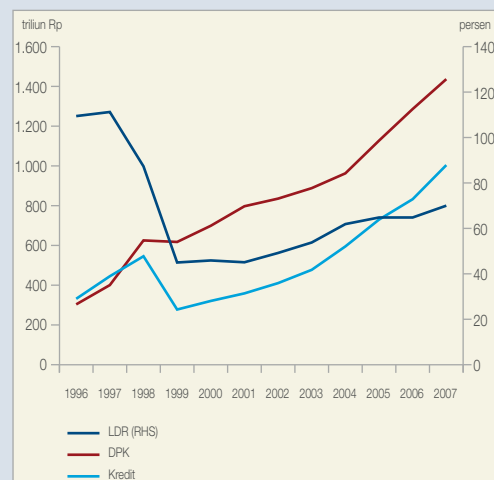
KMK dan KK yang masing-masing mencapai 28,6% dan 24,9%. Namun, pertumbuhan KI tersebut jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya. Salah satu faktor penting yang menghambat akselerasi KI adalah rendahnya realisasi kredit infrastruktur, yang tercermin pada rasio penarikan kredit infrastruktur yang telah disetujui sebesar 26,7%. Relatif rendahnya porsi kredit investasi mencerminkan belum optimalnya peningkatan kredit perbankan dalam mendukung pembiayaan jangka panjang.

Kredit konsumsi¹ menjadi pilihan bank karena karakteristik debiturnya tersebar dan plafonnya kecil sehingga risikonya lebih terdiversifikasi dan terukur. Terdapat 20 bank yang pangsa kredit konsumsinya di atas 75% dan 13 bank dengan pangsa kredit konsumsi antara 50%-75%. Kredit konsumsi didominasi oleh jenis kredit pemilikan rumah (KPR) dengan porsi sebesar 33,4% atau 9,0% dari total kredit perbankan. Dari segi pertumbuhan, KPR juga memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 29,6%, disusul kartu kredit sebesar 19,7% (Grafik 9.3). Penyaluran KPR didominasi oleh kelompok bank swasta devisa dan bank BUMN dengan pangsa masing-masing sebesar 45,8% dan 40,8%. Untuk kartu kredit dikuasai oleh bank asing dengan pangsa sebesar 49,7%, disusul bank swasta devisa sebesar 26,5%, dan bank BUMN sebesar 15,9%. Sementara itu, penyaluran jenis kredit konsumsi lainnya dikuasai oleh kelompok bank BUMN dengan pangsa sebesar 31,8%, diikuti bank swasta devisa dan BPD dengan pangsa masing-masing sebesar 29,5% dan 25,4%.

Secara umum, kualitas kredit konsumsi cukup baik kecuali untuk kartu kredit. Nominal NPL kartu kredit meningkat cukup signifikan (65,0%) dibandingkan dengan tahun

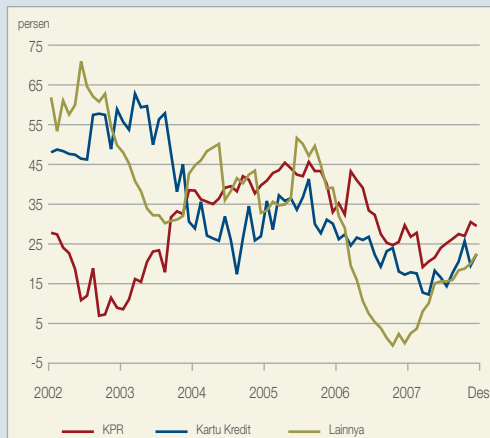
sebelumnya sehingga rasio NPL *gross*-nya meningkat dari 9,1% menjadi 12,2%. Sementara NPL *gross* untuk KPR dan kredit konsumsi lainnya tercatat cukup rendah, yaitu masing-masing sebesar 3,0% dan 1,9%. Walaupun NPL *gross* KPR dan kredit konsumsi lainnya mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, trennya cenderung stabil pada level yang rendah. Sementara tren NPL *gross* kartu kredit meningkat tajam sejak tahun 2006 (Grafik 9.4). Strategi pemasaran kartu kredit yang memberikan banyak kemudahan mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif sehingga intensitas debitur menggunakan kartu kredit semakin tinggi. Di sisi lain, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan harga BBM belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, bank harus lebih selektif dalam menerbitkan kartu kredit untuk menghindari peningkatan NPL lebih lanjut.

Tambahan kredit terbesar pada tahun laporan diberikan kepada sektor perdagangan dan jasa dunia usaha karena dianggap sebagai sektor yang memiliki risiko



Grafik 9.2
Perkembangan Kredit, DPK, dan LDR

1 Jenis kredit konsumsi yang disediakan perbankan antara lain kredit pemilikan rumah (KPR), kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, kredit alat rumah tangga atau elektronik, kredit renovasi rumah, kredit biaya sekolah, kredit liburan, kredit tanpa agunan, dan kredit multiguna.



Grafik 9.3
Pertumbuhan Kredit Konsumsi

yang terkendali (*manageable risk*). Kedua sektor tersebut mendapat tambahan kredit sebesar Rp53,5 triliun dan Rp31,3 triliun dengan kontribusi masing-masing sebesar 25,5% dan 14,3% terhadap kenaikan kredit perbankan selama tahun 2007, disusul sektor industri sebesar 10,3%. Namun dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor pertambangan, yakni sebesar 85,9%. Hal itu didorong oleh tingginya harga komoditas tambang seperti minyak, gas, batubara, dan nikel yang mendorong pengusaha melakukan ekspansi untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga.

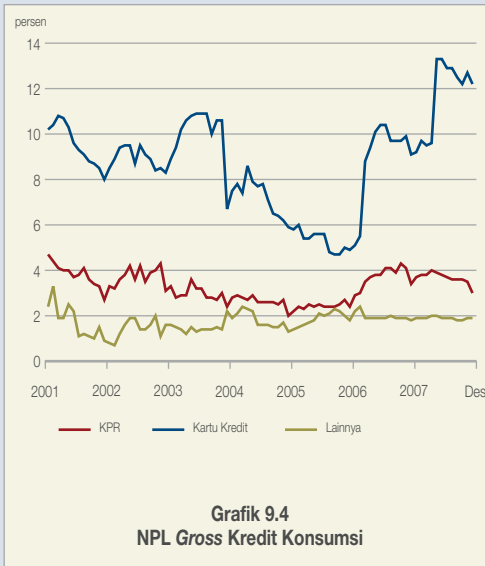
Kredit dalam valas tumbuh cukup besar sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional. Pada tahun 2007, kredit dalam valas tumbuh sebesar 36,8% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 18,5%, sementara kredit dalam rupiah pada tahun laporan tumbuh sebesar 24,0%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa gejolak eksternal yang terjadi pada pertengahan tahun sejauh ini belum berdampak terhadap permintaan kredit oleh dunia usaha.

Kualitas kredit mengalami perbaikan yang cukup signifikan. NPL *gross* turun dari 7,0% menjadi 4,6%, di bawah batas indikatif 5% untuk pertama kalinya pascakrisis, sedangkan NPL *net* turun dari 3,6% menjadi 2,3%. Perbaikan kualitas kredit tersebut, terutama didorong oleh program restrukturisasi kredit korporasi pada kelompok bank persero. Kredit korporasi yang direstrukturisasi tersebut umumnya disalurkan ke sektor industri pengolahan yang umumnya menggunakan fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit valas. Restrukturisasi kredit tersebut menurunkan NPL *gross* sektor industri dari 10,5% menjadi 7,1%, NPL *gross* pada kredit modal kerja dari 6,3% menjadi 3,7%, NPL *gross* kredit investasi dari 10,3% menjadi 6,6%, dan NPL *gross* kredit valas dari 9,9% menjadi 5,1%.

Di sisi penghimpunan dana, penurunan suku bunga simpanan tidak menurunkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan. DPK yang berhasil dihimpun perbankan pada tahun 2007 tetap meningkat,

Tabel 9.3
Perkembangan Kredit Perbankan

Keterangan	Posisi (triliun Rp)					Pertumbuhan (%)					Pangsa (%)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Sektor Ekonomi															
– Pertanian	24,4	33,1	37,2	45,2	56,9	7,7	35,6	12,2	21,6	25,9	5,6	5,9	5,3	5,7	5,7
– Pertambangan	5,1	7,8	8,1	14,1	26,2	31,1	52,7	4,0	73,6	85,9	1,2	1,4	1,2	1,8	2,6
– Perindustrian	122,4	144,9	171,3	184,0	205,6	(0,2)	18,3	18,2	7,4	11,7	28,1	25,9	24,6	23,2	20,5
– Listrik, Air dan Gas	4,5	6,0	5,4	7,2	7,9	2,9	33,7	(10,2)	34,1	10,0	1,0	1,1	0,8	0,9	0,8
– Konstruksi	12,5	20,0	27,0	33,1	44,1	32,8	60,2	35,2	22,6	33,2	2,9	3,6	3,9	4,2	4,4
– Perdagangan	84,0	113,1	135,8	163,4	216,9	26,8	34,6	20,1	20,3	32,7	19,3	20,2	19,5	20,6	21,6
– Pengangkutan	16,3	17,7	19,8	27,1	36,8	29,7	8,2	12,3	36,6	35,8	3,8	3,2	2,9	3,4	3,7
– Jasa Dunia Usaha	44,3	56,4	72,6	78,4	109,7	39,3	27,2	28,9	8,0	40,0	10,2	10,1	10,4	9,9	11,0
– Jasa Sosial	10,8	8,1	10,0	12,0	13,9	135,7	(25,3)	24,5	19,8	15,7	2,5	1,4	1,4	1,5	1,4
– Lain-lain	110,8	152,5	208,4	227,7	284,0	19,3	37,6	36,7	9,3	24,7	25,5	27,3	30,0	28,7	28,3
Jenis Penggunaan															
– Kredit Modal Kerja	231,2	289,6	354,5	414,7	533,2	11,9	25,3	22,4	17,0	28,6	53,1	51,8	51,0	52,3	53,2
– Kredit Investasi	94,5	118,7	134,4	151,2	186,2	12,0	25,6	13,2	12,5	23,2	21,7	21,2	19,3	19,1	18,6
– Kredit Konsumsi	109,4	151,1	206,7	226,3	282,6	36,8	38,1	36,8	9,5	24,9	25,1	27,0	29,7	28,6	28,2
Jenis Valuta															
– Rupiah	330,6	431,6	565,8	638,4	791,6	23,1	30,6	31,1	12,8	24,0	76,0	77,2	81,3	80,6	79,0
– Valas	104,5	127,8	129,8	153,8	210,4	1,9	22,3	1,6	18,5	36,8	24,0	22,8	18,7	19,4	21,0
TOTAL	435,1	559,4	695,6	792,2	1,002,0	17,2	28,6	24,4	13,9	26,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kredit Channelling	42,1	35,7	34,5	40,7	43,7	7,4	(15,3)	(3,2)	18,0	7,2					



yakni naik Rp223,8 triliun menjadi Rp1.510,7 triliun. Tabungan tumbuh paling tinggi (31,4%) dan menyumbang 46,8% pada total kenaikan DPK, diikuti oleh giro yang tumbuh 20,0% dan menyumbang 30,1%. Tingginya kenaikan tabungan disebabkan oleh adanya berbagai macam program simpanan berhadiah yang disediakan oleh bank. Di sisi lain, pangsa deposito terhadap total DPK sedikit menurun karena turunnya suku bunga (Tabel 9.4). Pergeseran struktur simpanan tersebut menurunkan biaya dana bank sehingga menurunkan suku bunga kredit, meskipun di sisi lain menurunkan fleksibilitas bank dalam menyalurkan kredit jangka panjang.

Preferensi penempatan DPK dalam valuta asing meningkat sejalan dengan pencabutan ketentuan Bank Indonesia tentang larangan bank menerima tabungan valas. Hal itu berkontribusi pada peningkatan tabungan

valas perbankan. Total DPK valas meningkat Rp32,4 triliun atau tumbuh 16,7% dari posisi tahun sebelumnya. Selain itu, kecenderungan melemahnya nilai rupiah, terutama pada paruh kedua tahun 2007 diantisipasi oleh sebagian nasabah dengan melakukan pengalihan penempatan dana dari rupiah ke valas.

Tren penurunan suku bunga kredit yang lebih lambat dibandingkan dengan suku bunga DPK berdampak pada peningkatan pendapatan bank. Peningkatan pendapatan dimaksud juga diakselerasi oleh peningkatan penyaluran kredit dan penurunan NPL yang tercermin pada peningkatan pendapatan bunga bersih (*net interest income/NII*) perbankan dari Rp7,7 triliun menjadi Rp8,9 triliun. Peningkatan profitabilitas tersebut sekaligus meningkatkan indikator *return on asset (ROA)* dari 2,6% menjadi 2,8% yang merupakan rasio ROA tertinggi di Asia.

Kondisi permodalan perbankan masih tetap stabil, meskipun terjadi peningkatan kredit. Meningkatnya kredit membawa konsekuensi pada naiknya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang harus ditopang oleh permodalan bank. Namun, perkembangan tersebut hanya sedikit menurunkan rasio permodalan bank dari 20,6% menjadi 19,2% dan masih merupakan level permodalan perbankan tertinggi di Asia. Level dimaksud merupakan *buffer* yang kuat untuk pertumbuhan kredit lebih tinggi danantisipasi risiko ke depan.

Kredit Mikro Kecil Menengah

Target penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) perbankan tahun 2007 terlampaui. Pertumbuhan kredit MKM mencapai 22,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 15,7%. Pertumbuhan tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%, namun lebih rendah dari pertumbuhan kredit non-MKM sehingga porsinya mengalami sedikit penurunan menjadi 50,2%

Tabel 9.4
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan

Keterangan	Posisi (triliun Rp)					Pertumbuhan (%)					Pangsa (%)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Giro	219,1	245,9	281,3	338,0	405,5	11,2	12,2	14,4	20,2	20,0	24,7	25,5	24,9	26,3	26,8
– Rupiah	150,1	171,0	193,8	249,5	309,3	15,3	13,9	13,3	28,8	23,9	68,5	69,5	68,9	73,8	76,3
– Valas	69,0	74,9	87,5	88,4	96,2	3,3	8,6	16,8	1,1	8,8	31,5	30,5	31,1	26,2	23,7
Tabungan	240,7	296,8	281,5	333,9	438,5	25,0	23,3	(5,2)	18,6	31,4	27,1	30,8	25,0	25,9	29,0
– Rupiah	240,7	296,8	281,5	333,9	434,5	25,0	23,3	(5,2)	18,6	30,1	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
– Valas	–	–	–	–	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9
Deposito	428,8	421,5	565,0	615,1	666,7	(3,9)	(1,7)	34,0	8,9	8,4	48,3	43,7	50,1	47,8	44,1
– Rupiah	351,8	351,9	455,0	509,9	541,0	(3,5)	0,0	29,3	12,1	6,1	82,0	83,5	80,5	82,9	81,1
– Valas	77,0	69,6	110,0	105,2	125,7	(5,6)	(9,6)	58,0	(4,4)	19,5	18,0	16,5	19,5	17,1	18,9
Total	888,6	964,2	1,127,8	1,286,9	1,510,7	6,3	8,5	17,0	14,1	17,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
– Rupiah	742,6	819,7	930,3	1,093,3	1,284,7	8,1	10,4	13,5	17,5	17,5	83,6	85,0	82,5	85,0	85,0
– Valas	146,0	144,5	197,5	193,6	226,0	(1,6)	(1,0)	36,7	(2,0)	16,7	16,4	15,0	17,5	15,0	15,0

(Tabel 9.5). Sementara itu, kualitas kredit MKM juga membaik yang tercermin pada penurunan rasio NPL dari 4,2% pada tahun 2006 menjadi sebesar 3,5%. Hal itu, antara lain, disebabkan oleh adanya beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan selama tahun 2007. Di antaranya adalah penyesuaian ketentuan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, skim penjaminan kredit, *linkage program* antara bank umum dan BPR dalam membiayai UMKM, pemberian bantuan teknis kepada perbankan dan *Business Development Service Provider* (BDSP) dalam rangka mempercepat akses UMKM terhadap pembiayaan.

Pertumbuhan kredit MKM didorong oleh kredit konsumsi. Kredit konsumsi meningkat sebesar Rp51,3 triliun (25,4%), sedangkan kredit modal kerja dan kredit investasi hanya meningkat masing-masing sebesar Rp33,6 triliun (19,7%) dan Rp7,4 triliun (20,0%). Kenaikan kredit konsumsi tersebut menyumbang 55,5% pada total kenaikan kredit MKM pada tahun 2007. Hal itu sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga. Secara sektoral, tambahan kredit MKM terbesar pada tahun laporan terjadi pada sektor perdagangan yang diikuti sektor jasa dunia usaha dan sektor konstruksi (Tabel 9.5). Sementara itu, ditinjau dari bank penyalurnya, kelompok bank swasta nasional devisa tetap menjadi penyalur terbesar kredit MKM yang mencapai Rp217,6 triliun yang diikuti kelompok bank

persero sebesar Rp176,7 triliun dan kelompok BPD sebesar Rp67,8 triliun.

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Tren penurunan jumlah BPR terus berlanjut melalui program merger. Sepanjang tahun 2007, Bank Indonesia telah memberi persetujuan prinsip kepada 27 BPR, persetujuan izin usaha kepada 25 BPR dan izin penggabungan usaha (merger/konsolidasi) kepada 105 BPR menjadi 19 BPR. Selain itu, Bank Indonesia telah mencabut izin usaha 5 BPR karena permasalahan struktural yang tidak dapat diselamatkan lagi. Dengan demikian, jumlah BPR pada akhir tahun 2007 sebanyak 1.817 BPR atau berkurang sebanyak 63 BPR dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 9.6).

Penyebaran BPR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan berada di wilayah kabupaten. Sebanyak 75,6% dari total BPR berada di Pulau Jawa sisanya tersebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Selain itu, sebanyak 79,3% dari jumlah BPR berada di wilayah kabupaten atau pedesaan. Dengan mengacu pada cetak biru (*master plan*) BPR, Bank Indonesia terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong penyebaran BPR ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM, dapat tersentuh dan merasakan manfaat BPR.

Industri BPR menunjukkan perkembangan kinerja yang positif (Tabel 9.6). Total aset BPR pada tahun

Tabel 9.5
Perkembangan Kredit MKM¹

Keterangan	Posisi (triliun Rp)			Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Jenis Penggunaan							
Kredit Modal Kerja	142,6	171,1	204,8	20,0	19,7	41,7	40,7
Kredit Investasi	33,0	37,1	44,6	12,5	20,0	9,0	8,9
Kredit Konsumsi	179,2	202,2	253,5	12,8	25,4	49,3	50,4
Total	354,8	410,4	502,8	15,7	22,5	100,0	100,0
Sektor Ekonomi							
Pertanian	12,6	13,9	16,1	10,5	15,7	3,4	3,2
Pertambangan	1,0	1,3	1,5	31,0	14,5	0,3	0,3
Perindustrian	32,5	36,7	37,8	12,8	3,1	8,9	7,5
Listrik, Air dan Gas	0,2	1,5	0,3	640,0	(79,7)	0,4	0,1
Konstruksi	7,7	10,1	13,2	31,4	30,4	2,5	2,6
Perdagangan	87,5	107,3	134,6	22,6	25,5	26,1	26,8
Pengangkutan	6,5	6,6	7,2	1,5	9,1	1,6	1,4
Jasa Dunia Usaha	20,6	23,5	30,5	14,1	29,7	5,7	6,1
Jasa Sosial	5,3	6,0	6,7	13,6	11,3	1,5	1,3
Lain-lain	180,9	203,5	254,9	12,5	25,2	49,6	50,7
Total	354,8	410,4	502,8	15,7	22,5	100,0	100,0
Rasio Kredit MKM/Total Kredit Perbankan	51,0	51,8	50,2				

¹ tidak termasuk kredit BPR

Tabel 9.6
Indikator Kinerja BPR

Indikator	2003	2004	2005	2006	2007
Jumlah BPR	2.141	2.158	2.009	1.880	1.817
Total Aset (miliar Rp)	12.635	16.707	20.393	23.045	27.741
DPK (miliar Rp)	8.868	11.161	13.178	15.771	18.719
Kredit (miliar Rp)	8.985	12.149	14.654	16.948	20.540
LDR (Kredit/DPK, %)	101,32	108,85	111,20	107,46	109,73
NPL Gross (%)	7,96	7,59	7,97	9,73	7,98
CAR (%)	-	-	19,34	19,50	23,38

2007 meningkat Rp4,7 triliun (20,4%) dari posisi tahun sebelumnya menjadi Rp27,7 triliun. Peningkatan aset tersebut terutama didorong oleh peningkatan kredit sebesar Rp3,6 triliun (21,2%) menjadi Rp20,5 triliun, sejalan dengan peningkatan DPK sebesar Rp2,9 triliun (18,7%). Dengan perkembangan tersebut, LDR BPR meningkat dari 107,5% menjadi 109,7% atau lebih tinggi dibandingkan dengan LDR bank umum.

Permintaan kredit tetap meningkat meskipun suku bunga kredit yang ditawarkan relatif tinggi. Pada akhir tahun laporan, suku bunga tabungan BPR sebesar 7,6% dan deposito sebesar 11,6%. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, suku bunga tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga simpanan bank umum. Relatif tingginya *cost of fund* yang harus ditanggung oleh BPR berdampak pada tingginya suku bunga kredit BPR yang dikenakan kepada nasabah, yakni sebesar 22,7% per tahun. Namun faktor pertimbangan utama nasabah BPR untuk mengajukan kredit adalah pelayanan dan kecepatan sehingga relatif tingginya suku bunga kredit tidak memengaruhi minat nasabah BPR.

Penyaluran kredit BPR tetap terfokus pada jenis kredit konsumsi. Walaupun mayoritas BPR berada di tengah-tengah masyarakat desa, penyaluran dana oleh BPR masih terfokus pada sektor perdagangan (37,6%) dan sektor lain-lain (44,1%). Sementara itu, sektor pertanian yang identik dengan mata pencaharian utama penduduk desa hanya memperoleh porsi pembiayaan sebesar 6,5% dan sektor industri sebesar 1,6%.

Kualitas kredit BPR mengalami perbaikan. Rasio NPL gross BPR menurun dari 9,7% menjadi 8,0%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Penyumbang terbesar tingginya NPL BPR tersebut adalah usaha mikro (78,0%) yang merupakan porsi pembiayaan BPR terbesar. Usaha mikro dimaksud identik dengan sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi karena ciri-ciri usahanya yang belum didukung oleh teknologi dan SDM yang memadai. Selain itu, mayoritas usaha mikro

juga belum dilengkapi dengan izin usaha formal sehingga sulit untuk memantau kelangsungan usahanya. Dari jenis penggunaan dan sektor ekonomi, penyumbang terbesar tingginya NPL BPR berasal dari jenis kredit modal kerja dan kredit sektor perdagangan.

Level permodalan BPR cukup tinggi sebagai penyangga risiko sekaligus faktor pendukung pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Hal itu tercermin pada CAR BPR yang mencapai 22,3%. Mayoritas BPR (52,5%) beroperasi dengan modal inti antara Rp1-10 miliar dan hanya sebesar 16,4% yang mempunyai modal inti di bawah Rp500 juta. Secara individu masih terdapat 66 BPR yang belum mampu memenuhi 40% modal disetor minimum yang seharusnya wajib dipenuhi pada akhir Desember 2006.

Kebijakan Perbankan Konvensional

Kebijakan perbankan pada tahun laporan tetap difokuskan untuk mendorong fungsi intermediasi dan untuk memperkuat kondisi atau ketahanan perbankan. Kedua tujuan kebijakan tersebut saling berkaitan karena untuk memaksimalkan peran perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian melalui penyaluran kredit, diperlukan kondisi dan struktur perbankan yang kuat. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan sepanjang tahun 2007 dilakukan dengan menitikberatkan pada implementasi program jangka pendek-menengah dan jangka panjang.

Implementasi Program Jangka Pendek-Menengah

Beberapa kebijakan jangka pendek-menengah yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2007 sebagai berikut.

- Penyediaan data dan informasi bisnis untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil. Dalam hal tersebut Bank Indonesia menyediakan *Database Perekonomian Nasional* sekaligus sebagai Pusat Informasi Kajian-kajian Ekonomi yang diluncurkan pada Juli 2007.
- Memfasilitasi proses merger untuk mendukung program konsolidasi perbankan, khususnya untuk pemenuhan modal minimum.
- Perubahan isi ketentuan dan penegasan atas penafsiran beberapa ketentuan yang pernah dikeluarkan. Kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada kemampuan *risk management* perbankan dalam proses pemberian dan penilaian kredit dibandingkan dengan pemenuhan berbagai persyaratan. Berbagai persyaratan penilaian kolektibilitas yang saat ini dirasakan memberatkan dapat dikesampingkan

sepanjang perbankan memahami benar *exposure* risiko yang dimilikinya dan siap dengan berbagai langkah mitigasi yang diperlukan.

- d. Pengaturan tenaga kerja asing (TKA) di perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kesempatan bagi tenaga kerja domestik. Penggunaan TKA pada level *middle management* dibatasi, yaitu dua tingkat di bawah direksi, kecuali untuk bidang-bidang yang dapat dibuktikan memang tidak mampu diisi oleh tenaga kerja domestik dan dibatasi untuk jangka waktu maksimal 3 tahun.
- e. Pengembangan pasar keuangan domestik dan perluasan instrumennya secara aktif, seperti: (i) menerbitkan aturan untuk mendukung penerbitan SPN; (ii) mendorong perluasan pasar SBI yang berjangka lebih panjang; (iii) menyediakan *regulatory environment* yang efektif bagi pengembangan produk dan pasar yang lebih luas, mencakup *medium term notes*, *corporate bonds*, dan *commercial papers*; dan (iv) memberi peluang yang lebih besar bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekuritisasi aset, *universal banking*, dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah.
- f. Pengembangan industri BPR yang diarahkan pada peningkatan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan, dan peningkatan pembiayaan BPR kepada sektor MKM. Kebijakan tersebut ditempuh melalui: (i) penyempurnaan pengaturan BPR; (ii) peningkatan efektivitas pengawasan melalui implementasi Sistem Informasi Pengawasan BPR dan pelaporan BPR secara *on line*; (iii) penguatan kelembagaan BPR (*institutional building*) dengan melanjutkan kebijakan restrukturisasi industri BPR; (iv) peningkatan kapasitas BPR dengan mendorong implementasi Program Sertifikasi Profesional (CERTIF) bagi direktur BPR, pemberian bantuan teknis bagi SDM BPR setingkat manajer untuk meningkatkan kompetensi teknis, dan penyelenggaraan *workshop* pembiayaan BPR ke sektor produktif; (v) melanjutkan program Apex² yang diarahkan pada pemantauan terhadap Apex yang telah beroperasi secara regional dan persiapan pembentukan Apex yang beroperasi dalam skala nasional; (vi) penelitian penyebab NPL di BPR; (vii) penelitian tingkat efisiensi BPR yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi BPR agar suku bunga kredit yang dikenakan menjadi lebih rendah; dan (viii) penelitian kredit usaha produktif tanpa jaminan fisik bagi BPR.

Implementasi Program Jangka Panjang

Program jangka panjang sektor perbankan tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Implementasi Pilar 1 API dalam tahun laporan memasuki tahap persiapan final. Pencapaian untuk Pilar 1 API pada tahun 2007 meliputi: (i) keberhasilan dalam pemenuhan persyaratan modal inti minimum sebesar Rp80 miliar; (ii) peningkatan *linkage program* antara bank umum dan BPR yang mencapai lebih dari 1.000 BPR dengan total plafon kredit sebesar Rp3,3 triliun dan peninjauan kerja sama bank umum dengan koperasi dengan total plafon kredit sebesar Rp576 miliar; dan (iii) penyempurnaan skim penjaminan kredit yang ditujukan untuk meningkatkan akses kredit pada sektor MKM yang kurang mampu untuk menyediakan agunan (*feasible* tetapi belum *bankable*).

Untuk meningkatkan kualitas pengaturan perbankan (Pilar 2) telah dibentuk lembaga riset perbankan daerah. Selama tahun 2007, telah terbentuk empat lembaga riset perbankan daerah yang melibatkan empat universitas, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanudin dan Universitas Andalas. Hasil kajian dari masing-masing lembaga tersebut akan dijadikan masukan bagi rumusan kebijakan peningkatan intermediasi di daerah.

Upaya peningkatan fungsi pengawasan (Pilar 3) dicapai melalui reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia dan penyempurnaan sistem pengawasan berbasis risiko. Hasil konsolidasi internal satker pengawasan bank mencakup pembentukan kelompok pengawas spesialis, *liaison officer*, dan pengalihan perizinan jaringan kantor bank. Sementara itu, untuk mendukung sistem pengawasan yang berbasis risiko, telah disusun *draft* pedoman *loan sampling* dan penyempurnaan mekanisme *judgement* pada aplikasi Sistem Pengawasan (SIMWAS). Selain itu, juga telah diselesaikan kajian *Blue Print* Sistem Pengawasan Bank yang memuat identifikasi permasalahan dalam sistem pengawasan bank dan rekomendasi penyempurnaan yang meliputi penyempurnaan kerangka pengaturan, kerangka pengawasan, dan manajemen sumber daya pengawasan.

Sertifikasi manajemen risiko dan *good corporate governance* (GCG) terus digalakkan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan operasional perbankan (Pilar 4). Sepanjang tahun 2007 telah dilaksanakan ujian sertifikasi manajemen risiko yang diikuti oleh 12.865 peserta ujian level 1 (lulus 9.024 peserta), 4.267 peserta ujian level 2 (lulus 1.874 peserta), dan 829 ujian level 3 (lulus 416 peserta). Sementara itu, untuk mendukung implementasi GCG, telah dilakukan pembahasan penerapan GCG yang ideal bagi perbankan yang melibatkan bank-bank,

² Lembaga pelindung atau penyangga dana bagi BPR jika mengalami kesulitan likuiditas karena *mismatch*.

asosiasi, dan institusi serta lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan GCG.

Pengembangan infrastruktur perbankan (Pilar 5) difokuskan pada pengembangan *Credit Bureau*. Pada tahun 2007 dilakukan pembahasan *draft final road map* pengembangan *Credit Bureau*. Di samping itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bapepam-LK dan Bank Indonesia tentang kerja sama penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap lembaga pembiayaan.

Untuk program peningkatan perlindungan nasabah (Pilar 6), difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pengaduan, mediasi, dan edukasi masyarakat. Pada tahun laporan, Bank Indonesia telah menyusun program otomasi pelaporan pengaduan nasabah secara *on-line* ke Bank Indonesia dan direncanakan dapat digunakan pada awal tahun 2008. Selain itu, fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan akan dilanjutkan oleh lembaga mediasi perbankan yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Namun berhubung asosiasi perbankan belum siap mengambil alih tugas mediasi maka fungsi mediasi perbankan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia sampai asosiasi perbankan siap. Sementara itu, program edukasi masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Pokja Edukasi Perbankan melalui kegiatan kampanye nasional edukasi perbankan mulai bulan November 2007.

Kebijakan Kredit UMKM

Bank Indonesia secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM pada tahun laporan mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Bantuan teknis dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan *Business Development Service Provider* (BDSP), serta program *Pilot Project* Pengembangan UMKM. *Pilot project* tersebut dilakukan dengan pendekatan klaster yang merupakan pendekatan strategis dalam hubungan industri dari hulu sampai hilir yang berbasis komoditas unggulan dan telah diterapkan pada beberapa jenis produk unggulan di 6 wilayah.³ Sementara itu, penyediaan informasi utamanya dilakukan melalui bazar intermediasi, seminar, *talk show*, sosialisasi, dan *uploading* Sistem Informasi Pola Usaha Kecil (SIPUK) ke dalam Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI). Adapun kegiatan penelitian yang telah dilakukan

untuk menunjang pengembangan UMKM, antara lain: (i) identifikasi peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan UMKM; (ii) identifikasi dan pengembangan produk unggulan sektor UMKM; (iii) identifikasi pola pembiayaan usaha (*lending model*) yang berpotensi untuk dikembangkan; dan (iv) penyediaan *database* UMKM yang potensial untuk dibiayai oleh bank yang akan didiseminasikan melalui *website*. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan strategi pengembangan sektor UMKM, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Perkembangan Perbankan Syariah

Peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat. Meskipun pertumbuhan perbankan syariah sempat mengalami penurunan pada triwulan kedua akibat dampak lanjutan kenaikan BBM pada sebagian golongan masyarakat, secara keseluruhan pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja industri perbankan syariah pada tahun laporan baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan meningkat sehingga semakin berperan dalam kegiatan ekonomi nasional.

Kinerja Perbankan Syariah

Sepanjang tahun 2007 jaringan kantor perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan berdirinya 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pembentukan 6 Unit Usaha Syariah (UUS), dan penambahan jaringan kantor cabang (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan unit pelayanan syariah) sebanyak 66 kantor (Tabel 9.7). Selain itu, kebijakan pembukaan layanan syariah (*office channeling*) juga memberikan dukungan yang berarti dalam mendorong berkembangnya volume usaha industri perbankan syariah. Hal itu ditunjukkan oleh jumlah layanan syariah yang meningkat hampir tiga kali lipat dari 456 kantor menjadi 1.195 kantor pada akhir tahun 2007. Penyebaran jaringan kantor bank syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih dari 70 kabupaten/kota di 31 provinsi. Perkembangan jaringan kantor mengindikasikan tingginya kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah sepanjang tahun 2007 cukup menggembirakan yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja utama. Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari perluasan jaringan pelayanan perbankan syariah pada tahun laporan sehingga memudahkan dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Penghimpunan

³ Kabupaten Serdang Badagai (opak/ubi kayu), Kabupaten Pandeglang (emping melinjo), Kabupaten Bandung (paprika), Kabupaten Sukoharjo (mebel rotan), Kabupaten Mojokerto (alas kaki), dan Kabupaten Lombok Tengah (rumpun laut).

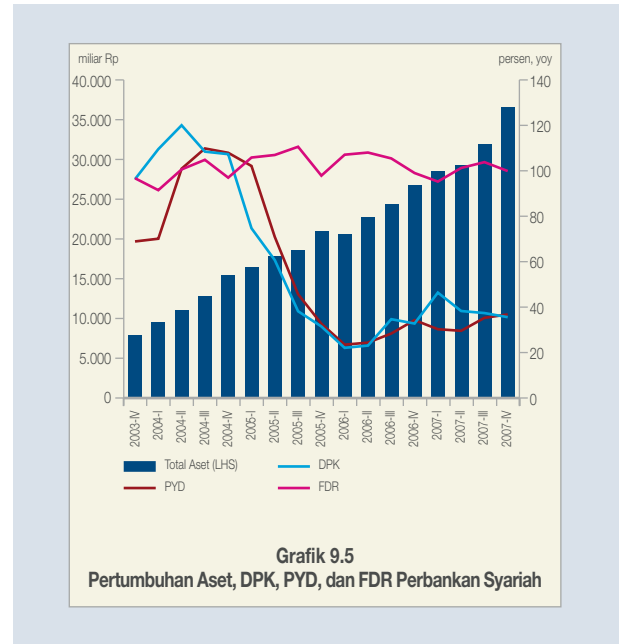
Tabel 9.7
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah (BUS)	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah (UUS)	8	15	19	20	26
BPR Syariah	84	88	92	105	114
Kantor BUS & UUS	253	355	458	531	597
Kantor Layanan Syariah	–	–	–	456	1.195

DPK tumbuh sebesar 35,5%, sedangkan pembiayaan yang disalurkan (PYD) tumbuh sebesar 36,7% (Grafik 9.5). Akselerasi pertumbuhan PYD yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK tersebut mendorong peningkatan *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah dari 98,9% menjadi 99,8%. Pencapaian tersebut berhasil mendorong kenaikan volume usaha industri perbankan syariah sebesar Rp9,8 triliun atau tumbuh 36,7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp36,5 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional dari 1,6% pada akhir tahun 2006 menjadi 1,8% pada akhir tahun 2007.

Perkembangan DPK perbankan syariah pada tahun 2007 didorong oleh peningkatan jumlah nasabah. Perluasan jaringan pelayanan perbankan syariah berhasil menarik nasabah baru dalam jumlah yang signifikan. Sepanjang tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah rekening sebanyak 853.377 yang berasal dari nasabah individu sebanyak 97,7% dan nasabah korporasi sebanyak 2,3%. Peningkatan DPK juga didorong oleh kompetitifnya nilai bagi hasil yang diberikan sehingga memengaruhi minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan syariah. DPK perbankan syariah meningkat Rp7,3 triliun (35,3%) dari posisi tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp28,0 triliun. Pencapaian tersebut menyebabkan pangsa DPK perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,6% pada akhir tahun 2006 menjadi 1,9% pada akhir tahun 2007.

Struktur DPK perbankan syariah masih didominasi oleh simpanan *mudharabah* (investasi). Berbeda dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan DPK perbankan syariah



bergeser ke jenis simpanan yang berbasis *mudharabah*. Pertumbuhan giro *wadiah* turun signifikan dari 67% pada tahun 2006 menjadi sebesar 9,8% pada tahun 2007. Sementara itu, pertumbuhan deposito *mudharabah* meningkat tajam dari 18,1% menjadi 36,4%. Melambatnya pertumbuhan giro *wadiah* tersebut membuat pangsaanya terhadap total DPK mengalami penurunan dari 16,5% menjadi 13,4%, sebaliknya pangsa simpanan *mudharabah* mengalami peningkatan (Tabel 9.8). Dilihat dari jangka waktu, struktur simpanan deposito *mudharabah* juga mengalami pergeseran ke arah jangka waktu yang lebih panjang.

Komposisi DPK yang didominasi oleh dana investasi dapat menurunkan potensi risiko likuiditas perbankan syariah. Potensi risiko likuiditas terutama bersumber dari fluktuasi dana kelompok deposan korporasi, yang umumnya masih sensitif terhadap daya saing nilai bagi hasil yang ditawarkan. Nilai simpanan kelompok deposan korporasi tersebut sangat besar (44,4% dari total DPK) meskipun dari segi jumlah nasabah atau rekening sangat kecil (2,3%).

Tabel 9.8
Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

Keterangan	Jumlah (miliar Rp)			Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Giro Wadiah	2.045	3.416	3.750	67,00	9,80	16,52	13,39
Tabungan Mudharabah	4.371	6.430	9.454	47,13	47,02	31,11	33,75
Deposito Mudharabah	9.166	10.826	14.807	18,11	36,77	52,37	52,86
Total DPK	15.582	20.672	28.012	32,66	35,50	100,00	100,00

Tabel 9.9
Perkembangan Jenis-jenis Pembiayaan

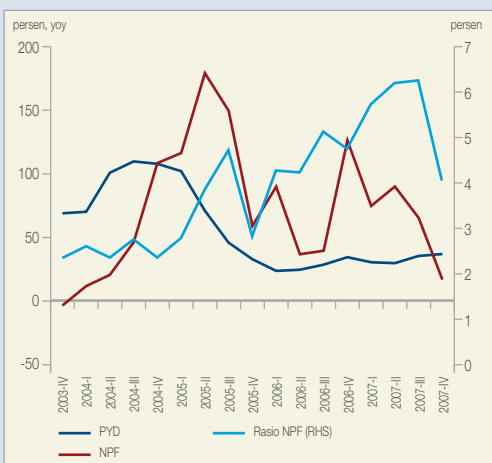
Keterangan	Jumlah (miliar Rp)			Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Musyarakah	1.898	2.335	4.406	23,0	88,7	11,4	15,8
Mudharabah	3.124	4.062	5.578	30,0	37,3	19,9	20,0
Piutang Murabahah	9.487	12.624	16.553	33,1	31,1	61,7	59,2
Piutang Istishna	282	337	351	19,6	4,2	1,6	1,3
Piutang Qardh	125	250	540	100,6	115,6	1,2	1,9
Ijarah	316	836	516	164,7	(38,3)	4,1	1,8
Total	15.232	20.445	27.944	34,2	36,7	100,0	100,0

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah tetap berjalan secara optimal. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syariah pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp7,5 triliun atau tumbuh 36,7% menjadi sebesar Rp27,9 triliun sehingga pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap kredit perbankan nasional meningkat menjadi 2,7%. Pertumbuhan PYD tersebut jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan konvensional. Hal itu dapat menegaskan peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan sektor riil. Kontribusi positif tersebut didukung pula oleh porsi pembiayaan MKM yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp19,6 triliun atau 70,0% dari total pembiayaan perbankan syariah. Secara sektoral terdapat tiga sektor utama yang mengalami peningkatan, yaitu sektor jasa dunia usaha, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi.

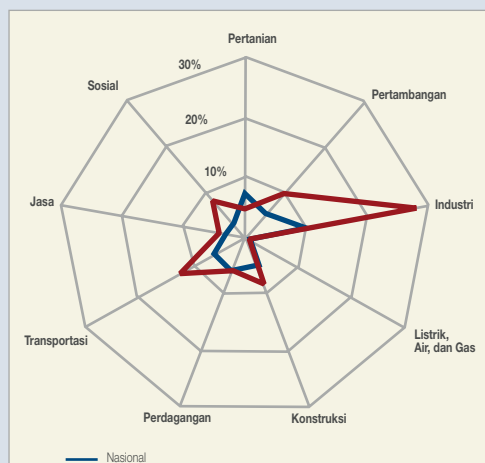
Pembiayaan dengan akad *murabahah* tetap mendominasi, walaupun pangasanya mengalami sedikit penurunan. Pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2007

tercatat sebesar 31,1% atau sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,1% sehingga pangasanya menjadi 59,2%. Sementara itu, pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* tumbuh signifikan masing-masing sebesar 88,7% dan 37,3% (Tabel 9.9). Hal tersebut meningkatkan pangsa pembiayaan *musyarakah* menjadi 15,8% dan *mudharabah* menjadi 20,0%. Peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad *musyarakah*, didorong oleh pola pembiayaan perbankan syariah yang melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan kecil seperti BPRS, koperasi, dan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa perbankan syariah cenderung mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil yang tingkat risikonya relatif lebih tinggi dari jenis pembiayaan lainnya.

Pembiayaan bermasalah menurun terutama akibat restrukturisasi pembiayaan. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah sempat meningkat



Grafik 9.6
NPF Perbankan Syariah



Grafik 9.7
Perbandingan NPF per Sektor

Tabel 9.10
Indikator Kinerja BPRS

Indikator Kinerja	2005	2006	2007	Δ 2007
Total Asset (miliar Rp)	605,0	906,3	1,207,2	33,2%
DPK (miliar Rp)	353,6	530,2	711,3	34,2%
PYD (miliar Rp)	435,9	636,3	879,7	38,3%
Indikator Rasio:				
LDR (%)	123,3	120,0	123,7	3,67
NPF Gross (%)	10,6	8,3	8,0	-0,31
NPF Net (%)	9,5	7,1	6,6	-0,47

sejak awal tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada triwulan III-2007 sebesar 6,3% (Grafik 9.6) karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif. Penurunan kualitas pembiayaan tersebut khususnya terjadi pada sektor manufaktur, transportasi dan konstruksi (Grafik 9.7). Walaupun demikian, berbagai upaya yang dilakukan perbankan syariah untuk menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah, khususnya melalui program restrukturisasi, berhasil menurunkan rasio pada tahun 2007 menjadi 4,1% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 4,8%.

Peningkatan risiko dalam penghimpunan maupun penyaluran dana dapat diantisipasi dengan baik oleh perbankan syariah. Walaupun laju peningkatan laba sedikit terhambat, tingkat *return on asset* (ROA) masih cukup memadai, yaitu sebesar 1,78% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,55%. Hambatan peningkatan laba tersebut disebabkan oleh meningkatnya pangsa pendapatan operasional yang dialokasikan kepada deposito untuk meningkatkan bagi hasil dan mempertahankan daya saing. Selain itu, untuk mengantisipasi risiko pembiayaan, beban pembentukan cadangan juga ditingkatkan sehingga kondisi permodalan bank syariah tetap terjaga di atas batas minimal rasio kecukupan modal.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Perkembangan BPRS sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan untuk segmentasi masyarakat kecil juga meningkat cukup pesat. Secara kelembagaan, jaringan pelayanan bertambah luas sejalan dengan bertambahnya jumlah BPRS sebanyak 9 BPRS menjadi 114 BPRS. Peningkatan jaringan tersebut meningkatkan volume usaha BPRS sebesar Rp300,9 miliar (33,2%) menjadi Rp1.207,2 miliar sehingga memperbesar pangsa BPRS dalam industri BPR nasional menjadi 4,2%. Penghimpunan dana meningkat menjadi sebesar Rp711,3 miliar, sedangkan ekspansi pembiayaan yang disalurkan (PYD) meningkat menjadi sebesar Rp879,7 miliar (Tabel 9.10). Kondisi tersebut meningkatkan FDR BPRS yang mencapai 123,7%.

Tabel 9.11
Perkembangan Pembiayaan BPRS

Kategori	2005	2006	2007	Δ 2007
Jenis Pembiayaan (miliar Rp)				
a. Piutang Murabahah	355,9	524,0	717,30	36,9%
b. Pembiayaan Mudharabah	24,5	26,8	42,17	57,1%
c. Pembiayaan Musyarakah	40,1	65,3	96,48	47,8%
d. Lainnya	15,4	19,6	38,49	96,8%
Golongan Pembiayaan (miliar Rp)				
a. Mikro (Rp0-Rp50 juta)	297,6	418,0	583,80	39,7%
b. Kecil (Rp50 juta-Rp500 juta)	121,7	178,8	263,10	47,1%
c. Lainnya	16,4	39,5	47,53	20,4%
Jenis Penggunaan (miliar Rp)				
a. Modal Kerja	252,6	378,8	506,49	33,7%
b. Investasi	50,2	78,6	126,80	61,4%
c. Konsumsi	132,9	178,8	261,14	46,1%
Sektor Ekonomi (miliar Rp)				
a. Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian	12,1	41,0	26,45	-35,5%
b. Pertambangan	0,1	0,5	1,18	142,7%
c. Industri Pengolahan	9,4	12,5	13,61	9,2%
d. Listrik, Gas dan Air	0,1	0,7	0,56	-25,5%
e. Konstruksi	3,5	6,6	18,59	182,9%
f. Perdagangan, Restoran dan Hotel	195,8	254,2	322,63	26,9%
g. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3,6	8,7	8,71	0,0%
h. Jasa-jasa Dunia Usaha	49,5	72,2	114,14	58,2%
i. Jasa-jasa sosial/masyarakat	5,2	5,6	10,81	91,9%
j. Lain-lain	156,2	233,7	377,77	61,6%

Kualitas pembiayaan BPRS juga membaik yang ditandai oleh menurunnya rasio NPF, baik *gross* maupun *net* masing-masing menjadi sebesar 8,0% dan 6,6%.

Pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* masih menjadi pilihan utama BPRS. Kedua jenis pembiayaan tersebut, terutama, ditujukan untuk melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja nasabah. Pembiayaan berbasis jual beli *murabahah* masih sangat dominan dengan porsi sebesar 80,2%, diikuti pembiayaan berbasis *musyarakah* dan *mudharabah* masing-masing sebesar 10,8% dan 4,7% (Tabel 9.11). Pembiayaan *murabahah* umumnya bernilai kurang dari Rp50 juta yang digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti kendaraan bermotor dan rumah tinggal oleh usaha mikro dan kecil.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah memformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah melalui program akselerasi pengembangan

perbankan syariah yang sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (Boks: *Grand Strategy* Pengembangan Perbankan Syariah sebagai Bagian dari Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah). Adapun tujuan peningkatan kapasitas pelayanan tersebut diselaraskan dengan target percepatan pertumbuhan perbankan syariah untuk mencapai pangsa sebesar 5% dari total volume perbankan nasional pada akhir tahun 2008. Program percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah pada prinsipnya ditujukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak.

Program Penguatan Sisi Penawaran

Untuk meningkatkan keahlian SDM, baik dalam aspek syariah maupun aspek keahlian teknis lainnya, langkah yang dilakukan adalah memberikan bantuan teknis berupa program sertifikasi direksi BPRS, *upgrading* pengurus bank syariah, dan penyusunan *textbook* Ekonomi Islam. Sepanjang tahun 2007 telah dilakukan program sertifikasi direktur BPRS sebanyak 2 angkatan dengan total peserta sebanyak 53 direktur serta *program upgrading* pengurus bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM *office channeling*. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang menjadi *resource* SDM bank syariah, telah selesai disusun *textbook* Ekonomi Islam yang ditujukan untuk mendukung proses pengajaran ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah.

Untuk meningkatkan jaringan pelayanan perbankan syariah, langkah yang dilakukan adalah mendorong pembukaan *office channeling*. Pada tahun 2007, pelayanan *office channeling* diperluas, bukan hanya melayani kebutuhan masyarakat pada sisi pendanaan tetapi juga sisi pembiayaan.

Untuk memperkaya produk jasa keuangan perbankan syariah bagi masyarakat, langkah yang dilakukan adalah menyusun buku kodifikasi produk perbankan syariah. Terkait dengan upaya pengayaan produk tersebut, pada tahun 2007 telah disusun buku kodifikasi yang memuat informasi berbagai produk bank syariah yang telah tersedia di pasar domestik agar dapat menjadi referensi bagi bank-bank syariah dalam melengkapi produk-produk jasa keuangannya.

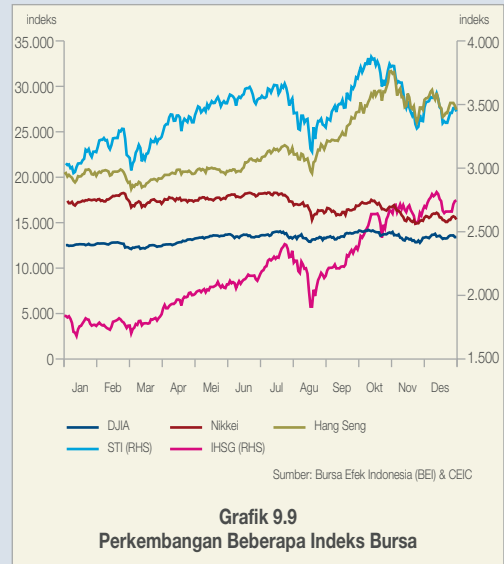
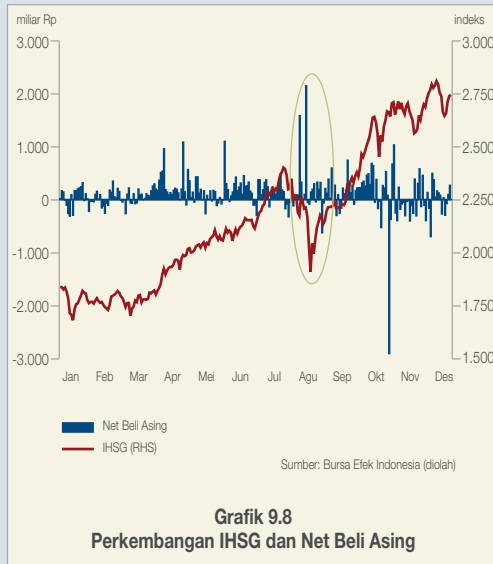
Program Penguatan Sisi Permintaan

Program ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut.

- a. Menggalakkan program sosialisasi perbankan syariah. Program sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai forum dengan melibatkan berbagai pihak, baik praktisi,

akademisi, maupun masyarakat umum. Pada tahun 2007 telah dimulai sosialisasi industri perbankan syariah melalui media-media informasi seperti televisi, radio, koran, dan media promosi lainnya.

- b. Melakukan *linkage program* sebagai bagian dari pengembangan industri perbankan syariah. Sasaran dari *linkage program* adalah untuk memperkuat pola hubungan antara pelaku perbankan syariah dengan sektor usaha. Pada tahun 2007 telah dilakukan replikasi *linkage program* berupa pelatihan pembinaan UMKM bagi pengurus bank syariah, pegawai Pemda, dan LSM terkait di kota Cilegon dan Yogyakarta.
- c. Menghimbau Pemerintah untuk terlibat aktif dalam pengembangan industri perbankan syariah nasional. Salah satu imbauan yang telah disampaikan kepada Pemerintah adalah agar memberikan kepercayaan kepada bank-bank syariah untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek Pemerintah dan dalam pengelolaan sumber-sumber dana Pemerintah di perbankan syariah.
- d. Menyempurnakan ketentuan dan perundang-undangan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Pada tahun laporan dilakukan pembahasan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Selain itu, diupayakan pula penyelesaian RUU Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.
- e. Mendorong pelaksanaan program *voluntary sector*. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan potensi peran industri perbankan syariah dalam sektor sosial melalui program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengelola ZISWaf (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf) yang telah ada. Melalui program tersebut diharapkan keberadaan industri perbankan syariah akan lebih diakui oleh masyarakat karena kemanfaatannya bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Pada tahun 2007 pengelolaan dana-dana sosial tersebut secara total meningkat Rp12,6 miliar menjadi Rp40,1 miliar, yang terdiri dari pengelolaan dana sosial berbasis ZIS sebesar Rp33,3 miliar dan berbasis *qardh* (pinjaman) sebesar Rp6,8 miliar.



Perkembangan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya

Perkembangan Pasar Modal

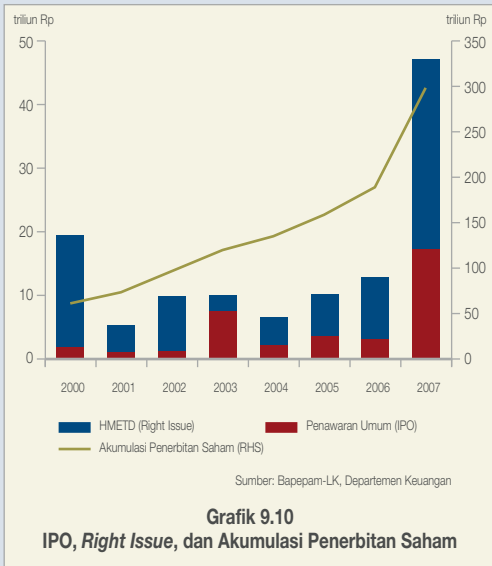
Melanjutkan prestasi tahun sebelumnya, kinerja pasar modal meningkat secara signifikan selama tahun 2007. IHSG pada akhir tahun 2007 mencapai 2.745,8 poin atau menguat 940,3 poin (52,1%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 9.8). Prestasi itu kembali menempatkan Bursa Efek Indonesia (BEI)⁴ sebagai bursa saham berkinerja terbaik ketiga di kawasan Asia Pasifik setelah bursa Shenzhen (164%) dan Shanghai (98,4%). Sebenarnya IHSG sempat menyentuh level 2.811 poin pada pekan kedua Desember 2007 sebelum akhirnya terkoreksi. Level tersebut merupakan level tertinggi yang pernah dicapai sejak beroperasinya pasar modal Indonesia. Secara sektoral, sumbangan terbesar peningkatan IHSG tersebut disumbang oleh sektor pertambangan, pertanian, dan properti. Total nilai transaksi saham juga meningkat signifikan dari Rp445,7 triliun menjadi Rp1.050,1 triliun (135,6%). Penguatan indeks dan maraknya transaksi tersebut mendorong peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebesar 59,2% menjadi Rp1.988,3 triliun, sehingga *share* pasar modal terhadap PDB meningkat dari 37,4% menjadi 57,0% pada akhir tahun 2007.

Peningkatan kinerja pasar modal tersebut didukung oleh faktor domestik dan faktor eksternal yang membaik. Faktor domestik yang mendorong peningkatan indeks pasar modal adalah penurunan BI Rate sebesar 175 bps sepanjang tahun 2007 dan semakin membaiknya berbagai

indikator makroekonomi, seperti inflasi yang terkendali dan cenderung menurun, cadangan devisa yang cukup kuat dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Di sisi mikro, kinerja emiten juga membaik yang ditunjukkan oleh peningkatan keuntungan yang cukup besar terutama pada triwulan III-2007. Ekspektasi peningkatan keuntungan terus berlanjut, khususnya untuk emiten tambang dan pertanian, sehubungan dengan meningkatnya harga komoditas tersebut di pasar internasional. Membaiknya faktor makro dan mikro tersebut berhasil meningkatkan optimisme para pelaku pasar sehingga likuiditas pasar modal meningkat dari Rp1,8 triliun menjadi Rp4,3 triliun per hari.

Dari sisi eksternal, peningkatan kinerja pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh sentimen positif di bursa saham internasional dan regional yang membaik. Walaupun pasar saham global pada tahun 2007 sempat digoncang oleh dampak *subprime mortgage* di AS, pecahnya *bubble* di China, dan peningkatan harga minyak dunia, namun langkah otoritas global dalam menangani krisis tersebut mampu mengembalikan optimisme para pelaku pasar sehingga indeks harga saham kembali meningkat. Penguatan indeks di bursa Amerika dan China yang turut mendorong peningkatan indeks regional seperti Hangseng dan Strait Times mampu memberikan angin segar kepada para pelaku pasar saham di Bursa Efek Indonesia sehingga IHSG kembali menguat dan mencapai level tertingginya (Grafik 9.9). Penguatan indeks juga didorong oleh *Price Earning Ratio* (PER) Indonesia yang masih menarik dibandingkan dengan beberapa negara *emerging market* di Asia.

4 Penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang secara resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007.



Grafik 9.10
IPO, Right Issue, dan Akumulasi Penerbitan Saham

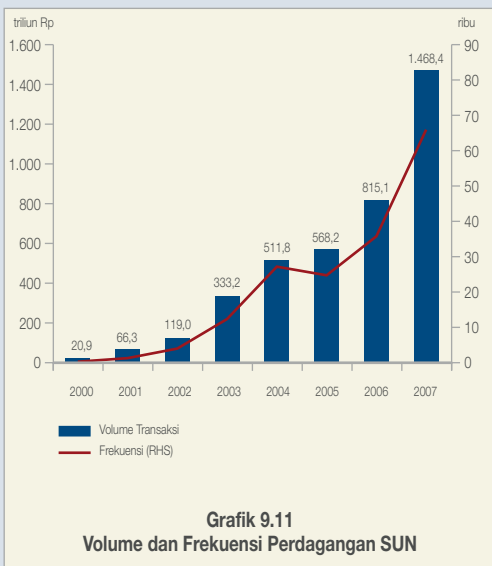
Selama tahun 2007, transaksi di pasar modal masih diwarnai oleh aksi beli investor asing. Posisi *net* beli investor asing di pasar saham mencapai Rp32,6 triliun atau meningkat 88,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp17,3 triliun. Sementara itu, posisi kepemilikan saham oleh investor asing meningkat dari Rp522,3 triliun pada akhir tahun 2006 menjadi Rp790,8 triliun pada akhir tahun 2007. Selain didorong oleh membaiknya indikator makroekonomi dan kinerja emiten, aksi beli investor asing juga didorong oleh eksekusi likuiditas global yang mencari *outlet* penempatan investasi di negara *emerging market*. Aksi beli investor asing di BEI bahkan tidak terpengaruh oleh krisis *subprime mortgage*. *Net* beli

investor asing tetap terjadi pada saat indeks tertekan oleh dampak *subprime mortgage* karena harga saham menjadi relatif lebih murah (Grafik 9.8). Langkah investor asing ini diikuti oleh investor domestik sehingga mendorong peningkatan IHSG lebih lanjut.

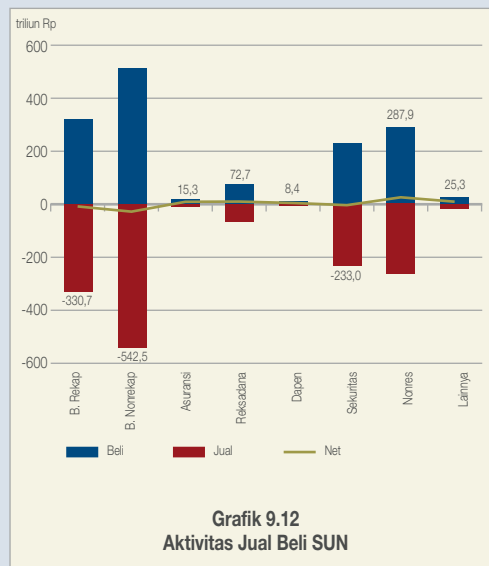
Peningkatan kinerja pasar modal dan masih tingginya permintaan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghimpun dana investasi maupun pengembangan bisnis. Selama tahun 2007 jumlah perusahaan yang melakukan penawaran perdana saham (*initial public offering/ IPO*) meningkat 100% dari 12 perusahaan menjadi 24 perusahaan. Nilai emisi saham yang diterbitkan juga melonjak dari Rp3,0 triliun menjadi Rp17,2 triliun (471%). Selain melalui IPO, sebanyak 25 perusahaan juga melakukan penawaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dengan nilai emisi sebesar Rp29,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 16 perusahaan dengan nilai emisi Rp9,8 triliun. Dengan demikian, total emisi saham yang diterbitkan selama tahun 2007 mencapai Rp47 triliun (Grafik 9.10).

Perkembangan Pasar Obligasi

Sejalan dengan perkembangan di pasar modal, aktivitas perdagangan di pasar SUN juga meningkat, baik volume maupun frekuensi perdagangan. Volume perdagangan SUN pada tahun 2007 meningkat tajam menjadi Rp1.468,4 triliun atau naik 80,1% dari tahun sebelumnya sebesar Rp815,1 triliun (Grafik 9.11). Peningkatan volume perdagangan tersebut, salah satunya, didorong oleh adanya tambahan penerbitan SUN. Selama tahun 2007, Pemerintah melakukan 24 kali lelang SUN, baik perdana



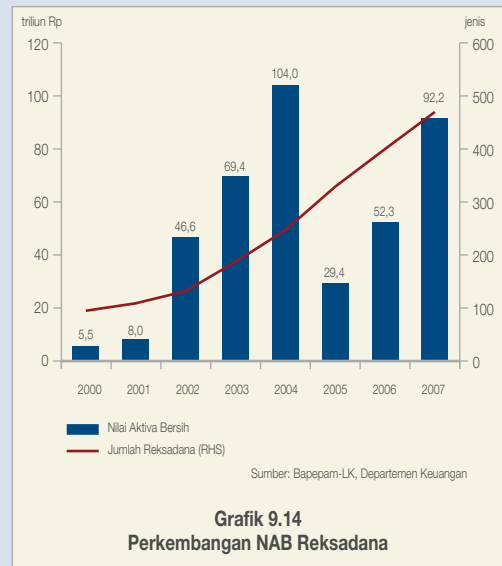
Grafik 9.11
Volume dan Frekuensi Perdagangan SUN



Grafik 9.12
Aktivitas Jual Beli SUN



Grafik 9.13
Emisi Obligasi Korporasi



Grafik 9.14
Perkembangan NAB Reksadana

maupun *reopening*, dan 3 kali lelang SPN dengan total penerbitan bersih sebesar Rp70,7 triliun. Selain itu, Pemerintah juga melakukan lelang Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebanyak 3 kali dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp15,6 triliun. Inovasi yang berhasil dilakukan Pemerintah untuk produk SUN adalah diterbitkannya obligasi seri *zero coupon* (ZC) melalui lelang sebanyak 3 kali. Selain itu, peningkatan volume perdagangan juga didorong oleh meningkatnya frekuensi perdagangan seiring dengan tingginya permintaan SUN. Frekuensi perdagangan SUN meningkat 84,7% dari 35,7 ribu transaksi pada tahun 2006 menjadi 66 ribu transaksi pada tahun 2007.

Kelompok nonresiden masih menjadi *net buyer* terbesar SUN yang diikuti oleh reksadana dan perusahaan asuransi (Grafik 9.12). Tingginya arus modal masuk sepanjang tahun 2007 mendorong terjadinya *net* beli asing sebesar Rp23,7 triliun. Sementara *net* beli SUN oleh reksadana dan asuransi masing-masing sebesar Rp7,6 triliun dan Rp6,7 triliun. Pulihnya kepercayaan investor terhadap produk reksadana meningkatkan permintaan terhadap SUN sehingga kelompok reksadana menjadi *net buyer* terbesar kedua. Mengikuti pola tahun sebelumnya, kelompok bank nonrekap, bank rekap, dan sekuritas tetap menjadi *net* penjual di pasar SUN masing-masing sebesar Rp30,5 triliun, Rp10,8 triliun, dan Rp6,0 triliun.

Walaupun volumenya tidak sebesar pasar obligasi pemerintah, aktivitas di pasar obligasi korporasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sejalan dengan pasar modal dan SUN, peningkatan aktivitas perdagangan obligasi korporasi juga didorong oleh meningkatnya

kepercayaan investor sehubungan dengan membaiknya indikator makroekonomi dan tingginya permintaan karena fenomena eksekusi likuiditas. Kondisi itu berhasil dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan penawaran umum obligasi korporasi. Selama tahun 2007 terdapat 39 perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan total emisi sebesar Rp31,3 triliun (Grafik 9.13). Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 14 perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp11,5 triliun.

Dari jumlah penerbitan obligasi tersebut, sebesar Rp1,03 triliun atau 3,3% merupakan obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh 4 perusahaan. Nilai emisi obligasi syariah tersebut meningkat 413% dari tahun 2006 sebesar Rp0,2 triliun yang diterbitkan oleh satu perusahaan. Sejak penerbitan pertamanya pada tahun 2002 hingga akhir tahun 2007 telah terdapat 21 penerbitan obligasi syariah dengan nilai emisi Rp3,2 triliun atau 2,5% dari total emisi obligasi.

Perkembangan Reksadana

Pasar reksadana kembali bergairah mengikuti pergerakan pasar saham dan obligasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana pada akhir tahun 2007 mencapai Rp92,2 triliun atau meningkat 76,4% dibandingkan dengan tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp52,3 triliun (Grafik 9.14). Kenaikan NAB tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga *underlying* reksadana, terutama, saham dan peningkatan volume reksadana (*net subscription*). Selama tahun 2007 terdapat penerbitan 70 reksadana baru, sehingga jumlahnya meningkat dari 399 reksadana menjadi 469

Tabel 9.12
Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan

Keterangan	Posisi (triliun Rp)			Pertumbuhan (%)	
	2005	2006	2007	2006	2007
Jumlah Perusahaan ¹⁾	236	214	205	(9,32)	(4,21)
Total Aset	96,5	108,9	127,3	12,81	16,87
Nilai Kegiatan Usaha	67,6	93,1	107,7	37,67	15,64
Sewa Guna Usaha	19,1	32,6	36,5	71,05	11,76
Pembiayaan Anjak Piutang	1,4	1,3	2,2	(7,80)	69,10
Pembiayaan Kartu Kredit	1,8	1,5	1,4	(16,22)	(2,37)
Pembiayaan Konsumen	45,4	57,7	67,6	27,14	17,09
Sumber Dana					
Pinjaman Bank	49,2	55,0	66,4	11,66	20,73
– Dalam Negeri	25,0	29,8	36,7	19,09	23,06
– Luar Negeri	24,2	25,2	29,7	3,96	17,96
Pinjaman Lainnya	11,6	10,2	10,5	(12,01)	3,05
– Dalam Negeri	4,5	3,4	3,8	(24,41)	13,86
– Luar Negeri	7,1	6,8	6,7	(4,22)	(2,32)
Penerbitan Surat Berharga	10,2	10,1	12,8	(0,83)	27,33
Modal ²⁾	15,2	19,0	24,5	25,22	28,90
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3,5	3,1	4,4	(10,04)	39,79

1) Satuan, merupakan jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan.

2) Terdiri atas modal disetor, agio, cadangan, laba ditahan dan laba tahun berjalan.

Sumber: Departemen Keuangan

reksadana (17,5%). Reksadana berpendapatan tetap mendominasi dengan porsi sebesar 35,3%, diikuti reksadana terproteksi sebesar 24,1%, reksadana campuran sebesar 21,8% dan reksadana saham sebesar 11,6%. Faktor lain yang mendukung peningkatan NAB adalah gencarnya edukasi kepada investor potensial dan semakin berimbang persepsi risiko antara reksadana dan simpanan bank seiring dengan penurunan nilai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sepanjang tahun 2007, terdapat 4 reksadana syariah yang mendapatkan pernyataan efektif sehingga akumulasi reksadana syariah mencapai 25 reksadana atau 5,7% dari total reksadana. NAB reksadana syariah mencapai Rp2,1 triliun atau meningkat 206,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,7 triliun. Peningkatan tersebut menaikkan porsi NAB reksadana syariah dari 1,3% menjadi 2,4% pada akhir tahun 2007.

Perusahaan Pembiayaan

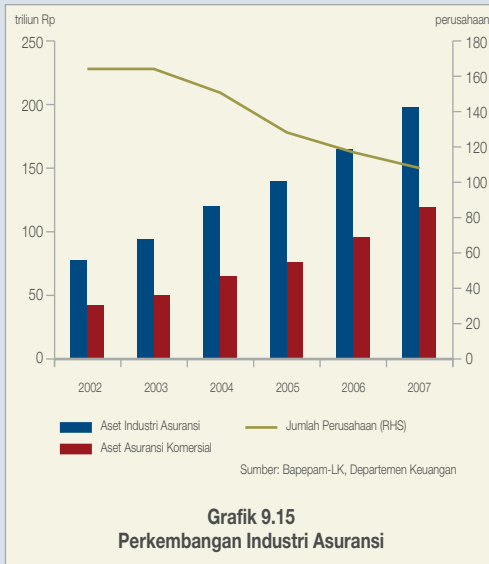
Kinerja perusahaan pembiayaan pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang tetap didorong oleh konsumsi swasta. Secara kelembagaan, jumlah perusahaan pembiayaan mengalami penurunan, tetapi total aset maupun nilai kegiatan usaha mengalami peningkatan yang signifikan (Tabel 9.12). Total aset perusahaan pembiayaan pada akhir tahun laporan mencapai Rp127,3 triliun atau meningkat 16,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu,

nilai kegiatan usaha meningkat 15,6% menjadi Rp107,7 triliun. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tetap didominasi oleh pembiayaan konsumen sebesar Rp67,6 triliun atau 62,7% dari total kegiatan usaha dan sewa guna usaha Rp36,5 triliun (33,9%).

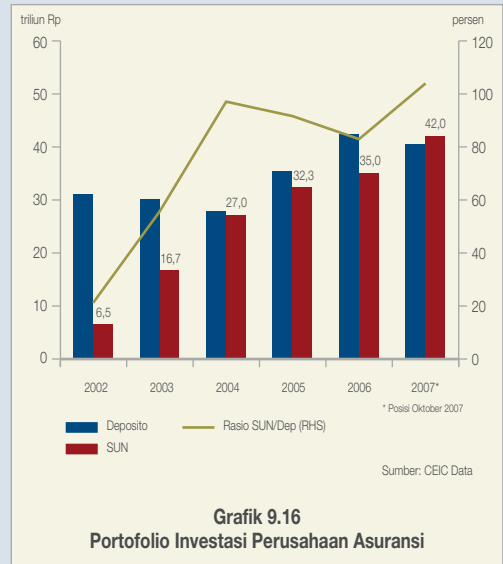
Ditinjau dari struktur sumber pendanaannya, sumber dana utama perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank. Total pinjaman bank pada tahun 2007 mencapai Rp66,4 triliun atau 58,1% dari total pendanaan. Dari total pinjaman bank tersebut sebesar Rp36,7 triliun (55,3%) merupakan pinjaman bank dalam negeri dan sisanya berasal dari bank luar negeri. Sementara itu, porsi sumber pendanaan dari penerbitan surat berharga, pinjaman lainnya dan penambahan modal sebesar 41,9%. Tren penurunan suku bunga, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mendorong peningkatan pinjaman bank oleh perusahaan pembiayaan sebesar 20,7% dari Rp55 triliun menjadi Rp66,4 triliun.

Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi pada tahun 2007 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dan secara umum perusahaan asuransi juga semakin efisien. Terjadi tren penurunan jumlah perusahaan asuransi sejak tahun 2003 (Grafik 9.15). Dalam kurun waktu 4 tahun, jumlah perusahaan asuransi turun sebesar 14,5% dari 173 perusahaan menjadi 148 perusahaan yang terdiri atas 46 perusahaan asuransi jiwa, 93 perusahaan asuransi



Grafik 9.15
Perkembangan Industri Asuransi



Grafik 9.16
Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi

kerugian, 4 perusahaan reasuransi, dan 5 perusahaan asuransi sosial, jamsostek, TNI dan Polri. Namun, penurunan jumlah perusahaan tersebut tidak menurunkan kinerja industri asuransi. Sampai dengan September 2007, total aset industri asuransi meningkat signifikan dari Rp94,1 triliun menjadi Rp198 triliun atau naik 110,4% dibandingkan dengan posisi tahun 2003. Sementara itu, total aset perusahaan asuransi komersial (asuransi jiwa, kerugian dan reasuransi) meningkat 137,6% dari Rp50,1 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp119,1 triliun.

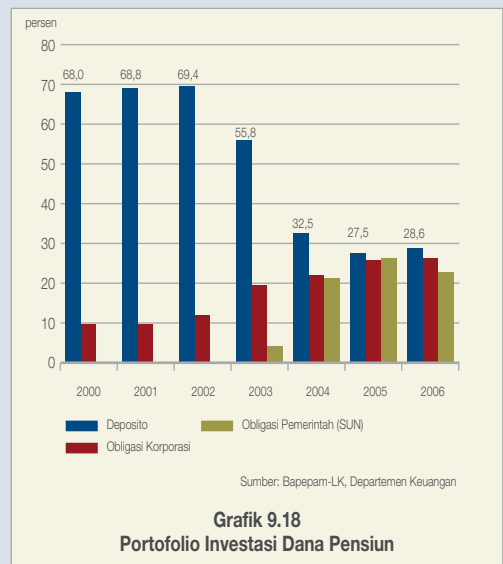
Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, jumlah perusahaan asuransi syariah juga

mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir tahun 2007 terdapat 3 perusahaan asuransi syariah, 32 cabang asuransi syariah dan 3 cabang reasuransi syariah. Sementara itu, total aset perusahaan asuransi syariah sampai dengan September 2007 mencapai Rp1,4 triliun atau meningkat 46,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,0 triliun. Pencapaian tersebut meningkatkan pangsa aset perusahaan asuransi syariah terhadap total aset industri asuransi menjadi 1,2%.

Investasi perusahaan asuransi didominasi oleh portofolio obligasi pemerintah (SUN) dan deposito. Fenomena yang menarik dari perilaku investasi industri asuransi



Grafik 9.17
Perkembangan Dana Pensiun



Grafik 9.18
Portofolio Investasi Dana Pensiun

adalah meningkatnya minat perusahaan asuransi untuk berinvestasi dalam SUN. Dalam lima tahun terakhir, portofolio SUN meningkat sebesar Rp35,5 triliun dari Rp6,5 triliun pada akhir tahun 2002 menjadi Rp42,0 triliun pada Oktober 2007. Sementara simpanan deposito hanya meningkat sebesar Rp9,5 triliun dari Rp31,0 triliun menjadi Rp40,5 triliun. Hal tersebut menandakan terjadinya pergeseran dominasi portofolio investasi dari deposito ke SUN yang tercermin dari rasio SUN terhadap deposito yang mencapai 103,8% (Grafik 9.16). Perubahan perilaku investasi perusahaan asuransi tersebut mendorong perkembangan pasar SUN dan secara tidak langsung membantu mengurangi eksekusi likuiditas perbankan.

Dana Pensiun

Kinerja dana pensiun juga mengalami peningkatan yang mengesankan. Total aktiva bersih industri dana pensiun secara konsisten mempunyai tren yang meningkat walaupun jumlah perusahaan penyelenggara dana pensiun mengalami penurunan sejak tahun 2002. Sampai dengan November 2007, jumlah perusahaan penyelenggara dana pensiun sebanyak 288 perusahaan atau turun 16% dari tahun 2002 sebanyak 343 perusahaan. Sementara itu, total aktiva bersih dana pensiun pada tahun 2007 diprediksi akan tumbuh sekitar 20% sehingga mencapai sekitar Rp93,0 triliun. Nilai aktiva bersih tersebut meningkat 125,6% dibandingkan dengan posisi tahun 2002 yang tercatat sebesar Rp41,2 triliun (Grafik 9.17).

Portofolio investasi perusahaan dana pensiun masih didominasi oleh deposito dan obligasi, baik obligasi pemerintah (SUN) maupun obligasi korporasi. Perilaku investasi perusahaan dana pensiun hampir sama dengan perusahaan asuransi yang pada awalnya sangat mengandalkan investasi pada deposito sehingga porsi simpanan deposito mencapai 70%. Namun sejak tahun 2003, porsi simpanan deposito terus mengalami penurunan sehingga pada akhir tahun 2006 tinggal sebesar 28,6% (Grafik 9.18). Sementara itu, porsi portofolio obligasi, terutama SUN mengalami lonjakan yang signifikan, sehingga porsi portofolio SUN dan deposito nyaris berimbang. Fenomena tersebut cukup menggembirakan karena dana pensiun yang mengelola dana jangka panjang masyarakat merupakan investor potensial bagi pasar obligasi sehingga diharapkan dapat menjadi pemain utama di pasar SUN.

Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya

Dengan mengacu kepada *Master Plan* Pasar Modal Indonesia, kebijakan pasar modal tetap ditekankan pada peningkatan infrastruktur, efisiensi, daya saing dan pengawasan. Secara kelembagaan, pada tahun

2007 dilakukan penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi kegiatan di pasar modal, penggabungan bursa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing pasar modal Indonesia. Sementara itu, untuk menyempurnakan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), pada tahun laporan kembali dilakukan penyesuaian RUU tentang Perubahan UUPM agar selaras dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Di sisi pengawasan, kegiatan pemeriksaan dan uji kepatuhan terhadap lembaga efek juga terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kepercayaan investor, kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*. Untuk menjamin ketersediaan informasi dan keterbukaan di pasar modal, pada tahun laporan dikeluarkan peraturan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten⁵. Untuk industri reksadana, peningkatan *governance* salah satunya dilakukan dengan menyempurnakan peraturan terkait dengan pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dana pensiun⁶, diterbitkan peraturan mengenai Laporan Teknis Dana Pensiun. Peraturan tersebut terutama ditujukan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi teknis dana pensiun, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

Untuk mendorong pendalaman pasar keuangan, pengembangan instrumen baru terus dilakukan. Pada tahun 2007 dikeluarkan dua paket peraturan untuk memberikan landasan bagi penerbitan instrumen baru. Paket peraturan pertama ditujukan untuk penerbitan obligasi daerah. Selain dapat memperkaya instrumen di pasar keuangan, penerbitan obligasi daerah juga memberikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah. Paket peraturan kedua ditujukan untuk mengatur penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE KIK).

Pengembangan pasar keuangan syariah terus digalakkan. Sejak tahun laporan, Bapepam-LK secara reguler mengeluarkan Daftar Efek Syariah⁷ untuk memberikan panduan bagi reksadana syariah dalam menempatkan

5 Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007.

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

7 Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

dana kelolaannya. Di samping itu, kebijakan untuk mendorong berdirinya perusahaan pembiayaan syariah juga dilakukan. Dua peraturan dikeluarkan untuk memberikan landasan bagi kegiatan perusahaan pembiayaan syariah berikut akad-akad yang dapat digunakan dalam kegiatan tersebut⁸. Sementara itu, untuk mendukung penerbitan obligasi syariah (*sukuk*), Bapepam-LK telah melakukan kajian penyusunan perlakuan akuntansi *sukuk*, khususnya *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah*.

Kebijakan pada industri asuransi ditekankan pada peningkatan kualitas manajemen perusahaan. Upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas dari direksi dan komisaris perusahaan asuransi, salah satunya, dilakukan dengan menyempurnakan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan⁹, termasuk di dalamnya, pelaksanaan *fit and proper test*. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan volume usaha industri asuransi juga terus digalakkan, antara lain, melalui: (i) edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; (ii) pengembangan produk asuransi; dan (iii) peningkatan strategi pemasaran, khususnya pemasaran melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*).

8 Peraturan Bapepam-LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tanggal 24 Juli 2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Grand Strategy Pengembangan Perbankan Syariah sebagai Bagian dari Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah

Potensi pengembangan pasar perbankan syariah masih sangat terbuka. Hal itu tercermin dari jumlah rekening milik masyarakat pengguna jasa bank pada bank konvensional yang telah mencapai lebih dari 80 juta rekening. Dengan melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia kemudian berinisiatif untuk melaksanakan Program Akselerasi Perbankan Syariah yang selanjutnya diikuti oleh program "iB Campaign 2008". Melalui program itu, Bank Indonesia mengajak seluruh pelaku industri perbankan syariah untuk menyinergikan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi publik sehingga lebih dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan bank syariah serta mendorong antusiasme masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah. Pada akhirnya, keberhasilan program sosialisasi tersebut akan sangat membantu pencapaian target akselerasi yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengembangan tersebut diperlukan *market positioning* yang tepat bagi industri perbankan syariah untuk melakukan penetrasi ke segmen yang lebih luas dalam rangka mendorong peningkatan jumlah nasabah bank syariah dari posisi saat ini yang mencapai 3 juta rekening.

Dalam konteks strategi kompetisi, industri kemapanan sistem perbankan konvensional yang telah memiliki skala ekonomi yang masif perlu direspons secara lebih inovatif oleh perbankan syariah. Strategi imitasi terhadap produk bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*market-driven*) hanya akan menghasilkan produk bank syariah yang mirip dan tidak memiliki diferensiasi yang jelas sehingga masyarakat tidak dapat melihat apa nilai lebih yang ditawarkan. Sebagai akibatnya, tidak ada daya pikat yang kuat bagi masyarakat untuk mencoba menggunakan produk bank syariah. Dihadapkan pada dua produk yang mirip, masyarakat pengguna jasa perbankan sebagai *target market*¹ akan bersikap *indifferen* dan cenderung memilih produk yang telah mapan. Dalam jangka panjang, strategi *market-driven*

juga tidak akan memberikan keunggulan komparatif yang berkesinambungan bagi perbankan syariah².

Dengan kekhasan sistemnya yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, sebenarnya perbankan syariah dapat memosisikan dirinya sebagai sebuah *market-driving industry* yang secara mandiri membentuk pasarnya (*shaping the market*) sesuai dengan kelebihan-kelebihan unik yang melekat pada dirinya³. Pengembangan *market-driving strategy* itu dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pengembangan kapasitas untuk berinovasi pada tahap awal pengembangan strategi dan penawaran proposisi values (*value proposition*) kepada *target market* pada tahap implementasi strategi.

Tahap pengembangan kapasitas inovasi terkait erat dengan pengembangan kompetensi SDM dan kultur organisasi yang mendukung/menghargai proses kreatif, mendorong eksperimen serta pemikiran *out-of-the-box* dalam proses inovasi produk. Kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan pasar dan menangkap "*unspoken needs*" dari *target market* harus diutamakan dalam mengembangkan produk⁴ sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi juga mampu mengarahkan perilaku *target market* dan membentuk struktur pasar yang sesuai dengan keunggulan perbankan syariah.

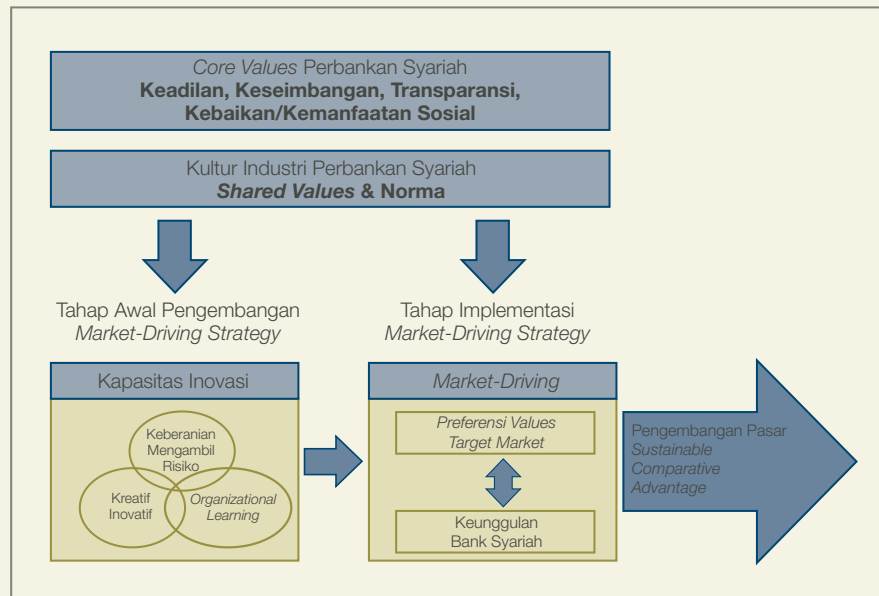
Tahap peningkatan proposisi nilai dapat diartikan bagaimana bank syariah dapat menawarkan values yang lebih tinggi kepada *target market* dibandingkan

1 "Nielsen Consumer Insight", The Nielsen Company-Bank Indonesia, November 2007. Data dari The Nielsen menunjukkan bahwa profil segmen masyarakat yang menjadi *target market* untuk produk dan jasa perbankan di Indonesia adalah populasi dengan karakter yang optimistis, dalam zona kenyamanan materi (*material comfort*) serta modern.

2 Johnston, Lean L., Ruby Pui-Wan Lee, Amit Sani and Bianca Grohmann. 2003. "Market-focused Strategic Flexibility: Conceptual Advances and an Integrative Model." *Journal of the Academy of Marketing Science* 31 (1): 74-89: "If every actor in the market follows a market-driven strategy and every firm adapts to competitors' strategic moves and stays aligned with consumers requirements, then no actor will be able to offer a value proposition superior to the competition."

3 Carrillat, François A., Fernando Jaramillo, William B. Locander, "Market-Driving Organizations: A Framework." *Academy of Marketing Science Review* 2004, <http://www.amsreview.org/articles/carrillat05-2004.pdf>: "Market-driving organizations may achieve greater performance than market-driven organizations by reshaping the structure of the market according to their own competencies and by exploiting the competitors' weaknesses."

4 Focus Group Discussion "Profil Strategi Penetrasi Pasar Perbankan Syariah di Indonesia: Kendala & Tantangan 2008", Bank Indonesia bersama industri perbankan syariah, Jakarta 6 November 2007.



dengan *values* yang ditawarkan oleh pihak lain. *Values* yang ditawarkan dapat berasal dari produk, pelayanan, *business process*, SDM, komunikasi, maupun fasilitas fisik. Dalam kerangka itu, *core values* perbankan syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemanfaatan sosial, sebenarnya, merupakan sumber *values* yang berlimpah yang dapat diaplikasikan ke dalam semua aspek dan kegiatan operasional bank syariah yang kemudian dapat dikedepankan dalam pemasaran kepada masyarakat.

Strategi komunikasi dan promosi yang mengedepankan nilai-nilai khas perbankan syariah tersebut dengan bahasa yang terbuka dan universal, secara langsung, akan menciptakan diferensiasi bagi produk-produk bank syariah yang membedakannya dari produk lain. Lebih dari itu, secara tidak langsung strategi tersebut secara bertahap akan membentuk pasar dan menciptakan preferensi baru dari masyarakat terhadap produk-produk yang memiliki dimensi lebih luas dari sekedar dimensi keuangan. Sebagai contoh, nilai keadilan dan kemanfaatan sosial dari bank syariah dapat digunakan untuk menciptakan preferensi masyarakat ke arah *socially responsible investment* dan *ethical banking* maupun *community*

development banking. Ketiganya sesungguhnya merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bank syariah dan sekaligus menjadi keunggulan komparatifnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Bank Indonesia merumuskan *Grand Strategy* Pengembangan Perbankan Syariah yang akan menjadi panduan utama dalam melakukan kegiatan edukasi publik/sosialisasi dan pengembangan perbankan syariah. *Grand strategy* itu, yang meliputi strategi sosialisasi/komunikasi, *branding strategy*, *product development strategy*, dan peningkatan kualitas pelayanan, disusun dengan melibatkan pelaku perbankan syariah sehingga rancangan yang dihasilkan adalah milik bersama yang dibuat secara bersama-sama, dan dalam semangat yang sama untuk mengakselerasi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 2007 juga telah dimulai upaya menyosialisasikan industri perbankan syariah melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di berbagai media. Sementara itu, pada tahun 2008, di samping melanjutkan ILM, program sosialisasi dilakukan pula melalui Festival Ekonomi Syariah (FES) di Jakarta dan beberapa kota besar yang menyajikan perkembangan sektor riil dan industri yang telah memanfaatkan jasa keuangan dan perbankan syariah. Program FES ini rencananya akan diselenggarakan setiap tahun.



Bab 10

Sistem Pembayaran Nasional

Bab 10: Sistem Pembayaran Nasional

Di bidang sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk membangun infrastruktur sistem pembayaran yang semakin andal, cepat, akurat, aman, dan efektif dalam menopang seluruh kegiatan transaksi swasta dan pemerintah di seluruh pelosok negeri. Sistem pembayaran yang demikian memiliki arti penting bagi pemeliharaan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Di sisi pengedaran uang, Bank Indonesia mampu memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat yang masih cenderung meningkat disertai dengan upaya penyebaran uang layak edar yang semakin merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan uang di Bank Indonesia serta optimalisasi manajemen kas perbankan meningkat pascapenerapan kebijakan uji coba setoran bayaran bank. Hal tersebut tercermin dari penurunan aktivitas aliran uang keluar dari Bank Indonesia (*outflow*) dan aliran uang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) yang cukup signifikan. Di sisi pembayaran nontunai, secara umum aktivitas transaksi tahun 2007 mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nilai. Faktor utama yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat cukup signifikan dan kondisi perekonomian yang semakin kondusif. Faktor-faktor lain adalah maraknya aktivitas transaksi di pasar keuangan, pergeseran preferensi cara pembayaran, dan inovasi teknologi di bidang sistem pembayaran. Upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan pembayaran nontunai mulai membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari tren peningkatan rasio total transaksi nontunai per kapita sebesar 18% per tahun.

Perkembangan Aktivitas Pembayaran

Instrumen Pembayaran Tunai

Berkembangnya sentra-sentra ekonomi di berbagai daerah di Indonesia dan masih cukup kentalnya budaya masyarakat Indonesia untuk memegang fisik uang dalam kegiatan transaksi berdampak pada peningkatan jumlah uang kartal tahun 2007. Rata-rata jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat (UYD) mencapai Rp174,8 triliun atau meningkat sebesar 21,0%, lebih besar dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 14,6% (Grafik 10.1). Untuk mendukung kenaikan UYD tersebut, realisasi penambahan kebutuhan uang kartal di seluruh wilayah mencapai Rp115,4 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penambahan kebutuhan uang kartal tersebut menurun 0,6%, yang dipengaruhi oleh langkah efisiensi sejak tahun 2006 berupa optimalisasi persediaan uang kartal di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mengalami *net inflow* dan membaiknya manajemen pengelolaan kas perbankan. Berdasarkan penyebarannya, terdapat kenaikan pangsa distribusi uang kartal terutama ke wilayah Indonesia Timur yaitu dari 8,9% menjadi

10,6%. Kenaikan pangsa di wilayah tersebut antara lain disebabkan peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi.

Pengelolaan manajemen kas perbankan semakin optimal tercermin dari menurunnya *outflow* dan *inflow* secara signifikan sepanjang tahun 2007. Jumlah *outflow* dan *inflow* uang kartal menurun masing-masing sebesar 42,1% dan 49,4%. Penurunan tersebut merupakan dampak langsung dari diterapkannya kebijakan uji coba setoran bayaran bank di mana perbankan hanya diperkenankan untuk menyetorkan uang ke Bank Indonesia dalam keadaan tidak layak edar. Menurunnya *outflow* yang disertai dengan kenaikan persediaan kas sebesar 20,8% pada akhir tahun laporan menyebabkan rasio kas Bank Indonesia meningkat menjadi sekitar 3 sampai 4 bulan rata-rata *outflow*.

Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)

Pertumbuhan rata-rata UYD pada tahun 2007 lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh faktor fundamental meningkatnya perekonomian. Secara triwulanan fluktuasi UYD masih

dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, seperti hari raya keagamaan, tahun baru, dan liburan sekolah. Hal tersebut terlihat dari rata-rata UYD tertinggi yang dicapai pada triwulan IV-2007 sebesar Rp200,4 triliun (tabel 10.1).

Bank Indonesia berhasil memenuhi lonjakan kebutuhan uang kartal pada saat terjadi bencana, seperti banjir. Bencana banjir di sebagian wilayah kota Jakarta pada awal Februari 2007 mendorong lonjakan penarikan uang kartal terutama karena adanya peralihan sebagian transaksi yang biasanya dilakukan secara nontunai. Penarikan uang tunai oleh bank di wilayah Jakarta selama masa tersebut sempat meningkat dari rata-rata Rp300 miliar per hari menjadi Rp900 miliar dapat dipenuhi. Selain ketersediaan uang yang cukup, pemenuhan tersebut didukung oleh langkah-langkah penanganan dan pengamanan fisik uang kartal sesuai dengan prosedur manajemen bencana di Bank Indonesia.

Posisi uang kartal di perbankan yang meningkat pascapenerapan uji coba setoran bayaran berangsur-angsur kembali normal seiring dengan mulai berjalannya langkah-langkah optimalisasi manajemen kas perbankan dan terselenggaranya mekanisme transaksi uang kartal antarbank. Awal tahun 2007 pangsa uang kartal di perbankan mencapai 17,7% dari total UYD atau naik dibandingkan dengan posisi yang sama tahun-tahun sebelumnya masing-masing 14,1% (tahun 2006) dan 15,1% (tahun 2005). Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan uang kartal, Bank Indonesia mendorong terselenggaranya mekanisme transaksi uang kartal antarbank agar bank yang mengalami kelebihan uang pecahan tertentu dapat melakukan transaksi dengan

Tabel 10.1
Perkembangan UYD

Periode	2006	Pertumbuhan (yoy)	2007	Pertumbuhan (yoy)
Triwulan-I	132,7	12,6%	160,8	21,2%
Triwulan-II	135,9	15,2%	160,7	18,3%
Triwulan-III	147,3	15,6%	176,7	20,0%
Triwulan-IV	161,7	14,8%	200,4	23,9%
	144,5	14,6%	174,8	21,0%

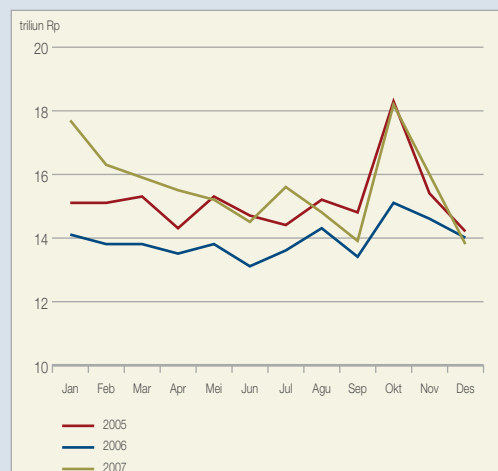
triliun Rp

bank lain yang memerlukan di wilayahnya. Kebijakan Bank Indonesia tersebut juga mendorong perbankan untuk mengoptimalkan manajemen kas dengan melakukan pemantauan kelebihan ataupun kekurangan uang kas di wilayah kerjanya secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan operasional dan proyeksi penarikan uang nasabah. Melalui berbagai upaya tersebut, sejak bulan Mei kondisi likuiditas uang kartal di perbankan mulai normal dan mengikuti pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya (Grafik 10.2).

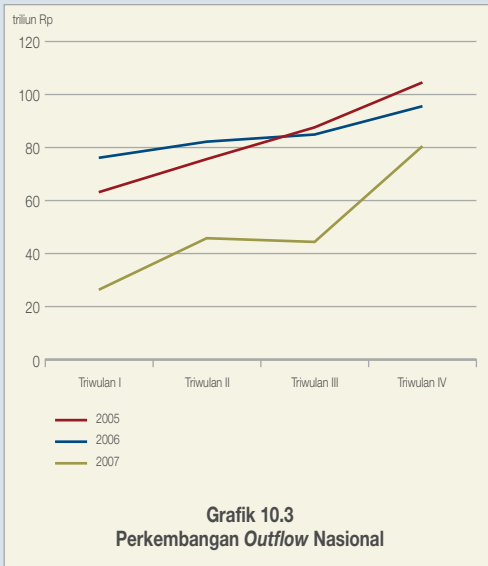
Selama dua tahun terakhir, nominal dan pangsa uang kertas (UK) yang diedarkan menunjukkan peningkatan. Pangsa UK yang diedarkan pada akhir tahun 2007 meningkat dari 98,4% menjadi 98,8%. Secara nominal, sebagian besar UK yang diedarkan tersebut adalah pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 yang masing-masing mencakup 45,0% dan 42,6% dari total UYD. Berdasarkan jumlah lembar/keping, pangsa uang pecahan kecil (Rp10.000 ke bawah) masih mendominasi meskipun mengalami penurunan dari 90,2% pada tahun 2006 menjadi 86,3% dari total jumlah lembar/keping UYD.



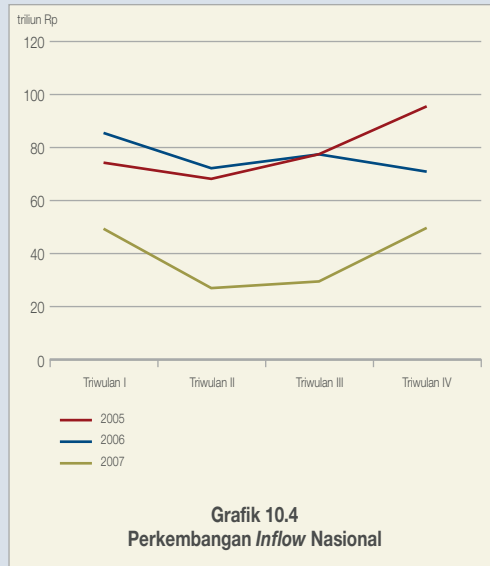
Grafik 10.1
Perkembangan UYD



Grafik 10.2
Pangsa UYD di Perbankan



Grafik 10.3
Perkembangan *Outflow* Nasional



Grafik 10.4
Perkembangan *Inflow* Nasional

Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia

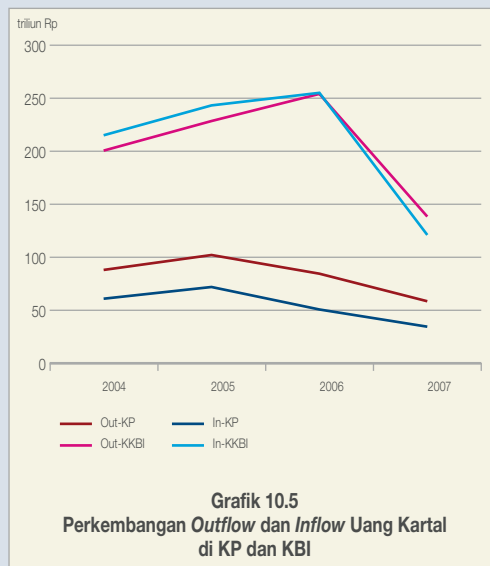
Efisiensi pengelolaan uang kartal di Bank Indonesia dan pengelolaan manajemen uang kartal di perbankan meningkat setelah diterapkannya uji coba setoran bayaran bank.¹ Hal tersebut tercermin dari menurunnya *outflow* dan *inflow* secara signifikan, masing-masing menjadi sebesar Rp195,9 triliun dan Rp154,3 triliun atau turun 42,1% dan 49,4%. Pola fluktuasi *outflow* dan *inflow* selama tahun 2007 ini hampir sama dengan 2005 tetapi dengan level yang jauh lebih rendah (Grafik 10.3 dan Grafik 10.4). Secara regional, penurunan jumlah *outflow* dan *inflow* di KBI lebih dalam dibandingkan dengan penurunan *outflow* dan *inflow* di KP. Hal tersebut disebabkan penerapan uji coba setoran bayaran di di KP telah dilakukan sejak Mei 2006, sedangkan di KBI baru diberlakukan pada Desember 2006 (Grafik 10.5).

Kebutuhan uang kartal di masyarakat yang meningkat tercermin dari terjadinya *net outflow*. Jumlah *net outflow* pada tahun 2007 sebesar Rp41,6 triliun atau naik 26,0% dari jumlah *net outflow* tahun sebelumnya. Pola *net outflow* di KP tidak berubah, meskipun jumlahnya menurun dari Rp34,0 triliun tahun 2006 menjadi Rp24,2 triliun pada tahun 2007. Sebaliknya, di wilayah KBI terjadi perubahan pola dari *net inflow* menjadi *net outflow* yang mencapai Rp17,4 triliun (Grafik 10.6). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses penyesuaian kebutuhan uang kartal masih terjadi di KBI, sedangkan di wilayah KP telah tercermin kebutuhan riil uang kartal oleh masyarakat.

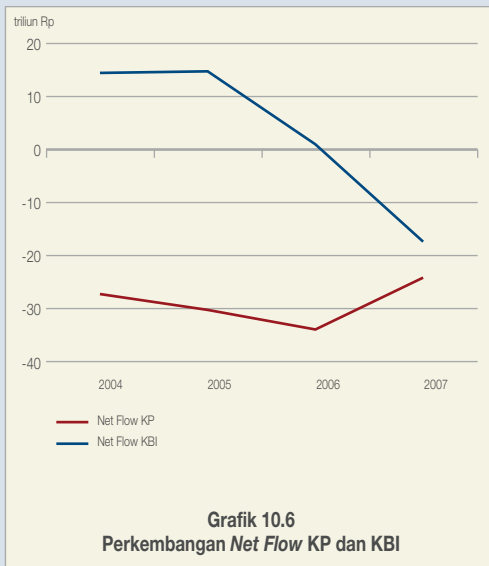
1 Kebijakan diskresi mengacu pada Surat Edaran No. 9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia menetapkan bahwa bank dapat menyetorkan uang yang masih layak edar ke Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Posisi Kas Bank Indonesia

Rasio kecukupan posisi kas terhadap rata-rata *outflow* lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 3-4 bulan rata-rata *outflow*. Peningkatan kualitas rasio tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata *outflow* sehingga memungkinkan Bank Indonesia dapat memelihara jumlah rata-rata posisi kas yang lebih rendah. Jumlah posisi kas Bank Indonesia terendah pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp47,2 triliun, sedangkan posisi kas tertinggi sebesar Rp83,7 triliun. Sejalan dengan kebutuhan denominasi uang masyarakat, sebagian besar posisi kas Bank Indonesia adalah pecahan Rp20.000 ke atas. Tahun 2007, pecahan uang kertas



Grafik 10.5
Perkembangan *Outflow* dan *Inflow* Uang Kartal di KP dan KBI



Grafik 10.6
Perkembangan Net Flow KP dan KBI

Rp50.000 dan Rp100.000 masing-masing mencapai 51,3% dan 34,6% dari total posisi kas Bank Indonesia. Sementara berdasarkan lembar/keping uang, pecahan terbanyak adalah Rp1.000 dan Rp50.000 masing-masing sebesar 25,1% dan 23,2%. Dengan komposisi tersebut, ketersediaan uang kertas pecahan besar (Rp20.000 ke atas) mampu memenuhi 3 sampai 4 bulan rata-rata *outflow* dan uang kertas pecahan kecil mencapai 5 sampai 6 bulan rata-rata *outflow*. Ketersediaan uang logam dapat memenuhi 9 sampai 10 bulan rata-rata *outflow*.

Pemusnahan Uang

Tingkat kelusutan dan kualitas uang yang beredar di masyarakat menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tercermin dari menurunnya jumlah nominal uang yang dimusnahkan sebesar 7,8%, meskipun uang kartal yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2007, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 4,1 miliar lembar atau turun 14,6%. Sebagian besar uang yang dimusnahkan adalah pecahan Rp1.000 dan Rp50.000 masing-masing sebesar 38,3% dan 17,7% dari total jumlah lembar uang kertas yang dimusnahkan. Sejalan dengan diterapkannya kebijakan penyeteroran uang tidak layak edar oleh perbankan, rasio pemusnahan terhadap *inflow* masih relatif rendah meskipun telah meningkat dari 27,2% menjadi 49,9%. Masih relatif rendahnya rasio pemusnahan terhadap *inflow* terutama disebabkan adanya kebijakan diskresi² dalam prosedur penyeteroran uang oleh perbankan yang

memungkinkan adanya setoran uang layak edar dan masih adanya bank-bank yang belum sepenuhnya patuh dalam menyetorkan uang tidak layak edar.

Perkembangan Temuan Uang Palsu

Rasio temuan uang palsu menurun pada tahun 2007. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain berbagai upaya penanggulangan meluasnya peredaran uang palsu dan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah. Rasio temuan uang palsu selama tahun 2007 tercatat 8 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan. Rasio tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 17 lembar temuan uang palsu per satu juta lembar uang kertas yang diedarkan. Berdasarkan wilayah, temuan uang palsu terbesar berasal dari wilayah Kantor Koordinator Bank Indonesia (KKBI) Surabaya (33,2%), wilayah Kantor Pusat (27,0%), dan KKBI Semarang (13,4%).

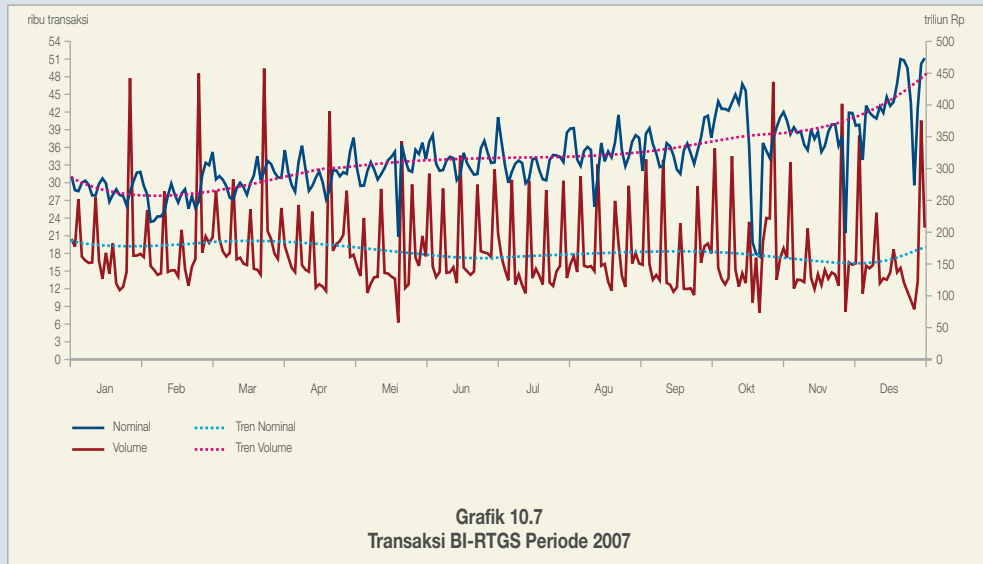
Instrumen Pembayaran Nontunai

Aktivitas transaksi pembayaran selama tahun 2007 secara umum mengalami peningkatan, baik dari sisi volume maupun nilai. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kondisi perekonomian yang kondusif merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi. Selain itu, meningkatnya perdagangan pada pasar keuangan, pergeseran preferensi cara pembayaran, dan inovasi teknologi sistem pembayaran turut memberikan kontribusi positif pada perkembangan transaksi pembayaran.

Peningkatan aktivitas perdagangan di pasar keuangan telah mendorong peningkatan transaksi pembayaran bernilai besar (Rp100 juta ke atas). Meningkatnya transaksi perdagangan saham yang dan meningkatnya aktivitas perdagangan obligasi serta berbagai produk derivatifnya di pasar modal telah berkontribusi cukup besar pada peningkatan aktivitas transaksi pembayaran bernilai besar. Selain itu, aktivitas transaksi industri perbankan, korporasi besar, lembaga pemerintah, dan transaksi Bank Indonesia untuk pengelolaan moneter juga turut mendorong peningkatan transaksi pembayaran bernilai besar.

Pergeseran cara pembayaran serta inovasi teknologi sistem pembayaran mendorong peningkatan transaksi pembayaran ritel (di bawah Rp100 juta). Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan masyarakat mulai beralih dari cara pembayaran dari tunai ke metode pembayaran nontunai. Berdasarkan hasil survei yang

² Kebijakan yang hanya memperkenankan bank menyetorkan uang tidak layak edar. Penerapan kebijakan uji coba setoran bayaran untuk seluruh pecahan dilakukan secara bertahap, masing-masing pada bulan Mei 2006 di KP dan Desember 2006 di seluruh wilayah KBI.



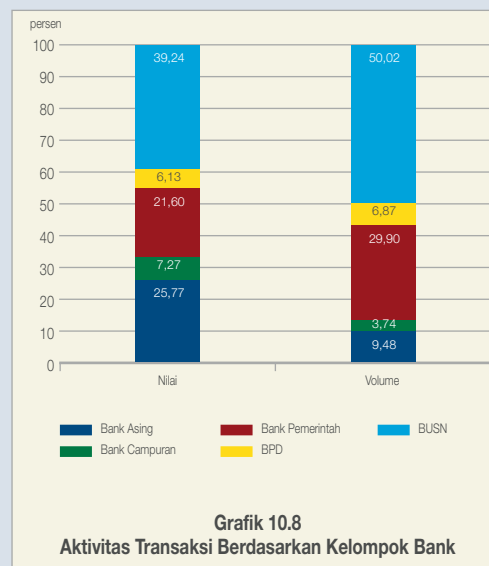
dilakukan tahun 2006 dan 2007³, pergeseran penggunaan instrumen pembayaran mulai terjadi, dari alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) seperti uang kertas, cek, dan bilyet giro, ke instrumen pembayaran berbasis kartu (*card based*) seperti kartu ATM/kartu debit, kartu kredit, dan *electronic money (e-money)*, terutama pada masyarakat perkotaan. Selain pergeseran preferensi, berbagai inovasi teknologi di bidang sistem pembayaran juga berkontribusi positif atas peningkatan penggunaan alat pembayaran nontunai. Di pasar ritel, sudah banyak lembaga keuangan yang memanfaatkan teknologi *internet banking*, *mobile banking* dan *phone banking* sebagai sarana transfer dana.

Perkembangan Transaksi RTGS

Total transaksi pembayaran yang *settlement*-nya dilakukan melalui sistem BI-RTGS tahun 2007 menunjukkan peningkatan, baik secara nilai maupun volume. Total nilai transaksi BI-RTGS mencapai 42,4 ribu triliun atau naik 45,6% dari posisi tahun sebelumnya (Rp29,1 ribu triliun). Sementara itu, volume transaksi mencapai 8,5 juta transaksi atau meningkat 22,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,9 juta transaksi), sehingga rata-rata harian (RRH) transaksi RTGS secara nilai dan volume mencapai Rp170 triliun dan 34 ribu transaksi. Peningkatan aktivitas transaksi tertinggi terjadi pada triwulan terakhir yang merupakan periode *high season* karena banyaknya transaksi pembayaran untuk kebutuhan perayaan beberapa hari besar keagamaan dan kebutuhan

pembayaran korporasi dan lembaga pemerintah pada akhir tahun.

Pelaku utama aktivitas transaksi pembayaran pada sistem BI-RTGS adalah industri perbankan dengan pangsa sebesar 92,8% dari volume dan 58,2% dari nilai. Peningkatan aktivitas transaksi perbankan terbesar berasal dari jenis transaksi untuk transfer nasabah dengan pangsa sebesar 50%. Hal tersebut mengindikasikan sebagian besar nasabah bank telah mulai terbiasa memanfaatkan mekanisme transfer dan penyelesaian transaksi melalui sistem RTGS. Kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) merupakan peserta terbesar karena adanya



3 Survey terkait inisiatif "Less Cash Society" yang terdiri dari Survey Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa terhadap Sistem Pembayaran Nontunai (tahun 2006) dan Survei Komposisi Tabungan yang Digunakan untuk Aktivitas Pembayaran (tahun 2007).

Tabel 10.2
Transaksi BI-RTGS Berdasarkan Jenis Transaksi

Jenis Transaksi	Nilai (triliun Rp)			%	Jenis Transaksi	Volume		
	2006	2007	Naik/Turun			2006	2007	Naik/Turun
PUAB	4.206	5.816	38,26%	PUAB	133.797	146.423	9,44%	
Nasabah	5.088	7.401	45,45%	Nasabah	5.362.485	6.776.777	26,37%	
Transaksi Valas	2.624	3.969	51,25%	Transaksi Valas	154.075	176.944	14,84%	
Settlement Pasar Modal	1.238	2.530	104,29%	Settlement Pasar Modal	37.241	63.980	71,80%	
Pemerintah	986	1.178	19,49%	Pemerintah	176.972	243.900	37,82%	
Pengelolaan Moneter	10.213	15.620	52,94%	Pengelolaan Moneter	54.441	46.497	-14,59%	
Settlement Kliring	3.682	4.793	30,18%	Settlement Kliring	470.232	365.033	-22,37%	
Lainnya	1.065	629	-40,93%	Lainnya	535.906	591.911	10,45%	

keunggulan fasilitas pembayaran yang ditawarkan yaitu keragaman dan kemudahan. Kontribusi transaksi dari kelompok bank ini mencapai 39,2% (nominal) dan 50% (volume). Selanjutnya, adalah kelompok bank pemerintah yang terdiri dari empat bank, tetapi dari sisi pangsa cukup signifikan karena mencapai 21,6% (nominal) dan 28,9% (volume) seperti terlihat pada Grafik 10.8.

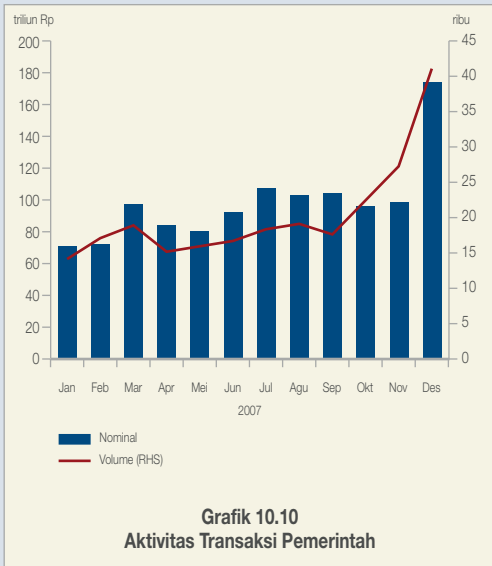
Berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan, aktivitas yang terkait langsung dengan ekonomi masyarakat adalah *settlement* pasar modal, valas, dan transfer untuk nasabah. Prosentase peningkatan tertinggi terjadi pada transaksi pasar modal dengan kenaikan sebesar 104,29% dan 71,8% untuk nilai dan volume transaksi (Grafik 10.9). Peningkatan di luar pola ini tampaknya merefleksikan semakin maraknya aktivitas transaksi saham dan obligasi selama tahun 2007.

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan perputaran transaksi yang tercatat pada lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yaitu sebesar 94% untuk nilai dan 89,5% untuk volume.

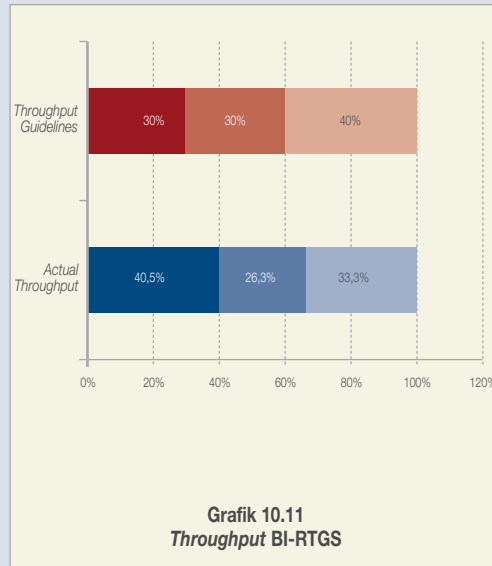
Penyumbang utama peningkatan nilai transaksi RTGS adalah transaksi dalam rangka pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, transaksi terkait pengelolaan moneter meningkat sebesar 48,9%. Komposisi transaksi ini mencapai 60%, yang umumnya berasal dari jenis transaksi intervensi rupiah, pembelian SBI, SWBI, dan SUN serta transaksi lain terkait pengelolaan moneter. Sementara itu, aktivitas transaksi pemerintah juga mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pengeluaran Pemerintah (Grafik 10.10).



Grafik 10.9
Perputaran Transaksi Pasar Modal pada Sistem BI-RTGS



Grafik 10.10
Aktivitas Transaksi Pemerintah



Grafik 10.11
Throughput BI-RTGS

Pengelolaan Likuiditas Sistem BI-RTGS

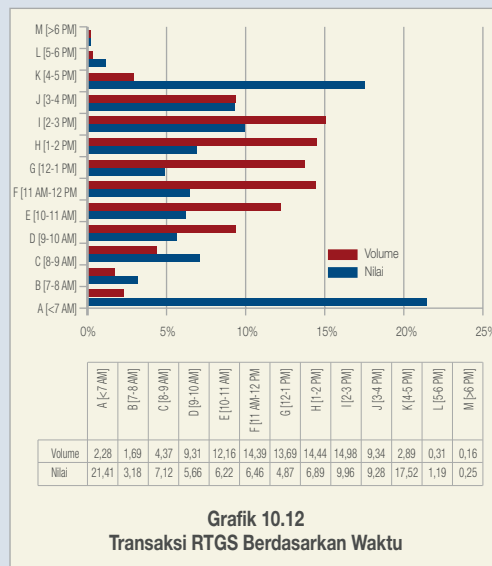
Kepedulian Bank Indonesia untuk tetap menjamin kelancaran transaksi pembayaran peserta RTGS tercermin dari adanya sistem pemantauan likuiditas peserta RTGS. Selama tahun laporan likuiditas di pasar uang tercatat cukup baik, tercermin dari tidak adanya kondisi *gridlock*⁴. Agar potensi terjadinya *gridlock* dapat dihindari, Bank Indonesia memantau likuiditas untuk mendeteksi secara dini kemampuan peserta RTGS untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada penggalan waktu terakhir. Indikator *throughput* juga menggambarkan proporsi waktu *settlement* terjaga cukup baik, yaitu mencapai 66,8% pada penggalan waktu *settlement* di awal dan pertengahan hari (Grafik 10.11). Hal tersebut mengindikasikan kebutuhan likuiditas pada operasional sistem BI-RTGS sampai akhir hari tidak terlalu ketat dan tersebar secara merata.

Dilihat dari waktu operasional RTGS, nilai *settlement* transaksi tertinggi terjadi di pagi hari, yaitu sebelum pukul 07.00 WIB (Grafik 10.12). Nilai tersebut mencapai 21,4% dari seluruh nilai transaksi yang di-*settle* selama satu hari. Transaksi pembayaran yang mendominasi pada rentang waktu tersebut adalah transaksi intervensi rupiah (45%), kemudian transaksi pelunasan SBI dan SBI (30,6%), transaksi *prefund* kliring (17,7%). Transaksi pelunasan SBI dan SWBI sangat efektif dalam membantu melikuidkan pasar keuangan sehingga kebutuhan likuiditas peserta RTGS untuk melakukan transaksi sepanjang hari dapat terpenuhi. Rentang waktu lainnya yang cukup tinggi penyelesaian transaksinya adalah pada pukul 16.00-17.00

WIB, terutama dalam rangka menalangi kewajiban bagi peserta pada sistem kliring. Dari sisi aktivitas transaksi, volume terbanyak terjadi pada siang hari, yaitu pada rentang waktu pukul 14.00-15.00 WIB. Volume tersebut mencapai 14,98 % dari seluruh volume transaksi selama satu hari. Pada rentang itu transaksi terbanyak berasal dari jenis transaksi transfer dana nasabah yang mencapai 83,6%, sementara sisanya transaksi PUAB dan transaksi pasar modal.

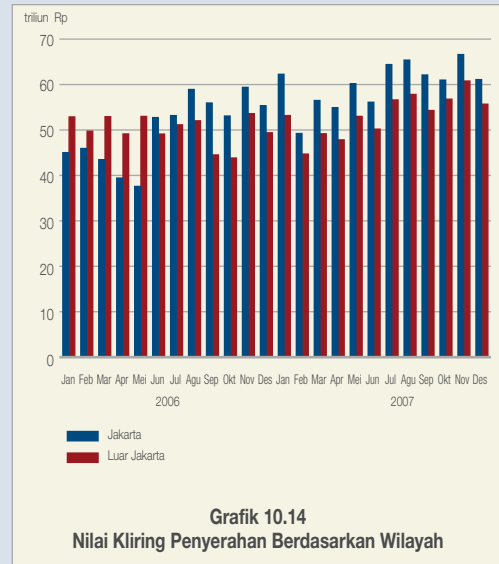
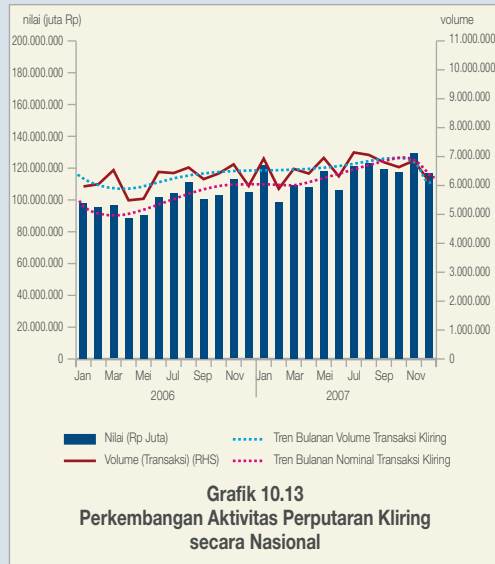
Perkembangan Transaksi Kliring

Sejalan dengan transaksi RTGS, aktivitas transaksi kliring yang mencerminkan aktivitas transaksi ritel di masyarakat



Grafik 10.12
Transaksi RTGS Berdasarkan Waktu

4 *Gridlock* adalah terhentinya sistem *settlement* karena adanya bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran.



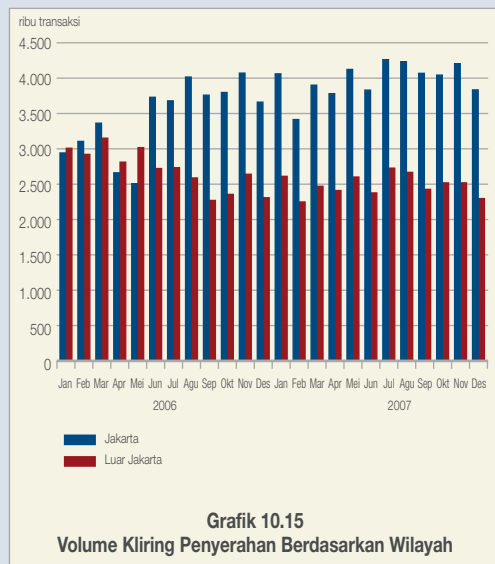
juga menunjukkan kenaikan. Nilai transaksi selama periode laporan meningkat sebesar 13,1% menjadi sebesar Rp1.389 triliun dengan RRH Kliring Rp5,6 triliun (Grafik 10.13). Dari sisi volume, jumlah transaksi meningkat sebesar 7,12% menjadi 79,5 juta transaksi dengan RRH sebesar 319 ribu transaksi. Dari total transaksi di atas, proporsi aktivitas transfer kredit dan kliring warkat debit relatif berimbang. Volume transfer kredit tercatat sebesar 37,6 juta transaksi sementara kliring warkat debit sebesar 40,1 juta transaksi. Secara nilai, transaksi transfer kredit mencapai Rp365 triliun dan kliring warkat debit mencapai Rp994 triliun. Dari sisi wilayah pemrosesan, aktivitas kliring di Jakarta masih mendominasi dengan pangsa mencapai

52% (Rp718,9 triliun) dan 60% (47,8 juta transaksi) untuk nilai dan volume (Grafik 10.14 dan Grafik 10.15).

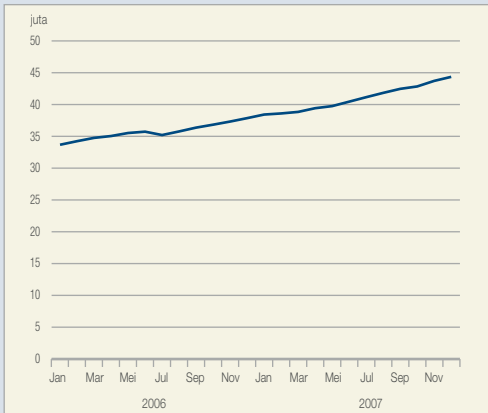
Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Sejalan dengan inovasi produk APMK, aktivitas industri APMK mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah kartu yang beredar, volume ataupun nominal transaksi. Selama tahun 2007 jumlah APMK yang beredar tercatat 44,6 juta kartu dengan nilai transaksi mencapai Rp1.700 triliun dan volume sebanyak 1,2 miliar transaksi (Grafik 10.16 dan Grafik 10.17). Pertumbuhan industri APMK terutama didorong oleh pertumbuhan kartu *account based* (ATM dan ATM+Debit)⁵ yang memiliki pangsa terbesar baik dari jumlah kartu (77,4%), nilai transaksi (96%) dan volume transaksi (95,8%). Industri kartu kredit juga mengalami pertumbuhan yang pesat, meskipun dari sisi kualitas sedikit menurun. Jumlah kartu kredit yang beredar meningkat 11,7% menjadi 9,2 juta kartu. Sementara itu nilai transaksi meningkat 26,9% (Rp 72,8 triliun) dan volume transaksi 13,7% (129,5 juta). Meskipun demikian perkembangan NPL kartu kredit mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan dalam Grafik 10.18.

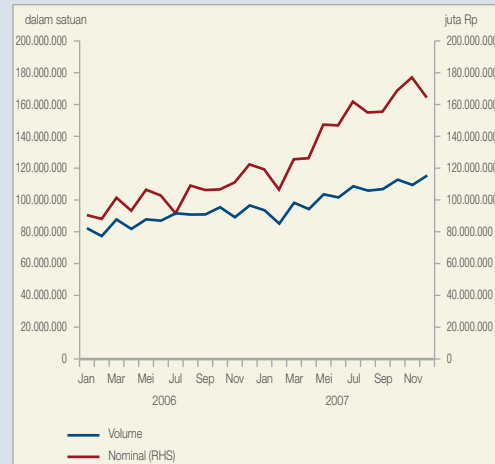
Guna memperbaiki kualitas kartu kredit, Bank Indonesia bersama asosiasi penerbit tengah melakukan evaluasi terhadap industri kartu kredit secara keseluruhan dan juga memfasilitasi pembentukan *self regulatory organization*



5 Pencatatan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) khusus yang bersifat *account based* sejak tahun 2006 tidak lagi didasarkan atas jenis kartu (ATM, Debit dan ATM+Debit), tapi lebih dikategorisasikan berdasarkan fungsi transaksi. Hal tersebut mengingat fungsi produk APMK khususnya yang *account based* saat ini sangat bervariasi dan sangat cepat berubah.



Grafik 10.16
Jumlah APMK



Grafik 10.17
Nilai dan Volume APMK

(SRO). Berbagai upaya ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya industri kartu kredit yang sehat, mandiri dan berkualitas. Melalui SRO tersebut nantinya para penerbit dapat secara bersama menyepakati adanya standar dan rambu-rambu operasional kartu kredit di antaranya: kualifikasi minimum calon pemegang kartu, intermediasi, *fairness competition*, dan penetapan besarnya minimum pembayaran.

Aktivitas industri APMK pada tahun 2007 juga diwarnai dengan penerbitan instrumen pembayaran baru yaitu *e-money*. Kecenderungan dan minat industri untuk menerbitkan *e-money* diperkirakan akan terus meningkat.

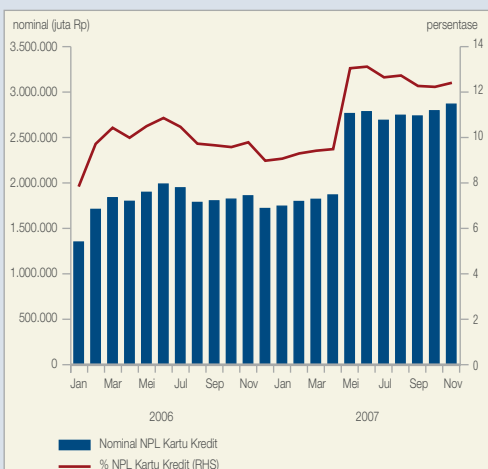
Selama tahun 2007, terdapat 10 institusi yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara *e-money*. Penggunaan *e-money* umumnya adalah untuk transaksi pembayaran eceran dengan frekuensi pemakaian tinggi dan proses yang cepat, misalnya pembayaran transportasi, pembayaran jalan tol, dan pembelian bensin.

Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan APMK, Bank Indonesia telah memfasilitasi penyusunan standarisasi instrumen nontunai untuk mendorong penggunaan satu kartu di berbagai jaringan penyelenggara jasa pembayaran (*interoperability*). Khusus untuk kartu ATM dan kartu debit telah dilakukan nota kesepahaman untuk merumuskan standarisasi teknis teknologi *chip* bagi kartu ATM dan kartu debit. Sementara itu, untuk mendorong *interoperability e-money*, Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan dengan penerbit maupun calon penerbit *e-money* agar fitur-fitur *e-money* dapat distandarisasi.

Kebijakan Sistem Pembayaran

Pengedaran Uang

Kebijakan pengedaran uang sepanjang tahun 2007 senantiasa memperhatikan dinamika lingkungan internal ataupun eksternal. Secara internal, faktor yang dipertimbangkan antara lain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan budaya masyarakat untuk memegang fisik uang dalam kegiatan transaksi. Secara eksternal, faktor yang dipertimbangkan antara lain *common practices* manajemen pengedaran uang di beberapa negara di dunia yang cenderung lebih



Grafik 10.18
Pertumbuhan NPL Kartu Kredit Nasional

memfokuskan kegiatannya pada kebijakan perencanaan dan pengawasan pengedaran uang, sementara tugas pengolahan uang dilakukan oleh berbagai pihak di luar bank sentral.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika di atas dan misi Bank Indonesia di bidang pengedaran uang yaitu memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan yang mengacu pada tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah pengedaran uang yang aman, andal, dan efisien; peningkatan layanan kas prima; serta peningkatan kualitas uang.

Pengedaran Uang yang Aman, Andal, dan Efisien

Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pengedaran uang yang aman, andal, dan efisien, melalui optimalisasi pengadaan dan distribusi uang dalam jumlah cukup dan pecahan yang sesuai ke seluruh wilayah secara aman dan tepat waktu. Dari sisi pelaksanaan kebijakan, upaya memenuhi kebutuhan uang masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pengadaan uang sebesar 4,29% dan merealisasikan distribusi uang melebihi target yang direncanakan (123,3%). Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan kas besar titipan di 13 KBI untuk memenuhi pengiriman uang secara cepat dan tepat waktu. Berbagai kemajuan di atas tercermin dari kenaikan angka indeks hasil survei ketersediaan uang rupiah dari 4,74 menjadi 4,90. Selain berbagai pelaksanaan kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan yang dapat menjamin kepastian hukum, antara lain ketentuan mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Indonesia.

Layanan Kas Prima

Implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung layanan kas prima antara lain dengan mempersiapkan penerapan strategi pengolahan uang oleh pihak ketiga dengan melanjutkan kebijakan uji coba setoran bayaran. Penerapan strategi tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah setoran dan bayaran bank secara signifikan sehingga berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pengolahan uang kartal di Bank Indonesia dan perbankan. Persiapan implementasi *cash centre* dilakukan dengan menyusun kajian yang mempertimbangkan aspek efektivitas, representasi kebutuhan masing-masing institusi, kondisi geografis, organisasi, serta infrastruktur dan fungsi pengawasan yang telah dimiliki. Langkah kebijakan lainnya adalah memperluas wilayah kerjasama layanan kas dengan PT Posindo di 7 wilayah yaitu Makassar, Mataram, Bengkulu, Medan, Jambi, Sibolga, dan Manado untuk memenuhi kebutuhan uang di

wilayah terpencil dan perbatasan. Berbagai kemajuan di atas tercermin dari peningkatan angka indeks dari survei kepuasan layanan kas Bank Indonesia dari 5,11 tahun 2006 menjadi 5,16 tahun 2007.

Uang Rupiah yang Berkualitas

Kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas uang rupiah diarahkan pada upaya menanggulangi penyebaran uang palsu, serta peningkatan unsur pengaman dan kualitas bahan uang. Strategi kebijakan penanggulangan penyebaran dan pengedaran uang palsu antara lain melanjutkan sosialisasi dan edukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah serta meningkatkan kerjasama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL), POLRI dan pihak terkait lainnya. Upaya lainnya yang dilakukan adalah melanjutkan kerjasama dengan bank sentral negara lain dalam pembentukan Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC) untuk mempelajari strategi penanggulangan uang palsu. Berbagai kemajuan tersebut tercermin dari kenaikan angka indeks hasil survei dari 4,79 tahun 2006 menjadi 5,00. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan kajian mengenai bahan uang pecahan Rp1.000,00 dengan mempertimbangkan perbandingan biaya, perlindungan terhadap pemalsuan, visual/penampilan, profil penggunaan, dan kebiasaan/tradisi.

Sistem Pembayaran

Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2007 tetap diarahkan pada peningkatan keamanan dan efisiensi terhadap penyelenggaraan dan instrumen sistem pembayaran, penurunan risiko, dan perlindungan konsumen.

Mitigasi Risiko Sistem Pembayaran

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun laporan dilakukan melalui penjagaan kehandalan operasional, baik pada sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ataupun di luar Bank Indonesia. Untuk sistem yang dilaksanakan di Bank Indonesia, penjagaan ini dilakukan secara rutin melalui uji coba kesiapan sistem utama maupun *back up* dalam menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya kedua sistem tersebut. Khusus sistem kliring, diimplementasikannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berarti mitigasi risiko kredit untuk transfer dana melalui kliring saat ini telah dilakukan dengan penerapan mekanisme *failure to settle* (FtS). Untuk sistem yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia seperti penyelenggaraan APMK, upaya persuasif dilakukan melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (FKSPN) atau asosiasi industri.

Pengawasan (*Oversight*) Sistem Pembayaran

Dalam menjalankan tugas di bidang *oversight* tersebut, Bank Indonesia telah memprioritaskan *oversight* terhadap Sistem BI-RTGS yang dikategorikan sebagai *Systemically Important Payment System* (SIPS) dan sistem kliring. Berbeda dengan konsep pengawasan bank yang difokuskan kepada tingkat kesehatan dan kinerja individual bank, pengawasan sistem pembayaran difokuskan kepada pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran secara keseluruhan, mulai dari proses perijinan, fasilitasi, dan konsultasi pada saat pengembangan sistem sampai pada tahap ketaatan peserta sistem pembayaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati. *Oversight* dilakukan dalam bentuk asesmen untuk menguji tingkat kepatuhan operasional kedua sistem tersebut agar sesuai dengan standar internasional (*BIS-Core Principle on Systemically Important Payment System*).

Kebijakan Meningkatkan Disiplin Pengguna Instrumen Cek dan Bilyet Giro

Terkait dengan upaya meningkatkan disiplin pengguna instrumen Cek dan Bilyet Giro, pertengahan tahun 2007, Bank Indonesia kembali menerbitkan ketentuan baru terkait Daftar Hitam Nasional (DHN). Ketentuan ini selain melengkapi ketentuan DHN terdahulu, juga menjadi pedoman dalam penatausahaan DHN. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut adalah prinsip kehati-hatian (*prudential*) khususnya bagi nasabah yang akan menggunakan instrumen cek atau bilyet gironya dalam melakukan pembayaran. Dengan penatausahaan daftar hitam yang terintegrasi secara nasional dan dapat diakses oleh seluruh bank di manapun, nasabah tidak lagi dapat melakukan beberapa kali penarikan cek kosong di berbagai wilayah yang berbeda.

Pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Kegiatan *Money Remittances*

Sejak diberlakukan pada akhir tahun 2006, ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) telah mendapat tanggapan positif dari berbagai otoritas terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Departemen Luar Negeri, serta pihak peneliti dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan upaya Bank Indonesia untuk membantu pencegahan *money laundering* dan pembiayaan teroris melalui remitansi. Selain itu, ketentuan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan yang mudah, aman, dan murah sekaligus perlindungan hukum bagi para pekerja luar negeri yang akan mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia.

Efisiensi Pengelolaan Rekening Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan jasa pembayaran kepada Pemerintah, Bank Indonesia telah mengembangkan aplikasi untuk memudahkan Pemerintah mengelola rekeningnya. Aplikasi yang diberi nama Bank Indonesia Government-eBanking (BIG-eB) ini mencakup penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan penyelesaian transaksi yang terkait dengan mutasi rekening Pemerintah. Beroperasinya BIG-eB juga merupakan implementasi UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, BIG-eB juga diupayakan untuk mendukung penerapan TSA secara menyeluruh sekaligus mendukung koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter.

Upaya Meningkatkan Kualitas Pembayaran Nontunai

Tahun 2007 upaya peningkatan pembayaran ritel berbasis kartu difokuskan pada sosialisasi mengenai cara penggunaan kartu kredit dan kartu debit secara bijaksana. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran eceran berbasis kartu yang mengacu pada aspek perlindungan konsumen. Berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada beberapa media massa, antara lain dalam bentuk iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik.



Bab 11

Perekonomian
Dunia dan
Kerja Sama
Internasional

Bab 11: Perekonomian Dunia dan Kerja Sama Internasional

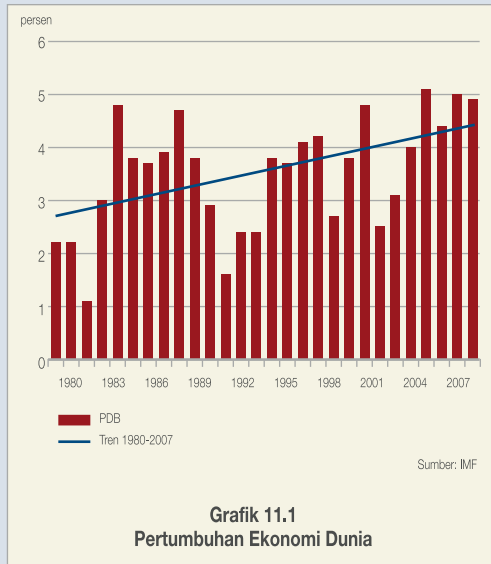
Dibandingkan dengan tahun 2006, perekonomian dunia pada tahun 2007 menunjukkan kinerja yang melemah sebagaimana tercermin pada melambatnya laju pertumbuhan dan aktivitas perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh melambatnya ekspansi ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang mengalami krisis *subprime mortgage*. Namun, melambatnya laju pertumbuhan negara maju tersebut dapat diimbangi oleh tetap tumbuh tingginya perekonomian negara berkembang. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dunia mencatat pertumbuhan 4,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjangnya. Permasalahan kredit perumahan di AS juga mengakibatkan gejolak di pasar keuangan global. Sementara itu, pasar komoditas mengalami lonjakan harga minyak yang diikuti peningkatan harga komoditas lainnya, terutama komoditas bahan makanan. Tingginya harga komoditas tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tekanan inflasi di negara-negara berkembang yang meningkat juga didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat. Sejalan dengan itu, kebijakan moneter global masih cenderung ketat. Di sisi domestik, Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing dan ketahanan sistem keuangan dengan terus aktif dalam berbagai kerja sama, baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral. Beberapa pencapaian penting yang patut dicatat adalah kesepakatan untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan penandatanganan persetujuan kerja sama ekonomi dengan Jepang. Sementara itu, proses multilateralisasi Chiang Mai Initiative terus berlanjut untuk mengantisipasi berbagai potensi krisis keuangan.

Perkembangan Ekonomi Dunia

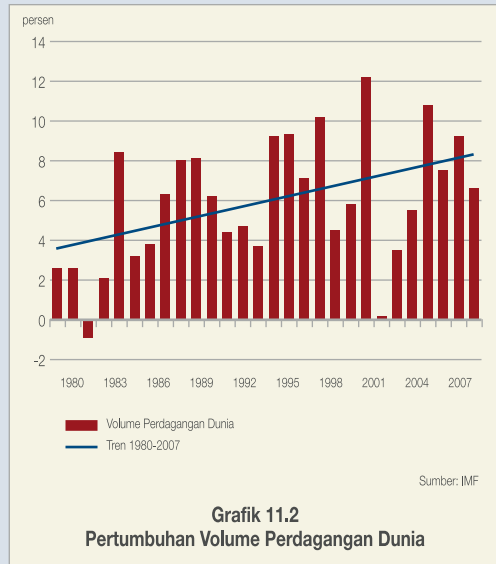
Laju pertumbuhan ekonomi dunia sedikit melambat pada tahun 2007 dibanding dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia disebabkan oleh pertumbuhan negara maju yang menurun dari 3,0% pada tahun 2006 menjadi 2,6%, terutama AS yang laju pertumbuhannya menurun drastis dari 2,9% menjadi 2,2%. Namun demikian, kelompok negara berkembang tetap tumbuh tinggi mencapai 7,8% meningkat dari 7,7% pada tahun sebelumnya sehingga dapat mencegah perlambatan ekonomi dunia secara lebih tajam. Tingginya pertumbuhan ekonomi negara berkembang terutama disumbang oleh China dan India yang kembali mencatat laju pertumbuhan yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dunia pada tahun 2007 tumbuh sebesar 4,9% (Tabel 11.1). Laju pertumbuhan tersebut relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjangnya dan hanya sedikit di bawah laju pertumbuhan tahun sebelumnya

yang mencapai 5,0% (Grafik 11.1). Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, aktivitas perdagangan barang dan jasa antar negara-negara di dunia juga mengalami penurunan pertumbuhan. Volume perdagangan dunia pada tahun ini hanya tumbuh 6,6%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,2% (Grafik 11.2).

Perkembangan ekonomi dunia juga diwarnai merebaknya permasalahan kredit perumahan di AS dan melonjaknya harga komoditas dunia. Permasalahan kredit perumahan di AS yang lebih dikenal dengan krisis *subprime mortgage* muncul ke permukaan pada pertengahan tahun 2007 yang ditandai oleh jatuhnya beberapa kreditur *subprime mortgage*. Permasalahan itu dipicu oleh meningkatnya ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Selain kreditur *subprime mortgage*, banyak investor – termasuk investor global – yang menginvestasikan dananya pada *subprime mortgage*



Grafik 11.1
Pertumbuhan Ekonomi Dunia



Grafik 11.2
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia

dan produk derivatifnya juga mengalami kerugian yang besar. Perkembangan itu menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas tidak hanya pada aset finansial yang terkait *subprime mortgage* tetapi juga memicu terjadinya pengetatan kredit. Dampak krisis terhadap pasar keuangan global tercermin pada jatuhnya harga di bursa saham AS dan di bursa saham utama dunia

lainnya. Selanjutnya, dampak krisis ini merambat ke pasar keuangan di negara berkembang.

Tabel 11.1
Indikator Utama Ekonomi Dunia

Indikator Utama	2005	2006	Estimasi IMF 2007
Output Dunia¹⁾	4,4	5,0	4,9
Negara-negara Maju			
Amerika Serikat	3,1	2,9	2,2
Kawasan Euro	1,5	2,8	2,6
Jepang	1,9	2,4	2,1
Negara Maju Lainnya	3,2	3,7	3,8
Negara Berkembang¹⁾	7,0	7,7	7,8
Afrika	5,9	5,8	6,0
Asia	9,0	9,6	9,6
China	10,4	11,1	11,4
Latin Amerika	4,6	5,4	5,4
Timur Tengah	5,6	5,8	6,0
Volume Perdagangan Dunia²⁾	7,5	9,2	6,6
Harga Komoditas	29,3	14,3	29,0
Komoditas Energi	41,1	7,2	43,6
Minyak Mentah	44,5	8,0	46,6
Komoditas Non-Energi	12,9	26,7	7,6
Inflasi²⁾			
Negara-negara Maju	2,3	2,3	2,1
Negara berkembang lainnya	5,2	5,1	5,9

Sumber: IMF, CEIC, Bloomberg, diolah

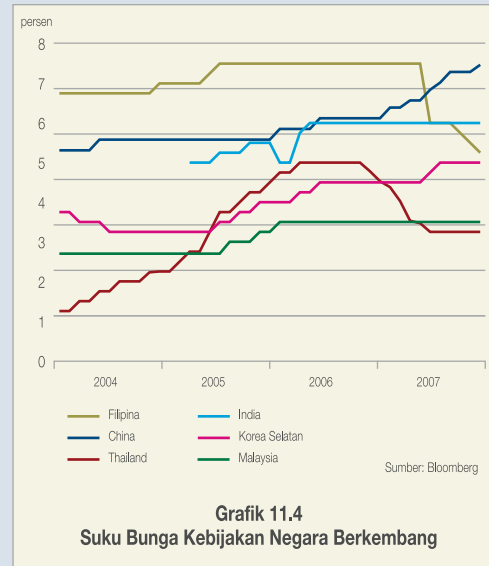
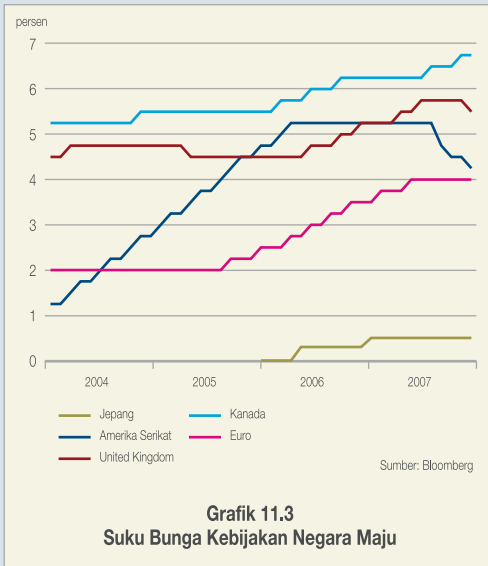
1) WEO Update, Januari 2008

2) WEO Oktober 2007

Terlepas dari gejala akibat *subprime mortgage*, perkembangan di pasar keuangan global pada umumnya masih diwarnai oleh kondisi likuiditas yang berlimpah. Likuiditas yang tinggi mendorong peningkatan investasi portofolio di pasar keuangan global sehingga harga aset finansial meningkat cukup signifikan, terutama pada paruh pertama tahun 2007. Di sisi lain, persepsi investor global terhadap risiko investasi di negara berkembang juga membaik sehingga investasi pada aset finansial di negara berkembang ikut meningkat. Namun, kondisi pasar keuangan global yang *bullish* tersebut berbalik setelah terjadi krisis *subprime mortgage* yang memicu terjadinya pembalikan aliran modal di negara-negara berkembang (*flight to quality*) sehingga nilai tukar dan harga aset keuangan jatuh.

Perkembangan ekonomi dunia juga diwarnai oleh melonjaknya harga minyak yang diikuti oleh harga berbagai komoditas lainnya. Harga minyak mentah terus bergerak naik dan hampir mencapai level psikologis \$100 per barel menjelang akhir tahun.¹ Tren pergerakan harga minyak tersebut menyimpang dari tren historisnya yang pada umumnya menurun di triwulan terakhir. Melonjaknya harga minyak didorong oleh faktor fundamental tingginya permintaan, sedangkan pasokannya relatif terbatas. Selain itu, meningkatnya transaksi yang bersifat spekulatif semakin mendorong tingginya harga minyak. Lebih jauh lagi, tingginya harga minyak berimbas pada harga

1 Harga minyak mentah jenis WTI.



berbagai komoditas di pasar komoditas internasional, sehingga secara umum harga komoditas cenderung meningkat.

Harga berbagai komoditas yang meningkat menimbulkan tekanan inflasi yang cukup besar, terutama di negara-negara berkembang. Laju inflasi kelompok negara berkembang meningkat mencapai 5,9% dari sebesar 5,1% pada tahun 2006. Di kelompok negara maju, laju inflasi relatif terjaga meskipun tekanan inflasi dari harga komoditas meningkat di akhir tahun. *Stance* kebijakan moneter negara-negara maju yang cenderung ketat dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor yang mengurangi tekanan inflasi di negara-negara tersebut.

Tekanan inflasi yang tinggi mendorong berlanjutnya kebijakan moneter yang cenderung ketat. Kebanyakan bank sentral meningkatkan suku bunga, seperti yang dilakukan oleh European Central Bank dan Bank of England (Grafik 11.3 dan 11.4). Namun demikian, pada paruh kedua intensitas peningkatan suku bunga kebijakan menurun, bahkan beberapa bank sentral termasuk Federal Reserve (Fed), mulai menurunkan suku bunga (Grafik 11.3). Keputusan Fed menurunkan suku bunga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah sebagai akibat permasalahan *subprime mortgage*. Selain itu, penurunan suku bunga juga ditujukan untuk mengurangi ketidakstabilan dan kondisi di pasar keuangan yang relatif ketat akibat krisis kepercayaan dan pengetatan kredit.

Perkembangan Ekonomi AS

Perekonomian AS yang cenderung melemah dalam dua tahun terakhir semakin memburuk pada tahun 2007, terutama setelah terjadinya krisis *subprime mortgage*. Aktivitas ekonomi yang mulai bangkit dan tumbuh meningkat pada triwulan II dan III kembali kehilangan momentum pertumbuhan dengan munculnya krisis *subprime mortgage* pada triwulan III. Perkembangan ini menghambat pertumbuhan di triwulan IV sehingga secara keseluruhan tahun PDB AS hanya tumbuh sebesar 2,2%, menurun cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 2,9%.

Melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh investasi dan konsumsi yang melemah. Selain dipengaruhi krisis *subprime mortgage*, melemahnya investasi dan konsumsi tidak terlepas dari mulai efektifnya dampak peningkatan suku bunga yang dilakukan pada tahun 2004-2006. Indikasi melemahnya konsumsi ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang bergerak menurun. Indeks yang sepanjang paruh pertama tahun 2007 selalu berada di atas level 100 – mengindikasikan optimisme konsumen dan implikasinya pada peningkatan konsumsi – berbalik menjadi pesimistis yang tercermin pada indeks yang jatuh ke level 88,6 pada akhir tahun. Memburuknya keyakinan konsumen juga didorong oleh angka pengangguran yang juga meningkat, sehingga ekspektasi pendapatan dan konsumsi masyarakat cenderung menurun. Di lain pihak, penurunan konsumsi memberikan dampak positif menurunkan impor yang selanjutnya membantu mengurangi defisit transaksi berjalan. Namun, penurunan defisit transaksi berjalan juga

dipengaruhi oleh depresiasi dolar AS terhadap mata uang utama dunia. Pada gilirannya, penurunan defisit transaksi berjalan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi AS, di samping juga sedikit memperbaiki *global imbalance*.

Krisis *subprime mortgage* menimbulkan gejolak yang cukup signifikan sehingga memperburuk kinerja pasar keuangan AS. Krisis itu menjadi puncak tren memburuknya sektor perumahan AS sejak pertengahan tahun 2005 yang diikuti meningkatnya ketidakmampuan membayar debitur *subprime mortgage* seiring dengan meningkatnya suku bunga. Akibatnya, banyak kreditur mengalami kerugian besar, bahkan beberapa kreditur terpaksa menutup usahanya. Lebih jauh lagi, hal itu mengakibatkan harga saham perusahaan yang terkait *subprime mortgage* menurun drastis dan secara keseluruhan menjadikan indeks harga saham di AS jatuh. Indeks Dow Jones Industrial Average yang sempat menembus level 14.000 (Juli 2007) terkoreksi tajam ke level 12.846 (Agustus 2007) pada saat permasalahan *subprime mortgage* mengemuka. Banyaknya investor asing yang ikut menginvestasikan modalnya di *subprime mortgage* mengakibatkan dampak krisis *subprime mortgage* meluas ke pasar keuangan global.

Meskipun permintaan domestik melemah, tekanan inflasi masih cukup kuat yang bersumber dari peningkatan harga energi dan komoditas internasional. Tingginya harga komoditas mengakibatkan harga-harga di level konsumen meningkat cukup signifikan mencapai 4,1% dari 2,5% pada tahun 2006. Namun, inflasi inti sedikit menurun dari 2,6% pada tahun 2006 menjadi 2,4%.

Perkembangan inflasi inti yang membaik memberi peluang bagi Fed menurunkan suku bunga untuk mendorong perekonomian. Terlepas dari tekanan inflasi yang masih tinggi, Fed mulai menurunkan Fed Fund Rate setelah mempertahankannya di level 5,25% sejak pertengahan tahun 2006. Hal itu dilakukan Fed dengan mempertimbangkan perekonomian yang terus melemah yang dapat mengarah pada resesi ekonomi. Pada FOMC Meeting bulan September 2007 Fed menurunkan suku bunga 50 bps menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga dilanjutkan pada FOMC Meeting bulan November dan Desember dengan keputusan penurunan masing-masing sebesar 25 bps, sehingga pada akhir tahun 2007 Fed Fund Rate menjadi 4,25%. Terkait dengan dampak krisis *subprime mortgage* yang menjadikan likuiditas di pasar keuangan ketat, Fed – bekerja sama dengan beberapa bank sentral – berupaya mengatasinya dengan menambah likuiditas di pasar uang termasuk likuiditas dolar AS di pasar uang Kawasan Euro. Upaya ini cukup

efektif dan berhasil menurunkan volatilitas suku bunga di pasar uang.

Perkembangan Ekonomi Kawasan Euro²

Perekonomian Kawasan Euro banyak dipengaruhi oleh perkembangan di AS, termasuk guncangan akibat krisis *subprime mortgage*. Melambatnya pertumbuhan ekonomi AS diikuti oleh Kawasan Euro yang pertumbuhan ekonominya pada tahun 2007 menurun menjadi 2,6% dari sebesar 2,8% pada tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan terjadi di seluruh negara Kawasan Euro, dengan perlambatan yang signifikan terjadi di Jerman di mana laju pertumbuhannya menurun dari 2,9% pada tahun 2006 menjadi 2,5%. Pertumbuhan ekonomi Kawasan Euro yang melambat disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Melemahnya konsumsi juga tercermin pada keyakinan konsumen dan angka penjualan ritel yang menurun. Ekspor yang tumbuh melambat tidak terlepas dari menurunnya permintaan ekspor AS yang merupakan salah satu mitra dagang utama Kawasan Euro dan apresiasi Euro yang mengakibatkan ekspor dari kawasan ini menjadi relatif lebih mahal.

Laju inflasi Kawasan Euro cenderung meningkat sejalan dengan tingginya harga minyak. Dalam perjalanannya sepanjang tahun 2007, laju inflasi relatif stabil di kisaran 2,0% sampai dengan triwulan III. Namun, kemudian meningkat tajam mencapai 3,1% pada akhir tahun 2007. Level inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2006 yang berada di level 1,9%. Selain didorong oleh harga minyak, tingginya inflasi juga didorong oleh harga bahan makanan yang meningkat cukup signifikan. Menurut negaranya, lonjakan inflasi yang tinggi terjadi di Jerman dari 1,4% pada tahun 2006 menjadi 3,1% tahun 2007, dan Spanyol dari 2,7% tahun 2006 menjadi 4,3% tahun 2007.

Tekanan inflasi yang masih cukup tinggi tersebut direspons ECB dengan melanjutkan peningkatan suku bunga kebijakan, meskipun intensitasnya tidak segenar tahun 2006. Sepanjang tahun 2007, ECB hanya 2 kali menaikkan suku bunga masing-masing sebesar 25 bps pada Maret 2007 menjadi 3,75% dan dilanjutkan pada Juni menjadi 4,0%.

Perkembangan Ekonomi Jepang

Sejalan dengan perekonomian dunia yang melambat, pertumbuhan ekonomi Jepang juga melambat. PDB hanya tumbuh sebesar 2,1%, melambat dari sebesar 2,4% pada tahun 2006. Melambatnya pertumbuhan disebabkan oleh

² Negara-negara yang tergabung dalam Kawasan Euro mencakup Austria, Belanda, Belgia, Finlandia, Irlandia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, dan Yunani.

konsumsi (di luar konsumsi Pemerintah) dan ekspor yang tumbuh melambat. Melemahnya ekspor tidak terlepas dari melemahnya perekonomian AS sehingga permintaan produk-produk dari Jepang menurun. Sementara itu, investasi masih mengalami kontraksi – meskipun kontraksinya menurun – sehingga semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hanya pengeluaran Pemerintah yang mengalami peningkatan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan harga di Jepang menunjukkan sedikit perbaikan. Perkembangan harga di tataran produsen (*domestic corporate goods*) menunjukkan sedikit peningkatan, namun inflasi CPI masih bergerak di sekitar 0%. Indeks harga produsen meningkat dari 1,8% pada tahun 2006 menjadi 2,6% yang didorong oleh tingginya harga komoditas energi. Namun, produsen atau korporasi tidak sepenuhnya membebaskan kenaikan biaya energi tersebut ke harga barang konsumsi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang masih lemah. Hal itu menjadikan inflasi CPI hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,3%.

Terkait dengan aktivitas perekonomian yang relatif masih lemah, Bank of Japan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga rendah. Suku bunga kebijakan tetap berada pada level yang sangat rendah, 0,50%, meskipun sempat naik 25 bps di awal tahun pada saat perekonomian mulai bangkit. Dengan level suku bunga Jepang yang relatif rendah banyak investor yang melakukan *carry trade* untuk memperoleh keuntungan dari selisih suku bunga Jepang dan suku bunga negara lain.

Perkembangan Ekonomi Amerika Latin

Perekonomian di kawasan Amerika Latin masih mampu tumbuh cukup tinggi meskipun terkait erat dengan ekonomi AS yang sedang melemah. Kawasan itu secara keseluruhan berhasil mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,4%, menyamai laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Secara individual, beberapa negara mengalami peningkatan pertumbuhan, sedangkan negara lainnya mulai melemah. Beberapa negara yang berhasil mencatat peningkatan pertumbuhan adalah Brazil, Chile dan Peru. Brazil yang merupakan perekonomian terbesar di kawasan itu tumbuh cukup tinggi dari 3,7% menjadi 5,2%, sementara Chile dan Peru masing-masing tumbuh dari 4,0% dan 7,6% menjadi 5,3% dan 9,0%. Peningkatan pertumbuhan di ketiga negara tersebut didorong oleh konsumsi, investasi dan ekspor. Ekspor yang tumbuh cukup signifikan didorong oleh permintaan ekspor dari China yang masih tinggi. Porsi ekspor negara-negara tersebut ke China cukup dominan, bahkan merupakan

yang terbesar untuk Chile. Di pihak lain, beberapa negara, seperti Argentina, Kolombia, Meksiko dan Venezuela, melambat pertumbuhannya. Pertumbuhan PDB Argentina secara keseluruhan sedikit melambat dari 8,5% pada tahun 2006 menjadi 8,3% karena melambatnya pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Argentina relatif masih tinggi. Sementara itu, perekonomian Meksiko melambat cukup signifikan yang disebabkan oleh baik melambatnya pengeluaran konsumsi, maupun perlambatan di sisi investasi dan ekspor neto. Pertumbuhan PDB Meksiko turun dari 4,8% menjadi 3,3%.

Sebagaimana di negara berkembang umumnya, laju inflasi di kawasan Amerika Latin juga meningkat cukup tinggi. Bahkan, beberapa negara, seperti Argentina dan Chile, menghadapi permasalahan inflasi yang cukup serius. Inflasi di Argentina mencapai 8,5% yang didorong oleh permintaan domestik yang tinggi. Namun, tingkat inflasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 9,8%. Inflasi di Chile melonjak cukup tinggi, dari hanya sebesar 2,6% menjadi 7,8% yang disebabkan oleh kenaikan harga di sektor perumahan dan transportasi. Negara lain di kawasan ini yang juga mengalami inflasi tinggi adalah Venezuela yang mencapai 22,5% dari 17,0% pada tahun 2006. Tingginya inflasi di Venezuela didorong oleh peningkatan pengeluaran sosial pemerintah (*welfare payments* dan *social expenditure* lainnya) yang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan pasokan barang-barang yang dibutuhkan.

Perkembangan Ekonomi Asia Pasifik (di Luar Jepang)

Perekonomian di kawasan Asia Pasifik di luar Jepang relatif terus membaik. Kelompok negara berkembang Asia mengalami peningkatan pertumbuhan dari 7,7% pada tahun 2006 menjadi 7,8%. China dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat kembali menjadi pendorong utama tumbuhnya perekonomian kawasan ini. PDB China tumbuh mencapai 11,4% pada tahun 2007, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11,1%. Pertumbuhan ekonomi China didorong oleh tingginya permintaan domestik dan ekspor.

Ekspansi ekonomi kelompok negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina), Australia dan Selandia Baru terus berlanjut. Perekonomian negara ASEAN-4 tumbuh meningkat dari 5,4% pada tahun 2006 menjadi 5,6%. Kecuali Thailand, negara-negara ASEAN-4 berhasil mencatat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara Australia dan Selandia Baru masing-masing tumbuh meningkat dari 2,8% dan 1,6% menjadi 3,9% dan 3,0%. Peningkatan pertumbuhan di kelompok negara ASEAN-4,

Tabel 11.2
Aliran Modal Internasional

Rincian	miliar \$		
	2005	2006	2007
Neraca Transaksi Berjalan	274,1	380,2	419,5
Pembiayaan Eksternal, <i>net</i> :			
Aliran Modal Swasta, <i>net</i>	519,6	572,8	620,3
Investasi <i>Equity, net</i>	254,3	229,3	265,1
Investasi Langsung, <i>net</i>	200,6	167,3	212,9
Investasi Portofolio, <i>net</i>	53,7	62,0	52,2
Kreditur Swasta, <i>net</i>	265,3	343,6	355,2
Bank Komersial, <i>net</i>	145,7	202,3	188,5
Non Bank, <i>net</i>	119,5	141,3	166,6
Aliran Modal Pemerintah, <i>net</i>	-64,2	-65,0	3,3
IFIs	-38,6	-32,9	1,9
Kreditur Bilateral	-25,6	32,1	1,3
Pinj. Penduduk/Lain-lain, <i>net</i>	-287,3	-334,1	-286,8
Cadangan (- = meningkat)	-442,2	-554,0	-756,2

Sumber: IIF, Capital Flows to Emerging Market Economies, 21 Oktober 2007.

Australia dan Selandia Baru disumbang oleh konsumsi dan investasi. Khusus pada kelompok ASEAN-4, pertumbuhan ekonominya juga ditopang oleh ekspor yang meningkat.

Kelompok negara industri maju Asia – *newly industrialized Asian economies*, yang meliputi Korea Selatan, Singapura, Hong Kong (SAR), dan Taiwan (Province of China) – tumbuh melambat dari 5,3% pada tahun 2006 menjadi 4,9%. Melambatnya pertumbuhan kelompok ini terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi Hong Kong dan Singapura. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Hong Kong lebih disebabkan oleh menurunnya investasi, sedangkan Singapura disebabkan oleh melemahnya ekspor. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Taiwan berhasil mencatat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi di kawasan Asia Pasifik cenderung meningkat didorong oleh tingginya harga komoditas internasional dan kuatnya permintaan domestik. Tekanan inflasi yang besar terjadi di China yang perekonomiannya tumbuh tinggi, serta negara-negara industri baru Asia. Lonjakan laju inflasi tertinggi terjadi di China (dari 2,8% pada tahun 2006 menjadi 6,5%), diikuti oleh Singapura (dari 0,8% menjadi 4,4%), Taiwan (dari 0,7% menjadi 3,3%), Korea Selatan (dari 2,1% menjadi 3,6%) dan Hong Kong (dari 2,6% menjadi 3,8%). Di tengah kecenderungan peningkatan inflasi di kawasan ini, laju inflasi di beberapa negara lain, seperti Australia dan negara-negara ASEAN-4, menunjukkan penurunan.

Tabel 11.3
Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Dunia

Negara - Mata Uang	Perubahan dari Tahun 2006		Rata-rata 2007*
	ptp	Rata-rata	
Uni Eropa - Euro	10,54	9,10	1,37
Kanada - Dollar	14,37	5,30	1,07
Inggris - Poundsterling	1,33	8,59	2,00
Swedia - Krona	5,57	8,34	6,76
Jepang - Yen	6,18	-1,24	117,78
Denmark - Krone	9,53	8,39	5,44
Argentina - Peso	-2,91	-1,33	3,12
Brazil - Real	16,69	10,55	1,95
Chili - Peso	6,64	1,57	522,21
Meksiko - Peso	-0,83	-0,20	10,93
China - Yuan	6,51	4,58	7,61
Hong Kong - Dollar	-0,28	-0,43	7,80
India - Rupee	10,95	8,76	41,35
Korea - Won	-0,65	2,67	929,30
Malaysia - Ringgit	6,27	6,29	3,44
Philipina - Peso	15,87	10,09	46,09
Singapura - Dollar	6,15	5,16	1,51
Taiwan - Dollar	0,50	-1,01	32,86
Thailand - Baht	15,94	14,74	32,32
Afrika Selatan - Rand	2,05	-4,14	7,05

Sumber: Bloomberg, diolah

(+) Apresiasi

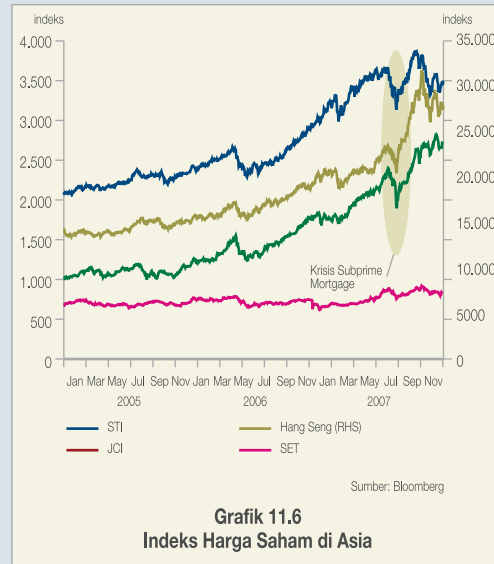
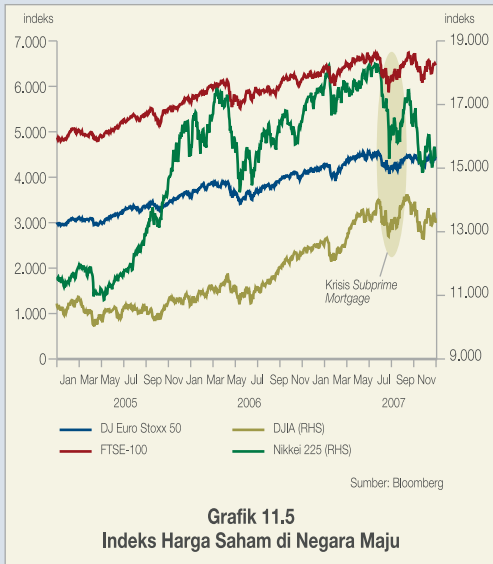
(-) Depresiasi

* Kuotasi dalam masing-masing mata uang terhadap dolar AS, kecuali Poundsterling Inggris dan Euro dengan kuotasi dolar AS terhadap mata uang tersebut.

Untuk menahan laju inflasi, kebijakan moneter kawasan Asia Pasifik cenderung ketat. People Bank of China mengambil kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga dan giro wajib minimum. Suku bunga kredit modal kerja berjangka waktu 1 tahun tercatat 6 kali dinaikkan dari 6,12% menjadi 7,47% (naik 135 bps), sementara giro wajib minimum ditingkatkan 10 kali sehingga pada akhir tahun 2007 mencapai 14,5% dari sebesar 9,0%. Sementara itu, Bank of Korea dua kali menaikkan suku bunga – masing-masing 25 bps – sehingga menjadi 5,0%, dan Taiwan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali dari 2,75% menjadi 3,375%.

Perkembangan Pasar Keuangan

Sepanjang tahun 2007 pasar keuangan global bergerak dinamis, meskipun terjadi guncangan akibat permasalahan *subprime mortgage* di AS. Secara keseluruhan kondisi pasar keuangan global sangat kondusif (*bullish*) yang didukung oleh likuiditas global yang masih tinggi dan membaiknya persepsi risiko terhadap negara berkembang. Kondisi ini menjadikan investor global melakukan diversifikasi portofolionya ke aset keuangan di negara-negara berkembang. Investasi di negara



berkembang menjadi alternatif yang semakin menarik sejalan dengan kinerja dan stabilitas ekonomi yang membaik. Hal itu menjadikan aliran modal – baik dalam bentuk FDI, portofolio, maupun pinjaman – mengalir ke negara-negara berkembang.

Aliran dana ke negara berkembang kembali meningkat sepanjang tahun 2007. Besarnya aliran modal yang mengalir ke negara berkembang mencapai \$620 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar \$572 miliar (Tabel 11.2). Penanaman dalam bentuk permodalan (*equity investment*) didominasi oleh penanaman dalam rangka FDI yang terus meningkat jumlahnya. Sebaliknya, investasi portofolio sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu terimbas oleh krisis *subprime mortgage* yang sempat mengguncang pasar modal global. Selain itu, pada tahun 2007 terjadi pergeseran tujuan aliran modal dengan lebih banyaknya aliran modal ke negara berkembang di Eropa dibandingkan dengan ke Asia.

Pasar Valas

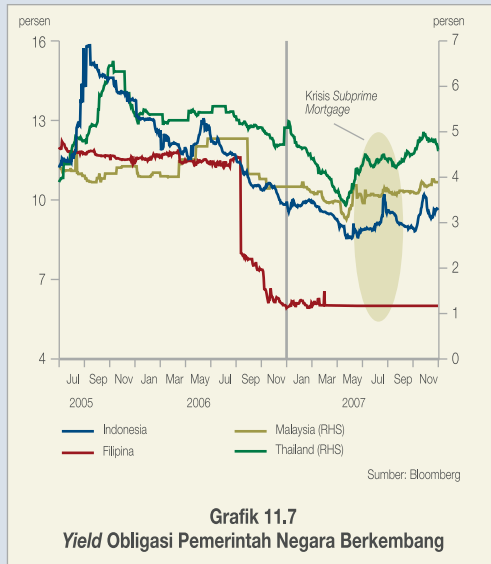
Perkembangan pasar valas diwarnai oleh kecenderungan pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang global (Tabel 11.3). Hal itu tidak terlepas dari fundamental perekonomian AS yang melemah. Selain itu, mata uang negara berkembang yang menguat didorong oleh tingginya aliran dana investor global ke negara-negara tersebut yang menawarkan imbal hasil investasi yang relatif lebih menarik dibandingkan dengan negara maju. Terlebih lagi, peran negara berkembang dalam pertumbuhan ekonomi dunia semakin penting dan

didukung oleh semakin besarnya volume perdagangan di antara negara berkembang.

Meskipun cenderung melemah, dolar AS dalam beberapa kesempatan sempat menguat. Ironisnya, penguatan yang signifikan justru terjadi pada saat merebaknya permasalahan *subprime mortgage* di AS di mana investor global mengalihkan portofolio investasinya ke aset yang dianggap tidak berisiko, yaitu US Government Securities. Hal itu mendorong aliran modal berbalik ke AS sehingga dolar AS menguat terhadap hampir seluruh mata uang global, kecuali yen Jepang. Yen tetap menguat terhadap dolar AS karena investor yang melakukan *carry trade* (menarik pinjaman di Jepang yang bunganya rendah untuk ditanamkan di negara lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi) menarik dananya kembali ke Jepang, sehingga mendorong penguatan yen. Setelah gejolak mereda, dolar AS kembali pada tren yang melemah, namun dengan volatilitas yang relatif lebih tinggi terkait dengan ketidakpastian kelanjutan dampak krisis *subprime mortgage* dan kecenderungan meningkatnya harga minyak.

Pasar Keuangan

Likuiditas global yang masih tinggi membawa pengaruh positif di pasar keuangan global, terutama di pasar modal. Indeks harga saham di berbagai bursa saham dunia, terutama di negara-negara berkembang, melonjak tinggi meskipun sempat tertahan oleh terguncangnya pasar keuangan global karena krisis *subprime mortgage*. Indeks harga saham di negara berkembang yang meningkat tinggi juga disebabkan membaiknya persepsi risiko investor global terhadap negara berkembang. Lonjakan



tajam dicatat oleh indeks harga saham China (Shanghai) yang meningkat hampir 100% sepanjang tahun 2007 sehingga mencapai 5266. Selanjutnya diikuti oleh lonjakan indeks harga saham di Indonesia, Hong Kong, Korea Selatan, dan Malaysia yang masing-masing meningkat 51,5%, 41,3%, 32,3% dan 30,7%. Sementara itu, indeks harga di bursa saham utama dunia juga masih mencatat peningkatan – kecuali bursa saham Jepang – meskipun peningkatannya tidak setinggi di negara berkembang.

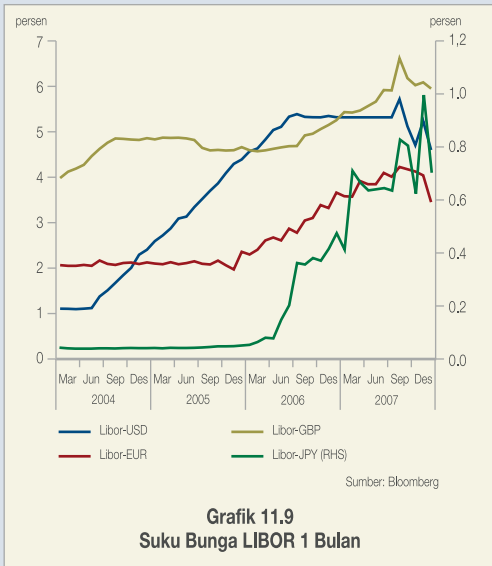
Pada saat krisis *subprime mortgage* merebak pada Juli 2007, indeks harga saham di bursa utama dunia terkoreksi cukup tajam. Diawali dengan jatuhnya harga saham di AS – indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi sekitar 8,2% –, indeks harga saham di Eropa dan Jepang juga ikut jatuh (Grafik 11.5). Indeks harga saham di Eropa menurun antara 10%-14% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan (Juli-Agustus 2007). Indeks harga saham di Perancis, Inggris dan Jerman masing-masing terkoreksi sebesar 14,0%, 12,8% dan 10,3%, sementara index Dow Jones Stoxx 50 terkoreksi 10,9%. Bursa utama dunia lainnya, yaitu Jepang, juga terimbas dengan turunnya indeks Nikkei 225 sebesar 16,4%.

Dampak yang lebih berat justru menimpa pasar keuangan di negara berkembang yang memiliki eksposur relatif lebih kecil terhadap *subprime mortgage*. Selain terkena sentimen negatif jatuhnya indeks harga saham di bursa saham utama dunia, koreksi harga saham di negara berkembang juga disebabkan penyesuaian portofolio oleh investor global sebagai reaksi terhadap krisis *subprime mortgage*. Pada umumnya investor global mengalihkan aset yang lebih berisiko – termasuk aset keuangan

yang diterbitkan di negara berkembang – ke aset yang lebih aman untuk memperbaiki profil risiko investasinya, sekaligus melakukan aksi ambil untung untuk menutup kerugian investasinya di tempat lain. Sebagai akibatnya, indeks harga saham Asia berjatuh. Dalam periode Juli-Agustus 2007 indeks harga saham di Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina terkoreksi antara 14%-24%³ (Grafik 11.6).

Perkembangan di pasar obligasi global diwarnai oleh pergerakan *yield* yang tidak searah antara negara maju dengan negara berkembang. *Yield* obligasi pemerintah di negara berkembang cenderung menurun – harganya naik – pada paruh pertama yang disebabkan oleh derasnya investasi asing pada obligasi pemerintah. Pada paruh kedua terjadi krisis *subprime mortgage* yang memicu *capital reversal* yang didahului penjualan obligasi domestik oleh investor asing, sehingga *yield* obligasi meningkat (Grafik 11.7). Pola sebaliknya terjadi pada *yield* obligasi pemerintah di negara maju. Lebih menariknya *yield* di negara berkembang menjadi salah satu penyebab investor mengurangi penempatannya pada obligasi negara maju sehingga pada paruh pertama *yield* obligasi negara maju cenderung meningkat. Namun, pada saat pasar terguncang oleh krisis *subprime mortgage* dan risiko meningkat, obligasi negara maju yang relatif lebih rendah risikonya kembali menjadi pilihan sehingga *yield* menurun (Grafik 11.8).

3 Besarnya koreksi indeks harga saham sebagai dampak krisis *subprime mortgage* yang memuncak pada akhir Juli 2007 dihitung dengan membandingkan indeks tertinggi pada bulan Juli 2007 (sebelum terjadinya krisis) dengan level indeks terendah pada periode Juli-Agustus 2007.



Sementara itu, perkembangan pasar uang antar bank lebih banyak dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sejalan dengan keputusan Fed menurunkan suku bunga di paruh kedua tahun 2007, suku bunga LIBOR dengan denominasi dolar AS ikut bergerak menurun. Suku bunga LIBOR denominasi Euro bergerak meningkat yang juga mengikuti pergerakan suku bunga kebijakan yang ditetapkan ECB (Grafik 11.9). Namun, suku bunga yang cenderung naik tersebut belum tertransmisikan ke suku bunga jangka panjang yang cenderung masih bergerak menurun.

Satu hal yang menarik dalam perkembangan pasar uang adalah lonjakan suku bunga yang cukup tinggi pada

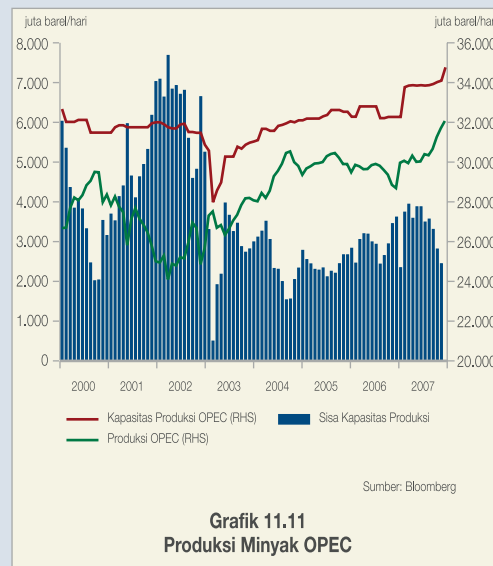
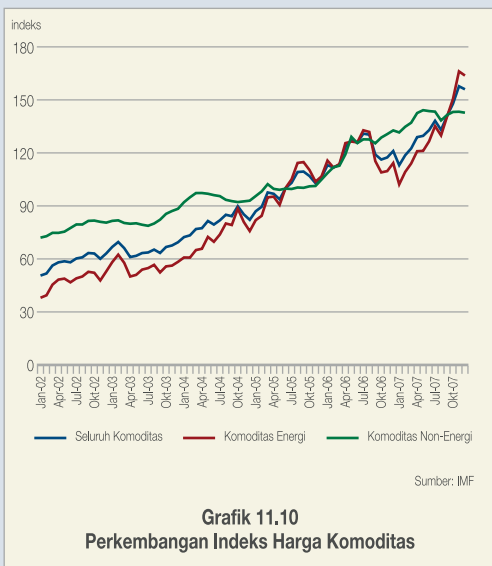
Agustus 2007. Krisis *subprime mortgage* menjadikan likuiditas pasar menjadi ketat dan mendorong peningkatan suku bunga. Meningkatnya suku bunga pasar uang tersebut terjadi pada saat suku bunga kebijakan tidak berubah. Selain meningkat, pergerakan suku bunga juga relatif lebih bergejolak. Namun selanjutnya suku bunga kembali ke level normalnya setelah beberapa bank sentral secara bersama-sama menginjeksi likuiditas untuk mengurangi guncangan di pasar uang.

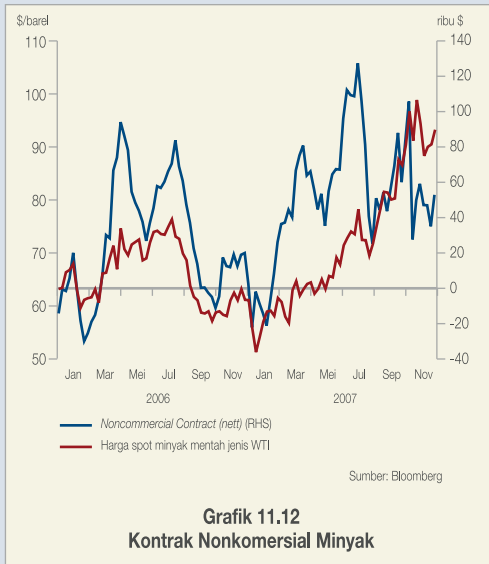
Perkembangan Pasar Komoditas

Perkembangan pasar komoditas diwarnai pergerakan harga yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2007. Meningkatnya harga komoditas didorong oleh tingginya harga minyak mentah dunia terkait dengan faktor fundamental pasokan dan permintaan yang kurang berimbang yang ditambah lagi dengan adanya transaksi yang bersifat spekulatif. Tingginya harga minyak juga mendorong peningkatan harga gas alam dan batu bara yang termasuk dalam kelompok komoditas energi. Indeks harga komoditas energi meningkat mencapai 43,6% dibandingkan dengan posisi akhir tahun sebelumnya (*point to point*), tetapi secara rata-rata hanya tumbuh 10,4%. Meningkatnya harga komoditas energi juga mendorong naiknya harga komoditas non-energi, terutama komoditas bahan makanan. Bahkan, peningkatan indeks harga komoditas non-energi yang secara rata-rata mencapai 14% melebihi peningkatan harga komoditas energi (Grafik 11.10).

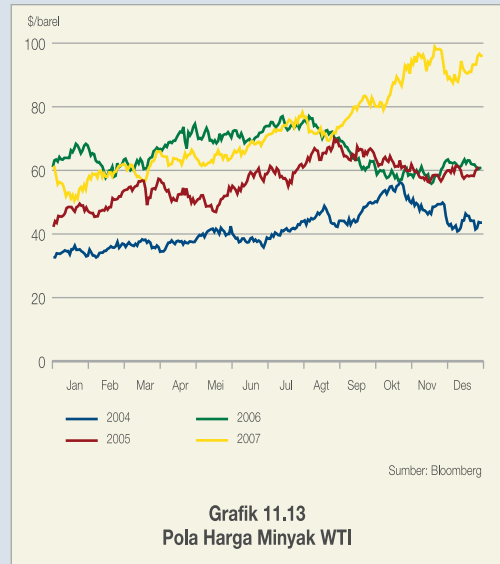
Perkembangan Pasar Komoditas Migas

Harga minyak bergerak terus meningkat sepanjang tahun 2007 dan mencetak rekor harga tertinggi yaitu sebesar \$98,9 per barel. Tren peningkatan harga – terutama pada





Grafik 11.12
Kontrak Nonkomersial Minyak



Grafik 11.13
Pola Harga Minyak WTI

akhir tahun – menjadikan pola pergerakan harga minyak pada tahun 2007 sedikit menyimpang dari pola historisnya yang pada umumnya menurun menjelang akhir tahun. Tingginya harga minyak disebabkan oleh masih tingginya permintaan – terutama China – yang tidak diimbangi oleh peningkatan pasokan yang cukup. Bahkan, upaya meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut mengakibatkan *spare capacity* menipis, sehingga menjadikan harga minyak rentan terhadap sentimen negatif dan meningkatnya faktor risiko (Grafik 11.11). Terlebih risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah masih belum mereda.

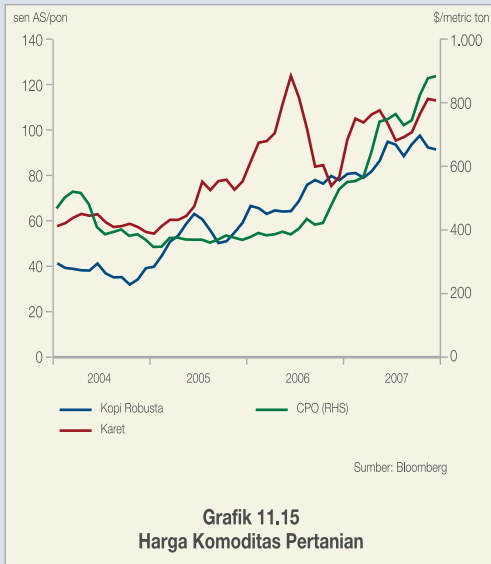
Di samping faktor fundamental, tingginya harga minyak juga dipicu oleh transaksi spekulatif yang memanfaatkan fluktuasi harga minyak untuk memperoleh keuntungan. Transaksi spekulatif cenderung meningkat seperti tercermin pada perkembangan '*non-commercial contracts*' (Grafik 11.13), dengan semakin menipisnya potensi keuntungan investasi di pasar keuangan dan melemahnya dolar AS. Faktor lain yang turut mendorong peningkatan transaksi spekulatif dimaksud adalah terjadinya krisis *subprime mortgage* yang mengakibatkan risiko investasi di pasar keuangan meningkat. Transaksi tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terus meningkatnya harga minyak di akhir tahun, sehingga menjadikan pola pergerakan harga minyak menyimpang dari pola historisnya (Grafik 11.13).



Grafik 11.14
Harga Gas Alam Cair (LNG)

Harga minyak meningkat baik secara rata-rata maupun *point to point*. Harga minyak jenis WTI bergerak dari \$61 per barel pada akhir tahun 2006 dan terus meningkat mencapai level \$98,9 per barel pada November 2007 yang merupakan level tertinggi yang pernah dicapai harga minyak. Di akhir tahun 2007 harga minyak ditutup pada level \$96 per barel, yang berarti secara *point to point* meningkat 57,2%. Secara rata-rata tahunan, harga minyak WTI meningkat 9,5% dari \$66,1 per barel pada tahun 2006 menjadi \$72,3 per barel. Harga minyak OPEC dan jenis Minas juga bergerak searah dengan harga minyak WTI. Sejalan dengan harga minyak, harga gas yang juga merupakan komoditas energi ikut terdorong naik di mana secara *point to point* naik sebesar 25,7% dan secara rata-rata naik sebesar 3,0%⁴ (Grafik 11.14)

4 Berdasarkan harga ekspor LNG Indonesia ke Jepang



Perkembangan Pasar Komoditas Nonmigas

Harga komoditas nonmigas meningkat sepanjang tahun 2007 yang antara lain didorong oleh kenaikan harga minyak. Harga komoditas industri manufaktur terdorong naik oleh karena proses produksinya terkait langsung dengan minyak yang digunakan sebagai input produksi. Komoditas lain yang terkena dampak langsung kenaikan harga minyak adalah komoditas pertanian, khususnya bahan pangan (Grafik 11.15).

Meningkatnya harga komoditas pangan terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan energi alternatif. Tingginya harga minyak mendorong dipercepatnya konversi sumber energi dari minyak ke bahan bakar alternatif seperti *biofuel* dan *biodiesel* yang bahan dasarnya adalah beberapa komoditas pangan, seperti jagung, tebu, CPO dan kedelai. Dengan meningkatnya penggunaan *biofuel/biodiesel*, permintaan terhadap komoditas tersebut juga meningkat sehingga harganya terdorong naik. Lebih jauh lagi, meningkatnya permintaan komoditas pertanian tersebut juga mendorong peningkatan produksi komoditas dimaksud. Salah satu upayanya adalah dengan menambah lahan penanaman, meskipun harus mengorbankan lahan untuk komoditas lain, seperti gandum. Akibatnya, pasokan gandum menurun dan harganya ikut meningkat. Selain itu, secara umum juga terdapat kendala cuaca – kekeringan sebagai dampak *global warming* – yang mengakibatkan terganggunya panen dan pasokan komoditas pertanian sehingga semakin memberikan tekanan pada harga.

Harga komoditas logam (*metal*) juga meningkat terutama pada paruh pertama tahun 2007. Harga yang meningkat didorong oleh kuatnya permintaan – terutama China



– untuk mendukung aktivitas produksinya. Namun, pada paruh kedua harga komoditas logam cenderung menurun yang disebabkan oleh menurunnya permintaan sejalan dengan melambatnya aktivitas produksi di negara maju. Penurunan juga disebabkan banyaknya kontrak perdagangan berjangka yang dibatalkan (*terminate*) oleh karena meningkatnya risiko setelah pasar keuangan terguncang krisis *subprime mortgage*. Penurunan harga tersebut mengompensasi kenaikan yang terjadi pada paruh pertama sehingga secara keseluruhan tahun tidak banyak berubah (Grafik 11.16).

Kerja Sama Internasional

Perekonomian dunia yang semakin dinamis menuntut terselenggaranya kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing negara-negara di kawasan dan menjaga stabilitas keuangan. Sepanjang tahun 2007 perkembangan kerja sama internasional telah menghasilkan sejumlah kemajuan penting terutama sebagai realisasi dari inisiatif yang berlangsung selama ini. Dalam rangka peningkatan daya saing, kerja sama di lingkup bilateral dan regional telah mencapai beberapa kesepakatan penting, seperti penandatanganan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Sementara itu, untuk meningkatkan stabilitas keuangan di kawasan, telah disepakati upaya peningkatan efektivitas jejaring *Bilateral Swap Arrangement (BSA)* melalui upaya multilateralisasi Chiang Mai Initiative (CMI) dan penguatan sistem *surveillance*. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas kerja sama *regional self-help mechanism* dalam rangka mencegah dan mengatasi potensi krisis di masa depan. Dalam forum multilateral, upaya menjaga stabilitas keuangan difokuskan

pada penguatan lembaga keuangan internasional melalui pelaksanaan reformasi kelembagaan dan tata kelola.

Peningkatan Daya Saing Negara-negara di Kawasan

Upaya peningkatan daya saing dalam kerja sama bilateral dan regional dilakukan melalui liberalisasi ketentuan perdagangan dan sektor terkait lainnya yang diwujudkan melalui IJ-EPA dan pembentukan MEA 2015. IJ-EPA adalah perjanjian bilateral komprehensif pertama yang dilakukan Indonesia. Sementara itu, komitmen dalam MEA ditujukan untuk meningkatkan daya saing kawasan ASEAN melalui pembentukan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi.

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)

Kerja sama perjanjian bilateral telah mencatat tonggak sejarah penting dengan ditandatanganinya kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang pada Agustus 2007. IJ-EPA yang dirintis sejak tahun 2004 telah menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang.⁵ Perjanjian IJ-EPA mencakup ruang lingkup yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi antara kedua negara, di antaranya melalui *capacity building*, liberalisasi, serta peningkatan hubungan perdagangan dan investasi. Perjanjian itu melibatkan berbagai sektor, antara lain perdagangan barang dan jasa, serta investasi dan *movement of natural persons*, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).

Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang dan salah satu negara utama sumber investasi asing langsung yang besar. Potensi keuntungan bagi Indonesia dari kerja sama IJ-EPA adalah adanya pembebasan sebagian besar bea masuk bagi ekspor Indonesia ke Jepang. Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dari Jepang dan sekaligus memperkuat upaya perbaikan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Pencapaian tersebut dimungkinkan melalui program bantuan Jepang, seperti bantuan teknis ketrampilan dan teknologi di berbagai bidang, khususnya terkait dengan standardisasi produk. Sementara itu, bagi Jepang, IJ-EPA dinilai penting mengingat posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan mempunyai sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Dalam lingkup regional, pada usianya yang ke-40 ASEAN memulai tonggak sejarah baru dalam inisiatif kerja

sama ekonomi. Pada 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan MEA dari semula pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. Percepatan itu mencerminkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan daya saing kawasan dalam menghadapi persaingan global. Untuk mendukung tujuan tersebut, pada November 2007, para pemimpin ASEAN telah menandatangani dua perangkat utama untuk mendukung pencapaian perwujudan MEA, yaitu Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan Cetak biru MEA, termasuk jadwal strategis pencapaian masing-masing elemen. Di samping cetak biru dan Piagam ASEAN, dikembangkan juga ASEAN *Baseline Report* (ABR) yang berfungsi memonitor pencapaian menuju MEA 2015 (Boks: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia).

Pembentukan MEA diharapkan akan meningkatkan daya saing kawasan dalam perekonomian global melalui pencapaian empat kerangka strategis yang meliputi pasar tunggal dan basis produksi internasional, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Upaya pencapaian pasar tunggal dan basis produksi internasional dilakukan dengan memperdalam integrasi kawasan melalui proses liberalisasi hasil dan faktor-faktor produksi sehingga mencapai skala ekonomi yang optimal. Proses liberalisasi tersebut akan menuntut penguatan perekonomian nasional negara-negara ASEAN agar memiliki daya saing yang tangguh dan terjadi penurunan tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara tersebut, sehingga secara keseluruhan posisi tawar ASEAN akan menjadi semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Daya saing ASEAN yang tinggi juga akan meningkatkan posisi tawar ASEAN dalam berbagai perundingan *free trade area* dengan mitra dagang ASEAN, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India.

Dalam pencapaian pasar tunggal dan basis produksi internasional, liberalisasi hasil dan faktor-faktor produksi akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas pada tahun 2015. Aliran bebas barang dilakukan melalui penurunan tarif dan pengurangan hambatan perdagangan nontarif. Sementara itu, peningkatan akses pasar dan penerapan perlakuan nondiskriminasi antara pengusaha lokal dan asing akan mendorong aliran bebas jasa. Adanya aliran bebas barang dan jasa lintas batas negara ASEAN akan meningkatkan efisiensi produksi dalam kerangka rantai produksi global (*global supply chain*). Kondisi tersebut akan membuka peluang yang lebih besar bagi investasi lintas batas

5 Perjanjian EPA Indonesia dengan Jepang relatif agak terlambat dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Singapura (2002), Malaysia (2005), Filipina (2006), dan Thailand (April 2007).

negara di dalam kawasan sehingga ASEAN akan menjadi tujuan investasi yang menarik investor global maupun regional. Kegiatan investasi yang berkembang pesat akan membutuhkan faktor-faktor produksi yang dipenuhi melalui pembebasan aliran tenaga kerja trampil lintas batas negara dan pembukaan aliran modal yang lebih bebas. Sebaliknya, produktivitas yang tinggi dari kegiatan investasi yang berkembang pesat juga akan meningkatkan arus barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan baku ataupun produk akhir.

Cetak Biru MEA

Cetak biru MEA merupakan *masterplan* pencapaian keempat kerangka strategis MEA 2015 dengan mengidentifikasi elemen-elemen, rencana aksi, dan target waktu implementasinya. ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi diwujudkan melalui proses liberalisasi secara bertahap. Peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce* merupakan elemen penting untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi. Pembuatan peraturan dan kebijakan tersebut dilakukan baik secara nasional maupun melalui kerja sama di kawasan antara lain melalui standarisasi, dan harmonisasi. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dilakukan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN (*Initiative for ASEAN Integration*) untuk negara-negara CLMV (Kamboja, Lao PDR, Myanmar dan Vietnam) yang bertujuan untuk meningkatkan teknologi dan *capacity building* pembangunan ekonomi. Pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran dalam jejaring produksi global merupakan dua elemen penting dalam mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Rencana aksi tersebut dilakukan dengan melakukan perundingan perjanjian *free trade area* yang saling menguntungkan dengan berbagai mitra dagang ASEAN.

Target waktu rencana aksi dibagi dalam empat tahap, yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Dalam mengimplementasikan Cetak biru MEA ini, ASEAN juga memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan anggotanya. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen yang telah disepakati, diterapkan prinsip tidak memperbolehkan penarikan komitmen (*no back-loading of commitments*), dan adanya fleksibilitas yang harus diajukan pada awal perundingan serta disetujui bersama (*pre-agreed flexibility*).

Untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi Cetak biru MEA 2015 disusun ASEAN *Baseline Report* (ABR). Dengan adanya ABR, para pemimpin ASEAN dapat mengetahui status kemajuan pencapaian tingkat integrasi ekonomi dan memberikan arahan untuk memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi. Tantangan dalam penyusunan ABR adalah ketersediaan *database* statistik indikator-indikator ekonomi dan keuangan dari sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dari seluruh negara anggota ASEAN.

ASEAN Charter

ASEAN Charter merupakan konstitusi dasar organisasi kerja sama antar Pemerintah negara-negara anggota ASEAN. Transformasi mendasar yang dilakukan oleh ASEAN Charter adalah memberikan status '*legal personality*' pada kerja sama ASEAN, sehingga ASEAN memiliki identitas yang berbeda dengan identitas negara-negara anggotanya. Seiring dengan perubahan tersebut, maka dilakukan penyempurnaan struktur kelembagaan ASEAN, peningkatan mandat ASEAN dan mekanisme pengambilan keputusan. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain pembentukan *Committee of Permanent Representatives to ASEAN* yang merupakan wakil negara anggota di dalam ASEAN, dan pembentukan ASEAN National Secretariat yang merupakan *national focal point* yang berfungsi melakukan koordinasi di tingkat nasional. Dengan transformasi ASEAN Charter tersebut, ASEAN diharapkan dapat mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dan merespons dengan lebih baik berbagai permasalahan di kawasan dalam menuju MEA dan permasalahan global yang semakin kompleks di masa depan.

Upaya Menjaga Stabilitas Keuangan

Dalam menjaga stabilitas keuangan, berbagai upaya penguatan tata kelola kelembagaan dilakukan baik dalam tataran regional maupun global. Dalam tataran regional, upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas tersedianya bantuan likuiditas dan penguatan pelaksanaan *surveillance*. Upaya peningkatan efektivitas bantuan likuiditas tersebut di antaranya melalui multilateralisasi CMI. Sedangkan, upaya peningkatan efektivitas *surveillance* kawasan dilakukan dengan membentuk *Monetary Financial Stability Committee* (MFSC) dalam forum EMEAP. Dalam tataran multilateral, pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan di tubuh institusi Bretton Woods (IMF dan World Bank) tetap menjadi perhatian utama sepanjang tahun laporan.

Peningkatan Efektivitas Bantuan Likuiditas dan *Surveillance* di Kawasan

Satu dekade setelah krisis Asia tahun 1997, merupakan saat yang penting bagi kawasan Asia Timur (ASEAN+3)⁶ untuk mengevaluasi peranan kerja sama kawasan dalam menjaga stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan. Berkaca dari pengalaman krisis tersebut, ASEAN+3 terus meningkatkan efektivitas kerja sama *regional self-help mechanism* untuk mencegah dan mengatasi potensi krisis di masa depan. Selain itu, besarnya kerugian akibat krisis dan semakin mendalamnya integrasi keuangan di kawasan telah mendorong ASEAN+3 untuk meningkatkan efektivitas kerja sama *surveillance* dan bantuan likuiditas melalui multilateralisasi CMI. Namun, upaya itu tetap dimaksudkan sebagai pelengkap dari skema bantuan likuiditas global melalui IMF.

Multilateralisasi CMI merupakan upaya memperkuat dan memastikan ketersediaan bantuan likuiditas, meningkatkan nilai bantuan, serta menyederhanakan mekanisme penarikannya. Dalam upaya multilateralisasi tersebut diharapkan kawasan secara bersama-sama menyetujui komitmen yang lebih kuat bagi inisiatif menjaga kestabilan di kawasan. Komitmen yang ingin dicapai adalah kerja sama dan koordinasi kebijakan kawasan melalui peningkatan *surveillance* sehingga dapat memfasilitasi evolusi kerja sama keuangan kawasan. Pada saat ini upaya untuk implementasi multilateralisasi masih dalam status persiapan.

Dalam forum EMEAP penguatan *surveillance* regional ditandai dengan dibentuknya MFSC pada April 2007. MFSC diharapkan dapat mendukung upaya kawasan untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan melalui peningkatan efektivitas kegiatan *surveillance*. Dalam MFSC juga dilakukan inisiatif koordinasi dan kerja sama terkait dengan manajemen krisis dalam skala regional. Dalam mendukung pelaksanaannya, negara anggota EMEAP bersepakat untuk melengkapi *surveillance* dengan tersedianya pengelolaan krisis di setiap negara anggota. Pengelolaan krisis dimaksud difokuskan pada tiga kategori yaitu: (i) *major operational disruptions* (MOD), (ii) *distressed financial institutions*, serta (iii) *financial market disruptions*. Pengelolaan krisis tersebut kemudian disepakati untuk diintegrasikan secara regional pada November 2007, sebagai langkah antisipasi dampak eksternalitas terhadap kawasan, seperti krisis *subprime mortgage* di AS. Selain itu dalam jangka panjang kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai lembaga keuangan internasional

dan berkoordinasi lintas regional terkait dengan pengelolaan krisis.

Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola IMF

Dalam tataran global, IMF aktif melakukan pembahasan terkait dengan reformasi kelembagaan dan tata kelola di tubuh organisasi tersebut. Pembahasan reformasi IMF berpedoman pada *Medium Term Strategy* (MTS) yang menjabarkan berbagai strategi untuk meningkatkan peran IMF dalam perekonomian dunia. Implementasi MTS mencakup beberapa topik utama seperti arah baru *surveillance*, kuota dan representasi suara negara berkembang, serta peran IMF di negara berkembang dan berpendapatan rendah.

Arah Baru *Surveillance*

Sebagai langkah untuk memperbaiki *surveillance*, IMF melakukan penyesuaian kerangka *surveillance* dengan memperhatikan krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Terjadinya krisis di akhir tahun 1990-an dan berbagai gejolak eksternal di beberapa kawasan hingga tahun 2007, mencerminkan kurang efektifnya pelaksanaan *surveillance* sebagai *core function* IMF dalam mendeteksi terjadinya krisis dan berbagai gejolak eksternal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih digunakannya kerangka *Decision on Surveillance over Exchange Rate Policies 1977*. Padahal, dalam 30 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan dalam lalu lintas arus modal dan tingkat integrasi pasar keuangan sehingga diperlukan penyesuaian kerangka *surveillance*. Untuk itu, pada Juni 2007 diadopsi *New Decision on Bilateral Surveillance* untuk mengantisipasi permasalahan pengelolaan nilai tukar. Perubahan penting di dalamnya mencakup tambahan prinsip yang menyatakan bahwa negara anggota harus menghindari kebijakan nilai tukar domestik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan eksternal. Selain memberikan panduan kegiatan *surveillance*, kerangka baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, keterbukaan, dan ketidakterpilihannya pelaksanaan *surveillance*. Kerangka baru tersebut memperhatikan tiga prinsip, yaitu (i) tidak ada kewajiban baru yang harus dipenuhi dan dialog persuasif tetap menjadi kunci utama, (ii) memperhatikan kondisi spesifik negara-negara anggota, dan (iii) fleksibilitas terhadap perkembangan perekonomian di masa mendatang.

Isu Kuota dan Representasi Suara

Upaya reformasi kuota dan representasi suara negara anggota merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dalam IMF. Upaya reformasi kuota itu dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan suara dan representasi negara

6 Negara ASEAN+3 adalah sepuluh Negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam) dan China, Jepang serta Korea Selatan.

berkembang dan berpendapatan rendah, khususnya negara berkembang yang perannya dalam perekonomian dunia semakin meningkat. Isu reformasi tersebut juga dibahas dan disepakati pada pertemuan G-20 pada September 2007.

Reformasi kuota untuk mengakomodasi representasi suara negara berpendapatan rendah diupayakan melalui peningkatan *basic votes*. Formula penentuan kuota yang baru disepakati harus sederhana, transparan dan mengakomodasi posisi relatif negara anggota dalam perekonomian dunia, yang berimplikasi pada meningkatnya kuota negara-negara berkembang. Beberapa usulan formula baru yang berkembang pada dasarnya mengangkat beberapa aspek utama, seperti *filtering approach* untuk menentukan negara yang berhak mendapatkan kenaikan kuota dan peningkatan *basic votes* untuk melindungi kuota negara-negara berpendapatan rendah, dan *foregoing* kenaikan kuota negara maju yang masih *underrepresented*. Meskipun negara-negara anggota IMF pada umumnya mendukung proposal kenaikan kuota negara berkembang, namun hingga penghujung tahun 2007 pembahasan formulasi kuota tersebut belum mencapai kesepakatan.

Peran IMF di Negara *Emerging Market* dan Negara Berpendapatan Rendah

Salah satu komitmen yang tertuang dalam MTS adalah dukungan IMF terhadap negara anggota berpendapatan rendah. Sebagai salah satu upaya realisasinya, IMF berinisiatif melakukan penghapusan utang Liberia yang termasuk kelompok negara *General Resource Account (GRA) protracted arrears*⁷ (Liberia, Sudan dan Somalia) dengan memanfaatkan dana bantuan sukarela negara anggota (*SCA-1/deferred charges*⁸). Inisiatif itu didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber dana dari program *Poverty Reduction and Growth Facility-Heavily Indebted Poor Countries (PRGF-HIPC)* dan *Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) Trust*⁹ dinilai tidak cukup untuk penghapusan utang negara-negara tersebut.

Pada akhirnya IMF hanya memberikan penghapusan utang kepada Liberia dengan pertimbangan kebijakan negara tersebut lebih kondusif dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, dengan pendapatan per kapita kurang dari \$120, rasio utang luar negeri lebih dari 760%, dan cadangan devisa hanya sebesar \$4,2 juta, Liberia dinilai perlu memperoleh penghapusan utang. Indonesia sebagai anggota IMF turut berperan dalam inisiatif tersebut.

7 Negara-negara yang terlambat melakukan kewajiban kepada IMF lebih dari jangka waktu enam bulan.

8 SCA-1 merupakan rekening yang dibentuk oleh IMF dalam rangka mengantisipasi sekaligus memproteksi kemungkinan munculnya dampak keuangan yang negatif akibat keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh negara anggota yang telah lebih dari jangka waktu enam bulan (*protracted arrears*).

9 PRGF-HIPC Trust adalah Trust yang dibentuk pada bulan Februari 2007 untuk menyalurkan bantuan khusus bagi kelompok negara HIPC yang dinilai eligible, sedangkan MDRI Trust dibentuk dalam rangka penghapusan 100% utang kelompok negara Low-Income Countries yang dananya berasal dari 3 lembaga multilateral (IDA, AfDF dan IMF)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

Pada November 2007 ASEAN mencatat babak baru dalam sejarah kerja sama ekonomi regional dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan cetak biru (*blue print*) langkah-langkah menuju MEA 2015¹. Disahkannya deklarasi tersebut memberi implikasi bahwa integrasi ekonomi ASEAN telah menjadi suatu komitmen yang tidak dapat ditawar lagi. Secara ringkas, MEA adalah transformasi ASEAN menjadi sebuah wilayah di mana barang, jasa, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas tanpa batas yang didukung oleh pergerakan modal yang lebih bebas. Dampak perubahan ini adalah terciptanya konfigurasi baru distribusi output produksi dan faktor produksi perekonomian intra ASEAN.

Secara teoritis, integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara di dalamnya, di antaranya melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, termasuk terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Hal itu juga didukung oleh banyaknya hasil empiris yang menunjukkan adanya hubungan positif antara integrasi ekonomi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat sebaliknya, di mana integrasi ekonomi seringkali dipandang hanya memberi keuntungan pada negara-negara tertentu.

Agar dapat menuai manfaat optimal dari integrasi yang akan terjadi, diperlukan suatu kajian menyeluruh untuk memperkirakan implikasi dari integrasi terhadap perekonomian nasional. Kajian itu diperlukan agar Pemerintah dan semua elemen bangsa dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan agar pada akhirnya Indonesia dapat turut berperan sebagai 'pemain' dan bukan hanya menjadi 'ladang pemasaran' bagi negara lain. Secara umum, peluang dan tantangan pembentukan MEA bagi perekonomian nasional disampaikan dalam uraian berikut.

Peluang bagi Indonesia

Dari sisi perdagangan, terbentuknya MEA menjanjikan peluang potensial karena ASEAN yang terintegrasi membuat pasar produk Indonesia menjadi lebih besar.

Pada tahun 2006 jumlah penduduk ASEAN mencapai 567,6 juta orang dengan nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$1,1 triliun (tumbuh 5,7%). Prospek pertumbuhan ke depan yang terus menjanjikan menjadikan ASEAN sebagai peluang pasar maupun basis produksi yang sangat potensial. Secara sektoral, salah satu sektor potensial adalah sektor elektronik, termasuk di dalamnya industri teknologi informasi dan komunikasi. Sektor elektronik merupakan sektor yang memiliki tingkat integrasi industri yang tinggi di ASEAN. Hal itu berarti produk elektronik yang dihasilkan oleh ASEAN diproses di antara negara anggota ASEAN sendiri. Hal itu telah menjadikan ASEAN sebagai basis produksi untuk produk elektronik. Untuk Indonesia, dari delapan sektor prioritas di luar jasa², Indonesia memiliki keunggulan di lima sektor yaitu pertanian, produk kayu, perikanan, produk karet, dan elektronik. Pemetaan sektor unggulan itu perlu dilakukan agar dapat dijadikan panduan dalam upaya peningkatan daya saing Indonesia.

Dari sisi penanaman modal langsung (investasi), berbagai kerja sama regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas dan teknologi informasi) membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik.

Dari sisi penarikan modal asing, perwujudan aliran modal yang lebih bebas di ASEAN (*freer flow of capital*) membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik derasnya aliran modal asing yang masuk ke kawasan ASEAN untuk ditempatkan di aset berdenominasi rupiah.

Selain peluang yang telah disebutkan, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan MEA adalah bahwa integrasi akan memungkinkan dipacunya peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, dan sumber daya manusia Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing maupun efisiensi perekonomian nasional. Berbagai program kerja sama regional ASEAN yang dilakukan dalam mendukung pencapaian MEA tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standardisasi, maupun mengikuti Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang telah disetujui

1 Pada 13 Januari 2007 para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan MEA dari semula pada 2020 menjadi 2015.

2 Delapan sektor prioritas meliputi sektor pertanian, perikanan, produk perawatan kesehatan, produk karet, produk kayu, tekstil dan produk tekstil, elektronika, teknologi informasi dan komunikasi serta otomotif.

bersama. Hal itu, misalnya pada liberalisasi tenaga kerja terampil di ASEAN yang harus diikuti dengan sertifikasi dan standarisasi kompetensi para profesional yang ada di ASEAN. Hal itu, pada akhirnya akan memaksa terjadinya proses perbaikan sumber daya manusia di berbagai sektor usaha di Indonesia.

Tantangan bagi Indonesia

Upaya mewujudkan segenap peluang pembentukan MEA tidak mudah untuk dilakukan mengingat terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

Kesamaan Keunggulan Komparatif Kawasan.

Dari pemetaan terhadap keunggulan negara ASEAN di kelompok barang yang termasuk sektor prioritas integrasi³, hampir sebagian besar negara mempunyai kesamaan komoditas unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan, produk karet, kayu, dan elektronik. Kesamaan itu menyebabkan rendahnya pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20%-25% dari total perdagangan ASEAN. Untuk itu, perlu dilakukan strategi peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang sekaligus asesmen terhadap dampak substitusi impor yang berpotensi meningkat sejalan dengan terhapusnya hambatan perdagangan di ASEAN. Untuk perdagangan intra-ASEAN, pangsa Indonesia masih relatif rendah (26%) dibandingkan dengan Singapura (31,8%) dan Malaysia (29%). Berbagai tantangan juga dihadapi di sektor jasa, misalnya pada jasa pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu dari empat sektor jasa yang diprioritaskan dalam cetak biru MEA 2015, bersama dengan jasa penerbangan, kesehatan, dan e-ASEAN. Saat ini industri pariwisata ASEAN masih didominasi oleh Malaysia, Thailand, Singapura dan Indonesia atau ASEAN-4. Ditinjau dari daya saing industri pariwisata, berdasarkan Tabel "Travel and Tourism Competitiveness"⁴ dapat diketahui bahwa Singapura menduduki peringkat tertinggi di ASEAN, diikuti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Perkembangan pariwisata intra-ASEAN yang didominasi oleh ASEAN-4 secara tidak langsung menimbulkan persaingan ketat di antara keempat negara tersebut, khususnya dalam menarik wisatawan dari ASEAN maupun non-ASEAN, mengingat keempat negara itu mempunyai karakteristik tujuan wisata yang mirip. Berdasarkan Tabel "Travel and Tourism Competitiveness" tersebut juga terungkap bahwa salah satu kelemahan dalam pariwisata Indonesia adalah kurang optimalnya

pengelolaan aspek pemasaran, baik dari sisi anggaran (biaya promosi) maupun pendirian pusat promosi wisata⁵.

Tingginya Hambatan Nontarif. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki hambatan nontarif. Hambatan nontarif ini salah satunya tercermin dari banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor/impor, terutama yang terkait dengan perizinan, yaitu lebih dari 22 instansi Pemerintah, dengan lebih dari 40 dokumen yang harus dikeluarkan. Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dari integrasi ekonomi ASEAN, berbagai hambatan yang menyebabkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi yang melemahkan daya saing harus segera dibenahi. Koordinasi antarsektor dan antarinstansi terkait, terutama dalam menyusun kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, dan mengharmonikan kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan.

Penyesuaian Agenda Nasional dengan Komitmen

MEA. Mengingat terdapat kewajiban melaksanakan komitmen sesuai cetak biru MEA, Indonesia perlu melakukan penyesuaian komitmen MEA tersebut dengan tujuan dan agenda nasional, *roadmap*, serta peraturan terkait di dalam negeri. Hal tersebut diperlukan agar implementasi jadwal strategis dapat dilakukan sesuai dengan kesiapan dalam negeri, mengingat implementasi MEA akan dipantau melalui *AEC balance scorecard* dengan indikator kinerja utama di setiap sektor yang diliberalisasi (barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil).

Peningkatan Kesadaran Pemangku Kepentingan (Stakeholders) atas Jadwal Strategis Menuju

MEA 2015. Selama ini, pemahaman tentang komitmen MEA dan tahapan implementasi yang akan dilakukan Indonesia belum menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanya dilakukan oleh otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan. Efek negatif dari integrasi yang mungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan pada sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan ulang, peningkatan ketrampilan, atau peralihan perlahan-lahan ke pekerjaan lain. Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan.

3 Terdapat 12 Sektor Prioritas Integrasi (SPI) yang dipercepat integrasinya pada 2010, yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk hasil karet, tekstil dan *apparel*, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik.

4 Daya saing pariwisata ini didasarkan pada beberapa indikator, yakni peraturan, lingkungan bisnis dan infrastruktur serta sumber daya manusia dan kebudayaan yang ada di masing-masing negara.

5 Salah satu kegiatan promosi yang dilakukan saat ini adalah program *Visit Indonesia Year 2008* yang dilakukan melalui penciptaan dan penyelenggaraan acara wisata di daerah berdasarkan keunikan dan *image* sumber daya wisata yang dimiliki masing-masing daerah.



Bab 12

Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan 2008

Bab 12: Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan Tahun 2008

Di tengah gejolak yang mewarnai perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 6,2% atau melambat dibandingkan dengan tahun 2007. Di satu sisi, permintaan domestik berupa konsumsi rumah tangga dan investasi akan semakin berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Di sisi lain, peranan ekspor akan berkurang sebagai konsekuensi dari kondisi global yang kurang kondusif. Nuansa gejolak eksternal juga tercermin pada menurunnya surplus transaksi berjalan dan keseluruhan neraca pembayaran. Tantangan eksternal akan memberikan tekanan berat pada stabilitas makroekonomi dalam negeri. Tekanan tersebut diperkirakan akan terjadi pada sisi inflasi, sementara pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan tetap bergerak stabil. Peranan sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting dalam memitigasi dampak negatif gejolak eksternal terhadap prospek perekonomian. Bank Indonesia akan tetap konsisten mengarahkan kebijakannya untuk mencapai sasaran inflasi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan tetap menjaga kesinambungan fiskal sembari berupaya memberikan stimulus fiskal. Selain itu, dalam upaya meningkatkan daya saing perekonomian, Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah itu diharapkan tidak hanya memfasilitasi perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan sehat, tetapi juga akan meningkatkan sisi penawaran dari perekonomian sehingga mendukung upaya pengendalian inflasi dalam jangka menengah-panjang. Di bidang perbankan, upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan dan penguatan kelembagaan perbankan tetap menjadi perhatian utama Bank Indonesia. Kebijakan itu akan disertai oleh kebijakan di bidang sistem pembayaran untuk mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, efektivitas kebijakan moneter dan perbankan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kinerja perekonomian pada tahun 2008 tidak terlepas dari prakiraan perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif. Perekonomian global diwarnai oleh harga komoditas dunia yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari krisis *subprime mortgage* di AS. Meskipun dibayangi oleh tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan tingginya harga komoditas, kebijakan moneter global cenderung longgar sebagai upaya untuk mengatasi pelemahan ekspansi ekonomi dunia. Sejalan dengan hal itu, aliran modal asing ke *emerging markets*, termasuk ke kawasan Asia Pasifik, pada tahun 2008 diperkirakan masih tetap tinggi. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang stabil, ketersediaan pembiayaan, serta daya

beli masyarakat yang masih cukup tinggi. Dari sisi fiskal, pelaksanaan kebijakan tetap konsisten dalam koridor utama, yaitu pengendalian defisit anggaran dan tetap memberikan ruang bagi stimulus fiskal.

Dengan perkembangan global dan domestik tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diperkirakan sedikit lebih rendah yakni 6,2%. Dari sisi permintaan, perekonomian didukung oleh konsumsi swasta. Implementasi berbagai paket kebijakan investasi dan berjalannya proyek-proyek infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Optimalisasi pengeluaran anggaran juga turut mendukung kegiatan investasi oleh Pemerintah. Di sisi lain, prakiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat akan

berpengaruh pada kinerja perekonomian, khususnya ekspor. Sebaliknya, kegiatan impor diperkirakan meningkat pada tahun 2008 sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik. Dari sisi sektoral, aktivitas perekonomian diperkirakan meningkat pada sektor-sektor yang terutama terkait dengan kegiatan konsumsi. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

NPI tahun 2008 diperkirakan mencatat surplus yang cukup tinggi, meskipun menurun dibandingkan dengan tahun 2007. Penurunan kinerja neraca pembayaran tercermin di neraca transaksi berjalan, dan transaksi modal dan finansial. Menurunnya surplus transaksi berjalan disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor nonmigas seiring prospek ekonomi global yang melambat. Sementara itu, penurunan surplus di transaksi finansial terkait dengan menurunnya arus modal portofolio.

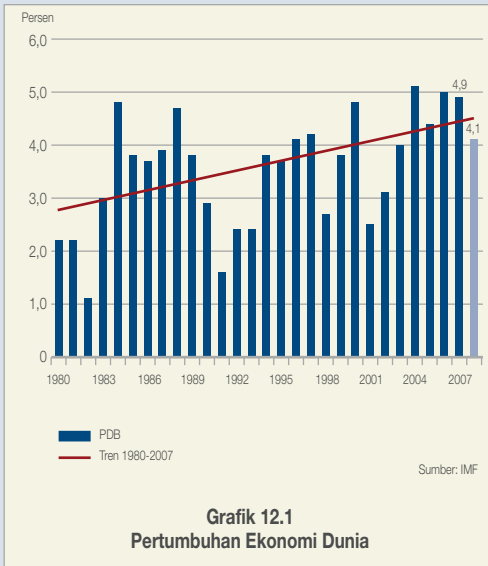
Nilai tukar rupiah diperkirakan terjaga stabil. Sejalan dengan kinerja neraca pembayaran yang masih cukup solid, dan didukung oleh konsistensi, kehati-hatian, dan keselarasan pengelolaan kebijakan makroekonomi, nilai tukar rupiah selama tahun 2008 diperkirakan tetap bergerak stabil. Imbal hasil investasi dalam rupiah yang tetap menarik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan mendorong aliran masuk modal asing. Terkait dengan hal tersebut, keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar valas diperkirakan tetap terjaga.

Inflasi IHK pada tahun 2008 diperkirakan mengalami tekanan berat yang terutama berasal dari faktor eksternal. Gejala eksternal diperkirakan mendorong meningkatnya tekanan *imported inflation*. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan juga bersumber dari meningkatnya ekspektasi inflasi. Namun, peningkatan tekanan inflasi tersebut diperkirakan dapat diredam oleh stabilnya nilai tukar. Di kelompok *administered*, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk tidak menaikkan harga kelompok *administered* yang strategis. Sementara itu, tekanan inflasi di kelompok *volatile food* diperkirakan masih cukup tinggi walaupun cenderung menurun. Secara keseluruhan, pencapaian sasaran inflasi tahun 2008 diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari faktor eksternal. Inflasi diperkirakan mencapai 6,0%-6,5% dengan kecenderungan mencapai batas atas prakiraan. Hal ini sejalan dengan usulan Pemerintah pada RAPBN-P 2008 untuk menggunakan asumsi inflasi 6,5% atau lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Kinerja perbankan selama tahun 2008 diperkirakan membaik. Sejalan dengan prospek ekonomi yang cukup baik serta didukung oleh stabilitas sistem keuangan, penyaluran kredit perbankan diperkirakan akan menunjukkan peningkatan. Kredit diperkirakan tumbuh sebesar 22%-24%, dengan dukungan penghimpunan dana masyarakat (DPK) yang meningkat sebesar 16%-18% dari tahun sebelumnya. Kondisi dimaksud disertai dengan perbaikan kualitas kredit, sebagaimana tercermin pada menurunnya NPL.

Aktivitas perekonomian pada tahun 2008 masih dihadapkan pada sejumlah risiko. Risiko terbesar terutama bersumber dari eksternal berupa perlambatan ekonomi dunia yang lebih dalam, harga komoditas internasional yang lebih tinggi dari perkiraan, dan berlanjutnya gejolak di pasar keuangan dunia. Berbagai faktor tersebut berpotensi memberi tekanan pada anggaran Pemerintah, kondisi neraca pembayaran, dan perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi domestik, tantangan perekonomian bersumber dari *lifting* minyak yang lebih rendah dari prakiraan dan masalah-masalah di level mikro yang menghambat perbaikan iklim investasi serta menahan percepatan proyek infrastruktur. Belum optimalnya respons kebijakan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai kondisi tersebut ditambah dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai, terganggunya pasokan barang dan distribusi kebutuhan pokok berpotensi meningkatkan inflasi. Apabila risiko tersebut tidak tertangani dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara inflasi berpotensi lebih tinggi dari prakiraan.

Sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan lebih diintensifkan untuk menjawab tantangan di atas. Kebijakan fiskal secara konsisten akan diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap memberikan stimulus bagi perekonomian. Kebijakan moneter secara konsisten akan diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah. Sinergi kebijakan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan pelaku ekonomi pada terjaganya kestabilan makroekonomi yang menjadi modal utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di bidang perbankan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan program konsolidasi untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kompetitif, seraya berupaya untuk terus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung efektivitas kebijakan moneter dan perbankan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.



Tabel 12.1

Proyeksi Ekonomi Internasional

	2005	2006	2007	Proyeksi 2008
PDB Dunia	4,4	5	4,9	4,1
Negara Maju	2,5	3	2,6	1,8
– AS	3,1	2,9	2,2	1,5
– Eropa	1,5	2,8	2,6	1,6
– Jepang	1,9	2,4	2,1	1,5
– Negara Maju Lainnya	3,2	3,7	3,8	2,8
Negara Berkembang	7	7,7	7,8	6,9
Afrika	5,9	5,8	6	7
Eropa Timur dan Tengah	5,6	6,4	5,5	4,6
Negara Persemakmuran	6,6	8,1	8,2	7
Negara Berkembang Asia	9	9,6	9,6	8,6
– China	10,4	11,1	11,4	10
Negara Timur Tengah	5,6	5,8	6	5,9
Amerika Latin	4,6	5,4	5,4	4,3

Sumber: IMF, WEO, Januari 2008.

Beberapa Asumsi Dasar

Lingkungan Global

Perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2008, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 4,9% (grafik 12.1). Perlambatan ekonomi dunia terutama terjadi di negara maju sebagai dampak dari krisis *subprime mortgage* di AS yang berkepanjangan. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam WEO revisi Januari 2008 telah mengubah prakiraan pertumbuhan negara maju seperti AS, kawasan Euro, dan Jepang menjadi lebih rendah (Tabel 12.1). Namun, perlambatan tersebut masih dapat diimbangi oleh ekspansi ekonomi negara berkembang. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih cukup tinggi, namun berada di bawah tren pertumbuhan jangka panjangnya. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan memperlambat volume perdagangan dunia.

Melambatnya perekonomian dunia diperkirakan menurunkan harga komoditas nonmigas namun masih pada level yang relatif tinggi. Kenaikan harga yang cukup tajam pada tahun 2007 sebesar 14% diperkirakan mulai akan terkoreksi menjadi lebih rendah pada tahun 2008. Penurunan yang cukup besar terutama terjadi pada komoditas logam dasar sejalan dengan perbaikan pasokan yang sempat tertunda sejak pertengahan tahun 2007. Berbagai hambatan sisi pasokan yang dihadapi oleh produsen baik yang disebabkan faktor alam maupun tenaga kerja serta kapasitas mesin diperkirakan mulai membaik. Namun untuk harga beberapa komoditas

pangan, seperti jagung, CPO, dan gula, diperkirakan masih relatif tinggi sejalan dengan permintaan yang tinggi terkait dengan upaya substitusi energi.

Selama tahun 2008 harga minyak mentah diperkirakan bertahan tinggi. Secara fundamental tingginya harga minyak dunia saat ini disebabkan oleh sisa kapasitas produksi minyak dunia yang masih kecil, faktor geopolitik dan iklim serta masih relatif tingginya permintaan minyak dari China dan India. Tekanan harga juga disebabkan oleh aksi spekulatif para pelaku pasar keuangan di pasar komoditas. Kecenderungan beralihnya pelaku pasar keuangan ke bursa komoditas dipicu oleh depresiasi dolar AS yang menurunkan nilai aset dalam denominasi dolar AS. Ke depan, melambatnya perekonomian dunia diperkirakan mengurangi tekanan terhadap harga minyak. Di samping itu, seiring dengan pulihnya kondisi pasar finansial akibat kebijakan beberapa bank sentral dalam menambah likuiditas, perilaku spekulatif para pelaku pasar juga akan cenderung berkurang. Sepanjang tahun 2008, rata-rata harga minyak dunia, menurut beberapa institusi diperkirakan sekitar \$75-90 per barel (Tabel 12.2).

Resistensi harga komoditas dunia pada level yang masih tinggi menyebabkan tekanan pada inflasi dunia tahun

Tabel 12.2

Perkiraan Harga Minyak Berbagai Lembaga

	2008	Keterangan
IMF	75,0	Rata-rata WTI, Brent, Dubai
Consensus Forecast	78,5	Posisi akhir Desember 2008
EIA	86,0	Energy Inform. Adm. US-Feb 08
Bloomberg, tgl 13 Feb 08	80,0	27 Responden
World Bank	84,1	Publikasi Januari 2008

Tabel 12.3
Aliran Modal ke *Emerging Markets*

	2005	2006	2007*	2008**
Neraca Transaksi Berjalan	274,1	380,2	419,5	374,0
Pembiayaan Eksternal, neto				
Aliran modal swasta, neto	519,6	572,8	620,3	593,1
Investasi Equity, neto	251,3	228,3	265,1	277,3
Investasi Langsung, neto	200,6	167,3	212,9	223,2
Investasi Portofolio, neto	53,7	62,0	52,2	54,0
Kreditor Swasta, neto	265,5	343,6	355,2	315,9
Bank Komersial, neto	145,7	202,3	188,5	145,8
Bukan Bank, neto	119,5	141,3	166,6	170,0
Aliran Modal Pemerintah, neto	-64,2	-65,0	3,3	9,5
Lembaga Keuangan Internasional	-38,6	-32,9	1,9	6,8
Kreditor Bilateral	-25,6	-32,1	1,3	2,7
Pinjaman Residen/lainnya, neto ¹	-287,3	-334,1	-286,8	-269,0
Cadangan Devisa (- = naik)	-442,2	-554,0	-756,2	-707,0

* Angka estimasi

** Proyeksi IIF

¹ Termasuk *net lending, monetary gold, dan errors and omissions*.

2008. Berdasarkan perkiraan IMF pada WEO Oktober 2007, inflasi tahun 2008 di negara maju diperkirakan sedikit meningkat menjadi 2,2%, sementara inflasi di negara berkembang 4,8%. Namun, berdasarkan asesmen perkembangan terkini, baik inflasi inti maupun IHK menunjukkan tren meningkat sehingga terdapat kecenderungan perkiraan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan IMF.

Dengan prakiraan perekonomian dunia yang melambat, kebijakan moneter global, khususnya di negara maju, diperkirakan cenderung longgar. Kebijakan itu ditempuh untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi lebih dalam, meskipun tekanan inflasi cenderung meningkat. Dengan perkembangan kebijakan moneter global tersebut, aliran modal asing ke *emerging markets* diperkirakan tetap tinggi, namun tidak setinggi tahun sebelumnya (Tabel 12.3). Peningkatan aliran modal terutama dalam bentuk FDI dan portofolio.

Skenario Kebijakan Fiskal

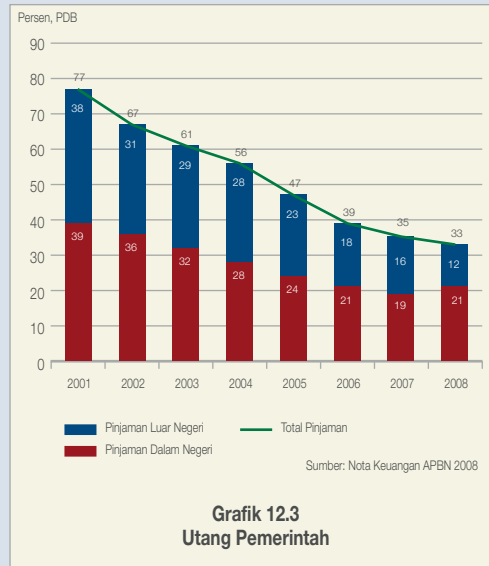
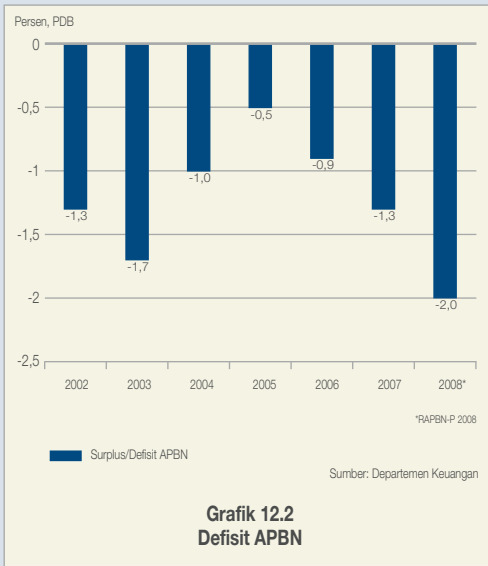
Kebijakan fiskal tahun 2008 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap berupaya memberikan stimulus fiskal. Termasuk di dalam kebijakan fiskal tersebut antara lain program stabilisasi harga pangan. Kebijakan fiskal dilakukan dalam dua koridor utama, yaitu konsolidasi fiskal melalui pengendalian defisit anggaran dan strategi pembiayaan anggaran yang ditujukan pada penurunan beban dan risiko utang Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan stimulus fiskal, pada awal tahun Pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2008 sebesar 1,7% dari PDB.

Ke depan, APBN tahun 2008 akan menghadapi tekanan dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, harga komoditas dunia yang terus meningkat berpotensi meningkatkan harga-harga domestik. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, Pemerintah akan memberikan subsidi dalam jumlah besar baik untuk subsidi energi maupun komoditas pangan strategis. Dari internal, pemerintah menghadapi risiko *lifting* di bawah asumsi APBN. Kedua kondisi tersebut akan meningkatkan defisit APBN tahun 2008. Pemerintah akan melakukan berbagai langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit RAPBN-P 2008 dapat dikendalikan menjadi 2% dari PDB (Grafik 12.2). (Boks: Sembilan Langkah Pengamanan APBN tahun 2008)

Kebijakan fiskal di sisi pendapatan secara umum diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tetap memberikan insentif fiskal secara terbatas.¹ Konsolidasi di sisi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan pangsa penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) melalui langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan serta reformasi administrasi perpajakan. Beberapa kebijakan utama di bidang nonpajak juga dilakukan seperti upaya peningkatan volume *lifting* minyak mentah; optimalisasi penerimaan dari SDA nonmigas, peningkatan upaya pencegahan *illegal logging, illegal mining dan illegal fishing*, penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN, dan peningkatan pengawasan pungutan PNPB di berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L).

Di sisi belanja, Pemerintah akan lebih mementingkan kualitas pengeluaran. Hal itu sejalan dengan semakin terbatasnya penerimaan negara terutama yang bersumber dari sektor perpajakan. Upaya-upaya tersebut meliputi perbaikan pendapatan aparatur negara, pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang, peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan anggaran untuk infrastruktur, dukungan terhadap stabilitas harga melalui pemberian subsidi, peningkatan anggaran pendidikan, dan kesinambungan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk masyarakat kurang mampu.

1 Beberapa insentif fiskal untuk tahun 2008 adalah PMK No.177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 berlaku surut sejak 16 Juli 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi, PMK No.178/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 berlaku 1 Januari 2008-31 Desember 2008 tentang PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Hulu Migas dan Panas Bumi, PMK No.179/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 berlaku sejak 1 Januari 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau di bawah air.



Di sisi pembiayaan, Pemerintah masih akan mengedepankan upaya pembiayaan dari sumber dalam negeri (Tabel 12.4). Peningkatan defisit akan dibiayai dengan peningkatan neto penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dari Rp91,6 triliun pada APBN tahun 2008 menjadi Rp116,6 triliun pada RAPBN-P tahun 2008 (Tabel 12.4). Melanjutkan strategi pada tahun 2007, selama tahun 2008 Pemerintah kembali akan menerbitkan beberapa jenis SBN untuk memperluas basis investor, termasuk rencana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Sementara target dari PT PPA dan privatisasi BUMN diperkirakan masih minimal dan hanya mencapai sekitar Rp2 triliun. Selain itu, searah dengan kebijakan strategi pengelolaan utang jangka panjang yang diarahkan pada sumber utang dari dalam negeri, pada tahun 2008 diperkirakan kembali mencatat pembayaran utang luar negeri neto. Pemerintah juga masih akan memberikan dukungan pada proyek infrastruktur melalui *Public Private Partnership* (PPP) sebesar Rp2,8 triliun.

Konsolidasi fiskal yang dilakukan Pemerintah diperkirakan masih menghasilkan stimulus fiskal berupa pertumbuhan konsumsi dan investasi pemerintah yang masih positif. Kenaikan defisit RAPBN-P tahun 2008 terutama disumbang kenaikan hampir seluruh komponen subsidi sebesar dua kali lipat dari APBN tahun 2008 dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat. Sementara itu, konsumsi dan investasi masih akan tumbuh namun dengan laju yang melambat. Di tingkat pusat, peningkatan konsumsi Pemerintah terutama didorong oleh peningkatan kesejahteraan pegawai negeri melalui kenaikan gaji pokok sekitar 20%. Kenaikan belanja barang antara lain berkaitan

dengan adanya reorganisasi dan pemekaran satuan kerja baru. Kenaikan belanja lainnya yang menampung kenaikan anggaran untuk langkah-langkah kebijakan (*policy measures*), mencakup alokasi anggaran untuk Pemilu 2009 dan penyediaan cadangan beras Pemerintah, dana cadangan tanggap darurat sosial-keamanan serta belanja penunjang lainnya. Sementara itu pengeluaran investasi didorong oleh naiknya anggaran untuk infrastruktur. Dua departemen yang mendapat anggaran infrastruktur cukup besar adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.

Peningkatan kontribusi fiskal diperkirakan juga terjadi di tingkat daerah. Kegiatan konsumsi dan investasi pemerintah daerah ditandai dengan meningkatnya alokasi belanja untuk daerah seiring dengan peningkatan penerimaan dalam negeri yang tercermin dari meningkatnya rasio penerimaan pajak menjadi 14% dari PDB pada RAPBN-P tahun 2008. Transfer ke sektor riil akan meningkat seiring dengan peningkatan anggaran bantuan sosial dan subsidi. Peningkatan anggaran bantuan sosial berupa peningkatan anggaran penanggulangan bencana alam, peningkatan anggaran bantuan melalui kementerian/lembaga, serta program bantuan kepada masyarakat yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah kelas III dan rumah sakit swasta yang ditunjuk, dan Program Keluarga Harapan yang merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai. Sementara itu, peningkatan subsidi terutama disebabkan peningkatan subsidi energi seiring dengan lebih tingginya prakiraan harga minyak

Tabel 12.4
APBN dan RAPBN-P 2008

triliun Rp

Rincian	APBN 2008		RAPBN-P 2008	
	Triliun Rp	% PDB	Triliun Rp	% PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	781,4	18,1	839,4	19,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	779,2	18,1	836,7	19,5
1. Penerimaan Pajak	592,0	13,7	601,5	14,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	187,2	4,3	235,2	5,5
Minyak Bumi dan Gas Alam	117,9	2,7	152,2	3,6
II. Hibah	2,1	0,0	2,7	0,1
B. Belanja Negara	854,7	19,9	926,2	21,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	573,4	13,3	641,4	15,0
1. Belanja Kementrian/Lembaga (K/L)	311,9	7,2	272,1	6,3
2. Belanja Non K/L	261,5	6,1	369,3	8,6
– Pembayaran Bunga Utang	91,4	2,1	94,2	2,2
i. Utang Dalam Negeri	62,7	1,5	65,0	1,5
ii. Utang Luar Negeri	28,6	0,7	29,1	0,7
– Subsidi	97,9	2,3	208,6	4,9
i. Subsidi Energi	75,6	1,8	161,2	3,8
ii. Subsidi Nonenergi	22,3	0,5	47,4	1,1
– Belanja Lainnya	25,0	0,6	19,3	0,5
II. Anggaran Belanja Untuk Daerah	281,2	6,5	284,8	6,6
1. Dana Perimbangan	266,8	6,2	274,8	6,4
a. Dana Bagi Hasil	66,1	1,5	74,1	1,7
b. Dana Alokasi Umum	179,5	4,2	179,5	4,2
c. Dana Alokasi Khusus	21,2	0,5	21,2	0,5
2. Dana Otonomi Khusus & Penyeimbang	14,4	0,3	10,1	0,2
C. Keseimbangan Primer	18,1	0,4	7,4	0,2
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(73,3)	(1,7)	(86,8)	(2,0)
E. Pembiayaan	73,3	1,7	86,8	2,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	90,0	2,1	104,2	2,4
1. Perbankan Dalam Negeri	0,3	0,0	(11,7)	(0,3)
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	89,7	2,1	115,9	2,7
a. Privatisasi (neto)	1,5	0,0	1,5	0,0
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan	0,6	0,0	0,6	0,0
c. Penjualan Obligasi Pemerintah, neto	91,6	2,1	116,6	2,7
d. Dana Investasi Pemerintah	(4,0)	(0,1)	(2,8)	(0,1)
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(16,7)	(0,4)	(17,4)	(0,4)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	43,0	1,0	44,2	1,0
a. Pinjaman Program	19,1	0,4	23,8	0,6
b. Pinjaman Proyek	23,9	0,6	20,4	0,5
2. Pembayaran Cicilan Pokok ULN	(59,7)	(1,4)	(61,6)	(1,4)
Asumsi:				
Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)		6,8		6,4
Inflasi (%)		6,0		6,5
Nilai tukar rata-rata (Rp/\$)		9100		9150
Suku bunga SBI 3 bulan rata-rata (%)		7,5		7,5
Harga minyak internasional (\$/barel)		60		83
<i>Lifting</i> minyak Indonesia (juta barel per hari)		1,034		0,910

Sumber: Departemen Keuangan.

mentah dan subsidi untuk komoditas pangan strategis. Dengan perkembangan tersebut, indikator *fiscal impulse*² mengindikasikan arah kebijakan fiskal sesuai dengan perkembangan kebutuhan perekonomian.

Kebijakan Sektorial

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kegiatan investasi dan ekonomi sektoral. Stimulus fiskal diarahkan pada upaya memperkuat sektor riil, diantaranya melalui peningkatan belanja modal. Selain memperkuat implementasi kebijakan iklim investasi, kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur termasuk mempersiapkan beberapa skema pembebasan tanah yang menjadi permasalahan utama dalam proyek infrastruktur. Berbagai kebijakan sektoral diarahkan untuk memberikan insentif dan mendorong pertumbuhan di masing-masing sektor ekonomi. Insentif tersebut antara lain pengurangan PPh atas jumlah penanaman modal, pembebasan atau keringanan bea masuk impor dan PPN barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah tertentu. Selain itu, Pemerintah juga telah mencanangkan program *Visit Indonesia Year 2008*, yang akan mendorong aktivitas ekonomi terutama yang terkait dengan sektor jasa, hotel, dan restoran. Sektor komunikasi juga akan semakin marak menyusul penetapan tarif interkoneksi baru pada tahun 2008.

Kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi akan diperkuat. Untuk menjaga pasokan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi kepada petani berupa pupuk, bunga kredit program, dan benih, di samping juga anggaran untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit. Departemen Pertanian menargetkan pencetakan areal persawahan baru pada tahun 2008 untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan pertanian. Pencetakan sawah tersebut akan dilaksanakan di luar Pulau Jawa, yaitu di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemerintah juga telah memberikan otoritas yang lebih besar kepada Bulog untuk melakukan impor beras. Selain itu, pemerintah menurunkan bea masuk impor beras sebesar Rp100,- menjadi Rp450/kg pada tahun 2008. Untuk mendukung daya beli masyarakat, Pemerintah masih akan menerapkan jaring pengaman sosial antara lain dengan meningkatkan volume beras untuk rakyat miskin (*raskin*) dan bantuan operasional sekolah.

Prakiraan Permintaan dan Penawaran Agregat

Peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diprakirakan masih berlanjut, namun dengan pertumbuhan yang melambat menjadi 6,2% (Tabel 12.5). Permintaan domestik berupa konsumsi dan investasi swasta akan menjadi mesin utama penggerak perekonomian. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor berpotensi melambat, sementara kegiatan investasi mulai mengambil peranan yang lebih besar dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah juga berpotensi melambat sejalan dengan meningkatnya alokasi untuk subsidi. Sejalan dengan perkembangan permintaan domestik, perekonomian didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Prakiraan Permintaan Agregat

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan lebih banyak didorong oleh meningkatnya permintaan domestik. Perbaikan daya beli masyarakat yang antara lain didorong oleh kenaikan gaji pegawai negeri dan UMP (Grafik 12.4) diprakirakan mendorong pertumbuhan konsumsi swasta. Kecenderungan penurunan suku bunga pada tahun 2007 juga turut menopang kenaikan konsumsi swasta dari sisi pembiayaan. Kegiatan investasi menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan membaiknya iklim investasi. Gejolak eksternal yang mewarnai perekonomian global diprakirakan akan memperlambat ekspor meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Sementara itu, impor akan meningkat seiring dengan menguatnya permintaan domestik.

Konsumsi Swasta

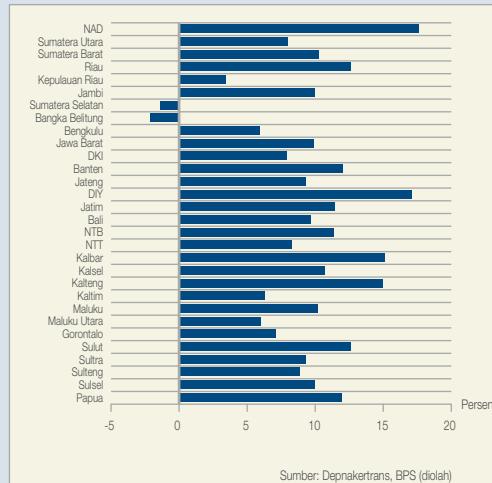
Dengan dukungan daya beli yang masih cukup tinggi dan ketersediaan pembiayaan, konsumsi swasta diprakirakan tetap tumbuh tinggi pada tahun 2008. Daya beli ditopang oleh kenaikan pendapatan masyarakat secara riil, antara lain akibat kenaikan gaji pegawai negeri sekitar 20% dan UMP. Berkembangnya pasar modal yang memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan berupa *capital gain* juga berpotensi meningkatkan daya beli

Tabel 12.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Komponen (persen, yoy)	2007	2008*
Produk Domestik Bruto	6,3	6,2
Konsumsi Swasta	5,0	5,4
Konsumsi Pemerintah	3,9	3,8
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9,2	9,3
Ekspor Barang dan Jasa	8,0	7,9
Impor Barang dan Jasa	8,9	9,4

* Prakiraan Bank Indonesia.

² Untuk penjelasan *Fiscal Impulse* lihat Bab Keuangan Pemerintah



Sumber: Depnakertrans, BPS (diolah)
Grafik 12.4
Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi Riil 2008

masyarakat terutama dari kalangan menengah ke atas. Ke depan, beberapa kebijakan fiskal yang dikeluarkan Pemerintah diperkirakan dapat menopang daya beli masyarakat. Selain itu, persiapan Pemilu tahun 2009 dan berlangsungnya Pilkada turut berperan mendorong konsumsi swasta. Dari sisi pembiayaan, peningkatan konsumsi didukung oleh pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit konsumsi oleh perbankan dan pembiayaan dari lembaga keuangan sejak pertengahan tahun 2007 diperkirakan akan terus berlanjut.

Konsumsi Pemerintah

Kegiatan konsumsi pemerintah pada tahun 2008 diperkirakan masih akan tumbuh namun dengan laju yang melambat. Walaupun defisit mengalami kenaikan cukup signifikan, kontribusi langsung sektor fiskal pada sektor riil melambat karena meningkatnya alokasi untuk subsidi. Perlambatan konsumsi terjadi baik pada konsumsi pemerintah pusat maupun konsumsi pemerintah daerah, seiring melambatnya pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, dan DAU.

Investasi

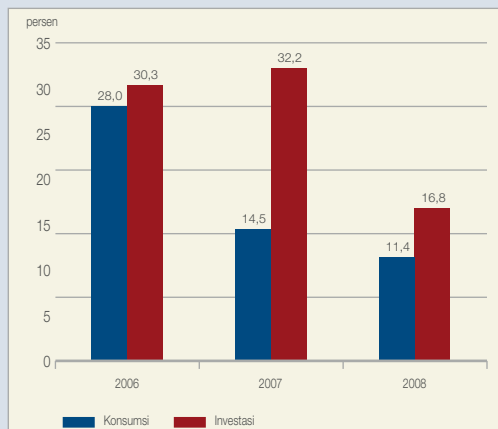
Kegiatan investasi pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi. Perbaikan iklim investasi diperkirakan akan mendorong akselerasi pertumbuhan investasi pada tahun 2008. Stimulus fiskal dalam bentuk investasi pemerintah juga masih berperan dalam meningkatkan investasi pada tahun 2008 meskipun dengan pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 12.5). Sementara itu, investasi swasta diperkirakan lebih berperan dalam mendorong investasi.

Berdasarkan jenis investasi, investasi bangunan diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2008 yang didorong oleh pembangunan berbagai proyek infrastruktur, yang dijalankan oleh pemerintah ataupun swasta. Salah satu proyek infrastruktur terbesar adalah pembangunan jalan tol. Ke depan, meskipun pelaksanaan proyek-proyek dimaksud diperkirakan terlambat dari jadwal semula, dengan usaha-usaha Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, terutama proses pembebasan tanah, investasi bangunan diperkirakan meningkat.

Sementara itu, investasi nonbangunan masih tumbuh positif. Iklim investasi yang diperkirakan membaik akan meningkatkan gairah investor untuk melakukan penanaman modal di dalam negeri. Data BKPM menunjukkan persetujuan permohonan investasi baik dari investor dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA) tahun 2007 meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 (Grafik 12.6 dan Grafik 12.7). Investasi yang diminati lebih banyak berupa investasi nonbangunan (*business investment*) pada sektor sekunder seperti industri makanan, kertas dan percetakan, serta kimia dan farmasi.

Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Pertumbuhan ekspor pada tahun 2008 berpotensi melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Potensi melambatnya ekspor disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia sehingga permintaan dunia terhadap produk dalam negeri menurun. Namun, perlambatan lebih dalam dapat ditahan dengan lebih terdistribusinya negara tujuan ekspor Indonesia. Pangsa ekspor nonmigas ke AS cenderung menurun,



Sumber: APBN, diolah
Grafik 12.5
Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi Pemerintah Nominal

sementara pangsa ekspor nonmigas ke *emerging markets*, terutama China dan India, semakin meningkat (Boks: *Intra Trade Emerging Markets*). Selain itu, ke depan ekspor masih akan lebih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam. Permintaan yang masih tinggi dari komoditas tersebut, terutama dari negara *emerging markets*, dan harga yang masih tinggi juga akan menahan perlambatan ekspor lebih jauh.

Pertumbuhan impor barang dan jasa riil pada tahun 2008 diperkirakan masih tumbuh tinggi seiring dengan masih tingginya permintaan domestik. Ekspansi ekonomi yang masih berlangsung diperkirakan akan mendorong kenaikan impor. Impor bahan baku diperkirakan akan meningkat sejalan dengan lebih tingginya kebutuhan untuk kegiatan ekonomi domestik. Selain itu, bertumbuhnya kegiatan investasi di dalam negeri akan mendorong peningkatan impor barang modal.

Prakiraan Penawaran Agregat

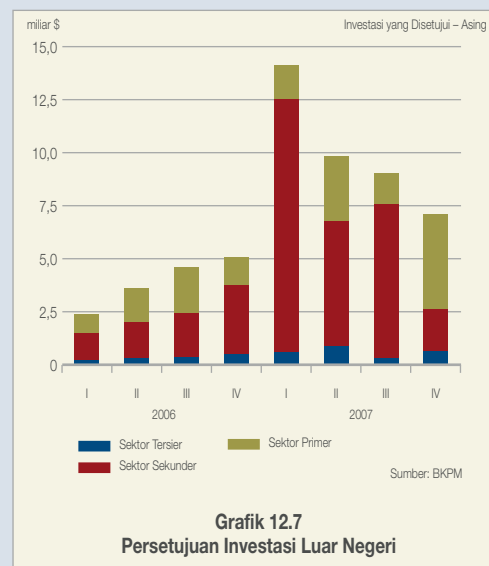
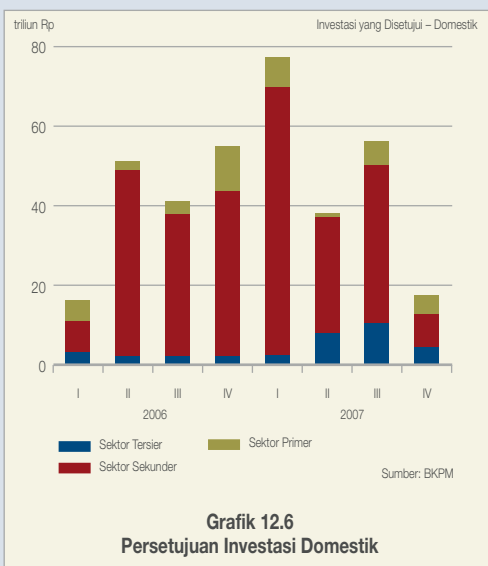
Di sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 diperkirakan akan ditopang pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi (Tabel 12.6).

Industri pengolahan, sebagai kontributor utama pertumbuhan di sisi sektoral, diperkirakan akan mencatat peningkatan pertumbuhan pada tahun 2008. Peningkatan tersebut disumbang terutama oleh subsektor industri pengolahan nonmigas. Kenaikan produksi diperkirakan dipicu oleh peningkatan permintaan sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih cukup tinggi.

Aktivitas di sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan juga meningkat. Kenaikan aktivitas konsumsi masyarakat diperkirakan akan mendorong kegiatan di subsektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, meningkatnya aktivitas bisnis serta pencanangan program pemerintah *Visit Indonesia Year 2008* diperkirakan akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi subsektor hotel dan restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi, terutama didorong oleh subsektor komunikasi. Kinerja subsektor komunikasi masih tetap mengesankan didukung oleh daya beli masyarakat yang masih tinggi. Permintaan akan sarana komunikasi yang meningkat diikuti oleh perbaikan suplai seiring dengan investasi yang dilakukan oleh para operator telepon dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan layanan selular tersebut dibarengi pula oleh biaya percakapan yang semakin terjangkau. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memprakirakan akan terjadi penurunan tarif pungut ke pelanggan yang cukup signifikan selama tahun 2008.

Sektor pertanian pada tahun 2008 diperkirakan masih tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan historis setelah krisis. Kinerja sektor itu terutama ditunjang oleh subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perkebunan. Di subsektor tanaman bahan makanan, *output* yang tinggi didorong oleh peningkatan produktivitas, khususnya padi. Proyeksi di subsektor tanaman bahan makanan itu antara lain sejalan dengan Angka Ramalan I-2008 yang dirilis BPS. Produksi padi tahun 2008 diperkirakan sebesar 58,27 juta ton GKG, naik 2,13% dari produksi tahun



Tabel 12.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

Komponen (persen)	2007	2008*
Produk Domestik Bruto	6,3	6,2
Pertanian	3,5	3,5
Pertambangan dan Penggalian	2,0	1,2
Industri Pengolahan	4,7	5,0
Listrik, Gas dan Air Bersih	10,4	11,4
Bangunan	8,6	9,3
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,5	8,7
Pengangkutan dan Komunikasi	14,4	14,6
Keuangan, Persewaan, dan Jasa	8,0	8,1
Jasa-jasa	6,6	3,3

* Perkiraan Bank Indonesia

2007 sebesar 57,05 juta ton. Kenaikan produksi juga terjadi pada komoditas jagung dan kedelai. Di subsektor perkebunan, produksi subsektor tanaman perkebunan diperkirakan tetap tinggi yang terutama didukung oleh produksi perkebunan kelapa sawit. Hal itu tidak terlepas dari produktivitas kebun yang tinggi serta insentif harga CPO di pasar internasional yang menarik.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan mengalami penurunan kinerja. Perlambatan volume perdagangan dunia pada tahun 2008 diperkirakan menyebabkan sedikit melemahnya permintaan akan barang tambang Indonesia, seperti nikel dan tembaga.

Sektor bangunan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2008. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan peran swasta diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor ini. Selain itu, pembangunan properti komersial, khususnya di Jakarta, diperkirakan masih meningkat sehingga menopang perbaikan kinerja sektor bangunan. Investasi pemerintah berupa proyek-proyek infrastruktur juga masih berperan di sektor itu meskipun tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2007.

Kinerja sektor keuangan pada tahun 2008 diperkirakan masih tetap kuat. Kegiatan ekonomi yang masih tinggi diperkirakan mendorong permintaan akan jasa intermediasi sektor keuangan. Prospek sektor keuangan yang membaik terindikasi dari rencana bisnis bank dalam penyaluran kredit dan rencana beberapa lembaga keuangan nonbank untuk menerbitkan obligasi pada tahun 2008 untuk membiayai ekspansi usahanya. Sementara itu, kegiatan *leasing* terutama untuk peralatan berat diperkirakan meningkat karena berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Prakiraan Neraca Pembayaran Indonesia

Pada tahun 2008 NPI diperkirakan mencapai surplus yang cukup tinggi, meskipun menurun dibandingkan dengan tahun 2007 (Tabel 12.7). Penurunan surplus neraca pembayaran itu disebabkan oleh penurunan kinerja neraca transaksi berjalan serta neraca modal dan finansial. Di tengah penurunan tersebut, investasi langsung diperkirakan meningkat yang didukung oleh beberapa langkah kebijakan Pemerintah untuk mendorong sektor riil dan perbaikan iklim investasi. Di sisi neraca transaksi berjalan, melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diikuti penurunan volume perdagangan dunia berdampak pada melemahnya kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, impor masih tumbuh tinggi sejalan dengan aktivitas domestik yang masih cukup tinggi. Dengan prakiraan tersebut, surplus transaksi berjalan mengalami penurunan, meskipun masih berada pada level yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, NPI tahun 2008 diperkirakan mencatat surplus \$11,3 miliar sehingga posisi cadangan devisa di akhir tahun 2008 diperkirakan mencapai \$68,2 miliar atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah.

Neraca Transaksi Berjalan

Surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007, walaupun masih berada dalam level yang tinggi. Penurunan surplus tersebut terutama akibat pertumbuhan ekspor nonmigas yang melambat mengikuti prospek ekonomi global yang melambat dan defisit transaksi jasa dan pendapatan yang meningkat. Penurunan surplus yang lebih tajam diperkirakan dapat dihindari karena ditopang oleh kenaikan harga minyak dan tertahannya akselerasi pertumbuhan impor nonmigas. Kinerja transaksi berjalan diperkirakan juga akan terbantu oleh prospek kenaikan arus masuk wisatawan terkait program *Visit Indonesia Year 2008*.

Neraca perdagangan nonmigas diperkirakan mencatat surplus yang relatif sama dengan tahun 2007. Prospek perlambatan perekonomian dunia menyebabkan ekspor nonmigas tumbuh melambat. Impor nonmigas masih tumbuh tinggi sejalan dengan permintaan domestik yang masih cukup tinggi. Sementara itu, neraca perdagangan migas diperkirakan mengalami surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. Pertumbuhan nilai ekspor migas diperkirakan lebih rendah yang disebabkan oleh penurunan produksi LPG dan LNG. Sementara itu, pertumbuhan nilai impor migas juga diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor migas.

Tabel 12.7
Proyeksi Neraca Pembayaran

juta \$

Rincian	2007	2008*
I. Transaksi Berjalan	11.009	10.102
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)	33.083	33.550
– Ekspor, fob.	118.014	128.918
– Impor, fob.	-84.930	-95.368
1. Nonmigas	27.048	27.109
– Ekspor	93.142	102.456
– Impor	-66.094	-75.347
2. Migas	6.036	6.440
– Ekspor	24.872	26.461
– Impor	-18.836	-20.021
B. Jasa-jasa, bersih	-11.103	-11.586
C. Pendapatan, bersih	-15.875	-16.737
D. Transfers berjalan, bersih	4.903	4.875
II. Transaksi Modal dan Finansial	2.753	1.225
A. Transaksi Modal	530	192
B. Transaksi Finansial	2.223	1.003
1. Investasi langsung	1.164	3.055
2. Investasi Portofolio	6.981	6.050
3. Investasi Lainnya	-5.922	-8.072
III. Jumlah (I+II)	13.726	11.328
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-1.220	0
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	12.543	11.328
VI. Cadangan devisa dan yang terkait ¹⁾	-12.543	-11.328
A. Perubahan Cadangan Devisa	-12.543	-11.328
B. Pinjaman IMF	0	0
Catatan:		
Posisi Cadangan Devisa	56.920	68.249
(Setara impor dan Pembayaran utang luar negeri pemerintah)	5,7	6,2

1) Tanda - (minus) menunjukkan surplus dan sebaliknya untuk tanda + (plus) menunjukkan defisit.

* Prakiraan Bank Indonesia

Defisit transaksi jasa-jasa dan pendapatan diprakirakan meningkat pada tahun 2008, sementara transfer relatif tetap. Tingginya harga minyak dan kegiatan impor berpengaruh terhadap peningkatan defisit pada neraca jasa, terutama jasa transportasi impor. Selain itu, defisit neraca pendapatan diprakirakan meningkat sebagai konsekuensi dari bertambahnya modal asing yang masuk ke dalam negeri. Secara keseluruhan, surplus transfer berjalan relatif tidak berubah.

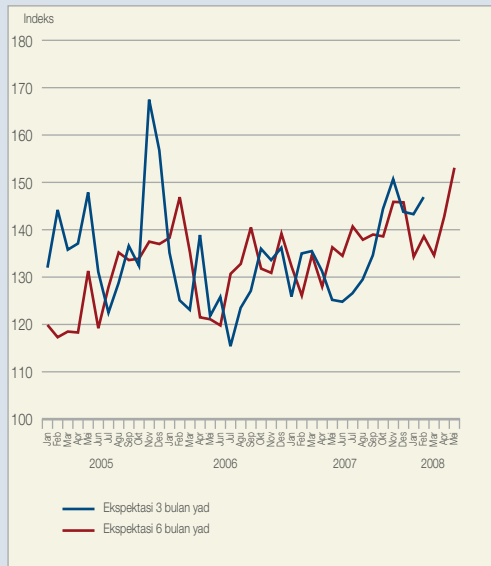
Neraca Transaksi Modal dan Finansial

Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan mencatat surplus yang lebih rendah. Penurunan surplus terutama disebabkan oleh menurunnya investasi portofolio dan meningkatnya sisi aset investasi. Di lain pihak, aliran modal masuk jangka panjang dalam bentuk FDI diprakirakan meningkat sejalan dengan membaiknya iklim investasi domestik. Minat investor di sektor migas diprakirakan meningkat seiring dengan masih tingginya harga minyak dan insentif perpajakan yang ditawarkan

Pemerintah. Aliran modal jangka pendek (investasi portofolio) pada tahun 2008 diprakirakan mencatat surplus yang lebih rendah. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak krisis *subprime mortgage* di AS yang belum sepenuhnya terungkap ke permukaan. Pemulihan arus modal masuk tersebut diprakirakan berjalan agak lambat sehingga untuk keseluruhan tahun 2008 jumlahnya tidak sebesar tahun 2007.

Prakiraan Nilai Tukar Rupiah

Untuk keseluruhan tahun 2008, nilai tukar rupiah diprakirakan dapat diupayakan bergerak relatif stabil. Prakiraan tersebut didukung oleh kondisi fundamental ekonomi domestik yang terjaga terutama kinerja neraca pembayaran yang cukup baik. Secara umum, kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing masih cukup berimbang. Permintaan valas meningkat terutama akibat peningkatan kegiatan ekonomi yang kemudian mendorong meningkatnya impor. Sementara itu dari sisi penawaran, sumber pasokan valas diprakirakan



Grafik 12.8
Ekspektasi Inflasi Survei Konsumen dan Survei Penjualan Eceran

cukup memadai yang berasal dari hasil devisa ekspor nonmigas dan arus modal masuk terutama investasi portofolio. Pasokan valuta asing yang bersumber dari devisa hasil ekspor masih cukup tinggi, meskipun dengan pertumbuhan ekspor nonmigas yang melambat. Surplus transaksi berjalan tersebut diperkirakan masih dapat berperan sebagai penyangga (*cushion*) dalam memitigasi kemungkinan *shock* eksternal di sisi neraca modal dan finansial khususnya investasi portofolio. Kondisi tersebut diperkirakan dapat menopang perkembangan nilai tukar rupiah untuk tetap stabil.

Prakiraan Inflasi

Inflasi IHK pada tahun 2008 diperkirakan mengalami tekanan berat, terutama dari faktor eksternal berupa tingginya harga komoditas internasional serta meningkatnya inflasi negara mitra dagang. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari meningkatnya ekspektasi inflasi. Namun, nilai rupiah yang relatif stabil diperkirakan dapat mengurangi tekanan inflasi tersebut. Di kelompok *administered*, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga kelompok *administered* yang strategis. Tekanan inflasi dari kelompok *volatile food* diperkirakan masih cukup tinggi walaupun cenderung menurun. Tingginya tekanan inflasi *volatile food* terkait dengan masih tingginya harga komoditas pangan internasional. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, inflasi IHK tahun 2008 diperkirakan akan berada pada kisaran 6,0%-6,5%, dengan kecenderungan menuju batas atas kisaran atau

berada di atas sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar $5\% \pm 1\%$.

Faktor Fundamental

Tekanan inflasi yang bersumber dari faktor fundamental pada tahun 2008 diperkirakan meningkat, yang terutama berasal dari sisi eksternal. Meningkatnya tekanan inflasi dari sisi eksternal karena meningkatnya inflasi negara mitra dagang dan tingginya harga komoditas internasional. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari meningkatnya ekspektasi inflasi. Masih cukup tingginya daya beli masyarakat, misalnya karena kenaikan upah minimum propinsi (tabel 12.8), diperkirakan akan mendorong kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat. Hal itu dikonfirmasi oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) dan Survei Konsumen (SK) (Grafik 12.8). Namun, peningkatan tekanan inflasi tersebut diperkirakan dapat dikurangi oleh stabilnya nilai tukar. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah untuk tidak menaikkan harga barang-barang yang strategis, seperti BBM dan TDL, juga mengurangi tekanan ekspektasi inflasi. Di sisi permintaan (kesenjangan *output*) tekanan inflasi diperkirakan masih rendah, terkait dengan terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi. Terjaganya pasokan antara lain didorong oleh meningkatnya kapasitas produksi sejalan dengan peningkatan pertumbuhan investasi. Selain itu, kondisi infrastruktur yang diperkirakan membaik diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi barang sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelangkaan.

Tabel 12.8
Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Provinsi	2007 (Rp)	2008 (Rp)	Kenaikan (%)
NAD	850.000	1.000.000	17,65
Sumatera Utara	761.000	822.205	8,04
Sumatera Barat	750.000	800.000	6,67
Jambi	658.000	724.000	10,03
Bengkulu	644.838	683.528	6,00
Jawa Barat	447.654	568.193	26,93
DKI Jakarta	816.100	972.605	19,18
Banten	661.613	837.000	26,51
Jawa Tengah	500.000	547.000	9,40
DI Yogyakarta	460.000	586.000	27,39
Jawa Timur	448.500	500.000	11,48
Bali	622.000	682.650	9,75
Nusa Tenggara Barat	550.000	730.000	32,73
Nusa Tenggara Timur	600.000	650.000	8,33
Sulawesi Tengah	615.000	670.000	8,94
Sulawesi Selatan	673.200	740.520	10,00
Papua	987.000	1.105.500	12,01

Faktor Nonfundamental

Tekanan inflasi kelompok barang yang harganya diatur Pemerintah (*administered*) diperkirakan tetap rendah sepanjang tahun 2008. Komitmen pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga barang *administered* yang bersifat strategis, seperti BBM dan TDL, diperkirakan dapat meminimalkan tekanan kenaikan harga barang *administered* terhadap inflasi IHK. Kenaikan harga kelompok barang ini diperkirakan bersumber dari kelompok barang nonstrategis, di antaranya cukai rokok, tarif PAM, tarif Angkutan Sungai dan Pengairan (ASDP), tarif tol, dan tarif bus antar kota antar propinsi (AKAP). Membaiknya pasokan dan distribusi barang diharapkan juga dapat meminimalkan tekanan inflasi dari sisi *administered*. Kelangkaan minyak tanah, sebagaimana terjadi pada paruh kedua tahun 2007, diperkirakan tidak terjadi lagi pada tahun 2008.

Tekanan inflasi kelompok bahan makanan (*volatile food*) diperkirakan tetap tinggi meskipun dengan kecenderungan menurun. Tekanan inflasi bersumber dari tingginya harga komoditas pangan internasional. Namun demikian peningkatan tekanan tersebut dapat diredam oleh terjaganya pasokan bahan makanan, terutama beras. Terjaganya pasokan beras terkait dengan peningkatan produksi dan fleksibilitas impor beras. Peningkatan produksi padi tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah melanjutkan perbaikan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan penggunaan bibit hibrida yang dapat meningkatkan produktivitas petani. Dari sisi pengadaan,

pengadaan beras melalui impor diperkirakan juga akan lebih efektif terkait dengan diberikannya otoritas yang lebih besar kepada Bulog untuk melakukan impor beras. Untuk mengendalikan harga beras, Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan penurunan bea masuk impor beras. Pemerintah pada tahun 2008 akan menurunkan bea masuk (BM) impor beras dari Rp550 per kilogram (kg) menjadi Rp450 per kg untuk mendukung program stabilisasi harga beras di pasar dalam negeri.

Prakiraan Perbankan

Kinerja perbankan pada tahun 2008 diperkirakan terus meningkat sejalan dengan masih cukup baiknya prospek ekonomi dan didukung oleh sistem keuangan yang semakin stabil. Prospek perekonomian tahun 2008 yang cukup baik disertai dengan perkembangan suku bunga yang kondusif merupakan modal utama bagi dunia usaha dan perbankan untuk mendorong kegiatan di sektor riil. Dengan dukungan stabilitas sistem keuangan yang terjaga dan ketahanan perbankan yang membaik, kredit perbankan diperkirakan tumbuh 22-24% yang didukung oleh pertumbuhan DPK sebesar 16-18% sehingga LDR diperkirakan dapat mencapai 72%. Hal itu juga dibarengi dengan perbaikan kualitas kredit, yang akan tercermin dari NPL gross yang relatif rendah di bawah 5%. Pertumbuhan kredit perbankan tersebut terutama akan didukung oleh perkembangan proyek infrastruktur yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit di sektor lain yang produktif (*multiplier effect*).

Sejalan dengan prakiraan kondisi perbankan yang terus meningkat, kinerja perbankan syariah juga diperkirakan terus membaik. Prospek perekonomian Indonesia tahun 2008 yang cukup baik dan pelaksanaan program akselerasi pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong peningkatan volume industri sekaligus penghimpunan DPK oleh perbankan syariah. Hal itu didorong oleh potensi berdirinya bank syariah baru pada tahun 2008 serta semakin menariknya imbal bagi hasil yang meningkatkan daya saing produk investasi bank syariah. Kondisi sektor riil yang membaik dan perluasan jaringan pelayanan bank syariah menjadi salah satu faktor pendorong naiknya permintaan terhadap pembiayaan. Pembiayaan tersebut diperkirakan tetap didominasi oleh pembiayaan berbasis jual-beli terutama pada sektor jasa dan perdagangan. Terkait dengan masih terbatasnya kapasitas pembiayaan, bank syariah akan menggunakan strategi pembiayaan sindikasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pembiayaan. Dengan mempertimbangkan sasaran pencapaian pangsa aset perbankan syariah sebesar 5%, dukungan Pemerintah dan penyelesaian UU Perbankan Syariah, Perpajakan serta SBSN, pertumbuhan

aset perbankan syariah pada tahun 2008 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan nasional. Sesuai dengan kondisi tersebut, volume aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2008 diperkirakan terus meningkat.

Prakiraan Sistem Pembayaran

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup tinggi dan dengan mempertimbangkan tingkat kelusuhan uang kartal di masyarakat, tambahan kebutuhan uang kartal pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp109,2 triliun. Tambahan kebutuhan uang kartal tersebut menurun 5,4% dibandingkan dengan realisasi tambahan uang kartal pada tahun 2007. Berbagai upaya efisiensi yang telah ditempuh sejak tahun 2006 berupa optimalisasi persediaan uang kartal di wilayah KBI yang mengalami kecenderungan aliran masuk dan manajemen kas perbankan yang semakin efektif berhasil menurunkan tambahan rencana distribusi uang kartal tersebut.

Di sisi pembayaran nontunai, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang tetap tinggi diperkirakan mendorong peningkatan aktivitas transaksi masyarakat. Aktivitas transaksi pembayaran diperkirakan mencapai sekitar Rp51.000 triliun. Sebagian besar transaksi (sekitar 93% atau Rp47.500 triliun) akan dilakukan melalui sistem BI-RTGS, 3% (sekitar Rp1.500 triliun) melalui kliring, sedangkan 4% (sekitar Rp2.000 triliun) melalui APMK dan pembayaran lainnya.

Beberapa Faktor Risiko

Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2008 masih akan menghadapi beberapa risiko yang bersumber dari gejolak eksternal maupun kondisi domestik, serta tantangan berupa masih tingginya level komponen permanen pembentuk inflasi. Risiko dari eksternal berupa potensi perlambatan ekonomi dunia yang lebih dalam, harga komoditas internasional yang lebih tinggi dari prakiraan, serta kondisi pasar keuangan yang belum stabil. Sementara itu, risiko dari dalam negeri berupa kemungkinan produksi minyak dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan semula, terhambatnya kelanjutan dari implementasi proyek infrastruktur, serta kondisi distribusi barang kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya lancar.

Faktor Risiko Eksternal

Perkembangan harga komoditas internasional baik minyak mentah maupun nonmigas yang lebih tinggi dari prakiraan merupakan faktor risiko terberat yang patut dicermati. Dampak kenaikan harga minyak dunia dapat dilihat melalui kinerja neraca pembayaran. Harga minyak

yang tinggi dapat memicu kenaikan inflasi dunia yang akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia melalui kenaikan harga bahan baku impor. Selain itu, harga minyak yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan disparitas harga minyak subsidi dan nonsubsidi sehingga berpotensi mendorong peningkatan konsumsi BBM. Peningkatan konsumsi BBM tersebut dapat meningkatkan impor minyak yang lebih tinggi dari perkiraan. Tingginya harga minyak dunia, potensi tidak tercapainya target produksi, dan permintaan domestik terhadap minyak yang masih tinggi dapat mendorong peningkatan permintaan valas untuk impor minyak yang selanjutnya akan memengaruhi perkembangan nilai tukar ke depan. Tingginya harga komoditas internasional dapat mendorong kenaikan harga di negara mitra dagang (*imported inflation*) yang akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku impor dan selanjutnya berpotensi ditransmisikan ke harga jual di pasar luar negeri dan domestik. Dari sisi konsumsi, kenaikan *imported inflation* tersebut dapat menahan pertumbuhan konsumsi swasta, terutama pada konsumsi non-makanan.

Perlambatan ekonomi dunia yang lebih dalam juga menjadi faktor risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2008 diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2007, terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Perekonomian AS masih menyimpan potensi untuk tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya terkait dengan perkembangan sektor perumahan yang belum pulih akibat dampak lanjutan krisis *subprime mortgage* di AS. Perlambatan ekonomi AS yang lebih dalam akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah yang selanjutnya akan mendorong penurunan volume perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekspor Indonesia juga berpotensi tumbuh lebih rendah dari yang diperkirakan.

Sementara itu, instabilitas pasar keuangan global yang berlangsung lebih lama dapat berpotensi menurunkan aliran masuk modal portofolio ke *emerging markets* termasuk Indonesia. Hal itu berpotensi menurunkan kinerja transaksi modal dan finansial. Dampak lanjutan krisis *subprime mortgage* di AS diperkirakan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap arus masuk modal asing ke Indonesia. Selain itu, struktur arus masuk modal asing ke Indonesia yang masih didominasi oleh arus masuk modal jangka pendek (investasi portofolio) dan kondisi pasar keuangan domestik yang masih dangkal menyebabkan pasar keuangan Indonesia relatif lebih rentan terhadap risiko global dibandingkan dengan negara-negara kawasan, sehingga berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar.

Faktor Risiko Domestik

Mempertimbangkan realisasi *lifting* minyak pada tahun 2007 yang hanya mencapai 899 ribu barel per hari serta dampak insentif perpajakan di sektor migas yang memiliki *lag*, terdapat potensi produksi minyak tahun 2008 berada di bawah asumsi. Produksi minyak dalam negeri yang lebih rendah menyebabkan kenaikan impor migas sehingga dapat memengaruhi kinerja NPI (Boks : Sensitivitas Neraca Pembayaran Indonesia 2008 terhadap Perubahan Harga dan Produksi Minyak).

Terhambatnya implementasi proyek infrastruktur juga menjadi faktor risiko dari sisi domestik. Potensi terhambatnya implementasi proyek infrastruktur terkait dengan masih terbatasnya kerangka hukum dan peraturan yang transparan dan efektif, baik di tingkat sektor maupun di lintas sektor. Kondisi itu antara lain tercermin pada ketidakjelasan peraturan tentang pembebasan tanah, serta masih lemahnya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, sumber daya yang terbatas dalam hal perencanaan dan manajemen risiko proyek serta pembiayaan domestik, dan mekanisme *cost recovery* yang belum jelas juga memengaruhi kelancaran implementasi proyek infrastruktur tersebut.

Perkembangan infrastruktur yang belum kondusif dan kondisi berbagai daerah di Indonesia yang rawan bencana alam merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan dalam distribusi barang, terutama barang kebutuhan pokok. Terganggunya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok akan mendorong kenaikan harga barang tersebut, yang juga berpotensi meningkatkan ekspektasi kenaikan harga yang dapat memicu peningkatan inflasi.

Seluruh faktor risiko tersebut, apabila tidak tertangani dengan baik akan memperbesar potensi menurunnya kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat lebih rendah dari pada yang diprakirakan. Tekanan harga dapat menggiring inflasi melampaui prakiraan. (Boks: Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan: Peluang dan Tantangan).

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menciptakan stabilitas makroekonomi guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Dengan mempertimbangkan prakiraan ekonomi dan berbagai risiko yang dihadapi, arah kebijakan moneter

difokuskan pada upaya pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Komitmen dan konsistensi kebijakan moneter itu diharapkan dapat mengarahkan persepsi dan ekspektasi pelaku ekonomi untuk lebih menjangkarkan ekspektasi inflasi kepada sasaran inflasi (*forward looking*). Namun, pencapaian sasaran inflasi dihadapkan pada tantangan berupa level komponen permanen pembentuk inflasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan akan terus dilakukan, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun sektor riil untuk menurunkan level komponen permanen tersebut.

Terkait dengan upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut, kebijakan di bidang moneter akan diarahkan pada upaya untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Pasar keuangan domestik yang lebih dalam, kuat dan likuid akan meningkatkan daya tahan dan stabilitas sistem keuangan, yang pada akhirnya dapat meminimalkan dampak negatif dari gejolak di pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, revitalisasi dan pengayaan instrumen moneter sangat diperlukan. Salah satunya melalui penerbitan SBI dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 6 dan 9 bulan dan pengaktifkan transaksi *repurchase agreement* (repo) dengan *underlying* SUN dalam pelaksanaan manajemen likuiditas.

Penggunaan SUN dalam transaksi repo diharapkan juga akan meningkatkan aktivitas dan likuiditas pasar SUN sehingga pasar SUN menjadi lebih efisien dan memiliki daya tahan dalam menghadapi potensi gejolak yang akan terjadi. Pengaturan likuiditas juga akan didukung oleh penggunaan *foreign exchange swap* (FX swap). Dengan kebijakan itu, para pelaku pasar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen likuiditas, mengoptimalkan penyebaran risiko penempatan dana, dan membentuk ekspektasi harga terhadap aset-aset keuangan.

Kebijakan di bidang moneter juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan ITF. Langkah-langkah penyempurnaan penerapan ITF yang akan dilakukan meliputi upaya untuk menjaga stabilitas suku bunga PUAB O/N sebagai alat transmisi kebijakan moneter serta sebagai mekanisme untuk membentuk struktur kurva imbal hasil jangka pendek (*short-term yield curve*) yang lebih wajar (Boks: Penyempurnaan Kerangka Operasional kebijakan Moneter). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mengelola ekspektasi masyarakat dan mendorong peningkatan peran pasar keuangan dalam mendukung perekonomian. Untuk itu, kondisi likuiditas dan suku bunga PUAB O/N di pasar uang akan dimonitor secara harian sehingga apabila terjadi gangguan dapat segera

direspons melalui mekanisme *Fine Tuning Operation* (FTO), transaksi repo, dengan menggunakan SBI atau SUN, dan transaksi FX swap.

Arah kebijakan moneter juga akan didukung dengan kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia akan tetap konsisten menerapkan kebijakan nilai tukar fleksibel sehingga pergerakan nilai tukar sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi. Guna menjaga volatilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing. Berbagai langkah di sisi nilai tukar tersebut diharapkan dapat mendukung upaya mengurangi tekanan inflasi dari sisi nilai tukar serta mengarahkan ekspektasi inflasi pelaku ekonomi kepada sasaran inflasi (*forward looking*). Di samping itu, sebagai upaya berjaga-jaga, selain melalui kerjasama ASEAN+3 dalam kerangka *Chiang Mai Initiatives*, Bank Indonesia juga memperluas kesepakatan *Bilateral Swap Arrangement* dengan Jepang, Korea, dan China. Langkah *regional self help* itu cukup strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan di waktu mendatang.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter juga akan diperkuat dengan strategi komunikasi dan diseminasi. Pelaksanaan komunikasi dan diseminasi melalui siaran pers dan penerbitan laporan perekonomian secara bulanan, triwulanan, dan tahunan akan terus dilanjutkan. Selain itu, pelaksanaan seminar, diskusi, dan berbagai langkah lainnya dalam rangka mensosialisasikan kebijakan moneter dan perkembangan perekonomian secara konsisten akan terus dilakukan. Dengan pelaksanaan berbagai langkah tersebut, diharapkan kebijakan moneter akan semakin transparan di mata masyarakat sehingga dapat mendukung upaya mengarahkan ekspektasi masyarakat sesuai sasaran inflasi yang ditetapkan.

Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi juga ditempuh melalui koordinasi kebijakan dan kemitraan strategis dengan Pemerintah dan elemen pelaku ekonomi lainnya. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang moneter, fiskal dan sektor sektoral telah diwujudkan melalui berbagai rapat koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Selain itu, upaya koordinasi kebijakan dalam rangka mengarahkan inflasi menuju sasarannya juga ditempuh melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi secara reguler. Di level teknis, tugas-tugas Tim Pengendalian Inflasi untuk mendukung upaya menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang, terutama kebutuhan pokok akan diintensifkan

melalui implementasi kebijakan (*road map*) pengendalian inflasi. Sementara itu, di tingkat daerah, peran KBI akan terus diperkuat bagi pemberdayaan dan percepatan pembangunan ekonomi di daerah, serta upaya pengendalian inflasi di daerah. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan koordinasi antara KBI dan instansi terkait. Upaya koordinasi pengendalian harga yang komprehensif, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat menjaga perkembangan inflasi sehingga dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang ditetapkan.

Di sisi sistem keuangan, koordinasi antara Bank Indonesia dengan lembaga lainnya ditempuh melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Pembentukan FSSK ditujukan untuk memperkuat dan memelihara stabilitas sistem keuangan³ melalui berbagai pertemuan yang dilakukan secara reguler. Untuk tahun 2008, FSSK berencana untuk melakukan finalisasi *Crisis Management Protocol* dan *Macro Early Warning System* (EWS), serta melanjutkan program-program dalam inisiatif Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI).

Arah Kebijakan Perbankan

Di bidang perbankan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan program konsolidasi untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kompetitif. Di samping itu, upaya meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi dunia usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian perbankan. Kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan sebagian merupakan lanjutan dari kebijakan konsolidasi perbankan, peningkatan *Good Corporate Governance*, edukasi nasabah dan akan dimulainya implementasi Basel II. Selanjutnya, upaya meningkatkan intermediasi perbankan antara lain ditempuh melalui kebijakan pembinaan usaha produktif, peningkatan kredit MKM, penerapan *universal banking*, optimalisasi peran bank-bank yang dimiliki asing, serta penjajagan kemungkinan pendirian *policy bank*. Kebijakan pengembangan BPR terutama diarahkan untuk menjadikan BPR sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi lokal dengan memperhatikan potensi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kebijakan tersebut antara lain berupa penelitian pemetaan profil BPR, peningkatan kualitas dan kompetensi pengawasan BPR, peningkatan kapasitas SDM BPR, serta pendirian pusat studi lembaga keuangan mikro. Sementara kebijakan perbankan syariah difokuskan pada berbagai langkah

3 Sistem keuangan yang dimaksud adalah terdiri dari perbankan, pasar modal, asuransi, serta lembaga keuangan lainnya.

untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, seperti program sosialisasi, peningkatan kualitas SDM, pengayaan produk dan tiga UU pendukung; Perbankan Syariah, Perpajakan dan SBSN.

Upaya Meningkatkan Intermediasi Perbankan

Upaya-upaya untuk meningkatkan intermediasi perbankan akan ditempuh melalui beberapa hal. *Pertama*, pembinaan usaha produktif yang mengharuskan setiap bank untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produktif di suatu wilayah ataupun sektor tertentu yang memiliki potensi, namun belum dikembangkan secara baik. Sebagai indikator pemenuhan kewajiban itu, akan digunakan rasio atau porsi jumlah kredit dan debitur dengan mengacu pada beberapa indikator, seperti dibandingkan dengan jumlah kredit konsumsi dalam portofolio bank.

Kedua, mendorong pembangunan ekonomi dari sisi pembiayaan kredit Mikro Kecil dan Menengah (MKM) yang terdiri dari empat kebijakan utama. Penyaluran kredit bank umum kepada nasabah kredit MKM akan dilakukan melalui BPR (*Linkage Program*). Program itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa kapasitas pendanaan bank umum lebih besar dari BPR, namun bank umum memiliki keterbatasan jaringan dan kemampuan analisis dalam menjangkau nasabah kredit MKM.

Pembentukan skim penjaminan kredit sebagai bentuk kepedulian kepada nasabah kredit MKM yang tidak mampu untuk menyediakan agunan (*feasible but not yet bankable*). Skema itu mengikutsertakan Pemda, bank umum terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD), dinas-dinas terkait di daerah, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Lembaga Penjaminan Kredit.

Mengkaji kemungkinan penurunan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan mempertimbangkan adanya penjaminan oleh Askrido, ATMR dapat diturunkan sekitar 30%-40%. Selain itu, penurunan perhitungan ATMR dimaksud dimungkinkan bagi kredit yang juga dijamin oleh perusahaan asuransi selain Askrido, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemudian.

Ketiga, pembentukan *universal banking* ke dalam sistem perbankan Indonesia yang akan menopang *financial market deepening*. Hal itu akan berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan perekonomian. Rencana implementasi *universal banking model in-house* akan dimulai pada akhir tahun 2010 dengan harapan perubahan UU Perbankan telah dapat diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2008.

Keempat, kebijakan untuk meningkatkan intermediasi perbankan yang diterapkan kepada 49 bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing (46% dari total aset perbankan). Kebijakan tersebut antara lain berupa peningkatan penyaluran kredit yang lebih berkualitas yaitu dengan menyalurkan kepada sektor MKM produktif, keterlibatan aktif dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produktif di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, serta peningkatan peran bank-bank tersebut melalui *program corporate social responsibility*.

Kelima, penajagan kemungkinan pembentukan *policy bank* mengingat masih terbatasnya pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Terbatasnya dana dari APBN dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan struktur pembiayaan dari perbankan yang masih didominasi oleh sumber dana jangka pendek menyebabkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur relatif terbatas. Dana yang berhasil dihimpun oleh *policy bank* akan disalurkan untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan jangka panjang, khususnya infrastruktur.

Upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Bank

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan bank akan ditempuh melalui beberapa kebijakan. *Pertama*, dalam rangka memberikan arah konsolidasi perbankan, kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) dan Bank Jangkar akan dipertegas dalam suatu ketentuan. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan terhadap efektivitas peningkatan modal perbankan menjadi Rp80 miliar.

Kedua, Implementasi Basel II meliputi Pilar 1 (kebutuhan modal minimum), Pilar 2 (proses *review* pengawasan) dan Pilar 3 (disiplin pasar). Untuk Pilar 1, akurasi penggunaan model internal dalam menghitung beban modal (*capital charge*) risiko pasar dinilai dengan mempertimbangkan (i) persyaratan umum antara lain berupa pengelolaan sistem manajemen risiko bank; (ii) persyaratan kualitatif seperti pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kepemilikan standar validasi internal, serta pelaksanaan *audit intern* secara periodik terhadap penggunaan model internal; dan (iii) persyaratan kuantitatif seperti menghitung *Value at Risk* (VaR) secara harian dan menggunakan data selama satu tahun (250 hari kerja). Untuk Pilar 2, program kerja tahun 2008 masih dalam lingkup menerjemahkan empat prinsip dalam sistem pengawasan bank yang berbasis risiko. Penerapan Prinsip 1 (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) melalui pengaturan yang lebih jelas sebagai pedoman bagi bank-bank untuk menghitung kecukupan modalnya, penerapan Prinsip 2 (*Supervisory Review Evaluation and Process – SREP*), Prinsip 3 (*CAR above minimum*),

dan Prinsip 4 (*early intervention*) akan dilakukan melalui penyempurnaan format tindak lanjut pengawasan bank saat ini, termasuk mempertegas aturan bahwa pengawas dapat meminta tambahan modal bank sesuai dengan profil risiko bank. Untuk Pilar 3, program kerja masih diarahkan pada penyempurnaan kerangka laporan publikasi bank, sejalan dengan pendekatan Pilar 1 Basel II dan standar internasional lainnya, antara lain standar akuntansi (*International Accounting Standards – IAS*). Penerapan Pilar 3 juga akan diikuti dengan ekstensifikasi dan intensifikasi proses edukasi kepada publik.

Ketiga, menerbitkan surat edaran *Good Corporate Governance (GCG)* tentang pedoman teknis pelaksanaan GCG bank yang mewajibkan bank dengan aset Rp10 triliun atau lebih atau telah *go public* untuk melaksanakan GCG pada akhir Juni 2007. Bagi bank dengan aset di bawah Rp10 triliun atau belum *go public*, seluruh ketentuan GCG akan berlaku pada akhir Juni 2008, sehingga pada pertengahan tahun 2008 seluruh bank diharapkan telah menerapkan ketentuan GCG dengan sebaik-baiknya (*self assessment*).

Keempat, program edukasi masyarakat dimana tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Edukasi Perbankan sejalan dengan pengembangan *financial deepening* melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang karakteristik produk dan jasa perbankan, berikut manfaat dan risikonya.

Kelima, program *Corporate Social Responsibility* industri perbankan yang diarahkan pada upaya-upaya strategis di bidang pendidikan.

Pengembangan BPR

Kebijakan BPR akan diarahkan untuk memberikan dukungan kepada upaya pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal yang menjadi sasaran dan fokus kegiatan usahanya. Untuk itu langkah-langkah *redefinition and redirection* atas arah kebijakan pengembangan BPR di masa datang akan dilakukan sebagai berikut.

Pertama, melanjutkan implementasi dari cetak biru BPR dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi strategis BPR sebagai *community bank* untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah setempat (*local economic development*).

Kedua, menyusun stratifikasi (pengelompokan) BPR dalam rangka optimalisasi peran dan kontribusi BPR. Stratifikasi tersebut didasarkan pada modal inti sesuai dengan kapasitas dan risiko BPR serta sejalan dengan struktur

perbankan yang dibangun dalam API. Ke depan, akan dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan dan sistem pengawasan terhadap BPR pada strata yang berbeda.

Ketiga, melakukan penelitian dalam rangka pemetaan profil BPR yang akan didasarkan pada kapasitas, kebutuhan nasabah, dan risiko yang dihadapi. Berbagai permasalahan diharapkan dapat diidentifikasi berdasarkan strata BPR, sehingga dapat dicarikan solusinya. Selain itu, akan dilakukan pula kajian yang menyeluruh terhadap kebijakan pengaturan dan sistem pengawasan BPR sesuai dengan kapasitas dan risiko di masing-masing strata BPR, yang akan dituangkan dalam cetak biru BPR.

Keempat, pelaksanaan lembaga Apex BPR yang beroperasi secara regional. Untuk itu akan dilakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan lembaga Apex regional di wilayah lain. Selain itu, akan dipersiapkan pembentukan lembaga Apex yang dapat beroperasi dalam skala nasional. Bercermin pada hasil pelaksanaan *pilot project* pelaksanaan lembaga Apex dengan mengacu pada praktek di beberapa negara, lembaga Apex nasional diupayakan dalam bentuk bank umum atau unit bank umum yang memiliki komitmen untuk mengayomi BPR anggota dan memiliki kesesuaian kebijakan (komitmen) dalam pengembangan UMKM.

Kelima, meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawas BPR sejalan dengan perkembangan produk dan pelayanan BPR serta mengantisipasi berbagai kasus yang menyertai operasional BPR.

Keenam, meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM BPR dalam menghadapi persaingan dengan lembaga lain yang juga melayani kredit MKM serta untuk meningkatkan kemampuan BPR untuk membiayai sektor produktif.

Ketujuh, mendirikan pusat studi lembaga keuangan mikro atau *Micro Finance Institute* yang diharapkan dapat mempertajam berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain dalam mendorong pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di berbagai pelosok daerah dan pedesaan.

Perbankan Syariah

Kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam rangka pencapaian aset sebesar 5% masih akan menghadapi tantangan berupa kondisi permodalan yang terbatas, SDM berkualitas yang belum mencukupi, serta cakupan pelayanan yang belum optimal. Tantangan tersebut pada dasarnya dapat diantisipasi melalui dua sisi, yaitu kebijakan pengembangan yang dilakukan oleh

otoritas dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh institusi perbankan. Dari sisi otoritas, kebijakan pengembangan antara lain berupa pengaturan kelembagaan, operasional, dan bantuan teknis. Dari sisi institusi perbankan, strategi pengembangan berupa pendekatan pemasaran, penyediaan dan pengembangan variasi produk, serta manajemen organisasi. Beberapa kebijakan dalam bidang perbankan syariah akan diarahkan sebagai berikut.

Pertama, memberikan insentif, kemudahan atau fasilitas untuk menarik investor-investor baru dengan membentuk forum investor dengan pihak terkait. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan permodalan perbankan syariah. Selain pembentukan forum investor, penyelesaian penyempurnaan UU Pajak juga akan menjadi pintu gerbang bagi masuknya investor baru. Sementara itu, kecenderungan peningkatan ROA dan ROE perbankan syariah diharapkan mampu menstimulasi para investor baru untuk masuk dalam industri itu.

Kedua, melakukan sosialisasi perbankan syariah untuk memberikan pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan perbankan syariah. Sosialisasi perbankan syariah akan menggunakan pendekatan keunggulan dan karakteristik unik berupa operasional perbankan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan kemanfaatan. Bentuk sosialisasi tersebut diantaranya berupa iklan layanan masyarakat di berbagai media dan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FES) pada setiap bulan Muharam.

Ketiga, melakukan pelatihan bagi pendamping Usaha Mikro Kecil (UMK) dan *Account Officer* Bank Syariah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai sektor riil. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan perbankan syariah. Program tersebut akan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah khususnya pemerintah daerah, lembaga konsultan atau pendidikan, dan perusahaan yang memiliki program pengembangan usaha mikro kecil (*Corporate Social Responsibility Programs*).

Keempat, memperluas keterlibatan perbankan syariah dalam proyek-proyek pemerintah, baik dalam program pembiayaan proyek-proyek pemerintah maupun kesempatan untuk mengelola sumber-sumber dana pemerintah. Di samping itu, perbankan syariah juga akan dilibatkan dalam program penjaminan bagi nasabah MKM melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, institusi perbankan dan lembaga penjaminan.

Kelima, menerbitkan atau mengamandemen beberapa ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung akselerasi pengembangan perbankan syariah seperti penyelesaian Undang Undang Perbankan Syariah, Undang Undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan amandemen UU Perpajakan.

Keenam, memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program-program bantuan teknis bagi bank untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, seperti sertifikasi bagi direksi bank syariah, kerjasama dengan institusi pendidikan berupa peningkatan keahlian pengurus bank syariah, rekomendasi kurikulum dan penyediaan literatur tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah bagi perguruan tinggi.

Ketujuh, memperkaya produk jasa keuangan perbankan syariah bagi masyarakat melalui penyusunan buku kodifikasi produk perbankan syariah internasional yang memuat informasi berbagai produk bank syariah di dunia internasional. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank syariah nasional dalam melengkapi produk-produk jasa keuangannya.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran masih tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan instrumen dan layanan jasa pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan moneter dan perbankan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi pengedaran uang, kebijakan pada tahun 2008 merupakan kelanjutan tahun sebelumnya, yang mengacu pada tiga pilar, yaitu (i) meningkatkan pengedaran uang yang aman, handal, dan efisien, (ii) meningkatkan layanan kas prima, serta (iii) meningkatkan kualitas uang. Di sisi pembayaran nontunai, kebijakan sistem pembayaran secara konsisten tetap difokuskan pada 4 (empat) prinsip utama yaitu: memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, kesetaraan akses (*equitable access*), dan perlindungan konsumen.

Strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal dilakukan dengan melaksanakan pengadaan uang dalam jumlah yang cukup disertai dengan penggunaan jasa pihak ketiga dalam kegiatan distribusi uang. Untuk memenuhi kebutuhan uang kartal, Bank Indonesia akan melaksanakan pengadaan uang sebesar 5,86 miliar lembar uang kertas dan 1,16 miliar keping uang logam. Selain itu, strategi distribusi uang dilakukan dengan tetap melanjutkan pola pengiriman dan retur dari KBI yang mengalami kelebihan uang kartal (*net inflow*) serta memperluas cakupan kerjasama dengan operator jasa transportasi. Kebijakan layanan kas prima dilakukan melalui uji coba implementasi *cash centre* serta melakukan evaluasi pola kerjasama layanan kas dengan pihak ketiga.

Untuk meningkatkan kualitas uang, Bank Indonesia merencanakan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp2.000.

Dalam rangka menjaga kehandalan dan kelangsungan operasional sistem pembayaran, serta memitigasi risiko, Bank Indonesia terus melakukan uji coba pada sistem utama maupun *back-up*, baik di sisi penyelenggara maupun di sisi peserta. Selain itu akan dilakukan kajian mengenai penyelenggaraan transfer valas dengan mekanisme *payment versus payment* (PVP) dan pengembangan model mitigasi risiko transfer dana di Indonesia yang diakomodasi pada proyek inisiatif pengembangan RTGS Generasi 2. Hal ini mengantisipasi, semakin tingginya minat investor asing yang menuntut ditingkatkannya efisiensi setelmen transaksi melalui *multi currency settlement* dengan jangkauan yang lebih luas (*cross border settlement*). Sejalan dengan pengembangan RTGS Generasi 2 tersebut akan dilakukan pengembangan BI-SSSS Generasi 2 untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku pasar terhadap instrumen transaksi surat berharga dengan *underlying* SUN dan SBI seperti *securities*

lending and borrowing dan *collateral management* Untuk meningkatkan efisiensi terutama pada sistem pembayaran ritel, prinsip *interoperability* akan diimplementasikan pada industri APMK. Penerapan prinsip kesetaraan akses akan dituangkan melalui ketentuan penyelenggaraan sistem dengan menegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai regulator, penyelenggara, dan peserta. Selain itu memungkinkan pula penyelenggaraan sistem pembayaran oleh lembaga selain bank. Sementara itu, perlindungan konsumen akan diupayakan dengan menerbitkan ketentuan penyelenggaraan *e-money* dan menerapkan secara luas ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang. Selain itu, dalam rangka mendukung koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, penyediaan infrastruktur pelayanan jasa pembayaran melalui fasilitas BIG-eB akan dilengkapi dengan berbagai modul tambahan, yang meliputi modul transaksi rupiah, modul transaksi valas, dan modul informasi transaksi valas. Fasilitas BIG-eB ini merupakan penopang bagi mekanisme *Treasury Single Account* (TSA) yang direncanakan untuk diterapkan di seluruh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sensitivitas Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2008 terhadap Perubahan Harga dan Produksi Minyak

Tingkat harga dan produksi minyak berpengaruh pada Neraca Pembayaran Indonesia terutama melalui neraca perdagangan minyak dan gas (migas). Dari hasil simulasi perubahan kedua asumsi tersebut pada perkiraan NPI 2008 diperoleh kesimpulan bahwa perubahan produksi minyak mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap neraca perdagangan migas dibandingkan dengan pengaruh perubahan harga minyak. Setiap kenaikan (penurunan) 1 persen harga minyak akan menambah (mengurangi) surplus neraca perdagangan migas sebesar \$80 juta. Sementara itu, setiap kenaikan (penurunan) produksi minyak 1 persen akan menambah (mengurangi) surplus neraca perdagangan migas sebesar \$248 juta.

Perubahan asumsi harga minyak pada prakiraan NPI ditransmisikan melalui perubahan nilai ekspor dan impor minyak Indonesia. Di samping itu, perubahan harga minyak juga berpengaruh terhadap nilai ekspor dan

impor gas karena formulasi penentuan harga jual gas memasukkan komponen harga minyak. Sementara itu, perubahan asumsi produksi minyak dalam negeri pada perkiraan NPI ditransmisikan melalui perubahan volume ekspor dan impor minyak. Apabila produksi minyak lebih rendah dari asumsi awal maka volume ekspor minyak menurun dan volume impor meningkat.¹

Dengan keterkaitan seperti itu, prospek NPI tahun 2008 antara lain tergantung pada prospek harga minyak dunia yang belakangan ini cenderung meningkat dan kemampuan produksi minyak mentah domestik yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas neraca perdagangan migas ketika harga minyak naik dan produksi minyak turun, masing-masing dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam proyeksi NPI 2008.²

Rincian	Dampak terhadap NPI (dalam \$ juta)		
	Harga ↑ 1%	Produksi ↓ 1%	Harga ↑ 1% Produksi ↓ 1%
Transaksi Minyak:			
– Ekspor Minyak (fob)	136 ↑	-131 ↓	3 ↑
– Impor Minyak (fob)	-190 ↑	-117 ↑	-308 ↑
Neraca Perdagangan Minyak	-54 ↑	-248 ↑	-305 ↑
Transaksi Gas			
– Ekspor Gas	134 ↑	0	134 ↑
– Impor Gas	–	–	–
Neraca Perdagangan Gas	134 ↑	0	134 ↑
Neraca Perdagangan Migas	80 ↑	-248 ↓	-171 ↓

1 Dengan asumsi *ceteris paribus*, antara lain tingkat konsumsi BBM domestik tidak berubah.

2 Perlu di catat bahwa, asumsi tingkat harga dan produksi adalah rata-rata dalam satu tahun.

Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008

Perkembangan terkini harga minyak mentah, *lifting* minyak dalam negeri dan meningkatnya harga komoditas internasional meningkatkan defisit APBN 2008. Harga minyak mentah terus meningkat sejak triwulan I-2007 dan selama tahun 2007 mencapai rata-rata \$72,3/barel, lebih tinggi dari asumsi APBNP 2007 dan APBN 2008 sebesar \$60/barel. Terlewatnya asumsi harga minyak tersebut dapat menyebabkan naiknya defisit APBN 2008 yang terutama disebabkan oleh perkembangan berbagai parameter dalam perhitungan Subsidi BBM dan Subsidi Listrik sehingga melonjakkan Subsidi BBM dan Subsidi Listrik. Parameter tersebut antara lain adalah meningkatnya perkiraan kuota konsumsi BBM bersubsidi; meningkatnya proporsi pemakaian bahan bakar dalam memproduksi listrik; dan tidak tercapainya target konversi energi dari minyak tanah ke LPG. Selain itu, *lifting* minyak selama tahun 2007 hanya mencapai 899.000 barel per hari, di bawah asumsi APBNP 2007 sebesar 950.000 barel per hari. Pada tahun 2008, *lifting* minyak diperkirakan di bawah 1 juta barel per hari, lebih rendah dari asumsi APBN 2008 sebesar 1,034 juta barel per hari. Di samping itu, kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas pangan dunia akibat naiknya permintaan dunia dan konversi energi, seperti kedelai, gandum dan jagung, juga berisiko meningkatkan defisit APBN 2008 melalui

peningkatan pemberian berbagai jenis subsidi dalam rangka menjaga stabilitas harga domestik komoditas tersebut. Berbagai faktor tersebut menyebabkan defisit RAPBN-P 2008 dapat melonjak dan mencapai 4,2% dari PDB.

Menghadapi risiko terlampauinya defisit, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengamankan defisit RAPBN-P 2008 sekaligus dapat mengurangi beban masyarakat dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Kebijakan tersebut mencakup Sembilan Langkah Pengamanan Defisit APBN 2008, memberikan insentif fiskal untuk sektor riil serta memberikan insentif untuk stabilisasi harga pangan. Kesembilan langkah pengamanan dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan defisit. Insentif fiskal yang diberikan pada sektor riil antara lain mencakup perluasan cakupan sektor yang menerima insentif pajak penghasilan (PP No.1 tahun 2007), fasilitas tarif pajak penghasilan untuk perusahaan masuk bursa, serta fasilitas fiskal untuk sektor tertentu (antara lain mencakup insentif pajak dan bea masuk untuk investasi migas dan panas bumi serta barang modal yang belum diproduksi di dalam negeri). Pemerintah juga akan mempertahankan anggaran dukungan terhadap program infrastruktur meskipun

Tabel 1
Faktor Pendorong Kenaikan Defisit APBN 2008

Faktor-faktor	
Harga Minyak	Di atas \$80/barel.
<i>Lifting</i> Minyak	Di bawah 1 juta barel/hari.
Kuota Konsumsi BBM Bersubsidi	Naik dari 35,8 juta kilo liter menjadi 39 juta kilo liter a.l. karena program konversi dari minyak tanah ke LPG hanya terjadi 50% dari target 2 juta kilo liter dan mempertimbangkan realisasi 2007 yang tinggi (38,2 juta kilo liter).
Subsidi Pangan	Naik untuk beras raskin, operasi pasar minyak goreng dan program bantuan langsung kepada perajin tempe dan tahu.
Paket Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Strategis	a.l. berupa penurunan BM impor beras; PPN minyak goreng ditanggung Pemerintah; penurunan BM impor tepung terigu; PPN gandum dan tepung terigu ditanggung Pemerintah; penurunan BM impor kedelai; penurunan PPh impor kedelai; kenaikan Bea Keluar CPO, biofuel
Penerimaan Pajak	PPh Nonmigas turun karena realisasi 2007 yang di bawah target APBN-P 2007 yang menjadi dasar perhitungan APBN 2008 dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Sumber: Departemen Keuangan (diolah), Februari 2008

Tabel 2
Outlook APBN 2008 Tanpa dan Dengan Langkah Pengamanan

triliun Rp

Keterangan	APBN 2008	APBN Tanpa Pengamanan	Langkah Pengamanan	RAPBN-P 2008	Perubahan
Pendapatan Negara a.l.	781,4	806,8	32,6	839,4	58,0
Pajak Nonmigas	550,3	534,3	20,4	554,7	4,4
Bagian Laba BUMN	23,4	23,4	8,0	31,4	8,0
PNBP Lainnya	37,6	39,1	3,4	42,4	4,8
Belanja Negara	854,7	985,6	(59,3)	926,2	71,6
Belanja Pemerintah Pusat	573,4	697,2	(55,8)	641,4	68,0
Belanja K/L	311,9	311,9	(39,9)	272,1	(39,9)
Belanja Non K/L a.l.	261,5	385,3	(16,0)	369,3	107,8
– Subsidi BBM	45,8	116,2	(10,0)	106,2	60,4
– Subsidi Listrik	29,8	65,0	(10,0)	55,0	25,2
– Subsidi Non Energi	22,3	39,5	7,9	47,4	25,1
Transfer ke Daerah a.l.	281,2	288,3	(3,5)	284,8	3,6
Dana Bagi Hasil Migas	23,6	28,5		28,5	4,9
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	4,6	4,6	(4,6)	0,0	(4,6)
Defisit Anggaran (Pangsa terhadap PDB)	(73,3) (1,7)	(178,8) (4,2)	91,9	(86,8) (2,0)	(13,5) (0,3)
Pembiayaan Anggaran	73,3	71,2	15,6	86,8	
Pembiayaan Dalam Negeri	90,0	90,3	13,9	104,2	
Pembiayaan Luar Negeri	(16,7)	(19,1)	1,7	(17,4)	

Sumber: Departemen Keuangan, Februari 2008.

jumlahnya menurun, yaitu dari Rp4 triliun pada APBN 2008 menjadi Rp2,8 triliun pada RAPBN-P 2008.

Berbagai upaya pengamanan tersebut memungkinkan Pemerintah menekan defisit RAPBN-P 2008 ke level yang belum membahayakan kesinambungan fiskal serta dapat tetap berkontribusi pada sektor riil. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah memperkirakan defisit RAPBN-P 2008 dapat diamankan hingga mencapai 2% dari PDB atau meningkat sekitar Rp14 triliun dari target awal tahun sebesar 1,7% dari PDB. Kenaikan defisit RAPBN-P 2008 tersebut masih akan diiringi oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi Pemerintah walaupun dengan laju yang melambat. Pemotongan

anggaran K/L menyebabkan pertumbuhan konsumsi dan investasi Pemerintah menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan di awal tahun. Sementara itu, transfer ke sektor riil akan lebih tinggi dari target awal tahun seiring dengan peningkatan subsidi. Peningkatan subsidi diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan permintaan domestik untuk meng-*offset* melambatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi Pemerintah. Di sisi pembiayaan, dengan terbatasnya sumber pembiayaan defisit, maka kenaikan defisit akan diikuti oleh penerbitan SBN yang lebih tinggi dari rencana awal tahun. Kedua hal tersebut diperkirakan belum akan mengganggu prospek kesinambungan fiskal, karena keseimbangan primer masih surplus dan rasio utang Pemerintah masih menurun.

Tabel 3
Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008

A. Optimalisasi Pendapatan	
1. Optimalisasi Perpajakan, PNPB dan Dividen BUMN.	• Penyesuaian tarif PPh Tetap: Badan 30%, Pribadi 35%.
	• Intensifikasi perpajakan sektor ' <i>booming</i> ' (Pertambangan dan Perkebunan).
	• Intensifikasi Penerimaan Cukai.
	• Tambahan penerimaan Bea Keluar (Pajak Ekspor) untuk CPO dan produk turunannya.
	• Bea Keluar Pertambangan (batu bara, emas, nikel, timah).
	• Dividen interim dari BUMN (Pertamina dan non Pertamina).
B. Penghematan Belanja	
2. Penggunaan Dana Cadangan APBN.	• <i>Policy measures</i> dalam Belanja Lainnya.
3. Penghematan dan Penajaman Prioritas Belanja Kementrian/Lembaga.	• Pemotongan 15% dari Belanja K/L (SK Menkeu No. S-1/MK 02-2008 tgl. 2 Jan 2008).
	• Penghapusan Dana Penyesuaian Infrastruktur.
	• Penghematan pinjaman proyek K/L.
4. Perbaikan Parameter Produksi dan Konsumsi BBM dan Listrik.	• Optimalisasi produksi/ <i>lifting</i> minyak: insentif pajak dan bea masuk sudah diberikan kepada investasi/eksplorasi minyak dan panas bumi; <i>lifting</i> minyak 2008 lebih tinggi dari realisasi 2007.
	• Program konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan menghilangkan hambatan operasi, penyediaan infrastruktur dan perijinan daerah.
5. Program Hemat Energi dan Efisiensi di Pertamina dan PLN.	• Subsidi BBM: alpha turun 1% dari 13,5% menjadi 12,5%; pembatasan konsumsi premium dan solar bersubsidi melalui <i>smart card</i> dan konsumsi minyak tanah melalui kartu kendali.
	• Subsidi Listrik: harga penjualan <i>High Speed Diesel</i> dari Pertamina ke PLN alpha 5%; susut jaringan PLN dijaga 11,4%; penghematan subsidi listrik dengan insentif dan disinsentif; memastikan rasio penggunaan BBM untuk pembangkit listrik maksimum 27%.
C. Pelonggaran Defisit dan Optimalisasi Pembiayaan	
6. Pemanfaatan Dana Kelebihan (<i>Windfall</i>) di daerah penghasil migas melalui instrumen utang.	• Surplus kas daerah penghasil migas ditempatkan pada instrumen bebas risiko seperti Surat Berharga Negara (SBN).
	• SBN dibeli langsung oleh daerah untuk mengurangi biaya intermediasi dan daerah langsung menikmati manfaatnya.
7. Pelonggaran defisit melalui penerbitan obligasi, optimalisasi pinjaman program dan percepatan pembayaran RDI.	• Penambahan obligasi syariah (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), ORI dan SPN.
	• Optimalisasi pinjaman program.
D. Program Stabilisasi Harga	
8. Pengurangan beban pajak komoditas pangan strategis.	• Beras: penurunan BM impor (Rp550/kg menjadi Rp450/kg).
	• Minyak Goreng: melanjutkan dan perluasan PPN ditanggung Pemerintah; penerapan Bea Keluar (Pajak Ekspor) CPO di atas \$1050, biofuel dan produk turunan CPO lainnya.
	• Terigu: penurunan BM; PPN Gandum dan Terigu ditanggung Pemerintah.
	• Kedelai: penurunan BM impor (10% menjadi 0%); penurunan PPh impor kedelai (2,5% menjadi 0,5%).
9. Penambahan Subsidi Pangan.	• Menambah volume beras raskin kepada rumah tangga sasaran 5 kg per Rumah Tangga Miskin.
	• Melanjutkan Operasi Pasar Minyak Goreng.
	• Bantuan langsung kepada perajin Tempe dan Tahu.

Sumber: Departemen Keuangan, Februari 2008.

Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan: Peluang dan Tantangan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan merupakan prasyarat utama tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Secara potensi, kondisi geografis dan demografis Indonesia menawarkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dukungan sumber daya alam melimpah dan angkatan kerja yang besar. Jumlah penduduk yang sangat besar juga menjanjikan potensi pasar domestik yang besar. Selain itu, perekonomian Indonesia yang terbuka memberi kesempatan yang luas bagi aktivitas ekspor-impor serta memanfaatkan aliran modal asing. Namun demikian, potensi pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir masih berkutat di angka 5% per tahun, yang merupakan *long-term trend*¹ pertumbuhan selama hampir tiga dekade terakhir. Angka ini jauh dari cukup untuk menyerap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Persoalan rendahnya penyerapan angkatan kerja diperparah oleh menurunnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, laju inflasi, meskipun telah dapat semakin dikendalikan, namun secara rata-rata masih lebih tinggi dari periode sebelum krisis, dengan disertai volatilitas yang lebih tinggi pula.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi diiringi rendah dan stabilnya laju inflasi, serta penyerapan tenaga kerja yang melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Bagaimana suatu perekonomian mampu mewujudkan hal ini? Dalam teori pertumbuhan, analisis tentang sumber pertumbuhan bermula pada evaluasi sisi produksi perekonomian, yang berarti meneliti tentang keberadaan dan efisiensi faktor-faktor input dalam produksi. Secara sederhana, dalam jangka panjang hanya peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang akan mampu membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, dorongan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat bertumpu pada peningkatan permintaan agregat. Namun dalam jangka panjang, hanya pertumbuhan sisi permintaan

yang diimbangi oleh sisi penawaran yang memungkinkan perekonomian mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, tanpa harus mengorbankan stabilitas harga. Lebih jauh, penambahan kapasitas produksi diharapkan juga sekaligus menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga akan menambah penyerapan tenaga kerja.

Berangkat dari hal di atas, muncul pertanyaan apakah dalam jangka lima tahun ke depan perekonomian Indonesia mampu tumbuh melebihi angka pertumbuhan jangka panjang-nya selama ini? Apakah perkembangan faktor-faktor produksi mendukung ke arah itu?

Perkembangan Faktor-faktor Produksi Pendukung Pertumbuhan

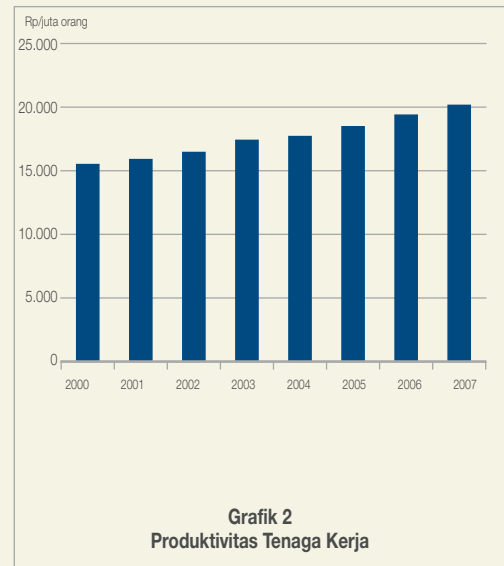
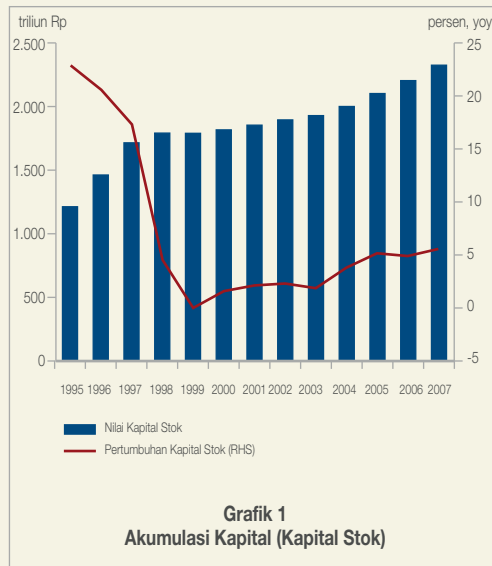
Perkembangan kondisi kapasitas perekonomian menunjukkan arah yang semakin baik, meskipun masih jauh dari kondisi sebelum terjadinya turbulensi ekonomi pada periode 1997-1998. Pertumbuhan akumulasi kapital pascakrisis perlahan mulai merangkak naik, meskipun sempat sedikit tertahan pada 2005 akibat melambatnya akselerasi kegiatan ekonomi pascakenaikan harga BBM. Peningkatan akumulasi kapital tersebut sejalan dengan indikasi adanya perbaikan dalam efisiensi penggunaan kapital. Hal ini tercermin dari angka ICOR, khususnya sejak 2004 yang cenderung terus menurun (lihat Bab 2 Kondisi Makroekonomi). Meskipun demikian, perbaikan efisiensi penggunaan kapital ini diduga masih lebih banyak didorong oleh peningkatan utilisasi kapasitas produksi dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang ada, yang selama ini belum digunakan secara optimal.

Membaiknya sisi kapital ini, sayangnya belum didukung perbaikan pada faktor produksi tenaga kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja² belum dibarengi peningkatan kualitas tenaga kerja, seperti tercermin dari stagnannya tingkat produktivitas tenaga kerja³ secara nasional (Grafik 2) dan porsi tenaga kerja terdidik yang

1 Angka *long term trend* diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode triwulan II-1981 s/d triwulan II-2007. Selengkapnya lihat "Struktur Perekonomian dan Implikasi terhadap Target Inflasi 2008-2009", Affandi, Yoga (2007).

2 Hingga Agustus 2007 jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 3,55 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3 Dihitung dengan menggunakan rasio antara nilai *output* (juta Rp) dengan jumlah tenaga kerja. Selengkapnya lihat *Working Paper* "Pertumbuhan Sektoral: Strategi menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", Permata, Melly (2007) dan Catatan Riset "Mengkaji Pertumbuhan Ekonomi 2007: Suatu Tinjauan dari Sisi Produksi", Yanuarti, Tri dan Kurniati, Yati (2007)



belum mengalami peningkatan berarti sejak krisis sampai dengan sekarang. Selain itu, distribusi tenaga kerja terdidik juga masih terkonsentrasi pada sektor tertentu saja, yaitu Sektor Keuangan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Sektor Jasa.

Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Menengah: Mampukah Pertumbuhan Melebihi Tren Pertumbuhan Jangka Panjangnya?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dilihat faktor-faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengacu pada model Formel-G,⁴ terdapat empat faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu: pertumbuhan penduduk, rasio investasi terhadap PDB, faktor SDM dan keterbukaan (*trade openness*).

Data memperlihatkan bahwa rasio investasi terhadap PDB lebih rendah setelah krisis (rata-rata 2003-2006 hanya 21%), jauh lebih rendah dari sebelum krisis. Rendahnya investasi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi pascakrisis. Dari sisi *trade openness*, Indonesia semakin mampu memanfaatkan keterbukaan dengan ekonomi global, seperti tercermin dari rasio ekspor dan impor terhadap PDB yang meningkat signifikan dari 27% (1993-1996) menjadi 38% (2003-2006). Dari sisi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan yang tinggi sayangnya belum disertai dengan perbaikan SDM (*human capital*).

Mengacu pada resep pertumbuhan dari model Formel-G, peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah-panjang yang lebih tinggi tetap terbuka, asalkan Indonesia dapat terus meningkatkan

rasio investasi terhadap PDB, meningkatkan kinerja eksternal, serta meningkatkan kualitas SDM.

Peningkatan kegiatan investasi perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Dalam jangka pendek, kegiatan investasi memang dapat digerakkan oleh permintaan domestik saja. Namun tanpa adanya perbaikan iklim investasi, kelangsungan kegiatan investasi dalam jangka panjang hampir mustahil dapat dicapai. Dalam *Global Competitiveness Report 2007-2008* terungkap bahwa iklim investasi tetap merupakan faktor paling bermasalah dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, agenda perbaikan iklim investasi merupakan prasyarat utama pembangunan ekonomi ke depan. Kombinasi antara potensi pasar yang besar dan iklim investasi yang sehat akan menjadi faktor pendorong masuknya FDI. Masuknya aliran FDI, tidak saja akan menghasilkan penambahan kapasitas usaha, namun juga sekaligus membawa berbagai teknologi dan inovasi baru, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan produktivitas perekonomian.⁵ Teori pertumbuhan menyatakan bahwa hanya peningkatan TFP yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dalam jangka panjang, sementara kontribusi dari akumulasi kapital maupun SDM pada akhirnya akan semakin menurun sejalan dengan semakin menurunnya tambahan produktivitas dari kedua faktor tersebut. Selain peningkatan TFP, kualitas dari SDM (*human capital*) diasumsikan juga mengalami perbaikan signifikan, sehingga kontribusi SDM dalam proses produksi juga ikut meningkat.

4 Formel-G : *Foresight Model for Evaluating Long-term Growth*, dikembangkan oleh Deutsche Bank Research, 2005

5 Dollar et al. 2003 memberikan bukti empiris yang menghubungkan kualitas iklim investasi dan pertumbuhan melalui peningkatan TFP (produktivitas).

	2007	2008*	2009*	2010*
Pertumbuhan Komponen (%)				
Produk Domestik Bruto	6,3	6,2	6,2-6,8	6,8-7,4
– Konsumsi Swasta	5,0	5,4	5,6-5,9	5,6-6,0
– Konsumsi Pemerintah	3,9	3,8	4,0-5,0	7,0-9,0
– Investasi	9,2	9,3	10,5-10,8	11,0-13,0
– Ekspor Barang & Jasa	8,0	7,9	8,1-9,1	10,5-11,5
– Impor Barang & Jasa	8,9	9,4	10,4-10,7	12,5-13,5
Lain-lain				
Pendapatan per Kapita (\$)	1.947,1	1980-2005	2145-2180	2375-2410
Pengangguran (%)	9,1	9,0-10,0	9,0-10,0	8,5-9,5
Inflasi (%)	6,4 ¹⁾	6,0 - 6,5	4,5±1% ²⁾	4,0±1% ²⁾

* Prakiraan Bank Indonesia

1) Rata-rata setahun

2) Target inflasi

Prospek perekonomian Indonesia ke depan tidak dapat dilepaskan dari perkiraan perkembangan ekonomi dunia ke depan. Harga minyak dunia diperkirakan akan kembali menurun sejalan dengan semakin meningkatnya pasokan. Dari sisi domestik, semakin turunnya harga minyak dunia akan melonggarkan tekanan terhadap kondisi fiskal, sehingga Pemerintah mempunyai kesempatan untuk kembali fokus pada upaya menjaga kesinambungan fiskal, yang tercermin dari angka defisit fiskal yang diperkirakan terus menurun. Langkah ini diyakini akan semakin memperkuat upaya mempertahankan stabilitas makro. Sejalan dengan turunnya harga minyak dunia, kondisi permintaan dunia diperkirakan juga masih cukup kondusif,⁶ sehingga peluang bagi peningkatan ekspor masih cukup terbuka. Peningkatan kinerja eksternal ini juga didukung oleh perbaikan investasi berupa peningkatan kapasitas mesin-mesin. Masuknya FDI sejalan dengan perbaikan iklim investasi sekaligus berperan sebagai katup pengaman bagi kondisi neraca pembayaran secara keseluruhan, sehingga sebagai akibatnya nilai tukar tetap dalam kecenderungan stabil. Sinergi antara terjaganya kestabilan nilai tukar dan perbaikan di sisi suplai memberikan kelonggaran dalam kapasitas terpakai, yang pada akhirnya akan menghasilkan lintasan perkiraan inflasi yang terus menurun dan mendorong penguatan konsumsi swasta. Jika berbagai asumsi di atas dapat berjalan, perekonomian Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun ke depan dapat dipacu mendekati angka pertumbuhan ekonomi sekitar 8%.

Implikasi Kebijakan

Dari analisis skenario di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia masih dapat dipacu untuk lebih baik di masa depan, asalkan beberapa prasyarat seperti meningkatnya rasio investasi terhadap PDB dan perbaikan kualitas SDM dapat terpenuhi. Agar hal tersebut dapat tercapai, komitmen dan kerja keras semua pihak mutlak diperlukan. Sejumlah kebijakan yang perlu untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah:

- **Kebijakan Ekonomi Makro (Moneter dan Fiskal)**

Kebijakan moneter tetap dilakukan secara berhati-hati dan konsisten dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur serta penajaman program dan pemantauan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Penajaman program pendidikan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, koordinasi fiskal dan moneter perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan semakin bersifat komplementer (saling mendukung), tidak bersifat substitusi (saling mengaburkan).

- **Kebijakan Ekonomi Mikro (Sektoral)**

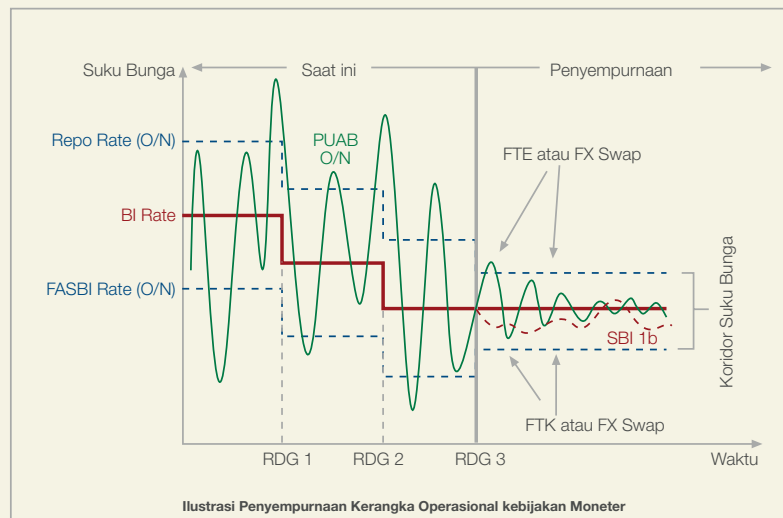
Untuk mendorong sektor riil agar bergerak lebih cepat, pembangunan infrastruktur menempati posisi kunci. Infrastruktur yang baik akan menjamin kelancaran arus barang modal dan *input* antara guna mendukung terciptanya proses produksi yang lancar dan fleksibel dalam merespons permintaan pasar serta menjamin kelancaran distribusi barang komoditas maupun hasil industri. Di samping itu, perbaikan institusi pemerintahan yang terkait dengan perbaikan di sisi suplai, perlu diberi prioritas yang tinggi. Hal ini mencakup perbaikan-perbaikan yang terkait investasi (baik perizinan, keamanan dan kepastian usaha), *human capital development* (keterampilan, pendidikan dan kesehatan), efisiensi dan produktivitas produksi.

6 WEO Update January 2008 menurunkan perkiraan pertumbuhan dunia dari sebelumnya 4,9% (WEO Oktober 2007) menjadi 4,1%, namun penurunan tersebut terutama diperkirakan di negara-negara maju.

Penyempurnaan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Implementasi kerangka kerja kebijakan moneter berbasis suku bunga dengan mengacu kepada *Inflation Targeting Framework* telah dilakukan sejak awal Juli 2005. Dalam perkembangannya, implementasi tersebut perlu disempurnakan agar dapat lebih baik beradaptasi terhadap berbagai perkembangan terkini. Pada tahun 2008, upaya penyempurnaan akan ditekankan kepada aspek operasional dari kebijakan moneter. Sebagaimana disampaikan Gubernur Bank Indonesia secara formal pada pertemuan tahunan perbankan, penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menimbang tingginya fluktuasi harian yang terjadi di pasar uang dan struktur suku bunga pasar uang jangka pendek yang curam (*steep short-term yield curve*). Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga, serta mendorong transaksi yang hanya bersifat memanfaatkan perbedaan suku bunga jangka pendek. Berbagai keadaan tersebut belum memberi ruang yang kondusif bagi institusi keuangan dalam pengelolaan asetnya dengan horizon lebih berjangka panjang¹.

Di samping itu, penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter dilandasi pemikiran bahwa PUAB yang berfungsi dengan baik dan efisien merupakan prasyarat bagi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter guna memengaruhi pembentukan struktur suku bunga jangka yang lebih panjang dan relevan bagi kegiatan ekonomi di sektor riil. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan operasional kebijakan moneter akan diarahkan pada upaya mengimplementasikan arah (*stance*) kebijakan moneter (BI Rate) di pasar uang. Dalam konteks itu, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas suku bunga PUAB O/N pada level yang konsisten dan sejalan dengan BI Rate². Hal tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah *stance* kebijakan yang tercermin pada level BI Rate³.



1 Arahan Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Perbankan 18 Januari 2008.

2 "Monetary policy operating framework establish the means by which central banks implement the desired monetary policy stance...the liquidity management operations that support the stance by seeking to ensure that a short term market rate is consistent with the policy rate." (Borio, Claudio and William Nelson, BIS Quarterly Review, March 2008).

3 Mekanisme penetapan BI Rate adalah melalui RDG bulanan dan level BI Rate hanya berubah apabila Bank Indonesia memandang terdapat perubahan indikator yang perlu direspons untuk menjaga pencapaian target inflasi.

Secara teknis, penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter akan dilakukan melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management operation*) di pasar uang. Sehubungan itu, Bank Indonesia akan mengoperasikan berbagai instrumen OPT, baik reguler maupun nonreguler, serta didukung oleh *standing facilities*. OPT reguler akan menggunakan instrumen dengan maturitas yang lebih beragam (1, 3, 6, dan 9 bulan) melalui mekanisme *variable rate tender*. Sementara itu, OPT nonreguler akan memanfaatkan *fine tuning operations* (FTO)¹ dan menggunakan valuta asing (*foreign exchange swap – FX Swap*) sesuai diskresi Bank Indonesia. Adapun *standing facilities* bertenor *overnight* dioperasikan sebagai instrumen lapis kedua yang terdiri atas *standing deposit facilities* dan *standing lending facilities* yang akan membentuk koridor suku bunga dengan jarak lebih sempit dari yang selama ini berlaku dan ditetapkan secara simetris terhadap BI Rate². Berbagai kegiatan pengelolaan likuiditas tersebut dilakukan dengan atau tanpa surat berharga sebagai *underlying asset*, yang jenisnya dapat berupa SBI atau lainnya seperti Surat Utang Negara (SUN)³.

Keberadaan berbagai jenis dan *underlying assets* dari instrumen moneter yang lebih bervariasi tersebut juga akan mendukung proses pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*). Penerbitan SBI bertenor lebih panjang dari 1 dan 3 bulan, selain menyerap kelebihan likuiditas yang bersifat struktural, juga dapat mengefektifkan manajemen likuiditas perbankan. Selain itu, hal tersebut juga kondusif bagi pembentukan ekspektasi harga (*pricing*) terhadap aset-aset keuangan berjangka pendek lainnya serta produk perbankan. Sementara itu, pemanfaatan SUN⁴ akan meningkatkan aktivitas dan likuiditas sehingga pasar SUN menjadi lebih berdaya tahan (*resilient*) dalam menghadapi potensi gejolak. Adapun *FX Swap* merupakan instrumen OPT untuk membantu pengaturan likuiditas di pasar uang rupiah.

Dalam implementasinya, penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Untuk itu, komunikasi kepada *stakeholders* akan terus diintensifkan melalui berbagai forum dan media. Pada waktunya Bank Indonesia akan mengumumkan penerapannya secara penuh kepada publik. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor yang mencerminkan kesiapan dan kestabilan kondisi pasar uang.

1 Dapat bersifat mengurangi likuiditas (kontraksi) atau menambah likuiditas (ekspansi) dengan tenor 2-14 hari.

2 *Press Release* Arahan Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Perbankan 18 Januari 2008.

3 Sejak 21 Januari 2008, instrumen FTO telah ditingkatkan intensitas penggunaannya, sementara sejak awal Februari 2008 sistem lelang SBI dikembalikan sepenuhnya menjadi *variable rate tender* secara mingguan untuk tenor 1 dan 3 bulan. *Standing facilities* disesuaikan jam bukanya menjadi 15.00-17.00 WIB baik untuk SBI Repo maupun FASBI. Di samping itu, *underlying assets* Repo diperluas menjadi SBI dan SUN berplafon 100%.

4 Dalam transaksi repo.

Lampiran

Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Tahun 2007

No	No. PBI	Tanggal	Perihal
1	9/1/PBI/2007	24/1/2007	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
2	9/2/PBI/2007	5/3/2007	Laporan Harian Bank Umum
3	9/3/PBI/2007	16/3/2007	Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara
4	9/4/PBI/2007	26/3/2007	Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan
5	9/5/PBI/2007	30/3/2007	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
6	9/6/PBI/2007	30/3/2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
7	9/7/PBI/2007	4/5/2007	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
8	9/8/PBI/2007	6/6/2007	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
9	9/9/PBI/2007	18/6/2007	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
10	9/10/PBI/2007	30/8/2007	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah
11	9/11/PBI/2007	5/9/2007	Pedagang Valuta Asing
12	9/12/PBI/2007	21/9/2007	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan
13	9/13/PBI/2007	1/11/2007	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
14	9/14/PBI/2007	30/11/2007	Sistem Informasi Debitur
15	9/15/PBI/2007	30/11/2007	Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
16	9/16/PBI/2007	3/12/2007	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
17	9/17/PBI/2007	4/12/2007	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
18	9/18/PBI/2007	17/12/2007	Pencabutan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/153/KEP/DIR tanggal 20 November 1998 tentang Kredit Likuiditas kepada Perusahaan Umum Pegadaian melalui PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (PERSERO), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/154/KEP/DIR tanggal 20 November 1998 tentang Kredit Likuiditas kepada Perusahaan Umum Pegadaian melalui PT. Bank Bumi Daya (PERSERO), dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/155/KEP/DIR tanggal 20 November 1998 tentang Kredit Likuiditas kepada Perusahaan Umum Pegadaian melalui PT. Bank Umum Koperasi Indonesia
19	9/19/PBI/2007	17/12/2007	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Berbagai Ketentuan dan Kebijakan Penting di Bidang Ekonomi dan Keuangan Tahun 2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
Januari		
8	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2007
10	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 22 tahun 2007
29	Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah	Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.KUKM/2007
Februari		
12	Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional	Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No. 08/Per/M.KUKM/II/2007
21	Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk Kendaraan Bermotor yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 2527 K/24/DJM/2007
23	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 3 tahun 2007
26	Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007	Peraturan Menteri Pertanian No. 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007
26	Harga Referensi Benih Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2007	Peraturan Menteri Pertanian No. 24/PERMENTAN/SR.120/2/2007
Maret		
1	Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007	Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.02/2007
2	Pedoman Produksi Benih Kedelai	Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.120/3/2007
2	Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana	Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.08/2007
2	Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.08/2007
5	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2007
28	Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea</i> (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)	Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 2007
28	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
29	Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) kilogram dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Aksesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG untuk Keluarga Miskin	Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 28/M-IND/PER/3/2007
30	Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/3/2007
31	Kebijakan Perberasan	Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2007
April		
2	Pedoman Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah	Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No. 38/Permentan/OT.140/4/2007
3	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.011/2007
13	Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran umum Obligasi Daerah	Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-66/BL/2007
27	Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun anggaran 2007	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1720 K/12/MEM/2007
30	Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 18/M-DAG/PER/4/2007
Mei		
1	Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2007
8	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI NO.20/M-DAG/PER/5/2007
31	Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) tahun 2007	Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/5/2007
Juni		
4	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 41/PMK.010/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar	Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2007
27	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 34/PMK.011/2007 tanggal 3 April 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 19/BC/2007
Juli		
3	Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)	Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
9	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2007
13	Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun Anggaran 2007	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 93 tahun 2007
16	Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Fasilitas <i>Air Conditioner</i> (AC)	Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 29 tahun 2007
16	Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi	Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 tahun 2007
17	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.05/2007
30	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor	Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2007
31	Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 007 tahun 2007
Agustus		
6	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2007
7	Pembebasan Bea Masuk atas Impor <i>Hot Rolled Coil</i> (HRC) < 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional	Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.011/2007
15	Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai	UU RI No. 39 tahun 2007
31	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras	Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2007
31	Perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor	Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.011/2007
31	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/8/2007
September		
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah Pencemaran Lingkungan	Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.04/2007
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran Pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan Masyarakat	Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04/2007
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan	Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.04/2007
5	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan	Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.04/2007
5	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor	Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.04/2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
5	Pemeriksaan Jabatan atas Barang Impor atau Barang Ekspor	Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.04/2007
6	Sistem Dealer Utama	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.08/2007
10	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 112 tahun 2007
12	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 2007
14	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor	Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.011/2007
19	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang Ditangkap dengan Sarana Penangkap yang telah Mendapat Izin	Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04/2007
20	Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras tahun 2007	Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.02/2007
24	Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri	Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.011/2007
26	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No.39/M-DAG/PER/9/2007
28	Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Satu Desa Satu Produk (<i>One Village One Product – OVOP</i>) di Sentra	Peraturan Menteri Perindustrian RI No.78/M-IND/PER/9/2007
Oktober		
1	Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2008 di Provinsi Gorontalo	Keputusan Gubernur Gorontalo No. 267/28/K/2007
5	Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 42/M-DAG/PER/10/2007
11	Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2008 di Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 29 tahun 2007
11	Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2765/X/tahun 2007
11	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M-DAG/PER/10/2007
22	Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 25 tahun 2007
22	Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2008	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.519-Bangsos/2007
23	Perubahan atas Undang-undang No.18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	UU RI No. 41 tahun 2007
24	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT)	Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007
24	Penetapan Upah Minimum Provinsi	Peraturan Gubernur Bali No. 41 tahun 2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
25	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 45/M-DAG/PER/10/2007
26	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat tahun 2008	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 917 tahun 2007
30	Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi di Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007	Peraturan Menteri Keuangan No. 131.1/PMK.07/2007
30	Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143 tahun 2007
30	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)	Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.011/2007
30	Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten tahun 2008	Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.680-Huk/2007
31	Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.534/2007
November		
1	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/2007
1	Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka ASEAN Integration System of Preferences (AISP) untuk Negara-negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)	Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2007
5	Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008	Keputusan Gubernur NTT No. 326/KEP/HK/2007
8	Perubahan ketiga atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau	Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2007
12	Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor	Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.04/2007
12	Impor Sementara	Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.04/2007
12	Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2008	Keputusan Gubernur DIY No. 171/KEP/2007
16	Pencabutan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1020.Bangsos/2006 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2007 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1142-Bangsos/2006 tentang Upah Minimum Kabupaten Bandung, Sumedang, Kota Bandung, dan Cimahi Tahun 2007	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.569-Bangsos/2007
19	Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	Peraturan Gubernur NAD No. 67 tahun 2007
19	Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/51/2007
20	Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008	Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.07/2007
21	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/399/KPTS/013/2007

Tanggal	Ketentuan/Kebijakan	Keterangan
22	Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007
22	Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan atau Penyusutan Volume atau Berat	Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2007
22	Ekspor Kembali Barang Impor	Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/2007
22	Upah Minimum Kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Sumedang, Bandung Barat, Kota Depok, Bekasi, dan Cimahi Tahun 2008	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/KEP.575.Bangsos/2007
26	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi	Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.03/2007
26	Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 di Provinsi Riau	Peraturan Gubernur Riau No. 38 tahun 2007
26	Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 355 tahun 2007
26	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46/M-DAG/PER/11/2007
27	Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya	Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2007
27	Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk Hibah	Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.07/2007
30	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2008	Keputusan Gubernur Jambi No. 416/Kep.Gub/DISNAKERTRANS/2007
Desember		
3	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)	Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-23/BC/2007
10	Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (<i>Vooruitslag</i>)	Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2007
18	Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2008	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007
18	Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2008	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 561/PU48/K/tahun 2007
19	Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 48/M-DAG/PER/12/2007
27	Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Peraturan Presiden RI No. 111 tahun 2007
28	Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 49/M-DAG/PER/12/2007
28	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi	Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.011/2007

Tabel Statistik

1. Produk Domestik Bruto menurut Jenis Penggunaan	218	27. Pasar Uang Antarbank di Jakarta (Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi & Sore Berbagai Tenor)	241
2. Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha	219	28. Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	242
3. Pengaruh Nilai Tukar Dagang terhadap Produk Domestik Bruto	220	29. Tingkat Diskonto SBI	243
4. Hasil Beberapa Jenis Produk Sektor Pertanian	220	30. Pendapatan dan Belanja Negara	244
5. Produk, Luas Panen, dan Produk Rata-rata Padi dan Palawija	221	31. Pembiayaan Defisit Anggaran	245
6. Hasil Beberapa Jenis Produk Sektor Pertambangan dan Penggalan	221	32. Penghimpunan Dana oleh Bank Umum	246
7. Produksi Tenaga Listrik	222	33. Giro dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum menurut Kelompok Bank	247
8. Perkembangan Upah Minimum Regional per Bulan per Provinsi	222	34. Simpanan Berjangka Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum menurut Jangka Waktu	248
9. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor	223	35. Simpanan Berjangka Rupiah pada Bank Umum menurut Golongan Pemilik	249
10. Penyebaran Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I	224	36. Sertifikat Deposito	250
11. Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor	225	37. Tabungan menurut Jenis pada Bank Umum	251
12. Penyebaran Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I	226	38. Suku Bunga Kredit Rupiah menurut Kelompok Bank	252
13. Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Negara Asal	227	39. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi	252
14. Indeks Harga Konsumen Indonesia	228	40. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi	253
15. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia	229	41. Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi	254
16. Perkembangan Laju Inflasi di 45 Kota	230	42. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Jakarta dan KKBI	254
17. Neraca Pembayaran Indonesia	231	43. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Jakarta dan KKBI	255
18. Nilai Ekspor Nonmigas menurut Komoditas	232	44. Pertumbuhan Ekonomi Dunia	255
19. Volume Ekspor Nonmigas menurut Komoditas	233	45. Inflasi Dunia	256
20. Nilai Ekspor Nonmigas menurut Negara Tujuan	234	46. Suku Bunga (%) dan Nilai Tukar	256
21a. Nilai Impor Nonmigas (C&F) menurut Kelompok Barang	235	47. Perkembangan Volume Perdagangan Barang dan Harga Dunia	257
21b. Volume Impor Nonmigas menurut Kelompok Barang	236	48. Transaksi Berjalan di Negara Industri dan Negara Sedang Berkembang	257
22. Nilai Impor Nonmigas menurut Negara Asal (C&F)	237		
23. Ekspor Migas	238		
24. Uang Beredar	239		
25. Perubahan Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhi	240		
26. Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank	240		

Tabel 1
Produk Domestik Bruto menurut Jenis Penggunaan

miliar rupiah

Jenis Penggunaan	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Harga Konstan 2000						
Pengeluaran konsumsi	1.031.083,2	1.077.997,5	1.130.357,7	1.178.430,7	1.224.491,8	1.284.496,4
Rumah tangga	920.749,6	956.593,4	1.004.109,0	1.043.805,1	1.076.928,1	1.131.186,7
Pemerintah	110.333,6	121.404,1	126.248,7	134.625,6	147.563,7	153.309,6
Pembentukan modal tetap domestik bruto	307.584,6	309.431,1	354.865,7	393.500,5	403.161,9	440.078,2
Perubahan stok	13.085,0	45.996,7	25.099,1	33.508,3	29.026,8	911,9
Diskrepansi statistik	10.454,6	-26.895,8	8.757,2	-8.535,4	16.961,3	56.986,9
Ekspor barang dan jasa	566.188,4	599.516,4	680.621,0	793.613,0	868.256,5	937.849,2
dikurangi Impor barang dan jasa	422.271,4	428.874,6	543.183,8	639.701,9	694.605,3	756.348,3
Produk Domestik Bruto	1.506.124,4	1.577.171,3	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.292,9	1.963.974,3
Pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi	-56.357,0	-81.230,8	-80.468,1	-107.381,7	-113.857,5	-116.241,2
Produk Nasional Bruto	1.449.767,4	1.495.940,5	1.576.048,7	1.643.433,5	1.733.435,4	1.847.733,1
dikurangi Pajak tidak langsung neto	57.684,9	65.876,5	46.040,6	34.698,9	55.425,6	56.308,9
dikurangi Penyusutan	75.306,2	78.858,6	82.825,8	87.540,8	92.364,6	98.198,7
Pendapatan Nasional	1.316.776,3	1.351.205,4	1.447.182,2	1.521.193,8	1.585.645,2	1.693.225,5
Harga Berlaku						
Pengeluaran konsumsi	1.364.183,3	1.535.779,4	1.723.943,9	2.010.576,9	2.380.735,5	2.841.068,3
Rumah tangga	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
Pemerintah	132.218,8	163.701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1
Pembentukan modal tetap domestik bruto	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	805.470,3	983.830,9
Perubahan stok	35.979,5	122.681,9	36.911,1	39.974,6	42.382,2	169,7
Diskrepansi statistik	-5.553,7	-165.677,9	-87.673,3	-47.163,0	-69.837,1	-27.114,5
Ekspor barang dan jasa	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
dikurangi Impor barang dan jasa	480.815,3	462.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,0
Produk Domestik Bruto	1.863.274,8	2.036.351,9	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
Pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi	-54.513,1	-77.413,9	-105.350,1	-135.000,5	-142.268,9	-156.567,6
Produk Nasional Bruto	1.808.761,7	1.958.938,0	2.190.476,1	2.639.280,6	3.197.210,7	3.800.836,3
dikurangi Pajak tidak langsung neto	71.186,3	85.272,2	62.534,0	53.719,3	98.142,7	112.188,8
dikurangi Penyusutan	93.163,8	101.817,6	114.791,3	138.714,1	166.974,0	197.870,2
Pendapatan Nasional	1.644.411,6	1.771.848,2	2.013.150,8	2.446.847,2	2.932.094,0	3.490.777,3
Memorandum item:						
PDB (Harga berlaku)						
dalam miliar rupiah	1.863.274,8	2.036.351,9	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
dalam juta \$	198.926,7	237.335,9	256.681,2	288.374,8	369.422,5	438.052,3
Produk Domestik Bruto per kapita						
dalam ribuan rupiah	8.828,1	9.535,7	10.610,1	12.675,5	15.029,7	17.581,4
dalam \$	942,5	1.111,4	1.186,2	1.317,6	1.662,6	1.947,1
Produk Nasional Bruto per kapita						
dalam ribuan rupiah	8.569,8	9.173.183,9	10.123,2	12.089,0	14.384,0	14.004,5
dalam \$	914,9	1.069,1	1.131,8	1.256,6	1.591,6	1.550,2
Pendapatan Nasional per kapita						
dalam ribuan rupiah	7.791,1	8.297.092,3	9.303,7	11.208,7	13.190,4	12.862,1
dalam \$	831,8	967,0	1.040,2	1.165,1	1.459,2	1.423,7

Sumber: Badan Pusat Statistik

* Data sementara

** Data sangat sementara

Tabel 2
Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha

miliar rupiah

Lapangan Usaha	Harga Konstan 2000						Harga Berlaku					
	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	232.973,5	240.387,3	247.163,6	253.881,7	262.402,8	271.586,9	298.876,8	305.783,5	329.124,6	364.169,3	433.223,4	547.235,6
Tanaman bahan makanan	115.925,5	119.164,8	122.611,7	125.801,8	129.548,6	134.075,6	153.666,0	157.648,8	165.558,2	181.331,6	214.346,3	268.124,4
Tanaman perkebunan	36.585,6	38.693,9	38.849,3	39.810,9	41.318,0	42.751,3	43.956,4	46.753,8	49.630,9	56.433,7	63.401,4	84.459,2
Peternakan	29.393,5	30.647,0	31.672,5	32.346,5	33.430,2	34.530,7	41.328,9	37.354,2	40.634,7	44.202,9	51.074,7	62.095,8
Kehutanan	17.986,5	17.213,7	17.433,8	17.176,9	16.686,9	16.401,4	18.875,7	18.414,6	20.290,0	22.561,8	30.065,7	35.734,1
Perikanan	33.082,3	34.667,9	36.596,3	38.745,6	41.419,1	43.827,9	41.049,8	45.612,1	53.010,8	59.639,3	74.335,3	96.822,1
Pertambangan dan penggalian	169.932,0	167.603,8	160.100,5	165.222,6	168.028,9	171.361,7	161.023,8	167.572,3	205.252,0	309.014,1	366.505,4	440.826,2
Minyak dan gas bumi	108.130,6	103.087,2	98.636,3	96.894,6	95.853,1	94.718,6	93.092,0	95.152,1	118.484,9	177.605,9	200.081,6	234.157,5
Pertambangan tanpa migas	49.066,5	51.007,3	46.947,1	52.694,2	55.239,6	58.250,3	51.277,5	53.313,2	65.122,4	104.599,1	130.700,6	160.459,0
Penggalian	12.734,9	13.509,3	14.517,1	15.633,8	16.936,2	18.392,8	16.654,3	19.107,0	21.644,7	26.809,1	35.723,2	46.209,7
Industri pengolahan	419.388,1	441.754,9	469.952,4	491.561,4	514.100,3	538.077,9	553.746,6	591.597,6	644.342,6	760.361,3	919.532,7	1.068.806,4
Industri migas	52.179,5	52.609,3	51.583,9	48.658,8	47.851,2	47.816,3	69.660,0	100.344,9	94.263,4	138.440,9	172.094,9	182.296,3
Pengilangan minyak bumi	21.820,0	22.374,1	22.322,3	21.207,2	20.806,9	20.776,6	43.448,5	50.989,5	59.062,0	89.629,6	117.952,2	122.096,5
Gas alam cair	30.359,5	30.235,2	29.261,6	27.451,6	27.044,3	27.039,7	26.211,5	49.355,4	35.201,4	48.811,3	54.142,7	60.199,8
Industri tanpa migas	367.208,6	389.145,6	418.368,5	442.902,6	466.249,1	490.261,6	484.086,7	491.252,7	550.079,2	621.920,4	747.437,8	886.510,1
Makanan, minuman dan tembakau	113.474,8	116.528,6	118.149,3	121.395,6	130.148,9	136.722,4	145.809,2	154.154,8	163.553,7	177.753,1	212.725,5	264.080,3
Tekstil barang kulit dan alas kaki	48.484,9	51.483,6	53.576,3	54.277,1	54.944,2	52.922,5	69.811,3	67.575,1	71.474,1	77.087,2	90.119,3	93.605,5
Barang kayu dan hasil hutan lainnya	20.510,3	20.754,3	20.325,5	20.138,5	20.006,2	19.657,6	29.575,6	29.898,4	31.225,9	35.247,5	44.605,4	54.884,6
Kertas dan barang cetakan	20.045,2	21.731,0	23.384,2	23.944,2	24.444,8	25.861,0	23.685,8	27.792,4	31.036,3	33.898,8	39.637,5	45.404,2
Kimia dan barang dari karet	45.171,4	50.008,7	54.513,6	59.293,1	61.947,9	65.470,0	73.790,8	56.760,5	64.012,6	76.213,6	94.078,8	110.769,3
Semen & barang galian bukan logam	12.830,6	13.735,9	15.045,2	15.618,1	15.700,1	16.233,3	19.010,9	19.215,6	21.588,3	24.589,1	29.014,1	32.816,6
Logam dasar besi dan baja	8.935,5	8.222,9	8.008,0	7.712,0	8.076,8	8.213,3	14.046,0	13.421,3	16.154,6	18.382,7	20.687,0	22.907,9
Alat angkutan, mesin & peralatannya	94.982,0	103.414,7	121.683,3	136.744,6	147.063,8	161.375,6	105.015,6	118.171,9	145.971,3	172.957,1	209.460,5	254.468,3
Barang lainnya	2.773,9	3.265,9	3.683,1	3.779,4	3.916,4	3.805,9	3.341,4	4.262,7	5.062,4	5.791,3	7.109,7	7.573,4
Listrik, gas, dan air bersih	9.868,2	10.349,2	10.897,6	11.584,1	12.251,1	13.525,2	15.391,9	19.144,2	23.730,3	26.693,8	30.354,8	34.726,2
Bangunan	84.469,8	89.621,8	96.334,4	103.598,4	112.233,6	121.901,0	101.573,5	125.337,1	151.247,6	195.110,6	251.132,3	305.215,7
Perdagangan, hotel, dan restoran	243.409,3	256.516,6	271.142,2	293.654,0	312.520,8	338.945,7	314.646,8	335.100,4	368.555,9	431.620,2	501.542,1	590.822,3
Perdagangan besar dan eceran	199.649,1	210.653,3	222.290,0	241.887,1	257.847,1	280.747,0	245.564,3	260.578,4	287.553,5	338.667,2	393.047,1	467.790,4
Hotel dan restoran	43.760,2	45.863,3	48.852,2	51.766,9	54.673,7	58.198,7	69.082,4	74.522,0	81.002,4	92.953,0	108.495,0	123.031,9
Pengangkutan dan komunikasi	76.173,1	85.458,4	96.896,7	109.261,5	124.975,7	142.944,5	97.970,2	118.916,4	142.292,0	180.584,9	231.808,6	265.256,9
Pengangkutan	52.386,5	57.463,0	62.495,7	66.404,7	70.807,0	72.775,9	66.117,7	79.535,5	88.310,3	110.157,3	142.799,0	149.926,6
Komunikasi	23.786,6	27.995,4	34.401,0	42.856,8	54.168,7	70.168,6	31.852,6	39.380,9	53.981,7	70.427,6	89.009,6	115.330,3
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	130.928,1	140.374,4	232.543,4	161.252,2	170.074,3	183.659,3	154.442,2	174.074,5	194.410,9	230.522,7	269.121,4	305.216,0
Bank ¹⁾	71.727,0	76.434,0	81.420,1	85.570,1	87.697,1	94.721,8	81.916,7	89.795,4	96.466,9	110.677,4	124.498,4	140.610,9
Sewa bangunan dan jasa perusahaan	59.201,1	63.940,4	69.703,2	75.682,1	82.377,2	88.937,5	72.525,5	84.279,1	97.944,0	119.845,3	144.623,0	164.605,1
Jasa-jasa	138.982,3	145.104,9	152.906,1	160.799,3	170.705,4	181.972,1	165.602,8	198.825,9	236.870,3	276.204,2	336.258,9	399.298,6
Pemerintahan umum	70.482,4	71.147,7	72.323,6	73.700,1	76.618,4	80.778,2	83.293,5	101.605,6	121.129,4	135.132,8	167.799,7	205.343,9
Swasta	68.499,9	73.957,2	80.582,5	87.099,2	94.087,0	101.193,9	82.309,4	97.220,3	115.740,9	141.071,4	168.459,2	193.954,7
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1.506.124,4	1.577.171,3	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.292,9	1.963.974,3	1.863.274,7	2.036.351,9	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
Nonmigas	1.345.814,2	1.421.474,8	1.506.296,6	1.605.261,8	1.703.588,6	1.821.439,4	1.700.522,7	1.840.854,9	2.083.077,9	2.458.234,3	2.967.303,1	3.540.950,1
Migas	160.310,1	155.696,5	150.220,2	145.553,4	143.704,3	142.534,9	162.752,0	195.497,0	212.748,3	316.046,8	372.176,5	416.453,8

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Termasuk lembaga keuangan di luar bank dan jasa penunjang keuangan

* Data sementara

** Data sangat sementara

Tabel 3
Pengaruh Nilai Tukar Dagang terhadap Produk Domestik Bruto

miliar rupiah

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
1 Ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
2 Ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan	566.188,4	599.516,4	680.621,0	793.613,0	868.256,5	937.849,2
3 Deflator ekspor (1:2) x 100)	105,2	102,4	108,7	119,1	119,4	123,9
4 Impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku	480.815,3	462.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,0
5 Impor barang dan jasa atas dasar harga konstan	422.271,4	428.874,6	543.183,8	639.701,9	694.605,3	756.348,3
6 Deflator impor (4:5) x 100)	113,9	107,9	116,4	129,8	123,2	132,5
7 Indeks nilai tukar dagang (3:6) x 100)	92,4	94,8	93,3	91,8	96,9	93,5
8 Perubahan indeks nilai tukar dagang (%)	-5,39	2,67	-1,57	-1,68	5,58	-3,53
9 Kapasitas impor riil dari ekspor (1:6) x 100)	523.004,4	568.559,1	635.318,2	729.043,9	810.413,1	876.646,1
10 Pengaruh nilai tukar dagang (9 - 2)	-43.184,0	-30.957,3	-45.302,7	-62.952,0	-54.090,4	-61.203,1
11 Perubahan nilai tukar dagang (%)	218,19	-28,31	46,34	38,96	-14,08	13,15
12 PDB atas dasar harga konstan 2000	1.506.124,4	1.577.171,3	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.292,9	1.963.974,3
13 Perubahan PDB atas dasar harga konstan (%)	4,38	4,72	5,03	5,69	5,51	6,32
14 Pendapatan Domestik Bruto (PnDB) (10 - 12)	-1.549.308,4	-1.608.128,6	-1.701.819,5	-1.813.608,1	-1.900.745,3	-2.025.177,4
15 Pertumbuhan PnDB (%)	6,37	3,80	5,83	6,57	4,80	6,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

* Data sementara

** Data sangat sementara

Tabel 4
Hasil Beberapa Jenis Produk Sektor Pertanian

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tanaman pangan (ribu ton)						
Padi	51.489,7	52.137,6	54.088,5	54.151,1	54.663,6	57.048,6 ¹⁾
Jagung	9.654,1	10.886,4	11.225,2	12.523,9	11.610,6	10.152,0 ²⁾
Ubi kayu	16.913,1	18.523,8	19.424,7	19.321,2	19.927,6	12.617,0 ²⁾
Ubi jalar	1.771,6	1.991,5	1.901,8	1.857,0	1.851,8	1.258,0 ²⁾
Kacang tanah	718,1	785,5	837,5	836,3	838,0	636,0 ²⁾
Kacang kedelai	673,1	671,6	723,5	808,4	749,0	405,0 ²⁾
Kacang hijau	288,1	335,2	310,4	309,7	-	- ²⁾
Tanaman perkebunan (ribu ton)						
Karet Kering	403,7	396,1	403,8	432,2	450,4	191,2 ³⁾
Minyak Sawit	6.195,6	6.923,5	8.479,3	10.119,0	10.869,4	4.505,3 ³⁾
Biji Sawit	1.209,7	1.529,2	1.862,0	2.115,9	2.315,8	966,3 ³⁾
Coklat	48,2	56,6	54,9	55,1	55,6	22,2 ³⁾
Kopi	26,7	29,4	29,2	24,8	25,1	2,0 ³⁾
T e h	120,4	126,2	125,5	128,2	114,4	54,0 ³⁾
Kulit Kina	0,6	0,8	0,7	0,8	1,4	0,1 ³⁾
Gula Tebu	1.901,3	1.991,6	2.051,6	2.241,7	2.266,7	287,2 ³⁾
Tembakau	5,3	5,2	2,7	4,0	3,9	1,2 ³⁾
Kehutanan (ribu M³)						
Kayu Bulat	8.660,0	11.423,5	13.548,9	24.222,6	21.792,1	-
Kayu Gergajian	623,5	762,6	433,0	1.471,6	679,2	-
Kayu Lapis	1.694,4	6.110,5	4.514,3	4.533,7	3.811,8	-
Peternakan						
Daging (ribu ton)	1.769,8	1.872,6	2.020,4	1.817,0	2.062,9	2.169,8
Telur (ribu ton)	945,8	973,6	1.107,4	1.051,5	1.204,4	1.297,2
Susu (juta liter)	493,4	553,4	549,9	536,0	616,5	636,9
Perikanan (ribu ton)						
Laut	4.073,5	4.383,1	1.006,1	1.273,0	1.106,0	-
Darat	305,0	308,7	260,0	890,0	727,0	-

Sumber: Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Badan Pusat Statistik

1) Angka Ramalan III

2) Data sampai dengan Agustus 2007

3) Data sampai Mei 2007

Tabel 5
Produksi, Luas Panen, dan Produksi Rata-rata Padi dan Palawija

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Produksi (ribu ton)						
Padi	51.489,7	52.137,6	54.088,5	54.151,1	54.663,6	57.048,6 ¹⁾
Jagung	9.654,1	10.886,4	11.225,2	12.523,9	11.610,6	10.152,0 ²⁾
Ubi kayu	16.913,1	18.523,8	19.424,7	19.321,2	19.927,6	12.617,0 ²⁾
Ubi jalar	1.771,6	1.991,5	1.901,8	1.857,0	1.851,8	1.258,0 ²⁾
Kacang tanah	718,1	785,5	837,4	836,3	838,0	636,0 ²⁾
Kacang kedelai	673,1	671,6	723,5	808,4	749,0	405,0 ²⁾
Kacang hijau	288,1	335,2	310,4	309,7	-	-
Luas panen (ribu hektar)						
Padi	11.521,2	11.488,0	11.923,0	11.839,1	11.854,9	-
Jagung	3.126,8	3.358,5	3.356,9	3.626,0	3.346,4	-
Ubi kayu	1.276,5	1.244,5	1.255,8	1.213,5	1.222,8	-
Ubi jalar	177,3	197,5	184,6	178,3	176,2	-
Kacang tanah	647,0	683,4	723,4	720,5	706,6	-
Kacang kedelai	544,5	526,8	565,2	621,5	581,6	-
Kacang hijau	313,6	330,4	311,8	308,0	-	-
Produktivitas (kuintal/hektar)						
Padi	44,7	45,4	45,4	45,7	46,2	-
Jagung	30,9	32,4	33,4	34,5	34,7	-
Ubi kayu	132,0	149,0	155,0	159,0	163,0	-
Ubi jalar	100,0	101,0	103,0	104,0	105,0	-
Kacang tanah	11,1	11,5	11,6	11,6	11,9	-
Kacang kedelai	12,4	12,8	12,8	13,1	12,9	-
Kacang hijau	9,2	10,1	n.a.	10,1	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Angka Ramalan III

2) Data sampai dengan Agustus 2007

Tabel 6
Hasil Beberapa Jenis Produk Sektor Pertambangan dan Penggalian

Rincian	Satuan	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ²⁾
Pertambangan Migas							
Minyak Mentah ¹⁾	Juta Barel	474,9	421,0	438,5	387,7	381,5	254,3
LNG	Ribu MMBTU	1.352.878,0	1.347.349,0	1.390.466,0	1.338.782,0	1.292.364,0	867.115,0
LPG	Ribu Metric Ton	1.792,6	1.921,8	1.677,6	1.581,7	1.861,3	1.249,5
Pertambangan Non Migas							
Batubara	Ribu Metric Ton	103.060,4	114.610,1	126.850,8	141.058,5	178.168,9	106.880,8
Nikel	Ribu Metric Ton	4.366,2	4.395,4	4.119,0	3.707,0	4.353,8	2.967,6
Tembaga	Ribu Metric Ton	3.786,7	3.328,3	2.810,3	3.553,8	2.938,0	1.992,2
Timah	Ribu Metric Ton	88,1	71,7	70,3	78,4	80,9	54,3
Bauksit	Ribu Metric Ton	1.283,5	1.262,6	1.330,8	1.419,7	1.501,9	970,4
Pasir Besi	Ribu Metric Ton	378,6	245,4	94,3	32,2	5,5	-
Emas	Ribu Kg	142,2	141,0	92,4	142,0	85,4	92,4
Perak	Ribu Kg	288,8	235,2	262,9	348,4	261,4	179,2

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Termasuk Kondensat

2) Data sampai dengan Agustus 2007

Tabel 7
Produksi Tenaga Listrik

juta kWJ

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total	86.504	89.782	99.111	105.992	111.402	119.969
Sosial	1.849	2.021	2.224	2.421	2.596	2.896
Rumah Tangga	33.799	35.541	38.322	40.906	43.422	46.950
Bisnis	11.208	12.584	14.128	15.628	16.887	19.036
Industri	36.753	36.361	40.057	42.123	43.280	45.432
Publik	2.547	2.920	3.626	3.878	4.188	4.595
Multiguna	205	356	752	1.035	1.030	1.060

Sumber: PT Perusahaan Listrik Negara

Tabel 8
Perkembangan Upah Minimum Regional per Bulan per Provinsi

rupiah

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Nanggroe Aceh Darussalam	330.000	425.000	550.000	620.000	820.000	850.000
Sumatera Utara	464.000	505.000	537.000	600.000	737.794	761.000
Sumatera Barat	385.000	435.000	480.000	540.000	650.000	650.000
Riau	394.000	437.500	476.875	551.500	637.000	710.000
Kepulauan Riau			n.a.	557.000	760.000	805.000
Jambi	304.000	390.000	425.000	485.000	563.000	658.000
Sumatera Selatan	331.500	403.500	460.000	503.700	604.000	753.000
Bangka Belitung	n.a.	n.a.	n.a.	560.000	640.000	830.000
Bengkulu	295.000	330.000	363.000	430.000	516.000	516.000
Lampung	310.000	350.000	377.500	405.000	505.000	555.000
Banten	360.000	475.000	515.000	585.000	661.613	661.613
DKI Jakarta	591.266	631.554	671.550	711.843	819.100	816.100
Jawa Barat	280.779	320.000	366.500	408.260	447.654	447.654
Jawa Tengah	314.500	340.400	365.000	390.000	450.000	500.000
D.I. Yogyakarta	312.750	360.000	365.000	400.000	460.000	460.000
Jawa Timur	245.000	281.750	310.000	340.000	390.000	448.500
Bali	341.000	341.000	425.000	447.500	510.000	622.000
Nusa Tenggara Timur	330.000	350.000	400.000	450.000	550.000	600.000
Kalimantan Barat	380.000	400.000	420.000	445.200	512.000	560.000
Kalimantan Tengah	362.000	425.000	482.250	523.698	634.260	665.973
Kalimantan Selatan	377.500	425.000	482.212	536.300	629.000	745.000
Kalimantan Timur	500.000	540.000	572.652	600.000	684.000	766.500
Sulawesi Utara	438.000	495.000	545.000	600.000	713.500	750.000
Sulawesi Tengah	350.000	410.000	450.000	490.000	575.000	615.000
Sulawesi Selatan	375.000	415.000	455.000	510.000	612.000	673.200
Sulawesi Tenggara	325.000	390.000	470.000	498.600	573.400	640.000
Maluku	285.000	370.000	450.000	500.000	575.000	635.000
Maluku Utara	322.000	322.000	400.000	440.000	528.000	660.000
Gorontalo	375.000	410.000	430.000	435.000	527.000	560.000
Papua	530.000	600.000	650.000	700.000	822.500	987.000

Sumber: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (diolah)

Tabel 9
Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor

miliar rupiah

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.453,7	1.929,1	1.847,9	4.494,1	8.767,8	21.948,4
Pertanian	1.452,2	1.657,9	1.845,0	4.338,7	8.712,5	21.118,3
Kehutanan	0,0	176,9	0,0	140,4	53,3	0,0
Perikanan	1,5	94,3	2,9	15,0	2,0	830,1
Pertambangan	786,7	752,8	662,4	982,3	437,4	3.346,1
Industri	15.853,5	40.442,7	20.631,6	26.807,9	131.753,3	144.226,2
Makanan	4.967,6	4.246,6	10.271,5	8.073,0	13.789,3	17.847,7
Tekstil	440,0	2.111,7	1.476,8	710,4	1.279,0	1.024,3
Kayu	409,1	562,9	120,7	685,3	731,5	185,1
Kertas	150,1	245,0	1.741,1	6.478,8	82.465,4	83.527,1
Kimia dan farmasi	1.953,1	30.204,6	3.046,2	1.686,5	24.281,0	33.396,7
Mineral bukan logam	217,1	932,5	313,5	3.310,5	1.666,9	4.577,6
Logam dasar	7.179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barang-barang logam	0,0	1.002,6	748,8	1.951,2	5.458,3	1.744,7
Lain-lain	537,3	1.136,8	2.913,0	3.912,2	2.081,9	1.923,0
Konstruksi	1.499,8	1.773,7	1.473,1	1.537,9	3.028,4	1.223,2
Perhotelan	683,2	929,7	552,1	4.049,7	8.913,7	1.417,9
Pengangkutan	3.117,7	2.022,0	1.885,1	2.375,1	1.930,3	1.109,7
Perumahan dan perkantoran	255,1	1,4	0,0	0,0	1,0	481,5
Jasa lainnya	1.612,6	633,4	9.695,4	10.330,4	7.935,3	15.123,3
Jumlah	25.262,3	48.484,8	36.747,6	50.577,4	162.767,2	188.876,3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

* Sampai dengan bulan Oktober 2007

Tabel 10
Penyebaran Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I

miliar rupiah

Daerah Tingkat I	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Jawa dan Madura	12.780,9	11.283,4	20.456,3	23.086,8	26.603,8	48.552,9
DKI Jakarta	4.013,7	2.667,6	3.481,0	4.079,7	2.697,6	5.605,2
Jawa Barat	5.587,3	5.567,3	7.555,6	11.029,4	8.540,8	21.539,1
Banten		1.558,4	3.621,9	5.136,5	6.305,7	4.063,6
Jawa Tengah	1.462,9	1.947,2	6.013,6	1.856,7	3.809,9	1.285,7
DI Yogyakarta	43,4	23,0	7,7	646,9	89,6	4,0
Jawa Timur	1.673,6	1.078,3	3.398,4	5.474,1	5.160,2	16.055,3
Sumatera	5.946,2	3.500,9	10.217,8	13.235,9	43.455,3	41.365,6
DI Aceh	1,2	98,9	71,0	0,0	218,6	5,7
Sumatera Utara	2.275,6	868,5	3.400,7	3.598,2	11.247,0	9.349,4
Sumatera Barat	0,0	289,8	712,3	512,5	1.847,2	1.934,6
Riau	1.474,2	770,7	4.289,7	4.805,6	21.241,8	4.874,3
Jambi	447,4	107,4	691,0	2.109,0	834,2	17.710,9
Sumatera Selatan	12,0	839,9	358,2	1.297,1	2.983,2	4.732,1
Bangka Belitung		301,0	0,0	0,0	0,0	1.487,0
Bengkulu	55,2	81,9	104,2	169,1	0,0	754,8
Lampung	1.680,6	443,8	590,7	744,4	5.083,3	516,3
Kalimantan	2.722,9	2.100,2	2.465,4	5.212,2	78.789,7	68.217,5
Kalimantan Barat	23,7	485,5	336,2	1.544,1	21.280,2	26.402,4
Kalimantan Tengah	491,8	516,0	254,7	965,5	2.099,3	20.563,6
Kalimantan Selatan	149,4	346,4	353,5	666,8	1.613,9	17.941,1
Kalimantan Timur	2.058,0	752,3	1.521,0	2.035,8	53.796,3	3.310,4
Sulawesi	3.546,0	29.766,9	2.593,7	4.034,4	4.578,7	9.352,5
Sulawesi Utara	127,8	142,3	374,6	460,0	59,4	393,1
Sulawesi Tengah	94,8	217,7	1.179,3	2.773,4	72,0	0,0
Sulawesi Selatan	141,4	29.239,8	646,1	133,2	2.407,3	3.765,6
Sulawesi Tenggara	3.182,0	167,1	393,0	667,8	2.040,0	5.193,8
Gorontalo			0,7	0,0		0,0
Nusa Tenggara	15,4	128,1	0,0	34,0	275,8	57,9
Nusa Tenggara Barat	0,4	5,8	0,0	34,0	0,0	3,5
Nusa Tenggara Timur	15,0	122,3	0,0	0,0	275,8	54,4
Bali	28,8	706,5	830,3	3.245,2	8.527,6	665,9
Timor Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	68,0	2,9	140,1	121,1	5,0	823,6
Papua	154,1	995,9	44,0	1.607,8	531,3	19.840,4
Jumlah	25.262,3	48.484,8	36.747,6	50.577,4	162.767,2	188.876,3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

* sampai dengan bulan Oktober 2007

Tabel 11
Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor

juta \$

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	458,9	178,9	329,7	606,0	963,5	1.491,6
Pertanian	446,3	57,2	196,9	462,0	845,2	1.261,7
Kehutanan	8,9	95,2	0,2	128,6	13,6	17,4
Perikanan	3,7	26,5	132,6	15,4	104,7	212,5
Pertambangan	49,2	17,8	66,3	775,9	325,7	817,6
Industri	3.208,2	6.457,4	6.334,3	6.028,0	8.307,4	27.209,4
Makanan	267,3	408,5	721,8	642,6	1.035,2	1.724,4
Tekstil	89,9	123,1	407,9	139,5	163,0	274,5
Kayu	30,4	235,0	15,5	102,2	138,8	223,9
Kertas	10,0	1.300,0	67,0	227,8	1.170,5	6.883,7
Kimia dan farmasi	1.872,7	3.034,6	3.413,5	2.878,9	1.528,4	15.267,4
Mineral bukan logam	32,6	711,4	37,7	368,1	785,1	319,1
Logam dasar	348,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barang-barang logam	0,0	323,4	1.013,5	695,0	2.918,9	1.611,9
Lain-lain	556,4	321,4	657,4	973,9	567,5	904,5
Konstruksi	287,7	787,7	954,0	1.777,2	2.561,3	1.908,5
Perhotelan	254,6	488,2	587,2	259,1	258,3	354,8
Pengangkutan	3.713,2	4.160,2	586,5	3.107,3	294,0	4.690,4
Perumahan dan perkantoran	7,4	10,3	339,6	124,8	57,2	1.043,9
Jasa lainnya	1.764,9	1.106,7	1.079,7	901,0	2.856,6	2.629,0
Jumlah	9.744,1	13.207,2	10.277,3	13.579,3	15.624,0	40.145,2

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

* sampai dengan bulan Oktober 2007

Tabel 12
Penyebaran Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I

juta \$

Daerah Tingkat I	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Jawa dan Madura	4.780,9	7.430,6	8.100,0	10.632,2	6.976,3	12.395,7
DKI Jakarta	3.373,4	5.611,6	1.728,4	5.206,1	2.673,8	6.081,9
Jawa Barat	1.053,6	1.294,2	2.671,6	1.438,3	1.605,0	3.764,9
Banten		383,2	585,0	2.774,1	1.353,9	1.223,6
Jawa Tengah	71,6	89,7	3.371,4	627,3	163,7	329,1
DI Yogyakarta	19,8	17,4	3,5	59,5	49,7	23,7
Jawa Timur	262,5	417,7	325,1	526,9	1.130,2	972,5
Sumatera	2.078,2	1.541,2	1.111,6	1.355,8	4.876,1	15.640,3
Nanggroe Aceh Darussalam	0,0	82,5	9,5	2,4	227,9	59,3
Sumatera Utara	44,5	57,6	151,5	235,8	1.516,5	423,7
Sumatera Barat	10,0	45,3	32,1	144,6	64,7	123,5
Riau	1.152,4	1.175,3	536,4	296,1	2.288,2	13.703,5
Jambi	21,6	0,6	35,7	21,9	121,9	56,9
Sumatera Selatan	764,0	178,8	80,0	611,9	386,3	934,5
Bangka Belitung		19,6	52,6	58,6	37,5	86,8
Bengkulu	0,0	0,0	1,4	12,1	41,6	0,8
Lampung	85,7	1,1	265,0	31,0	191,5	251,3
Kalimantan	2.236,6	780,7	158,6	1.005,3	2.958,9	5.407,0
Kalimantan Barat	1,3	33,0	38,8	296,6	469,1	498,5
Kalimantan Tengah	8,9	32,2	24,3	66,4	203,3	510,4
Kalimantan Selatan	34,0	2,1	7,1	80,9	1.594,2	267,3
Kalimantan Timur	2.192,4	713,4	88,4	561,4	692,3	4.130,8
Sulawesi	380,2	225,2	363,2	310,7	361,7	6.223,5
Sulawesi Utara	1,3	181,3	50,0	73,2	206,6	39,9
Sulawesi Tengah	0,3	0,0	0,5	170,2	3,0	1.044,5
Gorontalo		0,1	85,6	3,5	14,6	1,7
Sulawesi Selatan	373,6	43,8	226,1	54,8	136,0	5.126,5
Sulawesi Tenggara	5,0	0,0	1,0	9,0	1,5	10,9
Nusa Tenggara	121,9	2.806,0	18,9	59,3	32,5	42,7
Nusa Tenggara Barat	119,4	2.805,6	15,9	54,7	27,2	22,9
Nusa Tenggara Timur	2,5	0,4	3,0	4,6	5,3	19,8
Bali	86,6	198,5	414,3	191,5	227,3	182,4
Timor Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	0,0	3,0	59,9	10,7	69,7	128,6
Papua	59,7	222,0	51,0	13,8	121,5	125,0
Jumlah	9.744,1	13.207,2	10.277,5	13.579,3	15.624,0	40.145,2

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

* sampai dengan bulan Oktober 2007

Tabel 13
Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Negara Asal

juta \$

Negara Asal	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Eropa	1.358,3	1.264,1	1.956,4	2.125,3	2.220,3	2.133,0
Belanda	244,1	99,4	258,8	472,3	78,2	645,0
Belgia	7,1	5,9	10,2	16,4	3,2	4,6
Inggris	720,0	966,1	1.317,2	1.529,1	1.038,5	865,8
Jerman	35,7	170,8	29,9	40,1	19,9	36,0
Perancis	262,6	5,7	9,2	8,8	355,9	91,8
Swiss	74,3	0,3	299,0	27,5	477,7	234,4
Lainnya	14,5	15,9	32,1	31,1	246,9	255,4
Amerika	480,9	380,0	206,6	634,7	395,8	13.531,1
Amerika Serikat	467,7	173,5	133,3	91,3	161,7	13.319,0
Kanada	7,2	2,3	1,4	534,7	210,2	4,8
Lainnya	6,0	204,2	71,9	8,7	23,9	207,3
Asia	6.138,1	2.661,5	6.431,2	6.649,9	6.856,3	11.090,1
Hongkong	1.712,0	169,5	20,1	101,9	398,7	258,9
Jepang	510,4	1.252,2	1.683,5	916,0	443,6	598,3
Korea Selatan	369,7	122,1	402,3	617,5	877,4	895,4
Malaysia	71,6	155,3	461,4	485,5	2.328,3	2.364,6
Filipina	63,2	39,7	13,2	12,6	42,5	3,7
Singapura	3.328,0	518,9	576,5	1.267,0	2.165,9	5.556,7
Taiwan	37,7	136,7	68,5	129,5	218,6	51,4
Thailand	4,7	9,8	98,9	122,0	125,0	328,3
Lainnya	40,8	257,3	3.106,8	2.997,9	256,3	1.032,8
Australia	233,0	125,6	588,4	523,4	50,2	441,8
Afrika	875,5	4.462,2	360,9	151,9	1.487,5	1.716,9
Gabungan Negara	658,3	4.313,8	733,8	3.494,1	4.613,9	11.232,3
Jumlah	9.744,1	13.207,2	10.277,3	13.579,3	15.624,0	40.145,2

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
* sampai dengan bulan Oktober 2007

Tabel 14
Indeks Harga Konsumen Indonesia

Akhir Periode ¹⁾	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum	Perubahan Indeks Umum (%)
2002	317,29	304,35	235,08	285,38	277,79	248,43	255,85	274,13	10,03
2003	311,84	323,35	256,74	305,60	293,54	277,52	266,34	287,99	5,06
2004 ²⁾	111,10	115,70	124,19	113,36	113,06	126,20	114,25	116,86	6,40
2005 ²⁾									17,11
Januari	114,55	116,63	126,03	113,39	113,31	126,29	114,70	118,53	1,43
Februari	112,88	117,26	126,51	113,44	113,51	126,26	114,81	118,33	-0,17
Maret	113,01	119,16	127,22	114,17	114,18	126,63	126,32	120,59	1,91
April	112,77	119,84	127,99	114,55	114,52	126,78	126,88	121,00	0,34
Mei	112,92	120,11	128,45	114,73	115,20	126,83	126,93	121,25	0,21
Juni	113,74	121,52	128,77	115,19	115,57	127,03	127,23	121,86	0,50
Juli	116,09	122,06	129,17	115,82	115,93	128,24	127,28	122,81	0,78
Agustus	116,25	122,68	129,83	116,32	116,47	132,46	127,39	123,48	0,55
September	116,73	124,10	130,45	117,69	117,47	134,35	127,91	124,33	0,69
Oktober	125,18	128,08	140,10	119,86	118,59	136,23	164,45	135,15	8,70
November	128,27	130,72	141,00	120,25	119,29	136,63	165,32	136,92	1,31
Desember	126,55	131,56	141,50	121,21	119,99	136,60	165,38	136,86	-0,04
2006 ²⁾									6,60
Januari	131,98	132,80	142,49	122,09	121,26	136,87	165,29	138,72	1,36
Februari	133,54	133,66	143,28	122,97	121,74	136,48	165,55	139,53	0,58
Maret	132,37	134,44	143,79	123,16	122,22	136,64	165,77	139,57	0,03
April	131,24	135,02	144,40	124,02	122,93	136,76	165,89	139,64	0,05
Mei	131,61	135,43	144,83	126,54	123,63	136,86	166,18	140,16	0,37
Juni	133,08	135,78	145,30	126,44	123,96	137,20	166,35	140,79	0,45
Juli	134,40	136,20	145,60	126,89	124,04	138,15	166,48	141,42	0,45
Agustus	133,94	136,68	146,03	127,33	124,45	144,74	166,50	141,88	0,33
September	134,77	136,86	146,44	127,16	124,83	147,41	166,48	142,42	0,38
Oktober	137,70	137,74	146,82	128,43	125,19	147,56	167,24	143,65	0,86
November	138,60	138,39	147,25	129,33	125,71	147,60	166,89	144,14	0,34
Desember	142,92	139,93	148,34	129,50	127,03	147,70	167,06	145,89	1,21
2007 ²⁾									6,59
Januari	146,75	141,15	149,40	129,18	127,71	147,85	167,22	147,41	1,04
Februari	147,99	142,07	150,60	129,90	128,53	148,19	167,27	148,32	0,62
Maret	148,22	142,58	151,03	130,43	128,79	148,23	167,42	148,67	0,24
April	146,30	143,12	151,43	131,23	129,20	148,18	167,79	148,43	-0,16
Mei	145,73	143,79	151,96	131,51	129,43	148,19	168,00	148,58	0,10
Juni	146,42	144,27	152,16	130,94	129,71	148,24	168,19	148,92	0,23
Juli	148,39	144,84	152,64	131,74	130,16	152,52	168,27	149,99	0,72
Agustus	149,56	145,53	153,82	132,39	130,47	157,37	168,33	151,11	0,75
September	152,27	146,19	154,09	134,01	131,04	160,05	168,44	152,32	0,80
Oktober	155,11	146,93	154,42	136,76	131,63	160,38	169,23	153,53	0,79
November	155,17	147,56	154,60	139,03	131,97	160,55	168,78	153,81	0,18
Desember	159,01	148,90	155,58	140,41	132,51	160,74	169,15	155,50	1,10

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Angka tahunan/triwulanan adalah angka akhir periode yang bersangkutan

2) Dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

Tabel 15
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia ¹⁾

Kelompok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Perubahan 2007 Terhadap 2006 (%)
Pertanian	125	130	137	148	172	214	24,72
Pertambangan dan penggalian	121	123	135	147	169	187	10,81
Industri	124	130	136	158	195	218	11,94
Impor	112	114	127	149	162	186	14,64
Ekspor	108	109	121	145	154	167	8,68
Migas	106	115	149	210	229	241	5,36
Nonmigas	109	107	112	125	130	143	10,42
Indeks Umum	118	122	131	151	172	195	13,59

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Angka tahunan merupakan rata-rata indeks selama satu tahun yang bersangkutan

Tabel 16
Perkembangan Laju Inflasi di 45 Kota

persen

Kota	2002	2003	2004 ¹⁾	2005	2006	2007
Lhokseumawe	10,99	4,53	7,36	17,57	11,47	4,18
Banda Aceh	10,14	3,50	6,97	41,11	9,54	11,00
Padang Sidempuan	10,18	4,07	8,99	18,47	10,02	5,87
Sibolga	11,58	3,94	6,64	22,39	5,03	7,13
Pematang Siantar	9,41	2,51	7,31	19,67	6,07	8,37
Medan	9,49	4,46	6,64	22,91	5,96	6,42
Padang	10,22	5,55	6,98	20,47	8,05	6,90
Pekanbaru	11,66	6,65	8,92	17,10	6,31	7,53
Batam	9,14	4,27	4,22	14,79	4,59	4,84
Jambi	12,62	3,79	7,25	16,50	10,66	7,42
Palembang	12,25	5,03	8,94	19,92	8,44	8,21
Bengkulu	10,11	4,14	4,67	22,22	6,52	5,00
Bandar Lampung	10,32	5,44	5,22	21,17	6,03	6,58
Pangkal Pinang	-	-	9,00	17,44	6,42	2,64
Jakarta	9,08	5,78	5,87	16,06	6,03	6,04
Tasikmalaya	10,29	3,88	5,92	20,83	8,44	7,72
Serang/Celegon	9,68	5,21	6,40	16,11	5,33	6,31
Bandung	11,97	5,69	7,56	19,56	6,30	5,25
Cirebon	10,53	3,35	3,27	16,82	8,45	7,87
Purwokerto	8,77	2,89	6,32	14,54	6,18	6,15
Surakarta	8,64	1,73	5,15	13,88	6,07	3,28
Semarang	13,56	6,07	5,98	16,46	7,73	6,75
Tegal	11,27	1,86	5,25	18,39	10,40	8,89
Yogyakarta	12,01	5,73	6,95	14,98	6,84	7,99
Jember	9,75	5,20	6,24	16,86	7,78	7,25
Kediri	8,87	1,13	6,38	16,84	5,91	6,85
Malang	9,74	3,23	6,28	15,74	6,70	5,93
Surabaya	9,15	4,79	6,06	14,12	7,67	6,27
Denpasar	12,49	4,56	5,97	11,31	4,30	5,91
Mataram	7,96	1,82	6,61	17,72	4,17	8,76
Kupang	9,77	5,45	8,28	15,16	9,72	8,44
Pontianak	8,61	5,48	6,06	14,43	6,31	8,56
Sampit	7,59	3,06	6,67	11,90	7,75	7,57
Palangkaraya	9,18	5,68	7,25	12,12	7,72	7,96
Banjarmasin	9,18	6,77	7,52	12,94	11,04	7,78
Balikpapan	11,38	5,92	7,60	17,28	5,52	7,27
Samarinda	10,26	7,99	5,65	16,64	6,50	9,18
Manado	15,22	0,69	4,69	18,73	5,09	10,13
Palu	13,36	5,84	7,01	16,33	8,69	8,13
Makassar	8,25	3,01	6,47	15,20	7,21	5,71
Kendari	10,35	2,41	7,72	21,45	10,57	7,53
Gorontalo	-	-	8,64	18,56	7,54	7,02
Ternate	6,40	6,27	4,82	19,42	4,80	10,43
Ambon	9,47	2,51	3,44	16,67	5,12	5,85
Jayapura	13,91	8,39	9,45	14,15	9,52	10,35
Inflasi Nasional	10,03	5,06	6,40	17,11	6,60	6,59

Sumber: Badan Pusat Statistik

1) Sejak tahun 2004 dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2002 = 100 di 45 kota dan dibagi menjadi tujuh kelompok

Tabel 17
Neraca Pembayaran Indonesia

juta \$

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
I Transaksi Berjalan	7.823	8.106	1.563	278	10.836	11.009
1. Neraca Barang	23.512	24.563	20.152	17.534	29.660	33.083
a. Ekspor f.o.b	59.165	64.109	70.767	86.995	103.528	118.014
b. Impor f.o.b	-35.653	-39.546	-50.615	-69.462	-73.868	-84.930
2. Jasa-jasa (bersih)	-15.690	-16.456	-8.811	-9.122	-9.888	-11.103
3. Pendapatan (bersih)			-10.917	-12.927	-13.800	-15.875
4. Transfer berjalan (bersih)			1.139	4.793	4.863	4.903
II Transaksi Modal	-1.102	-949	1.852	345	2.943	2.753
A. Sektor Publik	-190	-833	...	333	350	530
B. Sektor Swasta	-912	-116	1.852	12	2.593	2.223
1. Investasi Langsung	145	-597	-1.512	5.271	2.211	1.164
2. Investasi Portofolio	1.222	2.251	4.409	4.190	4.174	6.981
3. Investasi Lainnya	-2.279	-1.770	-1.045	-9.449	-3.792	-5.922
C. Jumlah (I+II)	6.721	7.157	3.415	623	13.779	13.762
D. Selisih Perhitungan (bersih)	-1.694	-3.502	-3.106	-178	731	-1.219
E. Neraca Keseluruhan (C+D)	5.027	3.655	309	444	14.510	12.543
F. Pembiayaan ¹⁾	-5.027	-3.655	-309	-444	-14.510	-12.543
Perubahan Cadangan Devisa	-4.021	-4.257	674	663	-6.902	-12.543
a.I. Transaksi IMF	-1.006	603	-983	-1.107	-7.608	0
Catatan:						
1. Aktiva Luar Negeri (IRFCL)	32.037	36.296	36.320	34.724	42.586	56.920
Setara Impor Nonmigas dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah (bulan)	6,6	7,1	5,7	4,3	4,5	5,7
2. Transaksi Berjalan/PDB (%)	4,5	3,4	0,6	0,1	2,9	2,5

1) Minus (-) : Suplus ; Sejak tahun 2000 lalu lintas moneter berdasarkan pada mutasi cadangan devisa atas dasar konsep *International Reserve and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL) menggantikan *Gross Foreign Assets* (GFA).

* Angka sementara

Tabel 18
Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas

juta \$

Rincian	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Total Ekspor	46.308	100,0	48.876	100,0	54.482	100,0	66.752	100,0	80.578	100,0	93.142	100,0
Pertanian	2.640	5,7	2.750	5,6	2.430	4,5	2.870	4,3	3.465	4,3	4.543	4,9
Kopi	225	0,5	273	0,6	274	0,5	522	0,8	598	0,7	572	0,6
Teh	101	0,2	100	0,2	63	0,1	118	0,2	134	0,2	164	0,2
Rempah	191	0,4	203	0,4	150	0,3	158	0,2	195	0,2	294	0,3
Tembakau	68	0,1	48	0,1	44	0,1	290	0,4	326	0,4	217	0,2
Coklat	536	1,2	410	0,8	360	0,7	645	1,0	833	1,0	868	0,9
Udang	864	1,9	928	1,9	802	1,5	833	1,2	922	1,1	1.421	1,5
Lainnya	655	1,4	787	1,6	736	1,4	305	0,5	457	0,6	1.006	1,1
Mineral	3.849	8,3	4.145	8,5	4.636	8,5	8.010	12,0	11.361	14,1	9.575	10,3
Biji Tembaga	1.805	3,9	1.924	3,9	1.755	3,2	3.488	5,2	4.588	5,7	4.093	4,4
Biji Nikel	52	0,1	62	0,1	106	0,2	139	0,2	204	0,3	166	0,2
Batu bara	1.812	3,9	2.054	4,2	2.677	4,9	4.343	6,5	6.192	7,7	5.070	5,4
Bauksit	21	0,0	20	0,0	17	0,0	24	0,0	55	0,1	41	0,0
Lainnya	159	0,3	85	0,2	82	0,2	17	0,0	323	0,4	204	0,2
Industri	39.819	86,0	41.981	85,9	47.416	87,0	55.872	83,7	65.752	81,6	79.024	84,8
Tekstil & produk tekstil	7.158	15,5	7.294	14,9	7.507	13,8	8.554	12,8	9.597	11,9	12.832	13,8
- Pakaian jadi	3.996	8,6	4.147	8,5	4.364	8,0	4.959	7,4	5.699	7,1	7.382	7,9
Produk kayu	3.343	7,2	3.247	6,6	3.164	5,8	2.940	4,4	2.894	3,6	5.153	5,5
- Kayu lapis	1.797	3,9	1.708	3,5	1.501	2,8	1.798	2,7	1.829	2,3	2.812	3,0
Minyak kelapa sawit	2.151	4,6	2.521	5,2	3.353	6,2	3.708	5,6	5.087	6,3	5.183	5,6
Produk kimia	1.308	2,8	1.576	3,2	1.896	3,5	4.450	6,7	5.317	6,6	4.246	4,6
Produk logam	614	1,3	887	1,8	1.787	3,3	561	0,8	803	1,0	1.538	1,7
Barang-barang listrik	2.776	6,0	3.205	6,6	3.396	6,2	9.774	14,6	9.187	11,4	8.351	9,0
Semen	115	0,2	92	0,2	100	0,2	184	0,3	263	0,3	227	0,2
Kertas	2.156	4,7	2.061	4,2	2.171	4,0	3.238	4,9	3.872	4,8	4.194	4,5
Produk karet	1.604	3,5	2.146	4,4	2.878	5,3	793	1,2	991	1,2	2.898	3,1
Lainnya	18.594	40,2	18.952	38,8	21.166	38,8	21.668	32,5	27.742	34,4	34.401	36,9

Tabel 19
Volume Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas

ribu ton

Rincian	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Total Ekspor	177.352	100,0	165.171	100,0	196.938	100	206.652	100,0	288.215	100,0	307.846	100,0
Pertanian	2.097	1,2	2.075	1,3	2.351	1,2	2.273	1,1	3.170	1,1	3.591	1,17
Kopi	360	0,2	335	0,2	383	0,2	440	0,2	407	0,14	588	0,19
Teh	107	0,1	89	0,1	63	0,0	101	0,0	95	0,03	140	0,05
Rempah	144	0,1	126	0,1	130	0,1	132	0,1	117	0,04	202	0,07
Tembakau	34	0,0	29	0,0	31	0,0	84	0,0	94	0,03	78	0,03
Coklat	410	0,2	278	0,2	313	0,2	440	0,2	620	0,22	607	0,20
Udang	136	0,1	140	0,1	144	0,1	125	0,1	131	0,05	210	0,07
Lainnya	907	0,5	1.077	0,7	1.288	0,7	951	0,5	1.706	0,59	1.767	0,57
Mineral	124.533	70,2	116.212	70,4	142.853	72,5	153.129	74,1	220.485	76,5	223.935	72,74
Biji Tembaga	3.207	1,8	2.489	1,5	2.043	1,0	2.527	1,2	2.264	0,79	3.916	1,27
Biji Nikel	2.944	1,7	2.640	1,6	3.686	1,9	3.447	1,7	4.355	1,51	5.116	1,66
Batu bara	81.554	46,0	93.058	56,3	119.239	60,5	129.596	62,7	190.947	66,25	179.680	58,37
Bauksit	1.170	0,7	1.053	0,6	1.257	0,6	2.462	1,2	6.871	2,38	3.393	1,10
Lainnya	35.658	20,1	16.971	10,3	16.628	8,4	15.098	7,3	16.048	5,57	31.830	10,34
Industri	50.722	28,6	46.884	28,4	51.734	26,3	51.250	24,8	64.560	22,40	80.319	26,09
Tekstil & produk tekstil	1.962	1,1	1.722	1,0	1.837	0,9	1.786	0,9	1.934	0,67	2.842	0,92
- Pakaian jadi	371	0,2	355	0,2	360	0,2	400	0,2	446	0,15	588	0,19
Produk kayu	7.016	4,0	6.123	3,7	5.892	3,0	3.915	1,9	3.189	1,11	8.408	2,73
- Kayu lapis	3.997	2,3	3.456	2,1	2.622	1,3	2.916	1,4	2.392	0,83	4.876	1,58
Minyak kelapa sawit	7.064	4,0	6.676	4,0	9.778	5,0	10.269	5,0	12.771	4,43	13.785	4,48
Produk kimia	4.181	2,4	4.743	2,9	4.439	2,3	7.055	3,4	9.231	3,20	8.681	2,82
Produk logam	305	0,2	318	0,2	502	0,3	399	0,2	454	0,16	597	0,19
Barang-barang listrik	461	0,3	444	0,3	517	0,3	730	0,4	756	0,26	866	0,28
Semen	6.365	3,6	4.398	2,7	5.148	2,6	5.438	2,6	7.626	2,65	8.708	2,83
Kertas	3.805	2,1	3.205	1,9	3.513	1,8	5.819	2,8	6.567	2,28	6.750	2,19
Produk karet	1.963	1,1	2.031	1,2	2.535	1,3	335	0,2	365	0,13	2.409	0,78
Lainnya	17.600	9,9	17.224	10,4	17.574	8,9	15.503	7,5	21.668	7,52	27.272	8,86

Tabel 20
Nilai Ekspor Nonmigas menurut Negara Tujuan

Juta \$

Benua/Negara	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Afrika	1.126	2,4	1.255	2,6	1.301	2,4	1.669	2,5	1.996	2,48	2.466	2,6
Amerika	8.699	18,8	8.374	17,1	9.109	16,7	11.117	16,7	12.895	16,0	13.685	14,7
Amerika Serikat	7.354	15,9	7.140	14,6	7.664	14,1	9.342	14,0	10.629	13,2	11.176	12,0
Amerika Latin	577	1,2	525	1,1	655	1,2	935	1,4	1.316	1,6	1.513	1,6
Kanada	381	0,8	390	0,8	460	0,8	468	0,7	543	0,7	552	0,6
Lain-lain	387	0,8	320	0,7	331	0,6	372	0,6	407	0,5	443	0,5
Asia	26.462	57,1	28.937	59,2	33.751	61,9	41.605	62,3	50.697	62,9	59.847	64,3
ASEAN	9.456	20,4	10.239	20,9	12.251	22,5	14.610	21,9	16.679	20,7	20.032	21,5
Brunei	32	0,1	31	0,1	28	0,1	36	0,1	39	0,0	42	0,0
Malaysia	1.929	4,2	2.346	4,8	2.727	5,0	3.284	4,9	3.901	4,8	4.702	5,0
Filipina	789	1,7	965	2,0	1.411	2,6	1.414	2,1	1.416	1,8	1.862	2,0
Singapura	5.120	11,1	5.111	10,5	5.918	10,9	7.080	10,6	7.912	9,8	8.912	9,6
Thailand	998	2,2	1.108	2,3	1.485	2,7	1.980	3,0	2.126	2,6	2.763	3,0
Myanmar	51	0,1	68	0,1	568	0,1	652	1,0	1.027	1,3	1.355	1,5
Vietnam	477	1,0	558	1,1	56	1,0	73	0,1	148	0,2	271	0,3
Kamboja	61	0,1	51	0,1	56	0,1	89	0,1	107	0,1	121	0,1
Laos	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	4	0,0	4	0,0
Hong Kong	1.258	2,7	1.286	2,6	1.296	2,4	1.456	2,2	1.721	2,1	1.749	1,9
India	1.245	2,7	1.726	3,5	2.147	3,9	2.898	4,3	3.517	4,4	4.898	5,3
Irak	28	0,1	17	0,0	50	0,1	86	0,1	72	0,1	12	0,0
Jepang	6.545	14,1	7.055	14,4	8.266	15,2	9.853	14,8	12.253	15,2	13.365	14,3
Korea Selatan	1.904	4,1	1.827	3,7	1.783	3,3	2.689	4,0	3.408	4,2	3.814	4,1
Pakistan	246	0,5	306	0,6	405	0,7	629	0,9	777	1,0	889	1,0
China	2.144	4,6	2.756	5,6	3.317	6,1	4.015	6,0	5.624	6,98	6.808	7,3
Arab Saudi	463	1,0	409	0,8	375	0,7	526	0,8	641	0,8	947	1,0
Taiwan	1.209	2,6	1.220	2,5	1.473	2,7	1.814	2,7	2.306	2,9	2.389	2,6
Lain-lain	1.964	4,2	2.096	4,3	2.388	4,4	3.016	4,5	3.692	4,6	4.943	5,3
Australia/Oceania	1.359	2,9	1.360	2,8	1.325	2,4	1.525	2,3	2.008	2,5	2.489	2,7
Eropa	8.662	18,7	8.950	18,3	8.996	16,5	10.836	16,2	12.983	16,1	14.656	15,7
- Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)	7.532	16,3	8.424	17,2	8.320	15,3	10.131	15,2	12.159	15,1	13.548	14,5
= Belanda	1.548	3,3	1.425	2,9	838	3,2	2.148	3,2	2.633	3,3	2.831	3,0
= Belgia dan Luxemburg	786	1,7	889	1,8	623	1,5	988	1,5	1.144	1,4	1.315	1,4
= Inggris	1.412	3,0	1.140	2,3	1.546	2,2	1.282	1,9	1.446	1,8	1.465	1,6
= Italia	622	1,3	766	1,6	837	1,5	958	1,4	1.213	1,5	1.401	1,5
= Jerman	1.257	2,7	1.461	3,0	1.739	2,8	1.782	2,7	2.042	2,5	2.324	2,5
= Perancis	618	1,3	696	1,4	1.210	1,1	614	0,9	721	0,9	803	0,9
= Lainnya	1.289	2,8	2.048	4,2	1.527	2,8	2.360	3,5	2.959	3,7	3.409	3,7
- Bekas Uni Soviet	71	0,2	108	0,2	138	0,3	204	0,3	269	0,3	317	0,3
- Eropa Timur Lain-lain	309	0,7	305	0,6	236	0,4	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain	750	1,6	113	0,2	302	0,6	501	0,8	555	0,7	790	0,8
TOTAL	46.307	100,0	48.876	100,0	54.482	100,0	66.752	100,0	80.578	100,0	93.142	100,0

Tabel 21a
Nilai Impor Nonmigas (C&F) menurut Kelompok Barang

juta \$

Rincian	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Total Impor	31.068	100,0	33.740	100,0	42.738	100,0	58.108	100,0	62.775	100,0	71.907	100,0
I. Barang Konsumsi	2.780	8,9	2.321	6,9	3.327	7,8	4.165	7,2	4.932	7,9	7.241	10,1
1. Bahan makanan & minuman (rumah tangga)	485	1,6	324	1,0	476	1,1	407	0,7	583	0,9	797	1,1
2. Makanan & minuman (rumah tangga)	969	3,1	807	2,4	866	2,0	1.162	2,0	1.305	2,1	2.070	2,9
3. Mobil penumpang	71	0,2	146	0,4	304	0,7	480	0,8	436	0,7	337	0,5
4. Alat angkutan, bukan untuk industri	18	0,1	13	0,0	35	0,1	237	0,4	220	0,3	241	0,3
5. Barang konsumsi tahan lama	208	0,7	175	0,5	322	0,8	484	0,8	574	0,9	1.048	1,5
6. Barang konsumsi setengah tahan lama	343	1,1	294	0,9	378	0,9	620	1,1	754	1,2	1.496	2,1
7. Barang konsumsi tidak tahan lama	640	2,1	472	1,4	649	1,5	747	1,3	1.014	1,6	1.104	1,5
8. Lainnya	46	0,1	92	0,3	95	0,2	26	0,0	46	0,1	148	0,2
II. Bahan Baku	23.322	75,1	25.665	76,1	31.058	72,7	42.533	73,2	45.697	72,8	51.168	71,2
1. Bahan makanan & minuman (untuk industri)	1.375	4,4	1.644	4,9	1.871	4,4	1.347	2,3	1.355	2,2	2.010	2,8
2. Makanan & minuman (industri 1/2 jadi)	587	1,9	724	2,1	715	1,7	811	1,4	916	1,5	991	1,4
3. Bahan baku mentah untuk industri	2.082	6,7	2.201	6,5	2.623	6,1	2.554	4,4	2.737	4,4	3.155	4,4
4. Bahan baku 1/2 jadi untuk industri	13.965	45,0	14.911	44,2	18.892	44,2	22.992	39,6	26.150	41,7	29.259	40,7
5. Bahan bakar & pelumas (mentah)	3	0,0	4	0,0	16	0,0	14	0,0	31	0,0	10	0,0
6. Bahan bakar & pelumas (1/2 jadi)	179	0,6	157	0,5	202	0,5	278	0,5	154	0,2	172	0,2
7. Suku cadang & perlengkapan barang modal	2.781	9,0	3.105	9,2	3.746	8,8	10.238	17,6	10.630	16,9	11.334	15,8
8. Suku cadang & perlengkapan alat angkutan	2.349	7,6	2.918	8,6	3.195	7,5	4.299	7,4	3.724	5,9	4.237	5,9
III. Bahan Modal	4.967	16,0	5.753	17,1	8.354	19,5	11.411	19,6	12.147	19,3	13.498	18,8
1. Barang modal (selain alat angkutan)	4.399	14,2	5.217	15,5	6.807	15,9	9.033	15,5	9.292	14,8	10.672	14,8
2. Mobil penumpang	71	0,2	202	0,6	368	0,9	480	0,8	436	0,7	337	0,5
3. Alat transportasi untuk industri	497	1,6	334	1,0	1.178	2,8	1.897	3,3	2.419	3,9	2.489	3,5

Tabel 21b
Volume Impor Nonmigas menurut Kelompok Barang

ribu ton

Rincian	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)	Volume	Pangsa (%)
Total Impor	40.912	100,0	41.217	100,0	44.940	100,0	53.097	100,0	55.810	100,0	59.390	100,0
I. Barang Konsumsi	3.427	8,4	3.377	8,2	2.958	7,8	3.502	6,6	3.496	6,3	5.254	8,8
1. Bahan makanan & minuman (rumah tangga)	650	1,6	593	1,4	889	1,1	882	1,7	980	1,8	1.174	2,0
2. Makanan & minuman (rumah tangga)	2.354	5,8	2.353	5,7	1.381	2,0	1.785	3,4	1.680	3,0	3.134	5,3
3. Mobil penumpang	8	0,0	20	0,0	36	0,7	57	0,1	49	0,1	42	0,1
4. Alat angkutan, bukan untuk industri	8	0,0	11	0,0	25	0,1	45	0,1	49	0,1	53	0,1
5. Barang konsumsi tahan lama	71	0,2	72	0,2	133	0,8	165	0,3	169	0,3	233	0,4
6. Barang konsumsi setengah tahan lama	160	0,4	189	0,5	304	0,9	313	0,6	306	0,5	355	0,6
7. Barang konsumsi tidak tahan lama	174	0,4	136	0,3	189	1,5	253	0,5	261	0,5	258	0,4
8. Lainnya	3	0,0	5	0,0	1	0,2	1	0,0	2	0,0	4	0,0
Perengkapan militer								0,0		0,0		0,0
Lainnya								0,0		0,0		0,0
II. Bahan Baku	36.678	89,7	36.895	89,5	40.787	72,7	47.504	89,5	50.284	90,1	52.198	87,9
1. Bahan Makanan & minuman (untuk industri)	5.605	13,7	5.341	13,0	5.967	4,4	5.807	10,9	6.024	10,8	6.261	10,5
2. Makanan & minuman (industri 1/2 jadi)	1.451	3,5	1.719	4,2	1.272	1,7	1.992	3,8	1.937	3,5	1.600	2,7
3. Bahan baku mentah untuk industri	11.246	27,5	11.614	28,2	11.242	6,1	12.158	22,9	13.250	23,7	12.873	21,7
4. Bahan baku 1/2 jadi untuk industri	17.341	42,4	17.193	41,7	20.923	44,2	25.626	48,3	27.309	48,9	29.313	49,4
5. Bahan bakar & pelumas (mentah)	26	0,1	29	0,1	85	0,0	97	0,2	127	0,2	72	0,1
6. Bahan bakar & pelumas (1/2 jadi)	167	0,4	184	0,4	265	0,5	295	0,6	147	0,3	167	0,3
7. Suku cadang & perlengkapan barang modal	409	1,0	378	0,9	521	8,8	903	1,7	867	1,6	1.189	2,0
8. Suku cadang & perlengkapan alat angkutan	433	1,1	438	1,1	513	7,5	626	1,2	623	1,1	723	1,2
9. Lainnya	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
III. Bahan Modal	807	2,0	945	2,3	1.194	19,5	2.091	3,9	2.030	3,6	1.939	3,3
1. Barang modal (selain alat angkutan)	685	1,7	854	2,1	879	15,9	1.268	2,4	1.322	2,4	1.562	2,6
2. Mobil penumpang	8	0,0	20	0,0	36	0,9	57	0,1	49	0,1	42	0,1
3. Alat transportasi untuk industri	113	0,3	71	0,2	279	2,8	765	1,4	659	1,2	334	0,6

Tabel 22
Nilai Impor Nonmigas menurut Negara Asal (C&F)

juta \$

Benua/Negara	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)	Nilai	Pangsa (%)
Afrika	404	1,3	418	1,2	565	1,3	614	1,1	597	1,0	661	0,9
Amerika	4.480	14,4	4.699	13,9	5.898	13,8	6.278	10,8	6.606	10,5	8.145	11,3
Amerika Serikat	3.318	10,7	3.503	10,4	4.055	9,5	4.290	7,4	4.576	7,3	5.469	7,6
Amerika Latin	612	2,0	710	2,1	989	2,3	1.175	2,0	1.221	1,9	1.529	2,1
Kanada	511	1,6	442	1,3	818	1,9	749	1,3	713	1,1	1.071	1,5
Lain-lain	39	0,1	45	0,1	35	0,1	64	0,1	96	0,2	75	0,1
Asia	18.391	59,2	20.745	61,5	25.593	59,9	40.543	69,8	43.134	68,7	48.503	67,5
ASEAN	5.121	16,5	6.031	17,9	7.709	18,0	16.386	28,2	17.907	28,5	19.140	26,6
Brunei	2	0,0	4	0,0	5	0,0	8	0,0	4	0,0	4	0,0
Malaysia	998	3,2	1.107	3,3	1.394	3,3	1.934	3,3	2.271	3,6	2.903	4,0
Filipina	153	0,5	245	0,7	279	0,7	458	0,8	445	0,7	533	0,7
Singapura	2.274	7,3	2.241	6,6	3.039	7,1	9.874	16,99	11.119	17,71	10.511	14,6
Thailand	1.439	4,6	2.178	6,5	2.866	6,7	3.961	6,82	3.787	6,03	4.483	6,2
Myanmar	45	0,1	21	0,1	104	0,2	123	0,2	258	0,4	657	0,9
Vietnam	132	0,4	234	0,7	20	0,0	26	0,0	21	0,0	32	0,0
Kamboja	1	0,0	2	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Laos	-	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Hong Kong	304	1,0	303	0,9	323	0,8	1.281	2,2	1.633	2,6	29.363	40,8
India	792	2,5	869	2,6	1.227	2,9	1.075	1,9	1.429	2,3	1.917	2,7
Irak	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.745	2,4
Jepang	5.660	18,2	6.432	19,1	7.385	17,3	10.303	17,7	9.275	14,8	0	0,0
Korea Selatan	1.815	5,8	2.071	6,1	2.321	5,4	3.272	5,6	3.425	5,5	9.375	13,0
Pakistan	61	0,2	63	0,2	61	0,1	76	0,1	66	0,1	3.762	5,2
China	2.714	8,7	3.110	9,2	4.370	10,2	5.439	9,4	6.701	10,7	66	0,1
Arab Saudi	220	0,7	224	0,7	236	0,6	213	0,4	248	0,4	9.346	13,0
Taiwan	1.289	4,1	1.130	3,3	1.420	3,3	1.847	3,2	1.879	3,0	352	0,5
Lain-lain	411	1,3	511	1,5	540	1,3	650	1,1	570	0,9	2.170	3,0
Australia/Oceania	2.145	6,9	2.016	6,0	2.735	6,4	2.720	4,7	3.322	5,3	3.591	5,0
Eropa	5.648	18,2	5.863	17,4	7.948	18,6	7.953	13,7	9.117	14,5	11.007	15,3
- European Community	4.258	13,7	5.002	14,8	6.598	14,7	6.632	11,4	7.724	12,3	9.346	13,0
= Belanda	452	1,5	508	1,5	314	1,6	356	0,6	618	1,0	619	0,9
= Belgia dan Luxemburg	252	0,8	250	0,7	704	1,2	716	1,2	349	0,6	383	0,5
= Inggris	530	1,7	630	1,9	2.174	1,7	2.160	3,7	714	1,1	787	1,1
= Italia	548	1,8	474	1,4	604	2,0	622	1,1	616	1,0	756	1,1
= Jerman	1.616	5,2	1.615	4,8	545	0,8	458	0,8	2.149	3,4	2.628	3,7
= Perancis	538	1,7	638	1,9	853	4,8	738	1,3	1.184	1,9	1.633	2,3
= Lainnya	321	1,0	889	2,6	1.403	3,1	1.584	2,7	2.094	3,3	2.540	3,5
- Bekas Uni Soviet	234	0,8	161	0,5	280	0,7	442	0,8	469	0,7	443	0,6
- Eropa Timur Lain-lain	97	0,3	79	0,2	103	1,2	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain	1.059	3,4	620	1,8	967	2,3	879	1,5	924	1,5	1.217	1,7
TOTAL	31.068	100,0	33.740	100,0	42.738	100,0	58.108	100,0	62.775	100,0	71.907	100,0

Tabel 23
Ekspor Migas ¹⁾

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Nilai Ekspor ²⁾						
Minyak Bumi dan hasilnya	6.548	7.469	7.605	9.523	10.911	12.496
Gas						
- LNG	5.595	6.744	7.304	8.734	9.953	9.723
- LPG	323	326	366	477	175	210
- Natural Gas	392	695	1.010	1.509	1.910	3.443
Total	12.858	15.234	16.285	20.243	22.949	25.872
Volume Ekspor						
Minyak Bumi dan hasilnya (juta barel)	271	261	212	186	177	178
Gas						
- LNG (juta MMBTU) ³⁾	1.360	1.387	1.323	1.215	1.172	1.080
- LPG (ribuan Mton)	1.312	1.170	1.101	1.076	364	337
- Natural Gas (juta MMBTU) ³⁾	99	170	223	250	265	293

1) Nilai *free on board* (f.o.b)

2) Terdiri atas minyak mentah dan hasil-hasil minyak dalam juta \$

3) MMBTU: Million British Thermal Unit

Tabel 24
Uang Beredar

miliar rupiah

Akhir Periode	M1 ¹⁾		Uang Kuasi ²⁾		M2 ³⁾		
	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Pangsa (%)	Posisi	Perubahan	
						Tahunan	Triwulanan
2002	191.939	21,71	691.969	78,29	883.908	4,7	2,8
2003	223.799	23,42	731.893	76,58	955.692	8,1	3,2
2004 ⁴⁾	253.818	24,56	779.710	75,44	1.033.528	8,1	4,7
2005 ⁴⁾	281.905	23,43	921.310	76,57	1.203.215	16,4	4,6
2006 ⁴⁾							
Januari	281.412	23,63	909.422	76,37	1.190.834	17,2	
Februari	277.265	23,22	916.599	76,78	1.193.864	18,0	
Maret	277.293	23,20	917.774	76,80	1.195.067	17,1	-0,7
April	282.400	23,57	915.613	76,43	1.198.013	14,7	
Mei	304.663	24,62	932.840	75,38	1.237.503	18,3	
Juni	313.415	24,99	940.590	75,01	1.254.005	16,8	4,9
Juli	311.822	24,98	936.414	75,02	1.248.236	14,7	
Agustus	329.372	25,93	941.006	74,07	1.270.378	13,8	
September	333.905	25,86	957.491	74,14	1.291.396	12,3	3,0
Oktober	346.414	26,13	979.244	73,87	1.325.658	13,7	
November	342.645	25,60	995.910	74,40	1.338.555	14,6	
Desember	361.073	26,13	1.021.001	73,87	1.382.074	14,9	7,0
2007 ⁴⁾							
Januari	344.840	25,28	1.019.067	74,72	1.363.907	14,5	
Februari	346.573	25,36	1.020.247	74,64	1.366.820	14,5	
Maret	341.833	24,84	1.034.114	75,16	1.375.947	15,1	-0,4
April	351.259	25,39	1.032.318	74,61	1.383.577	15,5	
Mei	352.629	25,31	1.040.468	74,69	1.393.097	12,6	
Juni	381.376	26,27	1.070.598	73,73	1.451.974	15,8	5,5
Juli	397.823	27,01	1.075.129	72,99	1.472.952	18,0	
Agustus	402.035	27,03	1.085.506	72,97	1.487.541	17,1	
September	411.281	27,19	1.101.475	72,81	1.512.756	17,1	4,2
Oktober	414.996	27,12	1.115.149	72,88	1.530.145	15,4	
November	424.435	27,27	1.131.765	72,73	1.556.200	16,3	
Desember	460.842	28,05	1.182.361	71,95	1.643.203	18,9	8,6

1) Terdiri atas uang kartal dan uang giral

2) Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan, dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

3) Terdiri atas uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi

4) Data statistik Bank Beku Operasional dan Bank Beku Kegiatan Usaha telah dikeluarkan (7 Bank sejak 4 April 1998, 3 bank sejak 21 Agustus 1998, 38 bank sejak 13 Maret 1999, 1 bank sejak 23 April 1999, 1 bank sejak 28 Januari 2000, 2 bank sejak 20 Oktober 2000, dan 1 bank sejak 30 Oktober 2001)

Tabel 25
Perubahan Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhi

miliar rupiah

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007					
							I	II	III	IV		
Uang Beredar												
M2	39.854	71.784	77.836	169.687	178.859	261.129	-6.127	76.027	60.782	130.447		
M1	14.208	31.860	30.019	28.087	79.168	99.769	-19.240	39.543	29.905	49.561		
Kartal	4.344	13.856	14.723	15.051	26.693	32.410	-21.391	17.097	13.612	23.092		
Giral	9.864	18.004	15.296	13.036	52.475	67.359	2.151	22.446	16.293	26.469		
Kuasi ¹⁾	25.646	39.924	47.817	141.600	99.691	161.360	13.113	36.484	30.877	80.886		
Faktor yang Memengaruhi												
Aktiva Luar Negeri Bersih	16.721	21.124	-8.173	49.436	100.182	111.438	44.117	39.140	22.838	5.343		
Tagihan Kepada Pemerintah Bersih	-19.355	-31.338	18.134	882	7.587	-9.010	-58.833	-16.699	8.693	57.829		
Tagihan Kepada Sektor Swasta	60.143	77.532	148.976	123.039	98.228	203.925	8.957	63.301	52.824	78.843		
Tagihan Kepada Lembaga/Perusahaan Pemerintah	4.552	1.198	2.832	1.140	10.887	17.206	-3.914	9.153	1.311	10.656		
Tagihan Kepada Perusahaan Swasta dan Perorangan	55.591	76.334	146.144	121.899	87.341	186.719	12.871	54.148	51.513	68.187		
Aktiva Lainnya Bersih	-17.655	4.466	-81.974	-3.672	-15.334	-57.027	-12.172	-9.716	-23.572	-11.567		

1) Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

Tabel 26
Suku Bunga Deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank ¹⁾

persen per tahun

Jangka Waktu	Desember 2002		Desember 2003		Desember 2004		Desember 2005		Desember 2006		Desember 2007	
	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas
Bank Persero												
1 Bulan	12,84	2,63	6,61	1,60	6,17	3,90	11,84	3,98	8,71	4,24	7,00	3,89
3 Bulan	13,65	2,73	7,11	1,68	6,47	2,86	11,71	4,00	9,60	4,11	7,33	4,09
6 Bulan	13,86	2,71	7,96	1,90	6,99	6,45	10,21	3,82	10,53	4,24	7,13	4,07
12 Bulan	15,67	3,32	10,55	2,13	7,17	2,34	11,49	3,58	11,80	4,02	8,41	3,65
24 Bulan	18,05	5,57	16,13	2,36	8,09	2,10	12,46	3,90	11,86	3,87	10,80	3,69
Bank Swasta Nasional												
1 Bulan	12,90	2,33	6,63	1,17	6,58	1,95	12,23	3,53	9,16	4,00	7,31	3,94
3 Bulan	13,77	2,69	7,20	1,40	6,98	2,51	11,95	3,47	9,88	3,74	7,64	4,14
6 Bulan	13,91	2,73	8,65	1,57	7,38	2,51	10,14	3,11	10,79	4,13	7,90	4,02
12 Bulan	14,73	3,25	10,07	2,32	7,12	2,64	9,90	3,02	11,48	3,71	7,87	4,27
24 Bulan	17,18	6,23	15,55	3,01	8,87	...	10,18	...	11,96	2,75	11,59	3,92
Bank Pemerintah Daerah												
1 Bulan	12,81	2,48	6,78	1,20	6,86	7,00	10,28	3,32	8,77	3,78	7,24	3,73
3 Bulan	13,56	2,65	7,31	1,31	7,09	...	10,86	4,06	9,35	4,04	6,76	4,01
6 Bulan	14,14	4,17	8,63	1,41	7,29	...	9,92	2,04	10,83	3,81	7,74	3,96
12 Bulan	14,44	3,50	10,84	2,75	6,82	...	9,46	2,05	11,47	4,43	8,73	4,44
24 Bulan	17,72	...	17,01	...	9,47	...	8,50	...	10,94	...	10,17	-
Bank Asing & Campuran												
1 Bulan	10,50	1,86	6,54	1,70	6,06	1,82	10,51	3,45	8,48	4,28	7,27	4,40
3 Bulan	9,89	1,92	6,66	1,67	5,81	2,10	11,67	3,63	9,50	4,47	7,30	4,44
6 Bulan	9,66	2,39	6,38	2,00	6,02	1,94	10,38	3,48	10,80	4,34	7,58	4,63
12 Bulan	11,68	2,40	8,61	2,45	6,09	2,20	12,53	2,78	10,96	3,48	8,29	4,42
24 Bulan	15,97	3,21	15,80	3,10	4,74	...	9,55	...	10,52	4,35	9,83	4,80
Bank Umum												
1 Bulan	12,81	2,44	6,62	1,26	6,43	1,98	11,98	3,70	8,96	4,14	7,19	4,01
3 Bulan	13,63	2,65	7,14	1,54	6,71	2,14	11,75	3,68	9,71	4,11	7,42	4,26
6 Bulan	13,79	2,70	8,25	1,84	7,12	4,90	10,17	3,56	10,70	4,22	7,65	4,27
12 Bulan	15,28	3,24	10,39	2,23	7,07	2,32	10,95	3,07	11,63	3,71	8,24	4,21
24 Bulan	18,02	5,28	16,13	2,71	8,12	2,10	12,39	3,90	11,84	4,22	10,83	4,52

1) Rata-rata tertimbang pada akhir periode

Tabel 27
Pasar Uang Antarbank di Jakarta (Rata-rata Volume Transaksi PUAB Pagi & Sore Berbagai Tenor) ¹⁾

Periode	Nilai Transaksi (Miliar Rupiah)	Suku Bunga Rata-Rata Tertimbang (Persen per Tahun)
2002 Januari - Desember	3.749	14,20
2003 Januari - Desember	3.598	8,95
2004 Januari - Desember	4.460	6,20
2005 Januari - Desember	6.188	7,11
2004		
Januari - Maret	4.410	6,91
April - Juni	3.543	5,93
Juli - September	4.835	6,02
Oktober - Desember	5.052	5,92
2005		
Januari - Maret	5.914	5,33
April - Juni	6.197	6,72
Juli - September	5.843	7,39
Oktober - Desember	6.798	8,99
2006		
Januari	7.579	9,80
Februari	7.942	10,24
Maret	8.446	10,44
Januari - Maret	7.989	10,16
April	8.256	11,04
Mei	8.413	10,24
Juni	7.192	10,13
April - Juni	7.954	10,47
Juli	8.259	10,79
Agustus	8.310	10,51
September	8.877	8,94
Juli - September	8.482	10,08
Oktober	8.838	6,87
November	8.078	5,99
Desember	10.554	6,16
Oktober - Desember	9.157	6,34
2007		
Januari	11.586	5,25
Februari	11.653	5,24
Maret	14.506	7,58
Januari - Maret	12.582	6,02
April	11.685	8,40
Mei	11.486	6,92
Juni	12.115	5,88
April - Juni	11.762	7,07
Juli	12.029	5,33
Agustus	11.538	5,30
September	16.293	6,71
Juli - September	13.287	5,78
Oktober	12.495	6,34
November	15.020	7,16
Desember	12.877	4,86
Oktober - Desember	13.464	6,12

1) Angka rata-rata harian.

Tabel 28
Penerbitan, Pelunasan, dan Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

miliar rupiah

Akhir Periode	Penerbitan	Pelunasan	Posisi ¹⁾
Januari - Desember 2002	1.009.912	988.259	77.113
Januari - Desember 2003	1.225.665	1.197.376	105.402
Januari - Desember 2004	1.194.384	1.197.054	102.732
2005			
Januari	118.995	100.671	114.756
Februari	118.437	117.733	122.570
Maret	123.692	188.328	122.851
April	110.781	53.995	92.516
Mei	98.141	111.002	104.283
Juni	148.605	149.109	103.166
Juli	94.859	99.501	96.786
Agustus	83.682	95.045	93.629
September	46.573	40.996	51.972
Oktober	38.791	40.891	44.252
November	56.365	38.394	46.699
Desember	80.628	65.257	70.047
2006			
Januari	109.258	71.184	94.715
Februari	122.397	103.954	118.419
Maret	164.739	160.847	132.071
April	147.512	128.151	137.860
Mei	156.861	143.262	164.438
Juni	201.958	201.072	168.155
Juli	169.997	164.047	168.153
Agustus	242.712	231.775	178.716
September	178.419	182.384	182.574
Oktober	103.299	113.790	175.458
November	341.337	302.862	202.000
Desember	206.999	206.999	209.400
2007			
Januari	271.000	243.000	226.491
Februari	236.000	235.400	235.850
Maret	239.346	235.000	244.271
April	247.549	239.346	237.407
Mei	320.441	305.408	259.059
Juni	252.966	260.582	260.068
Juli	284.111	252.966	272.258
Agustus	330.875	352.564	274.425
September	264.842	262.422	263.384
Oktober	337.536	332.980	234.401
November	267.711	269.400	265.468
Desember	152.401	174.783	273.925

Keterangan:

Penerbitan SBI dimulai pada bulan Februari 1984, dan sejak Juli 1998 penjualan SBI dilakukan melalui lelang dengan sistem SOR (*Stop Out Rate*)

1) Angka rata-rata harian

Tabel 29
Tingkat Diskonto SBI ¹⁾

persen per tahun

Periode	7 hari	14 hari	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
2002						
Maret	-	-	16,76	16,89	-	-
Juni	-	-	15,11	15,18	-	-
September	-	-	13,22	14,11	-	-
Desember	-	-	13,02	13,12	-	-
2003						
Maret	-	-	11,40	11,97	-	-
Juni	-	-	9,53	10,18	-	-
September	-	-	8,66	8,75	-	-
Desember	-	-	8,31	8,34	-	-
2004 ²⁾						
Maret	-	-	7,42	7,33	-	-
Juni	-	-	7,34	7,25	-	-
September	-	-	7,39	7,31	-	-
Desember	-	-	7,43	7,29	-	-
2005 ²⁾						
Januari	-	-	7,42	7,30	-	-
Februari	-	-	7,43	7,27	-	-
Maret	-	-	7,44	7,31	-	-
April	-	-	7,70	7,51	-	-
Mei	-	-	7,95	7,81	-	-
Juni	-	-	8,25	8,05	-	-
Juli	-	-	8,49	8,45	-	-
Agustus	-	-	9,51	8,54	-	-
September	-	-	10,00	9,25	-	-
Oktober	-	-	11,00	12,09	-	-
November	-	-	12,25	12,83	-	-
Desember	-	-	12,75	12,83	-	-
2006 ²⁾						
Januari	-	-	12,75	12,92	-	-
Februari	-	-	12,74	12,92	-	-
Maret	-	-	12,73	12,73	-	-
April	-	-	12,74	12,65	-	-
Mei	-	-	12,50	12,16	-	-
Juni	-	-	12,50	12,16	-	-
Juli	-	-	12,25	12,16	-	-
Agustus	-	-	11,75	11,36	-	-
September	-	-	11,25	11,36	-	-
Oktober	-	-	10,75	11,36	-	-
November	-	-	10,25	9,50	-	-
Desember	-	-	9,75	9,50	-	-
2007 ²⁾						
Januari	-	-	9,50	9,50	-	-
Februari	-	-	9,25	8,10	-	-
Maret	-	-	9,00	8,10	-	-
April	-	-	9,00	8,10	-	-
Mei	-	-	8,75	7,83	-	-
Juni	-	-	8,50	7,83	-	-
Juli	-	-	8,25	7,83	-	-
Agustus	-	-	8,25	7,83	-	-
September	-	-	8,25	7,83	-	-
Oktober	-	-	8,25	7,83	-	-
November	-	-	8,25	7,83	-	-
Desember	-	-	8,00	7,83	-	-

1) Merupakan Rata-rata Tertimbang Akhir Periode

2) Sejak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 1999, RRT SBI 3 bulan disajikan s/d 5 desimal untuk dasar perhitungan kupon SUN jenis *Variabel Rate*

3) SBI dapat diterbitkan dalam periode 1 sampai dengan 12 bulan yang dinyatakan dalam hari, namun sejak penerbitan dengan sistem lelang pada bulan Juli 1998, baru tersedia SBI periode 1 dan 3 bulan.

Tabel 30
Pendapatan dan Belanja Negara

miliar rupiah

Rincian	2002 ¹⁾	2003 ¹⁾	2004		2005		2006		2007	
			APBN ²⁾	Realisasi ³⁾	APBN-P II ²⁾	Realisasi ³⁾	APBN-P ²⁾	Realisasi ⁴⁾	APBN-P ²⁾	Realisasi ⁴⁾
Pendapatan Negara dan Hibah	298.605	341.396	349.934	403.366	540.126	495.154	659.115	637.797	694.088	708.494
Penerimaan Dalam Negeri	298.528	340.929	349.300	403.104	532.671	493.858	654.882	635.940	690.265	706.791
Penerimaan Perpajakan	210.088	242.048	272.175	280.559	351.974	346.997	425.053	409.055	492.011	491.835
Pajak Dalam Negeri	199.512	230.934	260.224	267.817	334.403	331.759	410.226	395.822	474.551	470.906
Pajak Penghasilan (PPh)	101.874	115.016	133.968	119.515	180.253	175.543	213.698	208.834	251.748	238.740
Nonmigas	84.404	95.293	120.835	99.020	143.017	140.403	175.012	165.644	214.481	194.736
Migas	17.469	19.723	13.133	20.494	37.236	35.140	38.686	43.190	37.268	44.004
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	65.153	77.082	86.273	102.573	102.671	101.295	132.876	123.033	152.057	155.187
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.228	8.677	8.031	11.684	13.375	16.184	18.154	20.716	22.026	23.619
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.600	2.229	2.668	3.001	3.661	3.429	4.386	3.179	3.966	5.936
Cukai	23.189	26.277	27.671	29.173	32.245	33.256	38.523	37.772	42.035	44.681
Pajak lainnya	1.469	1.654	1.614	1.872	2.198	2.050	2.590	2.287	2.720	2.743
Pajak Perdagangan Internasional	10.575	11.114	11.951	12.742	17.570	15.239	14.827	13.233	17.460	20.929
Bea masuk	10.344	10.885	11.636	12.444	16.591	14.921	13.583	12.142	14.418	16.691
Pajak ekspor	231	230	315	298	980	318	1.244	1.091	3.042	4.238
Penerimaan Bukan Pajak	88.440	98.880	77.125	122.546	180.697	146.860	229.829	226.885	198.254	214.956
Penerimaan Sumber Daya Alam	64.755	67.739	47.241	96.717	144.361	110.441	165.695	164.773	115.053	133.018
Minyak bumi	47.686	48.871	28.248	72.742	102.196	72.805	122.964	125.146	78.235	99.156
Gas alam	12.325	12.631	15.754	18.801	36.364	30.983	36.825	32.941	29.484	25.628
SDA lainnya	4.744	6.238	3.238	5.174	5.801	6.653	5.906	6.686	7.334	8.234
Bagian laba BUMN	9.760	12.833	11.454	10.644	12.000	12.777	20.800	21.451	21.800	23.222
Surplus Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	0	0	13.669	13.669
PNBP Lainnya	13.925	18.308	18.430	15.185	24.336	23.643	43.334	40.661	47.731	45.047
Hibah	78	468	634	262	7.455	1.296	4.233	1.857	3.823	1.704
Belanja Negara	322.180	376.505	374.351	427.176	565.070	509.622	699.099	670.591	752.373	757.245
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	223.976	256.191	255.309	297.454	411.667	359.158	478.250	444.197	498.172	503.977
Pengeluaran Rutin	186.651	186.944	184.438	236.003	326.924	301.557	408.470	385.266	426.488	439.570
Belanja Pegawai	39.480	47.662	56.738	52.743	61.167	54.339	79.075	72.873	97.983	90.373
Belanja Barang	12.777	14.992	17.280	15.518	42.312	29.240	55.992	47.066	61.824	54.150
Pembayaran Bunga Utang	87.667	65.351	65.651	62.486	60.982	65.151	82.495	79.026	83.555	79.551
Utang dalam negeri	25.406	46.356	41.276	39.286	42.307	43.496	58.155	54.897	58.803	53.822
Utang luar negeri	62.261	18.995	24.375	23.200	18.675	21.655	24.340	24.129	24.752	25.728
Subsidi	43.628	43.899	26.362	91.529	119.089	120.784	107.628	107.410	105.073	150.214
Subsidi BBM	31.162	30.038	14.527	69.025	89.194	95.737	80.609	85.136	55.604	83.792
Subsidi nonBBM	12.466	9.901	10.995	16.076	23.643	17.892	21.367	15.911	49.469	49.308
Pajak ditanggung pemerintah	-	3.960	840	6.429	6.253	7.156	5.651	6.363	0	17.114
Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	41.018	43.392	52.272	50.678
Pengeluaran Rutin Lainnya	3.099	15.042	18.407	13.727	43.374	32.043	42.262	35.500	25.781	14.604
Pengeluaran Pembangunan	37.325	69.247	70.871	61.450	84.743	57.601	69.780	58.931	71.684	64.407
Pembiayaan rupiah	25.608	47.510	50.500	48.018	54.747	33.454	55.258	52.292	70.826	66.223
Pembiayaan proyek	11.717	21.737	20.371	13.432	29.997	24.147	25.475	19.829	23.205	14.391
Anggaran Belanja untuk Daerah	98.204	120.314	119.042	129.723	153.402	150.464	220.850	226.394	254.201	253.268
Dana Perimbangan	94.657	111.070	112.187	122.868	146.160	143.251	216.798	222.348	244.608	244.007
Dana Bagi Hasil	24.884	31.370	26.928	36.700	52.567	49.729	59.564	65.133	62.726	62.947
Dana Alokasi Umum	69.159	76.978	82.131	82.131	88.766	88.762	145.664	145.652	164.787	164.823
Dana Alokasi Khusus	613	2.723	3.128	4.036	4.828	4.760	11.570	11.563	17.094	16.237
Dana Otonomi Khusus dan penyeimbang	3.548	9.244	6.855	6.855	7.243	7.213	4.052	4.047	9.593	9.261

Sumber: Departemen Keuangan

1) Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

2) APBN yang telah disetujui DPR

3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

4) Realisasi sementara periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2007 (belum diaudit, Revisi IV)

Tabel 31
Pembiayaan Defisit Anggaran

miliar rupiah

Rincian	2002 ¹⁾	2003 ¹⁾	2004		2005		2006		2007	
			APBN ²⁾	Realisasi ³⁾	APBN-P II ²⁾	Realisasi ³⁾	APBN-P ²⁾	Realisasi ⁴⁾	APBN-P ²⁾	Realisasi ⁴⁾
I. Pembiayaan Dalam Negeri	17.024	34.562	40.556	51.867	29.786	24.659	55.258	52.292	70.826	66.223
1. Perbankan dalam negeri (SILPA/SIKPA) ⁵⁾	-8.140	10.705	19.199	25.727	4.271	700	17.907	15.223	10.622	8.420
2. Nonperbankan dalam negeri	25.164	23.857	21.358	26.141	25.515	23.959	37.351	37.069	60.204	57.803
a. Privatisasi	7.665	7.301	5.000	3.520	0	0	1.000	400	2.000	304
b. Penjualan aset program restrukturisasi	19.439	19.661	5.000	15.751	8.625	6.558	2.580	2.684	1.658	2.413
c. Obligasi negara, neto	-1.939	-3.105	11.358	6.870	22.086	22.596	35.772	35.986	58.546	57.086
i. Penerbitan obligasi pemerintah	1.991	11.319	32.500	23.362	43.315	46.824	43.315	47.324	99.266	117.149
ii. Pembayaran cicilan pokok utang/obligasi DN	-3.931	-14.424	-21.142	-16.492	-21.229	-24.228	-7.543	-11.339	-40.720	-60.063
d. Dana Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-5.195	-5.195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
II. Pembiayaan Luar Negeri, neto	6.550	548	-16.139	-28.057	-4.842	-10.260	-15.274	-19.316	-12.540	-23.924
1. Penarikan pinjaman luar negeri, bruto	18.809	20.360	28.237	18.434	35.541	26.870	37.550	33.409	42.210	33.998
Pinjaman program	7.170	1.792	8.500	5.059	11.270	12.309	12.075	13.580	19.005	19.608
Pinjaman proyek	11.639	18.568	19.737	13.375	24.271	14.561	25.475	19.829	23.205	14.391
Obligasi Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri (amortisasi)	-12.259	-19.812	-44.376	-46.491	-40.383	-37.130	-52.824	-52.725	-54.751	-57.922
Pembiayaan Bersih	23.574	35.109	24.418	23.810	24.944	14.399	39.984	32.975	58.285	42.299

Sumber: Departemen Keuangan

1) Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

2) APBN yang telah disetujui DPR

3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

4) Realisasi sementara periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2007 (belum diaudit, Revisi IV)

5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)

Tabel 32
Penghimpunan Dana oleh Bank Umum ¹⁾

miliar rupiah

Akhir Periode	Giro			Deposito			Tabungan	Jumlah
	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah ²⁾	Dalam Valas	Sub Jumlah		
2002	130.877	73.189	204.067	365.771	81.710	447.480	193.468	845.015
2003	155.898	68.861	224.759	356.287	76.840	433.127	244.440	902.326
2004								
Maret	155.529	72.712	228.241	331.602	73.782	405.384	247.991	881.616
Juni	163.796	81.279	245.075	337.841	71.091	408.932	261.041	915.048
September	165.622	80.175	245.797	340.411	71.038	411.449	270.996	928.242
Desember	171.661	75.482	247.143	352.723	68.567	421.290	296.647	965.080
2005								
Maret	177.592	77.170	254.762	351.599	70.055	421.654	284.657	961.073
Juni	193.561	80.559	274.120	376.493	78.236	454.729	284.415	1.013.264
September	185.917	93.732	279.649	409.322	113.432	522.754	280.749	1.083.152
Desember	194.533	88.122	282.655	456.739	112.935	569.674	281.757	1.134.086
2006								
Januari	194.318	85.801	280.119	457.340	110.384	567.724	274.555	1.122.398
Februari	196.370	85.175	281.545	468.331	113.043	581.374	271.700	1.134.619
Maret	193.434	86.276	279.710	471.782	109.631	581.413	268.319	1.129.442
April	194.735	82.182	276.917	475.618	105.932	581.550	270.318	1.128.785
Mei	214.736	83.862	298.598	483.298	114.485	597.783	275.629	1.172.010
Juni	215.132	83.240	298.372	489.962	111.595	601.557	279.534	1.179.463
Juli	211.881	85.835	443.787	485.376	105.907	591.283	281.729	1.316.799
Agustus	231.906	85.826	462.213	487.223	110.214	597.437	284.038	1.343.688
September	230.307	84.318	314.625	500.122	110.062	610.184	291.999	1.216.808
Oktober	236.385	90.630	327.015	504.082	114.363	618.445	299.479	1.244.939
November	240.060	86.751	326.811	515.295	112.006	627.301	309.028	1.263.140
Desember	251.219	88.568	339.787	511.356	113.234	624.590	334.380	1.298.757
2007								
Januari	246.238	89.047	335.285	513.614	111.371	624.985	331.028	1.291.298
Februari	248.376	91.328	339.704	521.716	103.253	624.969	331.199	1.295.872
Maret	241.249	91.473	332.722	526.291	110.074	636.365	333.841	1.302.928
April	246.810	93.008	339.818	526.306	106.238	632.544	338.716	1.311.078
Mei	243.624	100.033	343.657	518.868	115.201	634.069	339.323	1.317.049
Juni	263.807	107.306	371.113	520.872	116.536	637.408	355.320	1.363.841
Juli	282.542	95.641	378.183	520.999	126.193	647.192	364.547	1.389.922
Agustus	284.829	97.986	382.815	523.253	127.561	650.814	371.483	1.405.112
September	278.478	102.106	380.584	521.690	132.531	654.221	378.936	1.413.741
Oktober	284.663	100.149	384.812	524.212	135.246	659.458	388.560	1.432.830
November	289.627	97.095	386.722	531.156	137.307	668.463	398.472	1.453.657
Desember	311.037	96.247	407.284	543.285	138.245	681.530	439.371	1.528.185

1) Termasuk dana milik pemerintah dan bukan penduduk

2) Termasuk sertifikat deposito

Tabel 33

Giro dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum menurut Kelompok Bank

miliar rupiah

Akhir Periode	Bank Persero			Bank Swasta Nasional			Bank Pembangunan Daerah			Bank Asing & Campuran			Jumlah		
	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Sub Jumlah	Dalam Rupiah	Dalam Valas	Jumlah
2002	51.320	22.413	73.733	44.238	24.922	69.160	25.758	23	25.781	9.561	25.831	35.392	130.877	73.189	204.067
2003	64.181	17.290	81.471	53.401	27.180	80.581	27.081	40	27.121	11.235	24.351	35.586	155.898	68.861	224.759
2004															
Maret	63.411	17.258	80.669	54.298	30.496	84.794	25.266	86	25.352	12.554	24.872	37.426	155.529	72.712	228.241
Juni	66.444	19.563	86.007	57.147	32.187	89.334	27.148	95	27.243	13.057	29.434	42.491	163.796	81.279	245.075
September	64.340	22.037	86.377	58.406	29.828	88.234	28.779	68	28.847	14.097	28.242	42.339	165.622	80.175	245.797
Desember	63.597	19.251	82.848	62.493	27.311	89.804	30.417	62	30.479	15.154	28.858	44.012	171.661	75.482	247.143
2005															
Januari	63.634	18.688	82.322	60.437	29.074	89.511	30.881	102	30.983	16.041	28.630	44.671	170.993	76.494	247.487
Februari	65.405	18.643	84.048	61.754	28.912	90.666	31.881	48	31.929	16.485	30.684	47.169	175.525	78.287	253.812
Maret	65.347	18.416	83.763	61.167	27.481	88.648	33.468	47	33.515	17.613	31.226	48.839	177.595	77.170	254.765
April	63.683	20.632	84.315	58.191	29.166	87.357	33.137	70	33.207	14.456	32.896	47.352	169.467	82.764	252.231
Mei	63.823	18.667	82.490	60.402	28.565	88.967	33.360	56	33.416	24.083	32.121	56.204	181.668	79.409	261.077
Juni	76.714	18.994	95.708	60.337	28.042	88.379	38.765	49	38.814	17.747	33.475	51.222	193.563	80.560	274.123
Juli	68.753	20.743	89.496	58.539	29.079	87.618	39.711	47	39.758	16.099	31.436	47.535	183.102	81.305	264.407
Agustus	68.537	23.563	92.100	62.742	32.399	95.141	43.341	33	43.374	17.261	33.771	51.032	191.881	89.766	281.647
September	67.665	23.871	91.536	59.253	34.660	93.913	42.060	34	42.094	16.939	35.167	52.106	185.917	93.732	279.649
Oktober	66.401	22.561	88.962	56.806	34.461	91.267	39.952	48	40.000	15.002	35.181	50.183	178.161	92.251	270.412
November	69.554	20.868	90.422	57.954	34.742	92.696	44.961	54	45.015	14.952	36.734	51.686	187.421	92.398	279.819
Desember	70.624	23.256	93.880	60.352	32.874	93.226	50.656	43	50.699	12.901	31.948	44.849	194.533	88.121	282.654
2006															
Januari	72.378	20.437	92.815	58.590	33.881	92.471	49.065	39	49.104	14.285	31.444	45.729	194.318	85.801	280.119
Februari	70.329	19.767	90.096	57.691	34.186	91.877	51.398	28	51.426	16.952	31.196	48.148	196.370	85.177	281.547
Maret	71.024	20.305	91.329	56.044	34.452	90.496	53.676	25	53.701	12.690	31.494	44.184	193.434	86.276	279.710
April	69.146	18.985	88.131	56.214	33.278	89.492	56.595	29	56.624	12.780	29.883	42.663	194.735	82.175	276.910
Mei	74.051	20.614	94.665	60.556	32.766	93.322	65.810	27	65.837	14.319	30.454	44.773	214.736	83.861	298.597
Juni	74.910	20.547	95.457	60.488	32.767	93.255	66.604	33	66.637	13.129	29.894	43.023	215.131	83.241	298.372
Juli	72.908	20.492	93.400	62.363	34.652	97.015	63.176	103	63.279	13.435	30.589	44.024	211.882	85.836	297.718
Agustus	78.712	21.337	100.049	65.714	33.934	99.648	72.350	71	72.421	15.131	30.486	45.617	231.907	85.828	317.735
September	76.444	23.400	99.844	66.518	31.701	98.219	71.348	28	71.376	15.997	29.186	45.183	230.307	84.315	314.622
Oktober	75.606	24.258	99.864	70.944	33.538	104.482	72.981	29	73.010	16.854	32.803	49.657	236.385	90.628	327.013
November	76.106	23.396	99.502	71.579	32.429	104.008	74.259	30	74.289	18.115	30.896	49.011	240.059	86.751	326.810
Desember	89.194	22.732	111.926	71.261	34.979	106.240	74.740	31	74.771	16.025	30.826	46.851	251.220	88.568	339.788
2007															
Januari	85.374	23.302	108.676	73.235	34.359	107.594	69.984	32	70.016	17.645	31.354	48.999	246.238	89.047	335.285
Februari	83.526	22.702	106.228	73.829	33.494	107.323	73.361	34	73.395	17.660	35.098	52.758	248.376	91.328	339.704
Maret	80.392	24.319	104.711	69.422	33.558	102.980	76.205	34	76.239	15.230	33.560	48.790	241.249	91.471	332.720
April	79.825	24.218	104.043	73.144	36.063	109.207	76.595	31	76.626	17.246	32.696	49.942	246.810	93.008	339.818
Mei	78.366	23.953	102.319	70.665	41.282	111.947	76.219	30	76.249	18.374	34.768	53.142	243.624	100.033	343.657
Juni	85.362	32.081	117.443	79.167	40.038	119.205	77.342	31	77.373	21.936	35.156	57.092	263.807	107.306	371.113
Juli	92.124	23.977	116.101	86.828	37.025	123.853	81.026	27	81.053	22.564	34.612	57.176	282.542	95.641	378.183
Agustus	88.923	28.219	117.142	85.991	36.422	122.413	87.470	29	87.499	22.445	33.316	55.761	284.829	97.986	382.815
September	84.726	28.758	113.484	83.813	38.593	122.406	87.812	33	87.845	22.127	34.722	56.849	278.478	102.106	380.584
Oktober	85.609	26.127	111.736	89.263	39.571	128.834	83.947	26	83.973	25.844	34.422	60.266	284.663	100.146	384.809
November	87.467	23.898	111.365	89.407	38.127	127.534	85.562	27	85.589	27.191	35.043	62.234	289.627	97.095	386.722
Desember	122.110	23.852	145.962	94.424	36.561	130.985	69.202	167	69.369	25.301	35.667	60.968	311.037	96.247	407.284

Tabel 34
Simpanan Berjangka Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum menurut Jangka Waktu

miliar rupiah

Akhir Periode	24 bulan	12 bulan	6 bulan	3 bulan	1 bulan ¹⁾	Lain-lain	Jumlah
2002	21.447	23.161	20.131	77.078	248.834	56.830	447.480
2003	9.667	31.735	24.516	66.836	232.283	68.090	433.127
2004	4.986	15.458	28.341	47.749	247.897	76.858	421.290
2005							
Januari	5.695	15.027	28.453	48.727	246.015	74.125	418.042
Februari	4.036	14.673	28.017	48.872	251.151	65.278	412.027
Maret	4.744	15.666	28.289	49.551	246.697	76.704	421.651
April	6.202	15.531	27.389	54.966	256.483	83.135	443.706
Mei	4.862	16.996	24.343	60.097	260.951	78.911	446.160
Juni	6.738	16.909	20.931	61.357	263.001	85.792	454.728
Juli	5.216	18.043	21.413	60.806	266.924	96.562	468.964
Agustus	4.991	17.605	17.897	63.729	276.093	99.705	480.020
September	4.848	20.419	16.037	65.942	311.077	104.431	522.754
Oktober	3.165	18.580	15.693	64.786	327.130	104.838	534.192
November	2.731	19.539	16.647	62.748	343.194	99.958	544.817
Desember	4.007	24.144	17.297	61.356	351.672	111.199	569.675
2006							
Januari	4.014	30.383	17.414	63.566	343.054	109.291	567.722
Februari	4.117	38.843	20.029	64.495	355.468	98.407	581.359
Maret	4.775	41.384	22.599	67.558	337.614	107.486	581.416
April	4.981	43.781	24.738	69.471	340.574	102.670	586.215
Mei	4.597	45.708	25.318	74.180	346.842	101.142	597.787
Juni	5.081	46.995	24.911	72.212	339.917	112.448	601.564
Juli	5.195	48.122	27.027	73.793	329.713	107.433	591.283
Agustus	4.427	50.691	28.332	75.036	330.012	108.938	597.436
September	4.878	50.058	28.942	78.987	329.918	117.401	610.184
Oktober	5.196	50.792	31.923	80.508	343.700	106.326	618.445
November	5.557	51.042	31.709	81.183	347.324	110.486	627.301
Desember	6.764	49.799	29.601	80.580	340.942	116.904	624.590
2007							
Januari	6.428	46.919	28.149	79.973	359.842	103.674	624.985
Februari	6.537	46.488	26.887	77.646	377.153	90.258	624.969
Maret	6.447	47.613	26.309	74.921	363.904	117.170	636.364
April	6.509	47.670	24.438	73.354	374.210	106.363	632.544
Mei	6.505	45.503	24.246	74.421	369.478	113.916	634.069
Juni	6.444	44.874	24.175	73.578	367.435	120.902	637.408
Juli	6.437	45.058	24.216	72.904	382.971	115.608	647.194
Agustus	5.022	43.859	25.050	70.669	381.628	124.586	650.814
September	4.810	43.391	29.141	71.087	374.877	130.911	654.217
Oktober	4.726	43.141	30.654	71.650	383.264	126.022	659.457
November	4.681	42.720	31.290	72.818	386.552	130.402	668.463
Desember	4.352	43.343	30.684	75.365	389.505	138.280	681.529

1) Termasuk deposito yang sudah jatuh waktu

Tabel 35
Simpanan Berjangka Rupiah pada Bank Umum menurut Golongan Pemilik

miliar rupiah

Akhir Periode	Penduduk										Bukan Penduduk	Jumlah
	Pemerintah	Badan/Lembaga Pemerintah	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Negara	Perusahaan Swasta	Yayasan & Badan Sosial	Koperasi	Per-orangan	Lainnya	Sub Jumlah		
2002	7.869	8.998	27.469	14.434	54.461	31.126	1.204	215.591	2.094	363.248	2.523	365.771
2003	7.226	8.040	27.078	10.157	59.461	31.540	1.181	208.333	1.030	354.046	2.243	356.289
2004												
Maret	8.651	4.711	24.357	9.898	56.866	24.682	414	199.628	861	330.068	1.535	331.603
Juni	8.742	5.015	25.309	12.056	62.518	24.513	387	197.147	694	336.381	1.464	337.845
September	8.182	4.764	22.498	12.284	66.609	24.042	441	199.028	758	338.606	1.809	340.415
Desember	5.745	5.129	24.688	11.568	67.498	23.849	440	209.189	2.801	350.907	1.815	352.722
2005												
Januari	7.227	5.062	24.350	11.685	67.669	22.905	392	207.626	1.011	347.927	1.788	349.715
Februari	9.256	4.843	21.096	11.537	68.017	21.971	395	205.236	809	343.160	1.756	344.916
Maret	10.295	4.821	23.241	11.559	67.696	22.957	427	207.728	936	349.660	1.939	351.599
April	10.378	4.989	24.499	11.187	73.560	22.376	430	223.741	1.001	372.161	1.777	373.938
Mei	11.804	5.101	23.809	11.184	69.500	22.337	421	225.089	1.051	370.296	1.777	372.073
Juni	12.427	4.822	25.916	12.183	67.210	22.123	513	228.364	986	374.544	1.949	376.493
Juli	13.276	4.880	25.868	15.311	68.550	23.236	472	229.635	1.366	382.594	1.863	384.457
Agustus	14.119	4.302	26.661	14.347	65.862	23.530	541	242.500	1.109	392.971	2.088	395.059
September	14.713	4.293	27.557	13.130	68.626	23.511	492	253.673	1.194	407.189	2.133	409.322
Oktober	13.969	4.544	28.049	14.807	66.184	24.284	551	266.631	1.360	420.379	1.852	422.231
November	13.198	4.541	28.549	14.206	68.429	24.944	518	274.395	1.250	430.030	2.343	432.373
Desember	10.612	4.852	31.179	17.452	70.244	26.949	529	292.171	1.187	455.175	1.564	456.739
2006												
Januari	16.192	4.697	30.227	18.101	66.883	25.930	528	291.924	1.250	455.732	1.608	457.340
Februari	20.421	4.950	31.079	23.356	67.304	27.707	550	290.398	1.014	466.779	1.552	468.331
Maret	22.142	4.990	32.718	20.705	67.279	28.048	523	292.590	1.385	470.380	1.402	471.782
April	23.107	5.025	33.546	23.348	64.668	29.142	562	293.460	1.291	474.149	1.469	475.618
Mei	28.014	5.111	33.095	24.154	66.800	29.374	560	293.223	1.429	481.760	1.538	483.298
Juni	29.195	5.081	35.412	22.384	68.939	28.221	667	297.249	1.202	488.350	1.612	489.962
Juli	28.747	4.908	35.313	22.412	67.722	28.607	594	294.438	983	483.724	1.652	485.376
Agustus	30.130	4.743	34.859	19.881	69.169	29.455	607	295.540	1.109	485.493	1.730	487.223
September	29.542	5.133	36.182	26.764	72.618	29.412	595	296.760	1.253	498.259	1.863	500.122
Oktober	29.223	4.700	36.774	25.280	75.017	30.492	579	299.113	1.046	502.224	1.858	504.082
November	26.590	4.682	36.948	30.648	78.162	31.999	599	303.507	1.027	514.162	1.133	515.295
Desember	19.508	4.869	38.793	19.435	86.341	31.262	625	308.422	1.098	510.353	1.003	511.356
2007												
Januari	23.821	4.918	35.521	19.860	87.710	30.055	679	308.658	1.245	512.467	1.147	513.614
Februari	26.772	6.196	33.946	22.076	90.491	29.580	607	309.460	1.305	520.433	1.283	521.716
Maret	28.455	5.504	37.097	23.263	90.223	29.819	602	308.158	1.474	524.595	1.696	526.291
April	36.575	5.685	38.299	20.760	87.490	29.863	611	304.011	1.158	524.452	1.854	526.306
Mei	37.860	5.562	37.292	21.126	90.342	29.356	625	293.712	1.289	517.164	1.704	518.868
Juni	35.377	5.355	37.682	20.590	97.758	29.092	610	290.954	1.695	519.113	1.759	520.872
Juli	34.494	5.227	38.049	16.633	97.864	29.356	677	295.517	1.256	519.073	1.926	520.999
Agustus	35.962	4.815	33.109	16.990	100.151	29.115	743	298.624	1.910	521.419	1.834	523.253
September	36.825	4.909	34.714	17.455	98.973	29.088	701	295.459	1.676	519.800	1.890	521.690
Oktober	36.076	4.734	35.400	18.090	100.176	30.280	716	295.111	1.841	522.424	1.788	524.212
November	32.628	4.782	34.389	21.048	106.588	29.585	700	298.280	1.340	529.340	1.816	531.156
Desember	21.797	4.841	36.210	23.586	118.803	30.339	666	303.321	1.601	541.164	2.121	543.285

Tabel 36
Sertifikat Deposito

miliar rupiah

Akhir Periode	Bank Persero	Selain Bank Persero	Jumlah
2002	1.768	1.397	3.165
2003	641	1.165	1.806
2004	498	291	789
2005	497	256	753
2006			
Januari	474	246	720
Februari	5.117	168	5.285
Maret	480	168	648
April	5.150	170	5.320
Mei	5.391	163	5.554
Juni	5.397	145	5.542
Juli	4.166	221	4.387
Agustus	5.315	210	5.525
September	5.385	358	5.743
Oktober	4.829	374	5.203
November	4.860	343	5.203
Desember	4.504	353	4.857
2007			
Januari	4.552	369	4.921
Februari	4.567	353	4.921
Maret	4.838	311	5.150
April	4.816	297	5.113
Mei	4.684	301	4.985
Juni	4.119	287	4.406
Juli	4.197	371	4.569
Agustus	5.782	488	6.270
September	6.037	589	6.626
Oktober	6.035	556	6.591
November	7.449	539	7.989
Desember	8.923	240	9.163

Tabel 37
Tabungan menurut Jenis pada Bank Umum

Akhir Periode	Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu		Tabungan Berjangka		Tabungan Lainnya		Jumlah	
	Penabung (ribu)	Posisi (miliar Rp)	Penabung (ribu)	Posisi (miliar Rp)	Penabung (ribu)	Posisi (miliar Rp)	Penabung (ribu)	Posisi (miliar Rp)
2002	68.010	191.177	750	1.116	1.028	1.175	69.789	193.468
2003	69.370	241.366	761	1.318	1.334	1.756	71.465	244.439
2004								
Maret	68.558	242.511	873	3.436	1.454	2.043	70.885	247.990
Juni	90.539	256.772	862	2.386	1.391	1.886	92.793	261.043
September	59.433	267.171	769	2.355	945	1.469	61.147	270.995
Desember	70.391	292.609	801	2.457	872	1.581	72.064	296.647
2005								
Januari	71.018	282.024	627	2.050	923	1.550	72.568	285.624
Februari	70.694	279.744	683	2.223	919	1.556	72.296	283.523
Maret	71.586	280.615	815	2.517	903	1.526	73.304	284.658
April	71.417	281.080	794	2.655	836	1.438	73.047	285.173
Mei	72.309	276.976	861	2.998	851	1.482	74.020	281.456
Juni	72.362	278.750	744	4.129	871	1.536	73.978	284.415
Juli	72.187	280.012	742	4.101	838	1.476	73.767	285.589
Agustus	72.214	283.322	701	3.934	759	1.377	73.674	288.633
September	73.061	275.633	698	3.769	730	1.347	74.489	280.749
Oktober	73.101	267.603	714	4.248	747	1.342	74.562	273.193
November	72.837	266.926	756	4.680	745	1.441	74.338	273.047
Desember	73.790	275.690	736	4.553	750	1.513	75.276	281.756
2006								
Januari	73.821	268.312	754	4.759	708	1.485	75.283	274.556
Februari	74.375	265.580	763	4.669	700	1.450	75.838	271.699
Maret	74.588	262.027	824	4.807	707	1.484	76.118	268.319
April	66.683	263.506	806	5.369	638	1.444	68.127	270.319
Mei	69.131	268.072	913	5.997	703	1.559	70.748	275.628
Juni	68.268	271.886	859	6.138	700	1.509	69.827	279.534
Juli	66.785	274.148	824	6.017	709	1.563	68.317	281.729
Agustus	66.068	276.739	842	5.673	750	1.623	67.660	284.036
September	66.068	276.739	842	5.673	750	1.623	67.660	284.036
Oktober	67.003	291.799	853	6.382	643	1.300	68.499	299.480
November	87.614	300.854	896	6.832	604	1.344	89.113	309.030
Desember	67.201	325.564	1.023	7.399	640	1.417	68.864	334.380
2007								
Januari	67.651	322.512	984	7.072	622	1.445	69.258	331.029
Februari	65.999	322.622	1.048	7.169	668	1.409	67.715	331.199
Maret	66.271	324.959	1.066	7.419	631	1.465	67.968	333.842
April	65.722	330.157	1.065	7.139	588	1.420	67.376	338.715
Mei	60.741	330.541	1.169	7.606	371	1.177	62.281	339.324
Juni	64.820	346.932	1.076	7.146	449	1.242	66.345	355.321
Juli	63.202	355.149	1.134	7.494	523	1.905	64.859	364.548
Agustus	72.515	361.510	1.169	7.487	464	2.486	74.148	371.483
September	72.345	368.671	1.183	7.629	453	2.636	73.981	378.936
Oktober	71.936	377.507	1.258	8.141	458	2.911	73.652	388.559
November	71.893	386.944	1.317	8.425	450	3.102	73.659	398.470
Desember	69.267	426.809	1.392	9.451	440	3.108	71.099	439.369

Tabel 38
Suku Bunga Kredit Rupiah menurut Kelompok Bank ¹⁾

persen

Akhir Periode	Bank Pemerintah		Bank Pembangunan Daerah		Bank Swasta Nasional		Bank Asing & Campuran		Bank Umum	
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi
2002	18,85	17,50	19,93	17,89	18,21	18,30	15,71	16,09	18,25	17,82
2003	16,18	15,54	19,08	17,20	14,66	15,75	11,02	12,60	15,07	15,68
2004	14,32	14,10	17,54	16,24	13,13	13,91	9,33	11,44	13,41	14,05
2005	15,71	14,98	16,85	15,51	16,95	16,23	14,50	15,55	16,23	15,66
2006										
Maret	15,89	15,05	16,90	15,61	17,13	16,65	14,20	15,14	16,35	15,90
Juni	15,71	15,09	16,77	15,47	16,93	16,66	13,64	15,69	16,15	15,94
September	15,64	15,11	16,70	15,55	16,50	16,13	12,71	15,00	15,82	15,66
Desember	15,36	14,98	16,60	15,28	15,41	15,42	11,42	13,21	15,07	15,10
2007										
Januari	15,20	14,75	16,28	15,16	15,34	15,21	10,84	12,50	14,90	14,85
Februari	15,11	14,70	16,35	15,17	15,16	14,98	10,44	12,22	14,71	14,71
Maret	14,89	14,49	16,20	15,22	14,84	14,73	10,54	12,48	14,49	14,53
April	14,76	14,44	15,97	15,09	14,54	14,46	10,35	12,21	14,30	14,38
Mei	14,60	14,22	15,90	15,19	14,25	14,22	10,16	12,06	14,06	14,16
Juni	14,40	14,03	15,79	15,02	14,07	14,04	9,86	11,57	13,88	13,99
Juli	14,26	13,81	15,71	14,99	13,84	13,88	9,86	11,56	13,71	13,82
Agustus	14,54	13,98	15,64	14,93	13,50	13,69	9,85	11,37	13,66	13,75
September	13,90	13,43	15,66	14,81	13,24	13,49	10,04	11,32	13,31	13,45
Oktober	13,68	13,27	15,51	14,71	13,13	13,37	10,19	10,53	13,16	13,28
November	13,64	13,19	15,37	14,70	13,12	13,26	10,25	10,70	13,16	13,19
Desember	13,47	12,93	15,33	14,61	12,96	13,11	10,23	10,56	13,00	13,01

1) Rata-rata tertimbang

Tabel 39
Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Sektor Ekonomi ¹⁾

miliar rupiah

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
						Mar	Jun	Sep	Des
Kredit dalam Rupiah	271.851	342.026	438.880	566.444	639.153	640.239	689.779	732.986	793.186
Pertanian	19.121	20.759	26.604	29.437	34.932	33.715	36.289	37.036	41.123
Pertambangan	2.441	1.546	1.467	2.247	2.658	2.611	2.740	2.599	2.789
Perindustrian	64.986	67.323	77.299	98.096	104.457	102.276	104.302	108.304	115.172
Perdagangan	56.854	74.787	97.988	121.216	145.871	147.758	162.444	173.292	186.881
Jasa-jasa	44.581	68.007	86.045	110.100	126.325	123.768	137.087	147.198	165.965
Lain-lain	83.868	109.603	149.476	205.349	224.910	230.111	246.917	264.557	281.256
Kredit dalam Valuta Asing	93.559	95.917	114.668	123.226	147.984	154.475	165.207	174.275	201.926
Pertanian	3.211	3.548	5.772	7.241	10.071	9.304	10.160	12.044	14.783
Pertambangan	3.654	3.515	6.263	5.627	11.238	12.559	16.185	13.717	22.551
Perindustrian	56.049	55.801	66.304	71.582	77.976	79.857	80.525	81.618	88.636
Perdagangan	9.124	9.470	13.046	12.893	16.525	18.663	19.074	22.987	28.789
Jasa-jasa	16.402	21.123	21.812	24.844	31.313	33.444	37.562	43.301	46.476
Lain-lain	5.119	2.460	1.471	1.041	861	649	1.700	607	691
Jumlah	365.410	437.942	553.548	689.670	787.137	794.714	854.986	907.260	995.112
Pertanian	22.332	24.307	32.376	36.678	45.003	43.019	46.449	49.080	55.906
Pertambangan	6.095	5.061	7.730	7.874	13.896	15.169	18.925	16.316	25.340
Perindustrian	121.035	123.125	143.603	169.678	182.433	182.133	184.827	189.922	203.808
Perdagangan	65.978	84.257	111.035	134.109	162.396	166.421	181.518	196.279	215.670
Jasa-jasa	60.983	89.129	107.858	134.944	157.638	157.212	174.650	190.499	212.441
Lain-lain	88.987	112.063	150.947	206.390	225.771	230.761	248.617	265.164	281.947

1) Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek

Tabel 40

Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi ¹⁾

miliar rupiah

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
						Mar	Jun	Sep	Des
Kredit Modal Kerja	282.486	343.626	436.684	557.207	638.264	644.791	691.737	737.554	811.347
Pertanian	10.336	11.703	18.889	21.014	25.804	24.171	26.227	27.483	31.924
Pertambangan	2.497	2.951	3.575	4.239	8.503	9.967	10.151	7.614	14.693
Perindustrian	89.555	92.045	106.948	130.374	141.670	142.145	143.211	14.764	159.118
Perdagangan	55.804	70.147	91.548	112.072	137.103	140.332	153.414	16.764	185.623
Jasa-jasa	35.307	54.718	64.777	83.120	99.414	97.416	110.117	122.013	138.041
Lain-lain	88.987	112.062	150.947	206.388	225.770	230.760	248.617	548.916	281.948
Kredit Investasi	82.924	94.316	116.864	132.463	148.872	149.923	163.249	169.706	183.764
Pertanian	11.996	12.604	13.487	15.664	19.199	18.847	20.222	21.597	23.982
Pertambangan	3.598	2.110	4.155	3.635	5.393	5.202	8.776	8.702	10.647
Perindustrian	31.480	31.080	36.655	39.304	40.763	39.988	41.616	42.281	44.690
Perdagangan	10.174	14.110	19.486	22.036	25.293	26.089	28.104	28.639	30.046
Jasa-jasa	25.676	34.412	43.081	51.824	58.224	59.797	64.531	68.487	74.399
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	365.410	437.942	553.548	689.670	787.136	794.714	854.986	907.260	995.111
Pertanian	22.332	24.307	32.376	36.678	45.003	43.018	46.449	49.080	55.906
Pertambangan	6.095	5.061	7.730	7.874	13.896	15.169	18.927	16.316	25.340
Perindustrian	121.035	123.125	143.603	169.678	182.433	182.133	184.827	57.045	203.808
Perdagangan	65.978	84.257	111.035	134.108	162.396	166.421	181.518	45.403	215.669
Jasa-jasa	60.983	89.130	107.858	134.944	157.638	157.213	174.648	190.500	212.440
Lain-lain	88.987	112.062	150.947	206.388	225.770	230.760	248.617	548.916	281.948

1) Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek

Tabel 41
Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi ¹⁾

miliar rupiah

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
						Mar	Jun	Sep	Des
1. Bank Persero	145.984	173.154	217.066	250.319	282.784	282.633	301.186	314.427	348.972
Pertanian	13.632	14.988	20.224	21.908	25.816	24.222	26.805	28.433	30.281
Pertambangan	4.040	2.951	4.383	3.250	4.771	7.414	9.006	6.556	10.647
Perindustrian	48.155	49.923	59.185	65.781	71.165	71.600	69.959	69.450	72.810
Perdagangan	24.144	30.270	44.928	49.809	61.431	63.561	68.172	75.722	85.601
Jasa-Jasa	19.835	30.896	31.755	37.448	43.481	39.477	44.868	47.465	55.586
Lain-Lain	36.178	44.126	56.591	72.124	76.120	76.359	82.376	86.801	94.047
2. Bank Swasta Nasional	136.981	175.082	224.560	295.014	334.943	335.998	367.168	394.451	432.596
Pertanian	6.383	6.857	8.697	9.541	11.430	11.312	12.053	12.467	15.533
Pertambangan	1.209	1.416	2.268	3.267	6.460	5.409	7.321	7.076	10.678
Perindustrian	34.192	37.433	45.195	55.185	61.525	59.826	63.319	68.670	73.840
Perdagangan	33.869	45.464	55.702	71.098	85.628	86.783	95.549	100.883	108.726
Jasa-Jasa	30.541	42.589	53.632	68.660	78.963	80.252	90.497	98.503	110.144
Lain-Lain	30.787	41.323	59.066	87.262	90.937	92.416	98.429	106.852	113.675
3. Bank Pembangunan Daerah	21.518	29.198	37.246	44.909	55.959	58.851	65.123	70.937	71.920
Pertanian	969	1.113	1.320	1.640	2.030	2.090	2.130	2.248	2.274
Pertambangan	121	20	33	54	58	58	58	55	43
Perindustrian	325	338	400	421	457	487	520	543	631
Perdagangan	3.693	4.789	6.292	7.532	8.239	8.386	8.762	9.295	9.617
Jasa-Jasa	2.562	4.927	5.322	5.632	6.915	6.776	7.747	9.850	8.878
Lain-Lain	13.848	18.011	23.879	29.629	38.260	41.054	45.906	48.946	50.477
4. Bank Asing & Campuran	60.927	60.508	74.676	99.428	113.450	117.232	121.509	127.445	141.623
Pertanian	1.348	1.350	2.135	3.589	5.727	5.395	5.460	5.933	7.817
Pertambangan	725	674	1.046	1.303	2.607	2.287	2.540	2.629	3.972
Perindustrian	38.363	35.430	38.823	48.291	49.285	50.219	51.029	51.259	56.527
Perdagangan	4.272	3.734	4.113	5.669	7.098	7.691	9.035	10.379	11.726
Jasa-Jasa	8.045	10.717	17.149	23.203	28.279	30.709	31.540	34.679	37.831
Lain-Lain	8.174	8.603	11.410	17.374	20.454	20.931	21.905	22.566	23.749
5. Jumlah (1 s.d. 4)	365.410	437.942	553.548	689.671	787.136	794.714	854.986	907.260	995.111
Pertanian	22.332	24.308	32.376	36.678	45.003	43.019	46.448	49.081	55.905
Pertambangan	6.095	5.061	7.730	7.874	13.896	15.168	18.925	16.316	25.340
Perindustrian	121.035	123.124	143.603	169.678	182.432	182.132	184.827	189.922	203.808
Perdagangan	65.978	84.257	111.035	134.108	162.396	166.421	181.518	196.279	215.670
Jasa-Jasa	60.983	89.129	107.858	134.943	157.638	157.214	174.652	190.497	212.439
Lain-Lain	88.987	112.063	150.947	206.389	225.771	230.760	248.616	265.165	281.948

1) Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek

Tabel 42
Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Jakarta dan KKBI

triliun rupiah

Kantor	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Jakarta	37,7	62,3	50,4	75,6	58,4	86,6	70,2	100,8	49,9	83,7	33,6	57,7
Bandung	40,6	26,2	43,4	28,9	51,3	33,6	54,5	38,1	63,0	45,3	24,7	19,1
Semarang	27,4	19,1	29,9	22,5	36,0	26,6	40,7	30,0	37,3	29,4	20,2	10,7
Surabaya	40,4	36,8	42,1	39,2	49,2	45,8	54,1	52,8	58,4	58,9	26,4	27,1
Medan	16,7	17,7	15,0	14,7	18,3	17,1	20,7	19,0	29,1	31,8	18,8	23,2
Padang	12,1	16,4	14,2	18,5	17,5	22,3	19,4	24,9	20,7	28,2	9,0	20,3
Makassar	15,1	16,8	15,7	18,1	18,5	20,7	21,8	24,5	29,7	35,9	14,8	21,9
Banjarmasin	11,4	15,4	13,0	17,0	15,5	19,7	17,3	22,6	16,8	24,8	6,7	15,7
Jumlah	201,4	210,7	223,7	234,6	264,7	272,4	298,8	312,7	304,9	337,8	154,2	195,6

Tabel 43
Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Jakarta dan KKBI

miliar rupiah

Jangka Waktu	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Jakarta	0,6	187,7	4,2	203,4	33,7	195,6	61,3	254,1	23,1	196,7	15,8	160,9
Bandung	24,9	25,6	69,0	26,4	90,2	43,7	91,6	35,4	78,4	18,7	41,1	7,1
Semarang	20,5	12,9	44,5	11,5	59,2	22,4	72,7	15,0	64,2	6,4	40,3	4,3
Surabaya	2,5	50,0	8,2	60,2	10,4	46,6	19,2	58,2	17,7	36,5	3,4	29,7
Medan	1,0	24,9	2,1	24,0	8,1	29,4	17,7	26,3	13,3	18,9	4,6	6,7
Padang	0,5	24,8	0,4	23,9	0,7	20,2	2,9	17,9	2,0	11,6	1,7	10,7
Makassar	0,8	16,5	2,1	19,0	4,5	20,4	9,9	20,8	6,6	10,8	1,0	6,5
Banjarmasin	0,6	19,6	0,4	23,6	0,7	22,8	2,4	21,1	0,9	14,7	0,3	14,0
Jumlah	51,4	362,0	131,0	391,9	207,5	401,2	277,7	448,8	206,3	314,2	108,1	239,9

Tabel 44
Pertumbuhan Ekonomi Dunia

persen

Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Dunia	3,1	4,0	5,3	4,8	5,4	5,2
Negara Industri Maju	1,6	1,9	3,2	2,5	2,9	2,5
Amerika Serikat	1,6	2,5	3,6	3,1	2,9	1,9
Kawasan Euro	0,9	0,8	2,0	1,5	2,8	2,5
Jerman	-	-0,3	1,1	0,8	2,9	2,4
Perancis	1,0	1,1	2,5	1,7	2,0	1,9
Italia	0,3	-	1,2	0,1	1,9	1,7
Jepang	0,3	1,4	2,7	1,9	2,2	2,0
Inggris	2,1	2,8	3,3	1,8	2,8	3,1
Kanada	2,9	1,9	3,1	3,1	2,8	2,5
NIEs	5,0	3,0	5,5	3,1	3,8	3,8
Negara Berkembang	5,1	6,7	7,7	7,5	8,1	7,4
Afrika	3,6	4,7	5,8	5,6	5,6	5,7
Amerika Latin	0,3	2,4	6,0	4,6	5,5	5,0
Asia	7,0	8,3	8,8	9,2	9,8	9,8
China	9,1	10,0	10,1	10,4	11,1	11,5
Indonesia	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,2
Malaysia	4,4	5,5	7,2	5,2	5,9	5,8
Thailand	5,3	7,1	6,3	4,5	5,0	4,0
Filipina	4,4	4,9	6,4	4,9	5,4	6,3
Vietnam	7,1	7,3	7,8	8,4	8,2	8,3
Europa Tengah dan Timur	4,5	4,8	6,7	5,6	6,3	5,8
CIS ¹⁾	5,3	7,9	8,4	6,6	7,7	7,8
Rusia	4,7	7,3	7,2	6,4	6,7	7,0
Timur Tengah	4,0	6,6	5,6	5,4	5,6	5,9

Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2007

1) Commonwealth of Independent States.

* Angka sementara

Tabel 45
Inflasi Dunia

persen

Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Dunia	3,3	3,5	3,6	3,7	3,6	3,9
Negara Industri Maju	1,6	1,7	2,0	2,0	2,1	1,9
Amerika Serikat	1,7	2,1	2,9	3,2	3,2	2,6
Kawasan Euro	2,6	2,2	2,0	1,9	1,9	2,0
Jerman	1,3	1,0	1,8	2,0	2,0	2,0
Perancis	1,9	2,2	2,3	1,9	1,9	1,6
Italia	2,6	2,8	2,3	2,2	2,2	1,9
Jepang	-0,9	-0,3	0,0	-0,3	0,3	0,0
Inggris	1,3	1,4	1,3	2,0	2,3	2,4
Kanada	2,3	2,7	1,8	2,2	2,0	2,2
NIEs	1,0	1,5	2,4	2,3	1,6	2,0
Negara Industri Maju Lainnya	1,7	1,8	1,7	2,1	2,1	2,1
Negara Berkembang	5,7	5,7	5,4	5,2	5,1	5,9
Afrika	8,0	7,8	5,5	6,6	6,3	6,6
Amerika Latin	8,9	10,6	6,5	6,3	5,4	5,3
Asia	2,0	2,5	4,1	3,6	4,0	5,3
China	-0,8	1,2	3,9	1,8	1,5	4,5
Indonesia	6,8	6,1	10,5	13,1	6,3	13,0
Malaysia	1,8	1,1	1,4	3,0	3,6	2,1
Thailand	0,6	1,8	2,8	4,5	4,6	2,0
Filipina	2,9	3,5	6,0	7,6	6,7	3,0
Vietnam	4,0	3,2	7,7	8,3	7,5	7,3
Eropa Tengah dan Timur	14,9	9,2	6,1	4,9	5,0	5,1
CIS ¹⁾	13,4	11,9	10,3	12,1	9,4	8,9
Rusia	15,8	13,7	10,9	12,7	9,7	8,1
Timur Tengah	5,3	6,2	7,2	6,9	7,5	10,8

Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2007

1) Commonwealth of Independent States.

* Angka sementara

Tabel 46
Suku Bunga (%) dan Nilai Tukar

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Yield Obligasi Pemerintah (10 tahun)						
AS	3,82	4,25	4,22	4,39	4,70	4,02
Jepang	0,91	1,37	1,44	1,48	1,69	1,51
Kawasan Euro	4,20	4,29	3,68	3,31	3,95	4,33
LIBOR 6 bulan						
USD	1,38	1,22	2,78	4,70	5,37	4,60
Yen	0,07	0,07	0,07	0,08	0,63	0,98
Euro	2,80	2,16	2,21	2,64	3,86	4,71
Nilai Tukar						
Yen/USD	118,69	106,92	102,48	117,48	118,88	112,02
USD/EUR	1,05	1,26	1,37	1,18	1,32	1,47
USD/GBP	1,61	1,78	1,93	1,72	1,96	2,01

Sumber: Bloomberg

Tabel 47
Perkembangan Volume Perdagangan Barang dan Harga Dunia

persen

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Volume Perdagangan Barang	3,7	6,4	10,9	7,4	9,3	6,3
Harga						
Barang-barang Industri	2,1	14,3	9,5	3,7	3,8	7,9
Komoditas Primer Nonmigas	1,7	6,9	18,5	10,3	28,4	12,2
Minyak	2,5	15,8	30,7	41,3	20,5	6,6

Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2007

* Angka sementara

Tabel 48
Transaksi Berjalan di Negara Industri dan Negara Sedang Berkembang

persen PDB

Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
Negara Industri Maju	-0,8	-0,7	-0,7	-1,3	-1,4	-1,3
Amerika Serikat	-4,4	-4,8	-5,5	-6,1	-6,2	-5,7
Kawasan Euro	0,7	0,5	1,1	0,3	-	-0,2
Jerman	2,0	1,9	4,3	4,6	5,0	5,4
Perancis	1,4	0,8	0,1	-1,1	-1,2	-1,6
Italia	-0,8	-1,3	0,9	-1,5	-2,4	-2,3
Jepang	2,9	3,2	3,7	3,6	3,9	4,5
Inggris	1,6	-1,3	-1,6	-2,5	-3,2	-3,5
Kanada	1,7	1,2	2,3	2,0	1,6	1,8
Negara Berkembang						
Afrika	-1,4	-0,3	0,1	2,0	3,1	-
Amerika Latin	-0,9	0,4	1,0	1,4	1,5	0,6
Asia	2,4	2,8	2,6	4,1	5,9	6,9
China	2,4	2,8	3,6	7,2	9,4	11,7
Indonesia	4,0	3,5	0,6	0,1	2,7	1,6
Malaysia	8,4	12,7	12,6	15,3	17,2	14,4
Thailand	3,7	3,4	1,7	-4,5	1,6	3,7
Filipina	-0,5	0,4	1,9	2,0	4,3	3,8
Vietnam	-1,9	-4,9	-3,4	-0,9	-0,3	-3,2
Eropa Tengah dan Timur	-3,5	-4,5	-5,9	-5,2	-6,6	-7,3
CIS ¹⁾	6,5	6,3	8,2	8,8	7,6	4,8
Rusia	8,4	8,2	10,1	11,1	9,7	5,9
Timur Tengah	4,8	8,3	11,7	19,4	19,7	16,7

Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2007

1) Commonwealth of Independent States.

* Angka sementara

Daftar Singkatan

ABCP	Asset Backed Commercial Paper	BPS	Badan Pusat Statistik
ABR	ASEAN Baseline Report	BSA	Bilateral Swap Arrangement
ABS	Asset Backed Securities	Bulog	Badan Urusan Logistik
AC	Air Conditioner	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
AKAP	Antar Kota Antar Provinsi	BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	C&F	Carriage and Freight
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CAR	Capital Adequacy Ratio
APBN - P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan	CDO	Collateralized Debt Obligation
API	Arsitektur Perbankan Indonesia	CGI	Consultative Group on Indonesia
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	CIP	Covered Interest Rate Parity
ARM	Adjustable Rate Mortgage	CLMV	Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam
AS	Amerika Serikat	CMI	Chiang Mai Initiative
ASDP	Angkutan Sungai dan Pengairan	CP SIPS	Core Principal on Systemically Important Payment System
ASEAN	Association of South-East Asian Nations	CPI	Consumer Price Index
ASKI	Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia	CPO	Crude Palm Oil
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	CSR	Corporate Social Responsibility
ATMR	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	DAK	Dana Alokasi Khusus
BBM	Bahan Bakar Minyak	DAU	Dana Alokasi Umum
BDSP	Business Development Service Provider	DBH	Dana Bagi Hasil
BEC	Broad Economic Indicators	DHN	Daftar Hitam Nasional
BEI	Bursa Efek Indonesia	DIBI	Data Informasi Bisnis Indonesia
BEJ	Bursa Efek Jakarta	DIRE KIK	Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
BES	Bursa Efek Surabaya	DKI	Daerah Khusus Ibukota
BG	Bilyet Giro	DOKP	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
BI	Bank Indonesia	DPK	Dana Pihak Ketiga
BI - CAC	Bank Indonesia - Counterfeit Analysis Center	DSR	Debt to Service Ratio
BI - SSSS	Bank Indonesia - Scriptless Security Settlement System	ECB	European Central Bank
BIG - eB	Bank Indonesia Government - Electronic Banking	EMBIG	Emerging Market Bond Index Global
BI-RTGS	Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement	EMEAP	Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks
BIS	Bank for International Settlement	EWS	Early Warning System
BKB	Bank Kinerja Baik	FASBI O/N	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Overnight
BKM	Beasiswa Khusus Murid	FDI	Foreign Direct Investment
BKPM	Badan Koordinator Penanaman Modal	FDR	Financing to Deposit Ratio
BM	Bea Masuk	FED	Federal Reserve
BMT	Baitul Maal wa Tamwil	FES	Festival Ekonomi Syariah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	FGD	Focus Group Discussion
BOTASUPAL	Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu	FKSPN	Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah	FOMC	Federal Open Market Committee
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional	FSAP	Financial Sector Assessment Program
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	FSSK	Forum Stabilitas Sistem Keuangan
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah		

FTO	Fine Tune Operation	MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
FtS	Failure to Settle	MFSC	Monetary Financial Stability Committee
FTZ - BBK	Free Trade Zone - Batam Bintan Karimun	MICE	Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition
GCG	Good Corporate Governance	MKM	Mikro, Kecil, dan Menengah
GKG	Gabah Kering Giling	MOD	Major Operational Disruption
GRA	General Resource Account	MRA	Mutual Recognition Arrangement
GWM	Giro Wajib Minimum	MTS	Medium Term Strategy
HET	Harga Eceran Tertinggi	NAB	Nilai Aktiva Bersih
HJE	Harga Jual Eceran	NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	NFA	Net Foreign Assets
IAS	International Accounting Standard	NII	Net Interest Income
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process	NNS	New Neoclassical Synthesis
ICOR	Incremental Capital Output Ratio	NPF	Non-Performing Financing
ICP	Indonesia Crude Price	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
IHK	Indeks Harga Konsumen	NPL	Non-Performing Loan
IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar	NTP	Nilai Tukar Petani
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	NTT	Nusa Tenggara Timur
IJ-EPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
IMF	International Monetary Fund	OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries
Inpres	Instruksi Presiden	OPT	Operasi Pasar Terbuka
IOSCO	International Organisation of Securities Commission	ORI	Obligasi Negara Ritel
IPO	Initial Public Offering	PAM	Perusahaan Air Minum
ITF	Inflation Targeting Framework	PDB	Produk Domestik Bruto
JCRA	Japan Credit Rating Agency	Pemilu	Pemilihan Umum
KBI	Kantor Bank Indonesia	PER	Price Earning Ratio
KK	Kredit Konsumsi	Perda	Peraturan Daerah
KKBI	Kantor Koordinator Bank Indonesia	Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
KKMB	Konsultan Keuangan Mitra Bank	PMA	Penanaman Modal Asing
KMK	Kredit Modal Kerja	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
KPEI	Kliring Penjaminan Efek Indonesia	PMN	Penyertaan Modal Negara
KPPN	Kantor Pusat Perbendaharaan Negara	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
KUR	Kredit Usaha Rakyat	PNS	Pegawai Negeri Sipil
LDR	Loan to Deposit Ratio	PPA	Perusahaan Pengelola Aset
LIBOR	The London Inter-Bank Offered Rate	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
LNG	Liquefied Natural Gas	PPh	Pajak Penghasilan
LPG	Liquefied Petroleum Gas	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan	PPP	Public Private Partnership
M0	Uang Primer	PRGF-HIPC	Poverty Reduction and Growth Facility-Heavily Indebted Poor Countries
M1	Uang Beredar dalam arti sempit	PSPU	Perbankan Syariah Peduli Umat
M2	Uang Beredar dalam arti luas	PUAB	Pasar Uang Antar Bank
MDGs	Millenium Development Goals		
MDRI	Multilateral Debt Relief Initiative		

PVP	Payment Versus Payment	SPN	Surat Perbendaharaan Negara
PYD	Pembayaran Yang Disalurkan	SPP	Survei Persepsi Pasar
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	SREP	Supervisory Review Evaluation and Process
RAPBN-P	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan	SRO	Self Regulatory Organization
RBC	Real Business Cycle	SUN	Surat Utang Negara
RCA	Revealed Comparative Advantage	SWBI	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
RDG	Rapat Dewan Gubernur	TDL	Tarif Dasar Listrik
ROA	Return on Asset	TFP	Total Factor Productivity
ROE	Return on Equity	TKA	Tenaga Kerja Asing
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RRH	Rata-rata Harian	T-Notes	Treasury Notes
RTGS	Real Time Gross Settlement	TPI	Tim Pengendalian Inflasi
RTM	Rumah Tangga Miskin	TPID	Tim Pengendalian Inflasi di Daerah
SBI	Sertifikat Bank Indonesia	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
SBN	Surat Berharga Negara	TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara	TSA	Treasury Single Account
SD	Sekolah Dasar	UIP	Uncovered Interest Rate Parity
SDA	Sumber Daya Alam	UK	Uang Kertas
SDM	Sumber Daya Manusia	ULN	Utang Luar Negeri
SIPS	Sistemically Important Payment System	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
SIPUK	Sistem Informasi Pola Usaha Kecil	UMP	Upah Minimum Provinsi
SITC	Standard International Trade Classification	UU	Undang-Undang
SK	Survei Konsumen	UUPM	Undang-Undang Pasar Modal
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha	UUS	Unit Usaha Syariah
SKN	Sistem Kliring Nasional	UYD	Uang Yang Diedarkan
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	VaR	Value at Risk
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	VOA	Visa on Arrival
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	WEO	World Economic Outlook
SMP	Sekolah Menengah Pertama	WTI	West Texas Intermediate
SPE	Survei Penjualan Eceran	YoY	Year on Year
		YtD	Year to Date
		ZISWaf	Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf

Laporan Perekonomian Indonesia 2007

Komite Pengarah: Made Sukada, Hendar, Wijoyo Santoso, Sugeng; **Penanggungjawab:** Suhaedi; **Koordinator:** Decymus;
Wakil Koordinator: Clarita Ligaya Iskandar, Pribadi Santoso; **Penulis/Kontributor:** Ali Sakti, Aulia Fadly, Ayu Rulita Dewi, Azhari Firmansyah, Beny Okta Tutuarima, Bimo Epyanto, Darmansjah M.P., Diah Esti Handayani, Diana Permatasari, Erwindo Kolopaking, Fenty Tri Suryani, Hery Indratno, Heri Ispriyahadi, Hidayah Dhini Ari, Himawan K., Ibrahim, I.G.P. Wira Kusuma, Irfan Farulian, Iwan Chandra, Juli Budi Winantya, Junanto Herdiawan, Kiki Nindya Asih, Kusuma Ayu Kinanti, Leslie Djuranovik, M.A. Majid Ikram, M. Cahyaningtyas, M. Noor Nugroho, Mirza Afifa, Naek T. Sinaga, Ndari Surjaningsih, Nugroho Joko Prastowo, Ricky Satria, Rosita Dewi, Rudy B. Hutabarat, Susiati Dewi W.

Bank Indonesia

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM)
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Email: BKM_TOD@bi.go.id



Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - Indonesia

www.bi.go.id



Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri

Laporan Perekonomian Indonesia **2007**